



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 315.K/30/DJB/2018
TENTANG PROSES BISNIS
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 315.K/30/DJB/2018

TENTANG

PROSES BISNIS

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013, tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan

Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3940 K/08/MEM/2017 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROSES BISNIS DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang terdiri atas:

- a. Bisnis Proses Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Bisnis Proses Sekretariat Jenderal Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Bisnis Proses Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Bisnis Proses Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Bisnis Proses Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Bisnis Proses Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

g. Bisnis Proses Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pemilik Proses dari Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan proses bisnis untuk mengidentifikasi tindakan pencegahan dan perbaikan; dan
- b. memulai dan memengaruhi perubahan prosedur kerja, waktu penyelesaian, dan hasil kegiatan serta mengendalikan sumber daya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **14 Desember 2018**

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



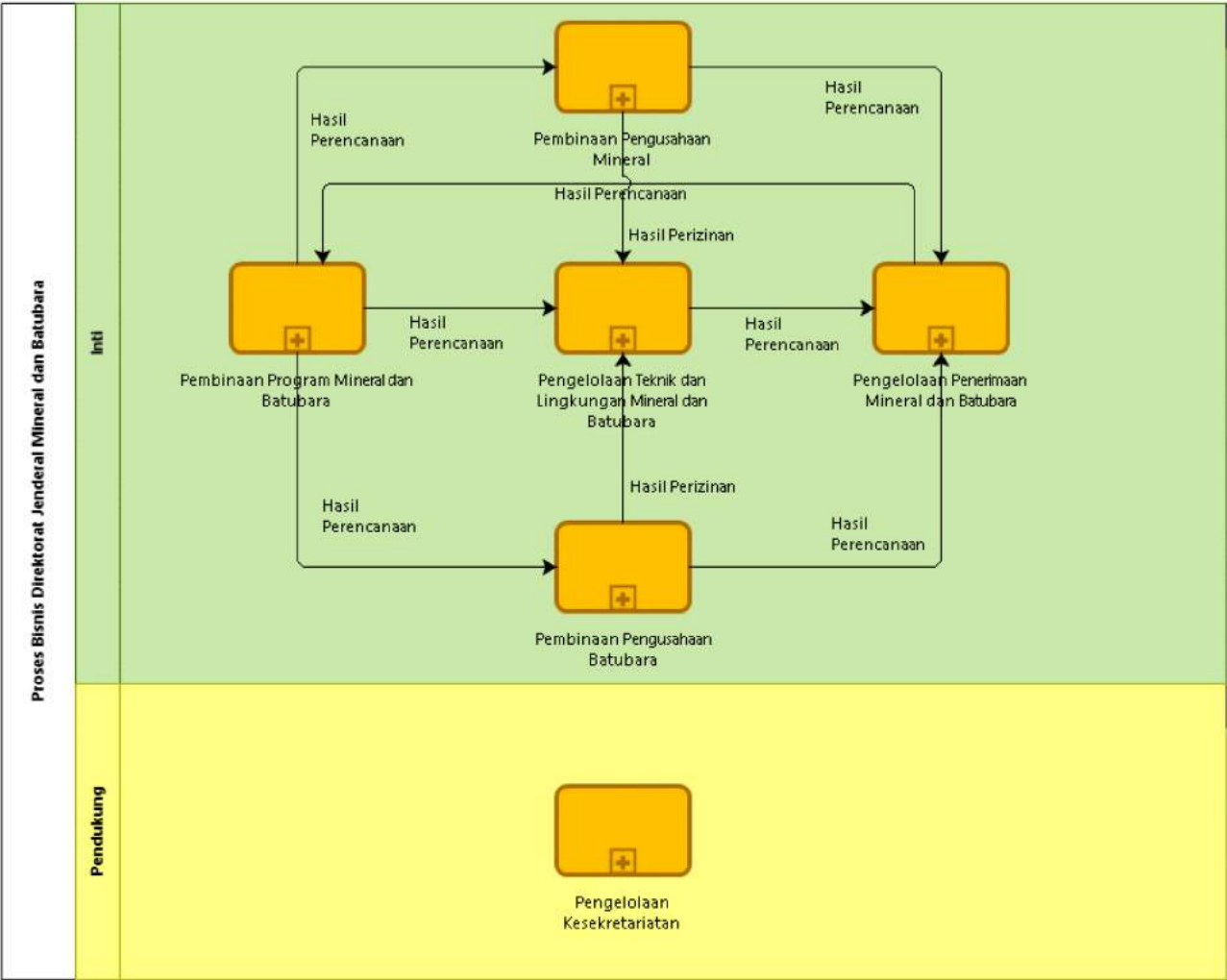
BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 315.K/30/DJB/2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Keterangan Bisnis Proses Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai lima proses bisnis inti dan satu bisnis pendukung, penjelasan proses bisnis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Bisnis proses Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dimulai dari Pembinaan Program mineral dan batubara yang menghasilkan perencanaan program kegiatan dan target capaian yang harus dicapai

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hasil perencanaan tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Pengelolaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

2. Hasil perencanaan proses bisnis akan dilanjutkan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memroses izin-izin terkait pemanfaatan Mineral dan Batubara berdasarkan kebijakan yang berlaku.
3. Hasil perencanaan dan perizinan akan dilanjutkan dengan proses penghitungan, pengawasan, serta penagihan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.
4. Pengelolaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara adalah pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
5. Pengelola kesekretariatan menjalankan bisnis sebagai unit pendukung yang menunjang semua unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

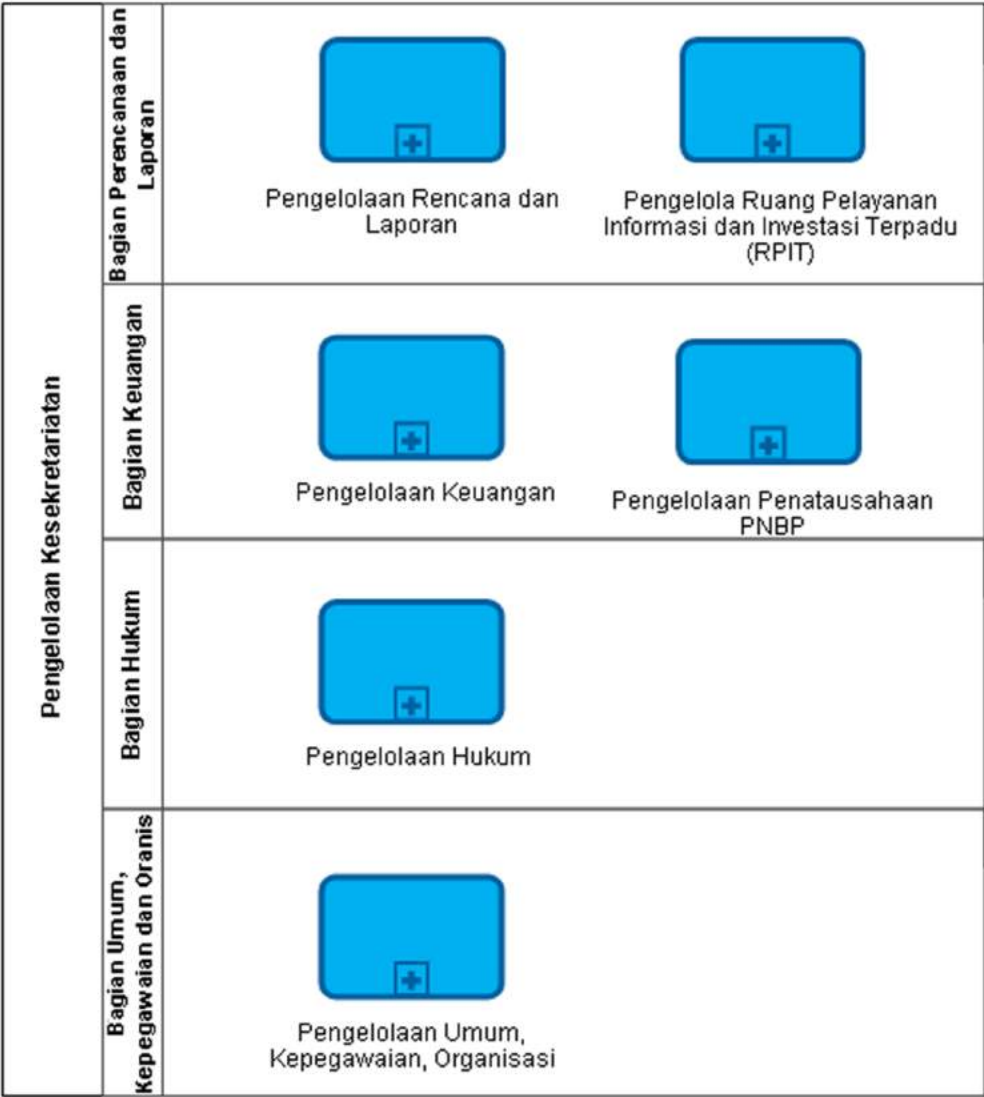
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 315.K/30/DJB/2018
 TANGGAL : 14 Desember 2018

BISNIS PROSES SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL
 DAN BATUBARA



Pengelola kesekretariatan, Sekretaris Direktorat Mineral dan Batubara memiliki empat bisnis utama yaitu pengelolaan perencanaan dan laporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan hukum serta pengelolaan umum, kepegawaian dan organisasi. Dalam menjalankan bisnis sebagai unit pendukung yang menunjang semua unit di lingkungan Ditjen Minerba, yaitu:

1. Pada fungsi pengelolaan rencana dan laporan yaitu Sekretaris Direktorat Minerba mampu berkoordinasi dan menyusun rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, serta pengelolaan

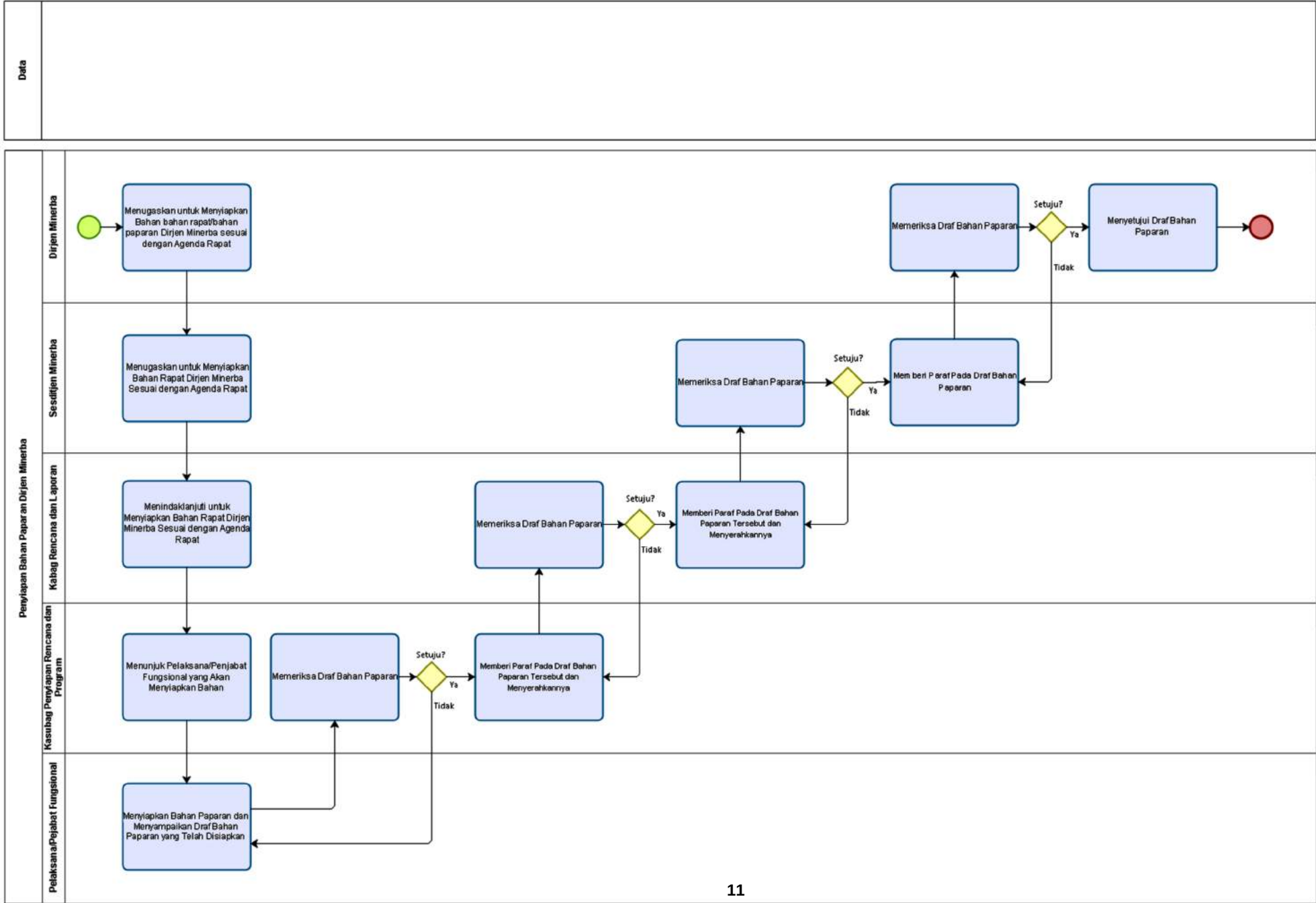
sistem informasi seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba, selain itu mendapat tugas tambahan dalam pengelolaan Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).

2. Pada fungsi pengelolaan keuangan bahwa Sekretaris Direktorat Minerba harus mampu mengelola administrasi perbendaharaan, barang milik negara, pengadaan barang/jasa serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal Minerba.
3. Pada fungsi pengelolaan Bantuan Hukum bahwa Sekretaris Direktorat Minerba harus mampu mengelola, berkoordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat.
4. Pada fungsi pengelolaan Umum, Kepegawaian, dan Organisasi bahwa Sekretaris Direktorat Minerba harus mampu pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

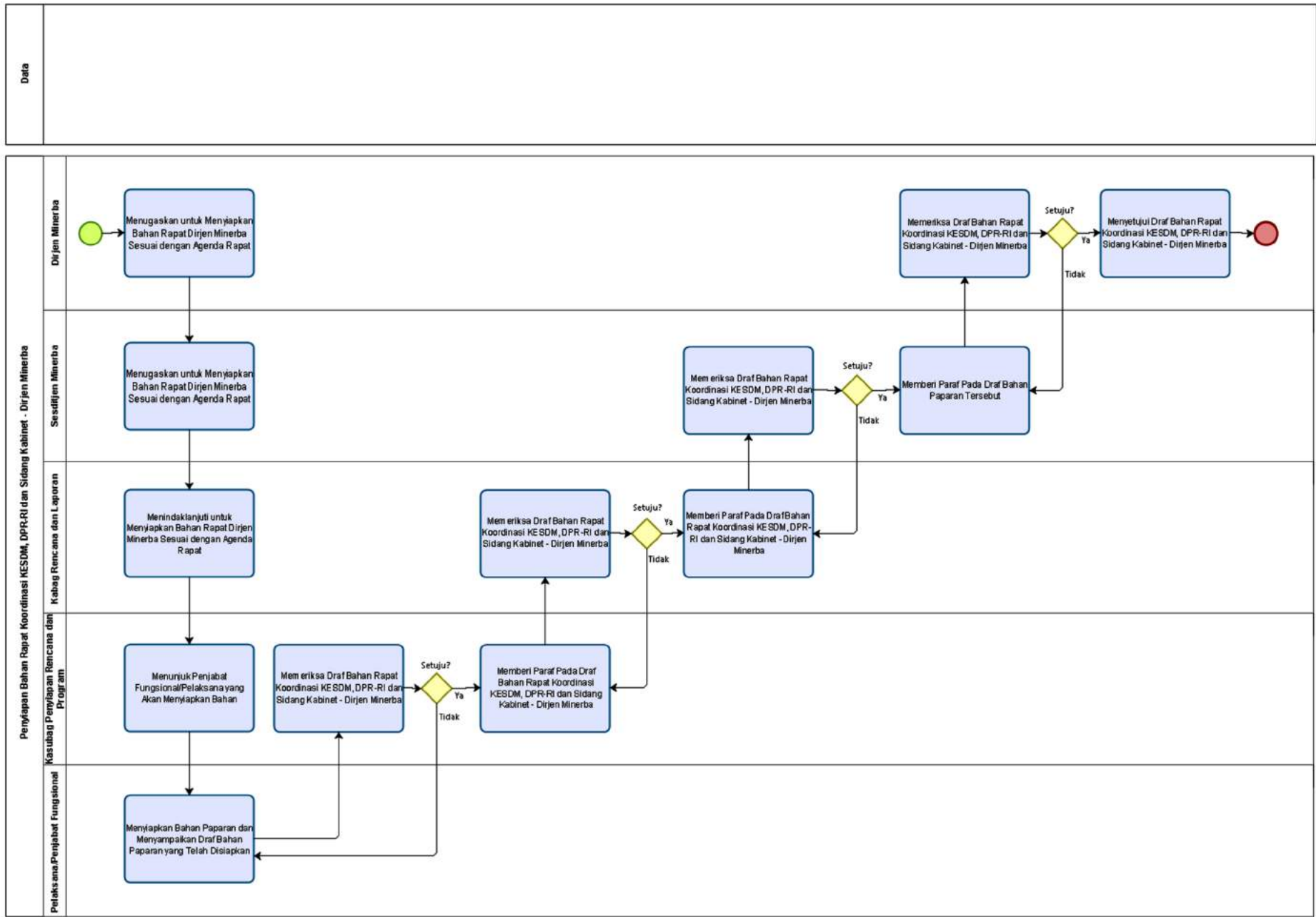
Pengelolaan Rencana dan Laporan

Pengelolaan Rencana dan Laporan	Subbagian Rencana dan Program								
		Penyiapan Bahan Rapat Dirjen Minerba	Penyiapan Dokumen Rapat Koordinasi KESDM, DPR-RI dan Sidang Kabinet	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara				
	Subbagian Pengelolaan Informasi								
		Pelaksanaan Pameran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Pengelolaan Gangguan Jaringan Sistem Informasi	Updating Konten Website	Permintaan Data Berkala	Pengelolaan Data Mineral dan Batubara	Penyampaian Formulir Laporan Extraxtive Industries TRansparency Initiative (EITI)	Penyusunan Buku Mineral dan Batubara	
	Subbagian Evaluasi dan Laporan								
		Penyiapan LAKIN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Penyiapan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Prosedur Penyiapan Laporan Setditjen Minerba pada Aplikasi E-Monev Bappenas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri				

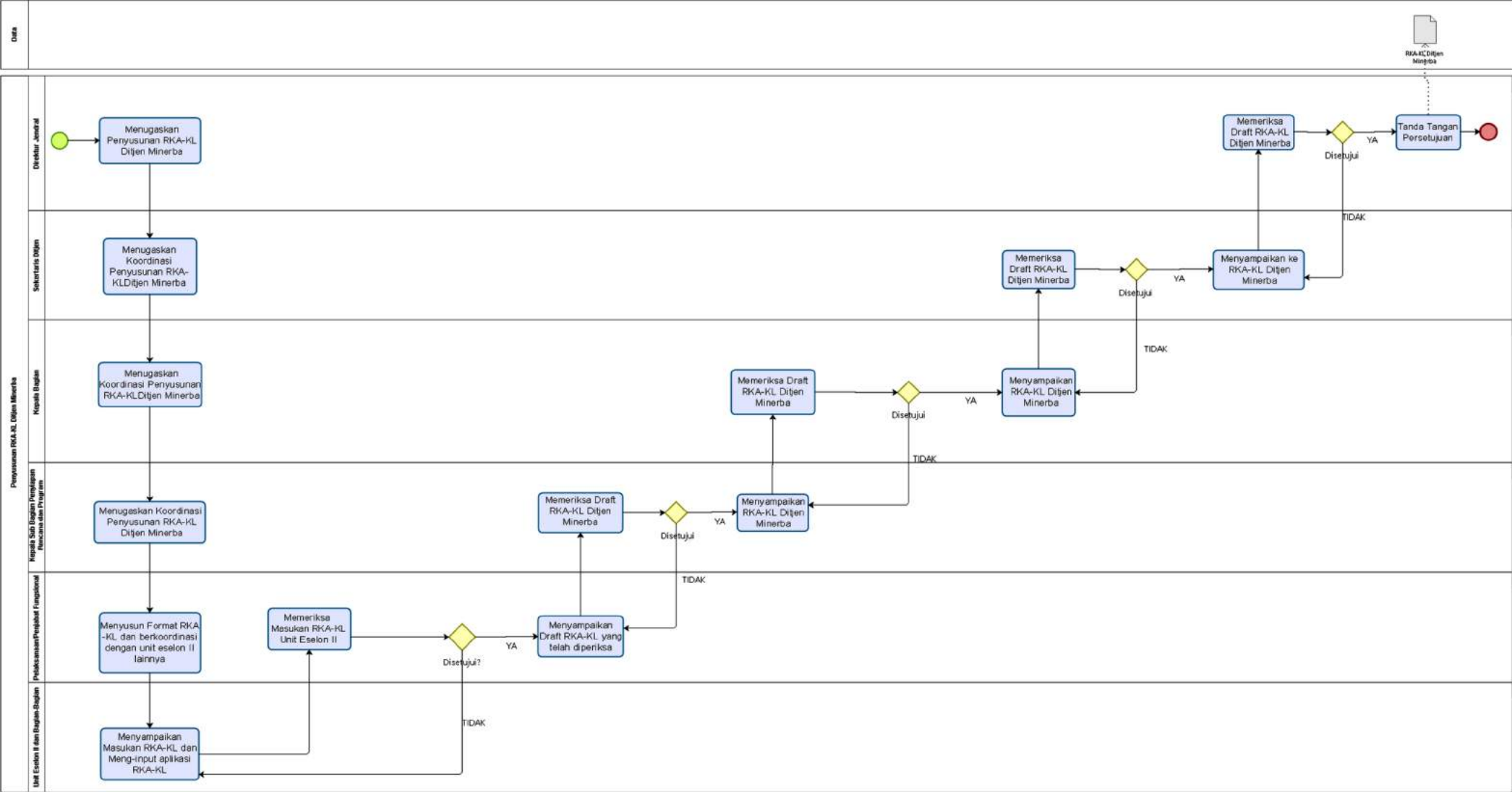
Subbagian Rencana dan Program – Penyiapan Bahan Rapat Dirjen Minerba



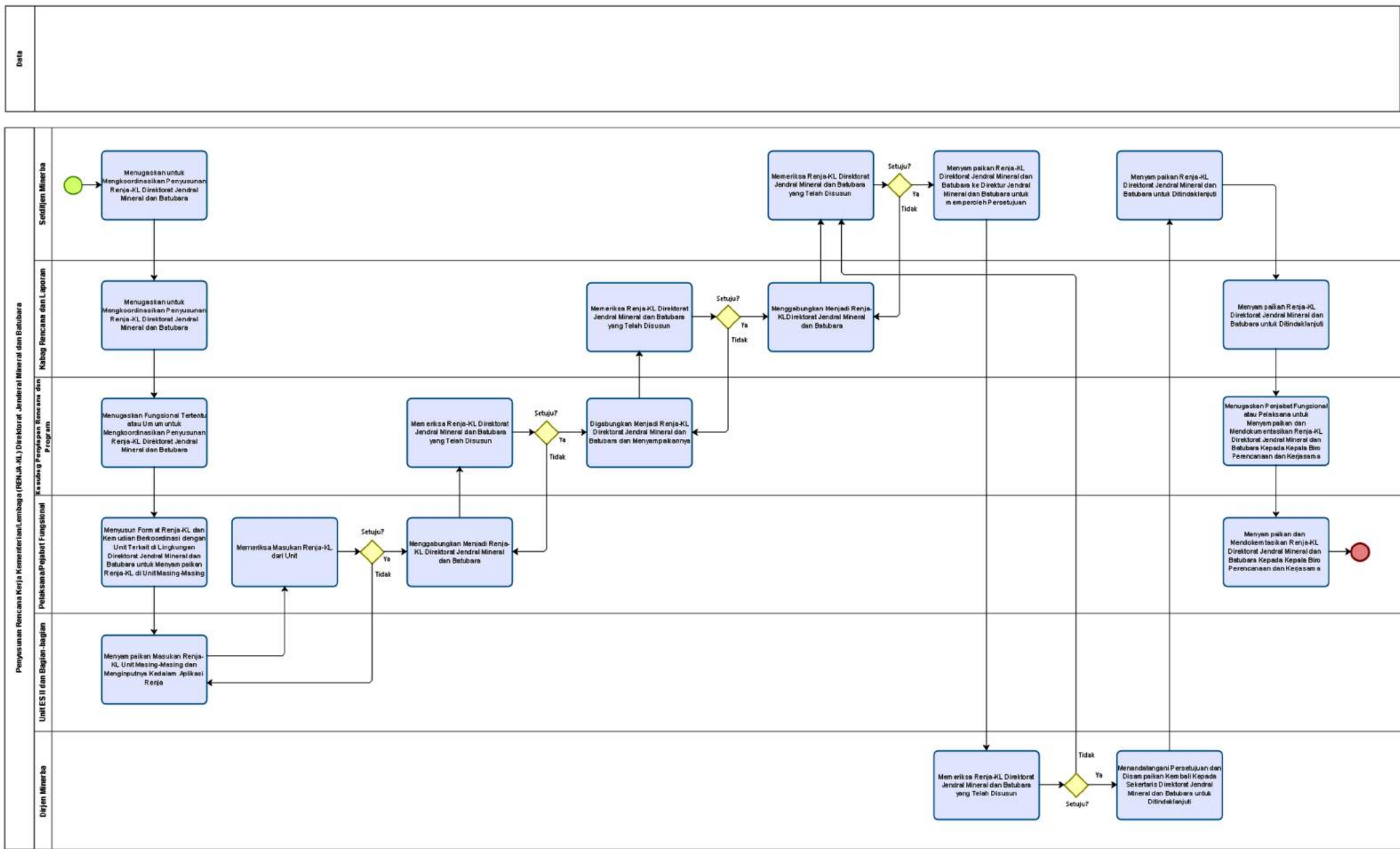
Subbagian Rencana dan Program – Penyiapan Dokumen Rapat Koordinasi KESDM, DPR-RI dan Sidang Kabinet



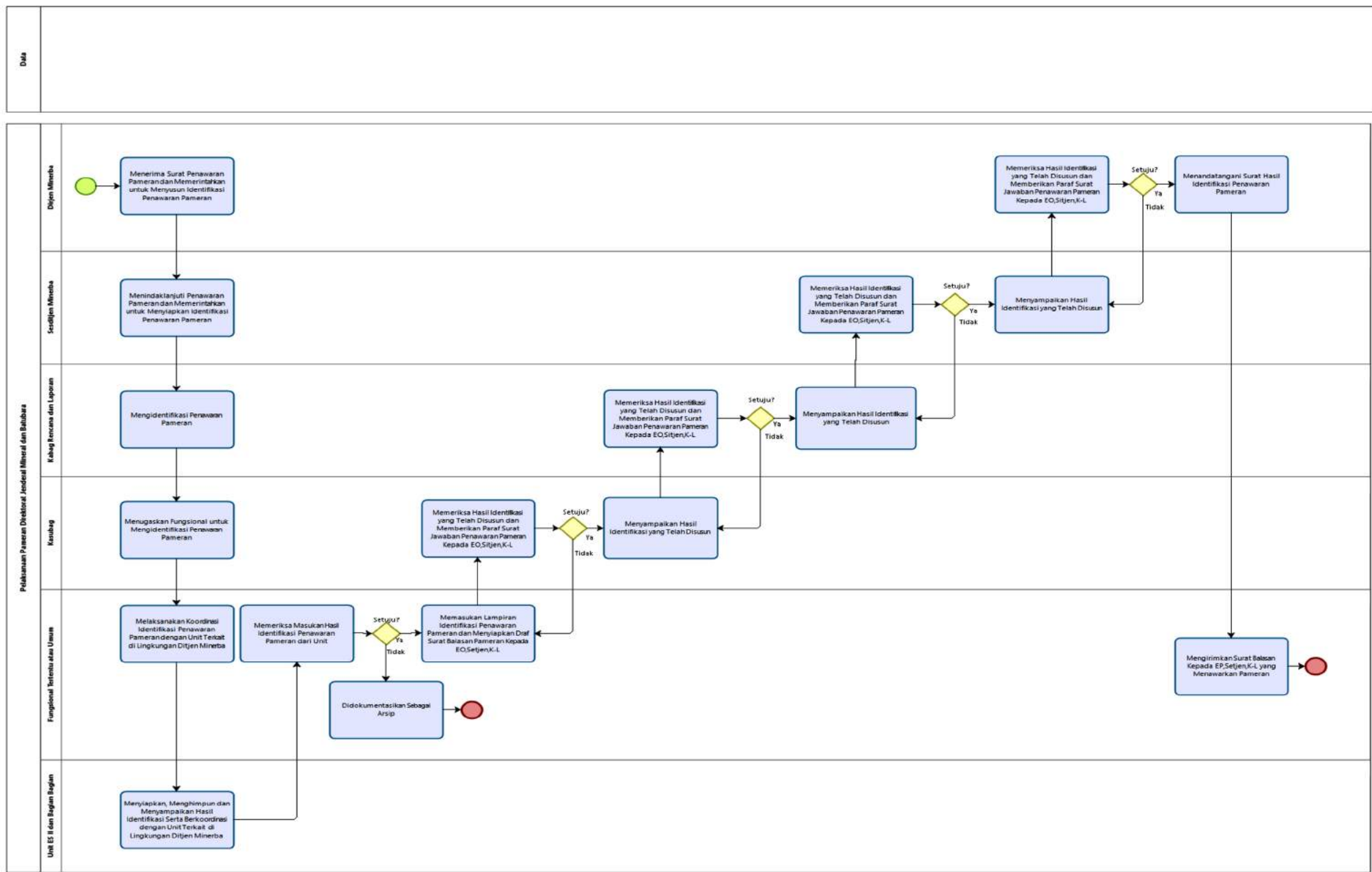
Subbagian Rencana dan Program – Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



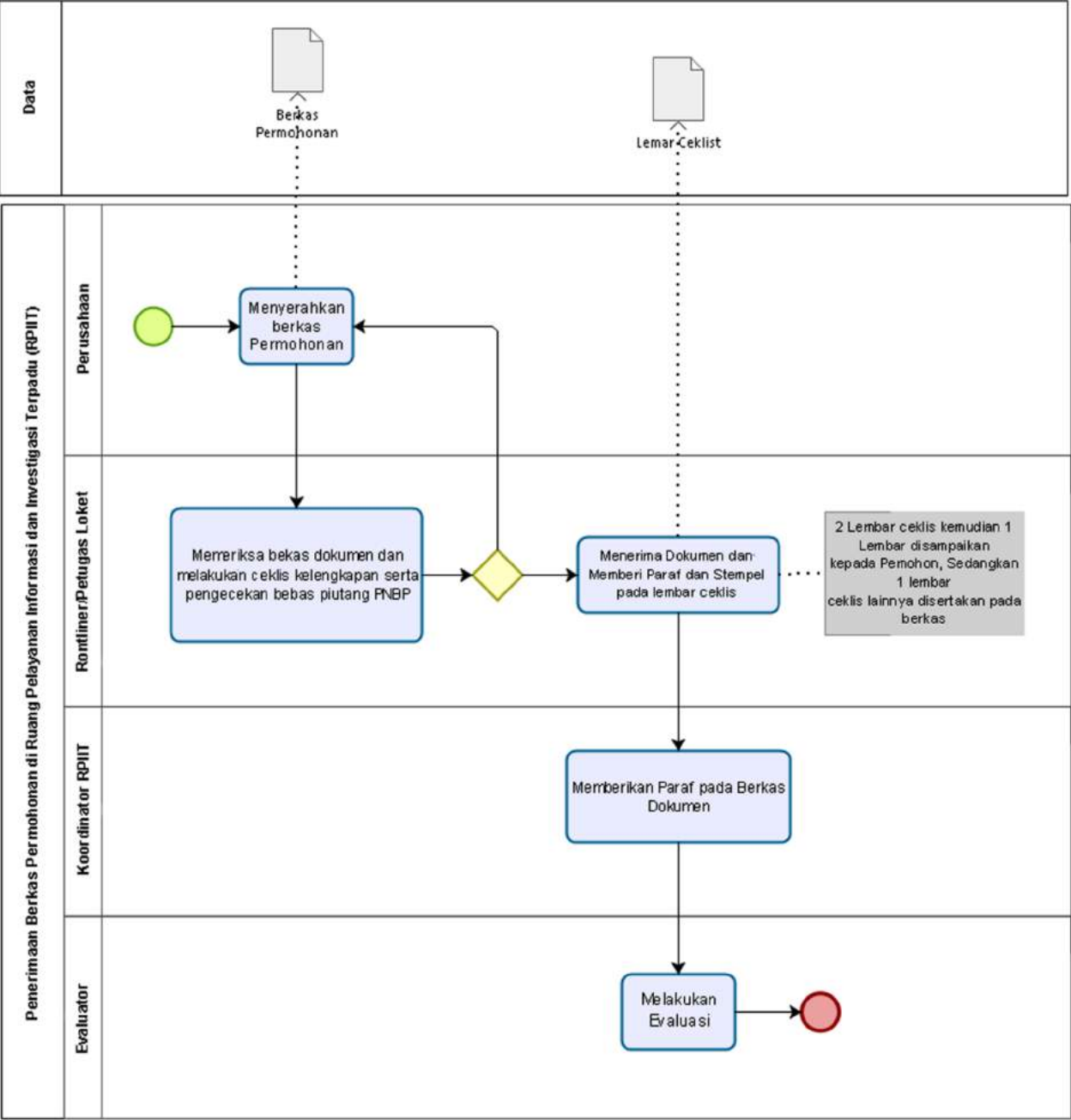
Subbagian Rencana dan Program – Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



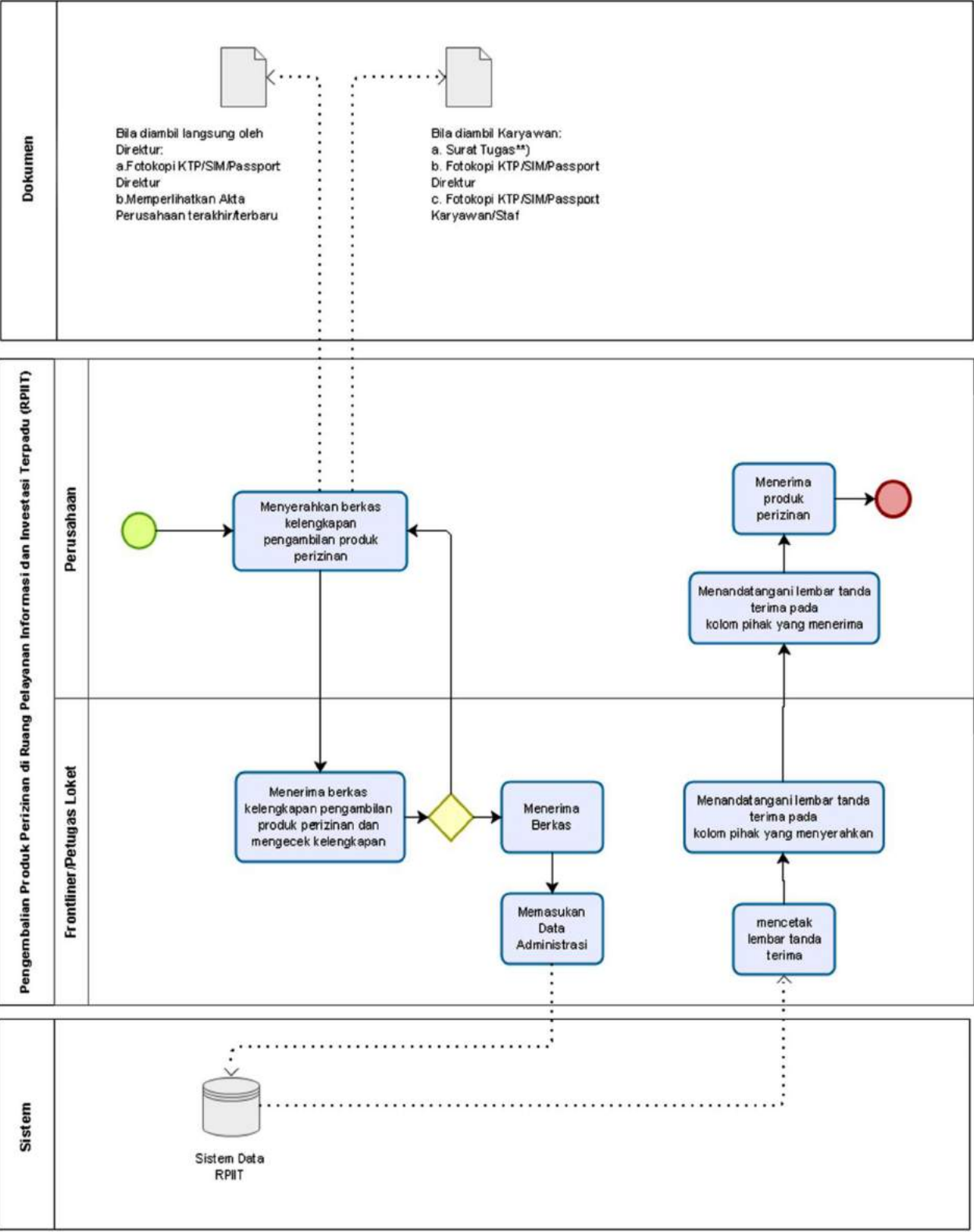
Subbagian Pengelolaan Informasi – Pelaksanaan Pameran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



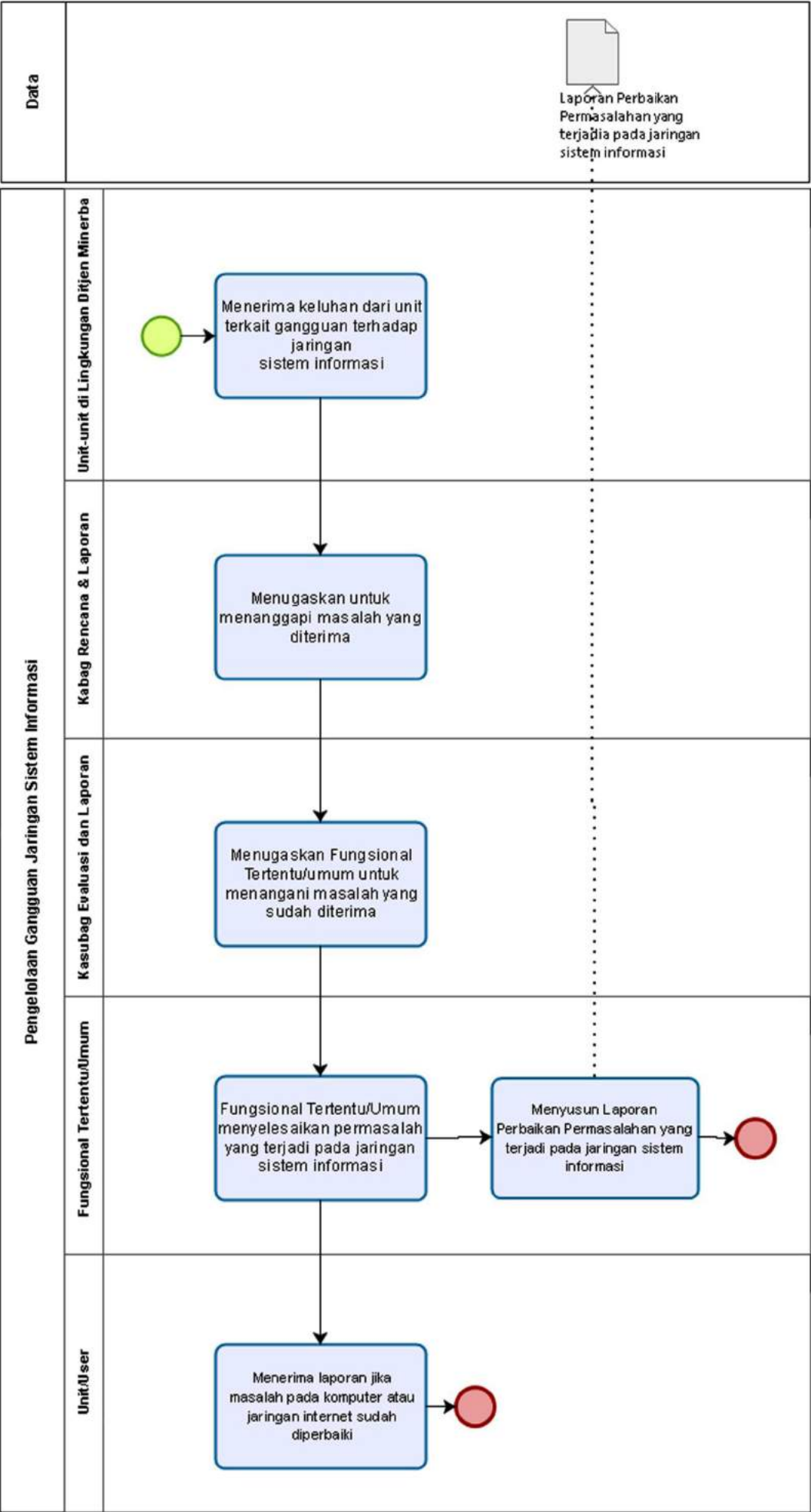
Subbagian Pengelolaan Informasi – Penerimaan Berkas Permohonan di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)



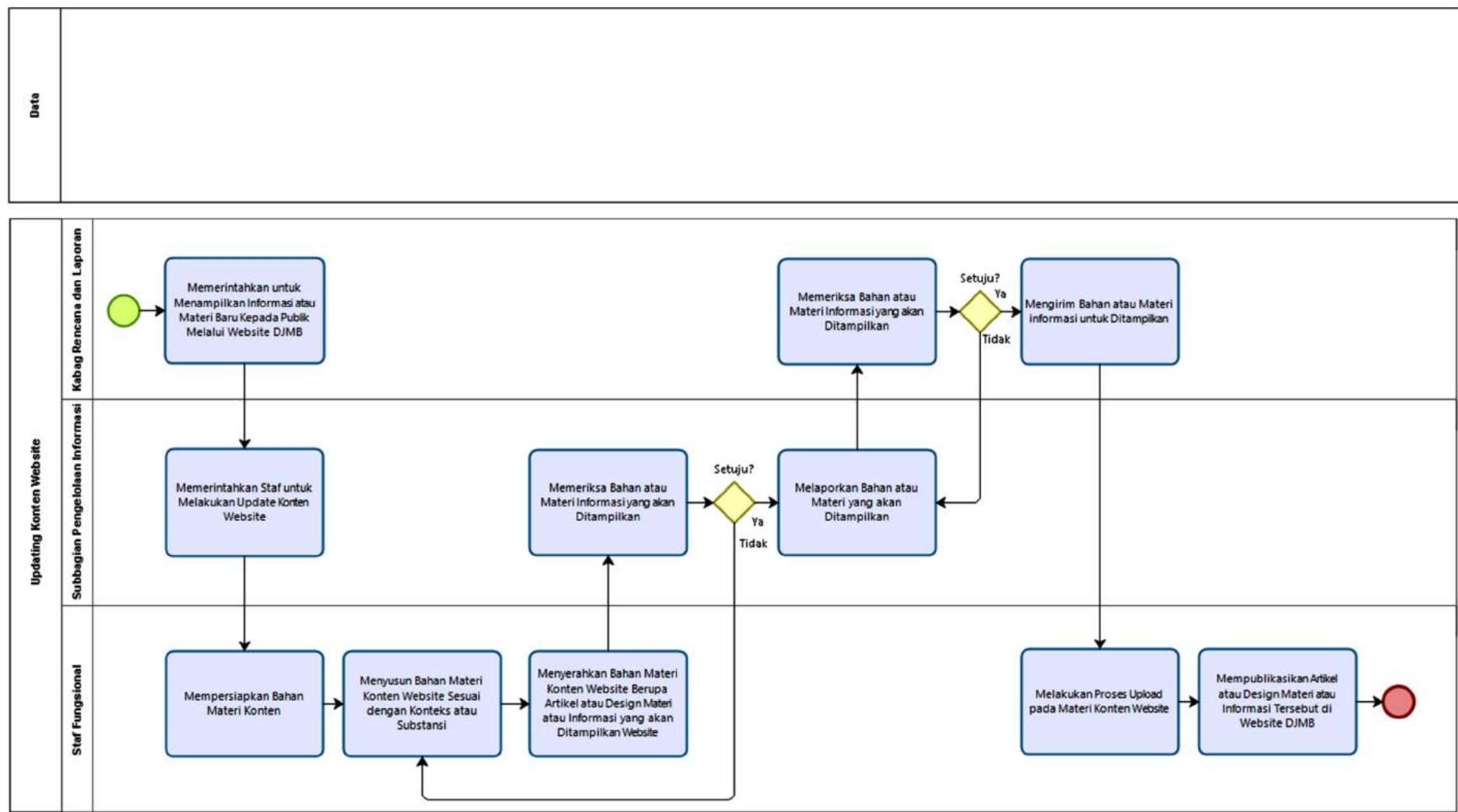
Subbagian Pengelolaan Informasi – Pengambilan Produk Perizinan di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)



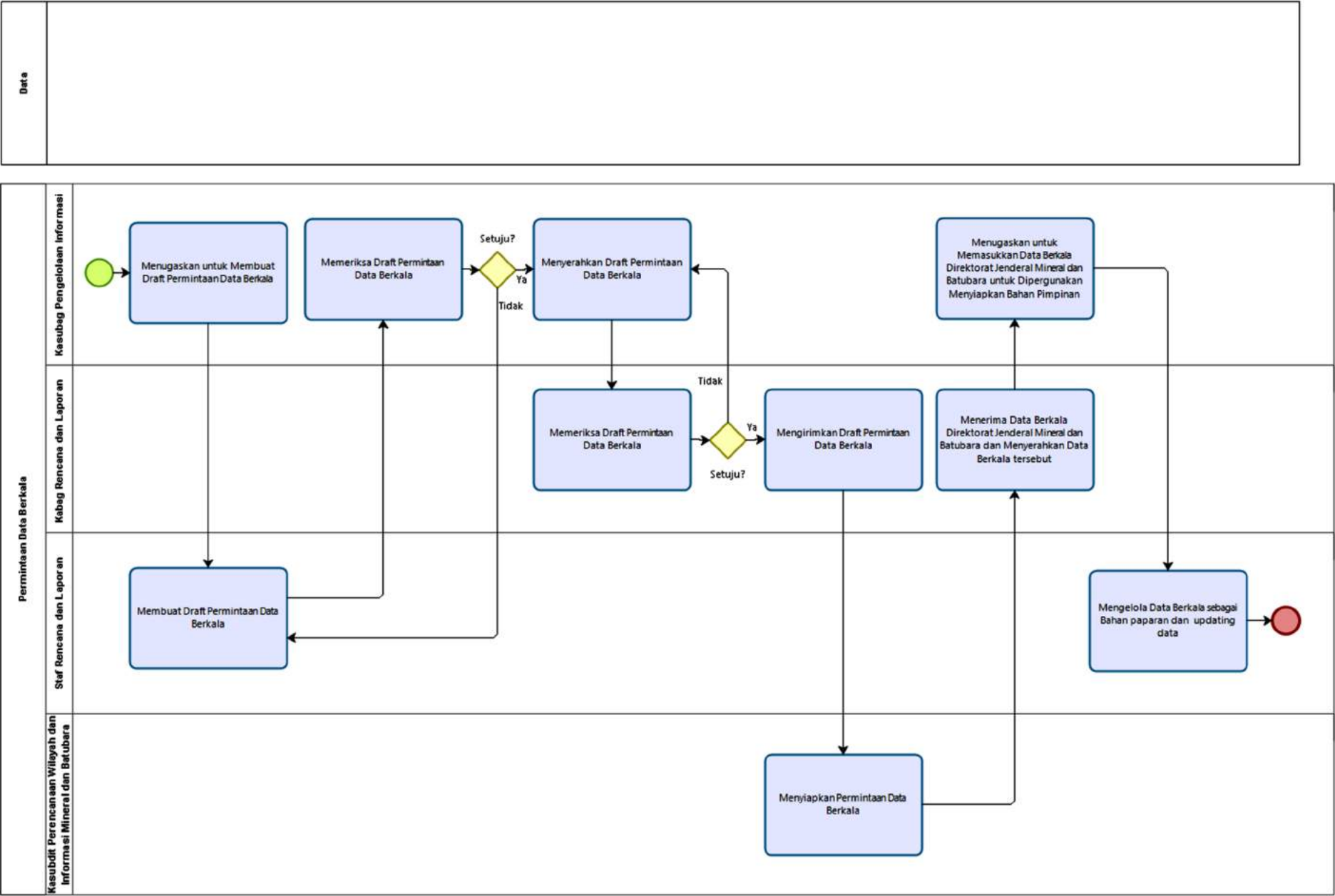
Subbagian Pengelolaan Informasi – Pengelolaan Gangguan Jaringan Sistem Informasi



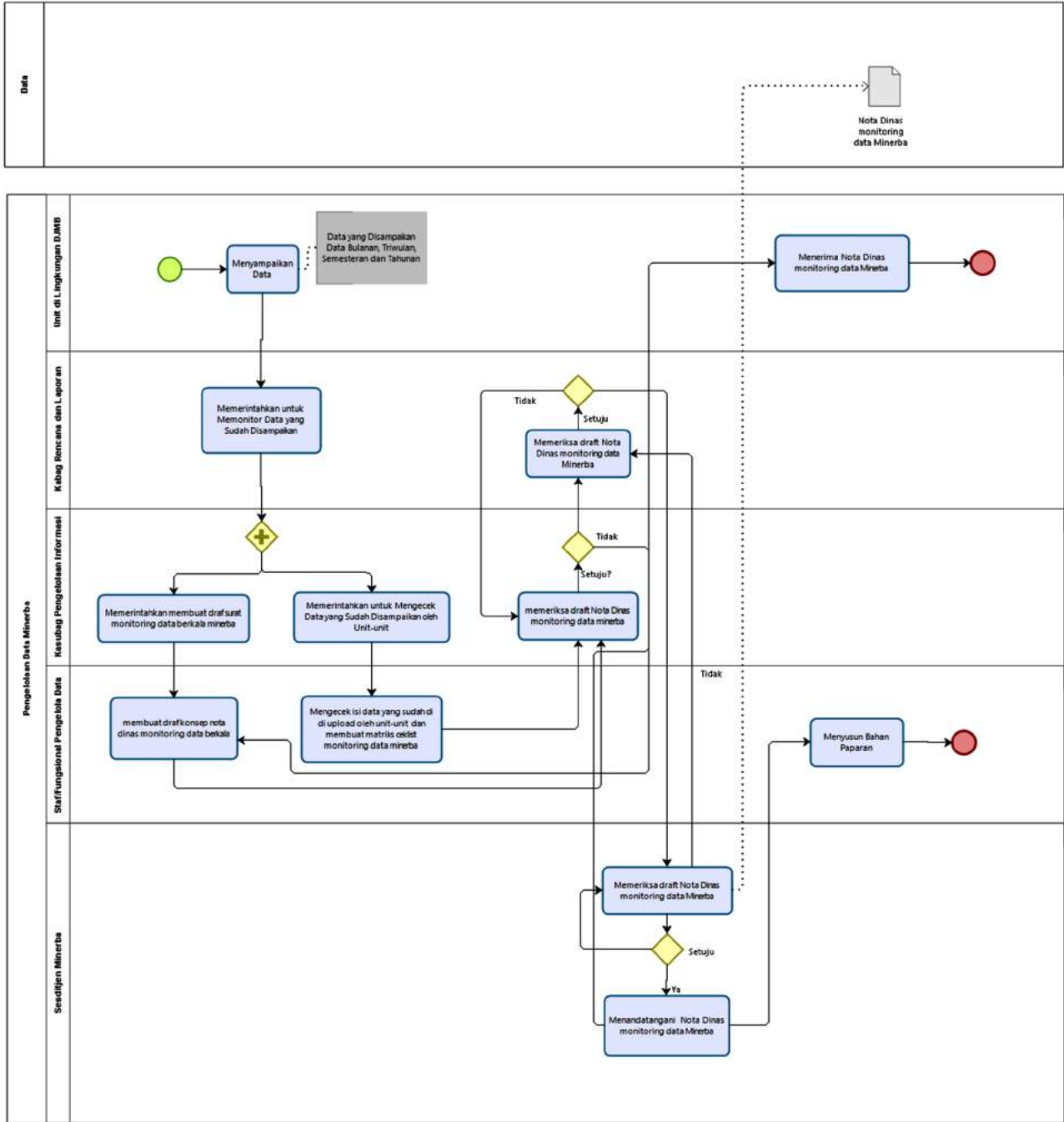
Subbagian Pengelolaan Informasi – Updating Konten Website



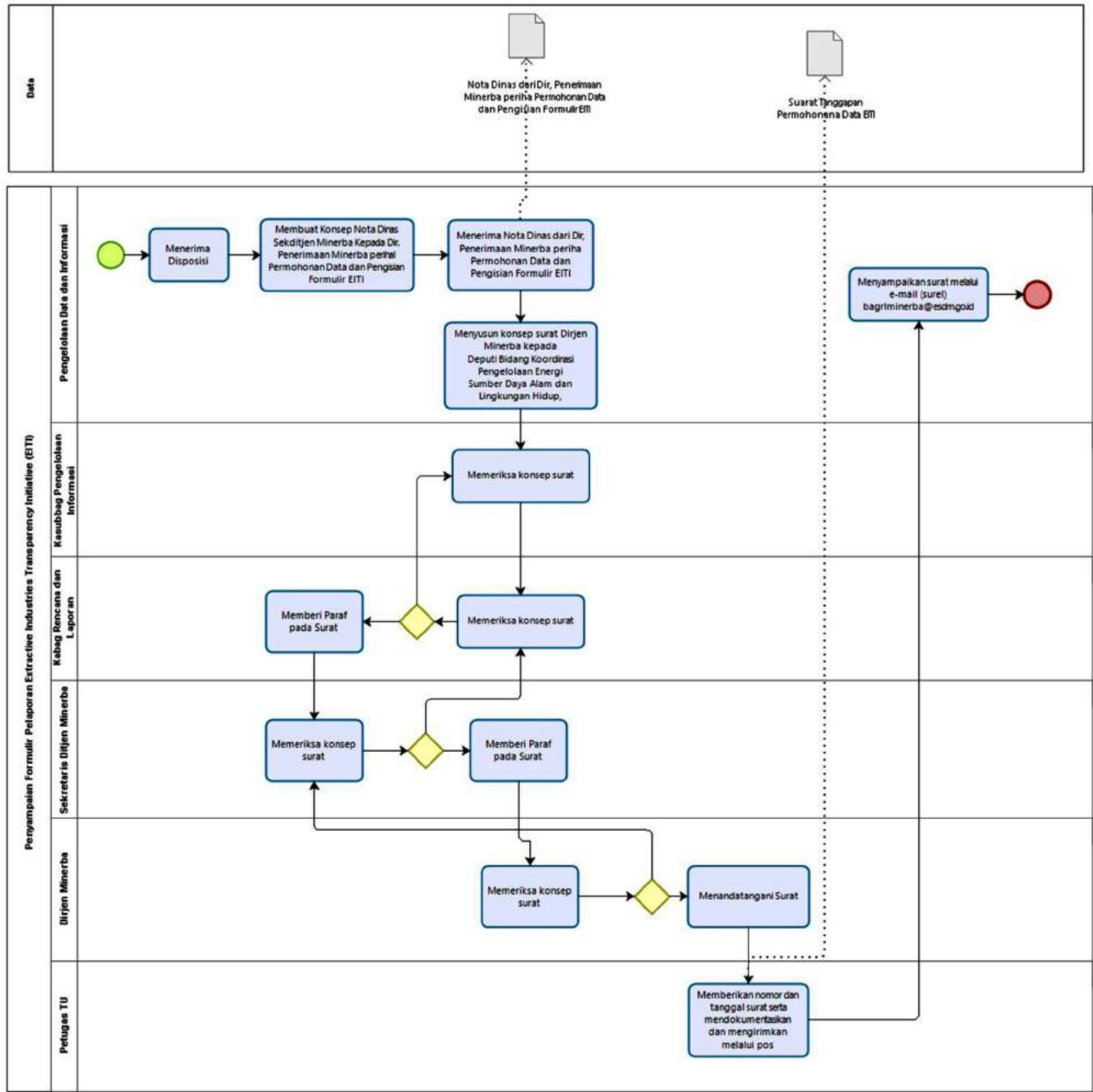
Subbagian Pengelolaan Informasi – Permintaan Data Berkala



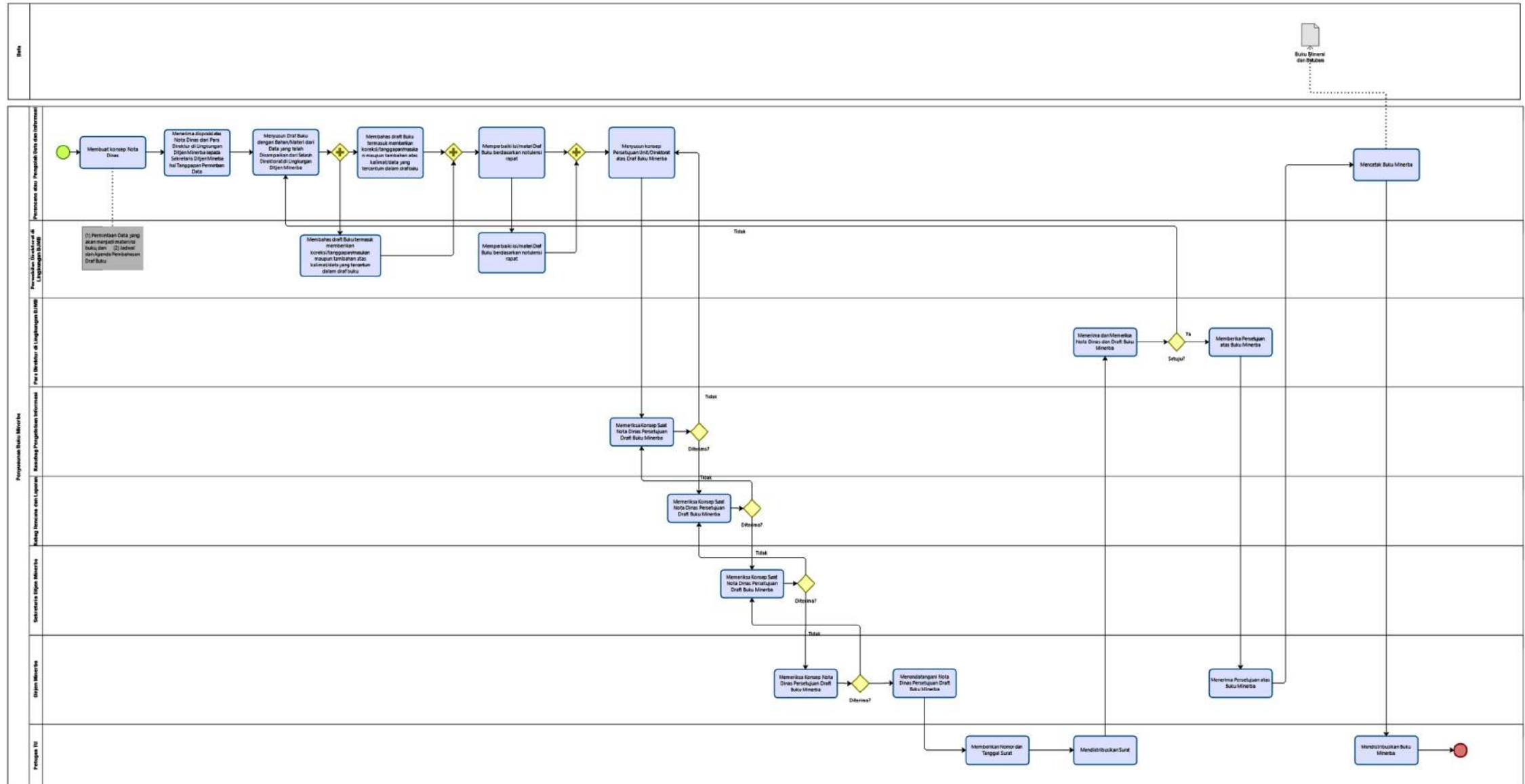
Subbagian Pengelolaan Informasi – Pengelolaan Data Mineral dan Batubara



Subbagian Pengelolaan Informasi – Penyampaian Formulir Laporan Extraxtive Industries Transparency Inisiative (EITI)

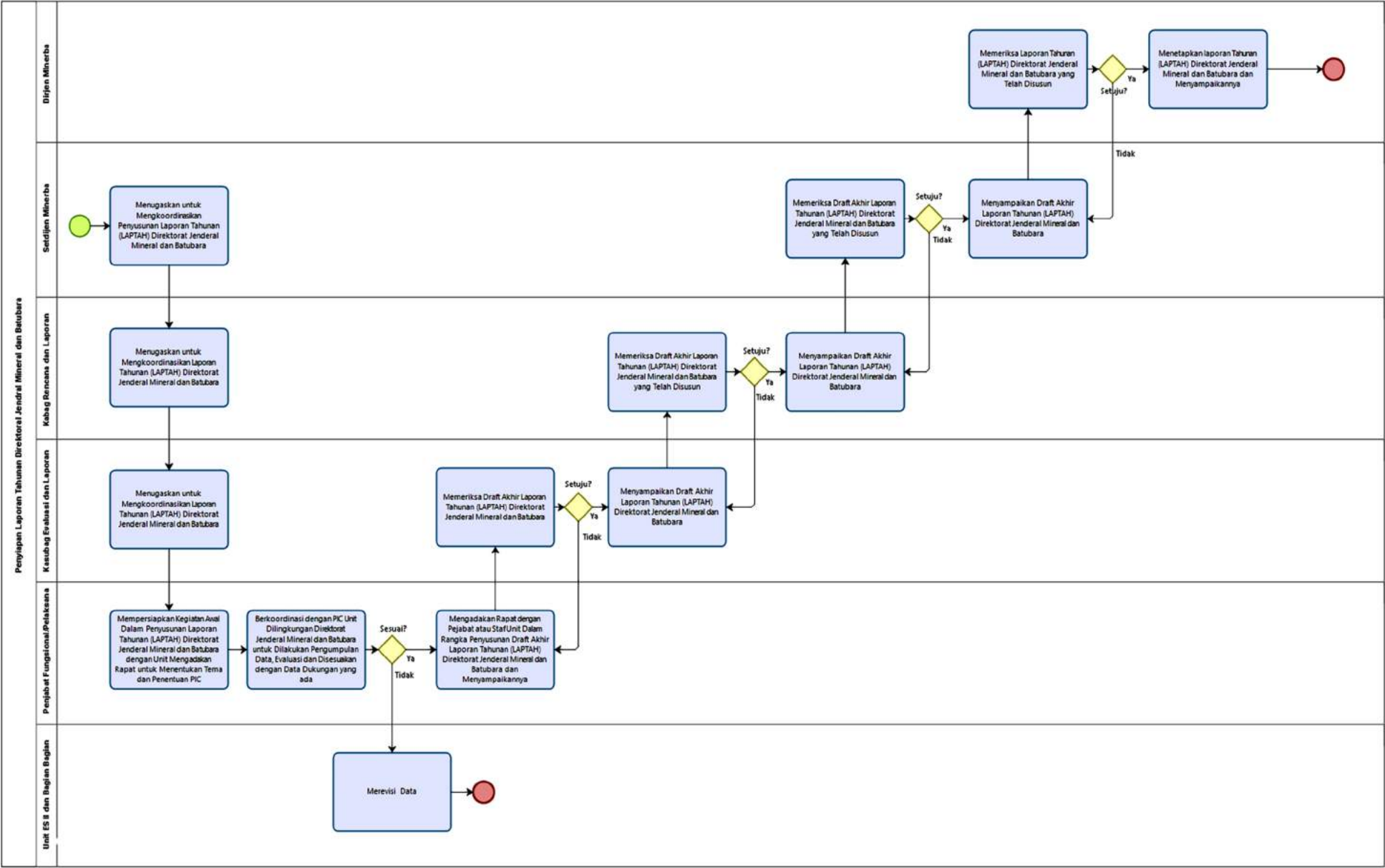


Subbagian Pengelolaan Informasi – Penyusunan Buku Mineral dan Batubara

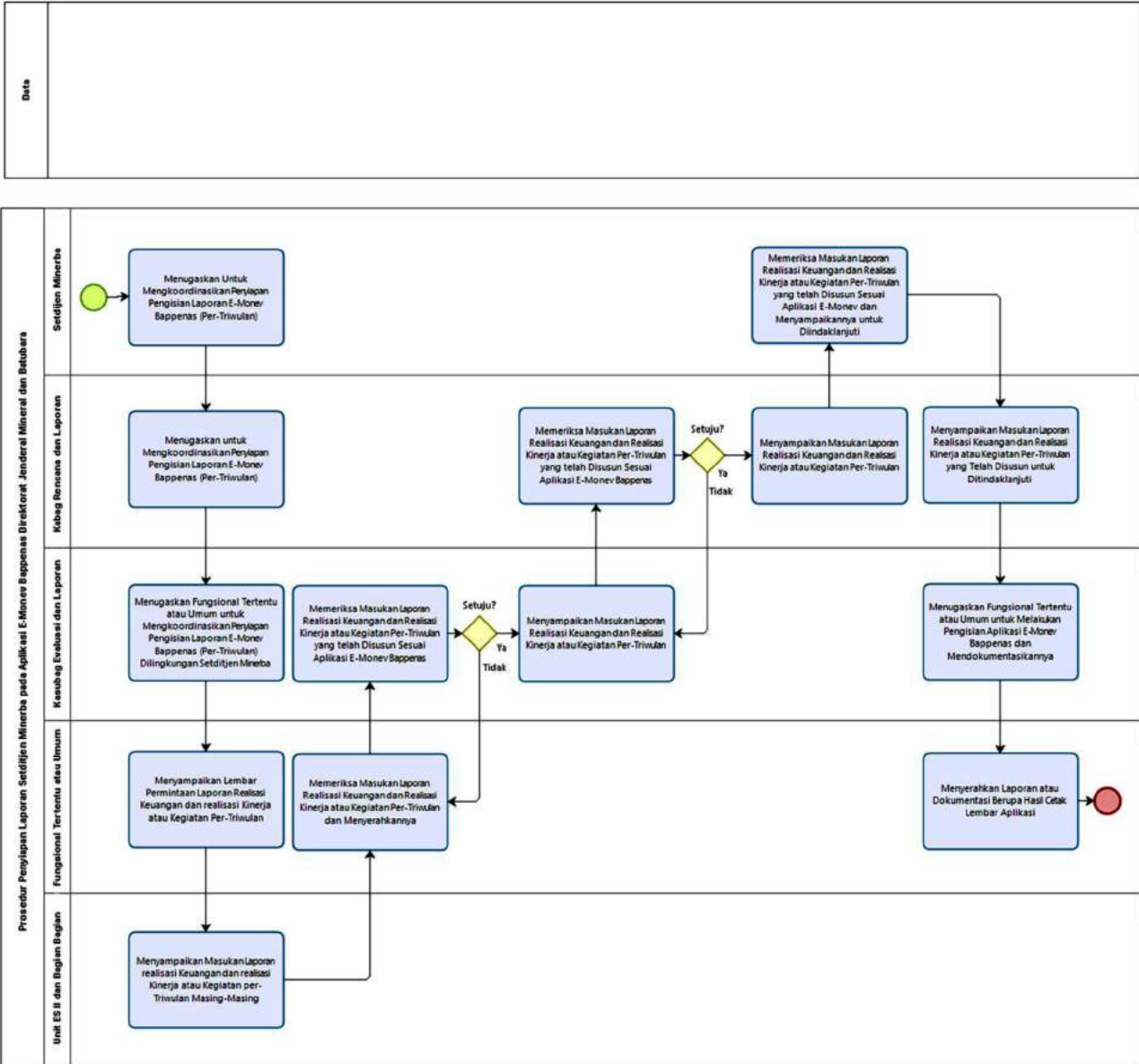


[illegible]

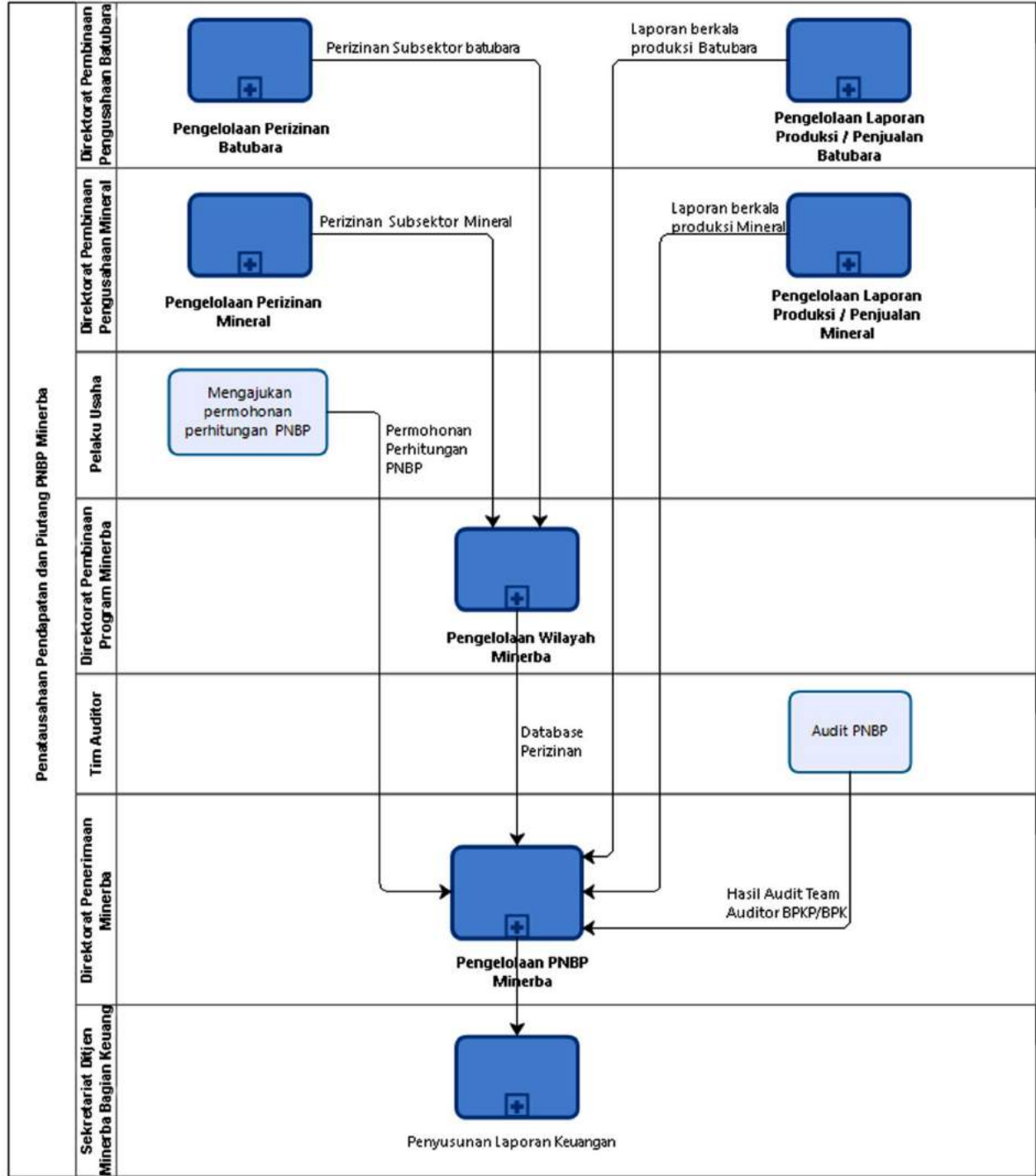
Subbagian Evaluasi dan Laporan – Penyiapan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



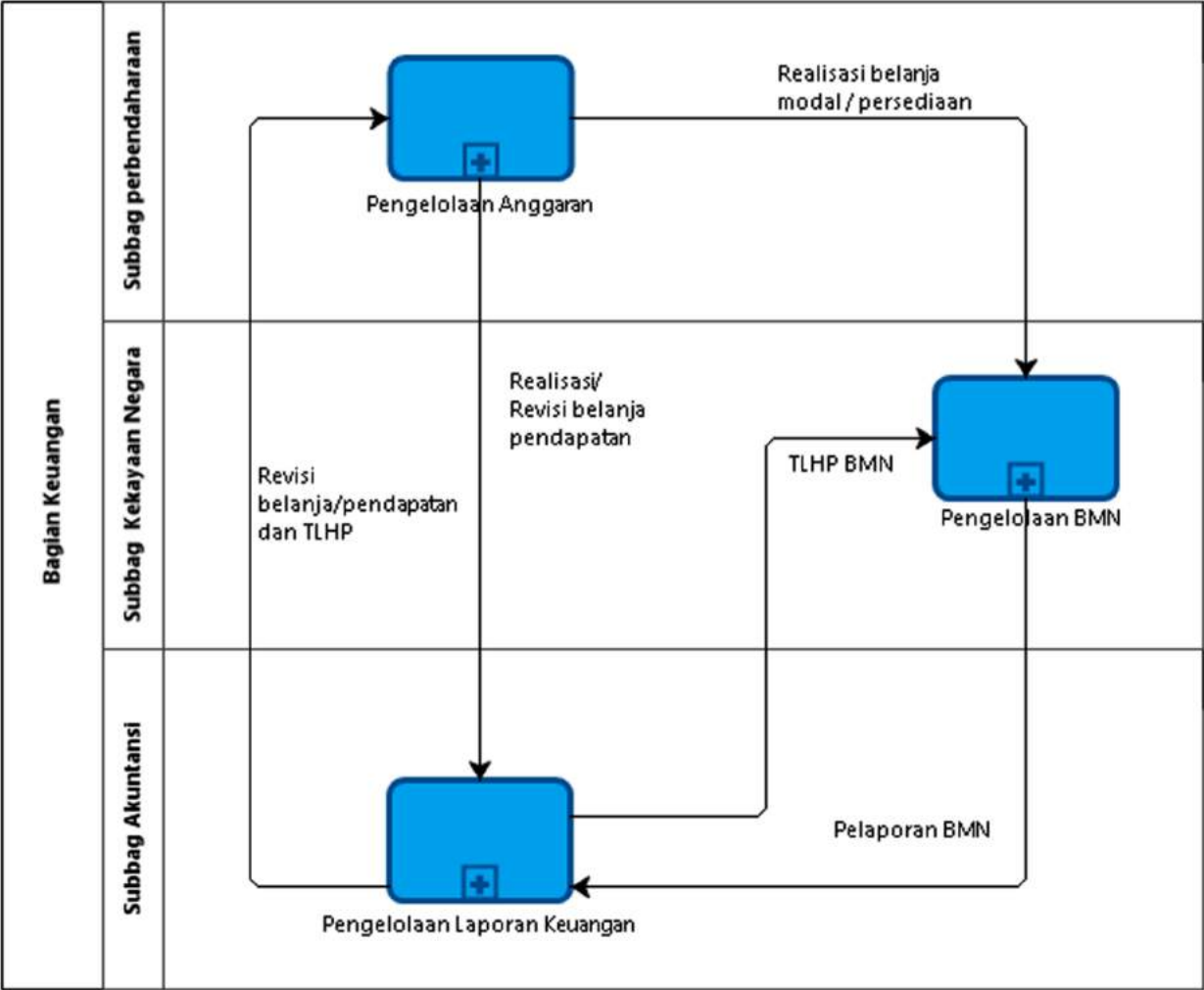
Subbagian Evaluasi dan Laporan – Prosedur Penyiapan Laporan Setditjen Minerba pada Aplikasi E-Monev Bappenas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



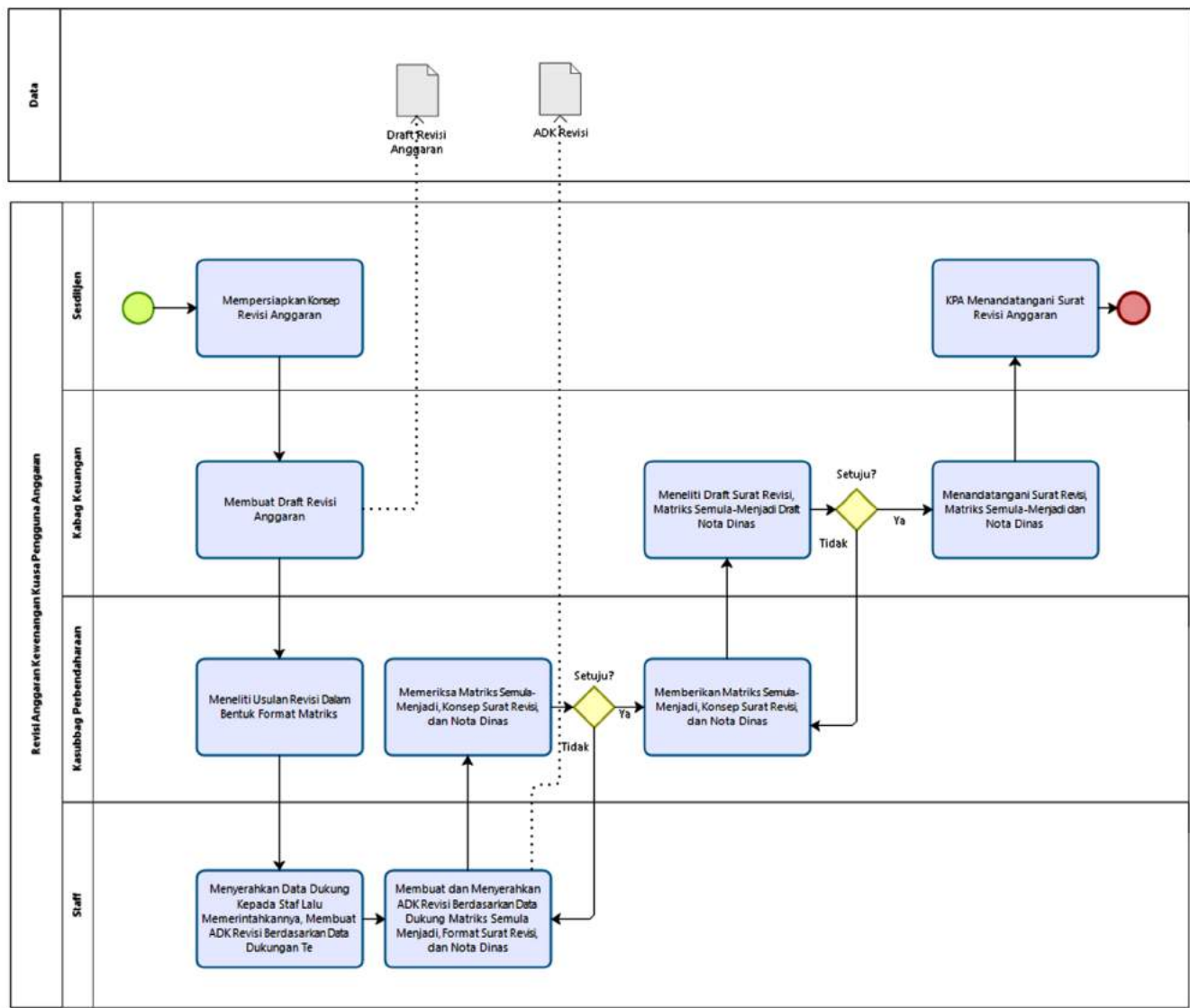
Pengelolaan Penatausahaan PNB



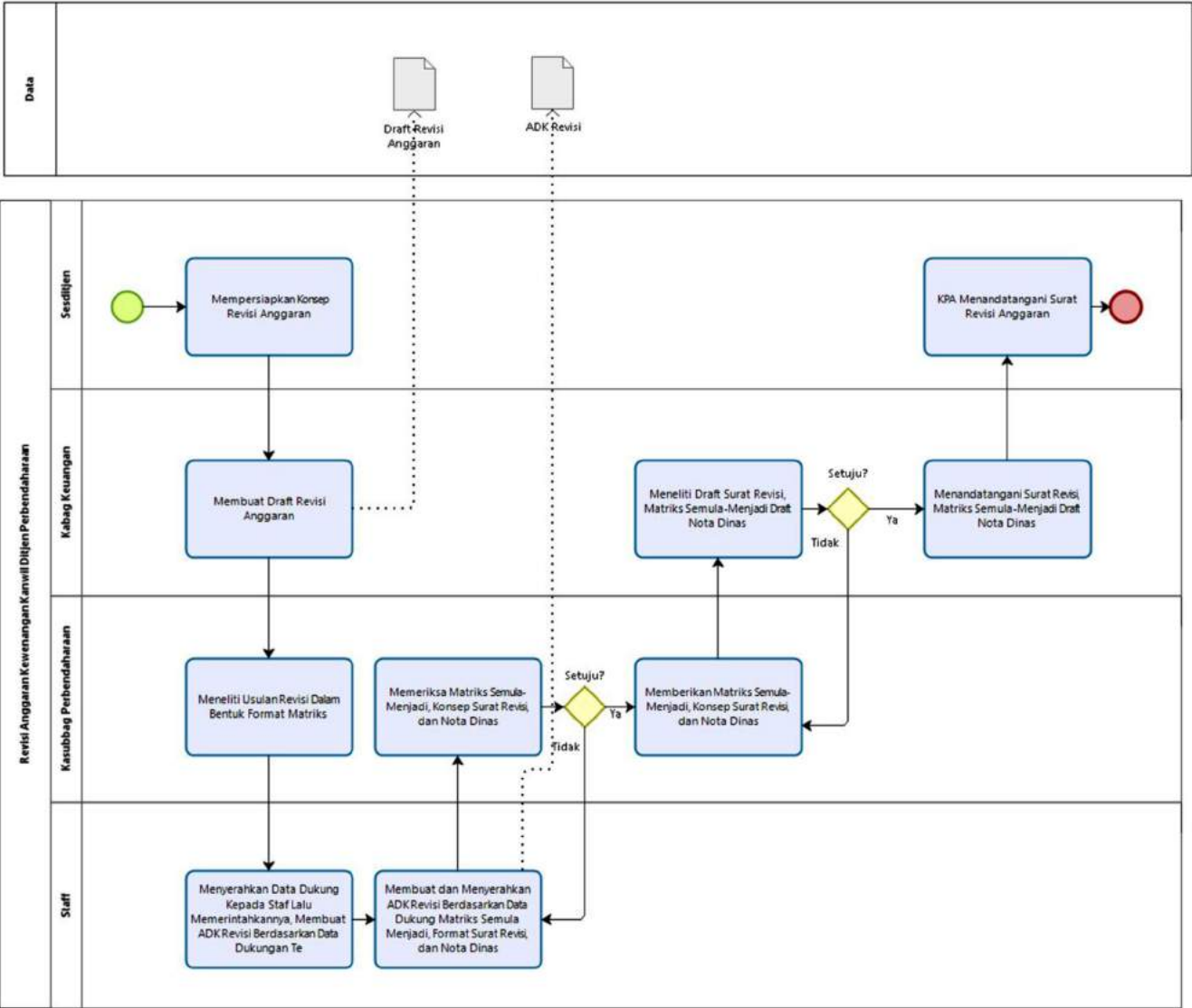
Pengelolaan Keuangan



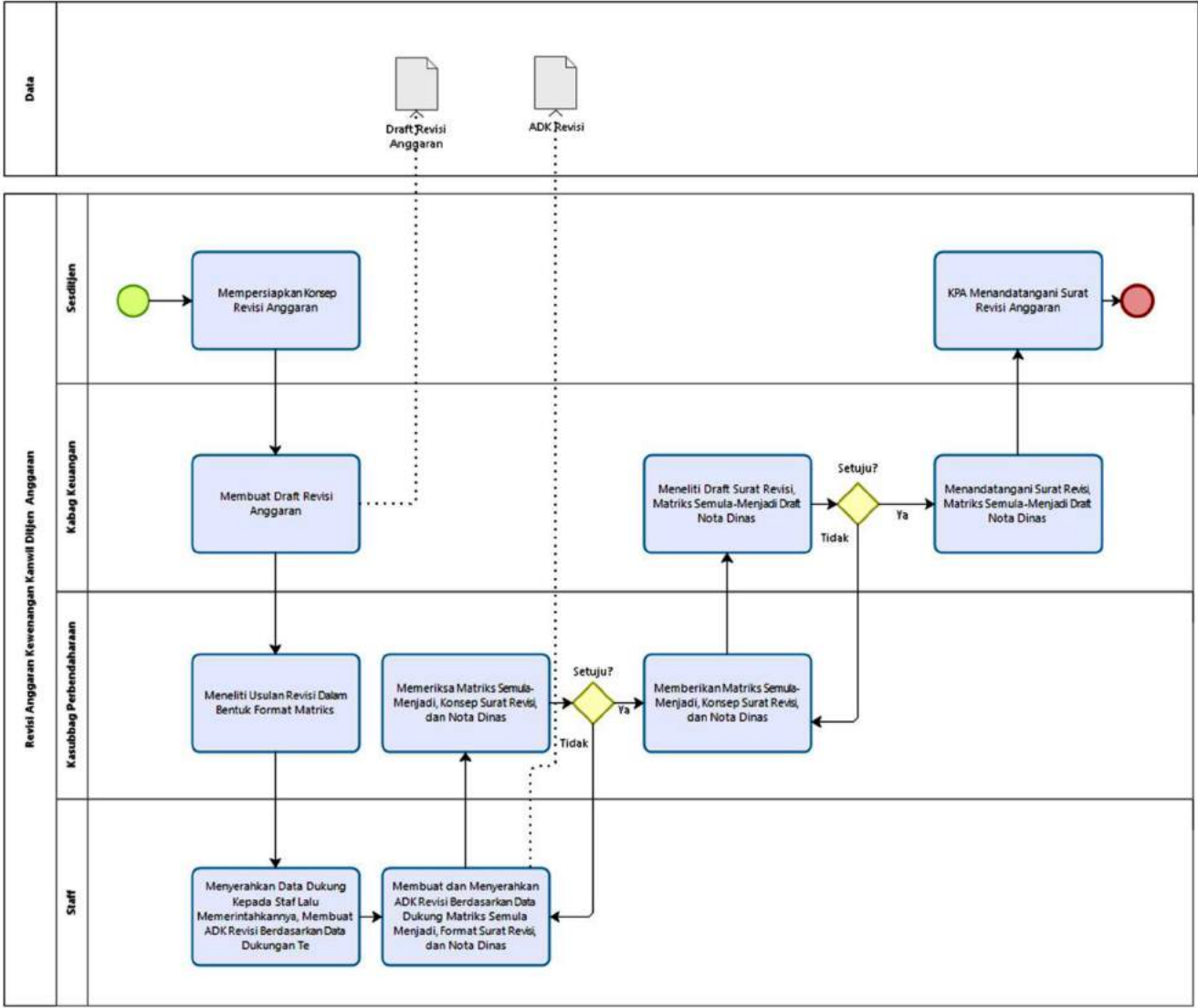
Subbagian Perbendaharaan - Revisi Anggaran Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran



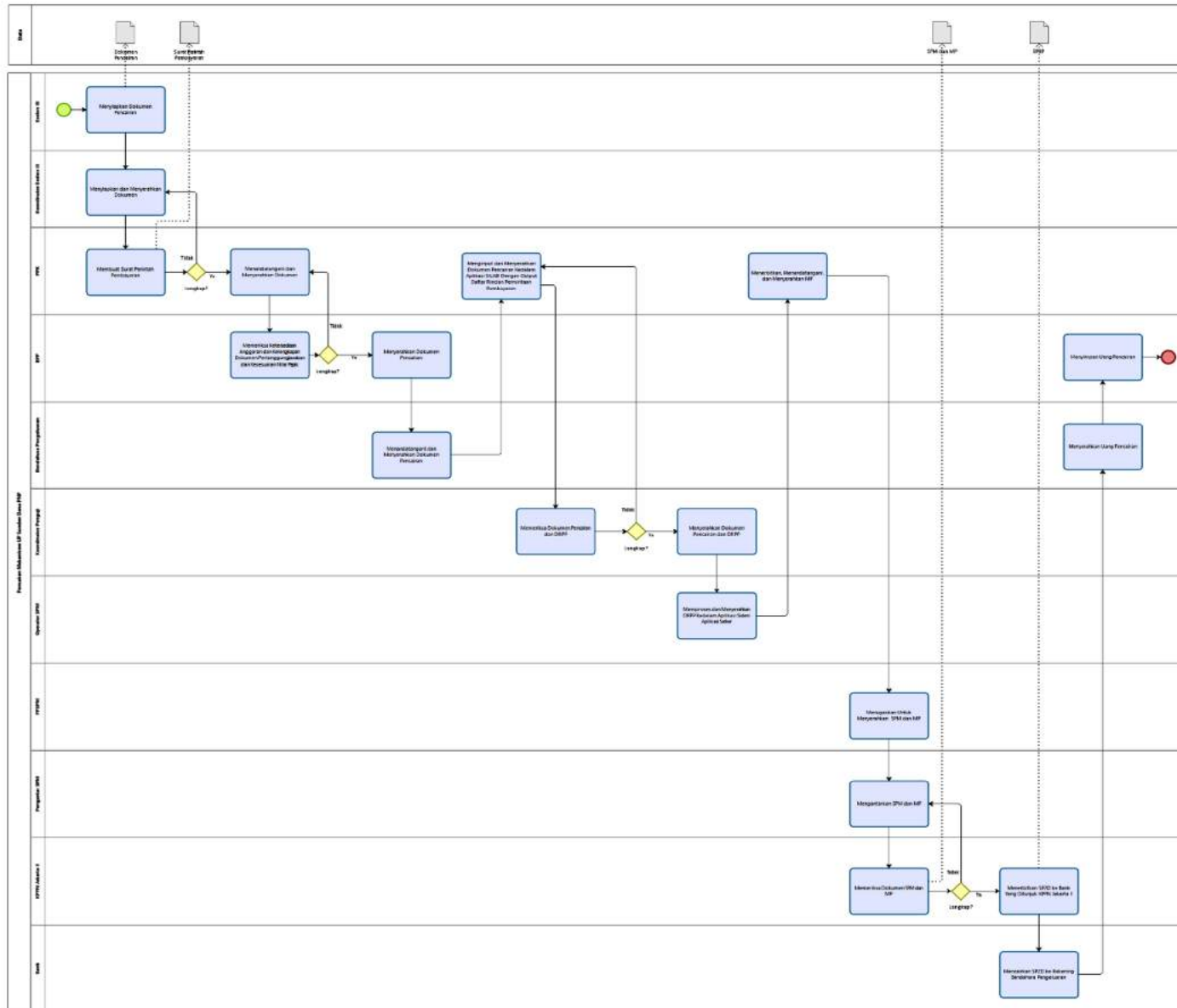
Subbagian Perbendaharaan - Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan



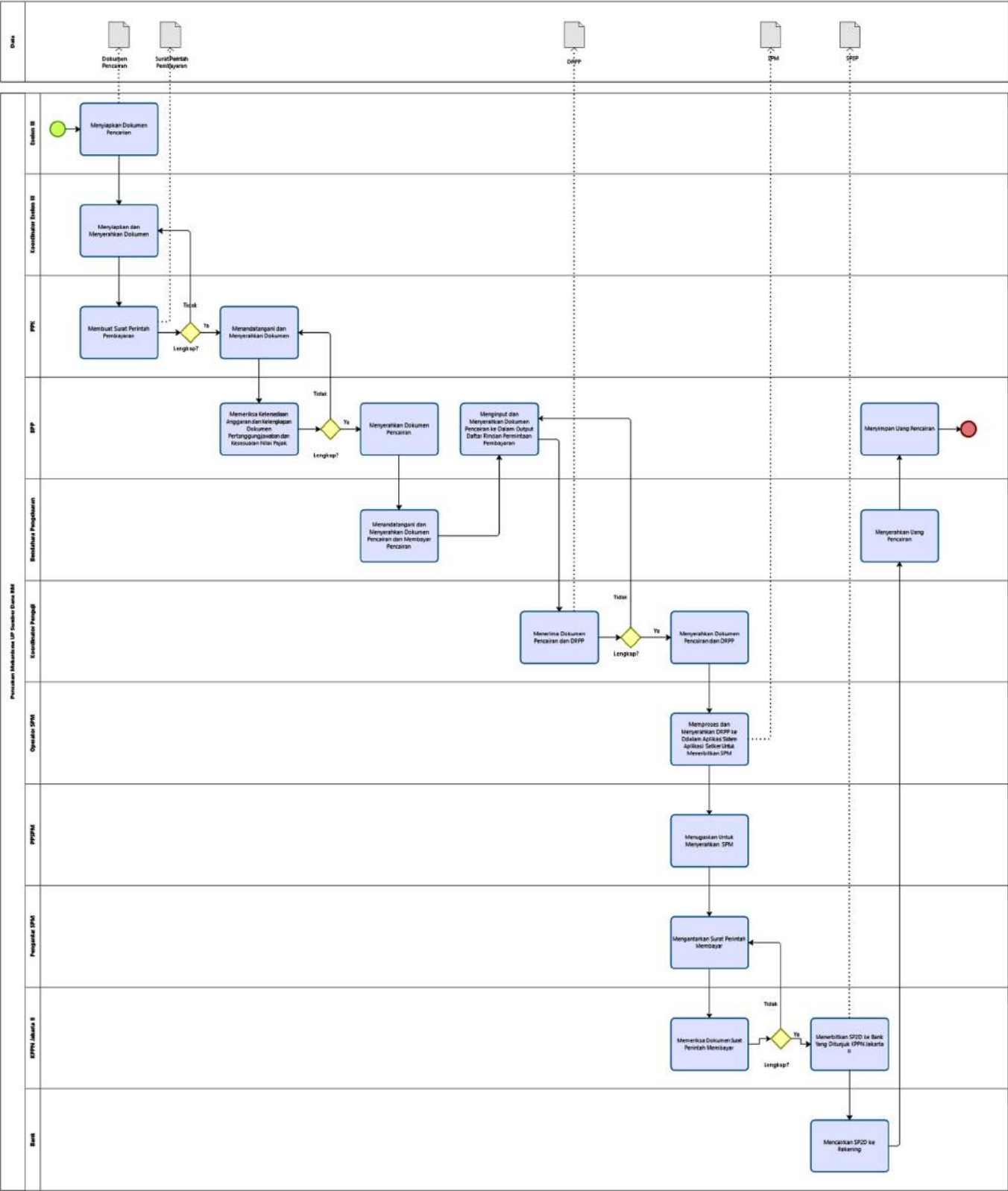
Subbagian Perbendaharaan - Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil Ditjen Anggaran



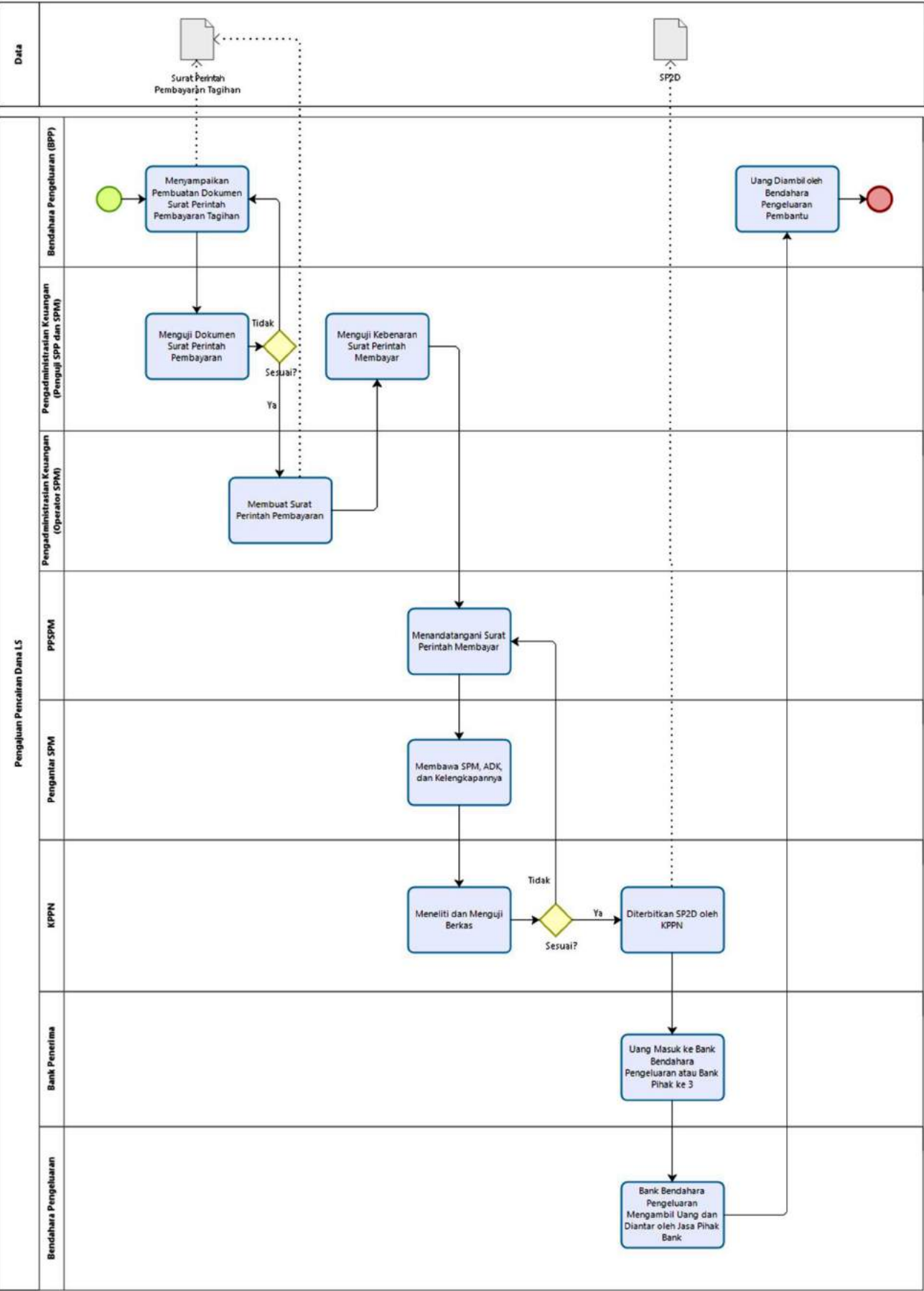
Subbagian Perbendaharaan - Pencairan Mekanisme UP Sumber Dana PNP



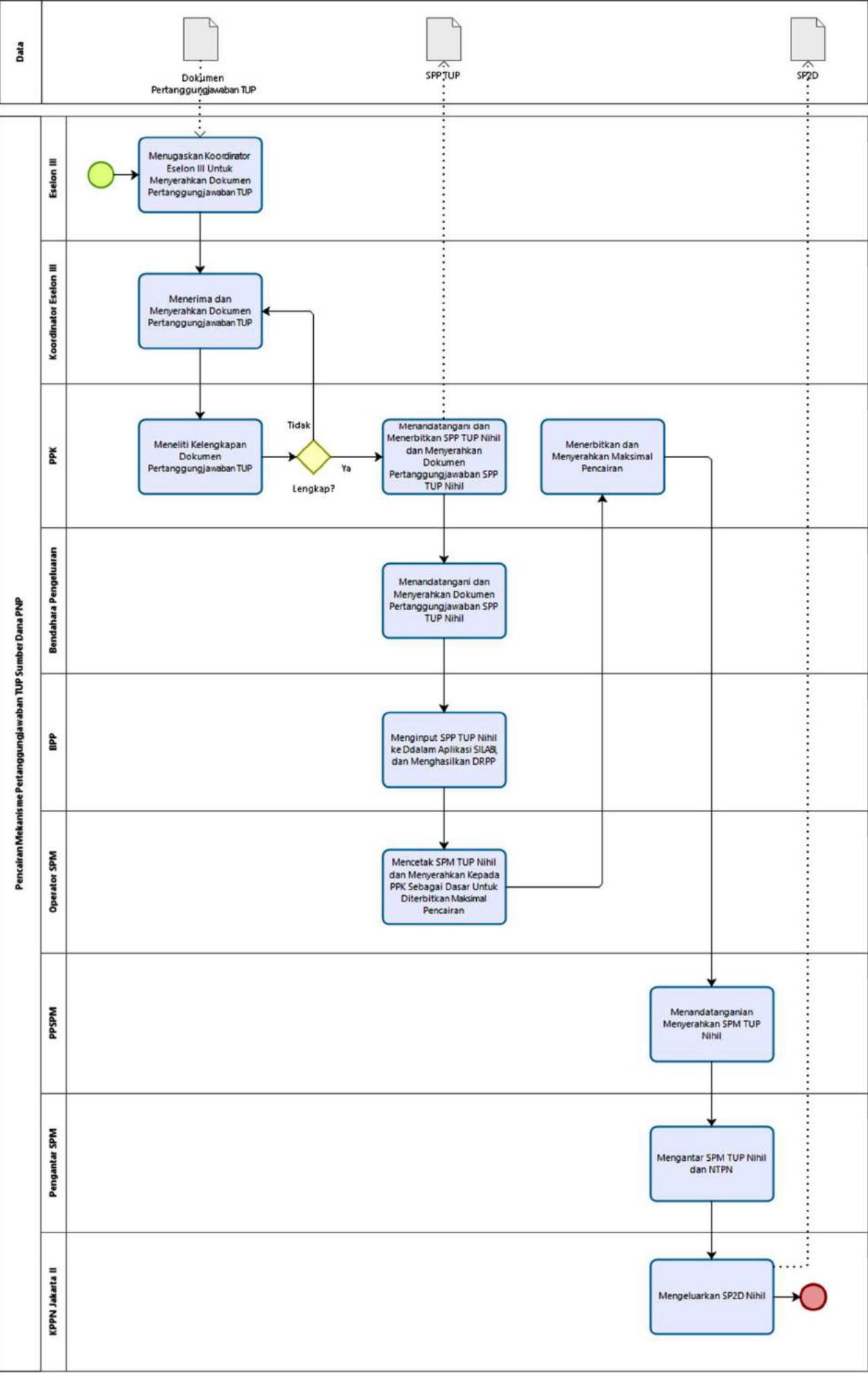
Subbagian Perbendaharaan - Pencairan Mekanisme UP Sumber Dana RM



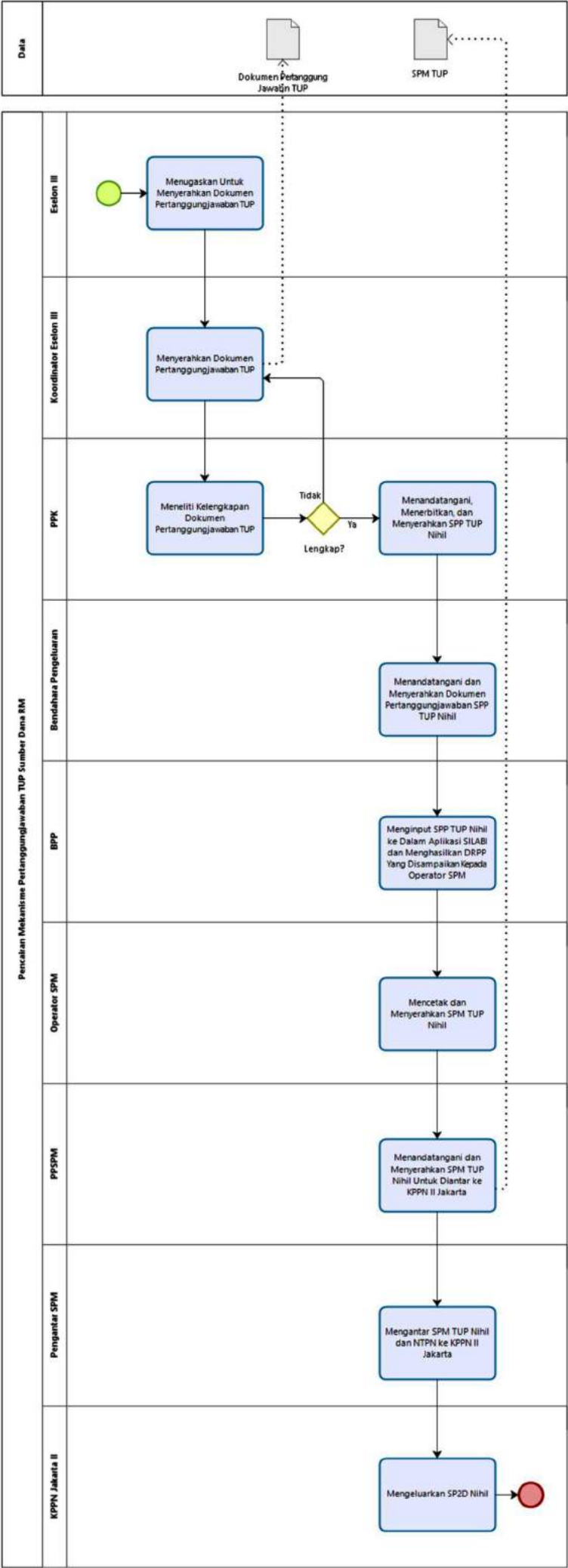
Subbagian Perbendaharaan - Pengajuan Pencairan Dana LS



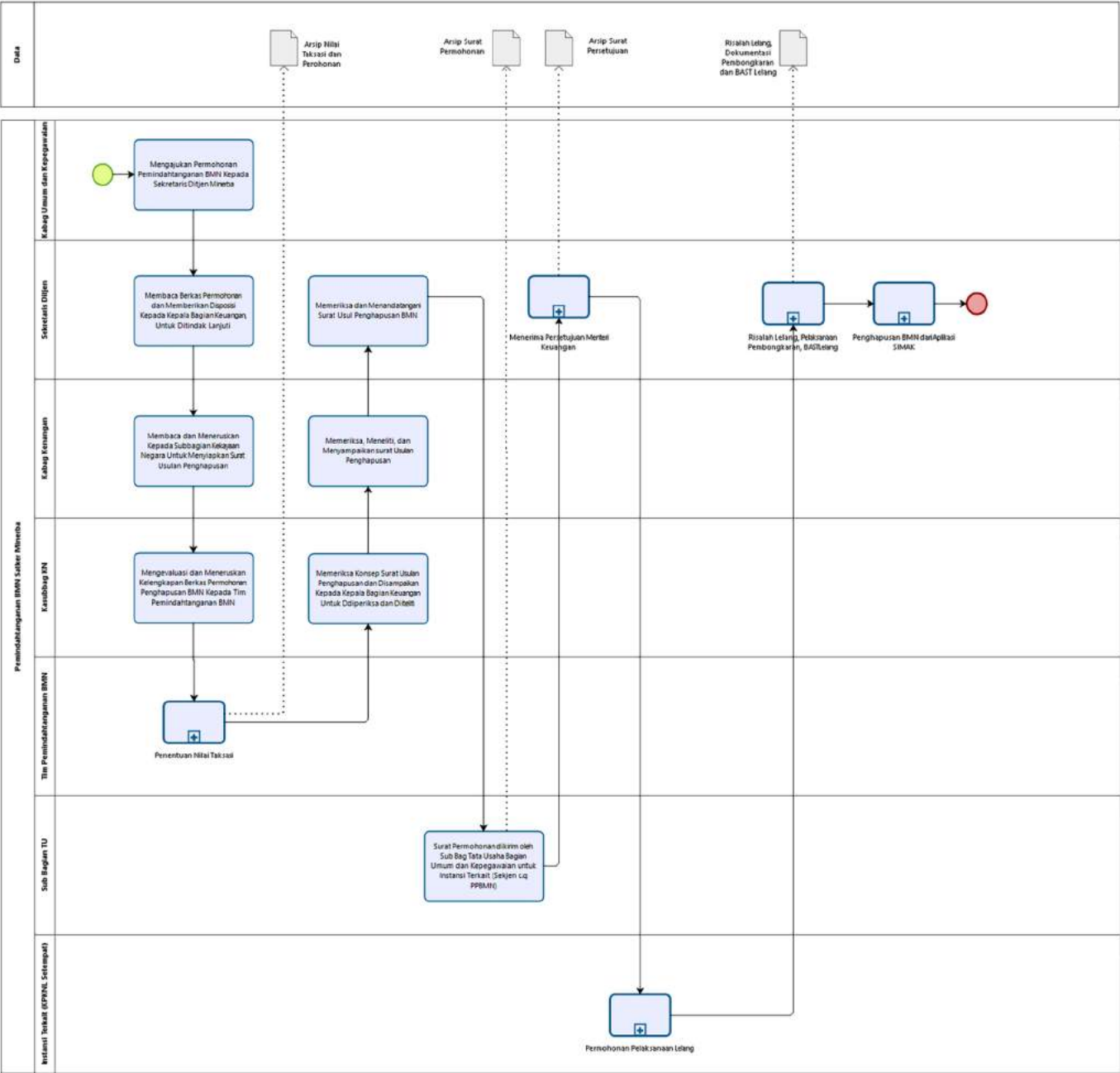
Subbagian Perbendaharaan - Pencairan Mekanisme Pertanggungjawaban TUP Sumber Dana PNP



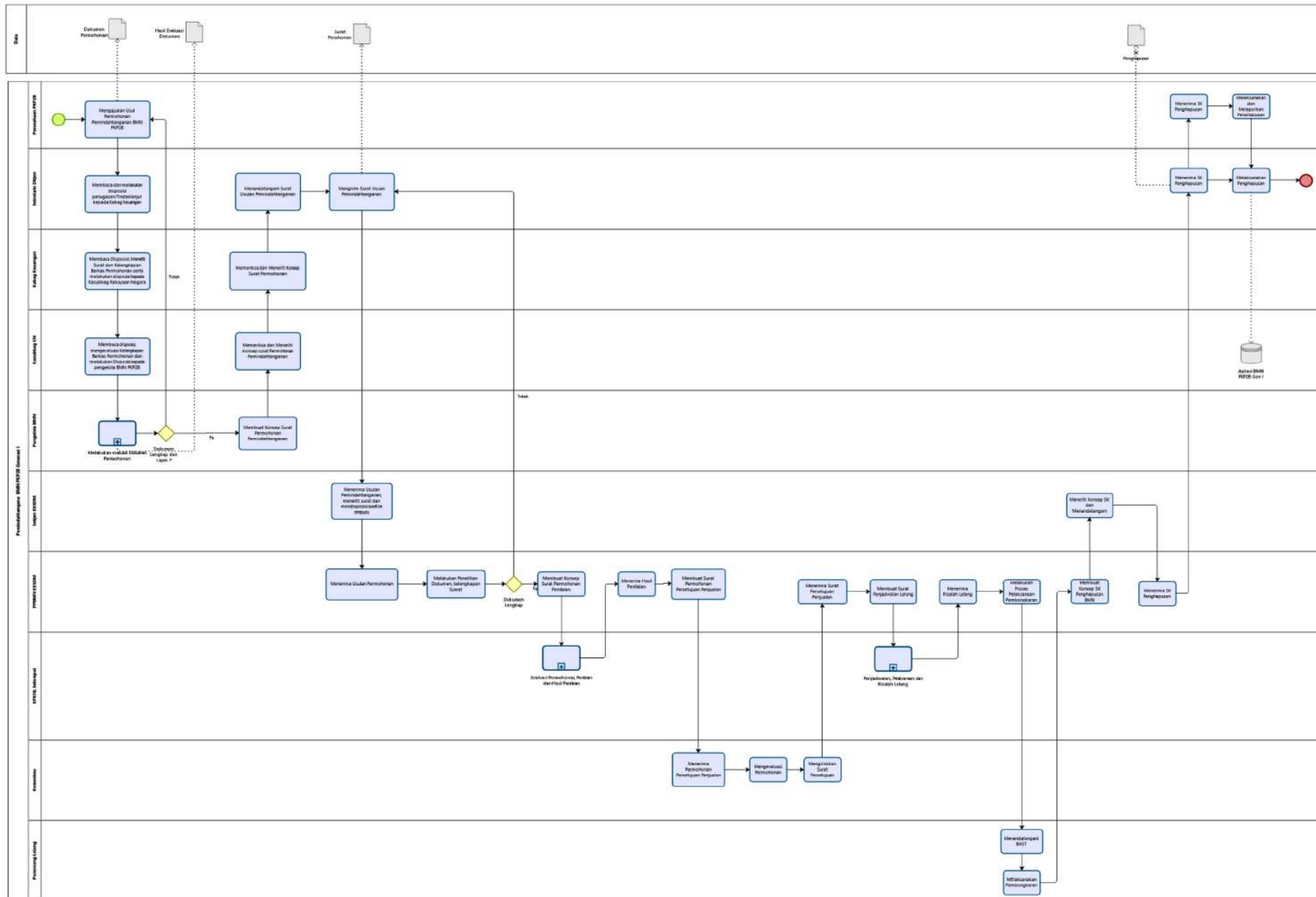
Subbagian Perbendaharaan - Pencairan Mekanisme Pertanggungjawaban TUP
Sumber Dana RM



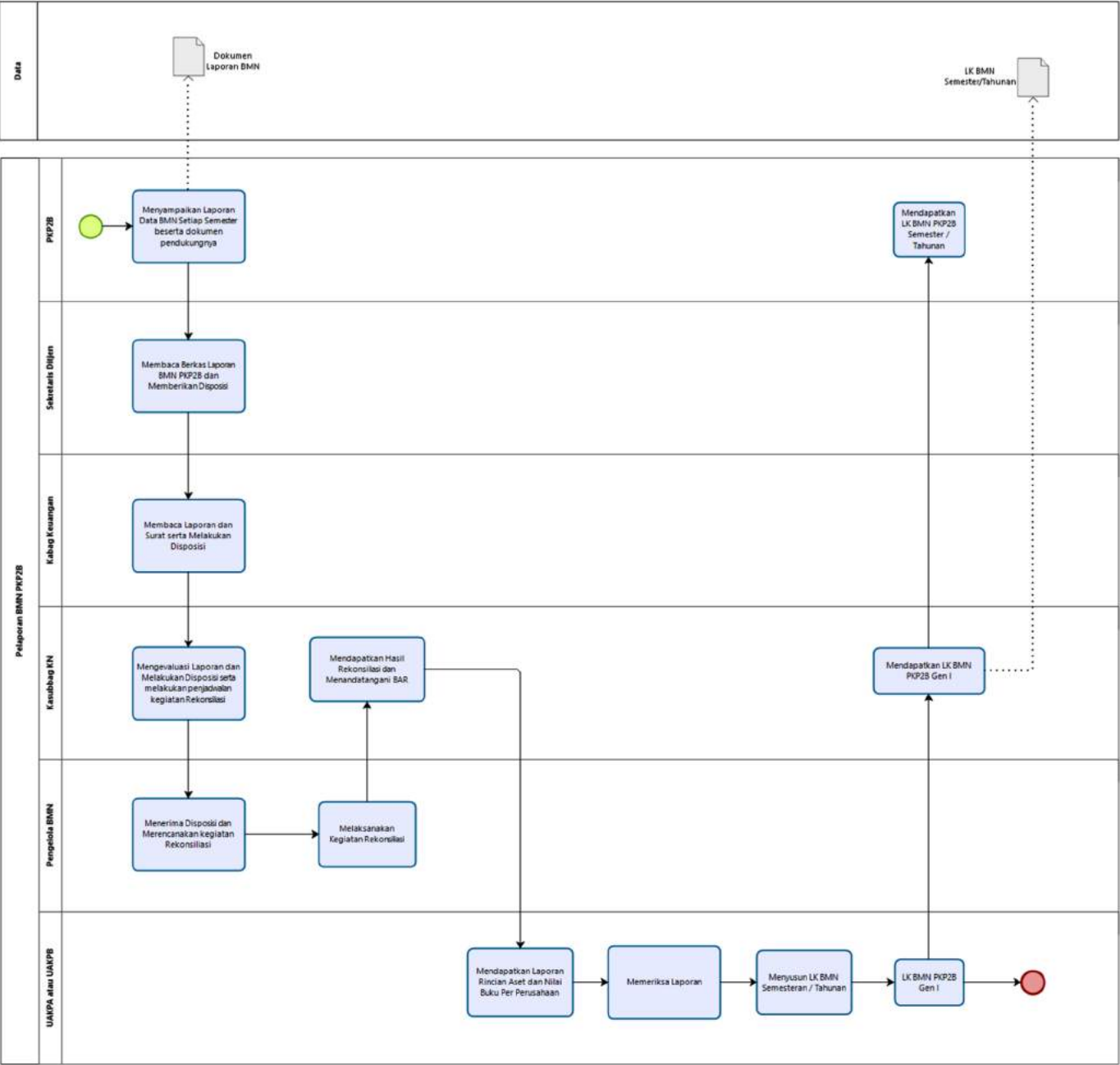
Subbagian Kekayaan Negara - Pemindahtanganan BMN Satker Ditjen Minerba



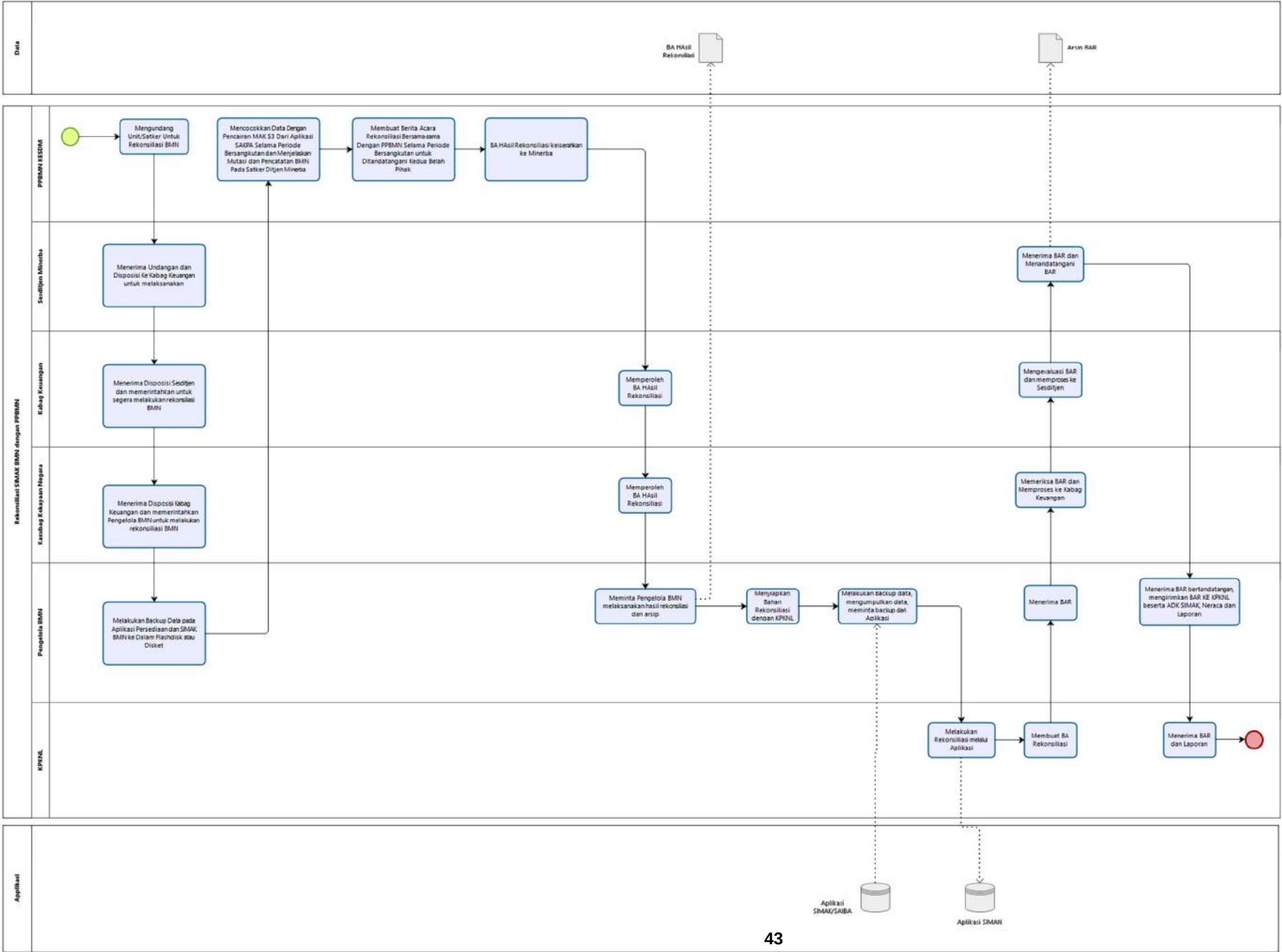
[illegible]

Subbagian Kekayaan Negara - Pemindahtanganan BMN PKP2B Generasi I

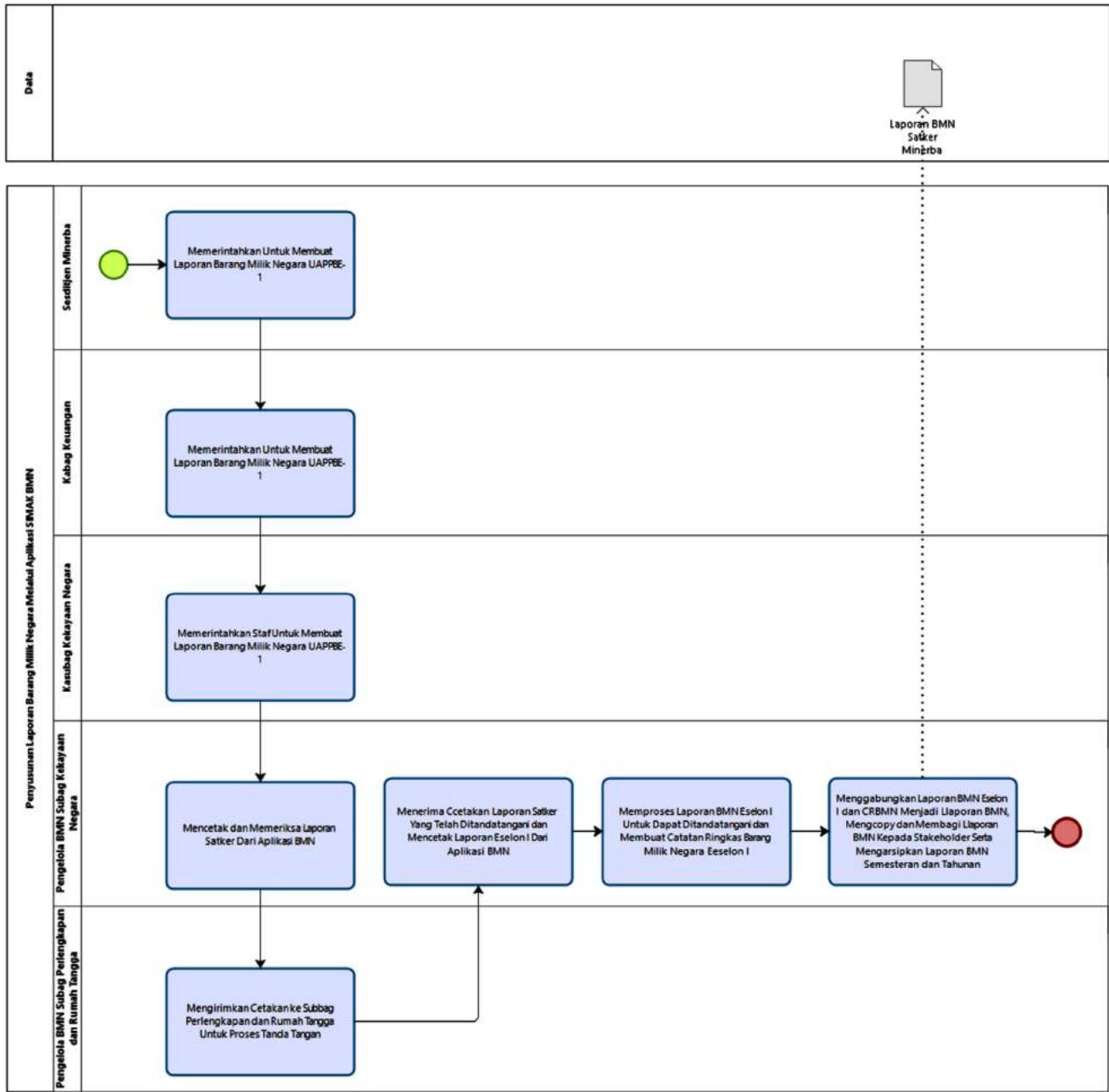
Subbagian Kekayaan Negara - Pelaporan BMN PKP2B



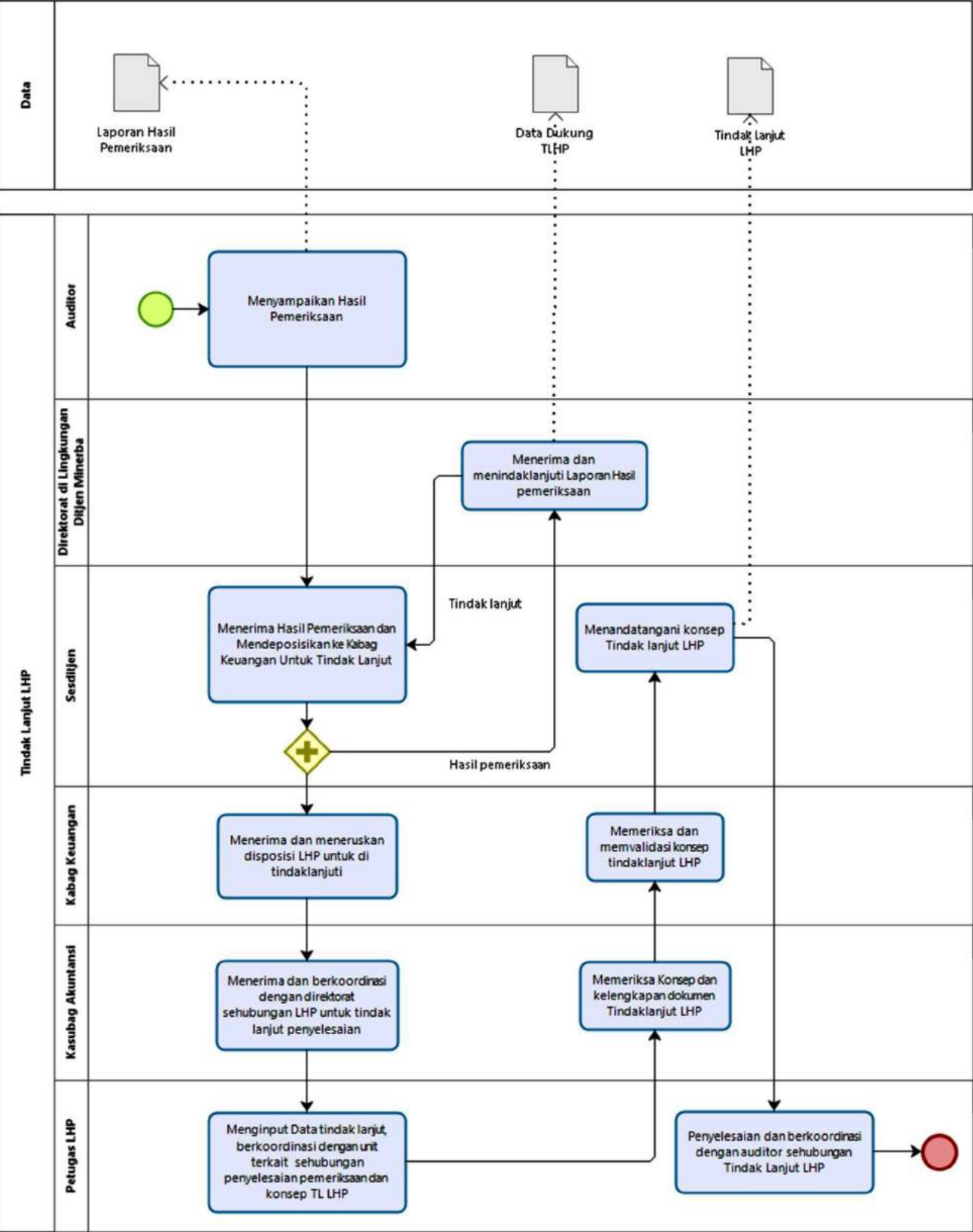
Subbagian Kekayaan Negara - Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan PPBMN dan KPKNL



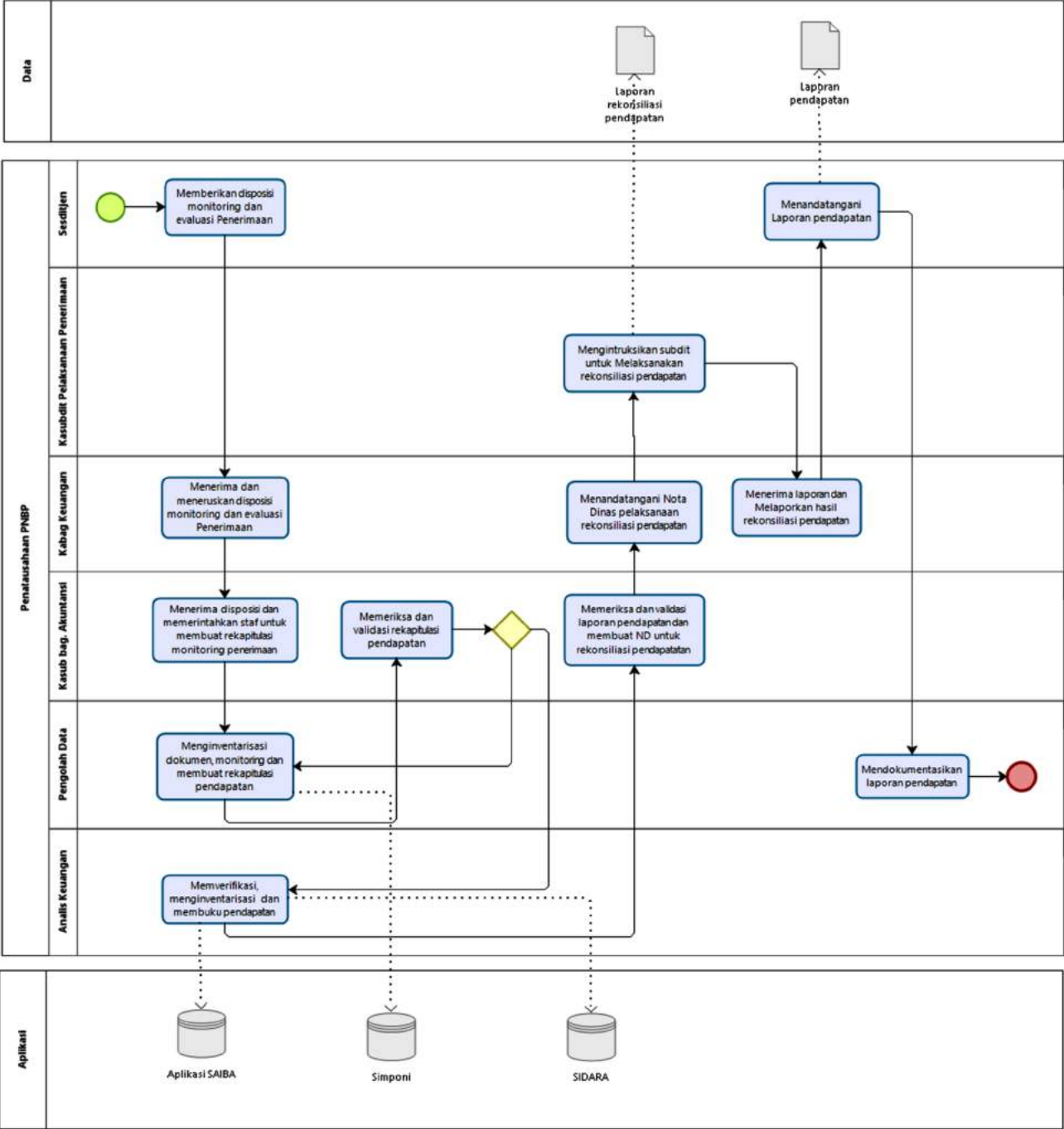
Subbagian Kekayaan Negara -Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAK BMN



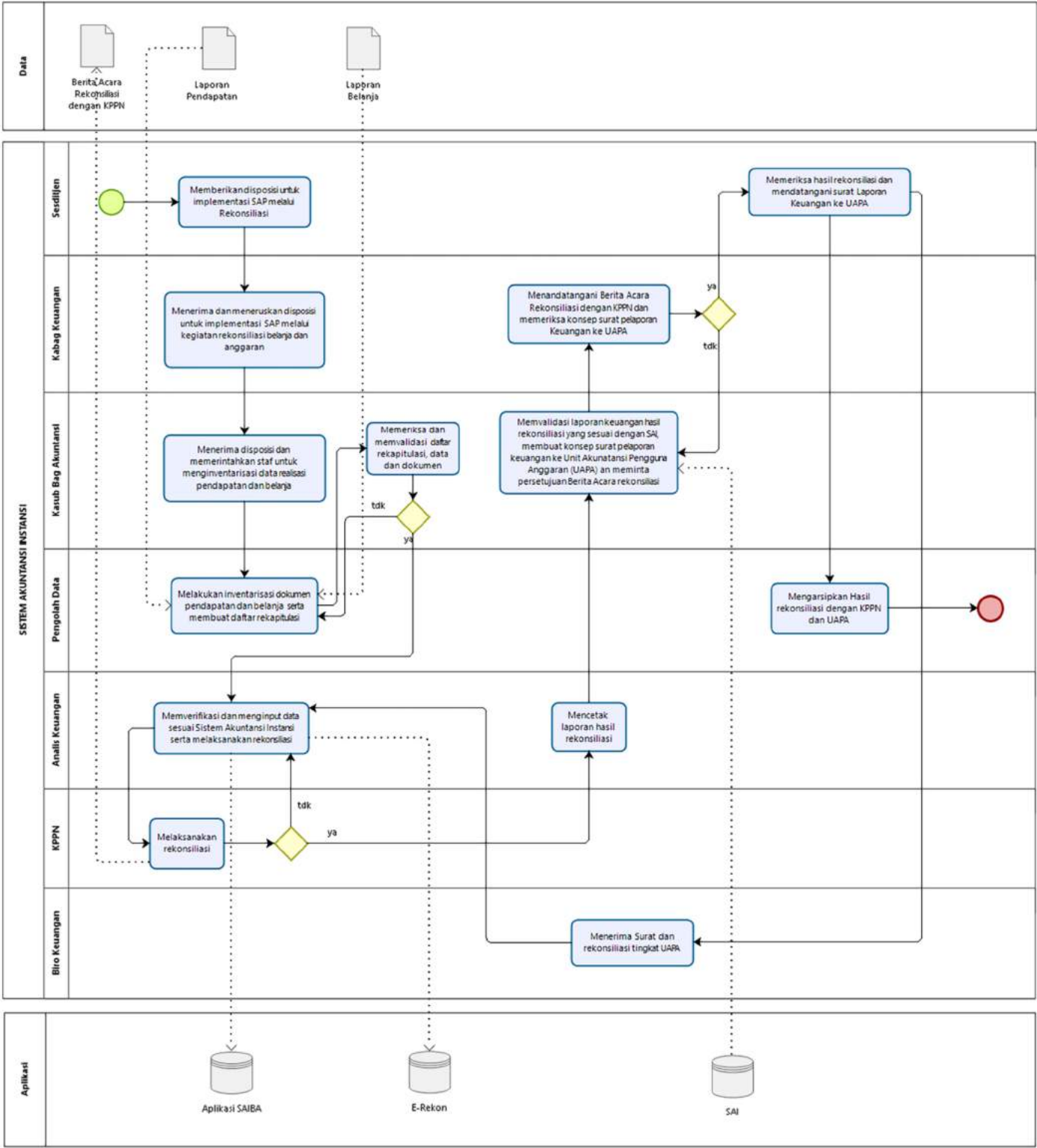
Subbagian Akuntansi - Tindak Lanjut LHP



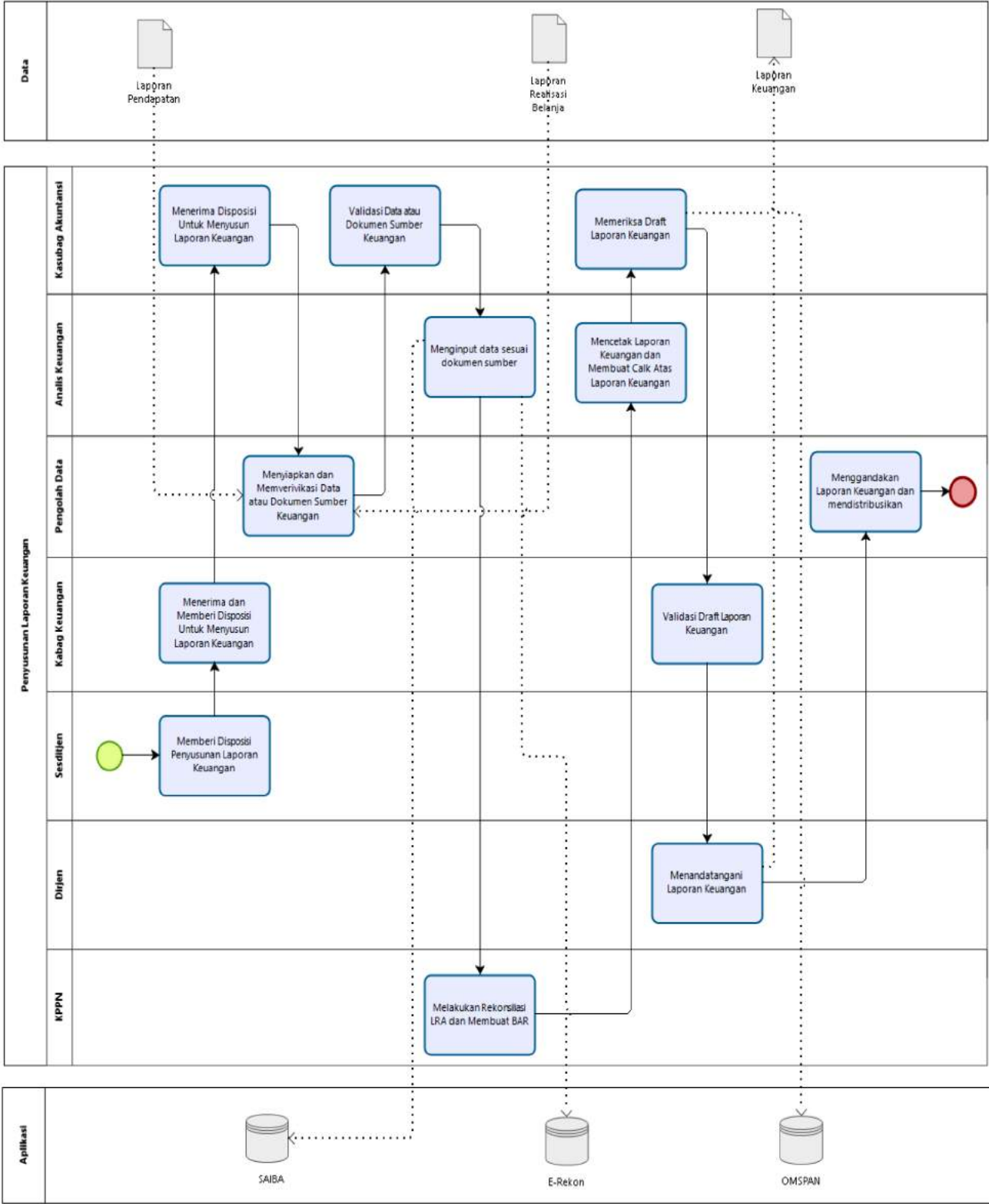
Subbagian Akuntansi – Penerimaan Penatausahaan PNPB



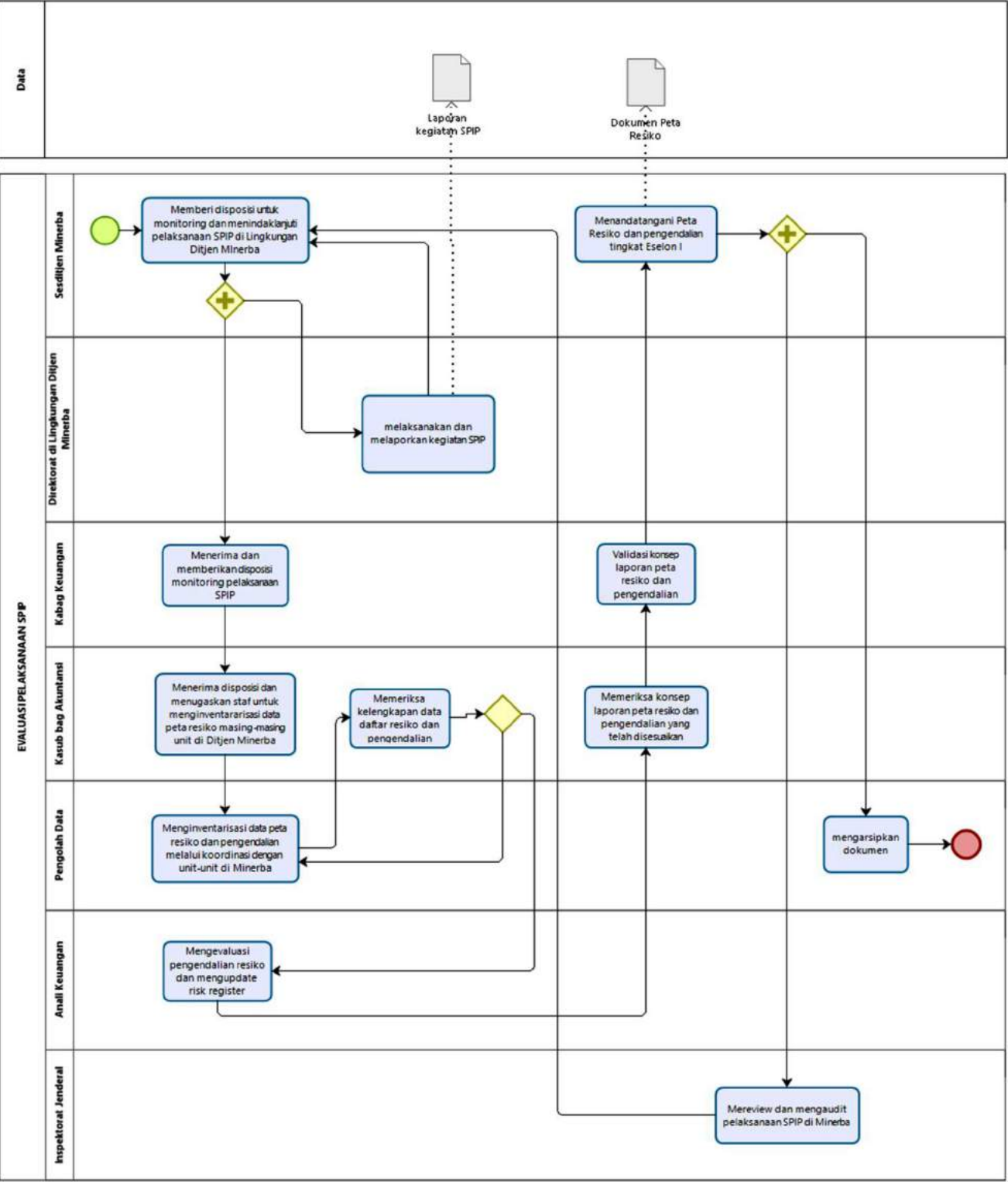
Subbagian Akuntansi – Sistem Akuntans Instansi



Subbagian Akuntansi – Penyusunan Laporan Keuangan



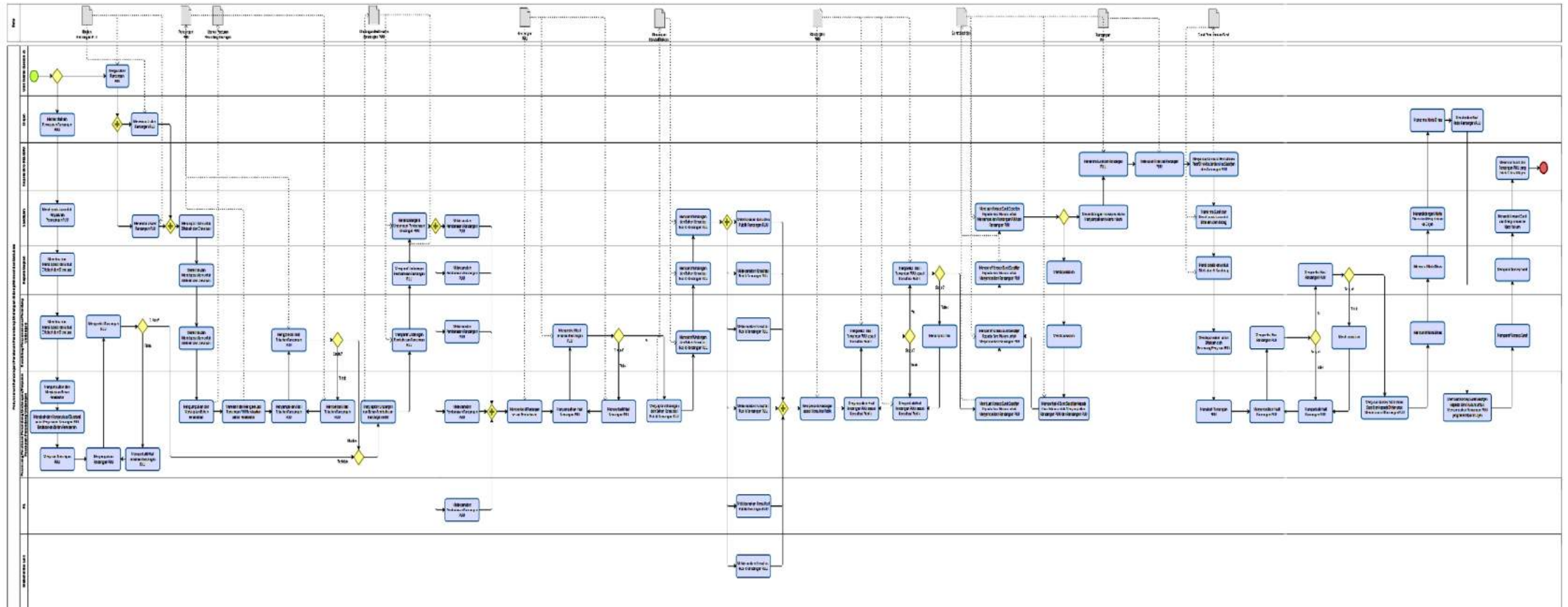
Subbagian Akuntansi – Evaluasi Pelaksanaan SPIP



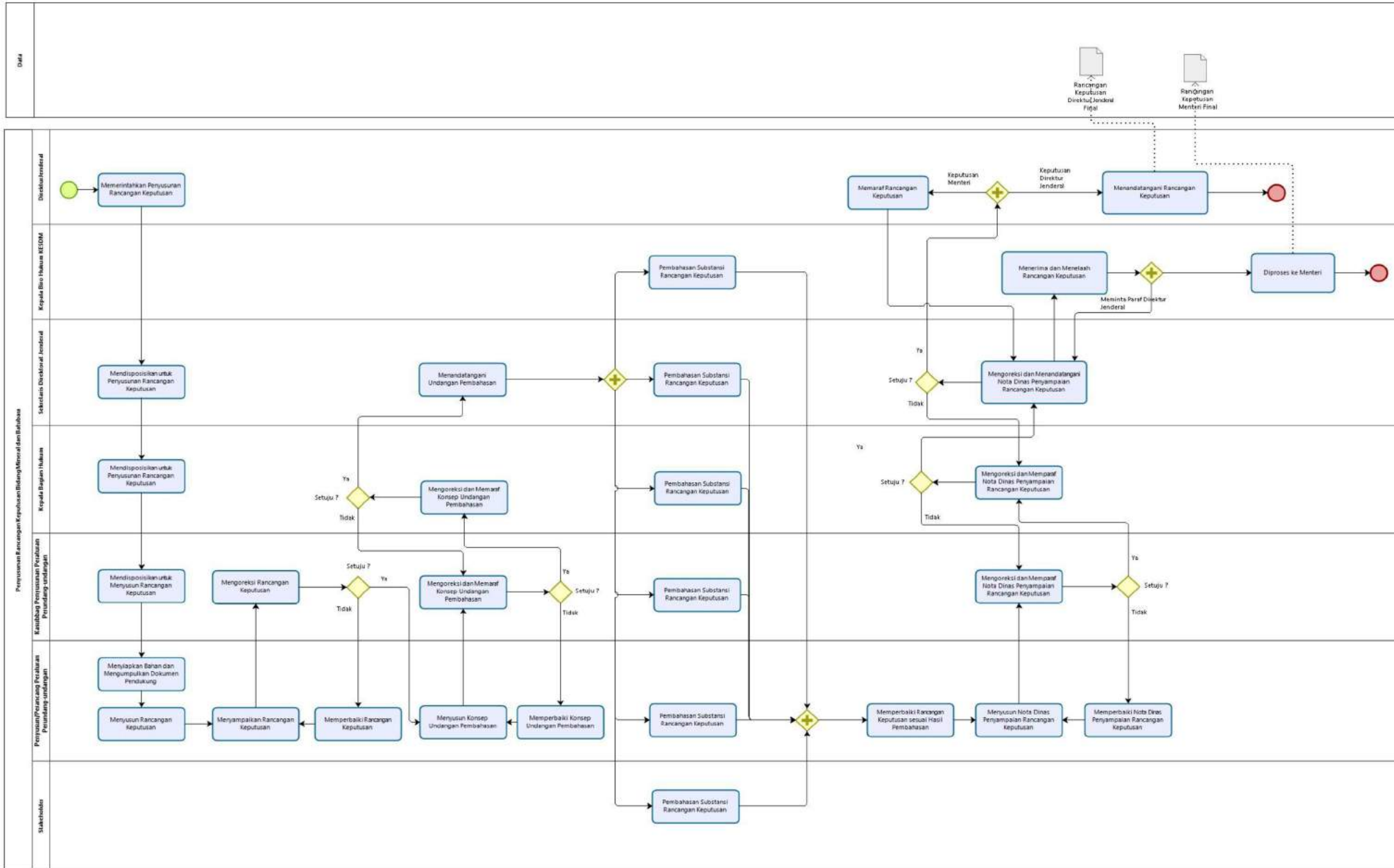
Pengelolaan Hukum

Pengelolaan Hukum	Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang Undangan Bidang Mineral dan Batubara	 Penyusunan Rancangan Keputusan Bidang Mineral dan Batubara	 Penelaahan Rancangan Keputusan Bidang Mineral dan Batubara	 Penelaahan Rancangan Keputusan Terkait Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
		 Penelaahan Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kegiatan dan/stau Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	 Penyusunan dan Penelaahan Rancangan Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	 Penelaahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sektor Terkait Bidang Mineral dan Batubara	
	Subbagian Pertimbangan Hukum	 Penyelesaian Perkara Hukum (Litigasi) Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara- Tergugat Menteri	 Penyelesaian Perkara Hukum (Litigasi) Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara- Tergugat Dirjen	 Pemberian Pertimbangan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan IUP, KK dan PKP2B	
	Subbagian Informasi Hukum	 Penayangan Berita Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	 Pemberian Informasi Publik Terkait Kegiatan Pertambangan Minerba	 Permohonan Data dan Informasi Hukum yang Dirahasiakan	 Pelayanan Pemberian Konsultasi dan Informasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Mineral dan Batubara

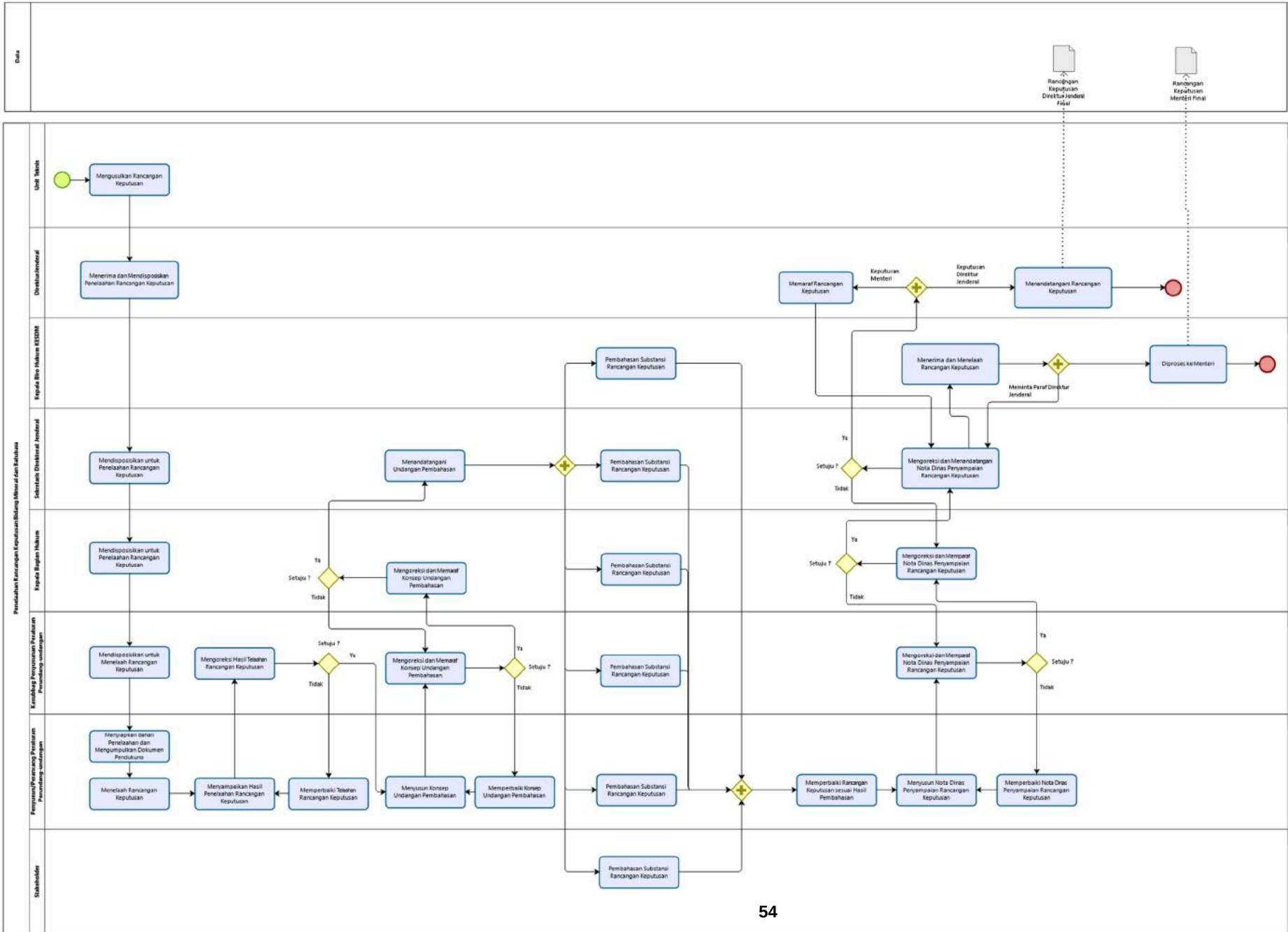
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan – Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Undangan Bidang Mineral dan Batubara



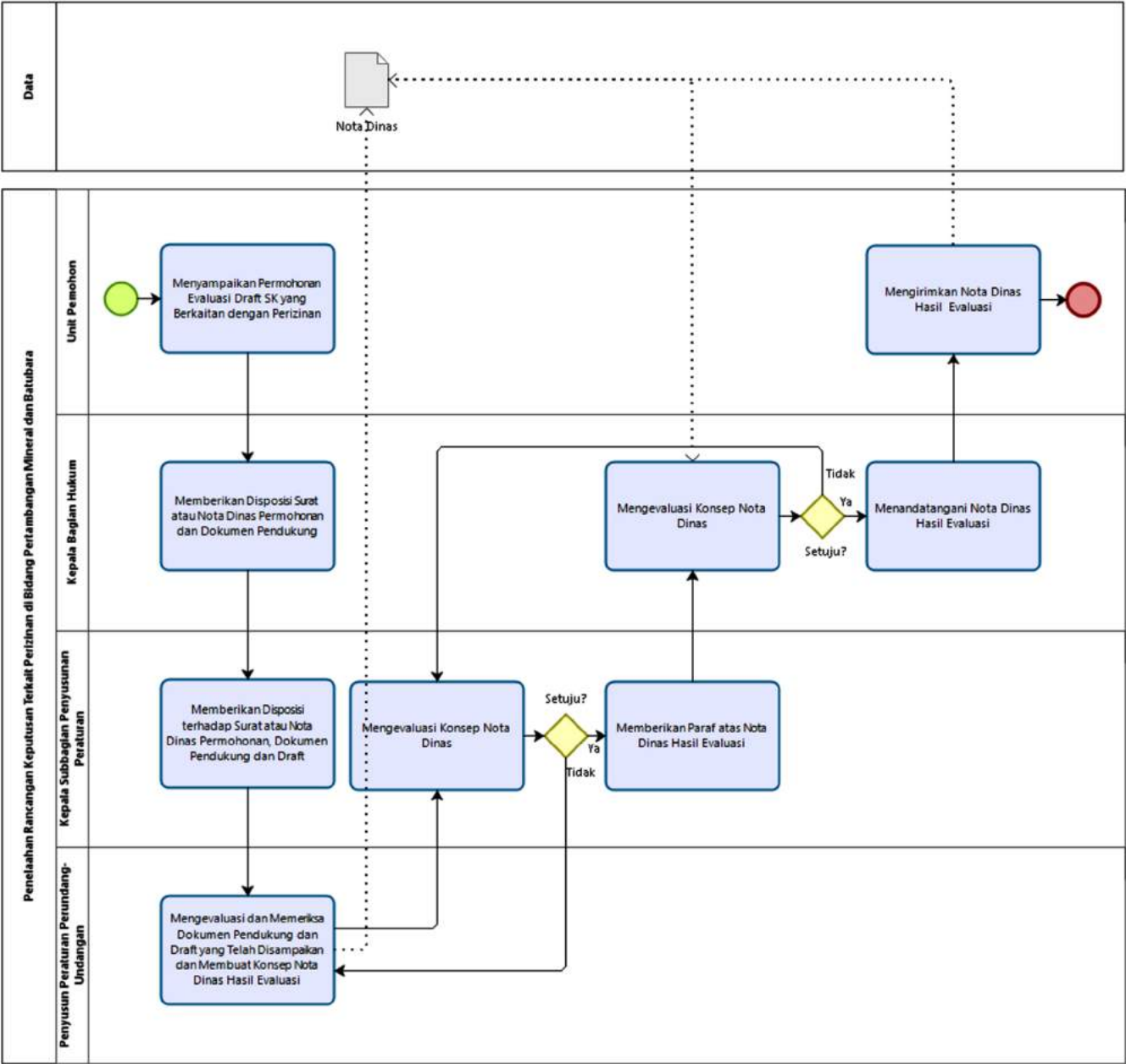
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan Rancangan Keputusan Bidang Mineral dan Batubara



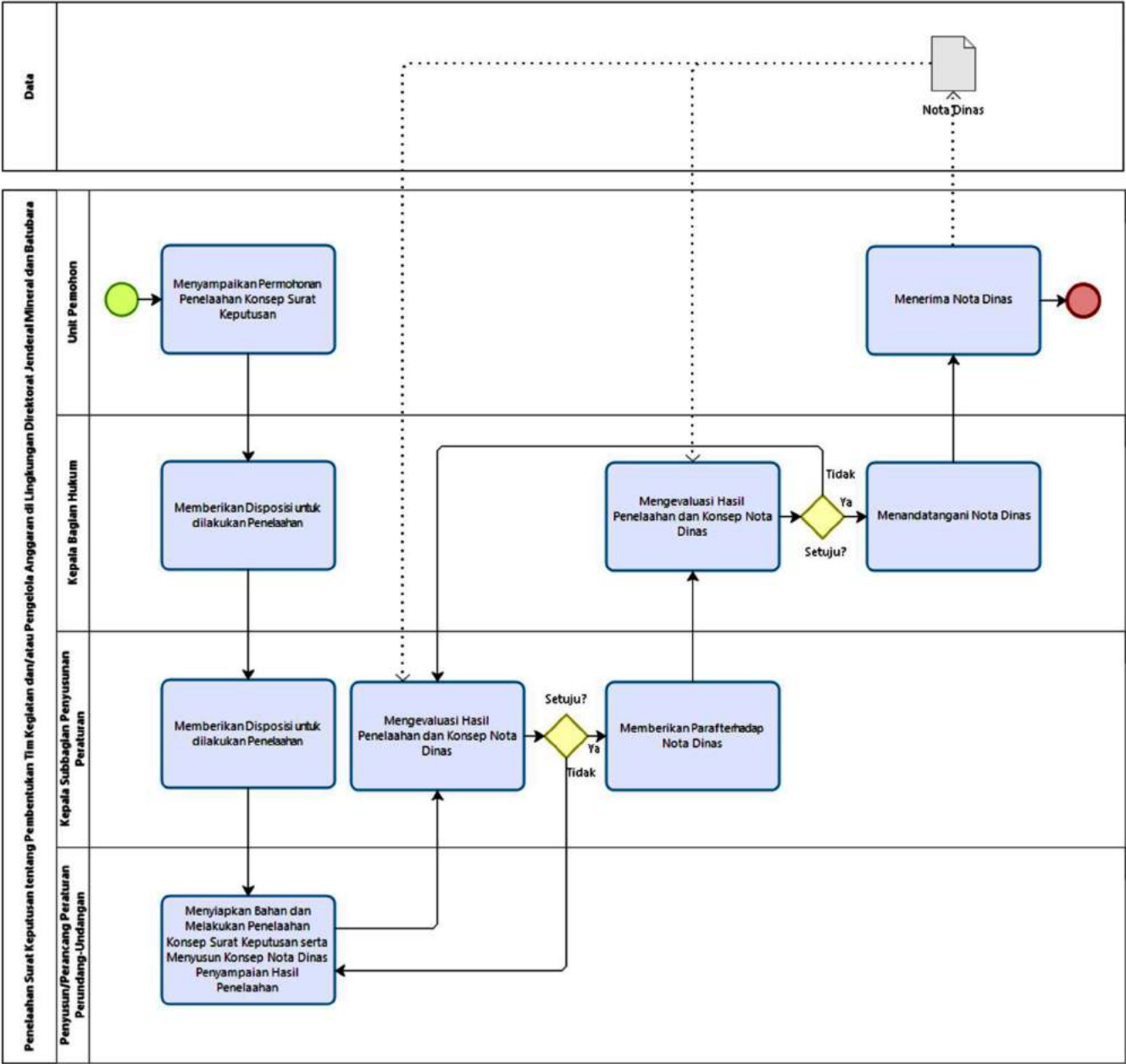
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Penelaahan Rancangan Keputusan Bidang Mineral dan Batubara



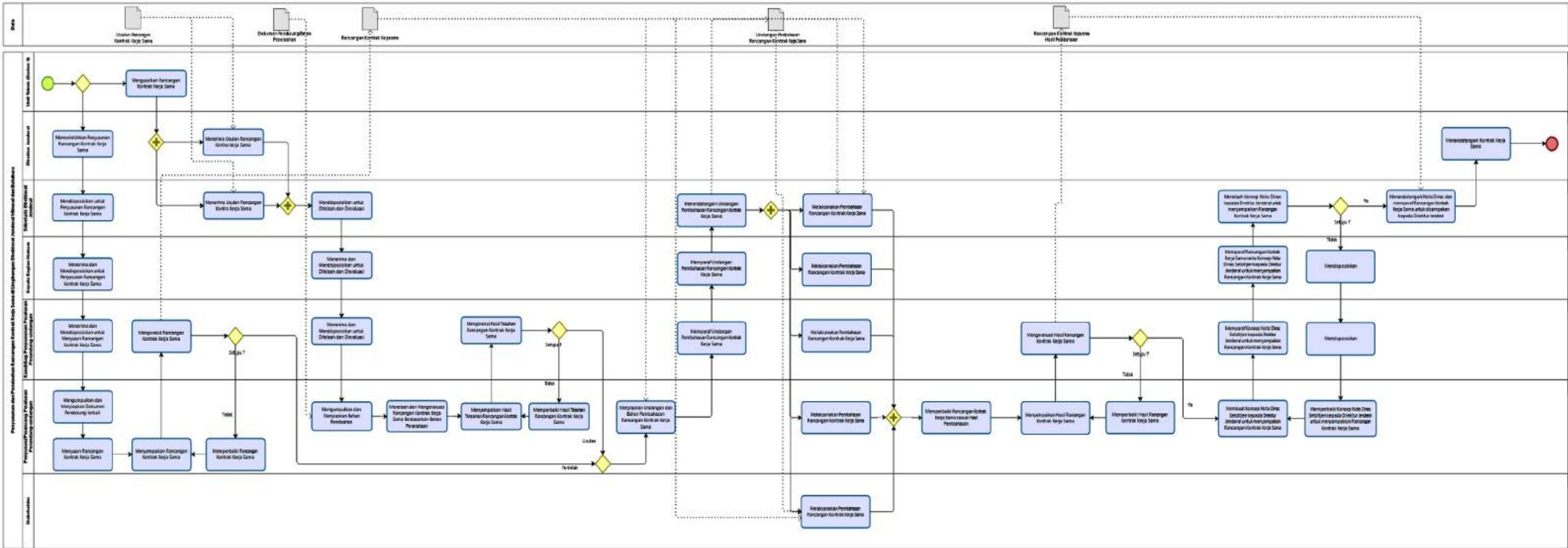
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Penelaahan Rancangan Keputusan Terkait Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara



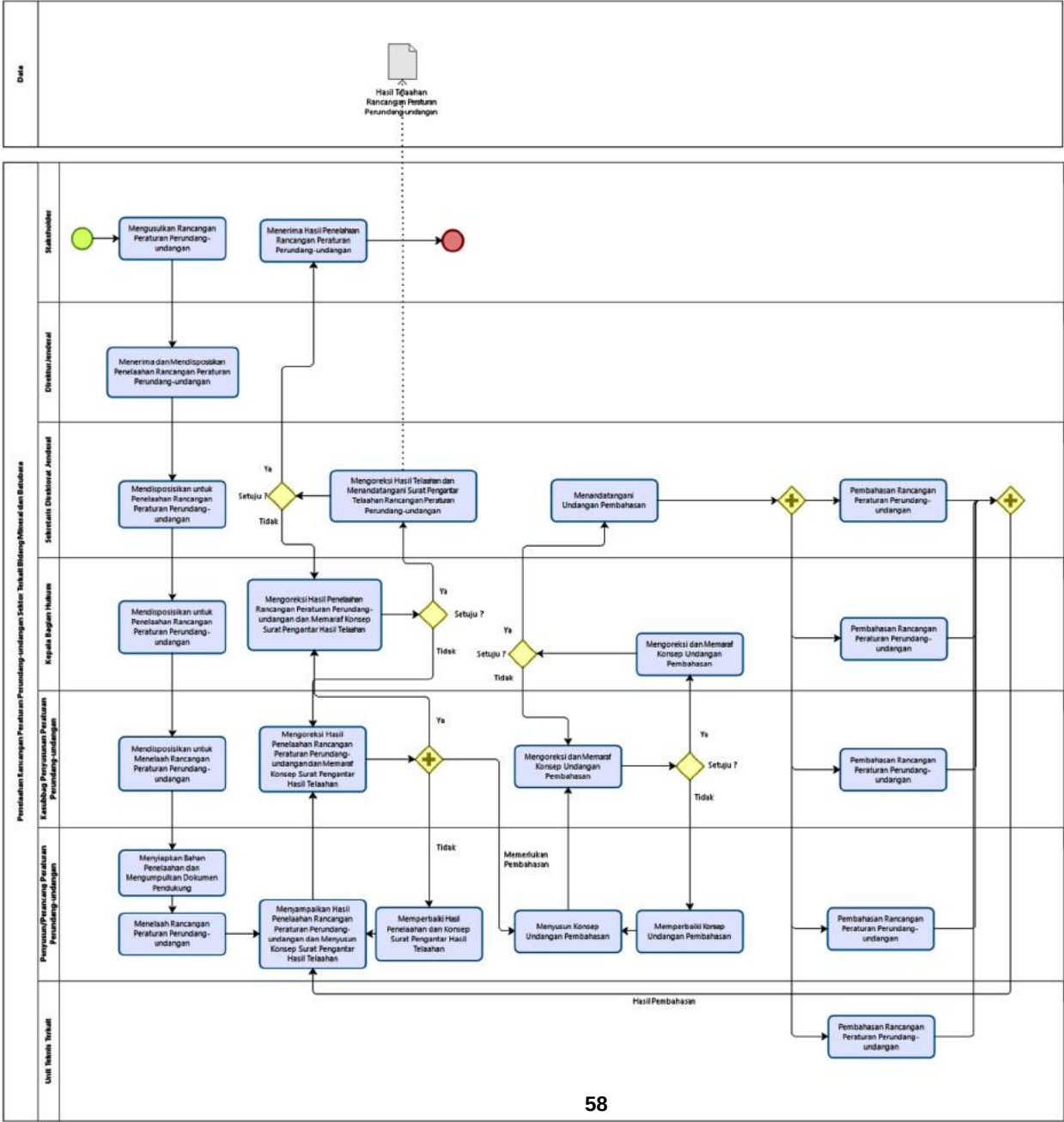
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Penelaahan Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kegiatan dan/atau Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



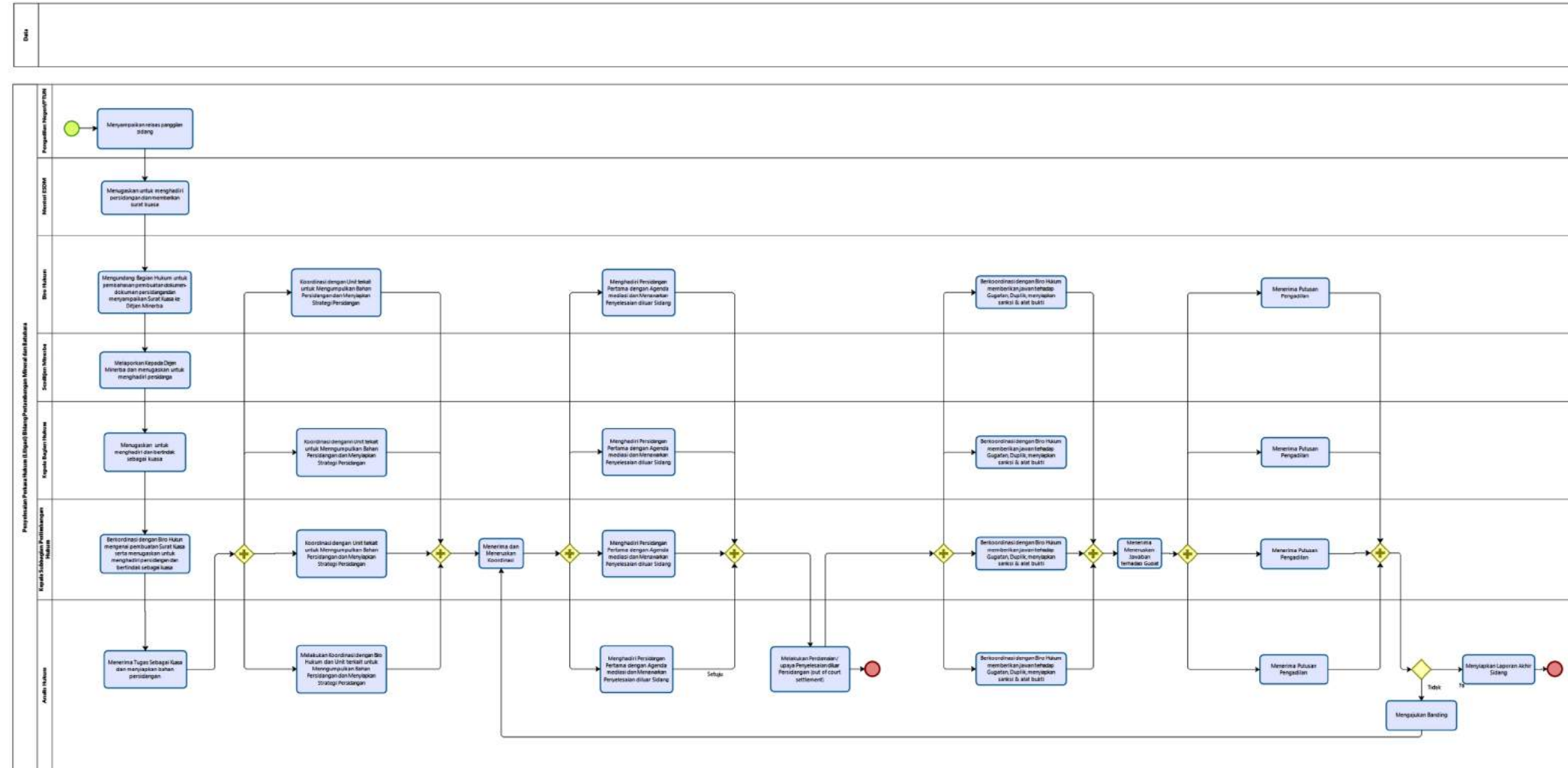
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan dan Penelaahan Rancangan Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



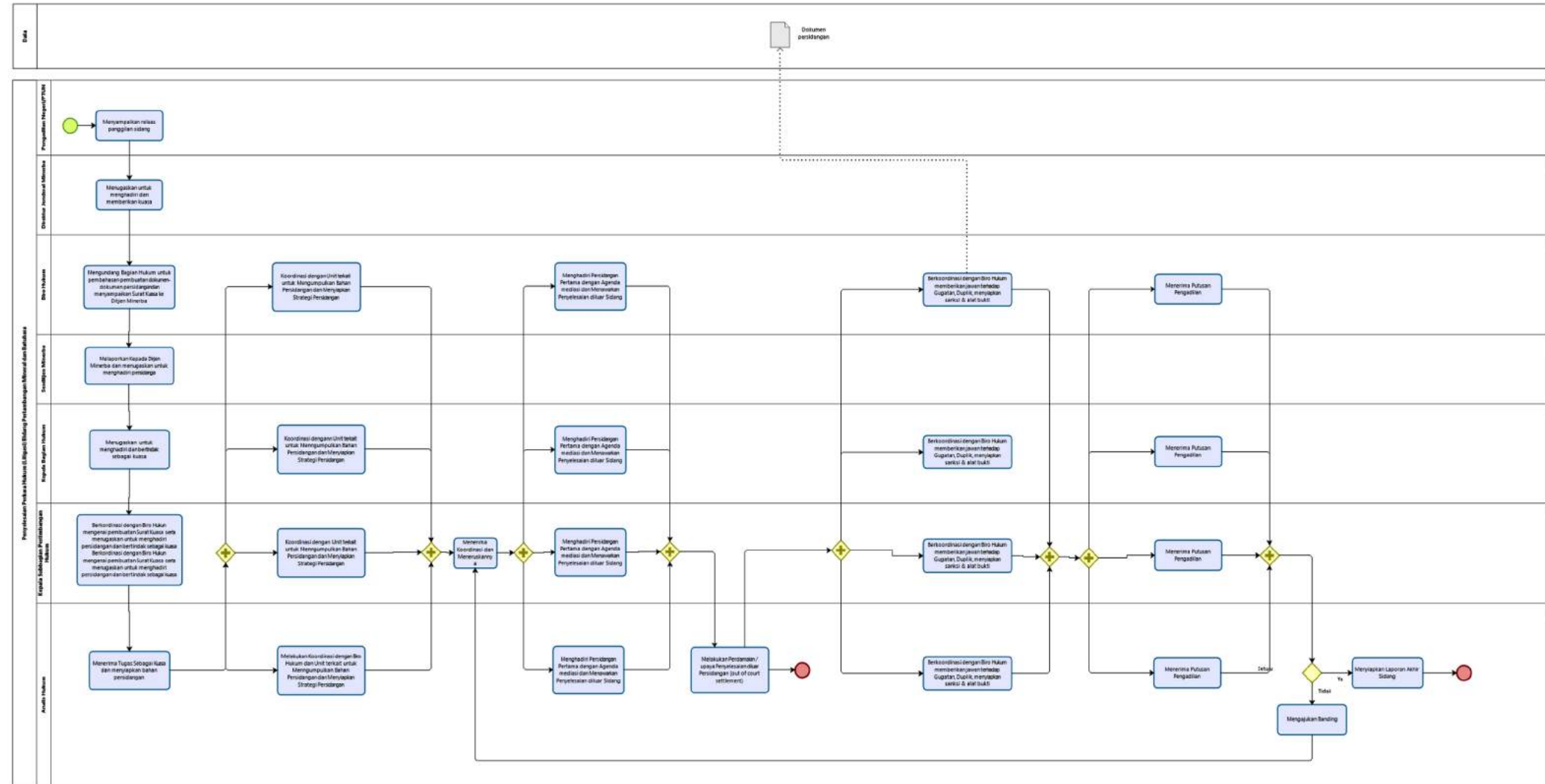
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Penelaahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sektor
Terkait Bidang Mineral dan Batubara



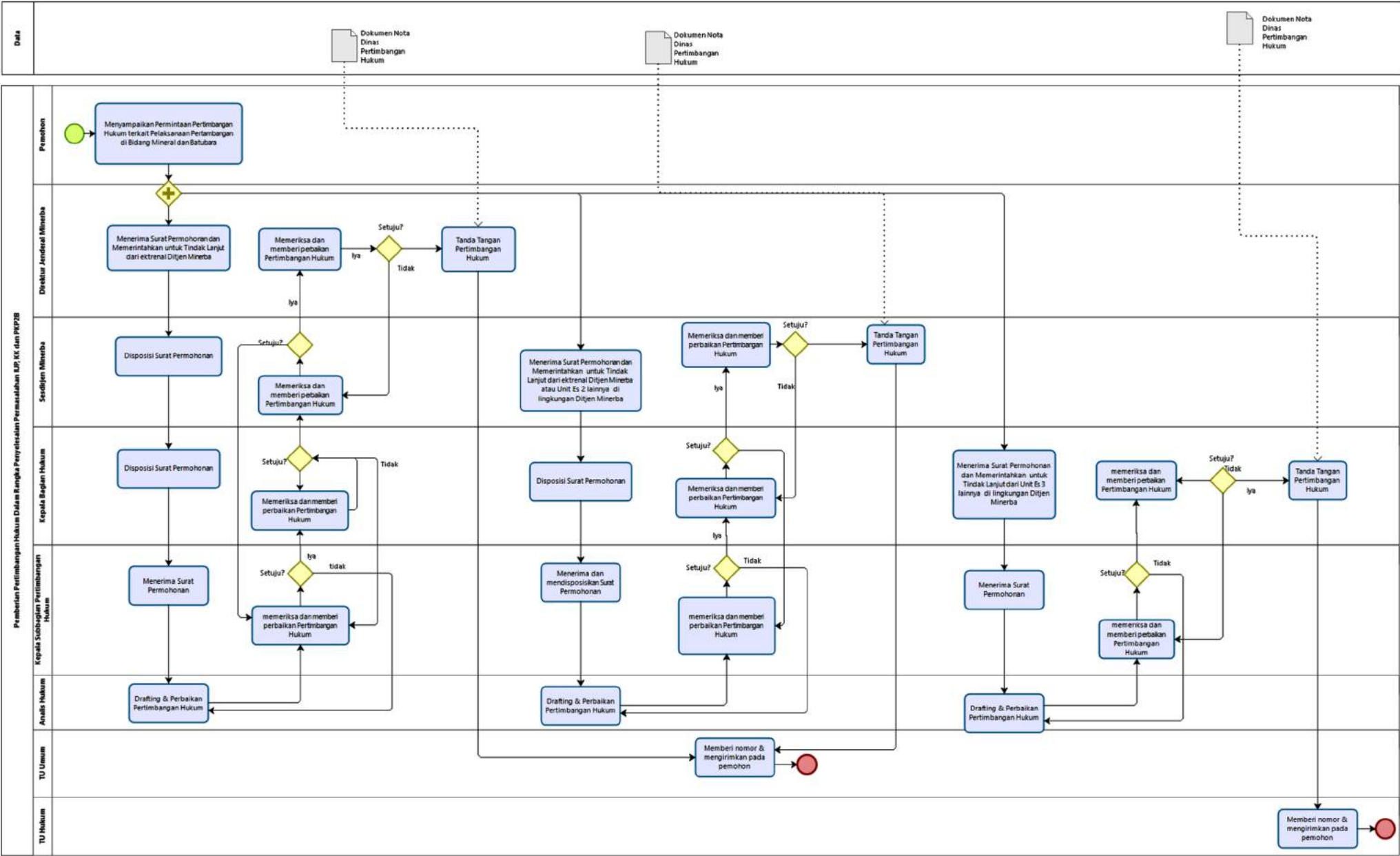
Subbagian Pertimbangan Hukum - Penyelesaian Perkara Hukum (Litigasi) Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Tergugat Menteri



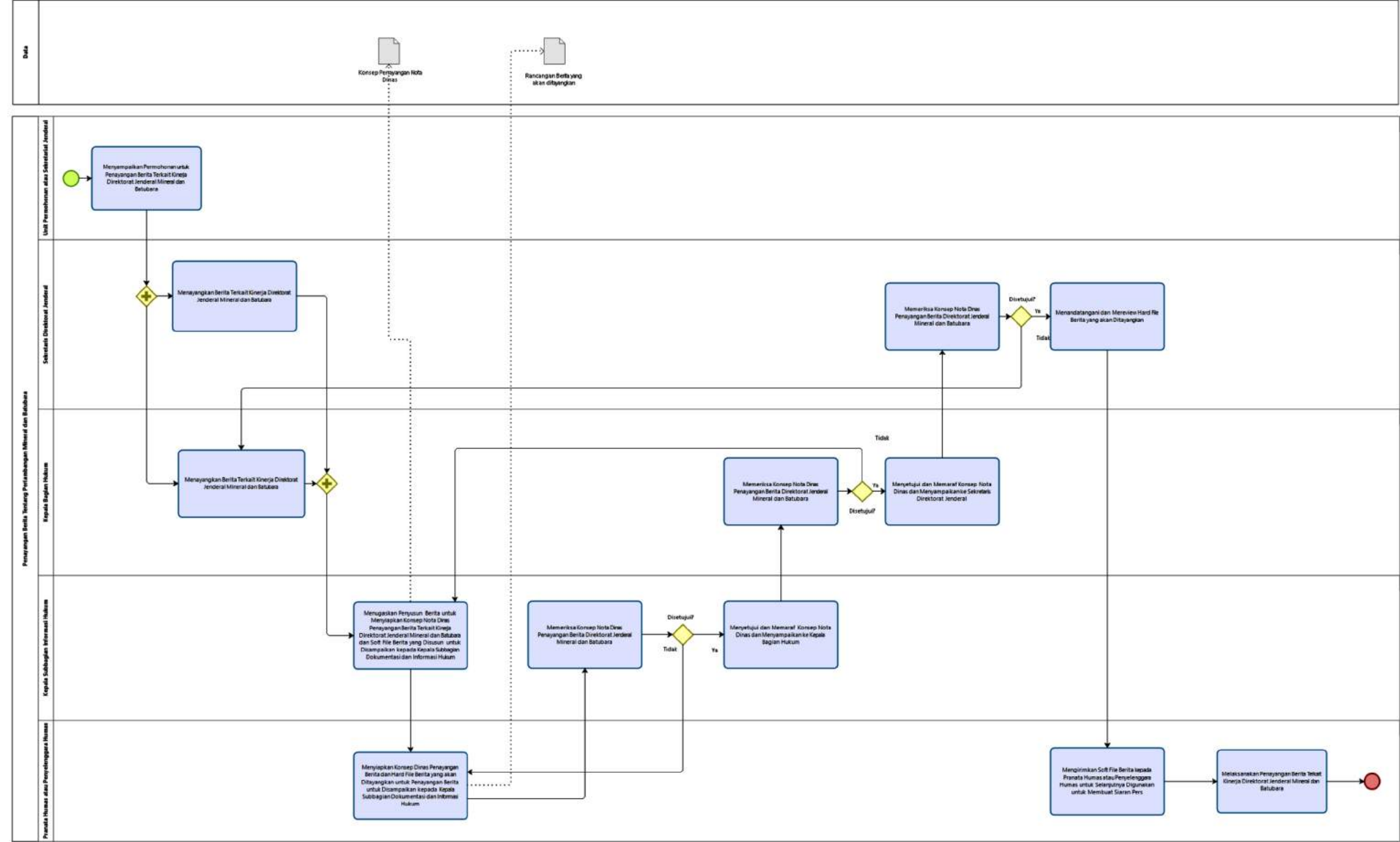
Subbagian Pertimbangan Hukum - Penyelesaian Perkara Hukum (Litigasi) Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Tergugat Dirjen



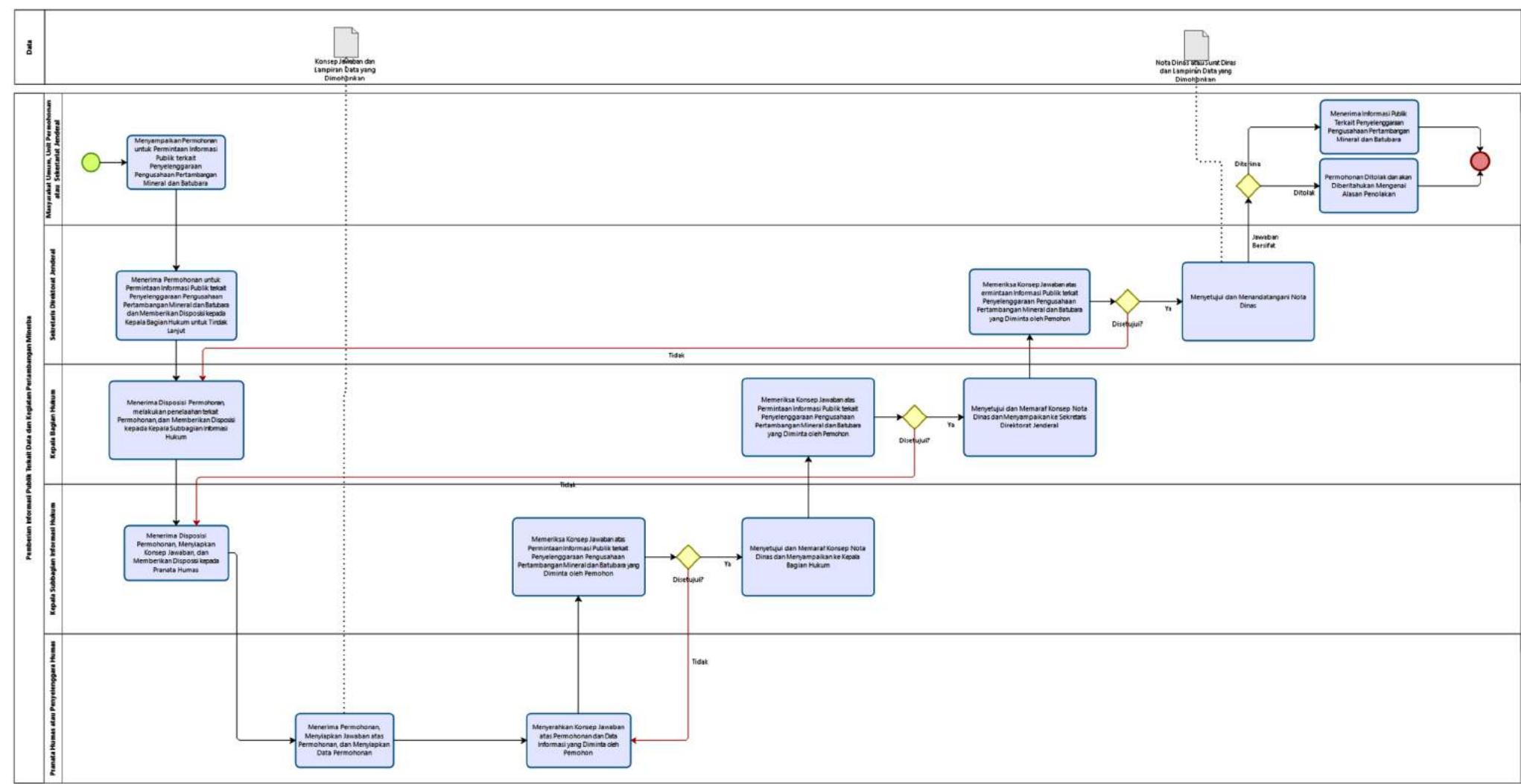
Subbagian Pertimbangan Hukum - Pemberian Pertimbangan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan IUP, KK dan PKP2B



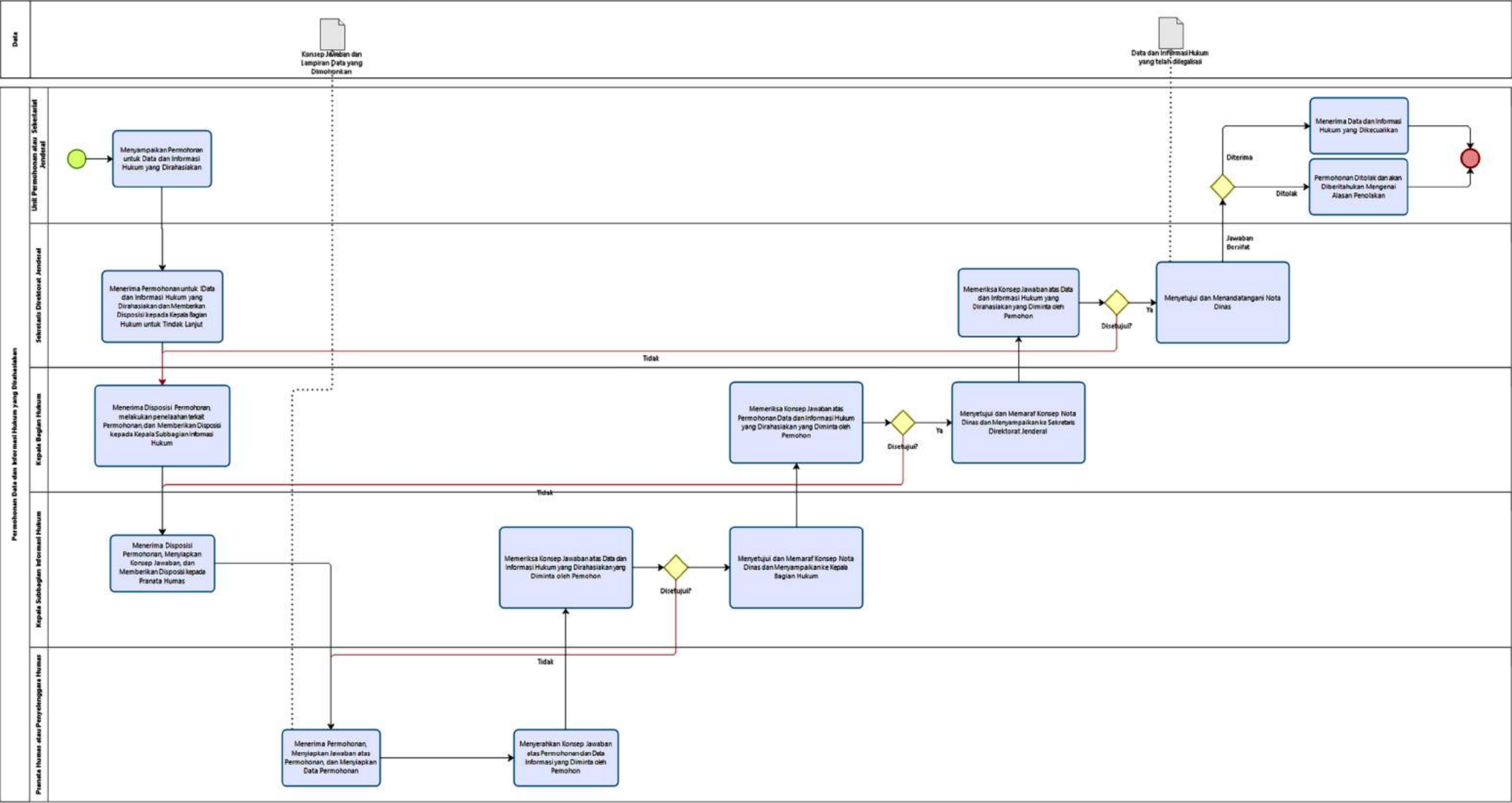
Subbagian Informasi Hukum - Penayangan Berita Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



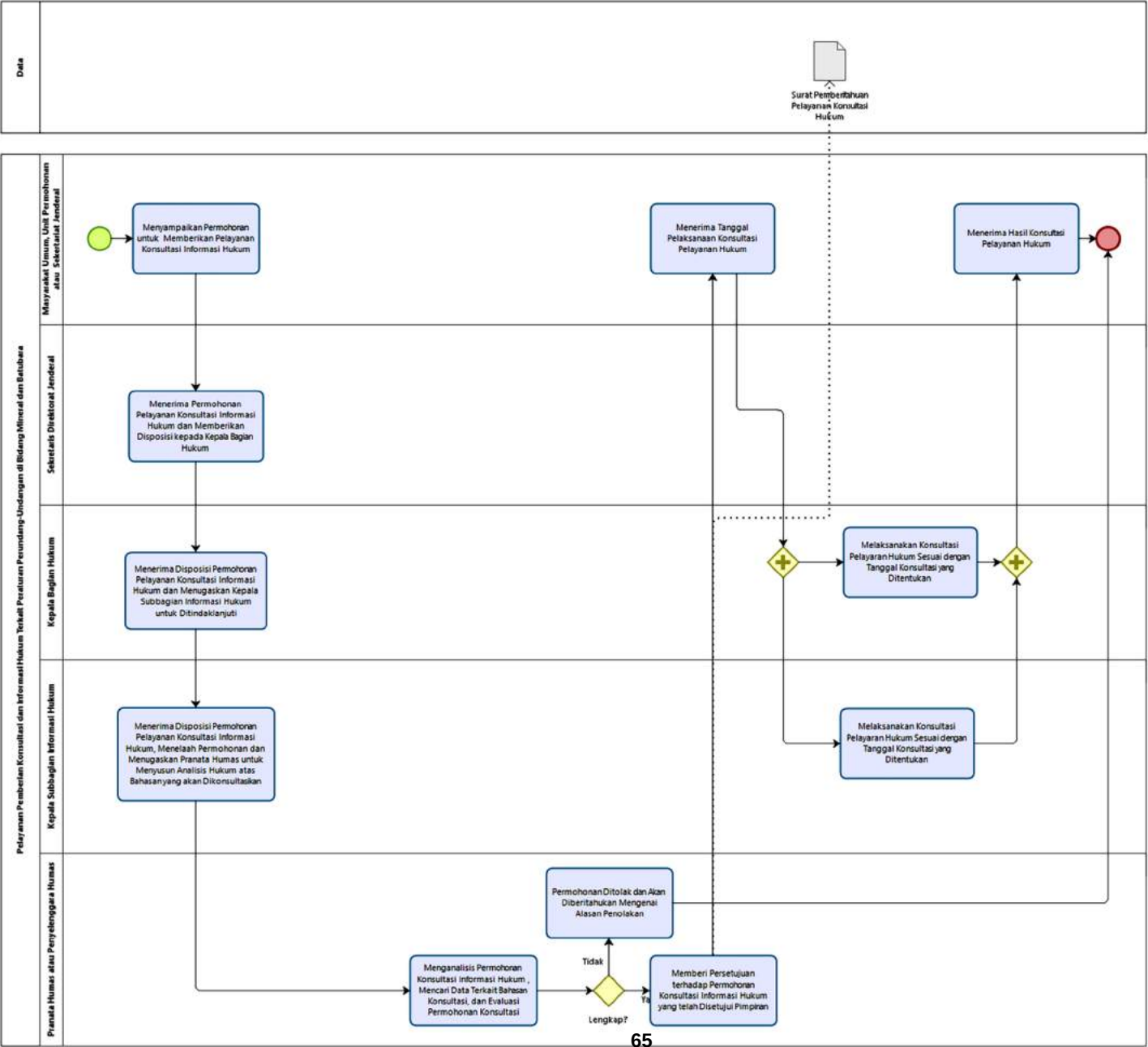
Subbagian Informasi Hukum - Pemberian Informasi Publik Terkait Kegiatan Pertambangan Minerba



Subbagian Informasi Hukum - Permohonan Data dan Informasi Hukum yang Dirahasiakan



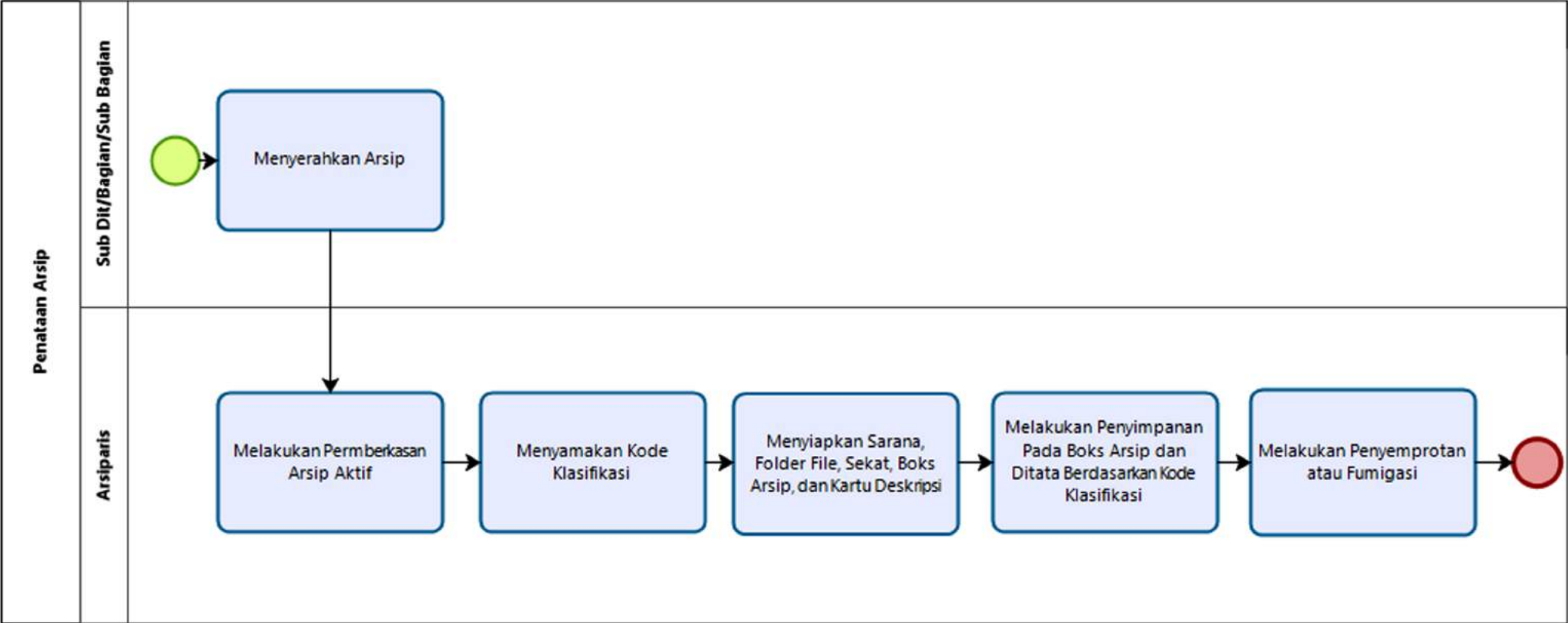
Subbagian Informasi Hukum - Pelayanan Pemberian Konsultasi dan Informasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Mineral dan Batubara



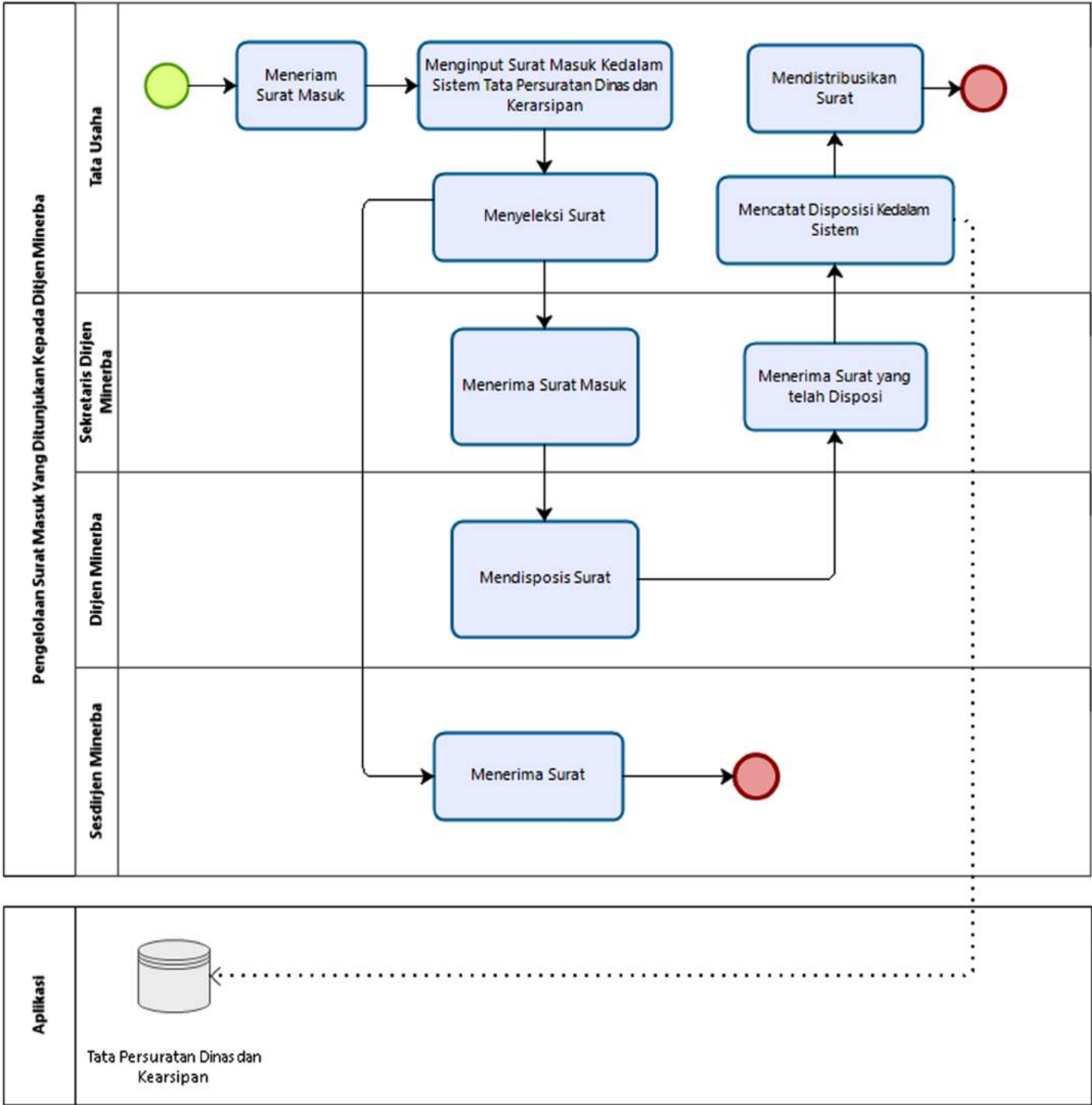
Pengelolaan Umum, Kepegawaian dan Organisasi

Pengelolaan Umum, Kepegawaian, Organisasi	Subbagian Tata Usaha	 Prosedur Pembuatan Surat Dinas	 Peminjaman Arsip	 Pengelolaan Persuratan Masuk	 Penataan Arsip Inaktif
	Perlengkapan dan Rumah Tangga	 Pemeliharaan Gedung Mayor	 Pemeliharaan Gedung Minor	 Penatausahaan Persediaan Barang Pakai Habis	 Penatausahaan dan Pelaporan BMN
	Subbagian Kepegawaian dan Organisasi	 Pengelolaan Kepegawaian	 Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Penempatan Daerah	 Manajemen Organisasi	 Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

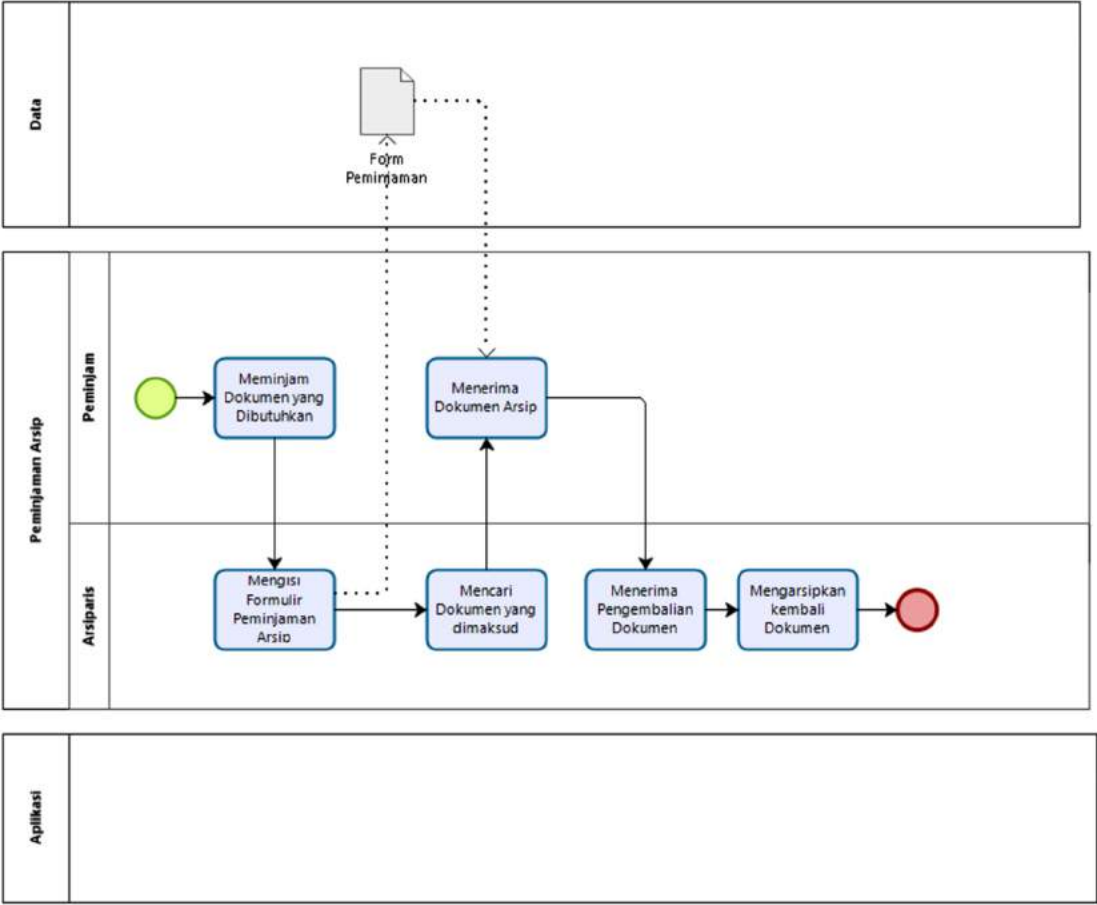
Subbagian Tata Usaha - Penataan Arsip



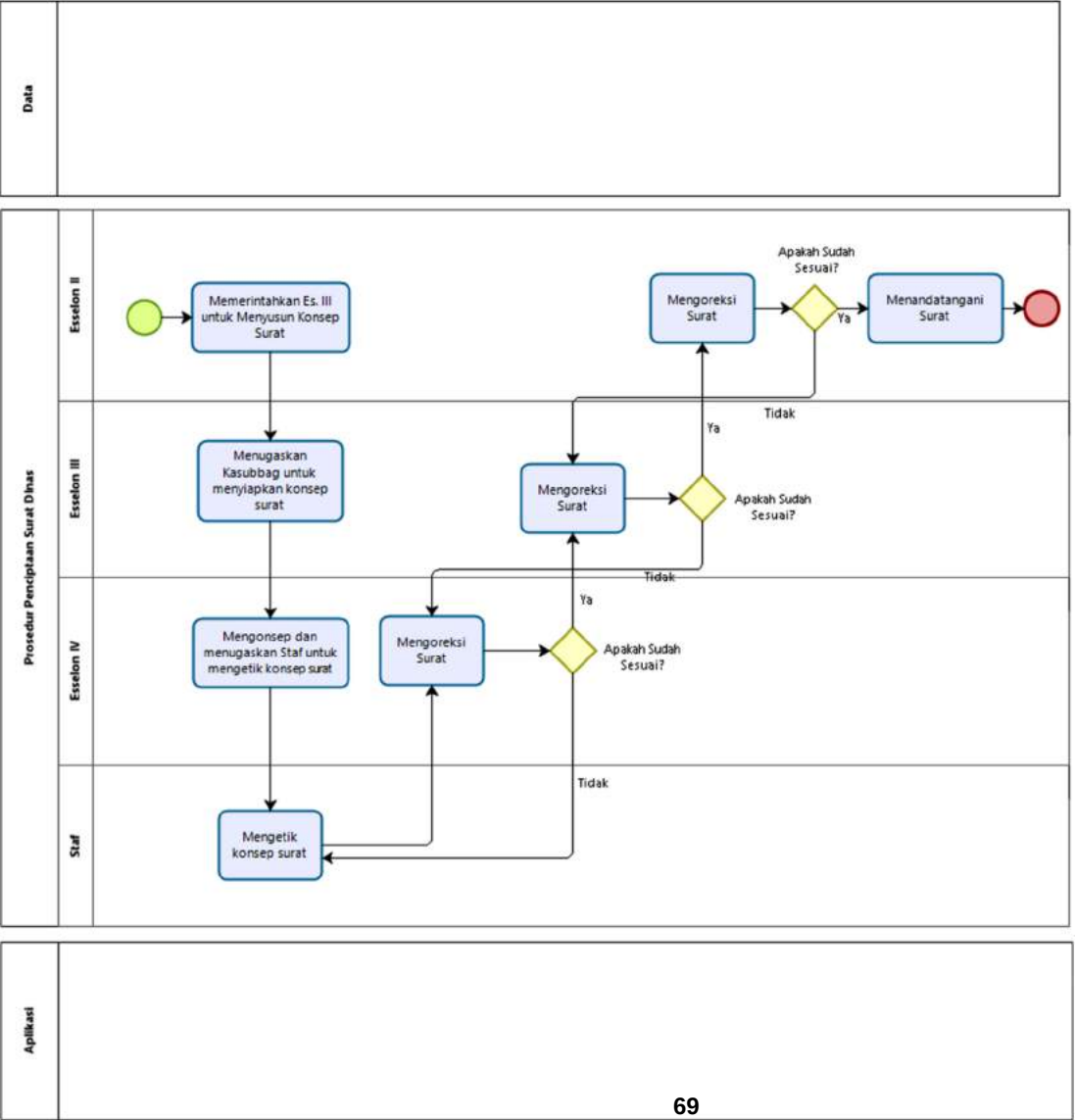
Subbagian Tata Usaha - Pengelolaan Persuratan Masuk



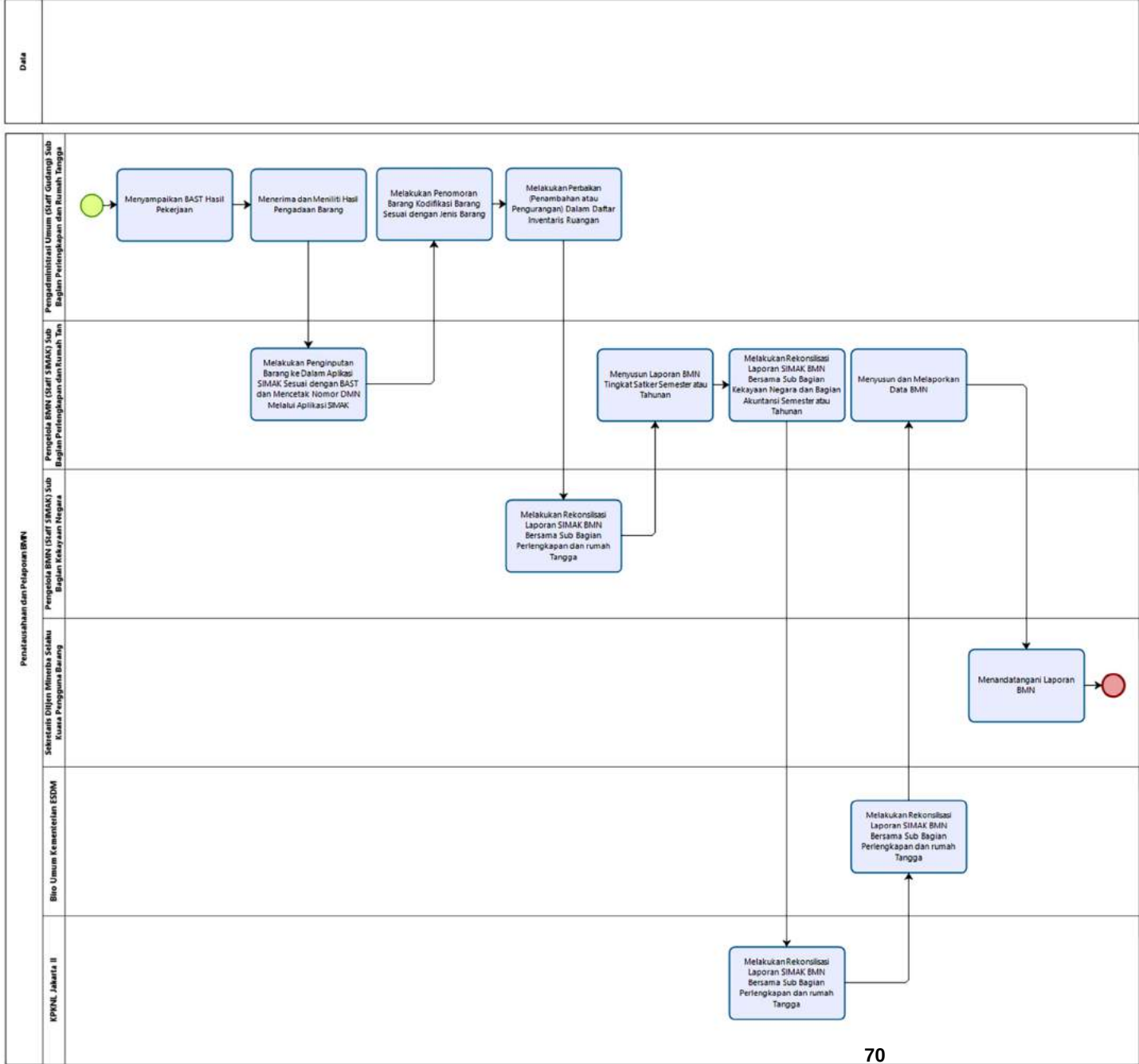
Subbagian Tata Usaha - Peminjaman Arsip



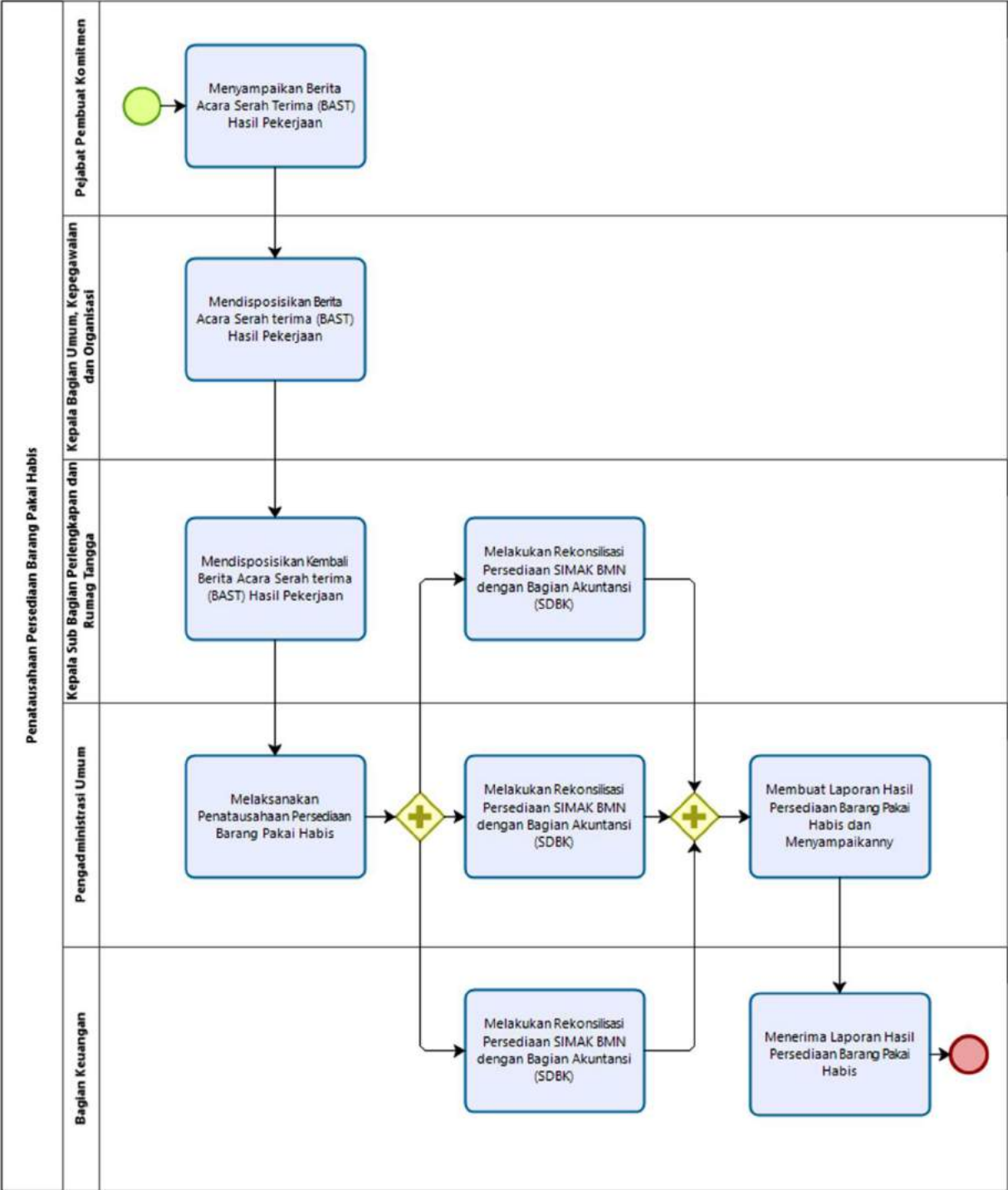
Subbagian Tata Usaha - Prosedur Penciptaan Surat Dinas



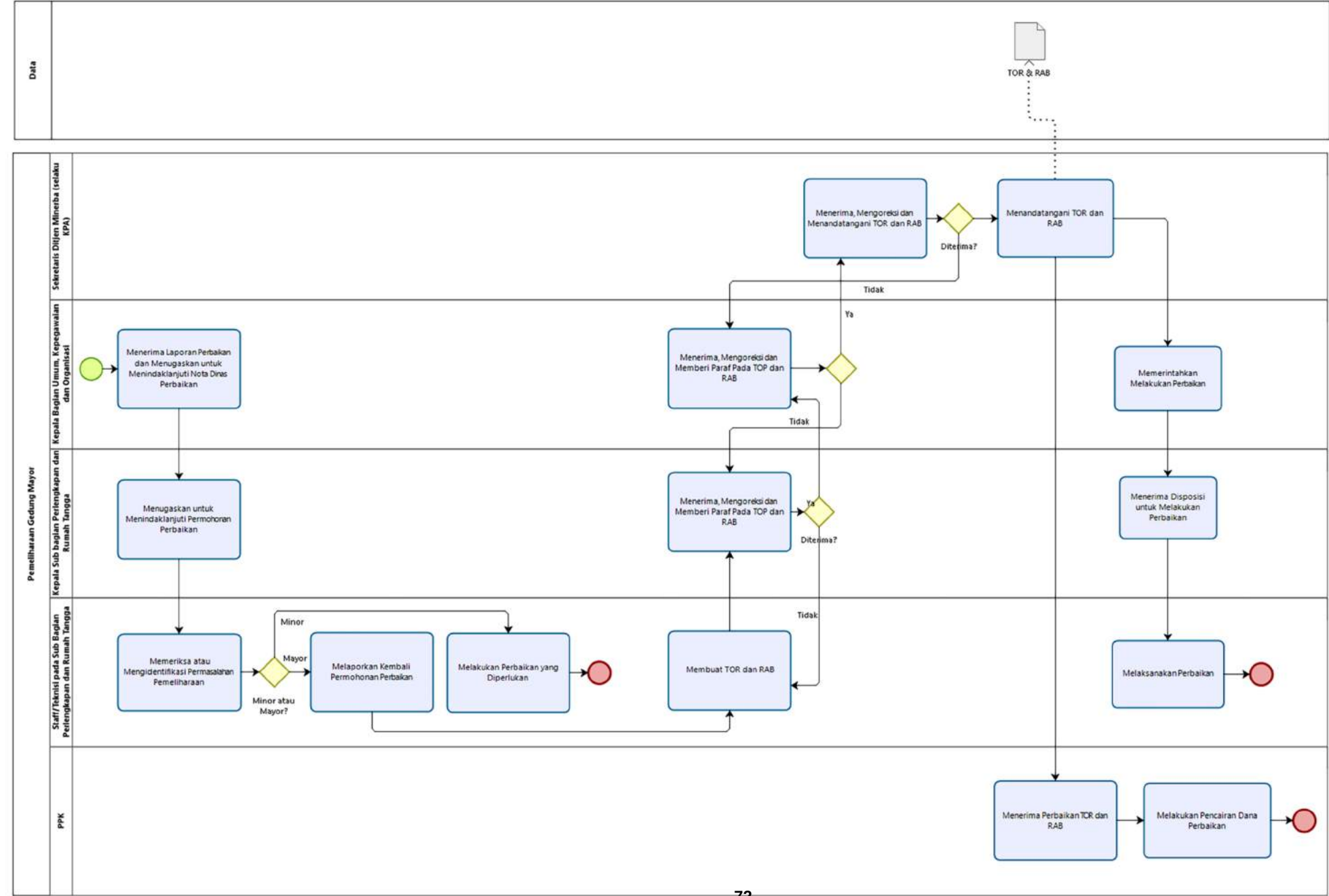
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga - Penatausahaan dan Pelaporan BMN



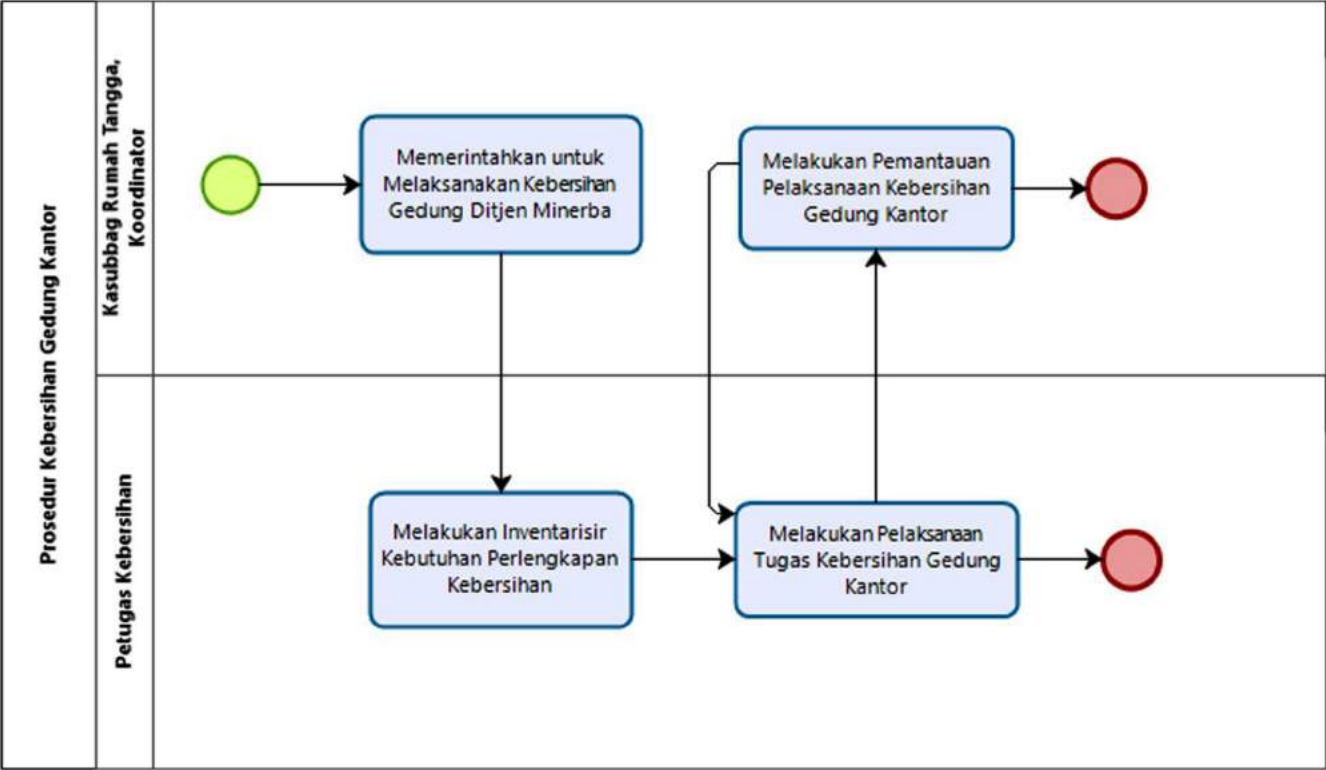
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga - Penatausahaan Persediaan Barang Pakai Habis



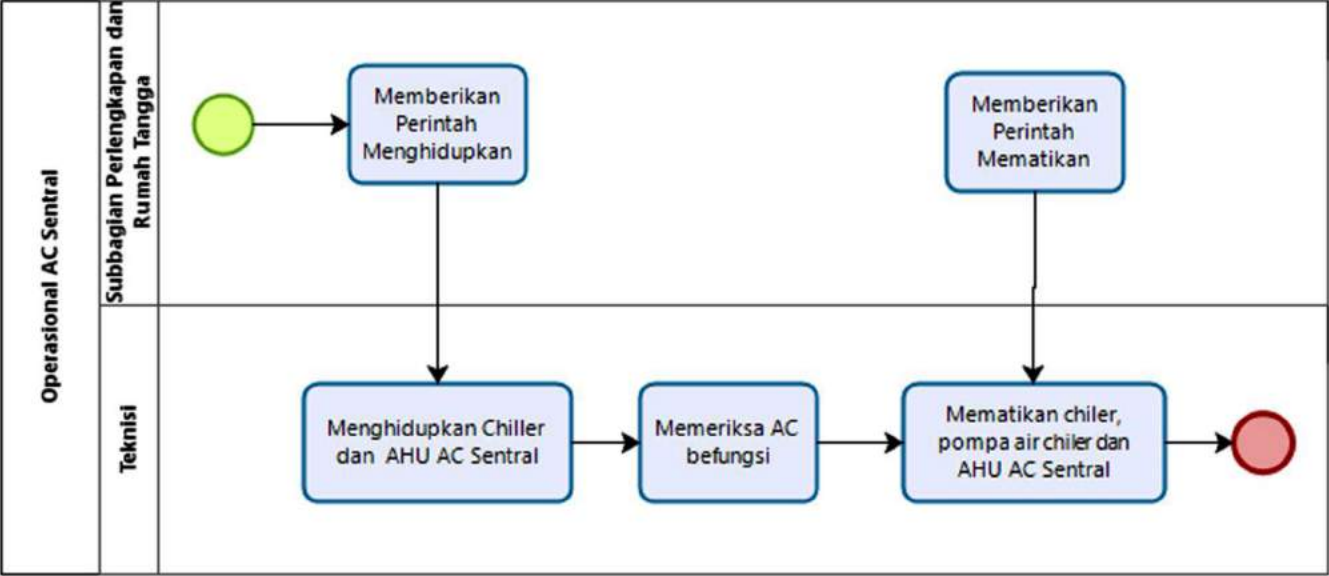
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga - Pemeliharaan Gedung Mayor



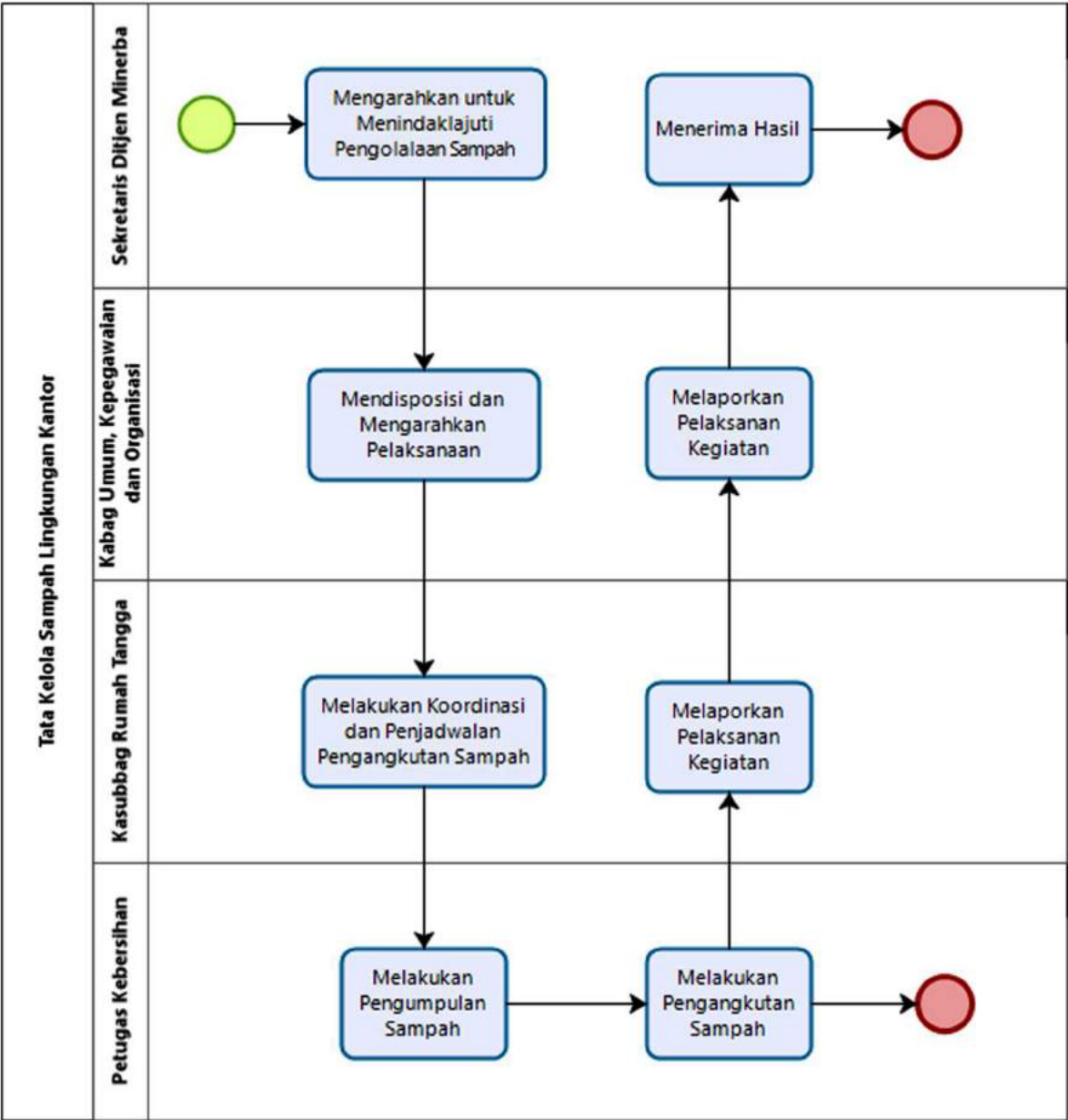
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga - Prosedur Kebersihan Gedung Kantor



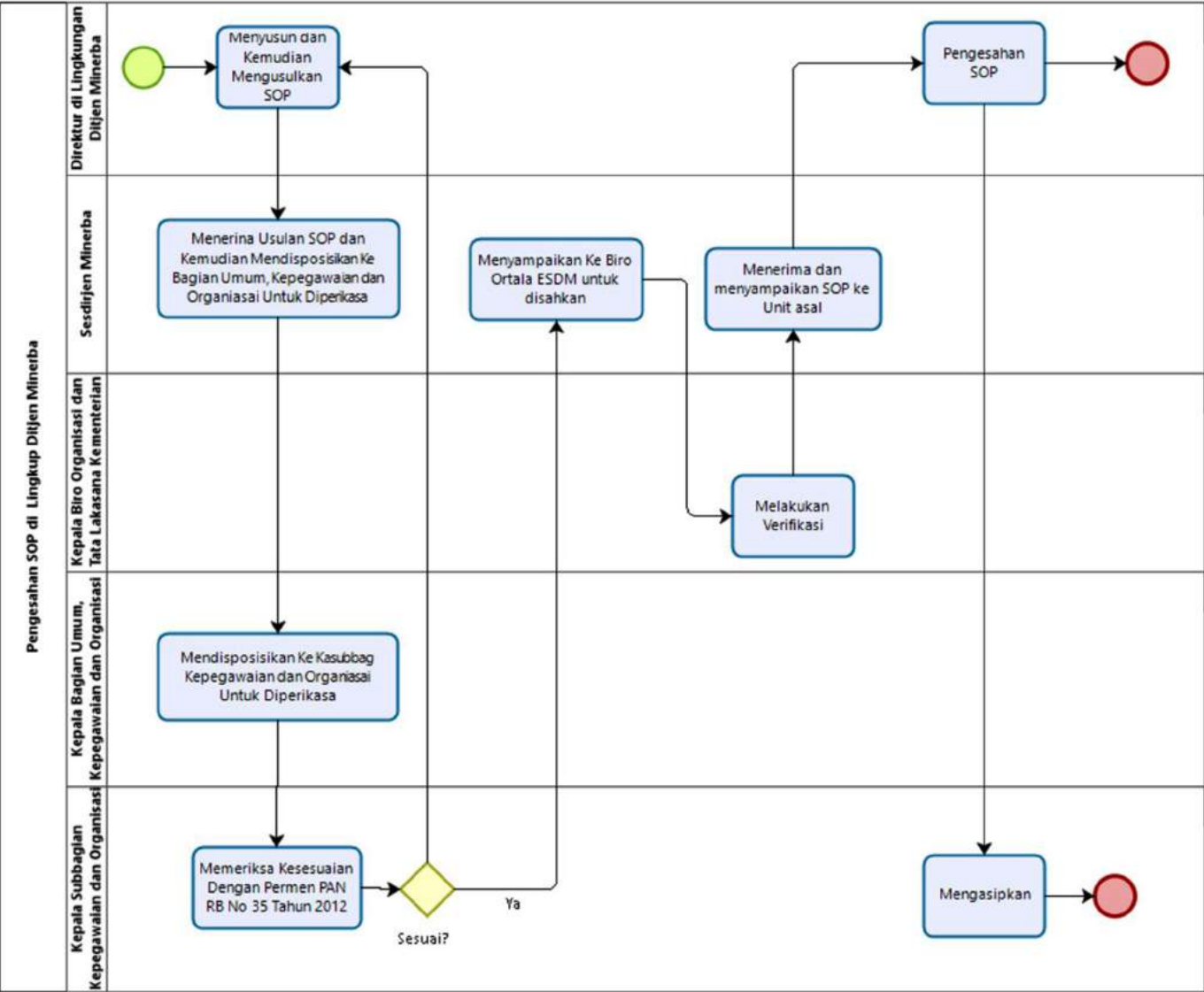
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga - Operasional AC Sentral



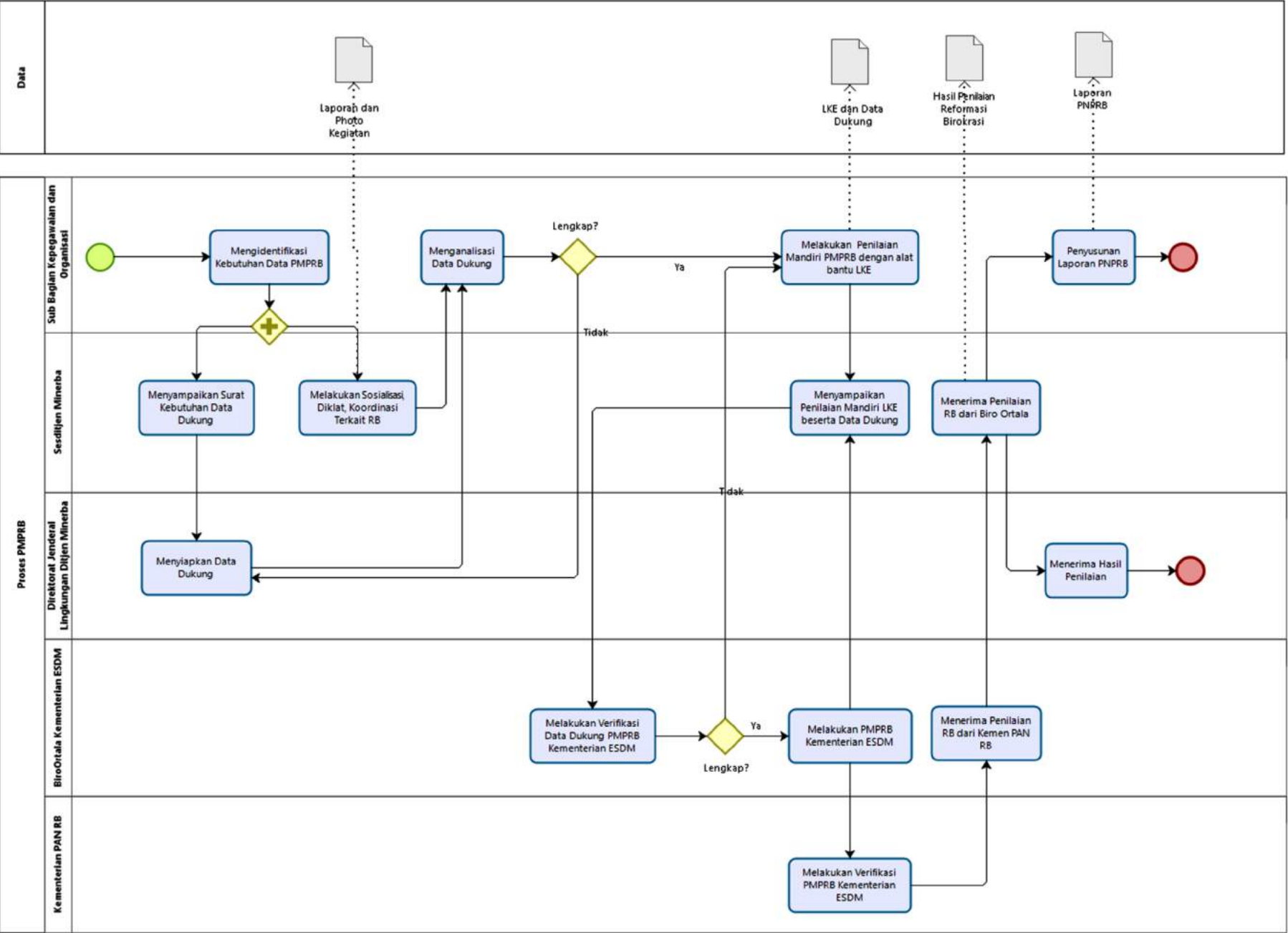
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga - Pengelolaan Sampah Lingkunga Kantor



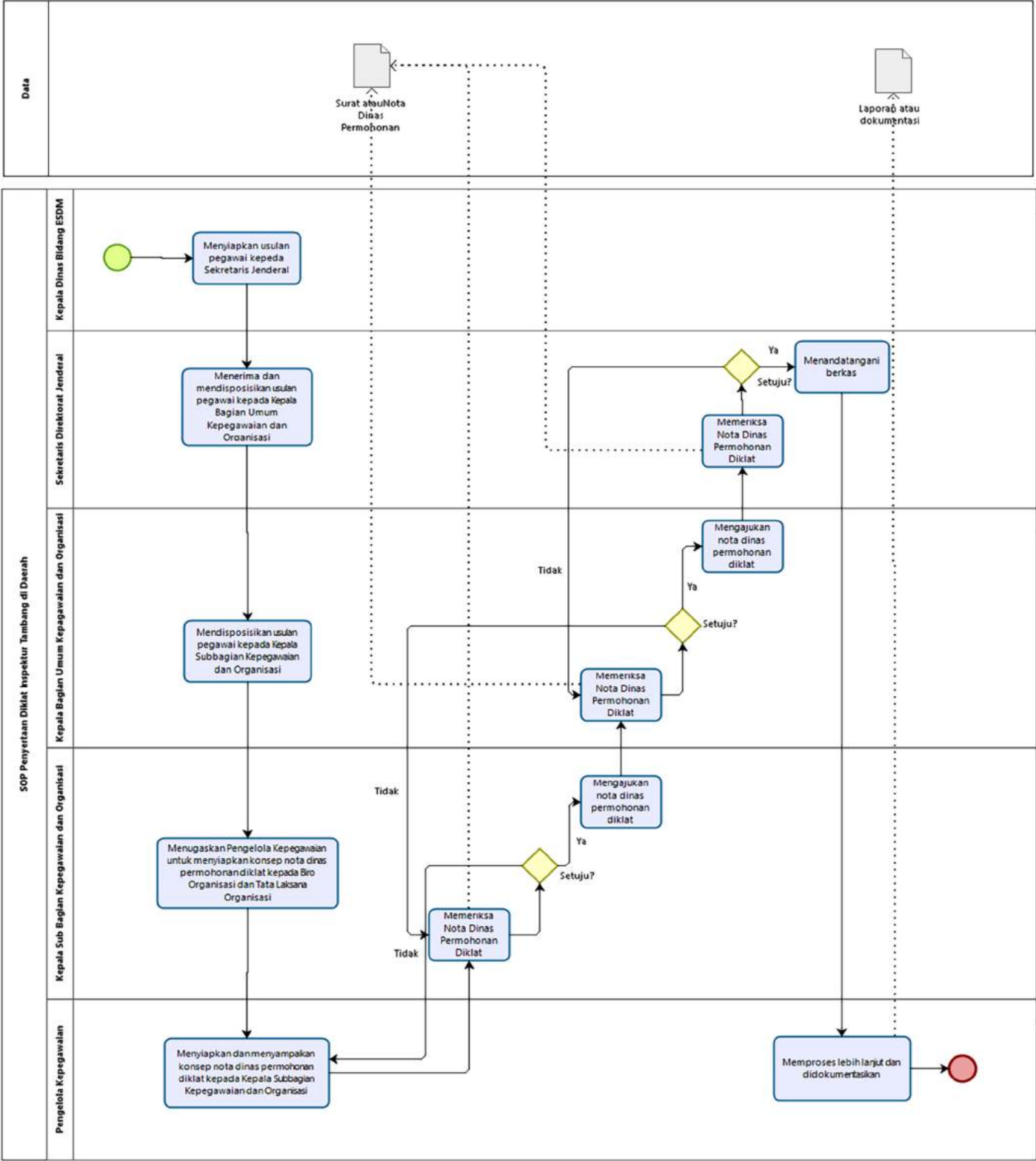
Subbag Kepegawaian dan Organisasi – Pengesahan SOP



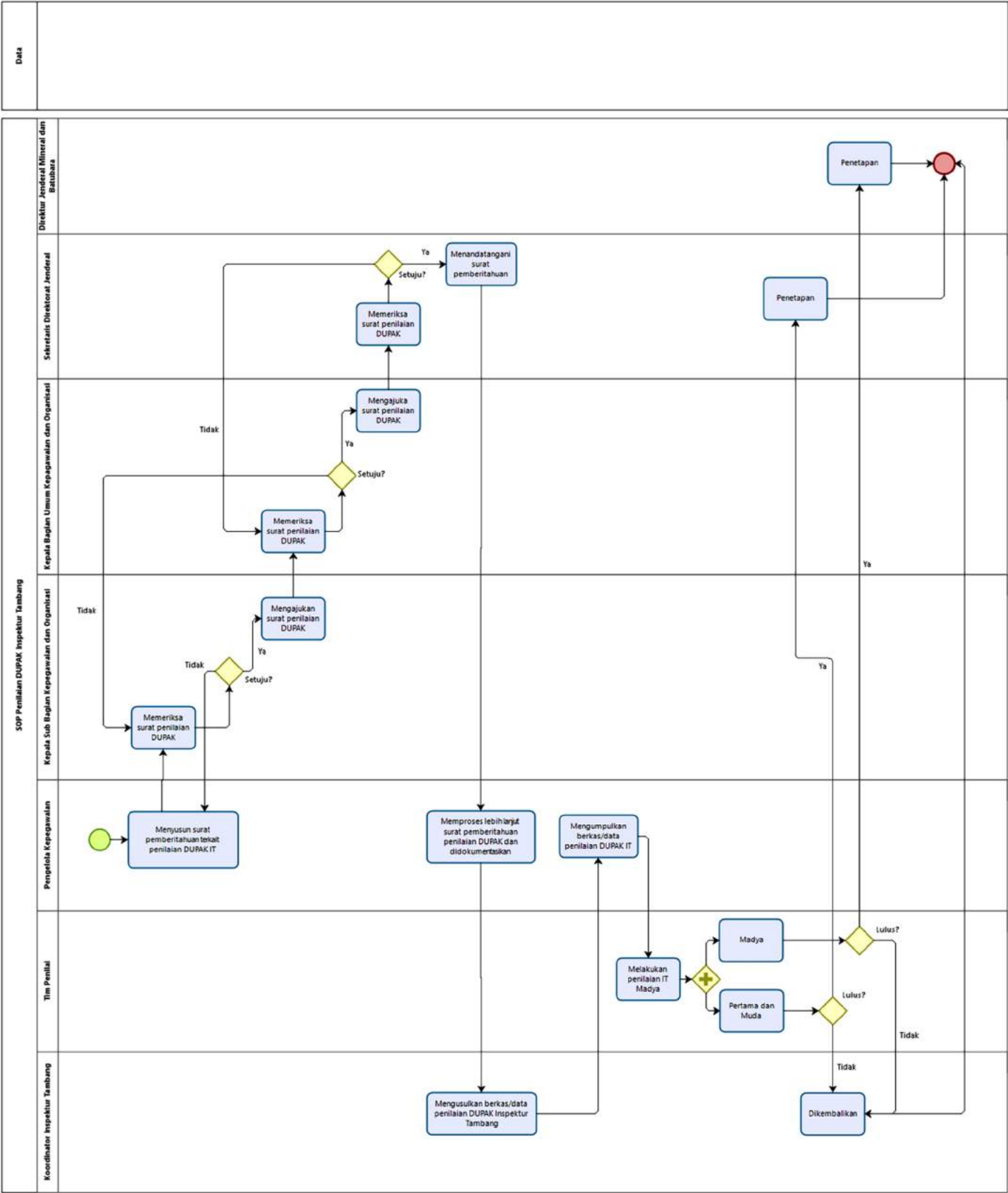
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi - Proses Penilaian ZI, AWBK dan WBBM



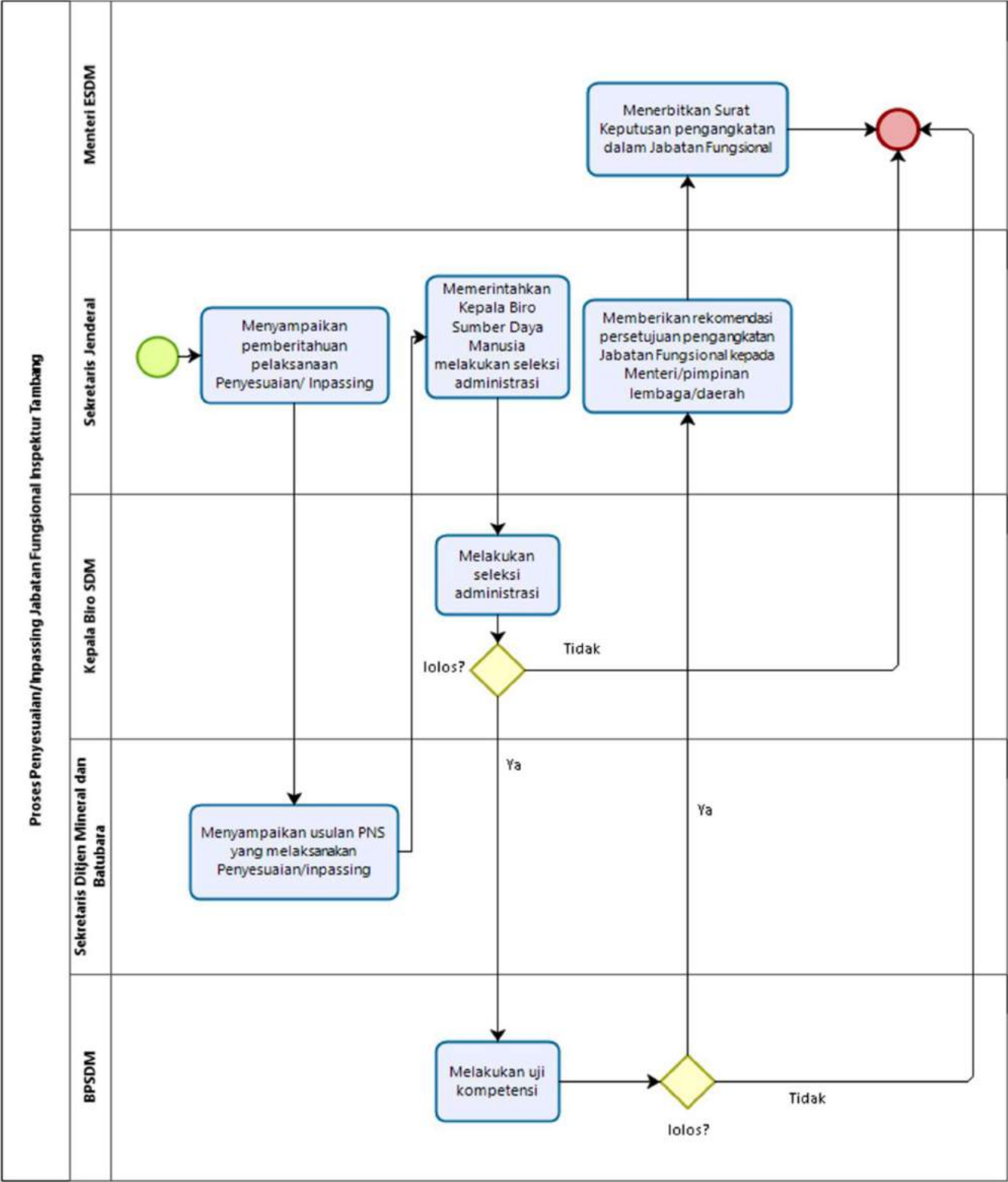
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Penyertaan Diklat Inspektur Tambang Daerah



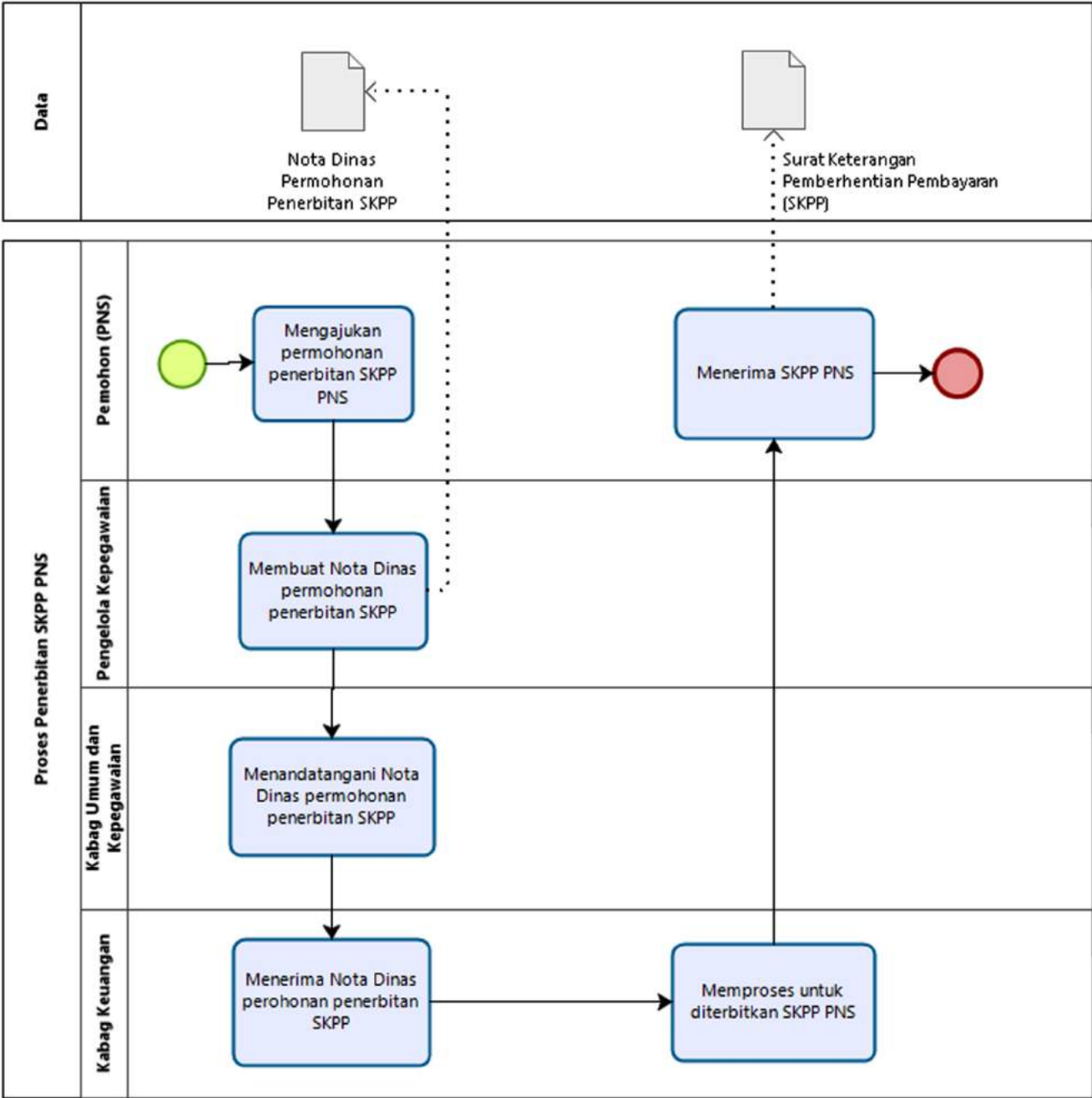
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Penilaian DUPAK Inspektur Tambang



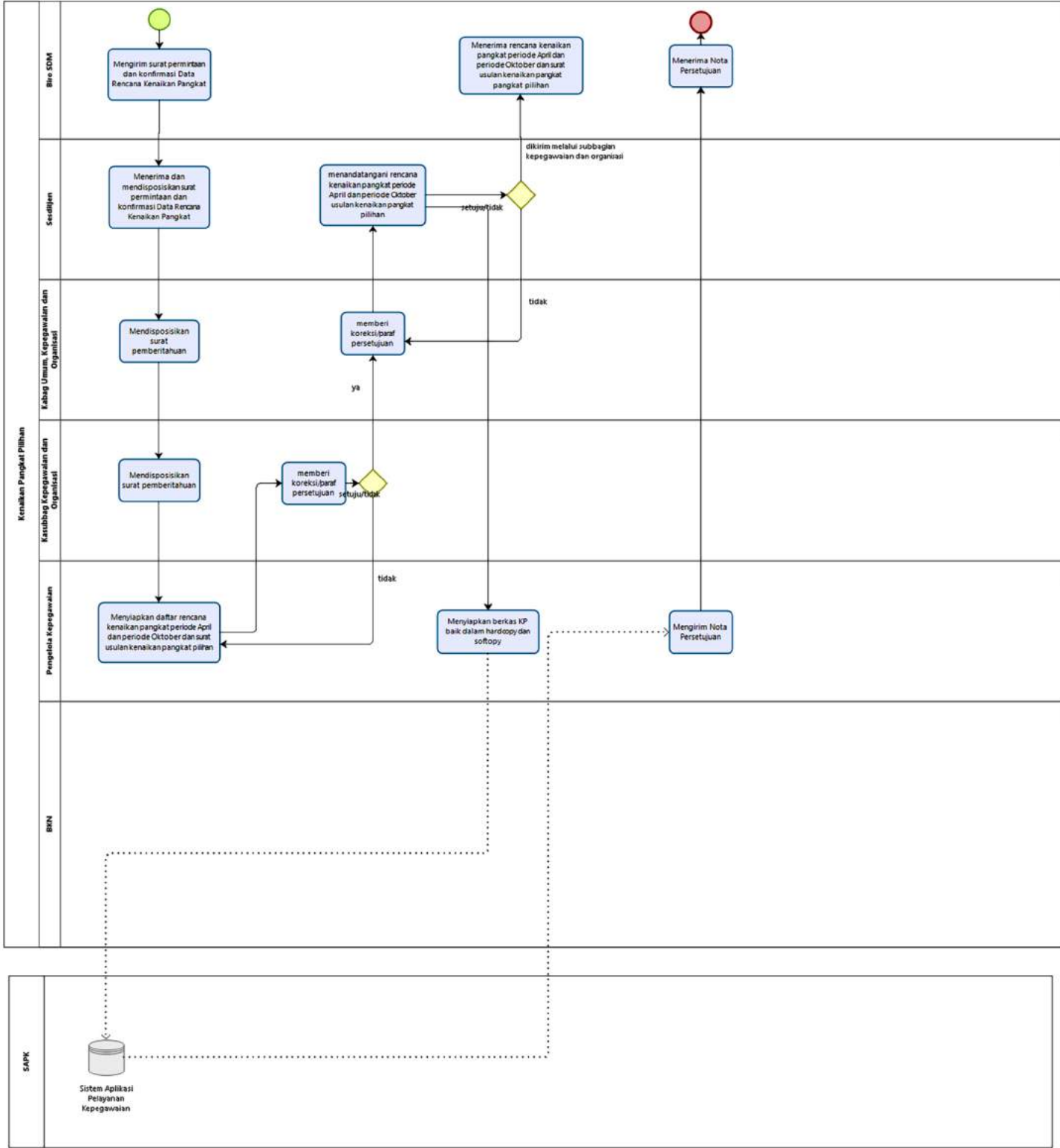
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Inpasing IT Daerah



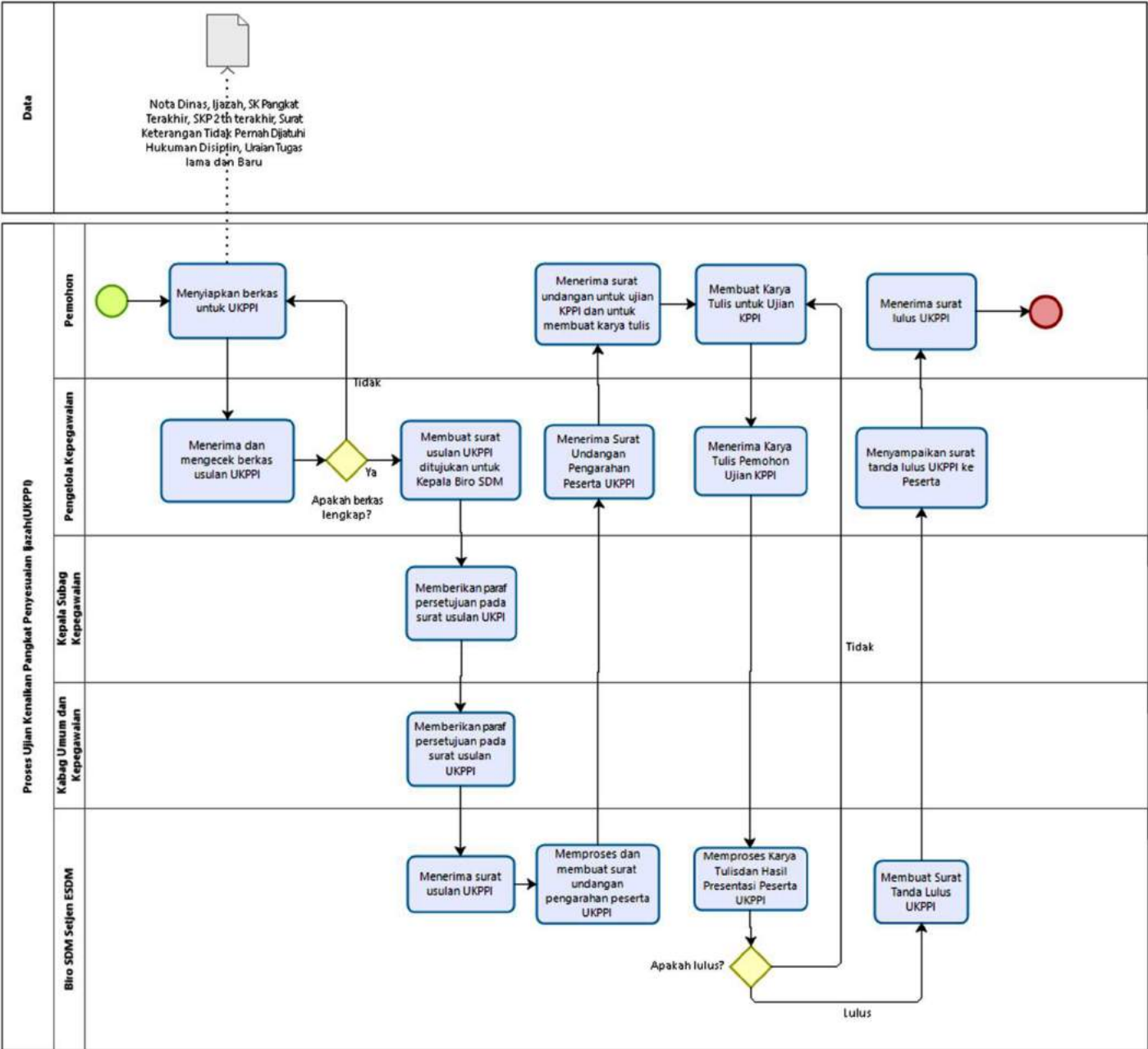
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Penerbitan SKPP PNS, Uang Makan



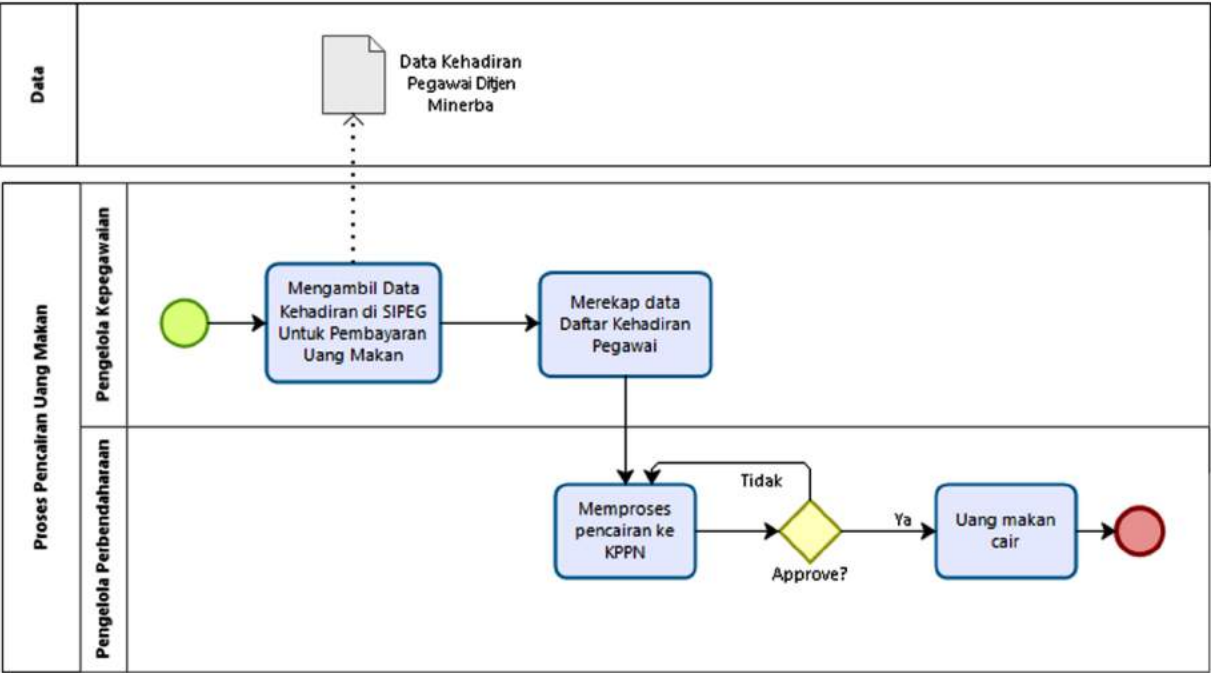
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Kenaikan Pangkat Pilihan



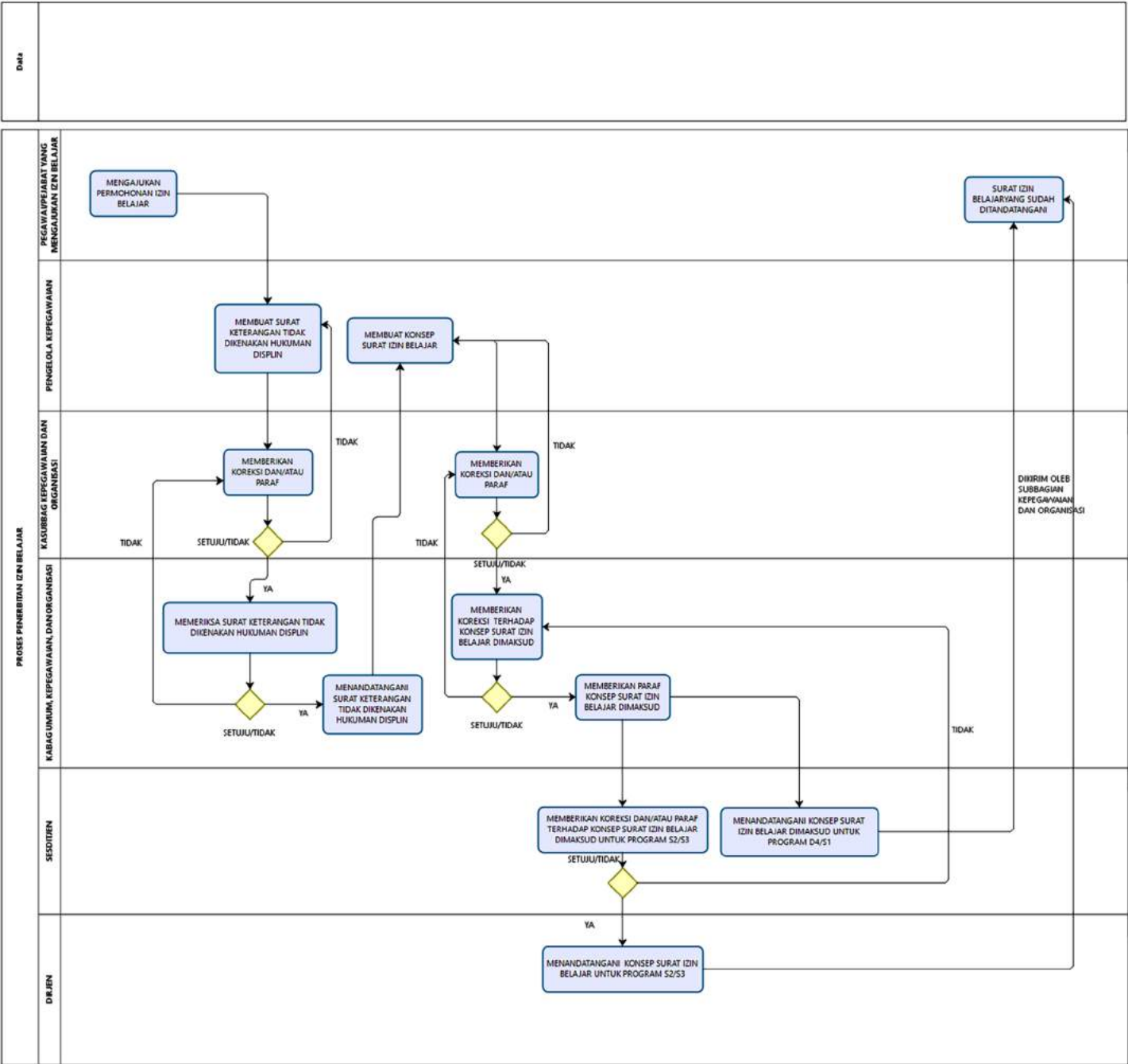
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses UKPPI PNS



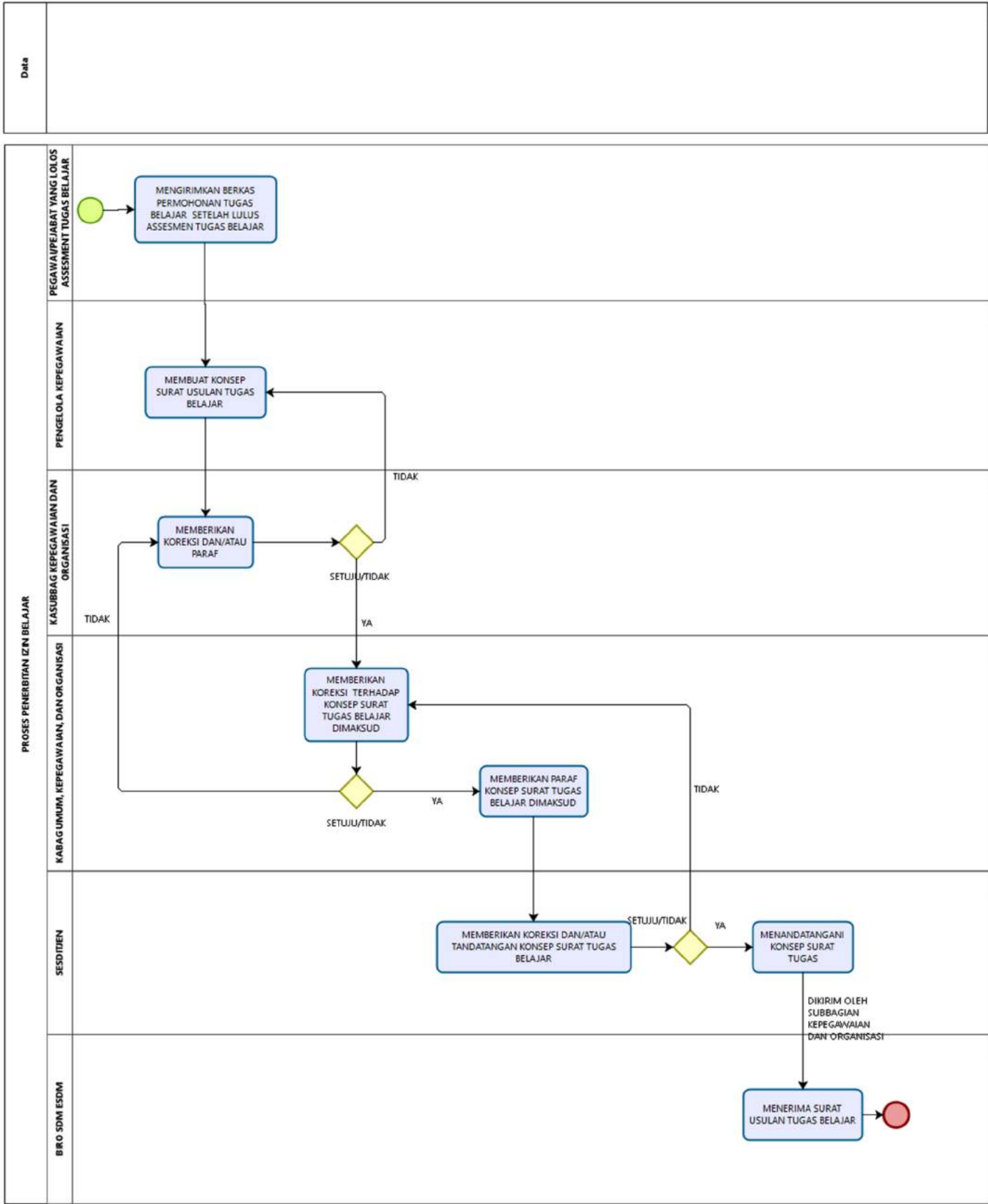
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Pencairan Uang Makan



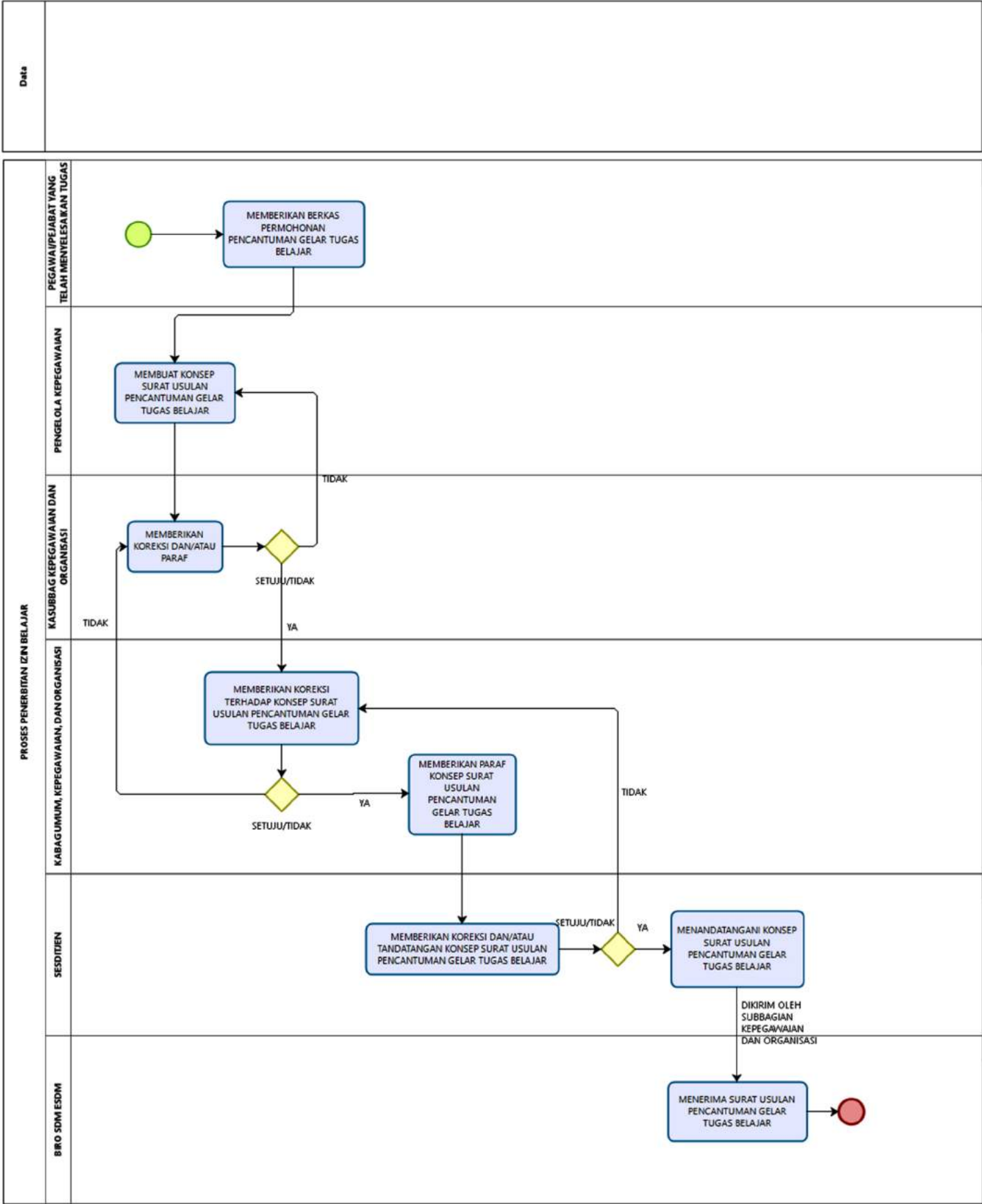
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Pengembangan Pegawai Program Izin Belajar



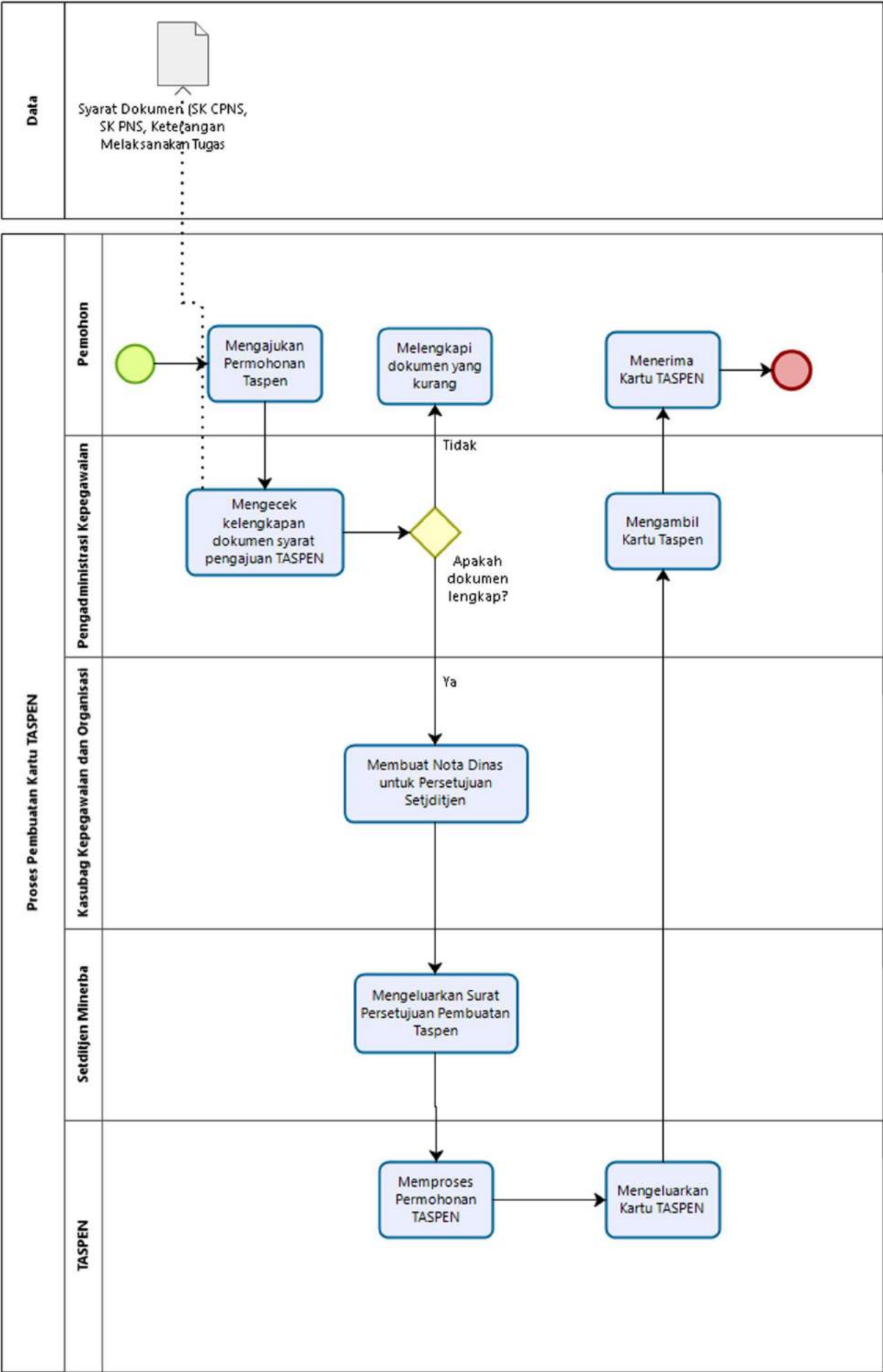
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Pengembangan Pegawai Program Tugas Belajar



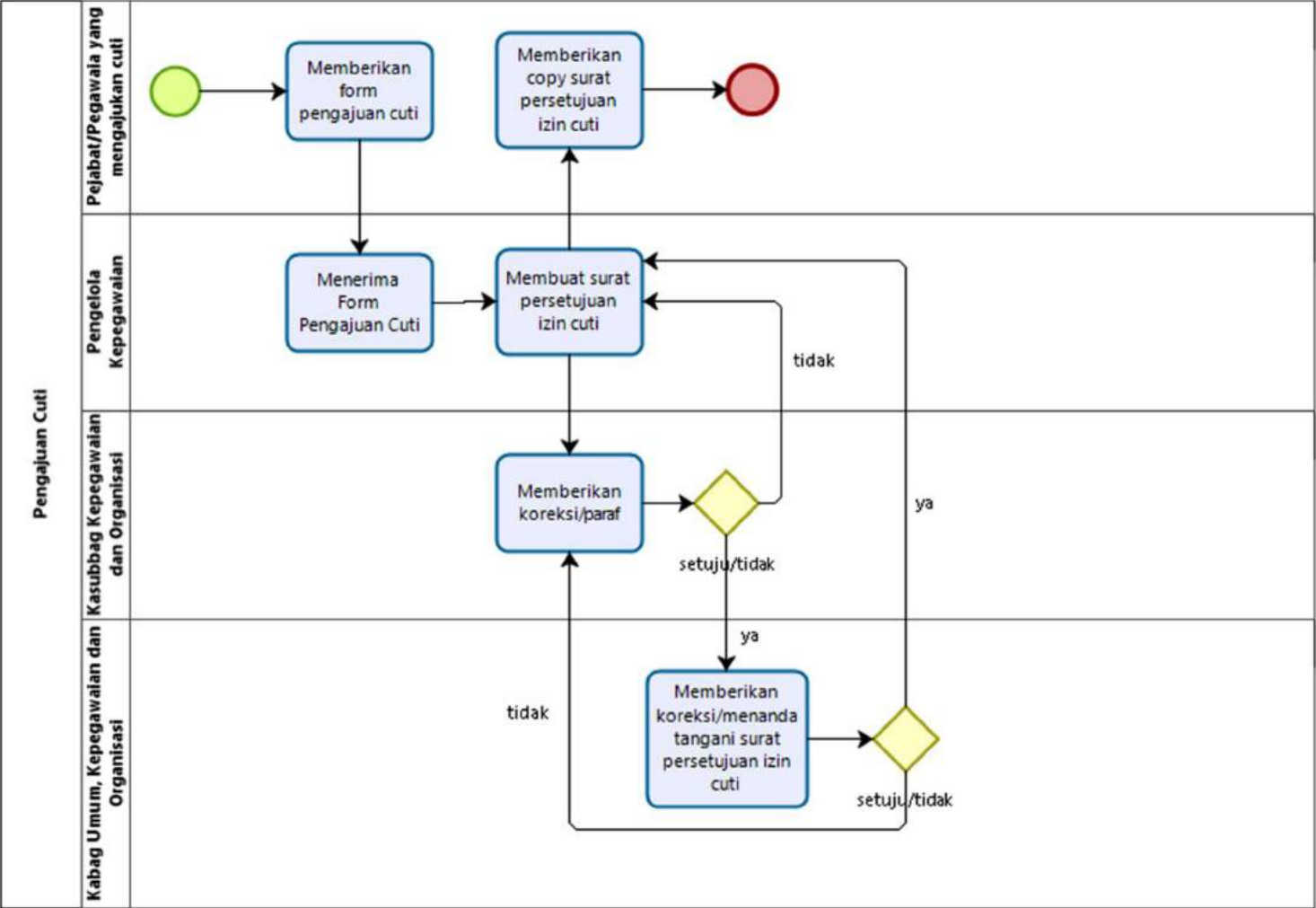
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Pengakuan dan Pencantuman Gelar



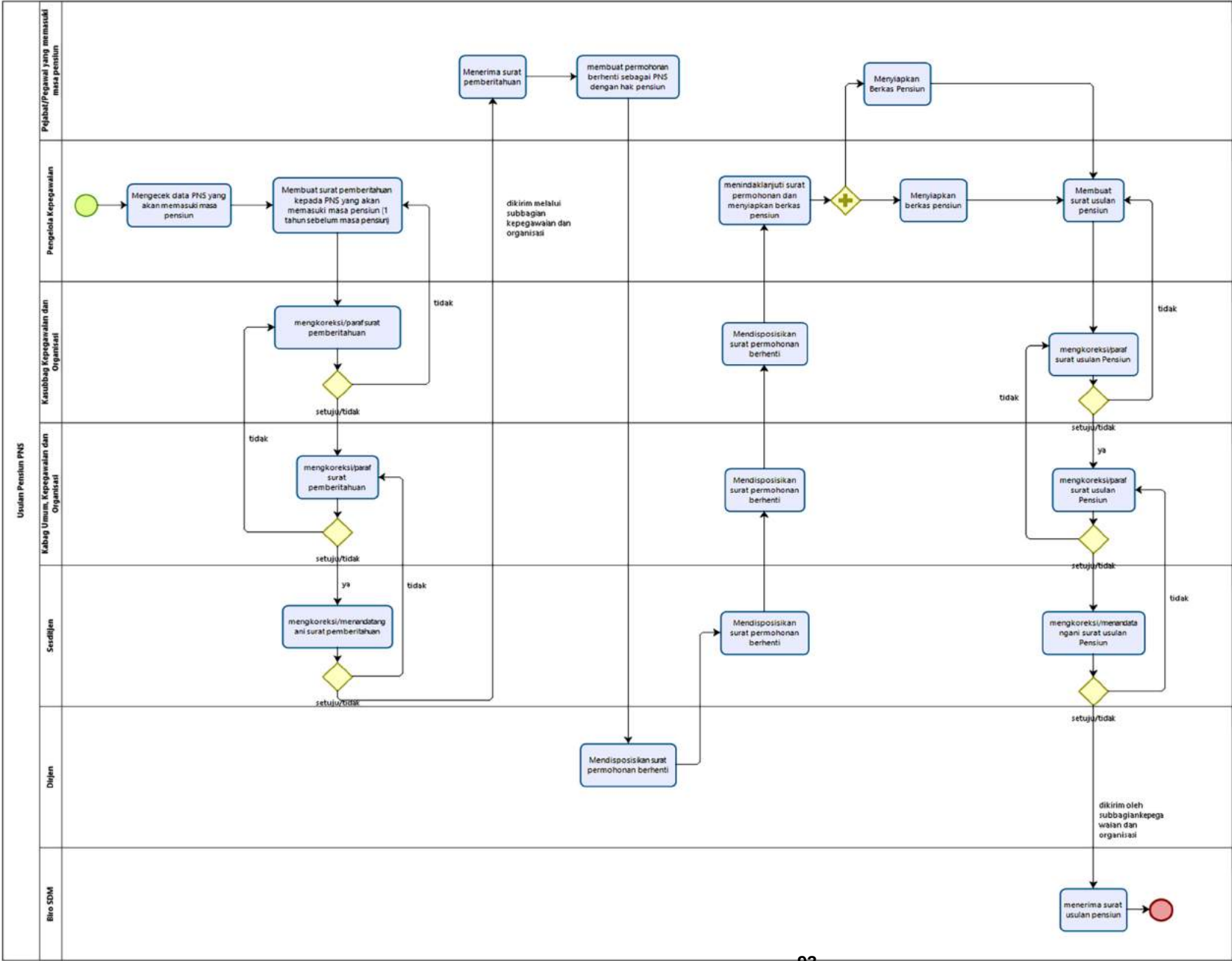
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses usulan TASPEN



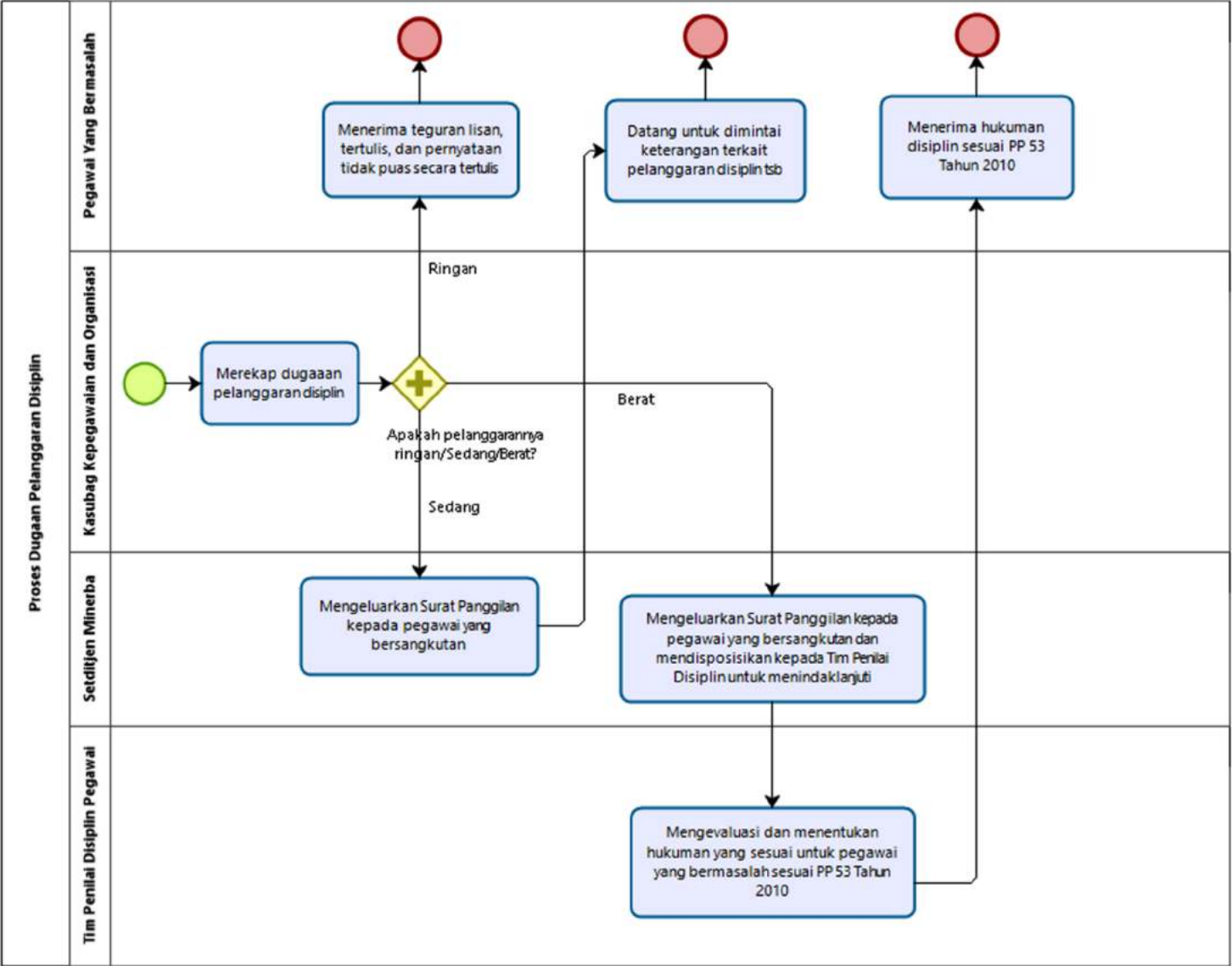
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Cuti PNS



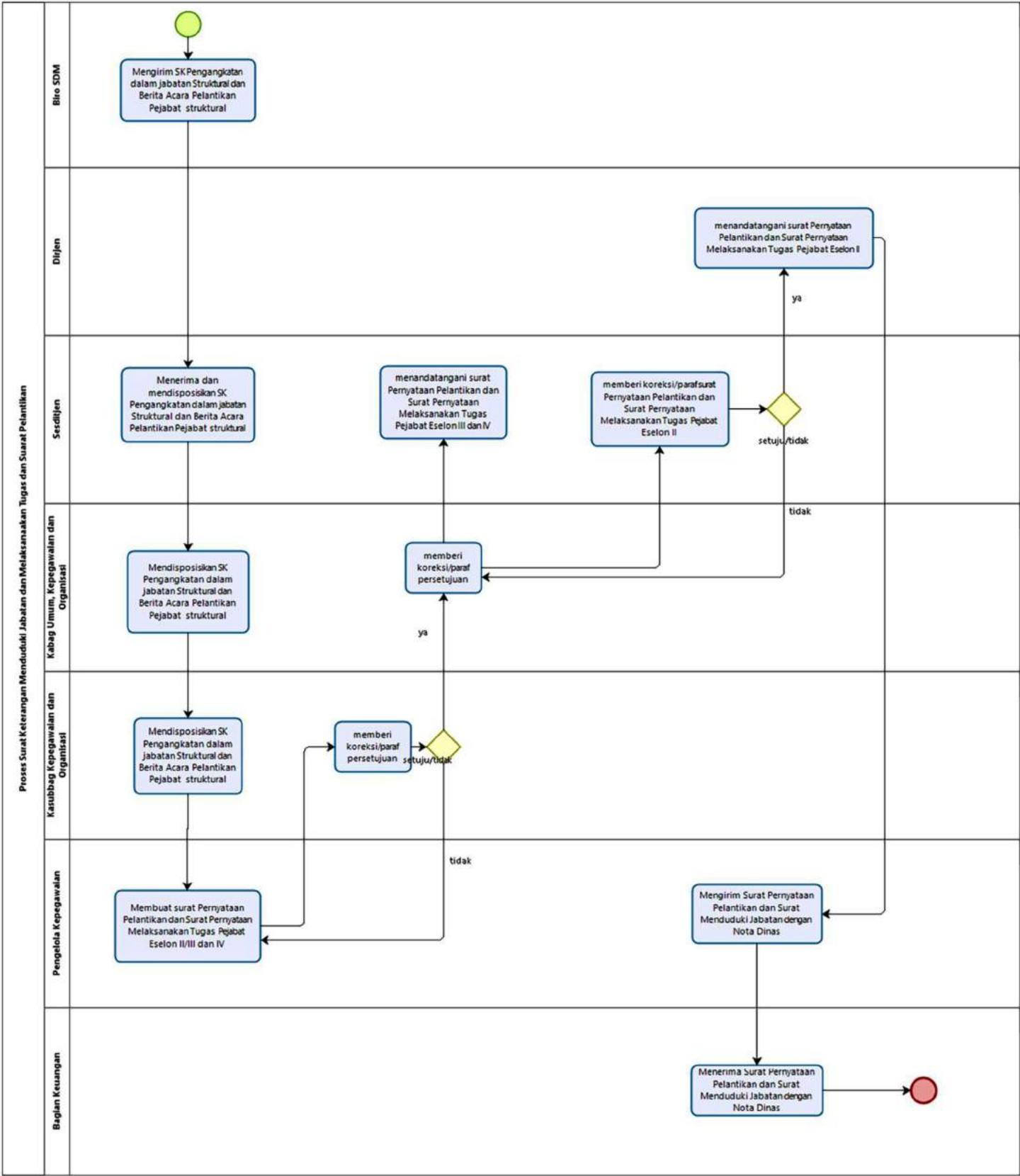
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Usulan Pensiun PNS



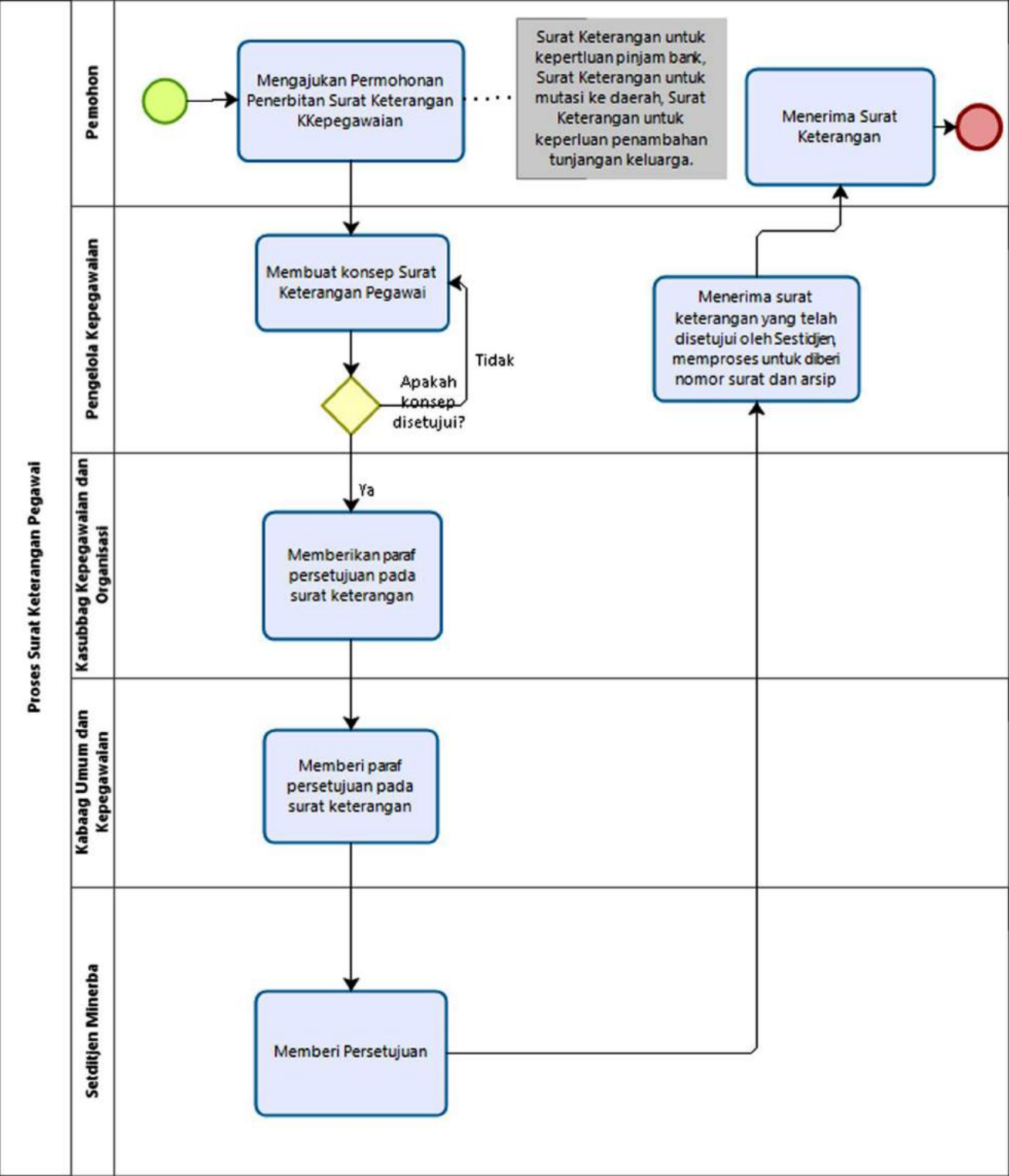
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Dugaan Pelanggaran Disiplin



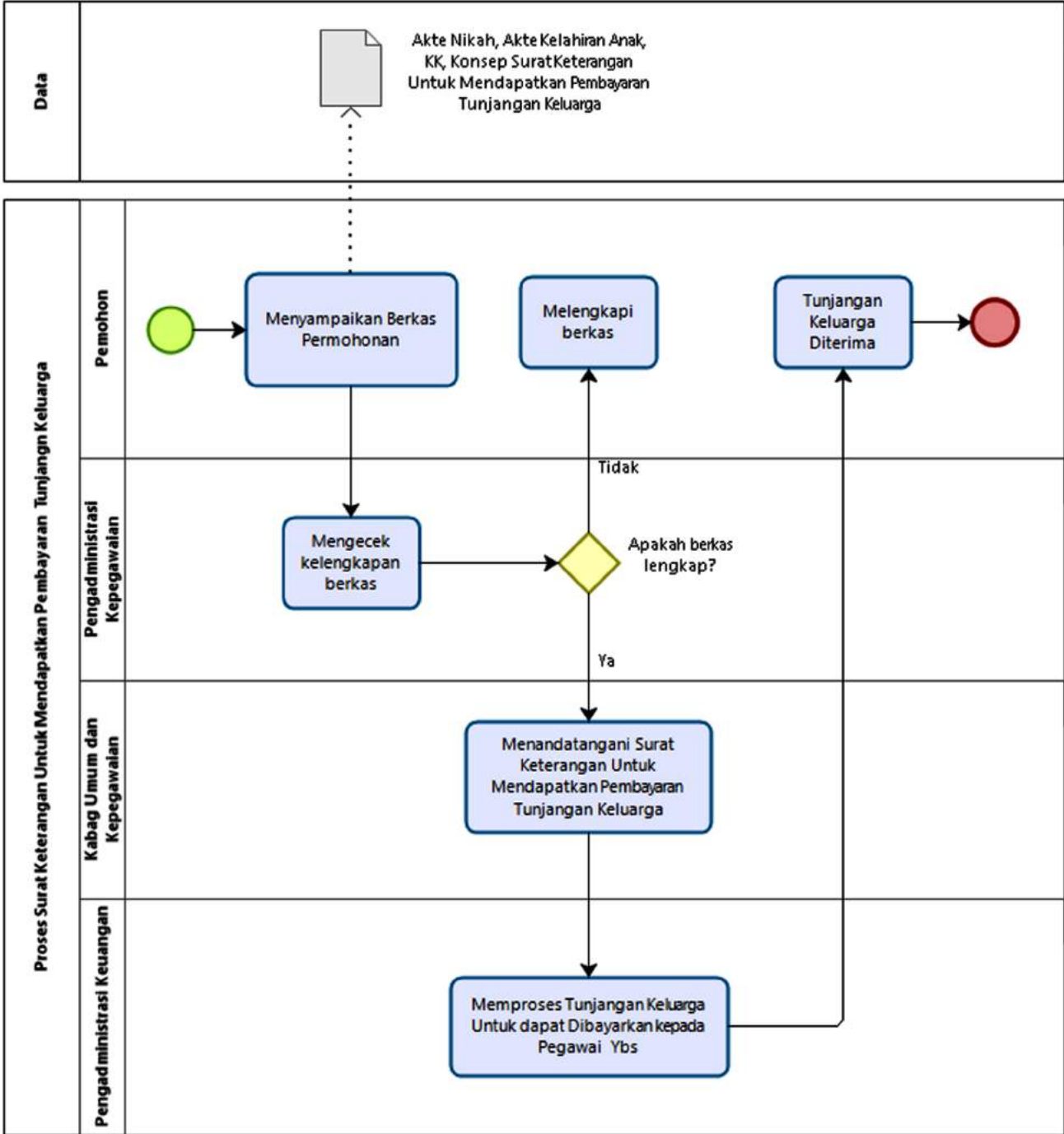
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Surat Keterangan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas dan Suarat Pelantikan



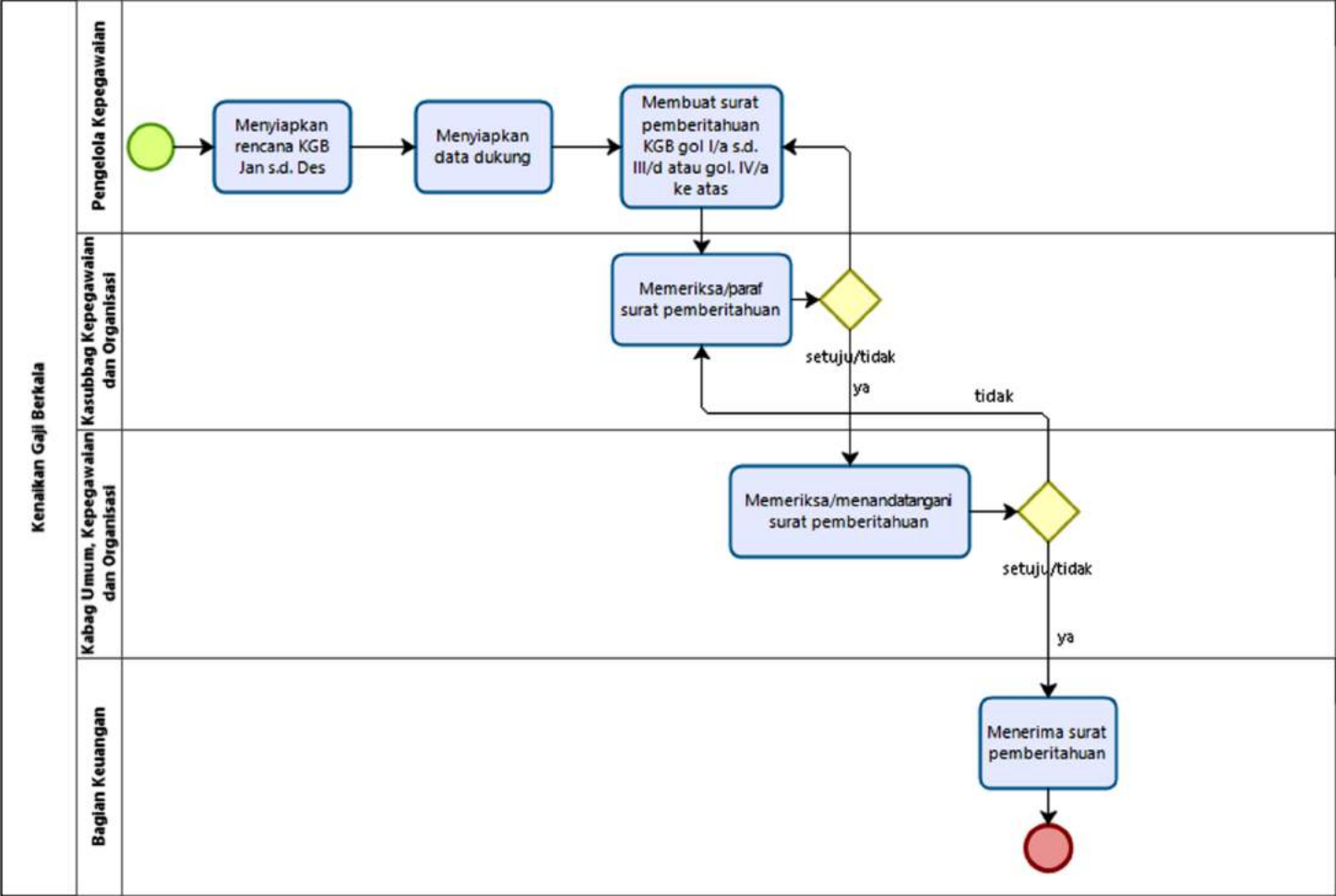
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Surat Keterangan Pegawai



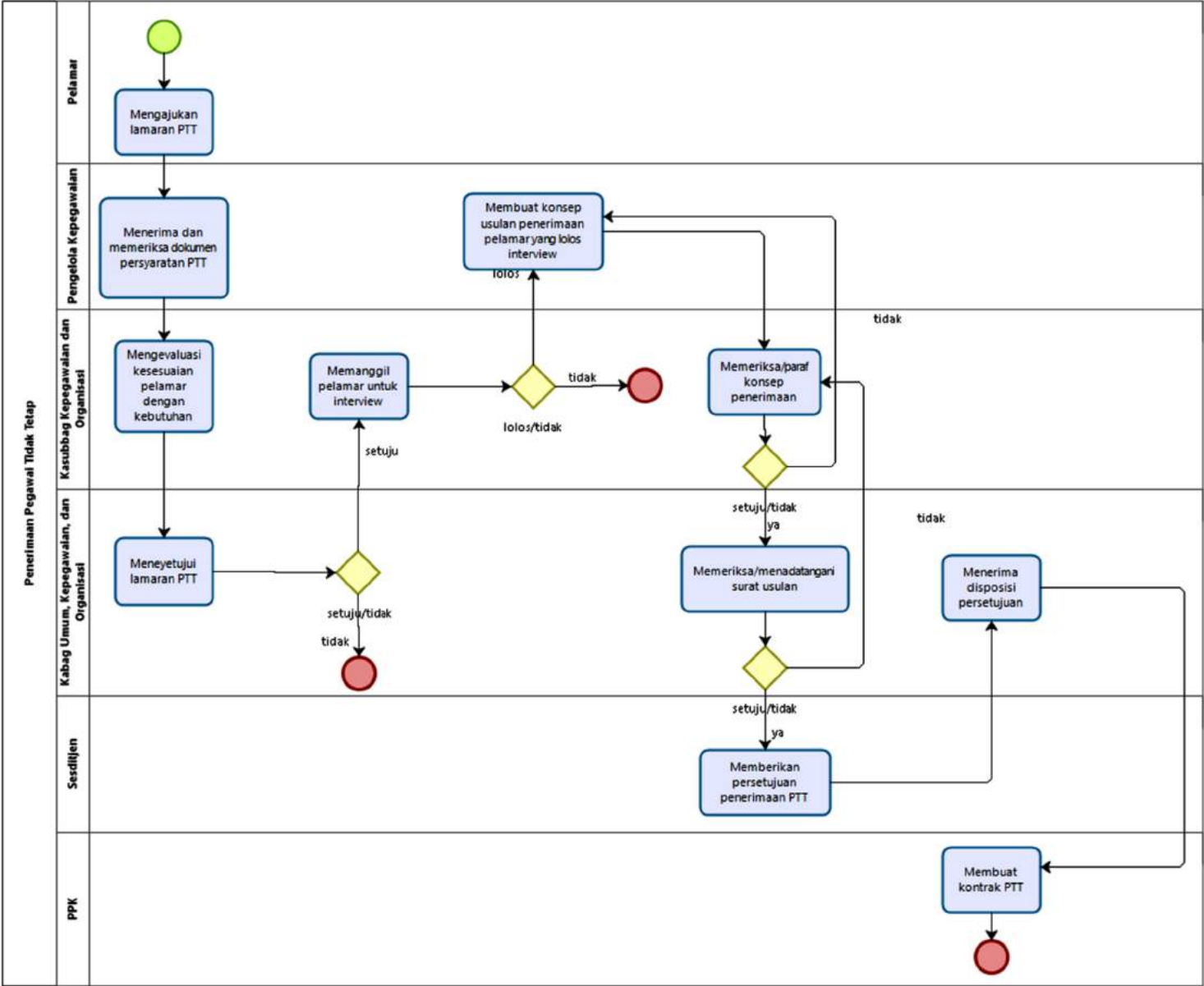
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Susat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga



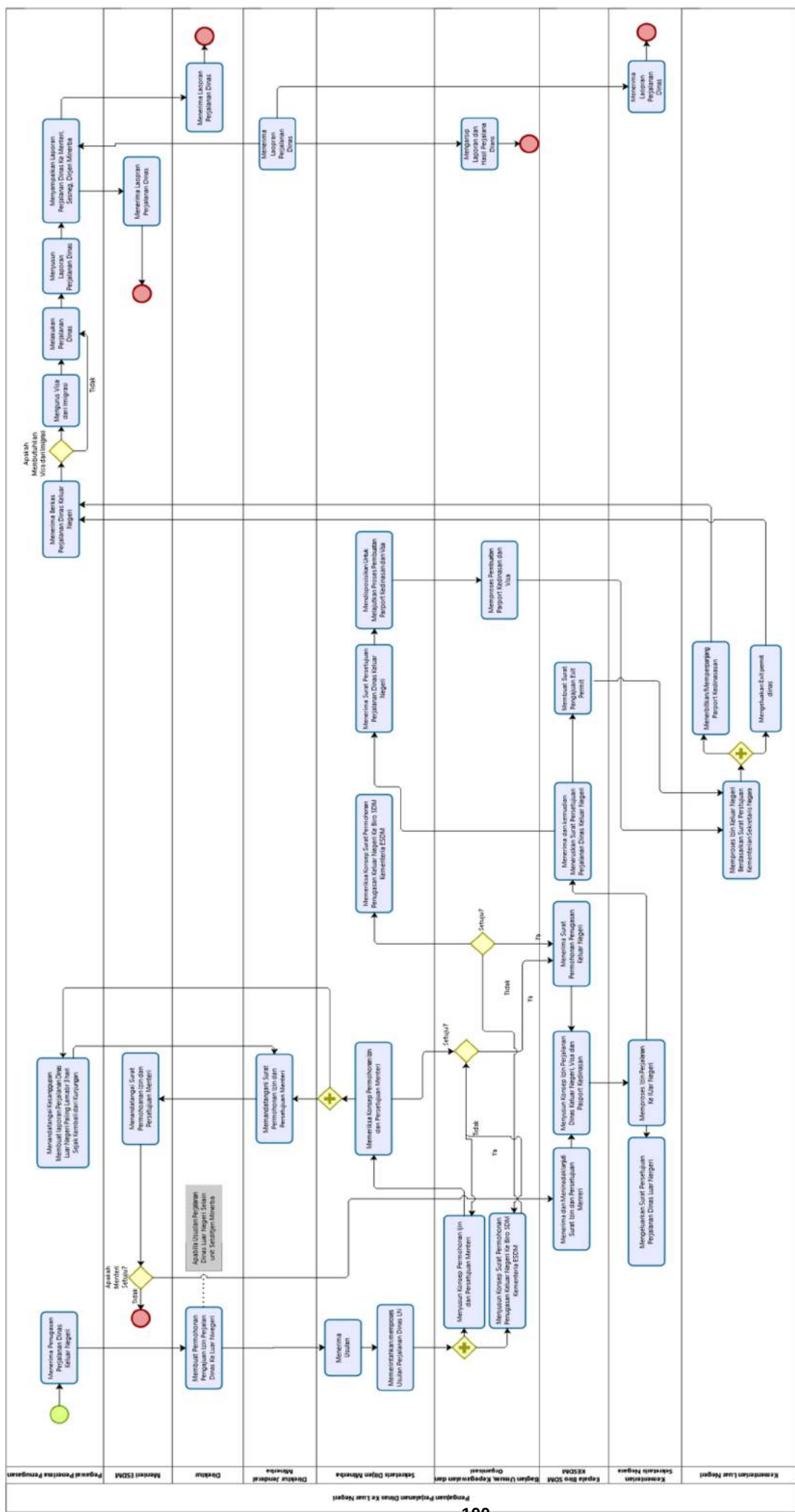
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB)



Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Proses Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap



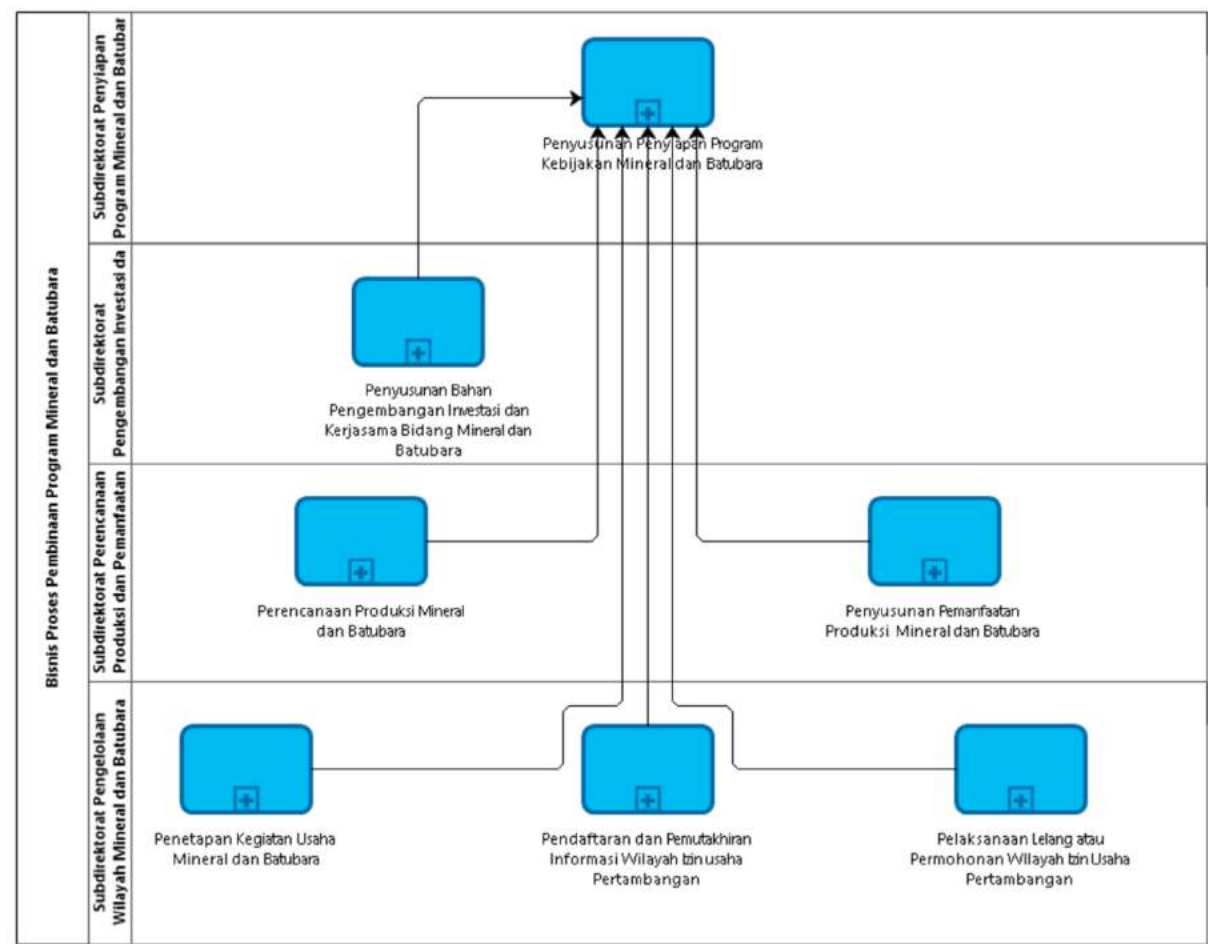
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi - Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri



LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 315.K/30/DJB/2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

BISNIS PROSES DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL
DAN BATUBARA



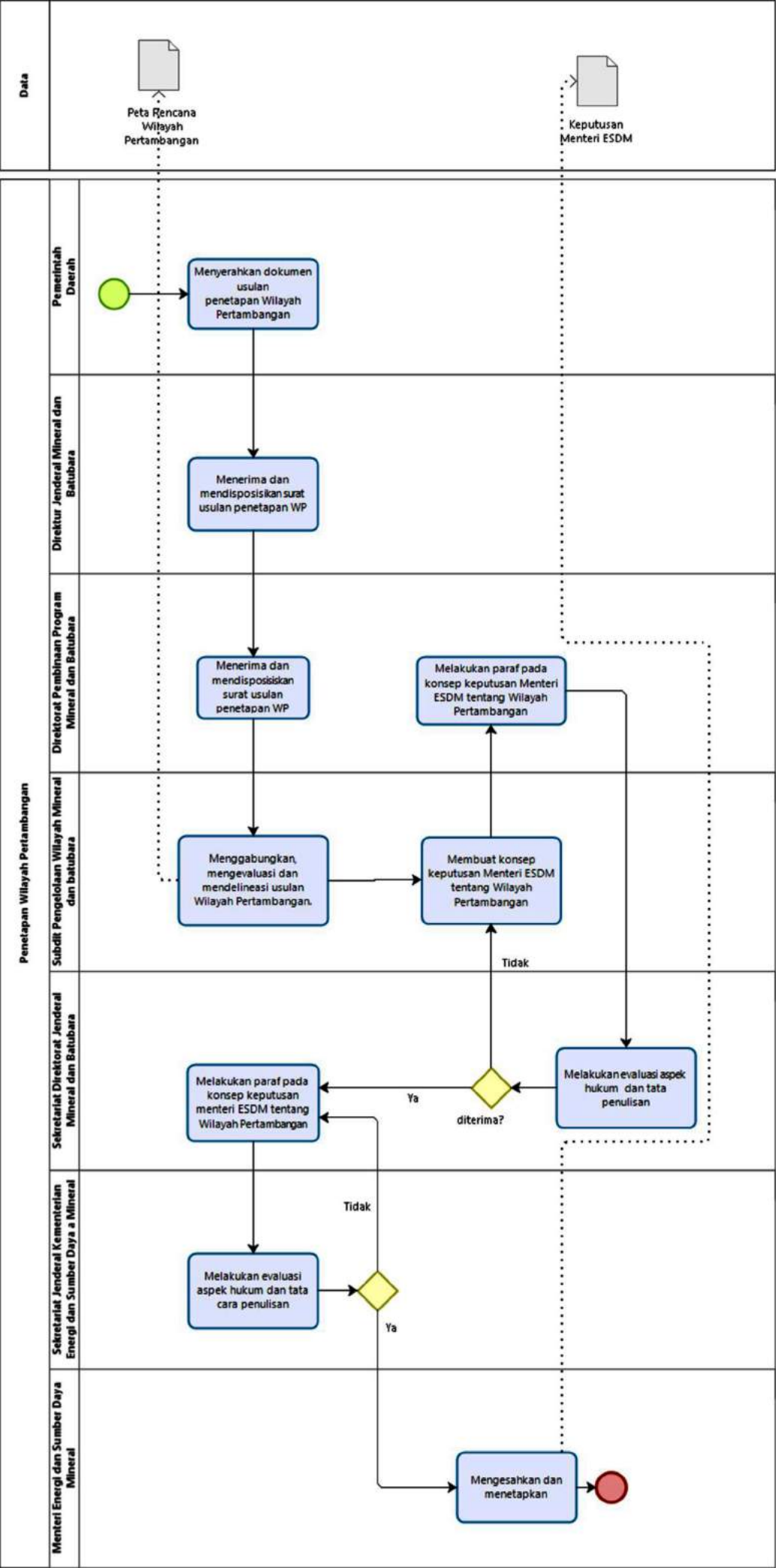
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara memiliki proses bisnis sebagai berikut, yaitu:

1. Penetapan kegiatan usaha mineral dan batubara meliputi penetapan wilayah pertambangan, penetapan wilayah izin usaha pertambangan, dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang kemudian akan dimanfaatkan dalam penyusunan penyajian program kebijakan mineral dan batubara.
2. Pendaftaran dan pemutakhiran informasi wilayah izin usaha pertambangan meliputi Pendaftaran dan Pemutakhiran Informasi Wilayah Izin usaha Pertambangan yang kemudian akan dimanfaatkan dalam penyusunan penyajian program kebijakan mineral dan batubara.
3. Penetapan lelang atau permohonan wilayah izin usaha pertambangan meliputi pelaksanaan lelang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus, pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan atau batuan, serta penerbitan rekomendasi pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan atau batuan

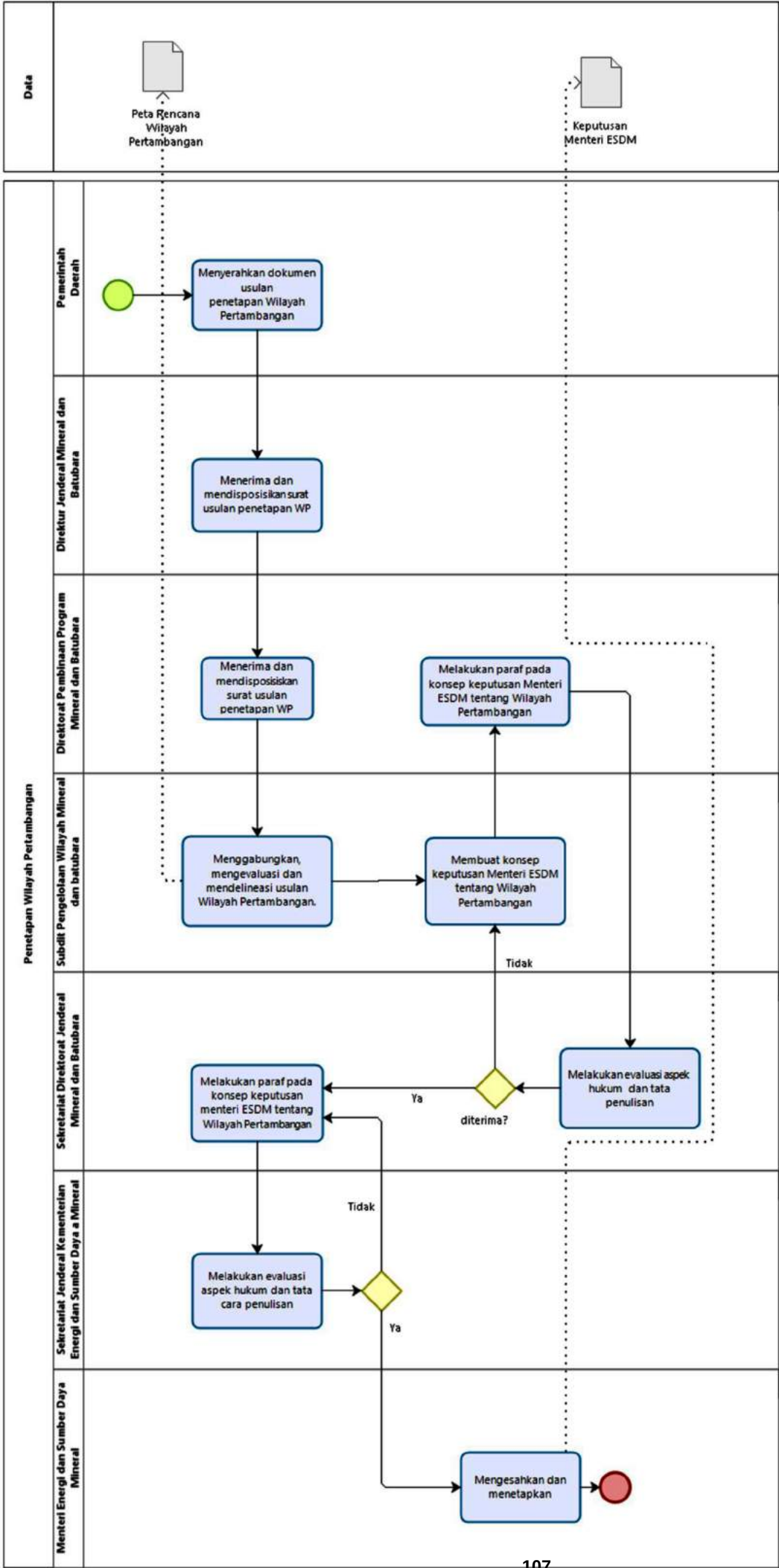
yang kemudian akan dimanfaatkan dalam penyusunan penyiapan program kebijakan mineral dan batubara.

4. Perencanaan produksi mineral dan batubara meliputi penyusunan rumusan rencana produksi mineral dan batubara, penetapan rencana produksi mineral dan batubara, penyusunan rumusan kebutuhan mineral dan batubara, serta penetapan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri yang kemudian akan dimanfaatkan dalam penyusunan penyiapan program kebijakan mineral dan batubara.
5. Penyusunan Pemanfaatan Produksi Mineral dan Batubara meliputi tinjauan pemanfaatan mineral dan batubara, kajian potensi baru pemanfaatan mineral dan batubara, penyiapan laporan evaluasi pencapaian produksi mineral dan batubara, serta penyelenggaraan bimbingan teknis penetapan rencana produksi dan pemanfaatan mineral dan batubara yang kemudian akan dimanfaatkan dalam penyusunan penyiapan program kebijakan mineral dan batubara.
6. Penyusunan bahan pengembangan investasi dan kerjasama bidang mineral dan batubara yang meliputi inventarisasi data rencana investasi, penyelenggaraan promosi investasi di luar negeri, inventarisasi data kerjasama dan pelaksanaan dan evaluasi kerjasama yang kemudian akan dimanfaatkan dalam penyusunan penyiapan program kebijakan mineral dan batubara.
7. Penyusunan penyiapan program kebijakan mineral dan batubara meliputi pengumpulan seluruh data terkait program mineral dan batubara yang kemudian diusulkan sebagai bahan kebijakan mineral dan batubara.

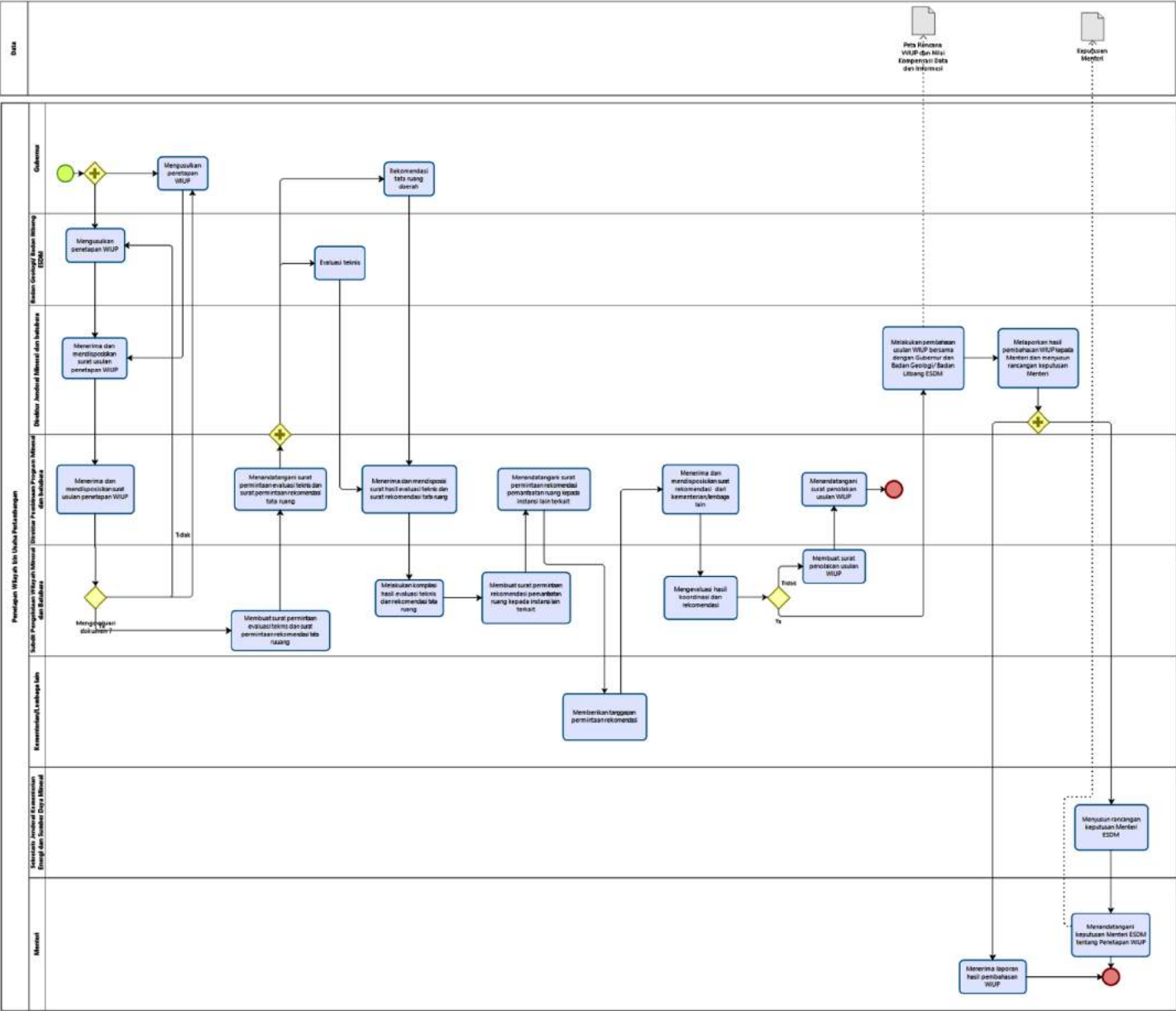
Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral - Penetapan Wilayah Pertambangan



Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara - Penetapan Wilayah Pertambangan



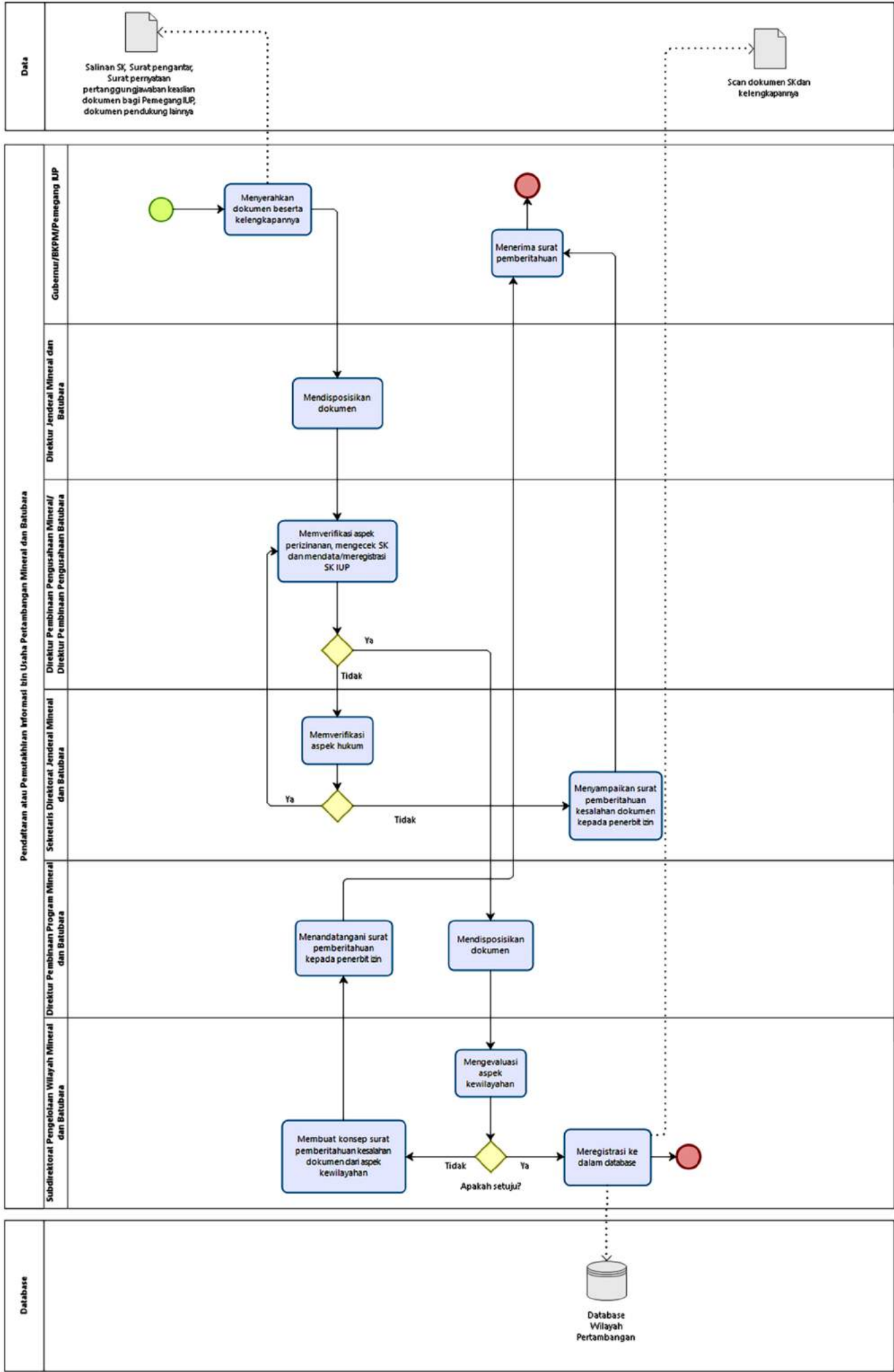
**Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara - Penetapan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Batubara**



Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara - Pendaftaran dan Pemutakhiran Informasi Wilayah Izin usaha Pertambangan

Pendaftaran dan Pemutakhiran Informasi Wilayah Izin usaha Pertambangan	Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral	 Pendaftaran dan Pemutakhiran Informasi Wilayah Izin usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara	 Pendaftaran dan Pemutakhiran Informasi Wilayah Izin usaha Pertambangan Batubara

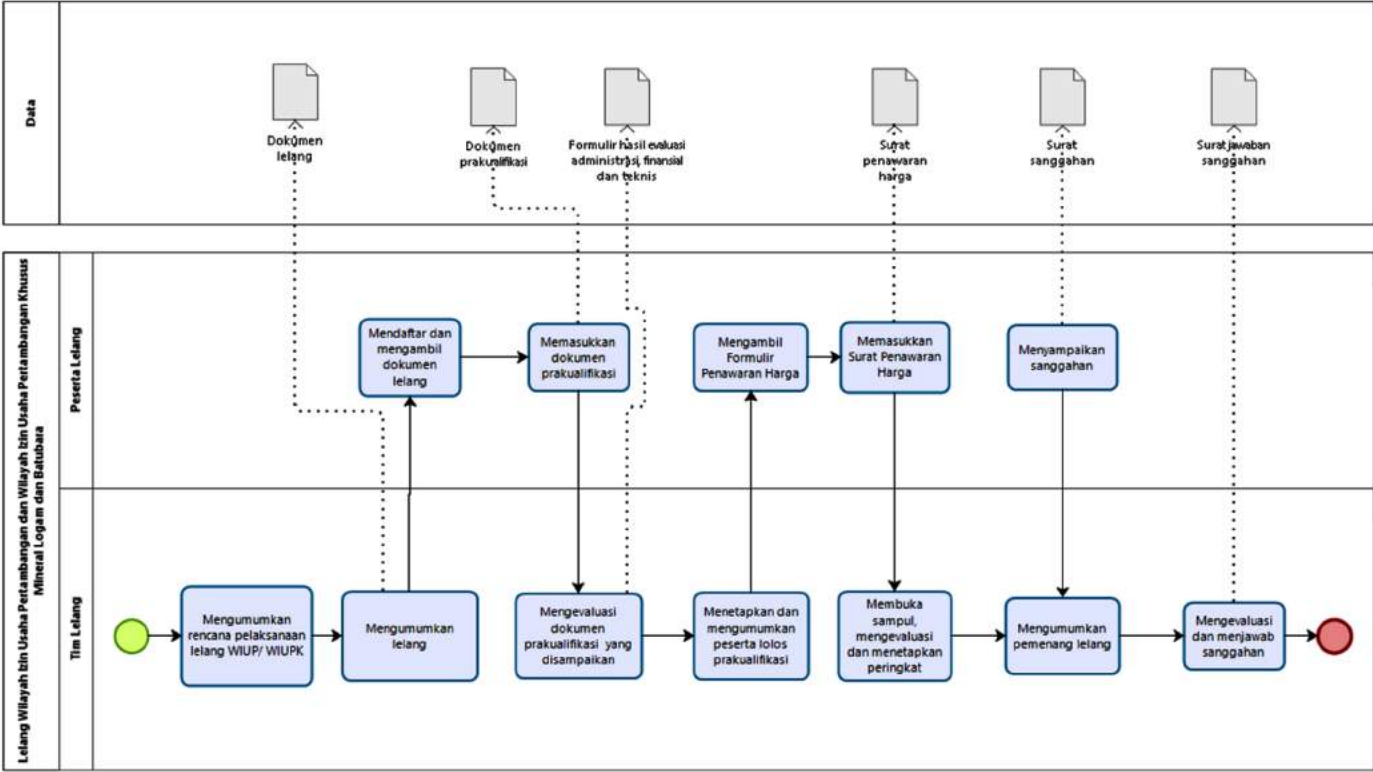
Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara - Pendaftaran dan Pemutakhiran Informasi Wilayah Izin usaha Pertambangan



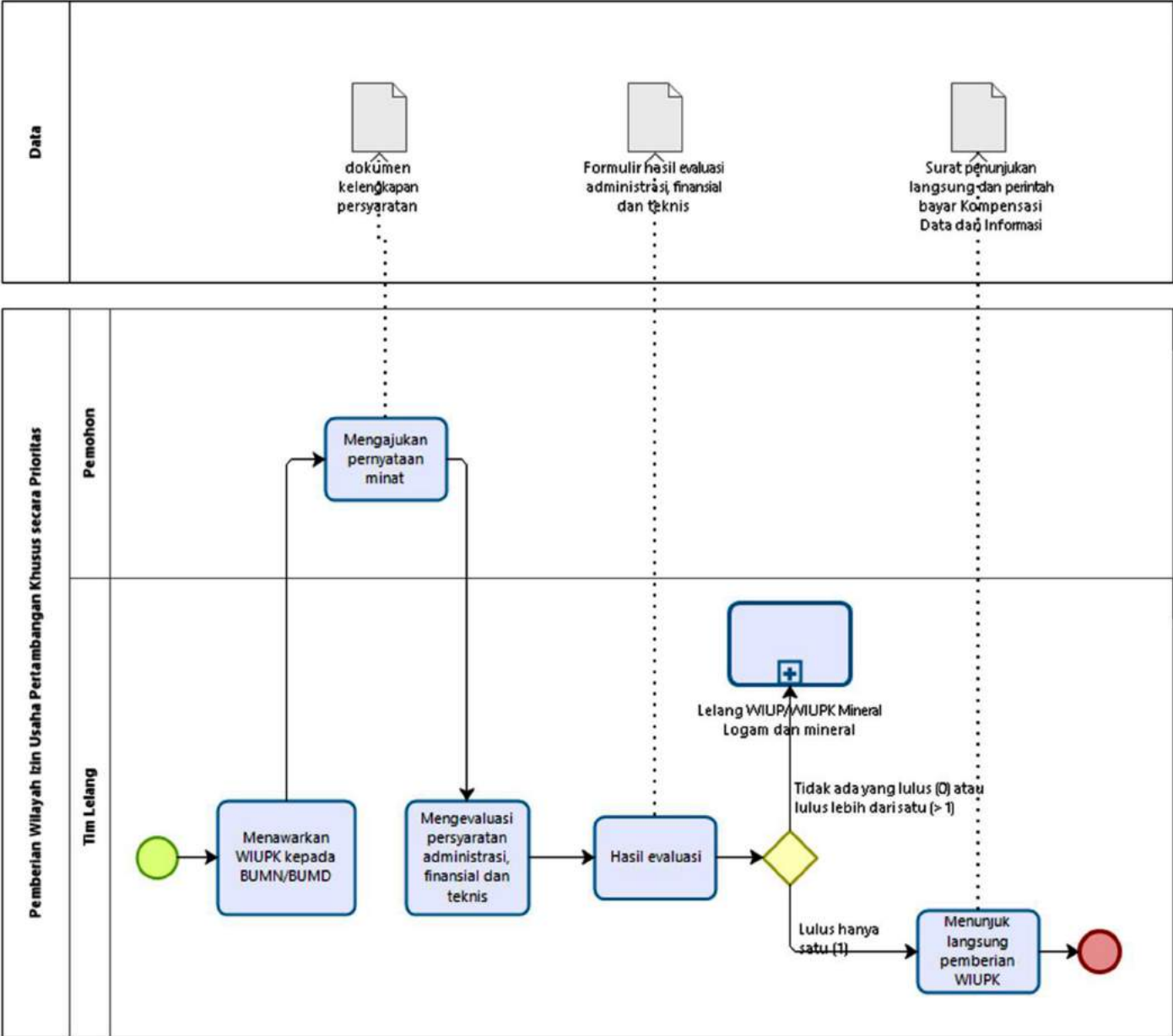
Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara - Pelaksanaan Lelang atau Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pelaksanaan Lelang atau Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral	 Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam  Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam secara Prioritas  Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan  Penerbitan Rekomendasi Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan
	Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara	 Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara  Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara secara Prioritas

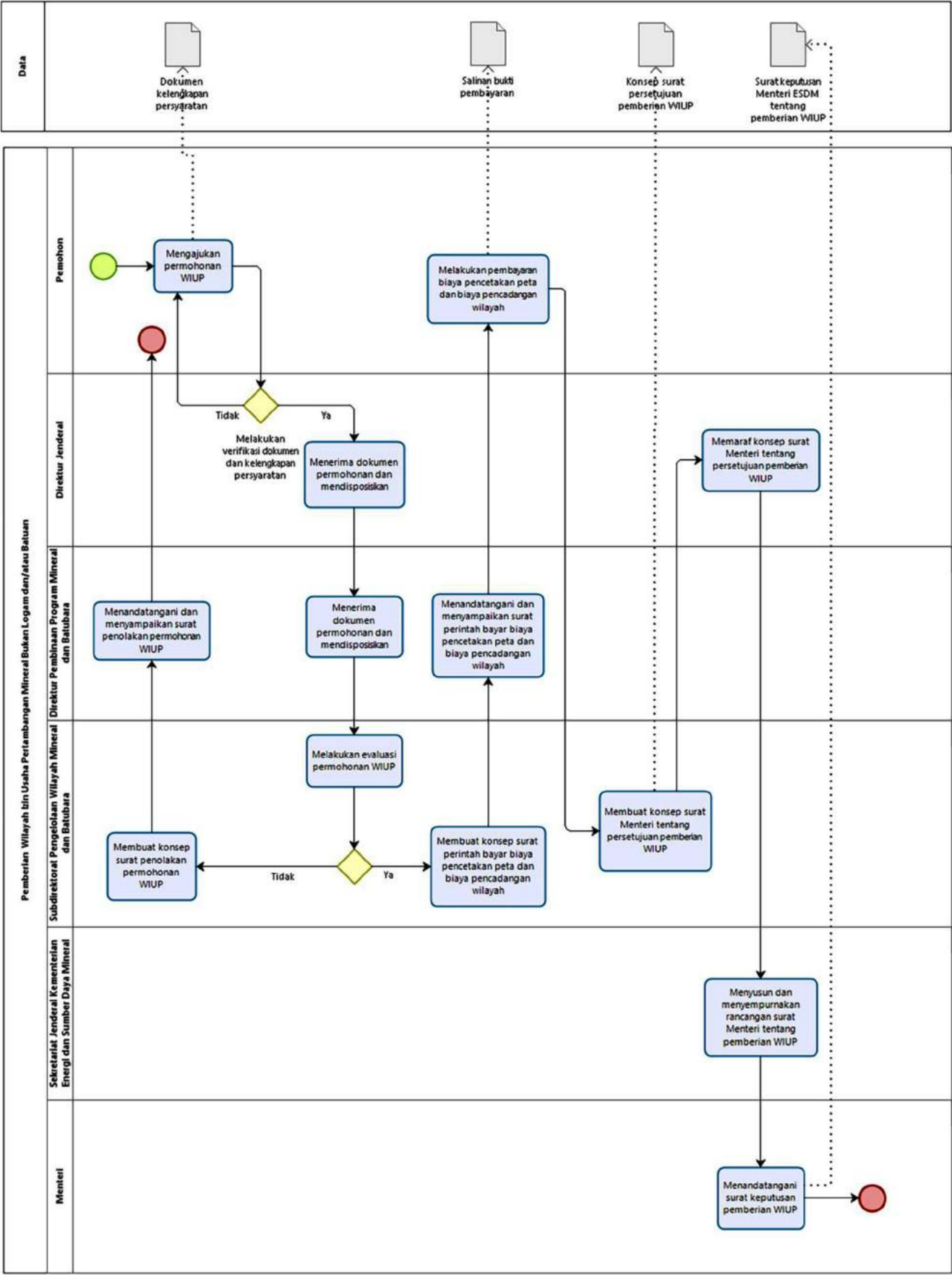
Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral - Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam



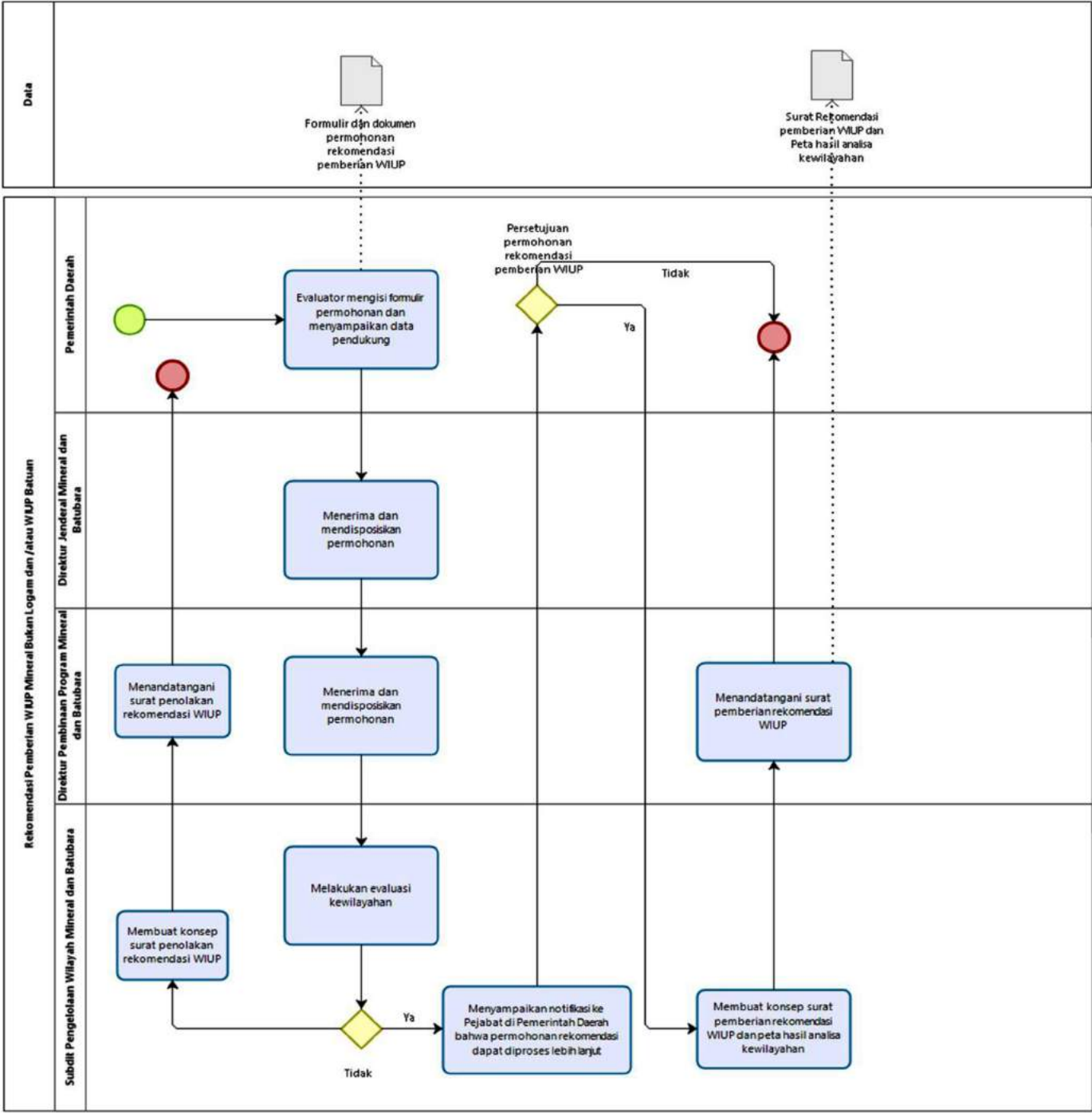
Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral - Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam secara Prioritas



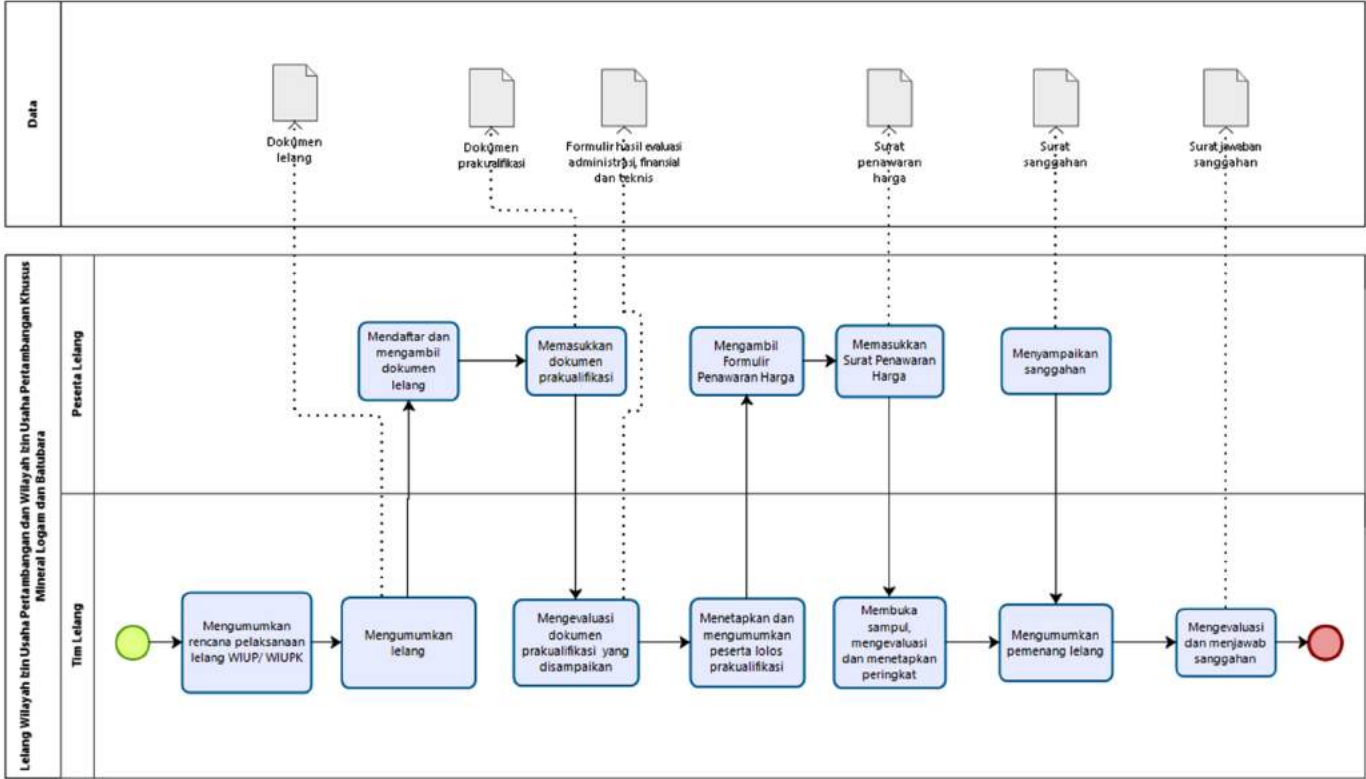
Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral - Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan



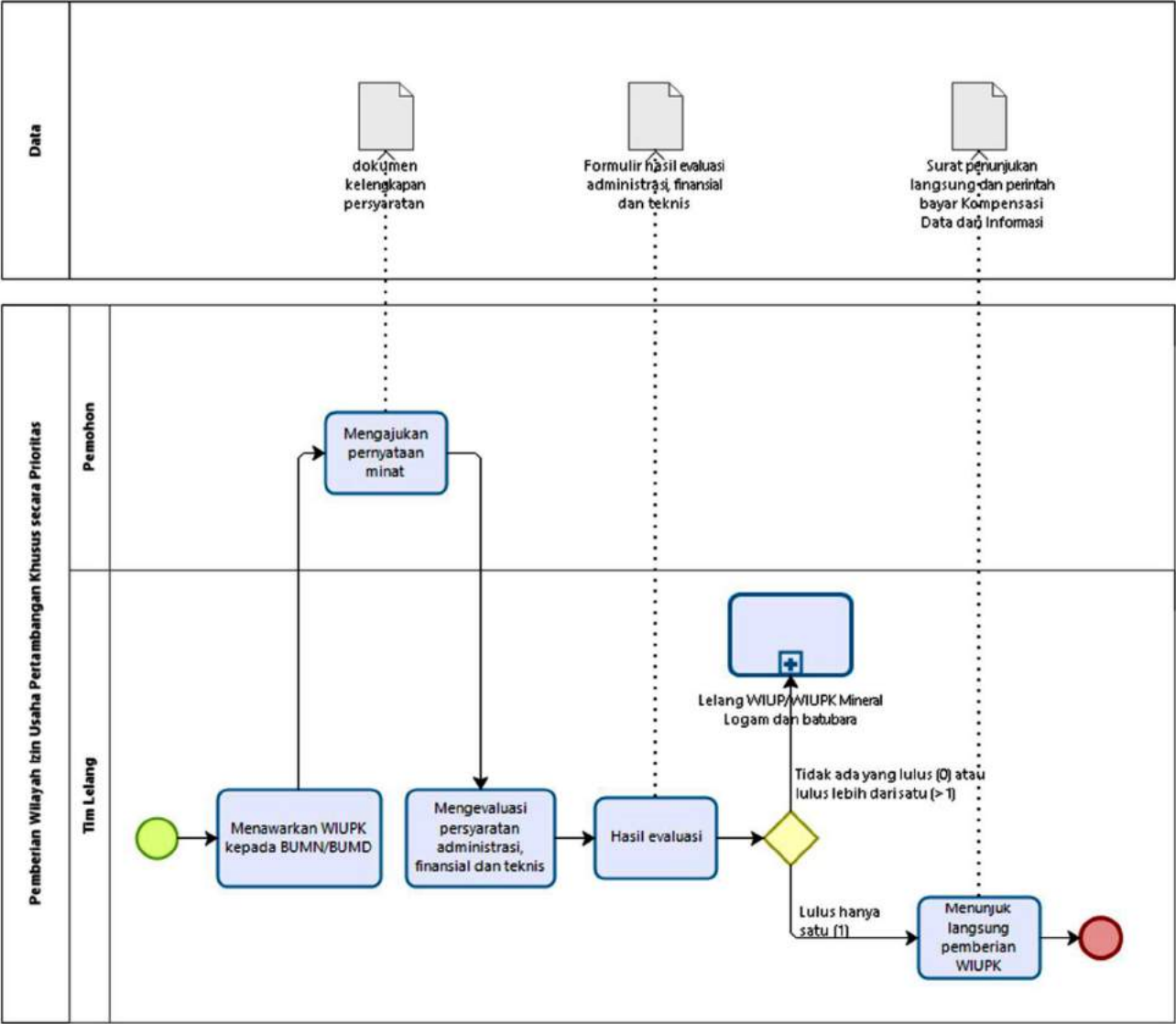
Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral - Penerbitan Rekomendasi Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan



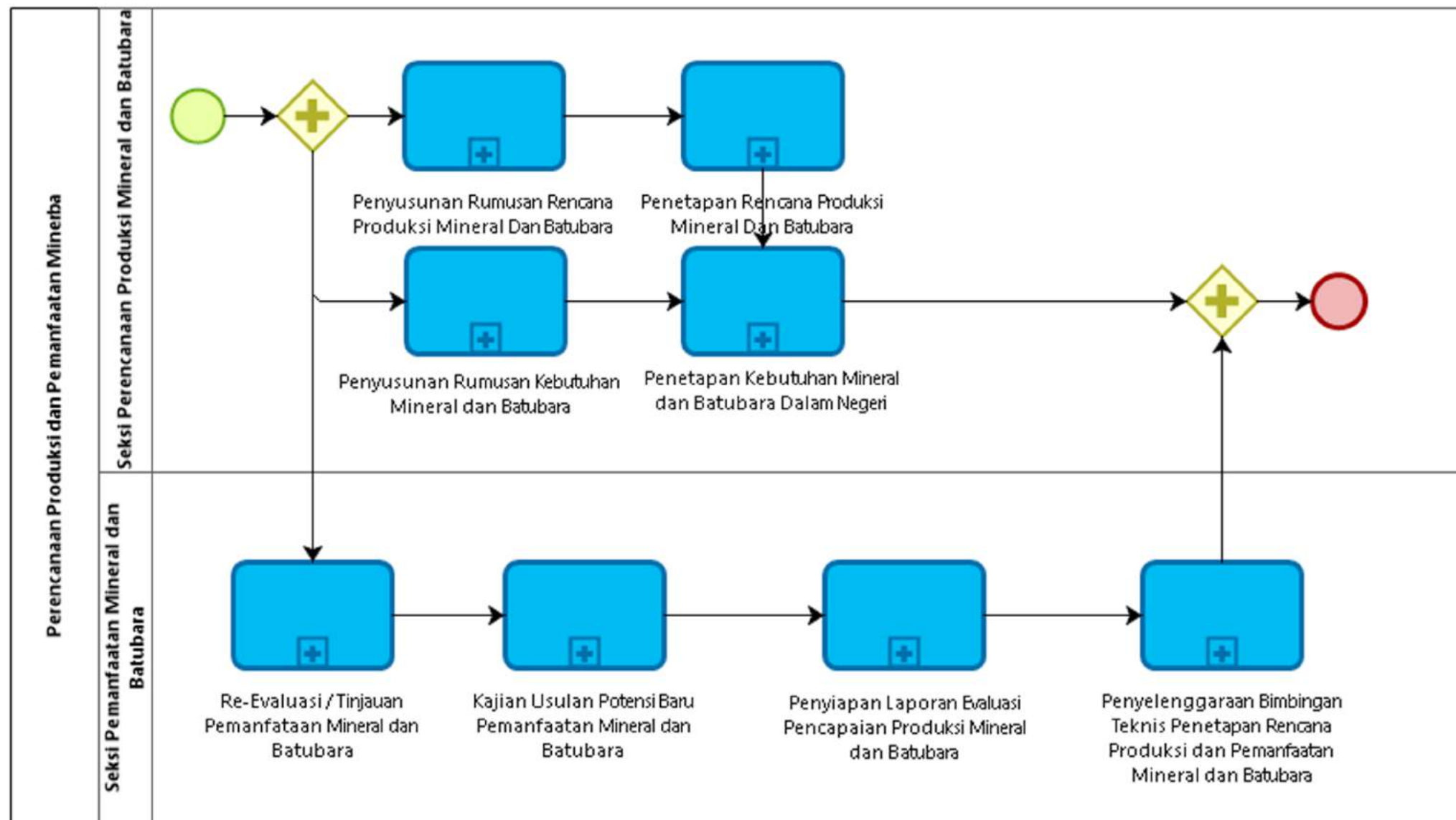
Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara - Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara



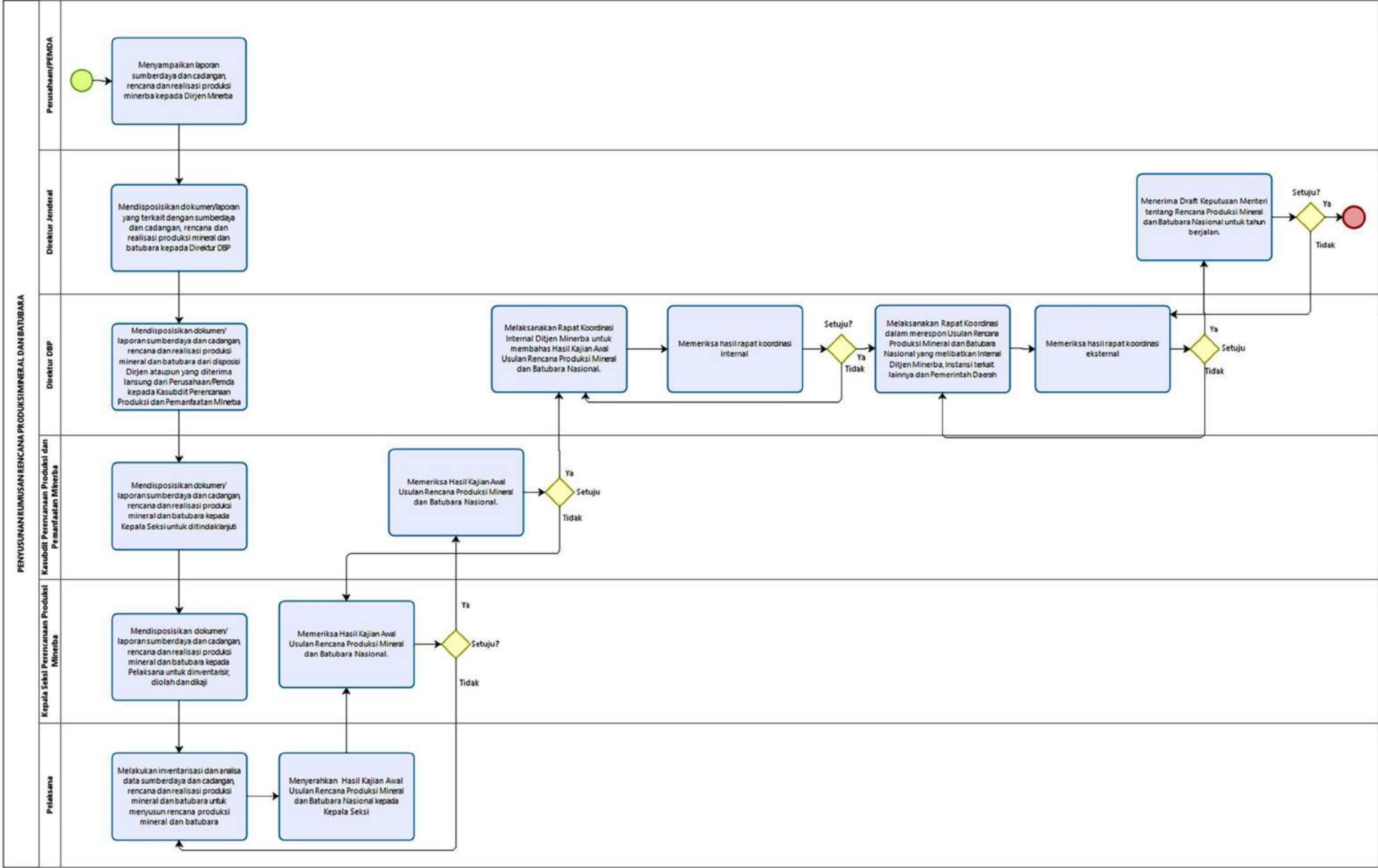
Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara - Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara secara Prioritas



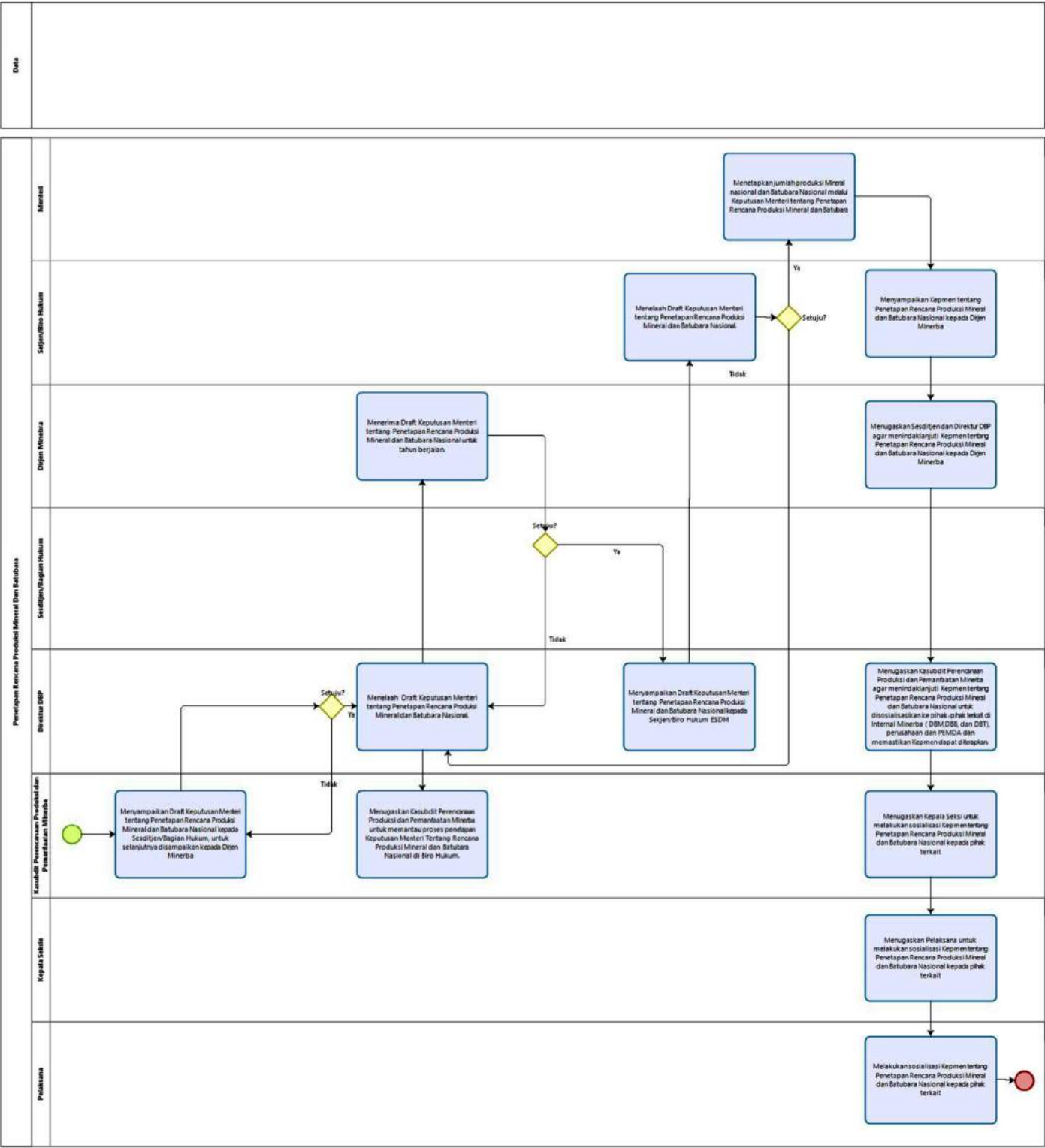
Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara



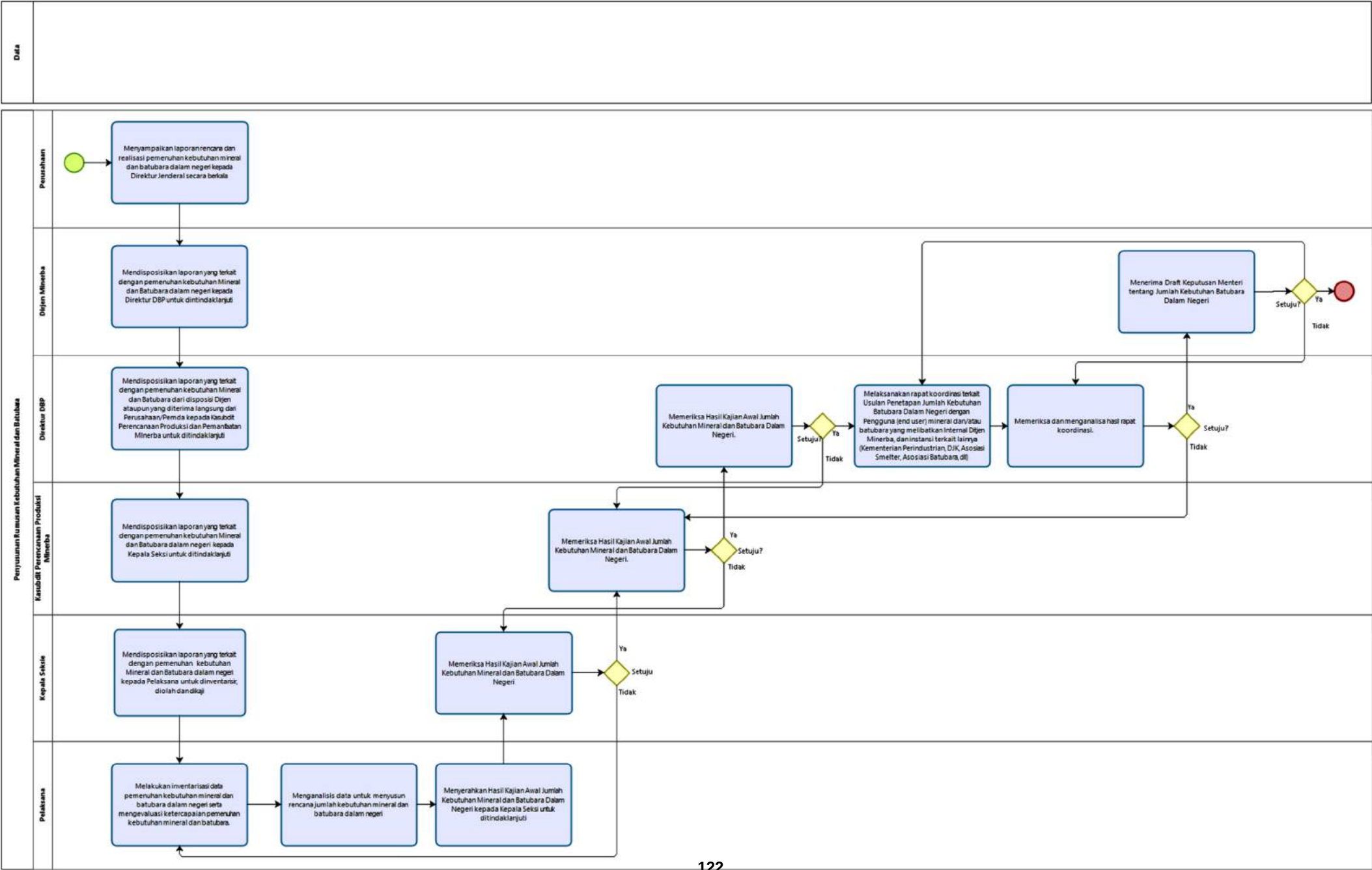
Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara - Penyusunan Rumusan Rencana Produksi Mineral Dan Batubara



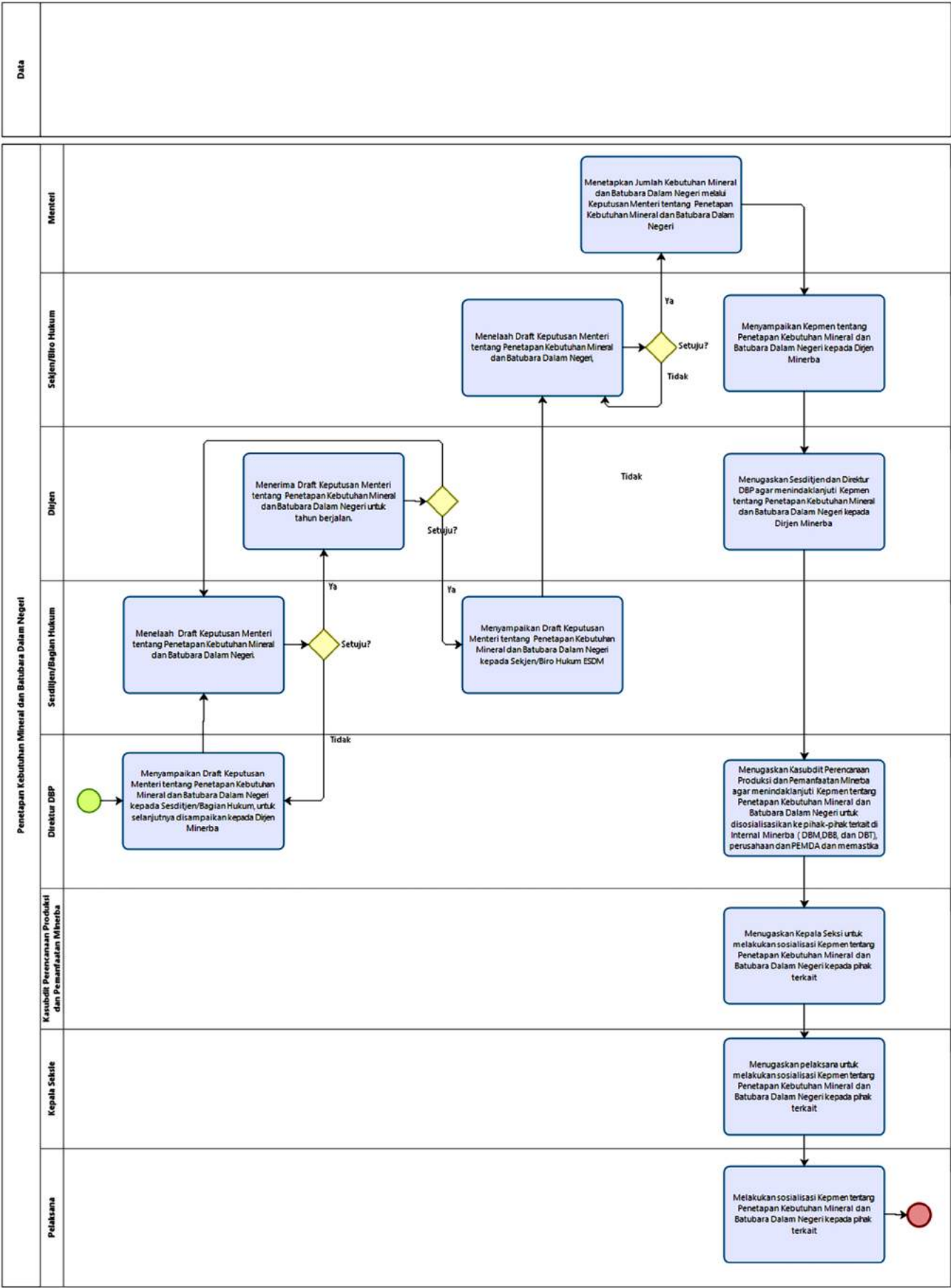
Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara - Penetapan Rencana Produksi Mineral Dan Batubara



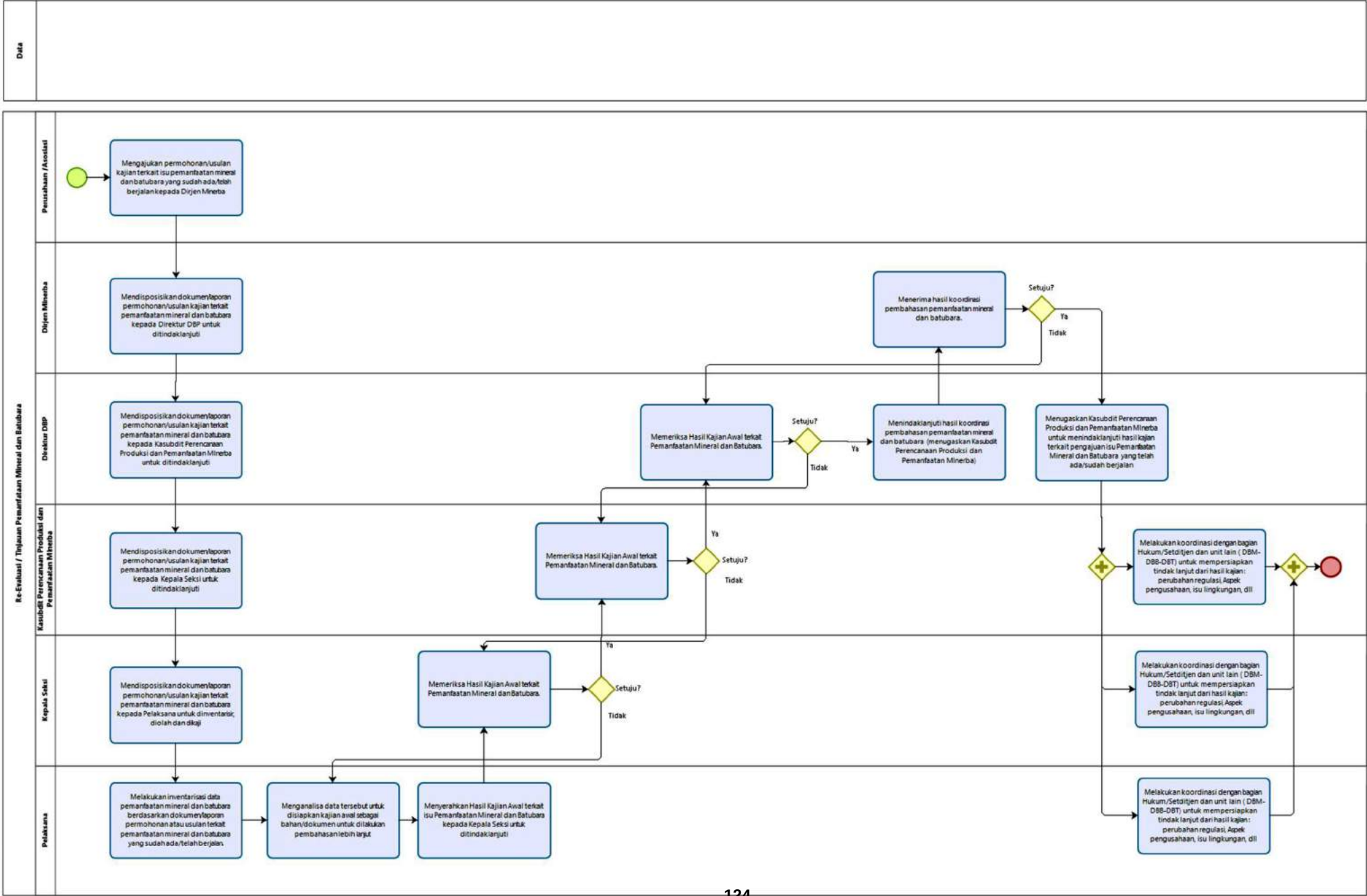
Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara - Penyusunan Rumusan Kebutuhan Mineral dan Batubara



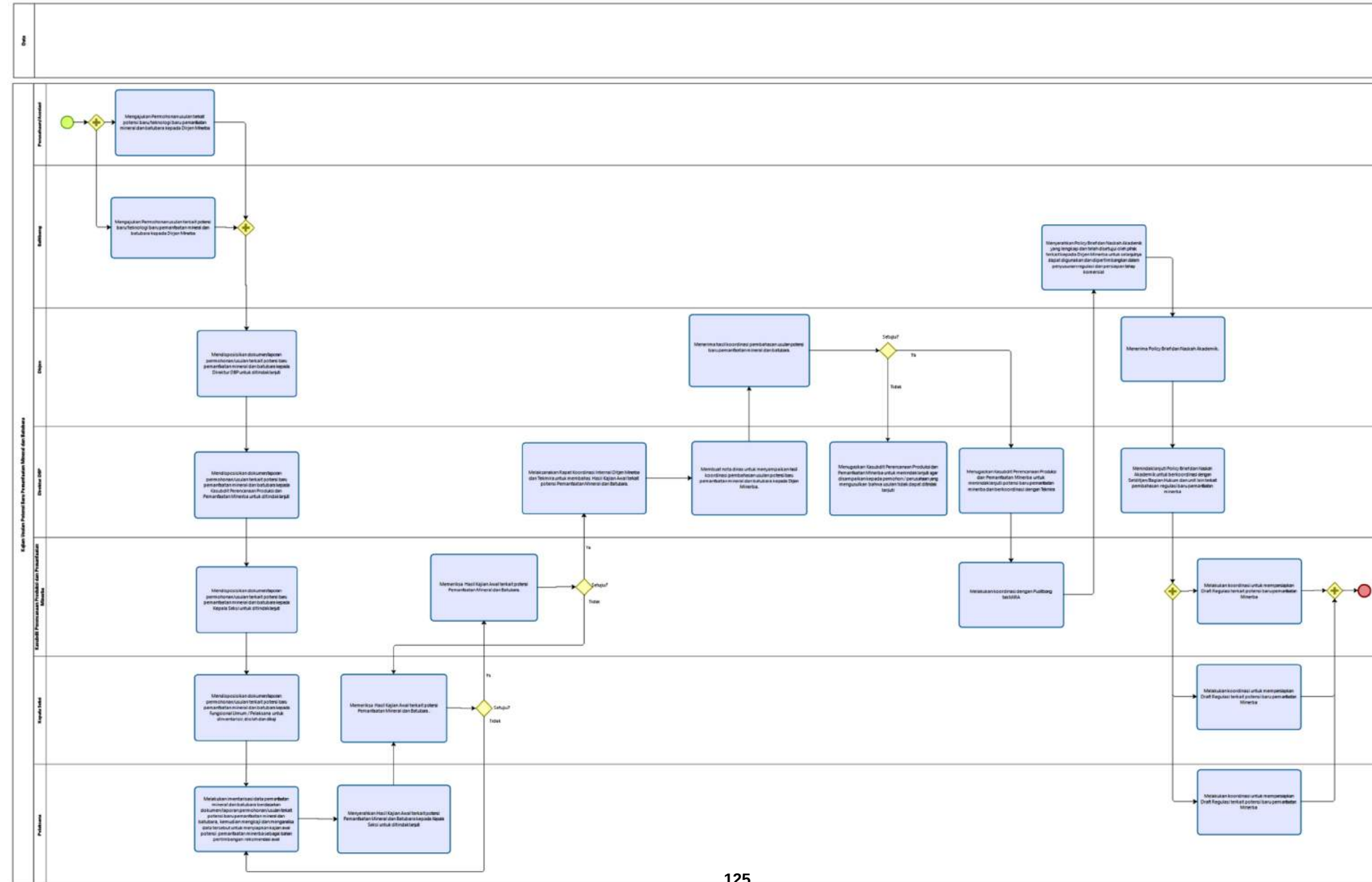
Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara - Penetapan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri



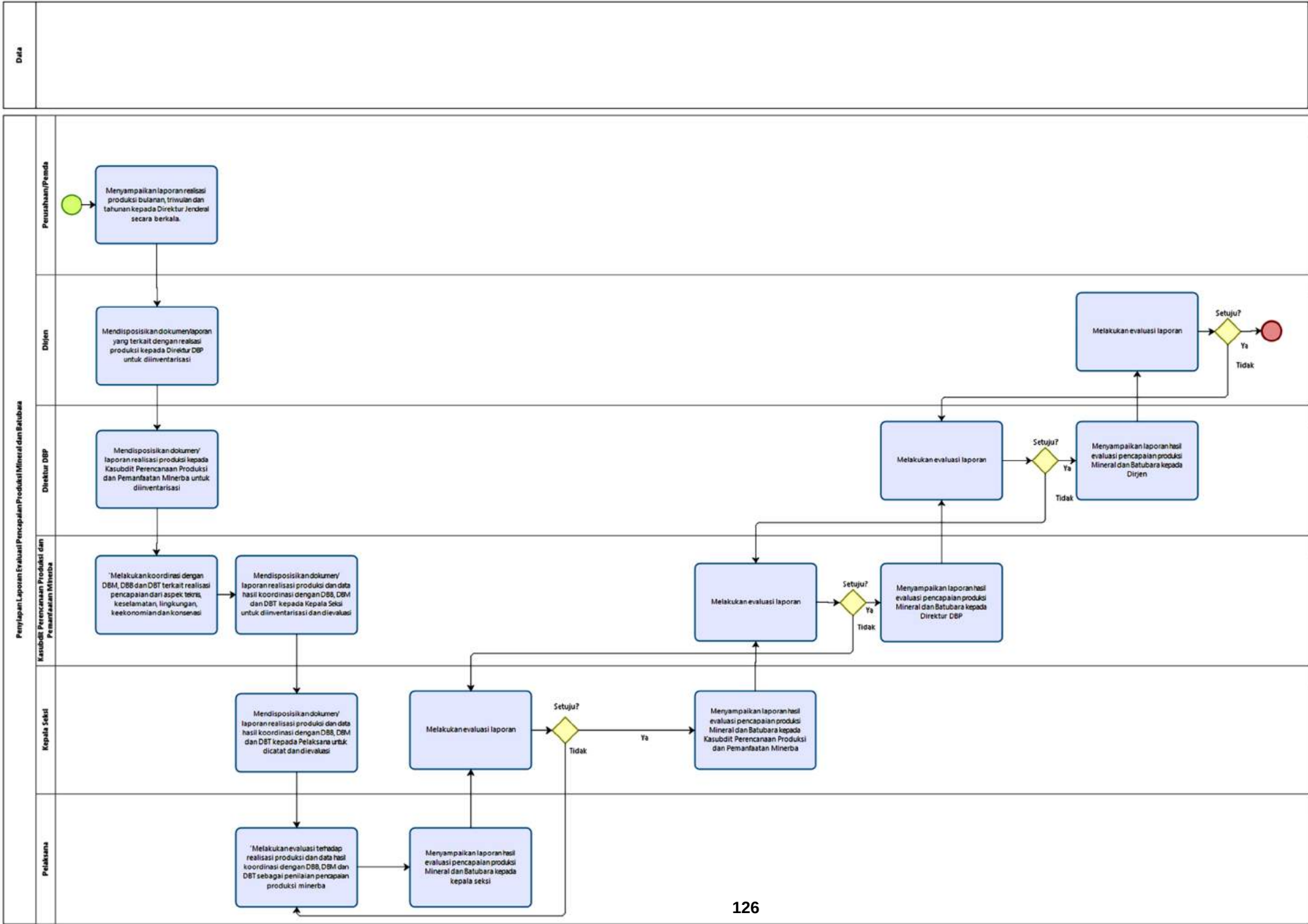
Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara - Re-Evaluasi / Tinjauan Pemanfaatan Mineral dan Batubara



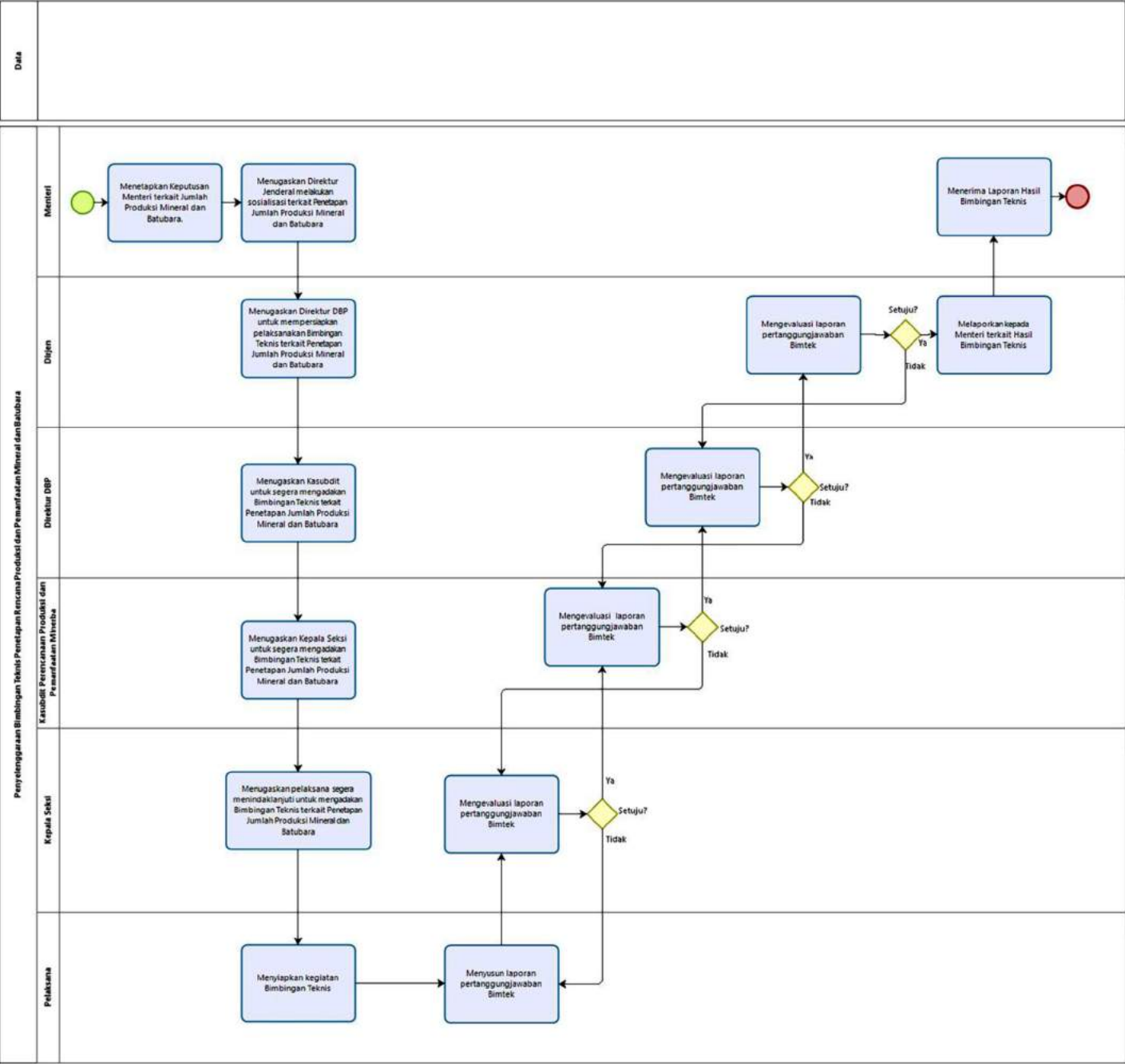
Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara - Kajian Usulan Potensi Baru Pemanfaatan Mineral dan Batubara



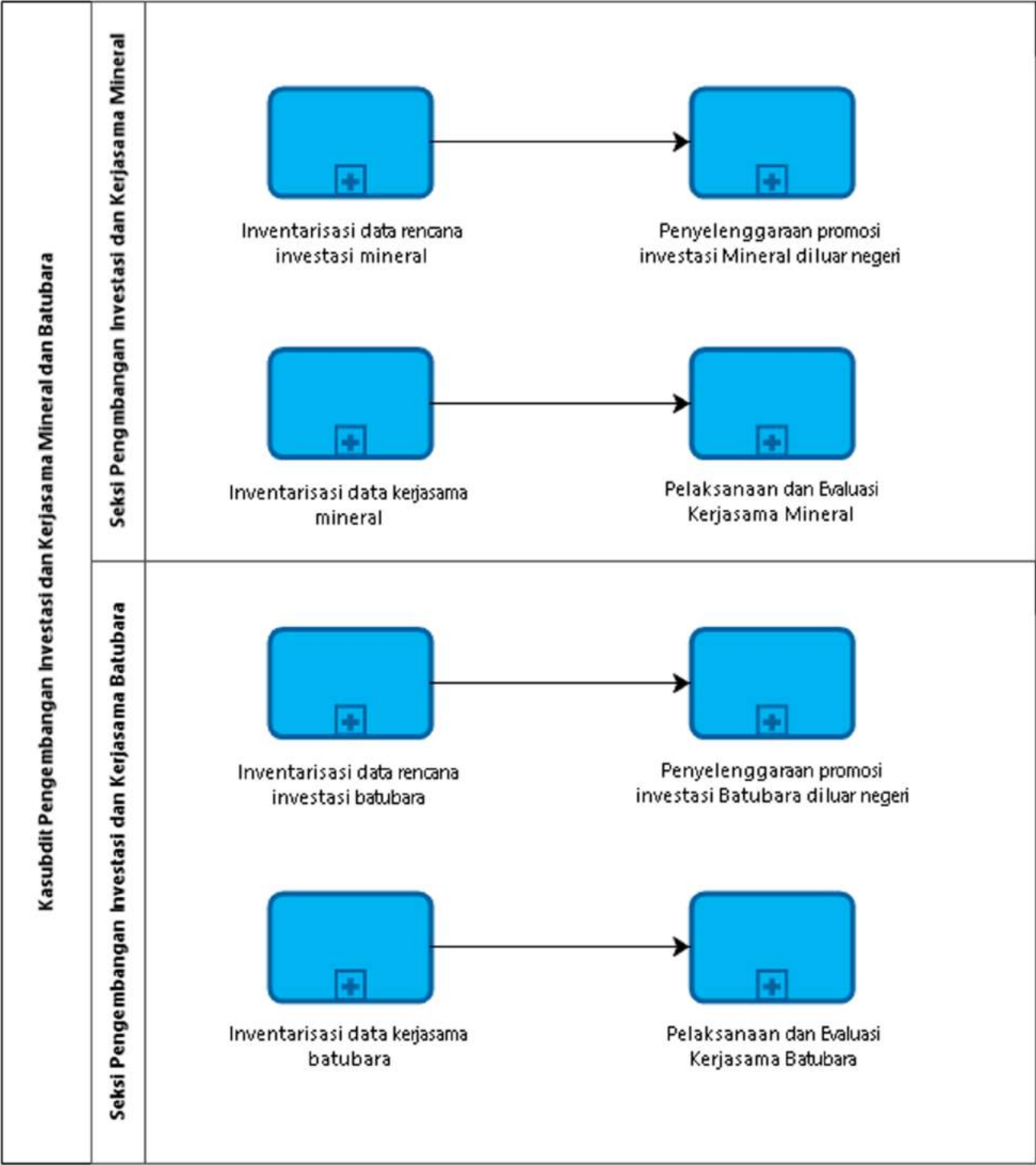
Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara - Penyiapan Laporan Evaluasi Pencapaian Produksi Mineral dan Batubara



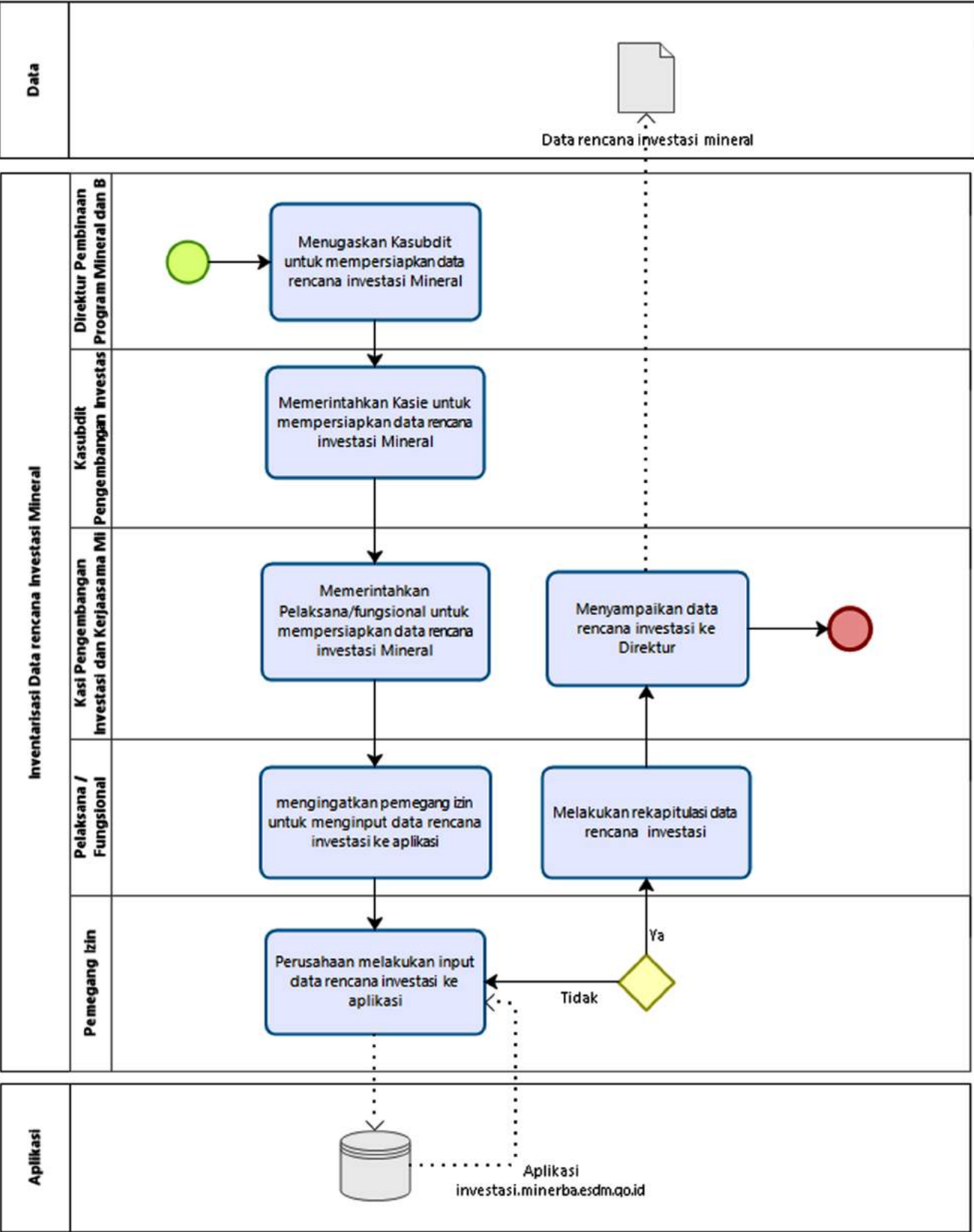
Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara - Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penetapan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara



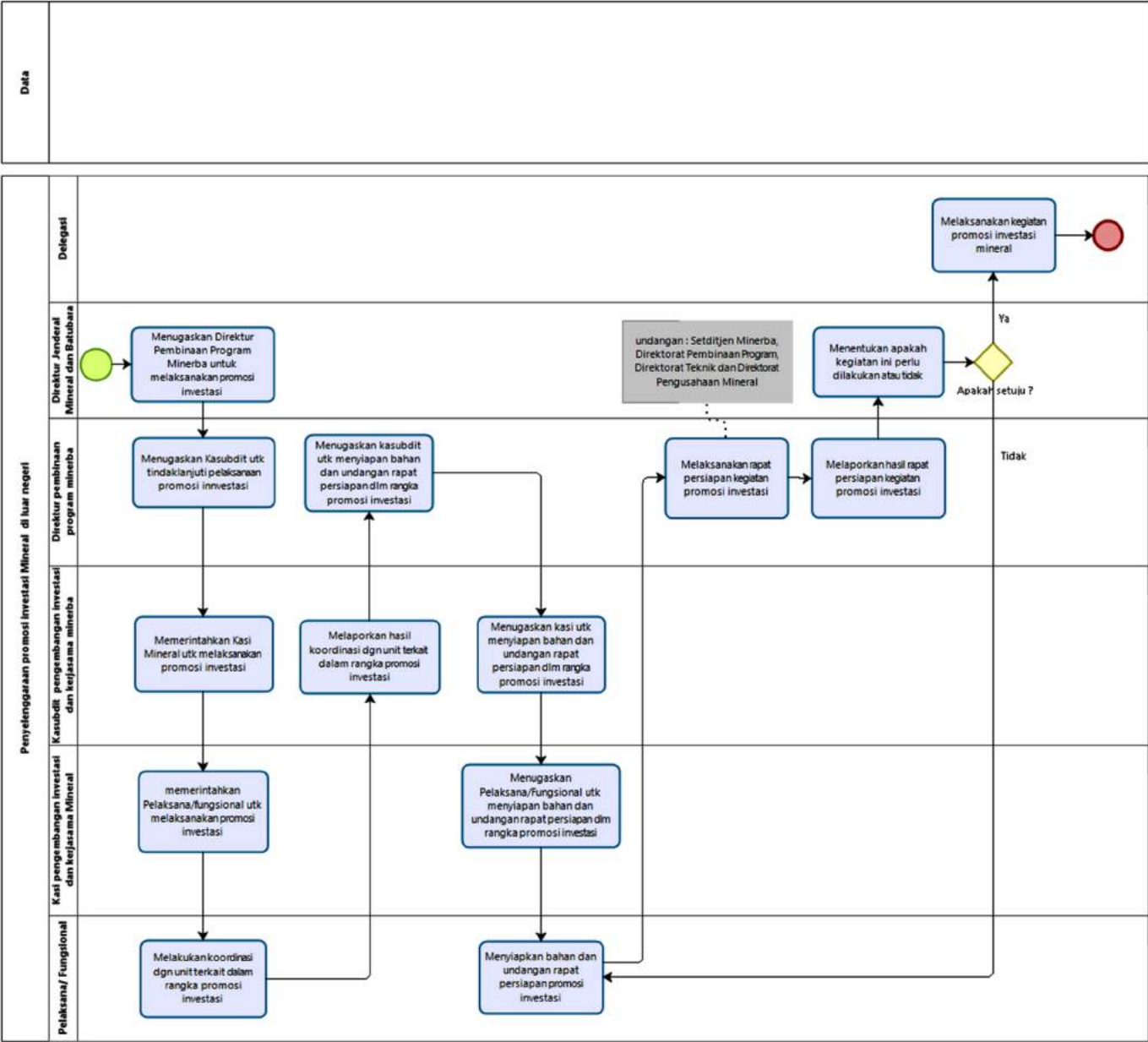
Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara



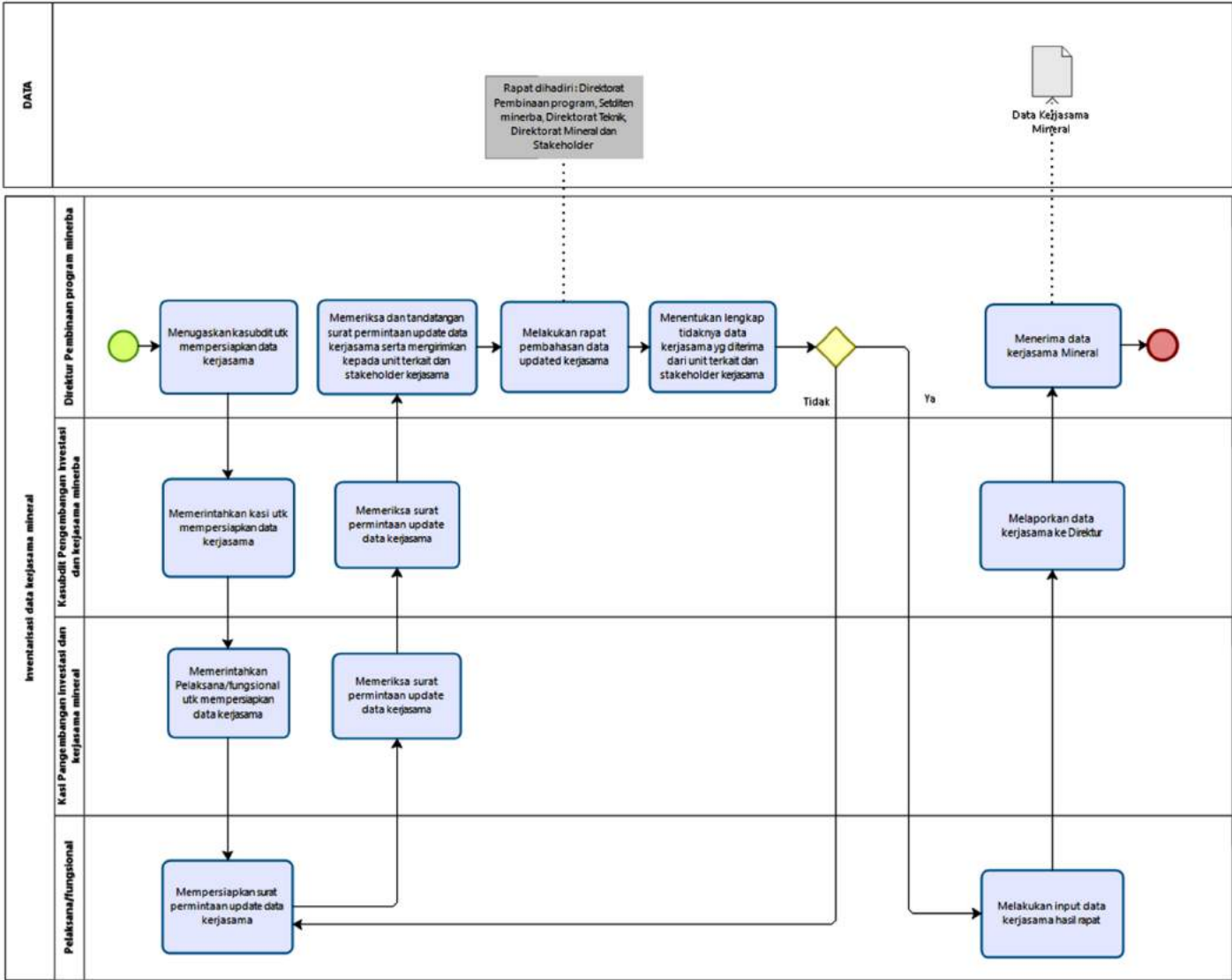
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral – Inventarisasi data rencana investasi mineral



Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral - Penyelenggaraan promosi investasi Mineral di luar negeri



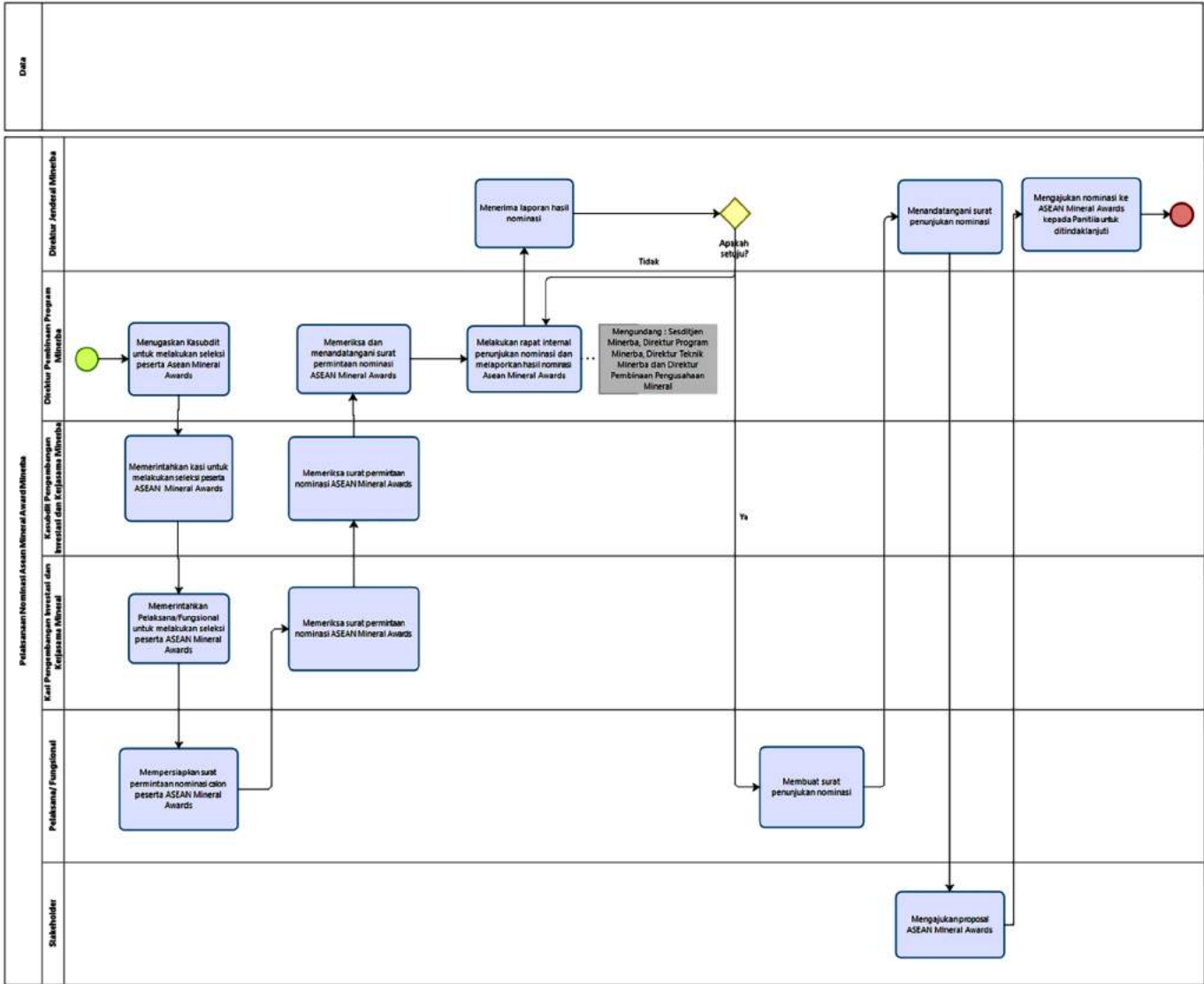
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral – Inventarisasi data kerjasama mineral



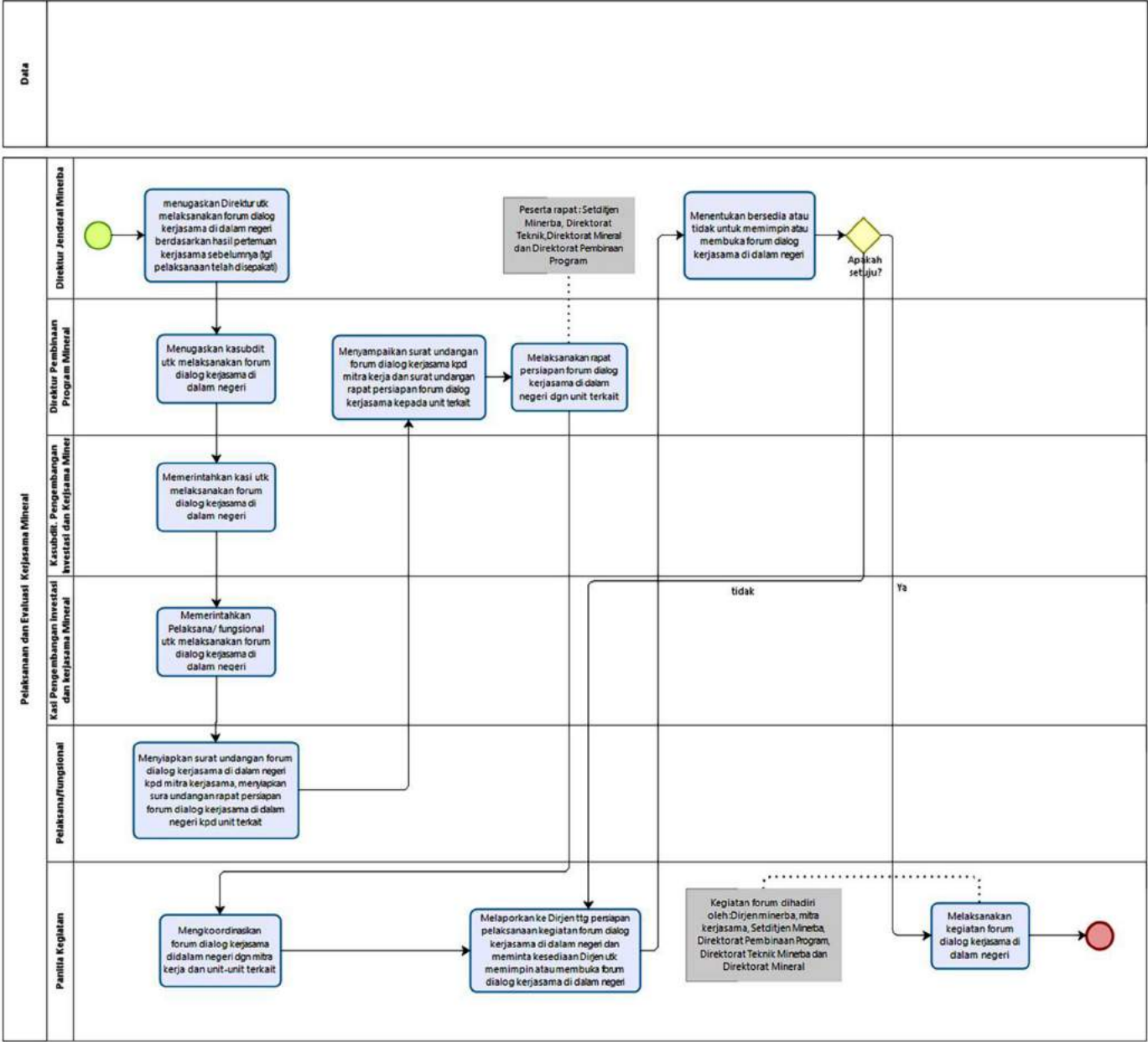
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral - Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Mineral

Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Mineral	 Penetapan DELRI Pada Forum Dialog / Kerja Sama /Undangan Pertemuan Sektor Mineral		
	 Penyusunan Rancangan Naskah Perjanjian Kerjasama Internasional Mineral		
	 Pelaksanaan Nominasi ASEAN Mineral Awards Minerba		
	 Penandatanganan rancangan naskah perjanjian kerjasama Mineral setingkat Eselon 1		
	 Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Mineral		

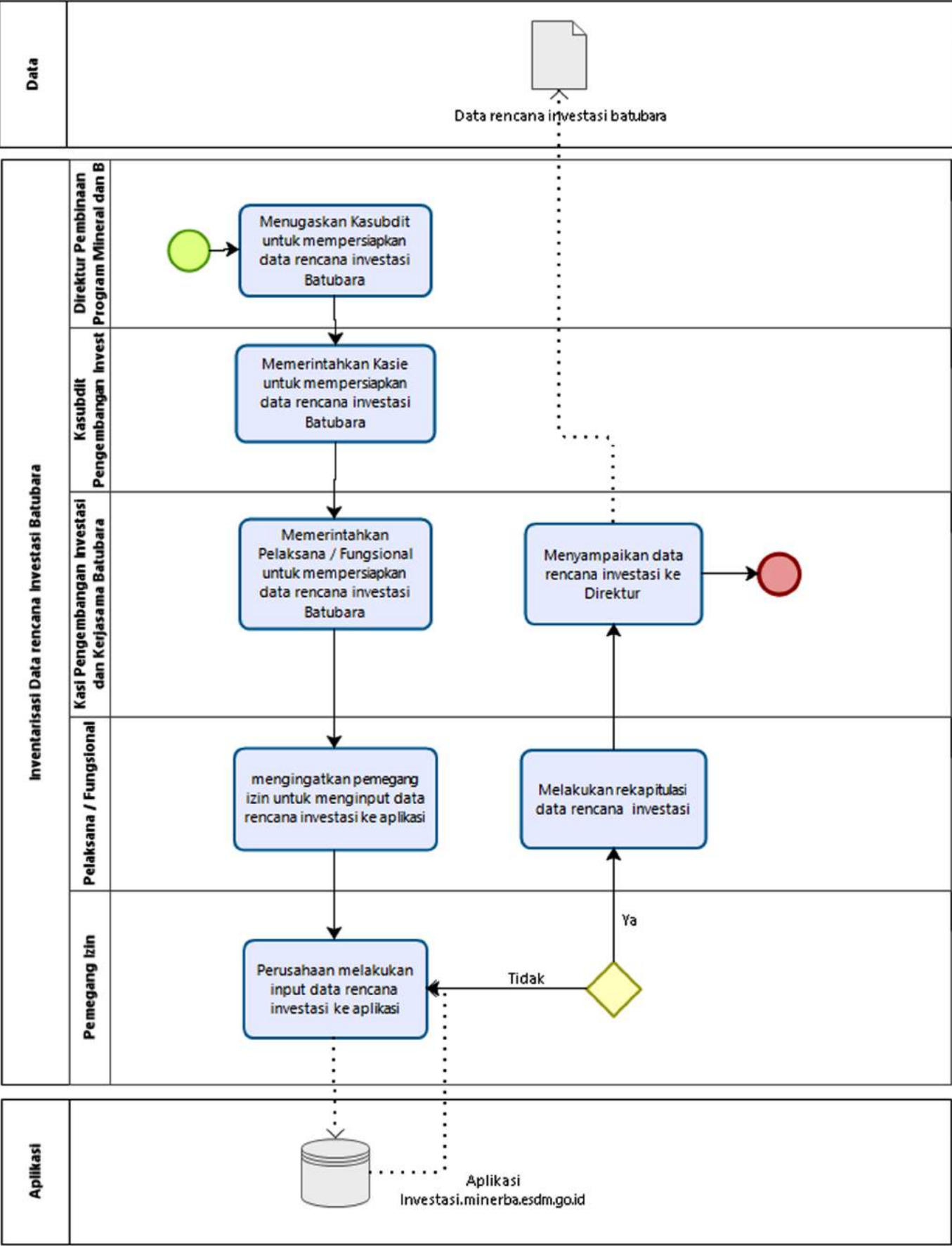
**Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral - Pelaksanaan
Nominasi ASEAN Mineral Awards Minerba**



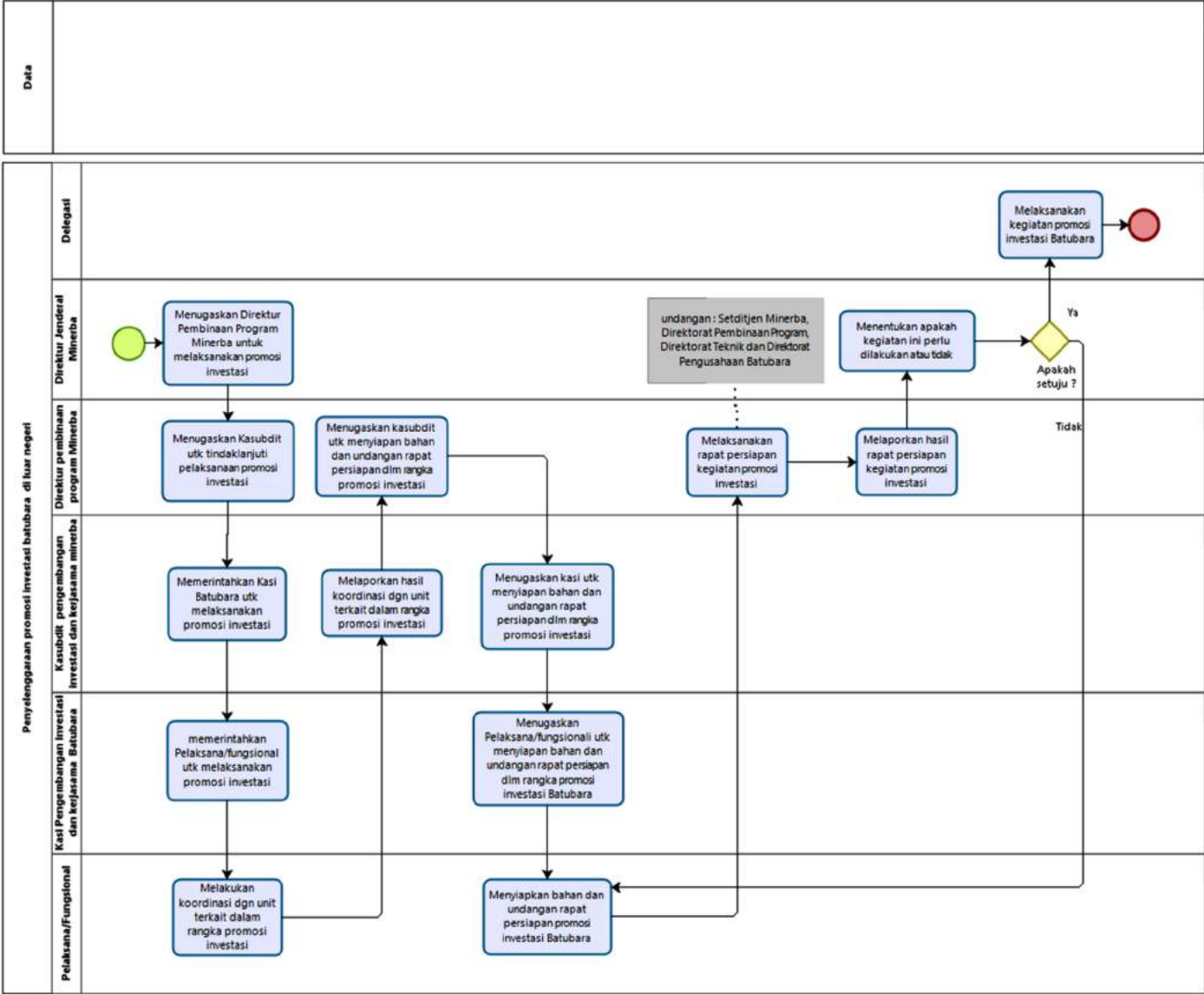
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral - Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Mineral



Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Inventarisasi data rencana investasi batubara



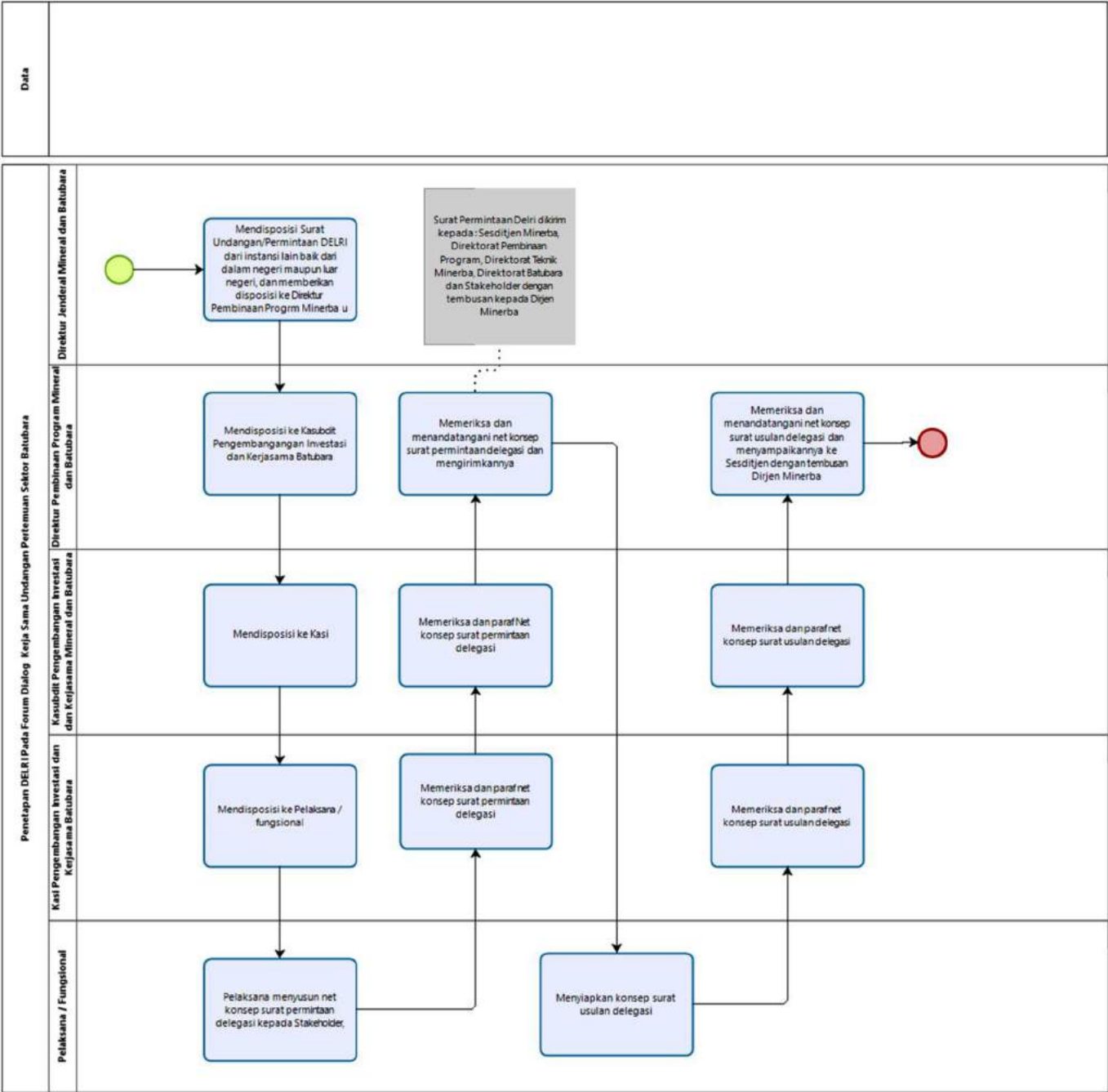
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Penyelenggaraan promosi investasi Batubara di luar negeri



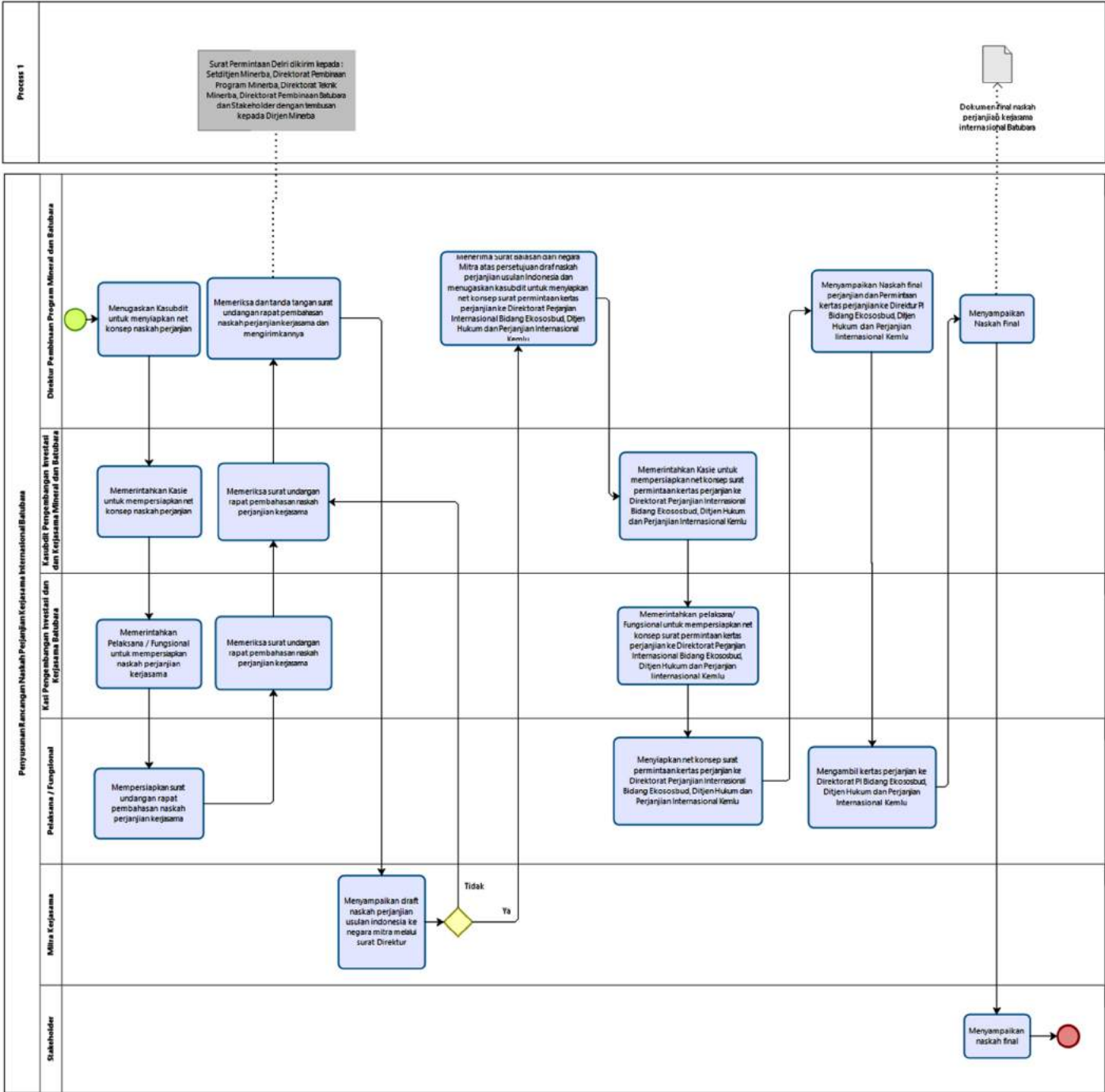
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Batubara

Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Batubara			
	Penetapan DELRI Pada Forum Dialog / Kerja Sama /Undangan Pertemuan Sektor Batubara	Penyusunan Rancangan Naskah Perjanjian Kerjasama Internasional Batubara	Pelaksanaan Nominasi Asean Batubara Awards Minerba
			
	Penandatanganan rancangan naskah perjanjian kerjasama batubara setingkat Eselon 1	Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Batubara	

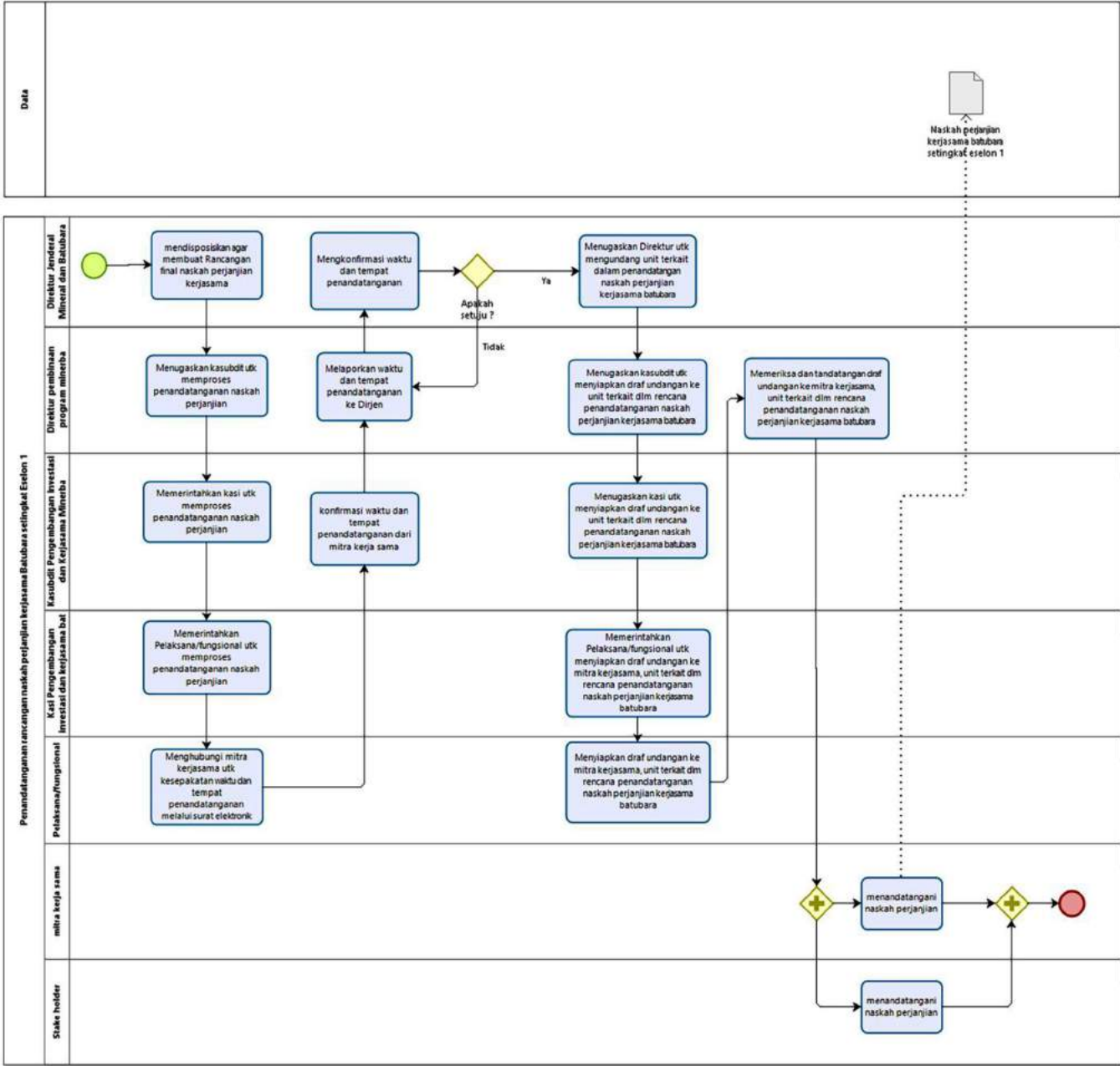
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Penetapan DELRI Pada Forum Dialog / Kerja Sama /Undangan Pertemuan Sektor Batubara



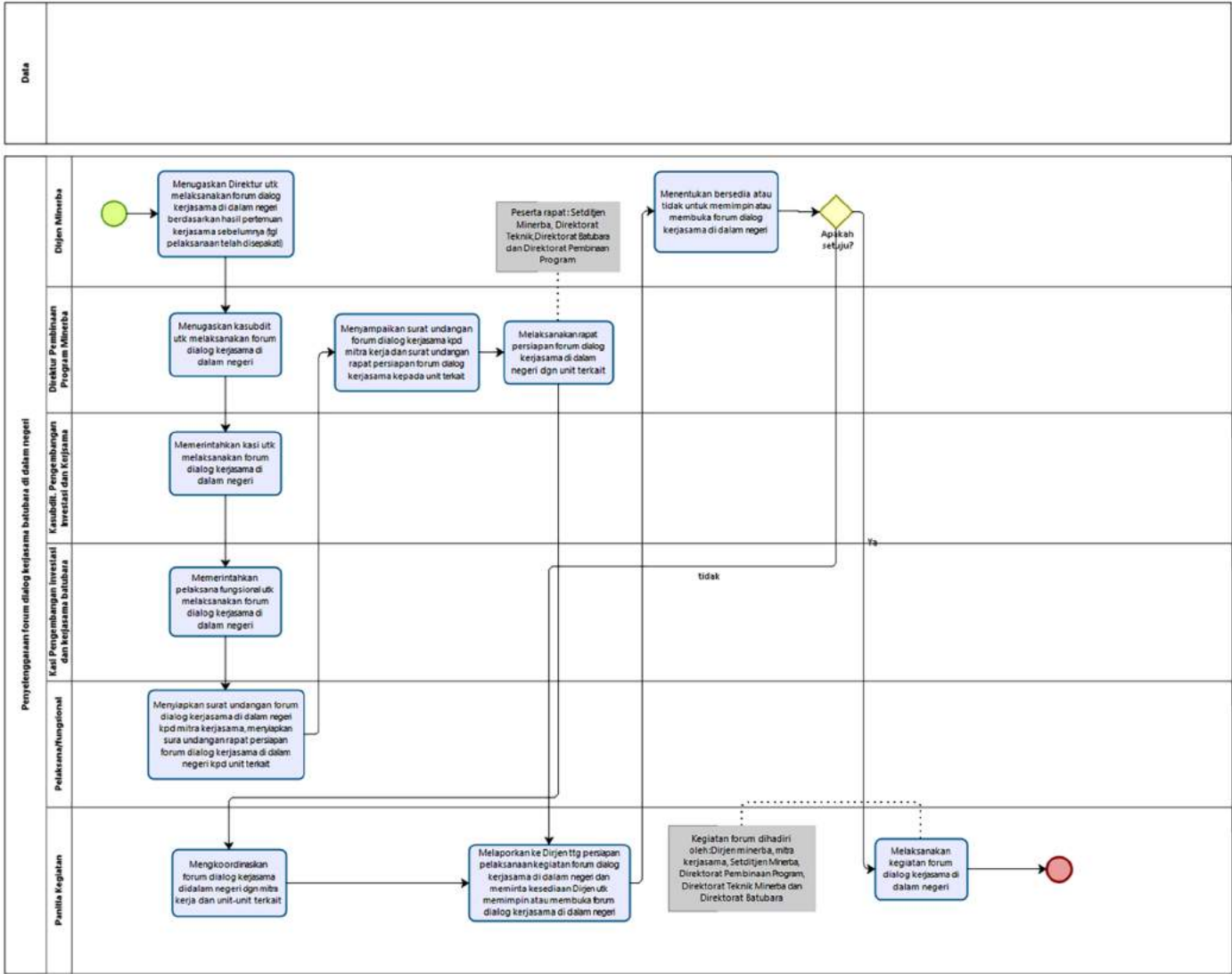
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Penyusunan Rancangan Naskah Perjanjian Kerjasama Internasional Batubara



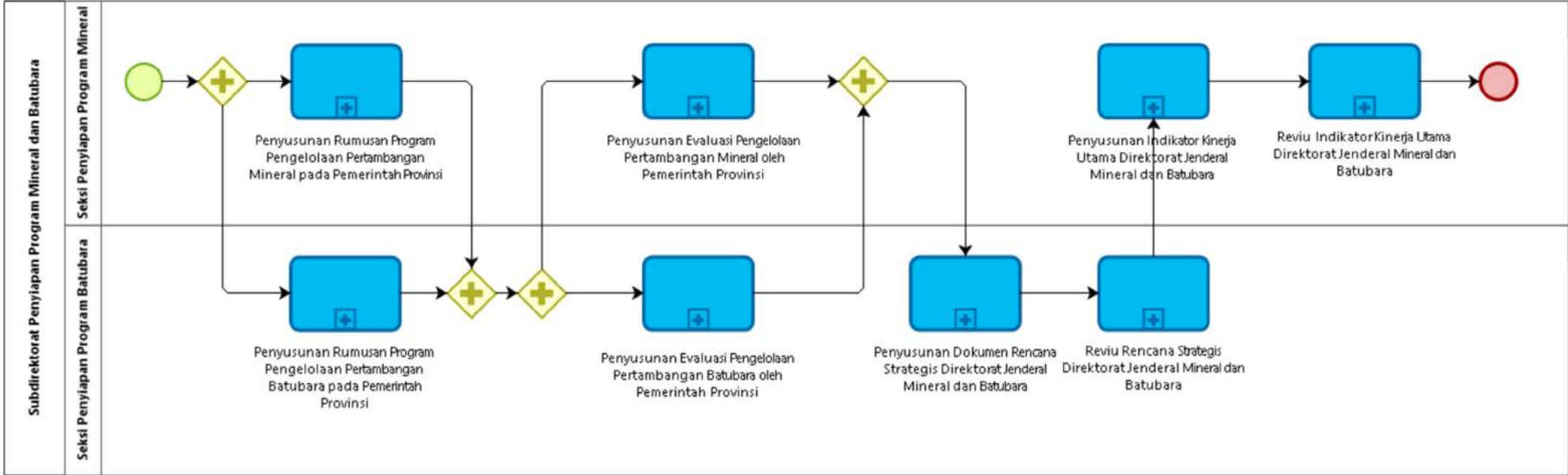
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Penandatanganan rancangan naskah perjanjian kerjasama batubara setingkat Eselon 1



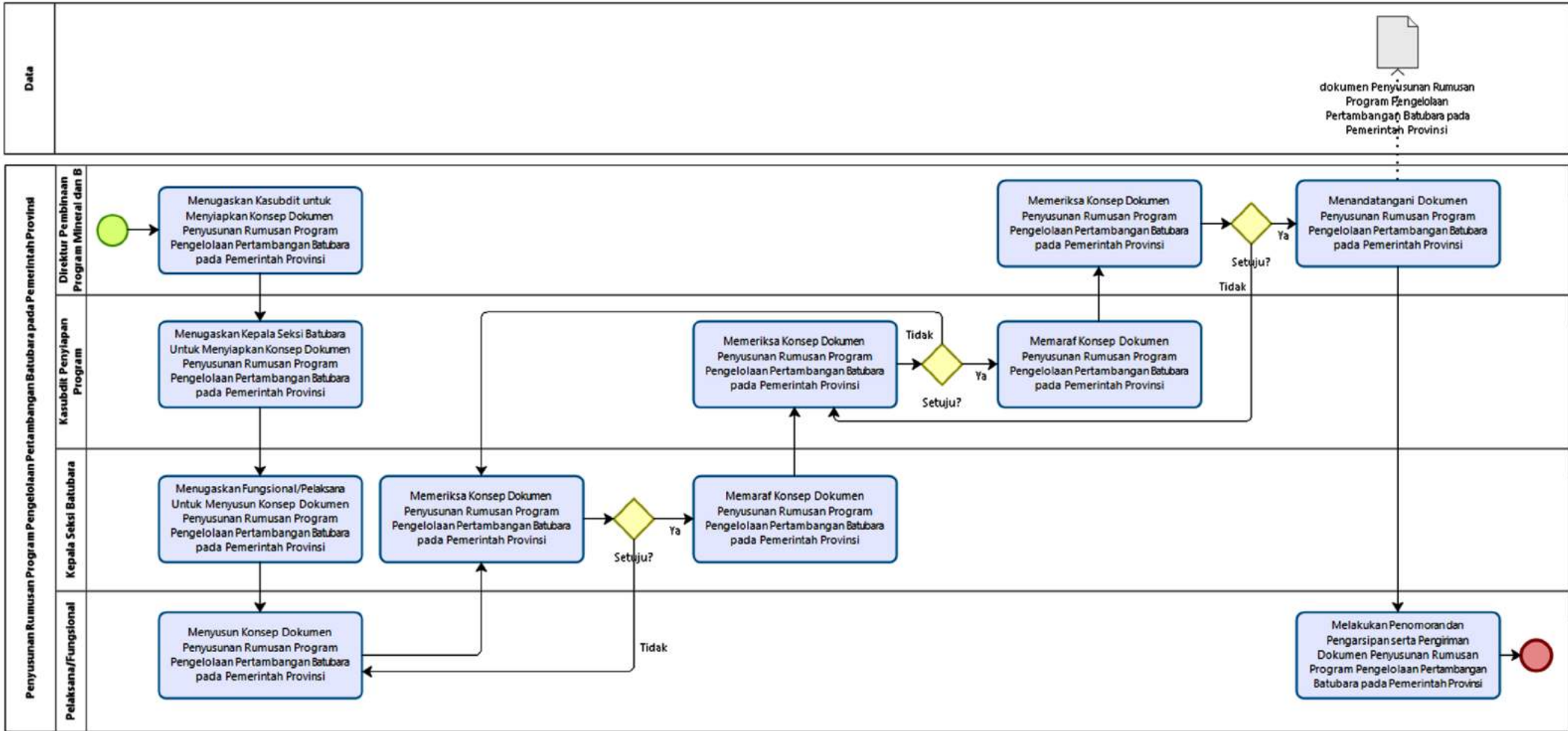
Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara - Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Batubara



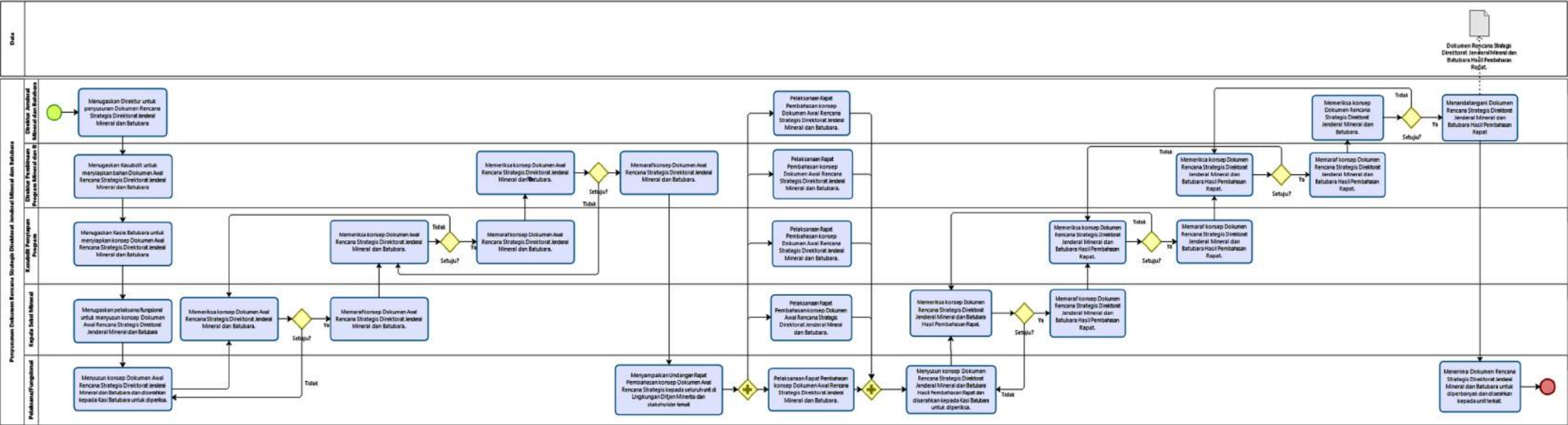
Penyiapan Program Mineral dan Batubara



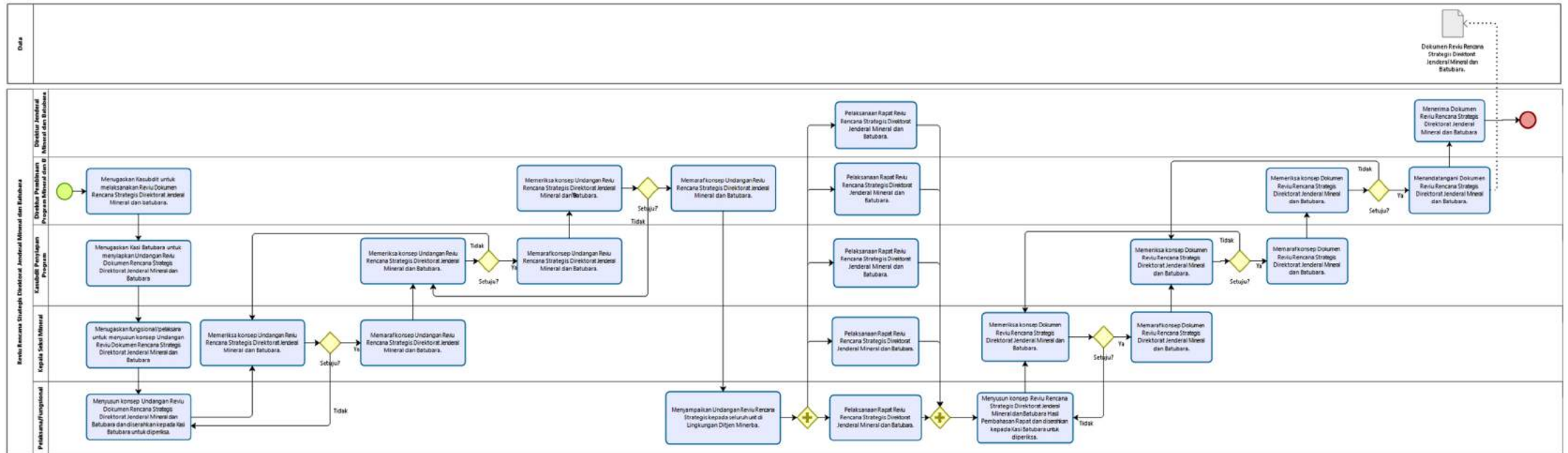
Seksi Penyiapan Program Batubara - Penyusunan Rumusan Program Pengelolaan Pertambangan Batubara pada Pemerintah Provinsi



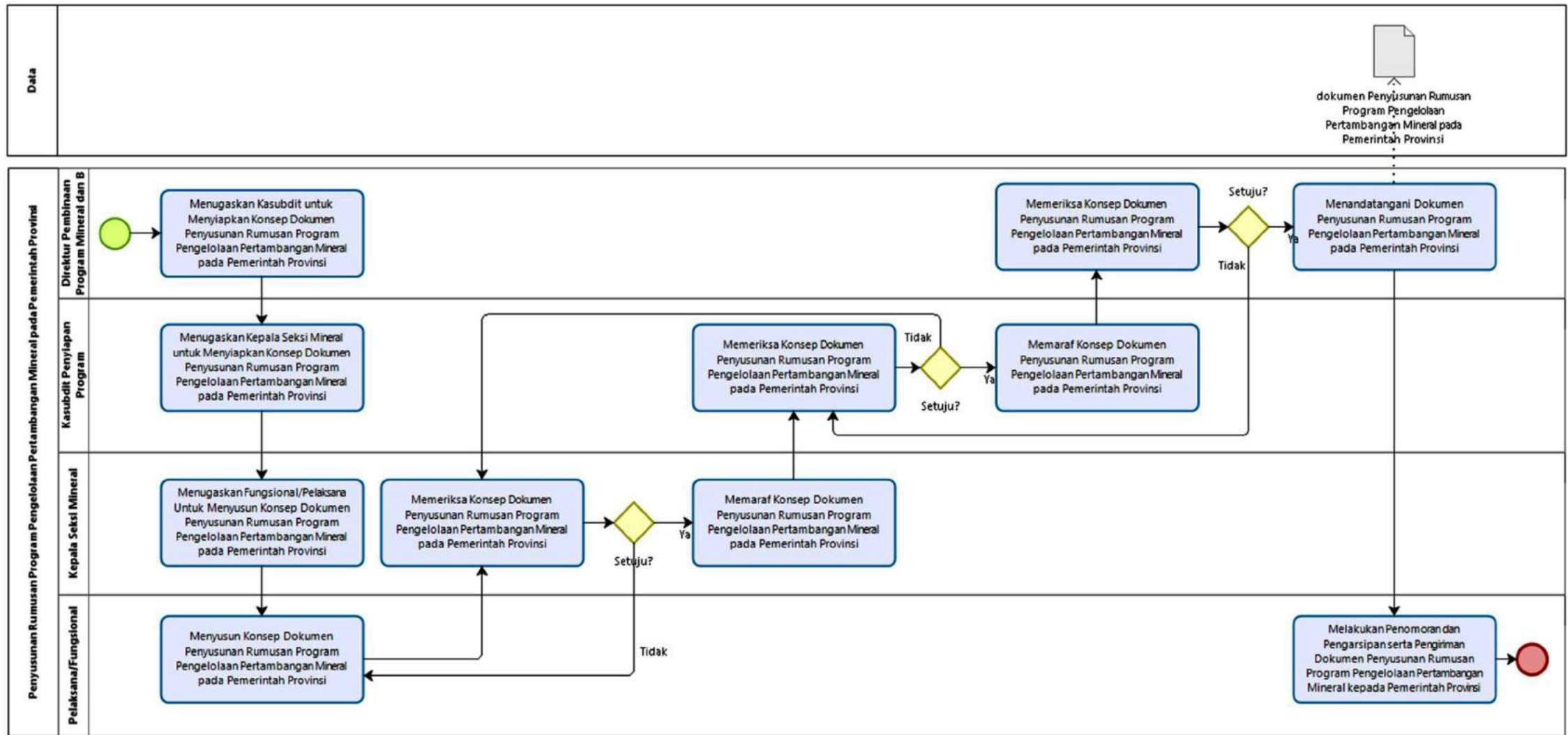
Seksi Penyiapan Program Batubara - Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



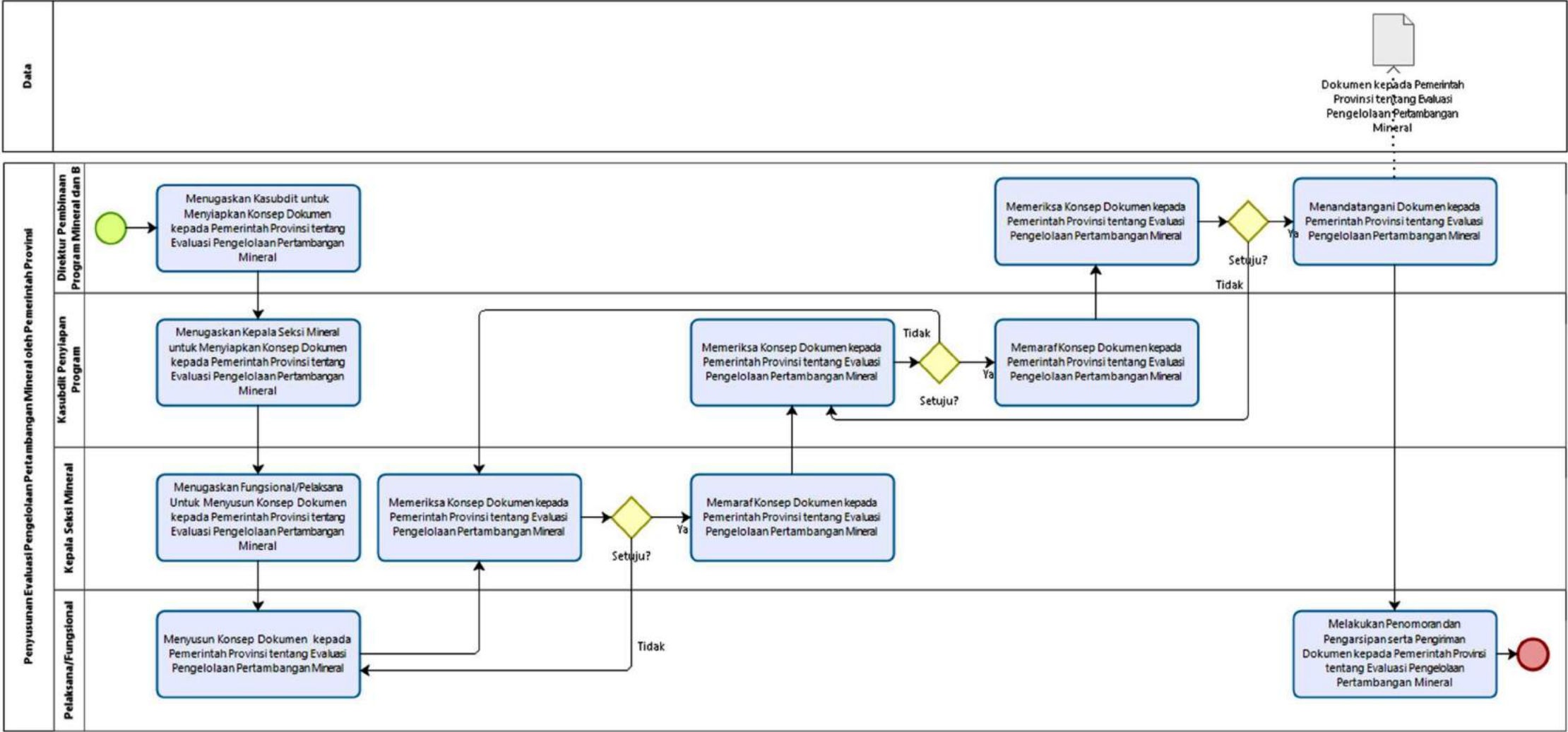
Seksi Penyiapan Program Batubara - Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



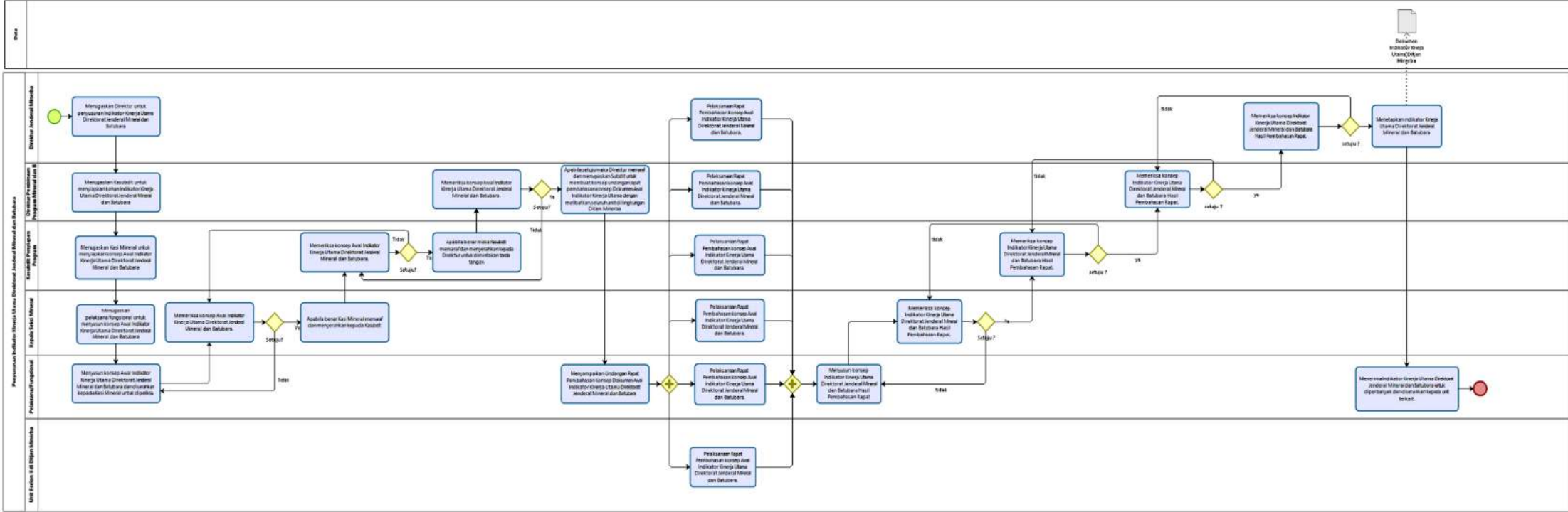
Penyiapan Program Mineral - Penyusunan Rumusan Program Pengelolaan Pertambangan Mineral pada Pemerintah Provinsi



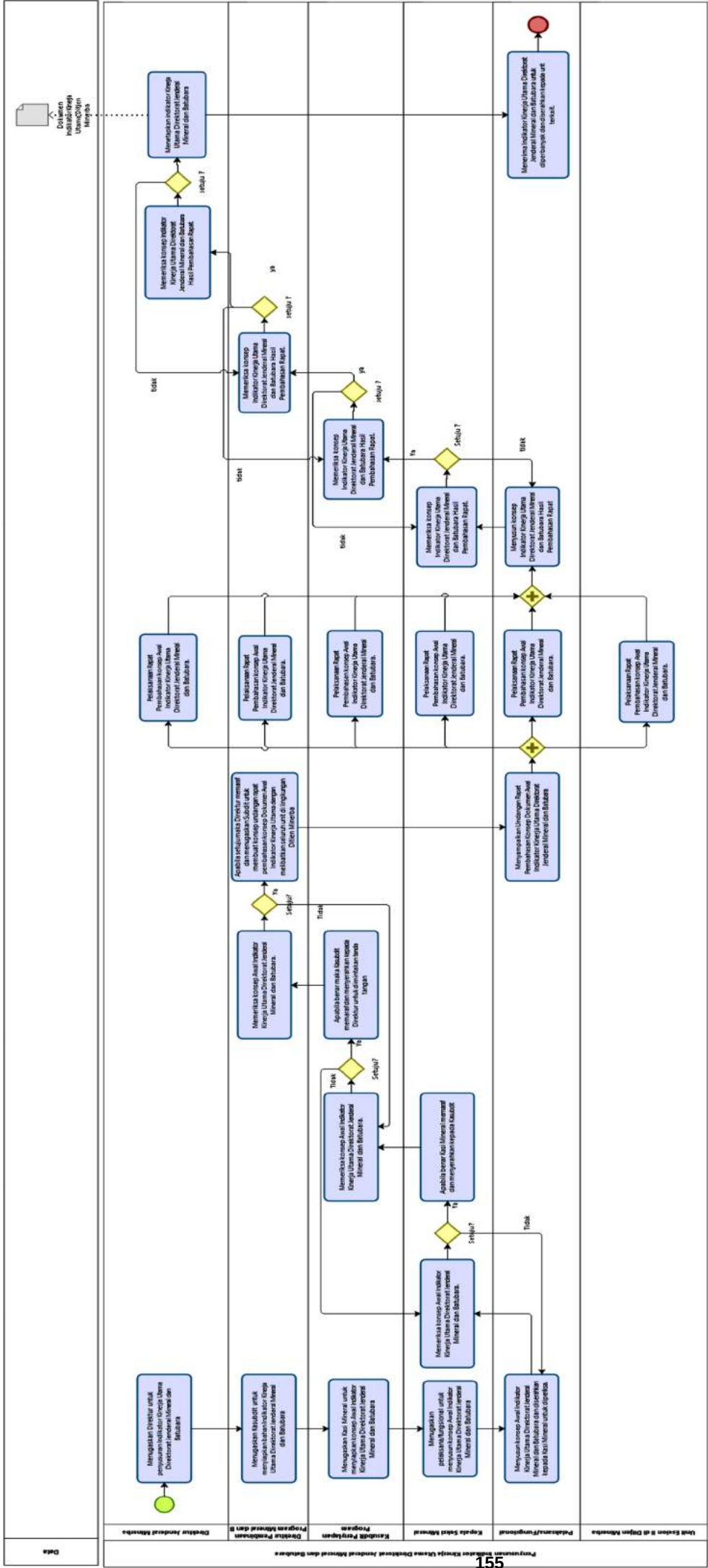
Seksi Penyiapan Program Mineral - Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan Mineral oleh Pemerintah Provinsi



Seksi Penyiapan Program Mineral - Penyusunan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



Seksi Penyiapan Program Mineral - Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

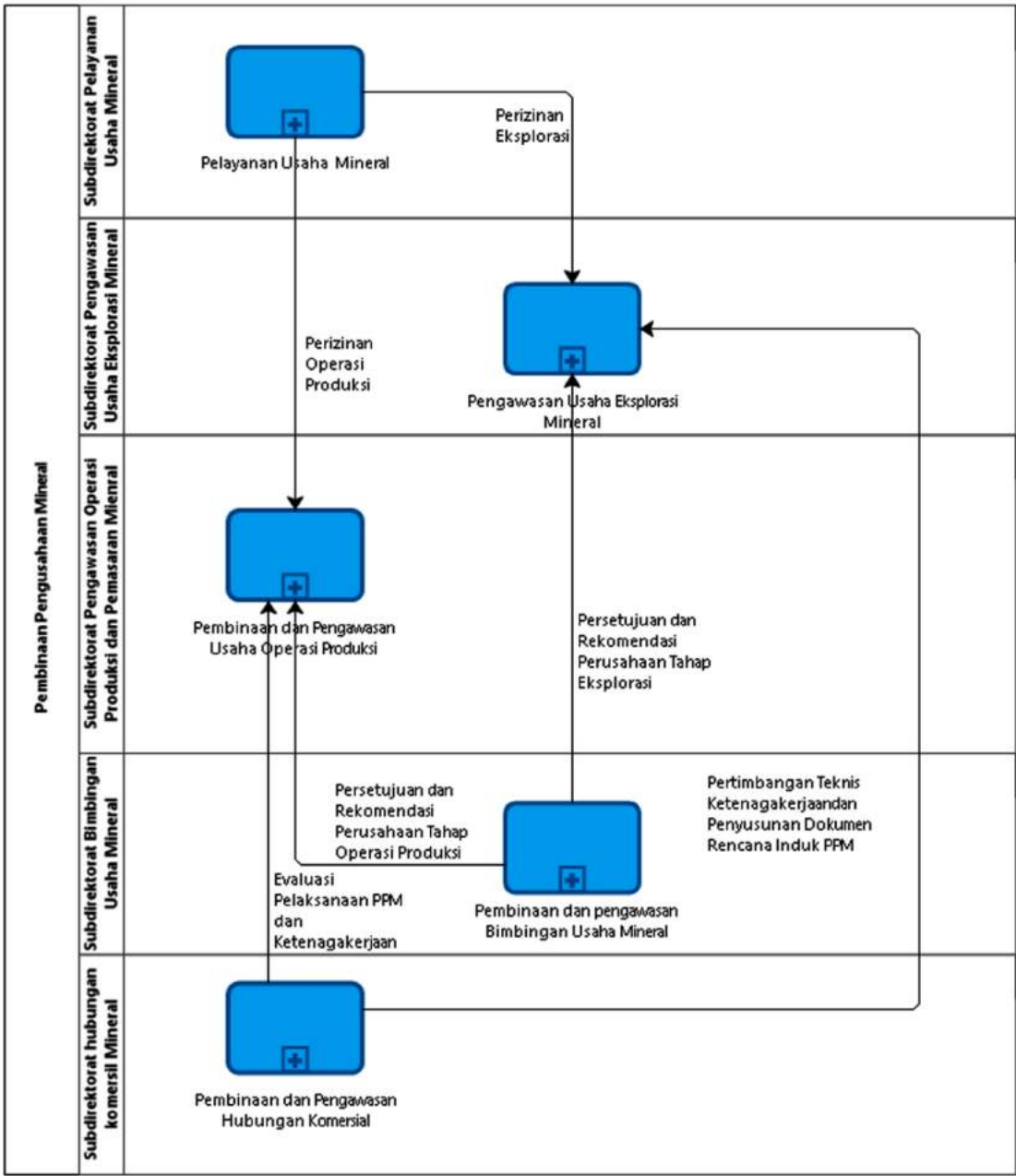


BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 315.K/30/DJB/2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

**BISNIS PROSES DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN
MINERAL**

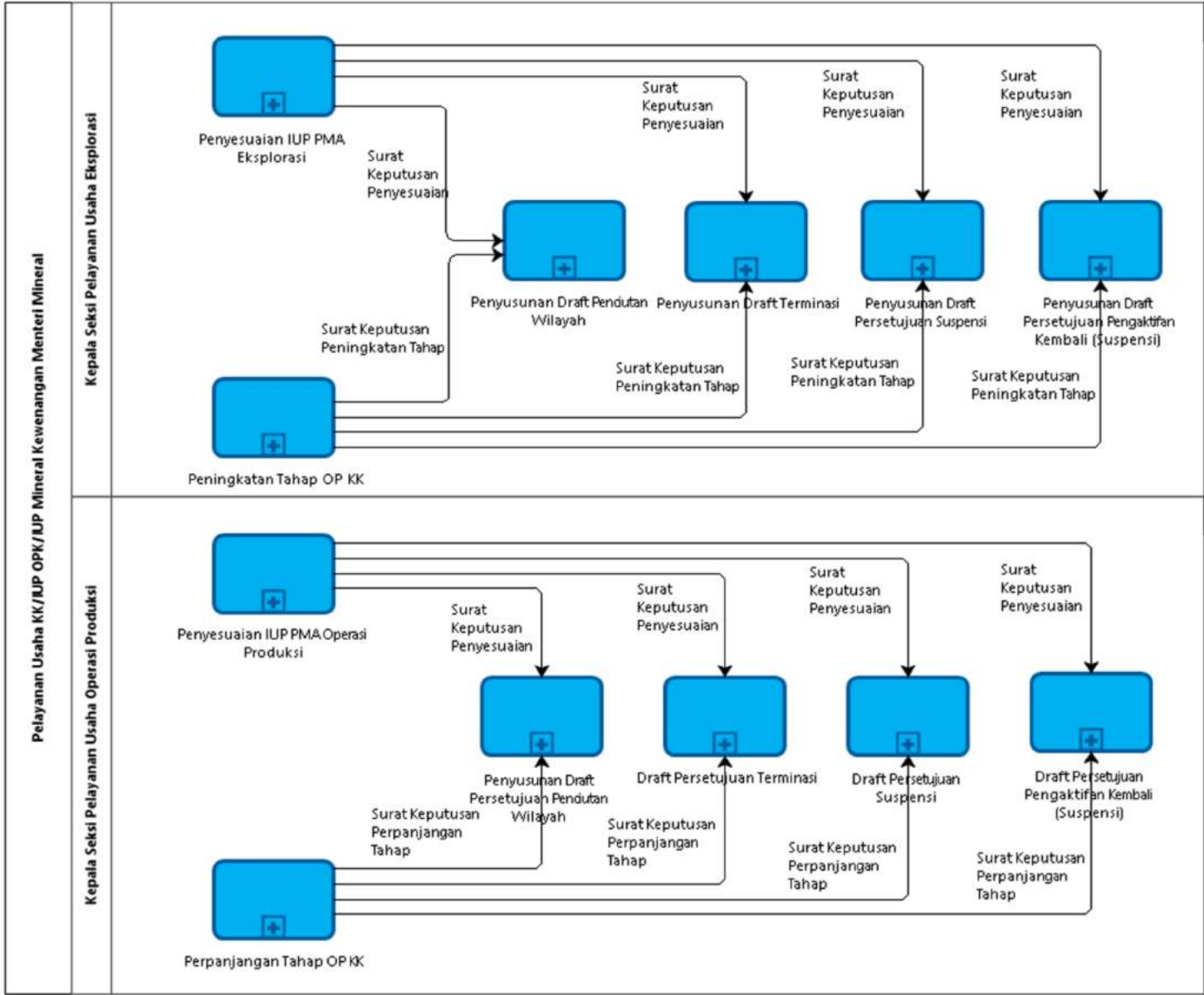


Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai proses bisnis sebagai berikut:

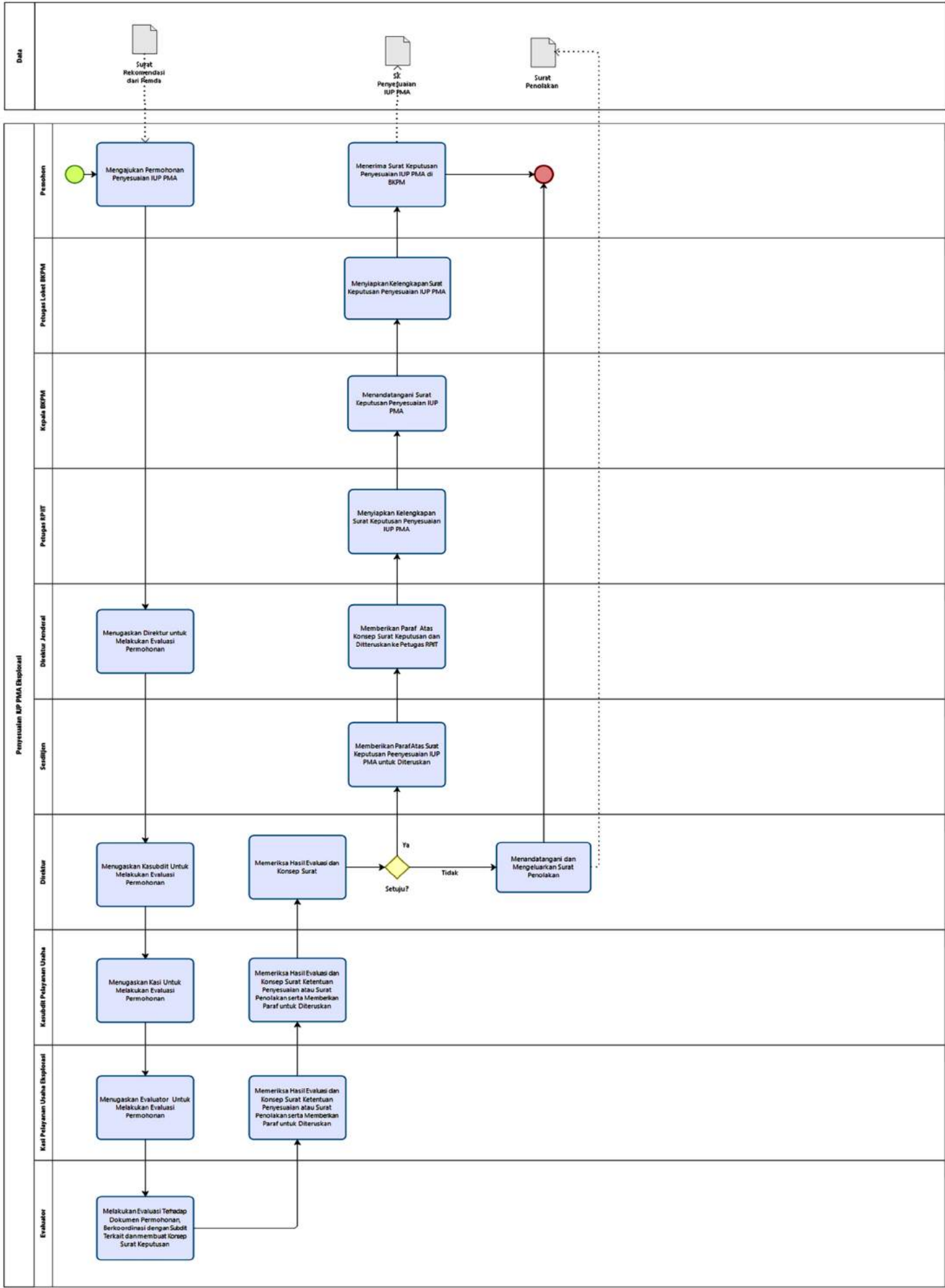
- a. Pelayanan usaha mineral meliputi pengelolaan perizinan dan rekomendasi kegiatan usaha pertambangan yang kemudian akan dimanfaatkan dalam pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi serta pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi

- b. Pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi mineral meliputi persetujuan RKAB, penerbitan surat klarifikasi dan rekomendasi serta melakukan monitoring dan evaluasi tahap eksplorasi dan studi kelayakan yang kemudian akan dimanfaatkan dalam pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi serta pembinaan dan pengawasan bimbingan usaha mineral
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral meliputi persetujuan RKAB, persetujuan terkait pengolahan dan pemurnian mineral serta pengawasan produksi yang kemudian akan dimanfaatkan dalam pembinaan dan pengawasan hubungan komersial mineral serta pembinaan dan pengawasan bimbingan usaha mineral
- d. Pembinaan dan pengawasan bimbingan usaha mineral meliputi monitoring dan evaluasi dalam aspek keuangan dan barang produksi serta evaluasi laporan keuangan perusahaan pertambangan yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi mineral serta Pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral
- e. Pembinaan dan pengawasan Hubungan Komersial mineral meliputi monitoring dan evaluasi dalam aspek ketenagakerjaan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi mineral serta Pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral.

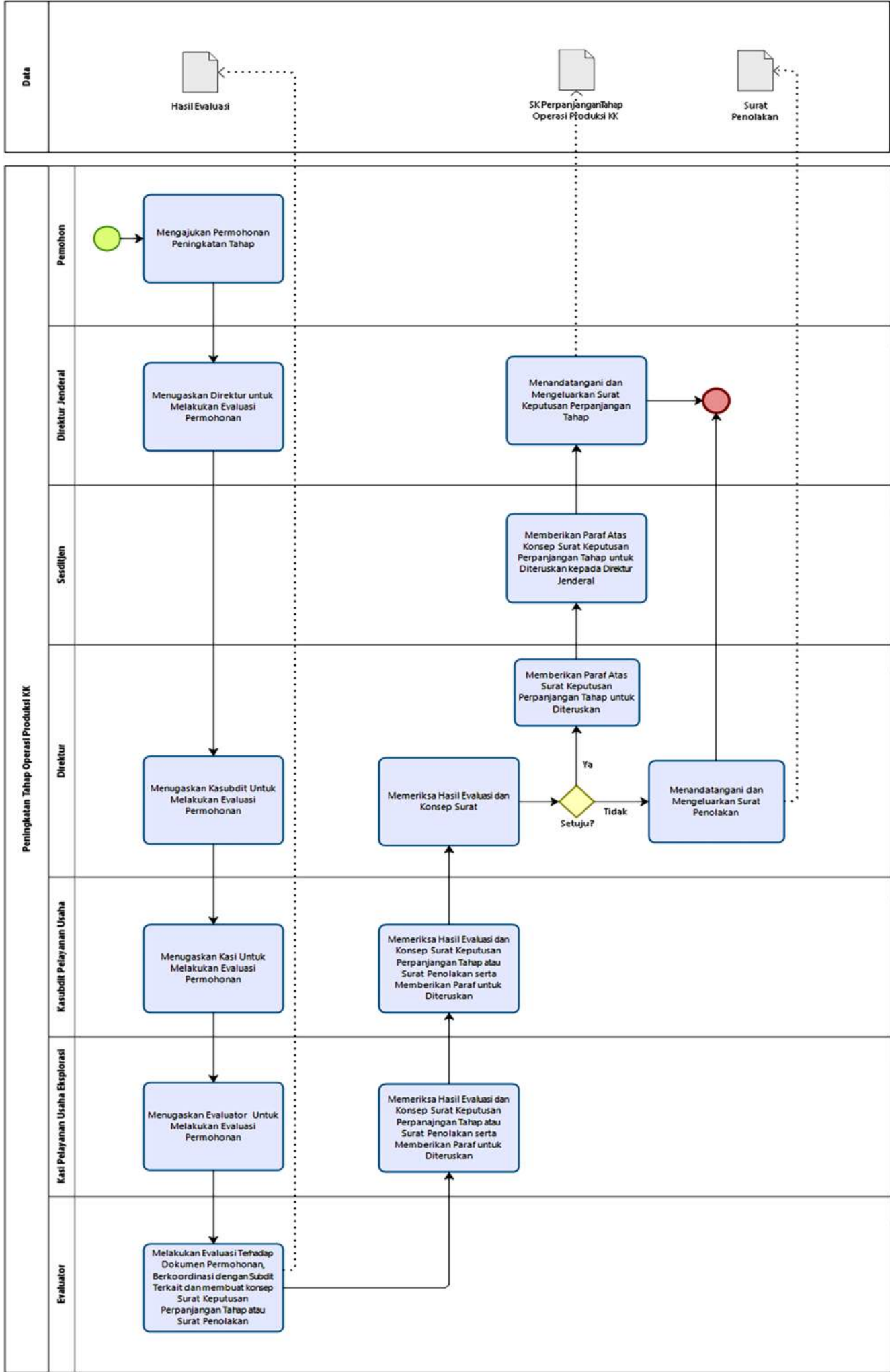
Pelayanan Usaha Mineral



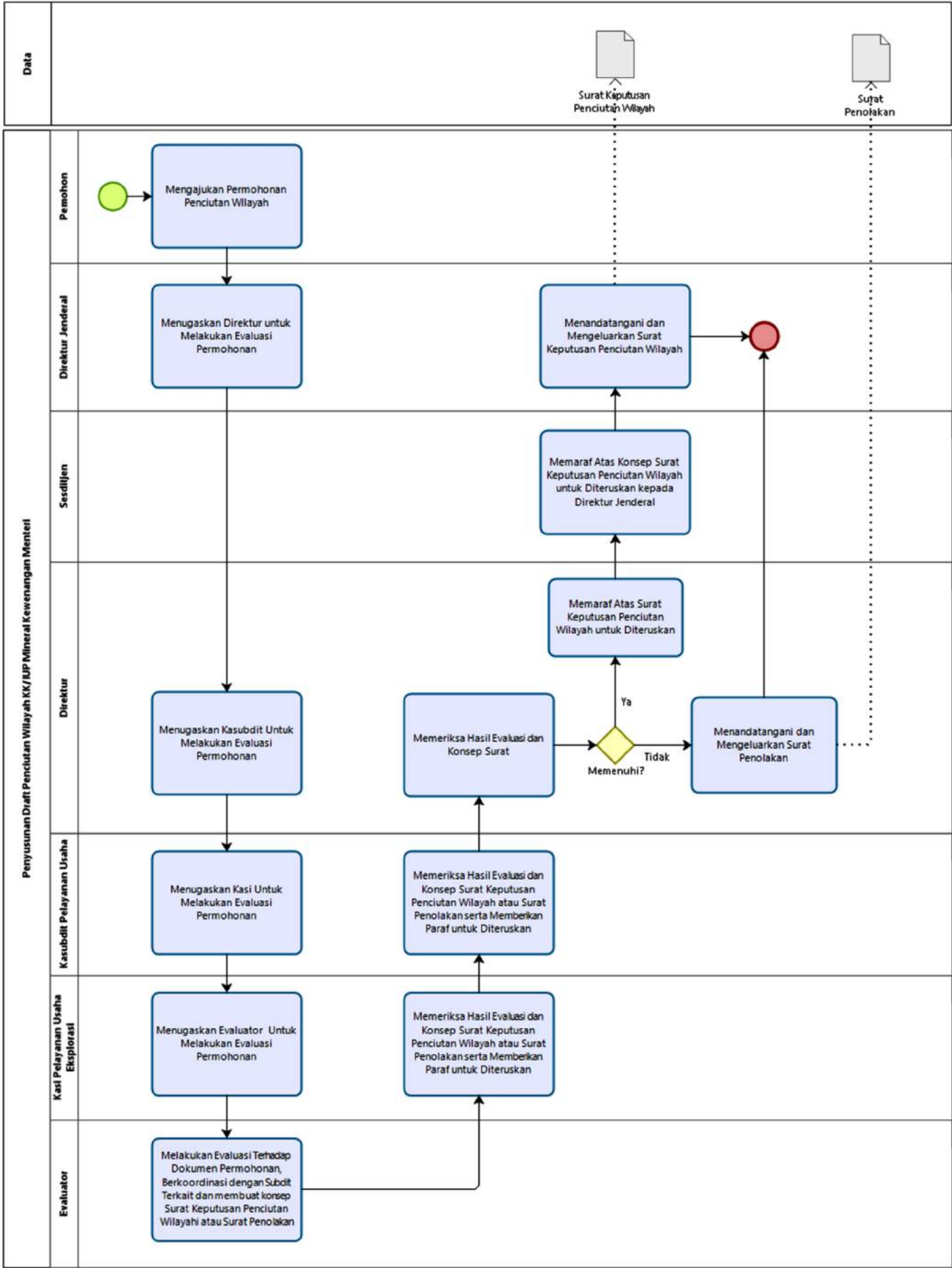
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyesuaian IUP PMA Eksplorasi



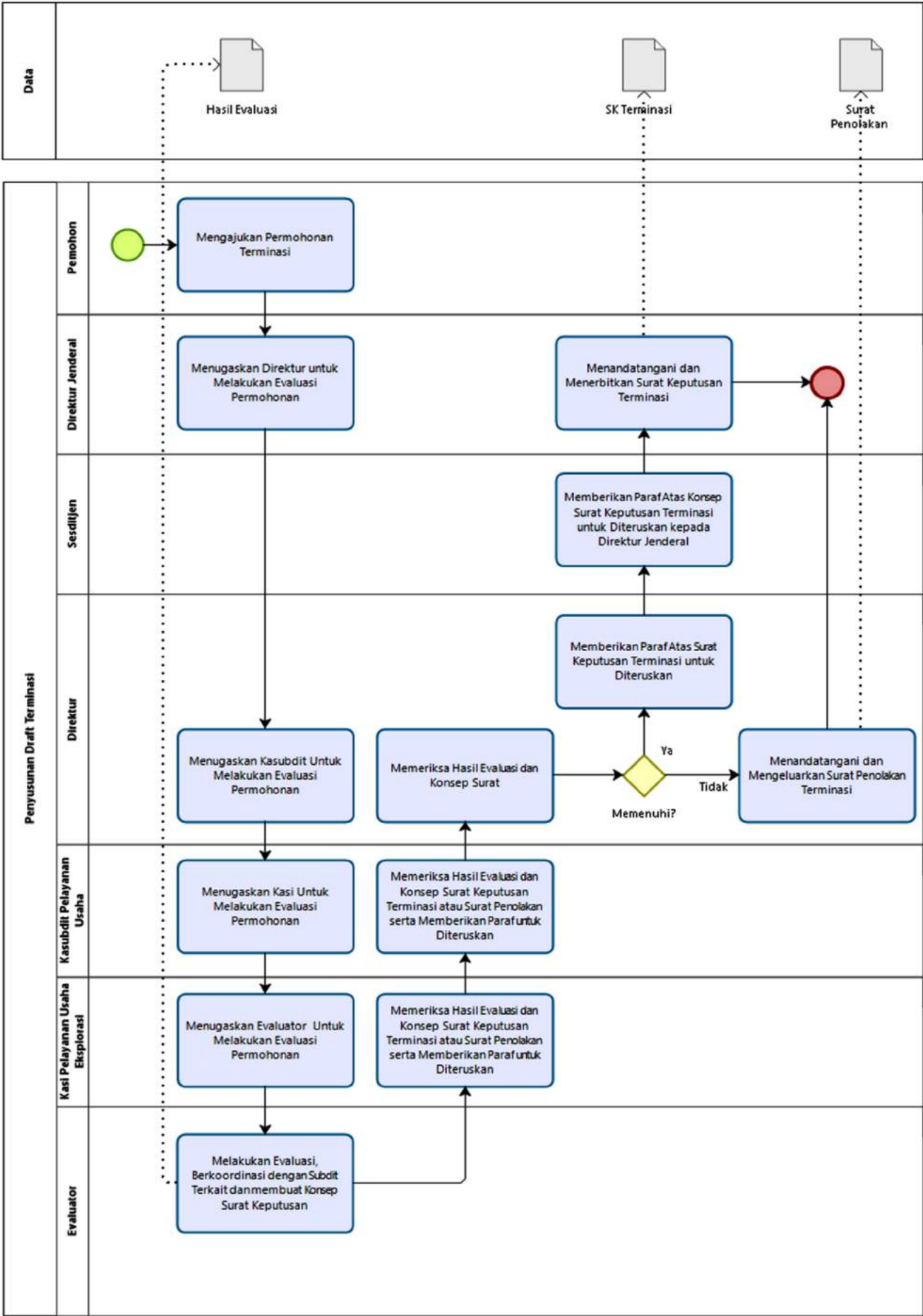
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Peningkatan Tahap Operasi Produksi KK



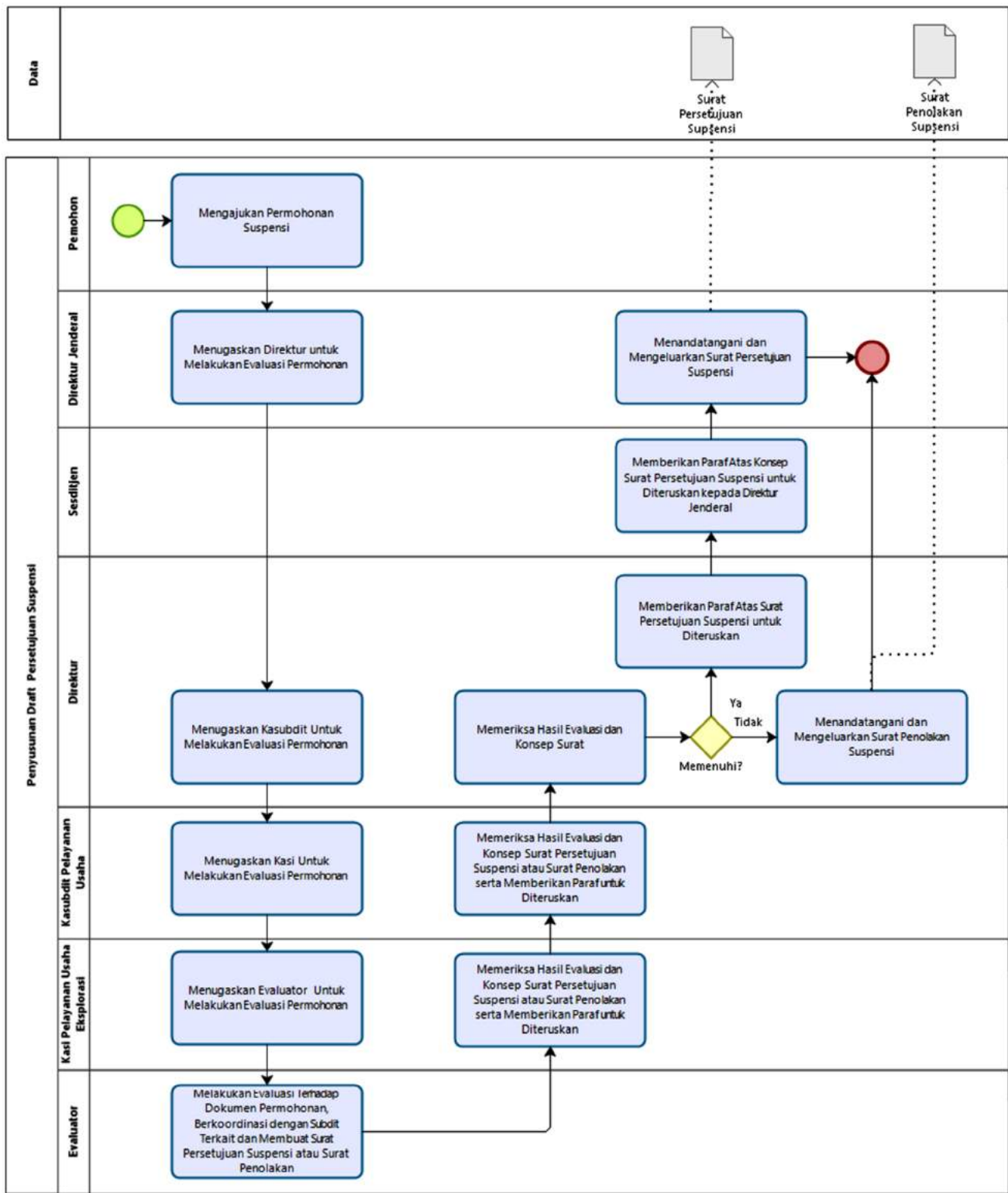
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyusunan Draft Penciutan Wilayah



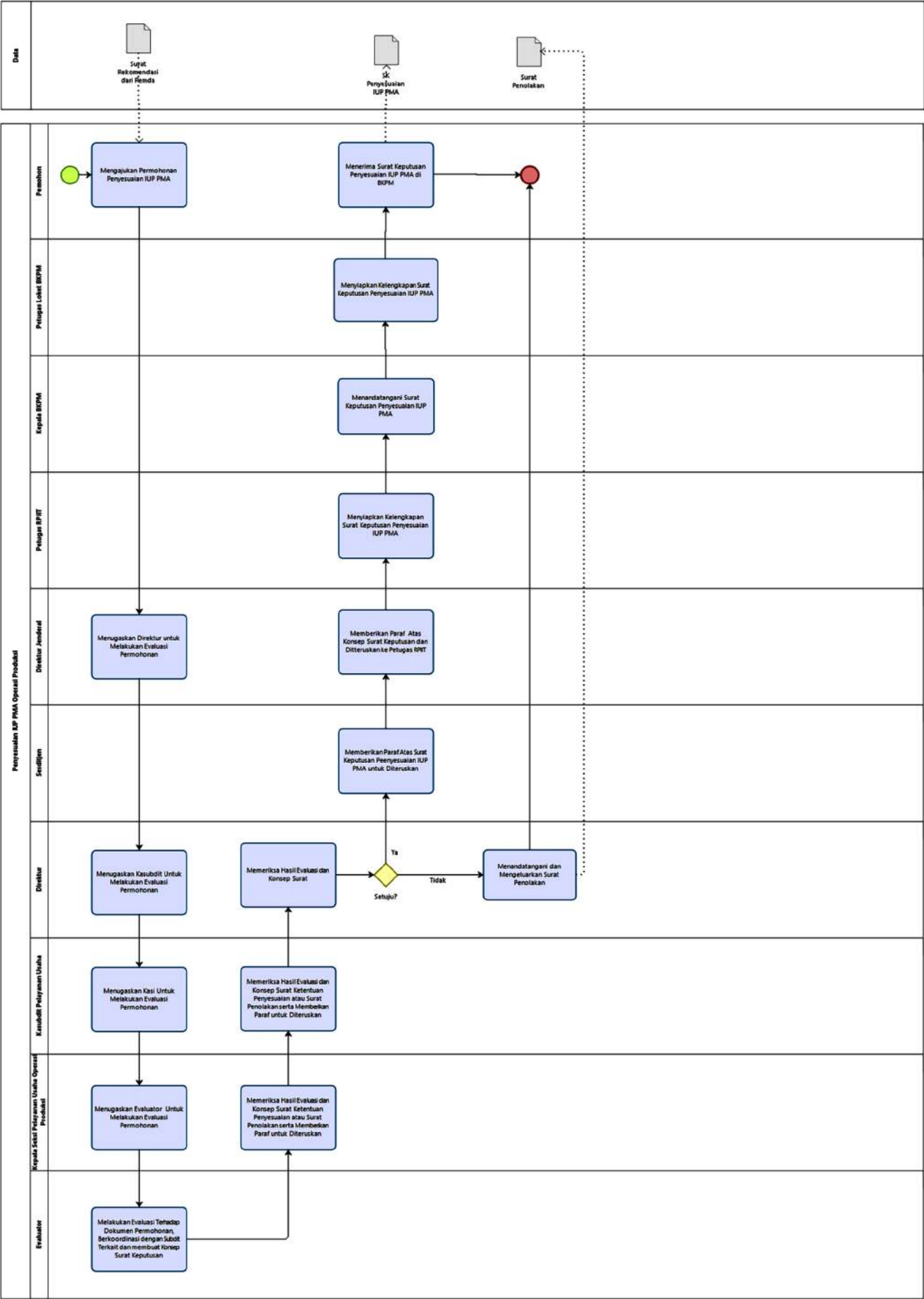
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyusunan Draft Terminasi



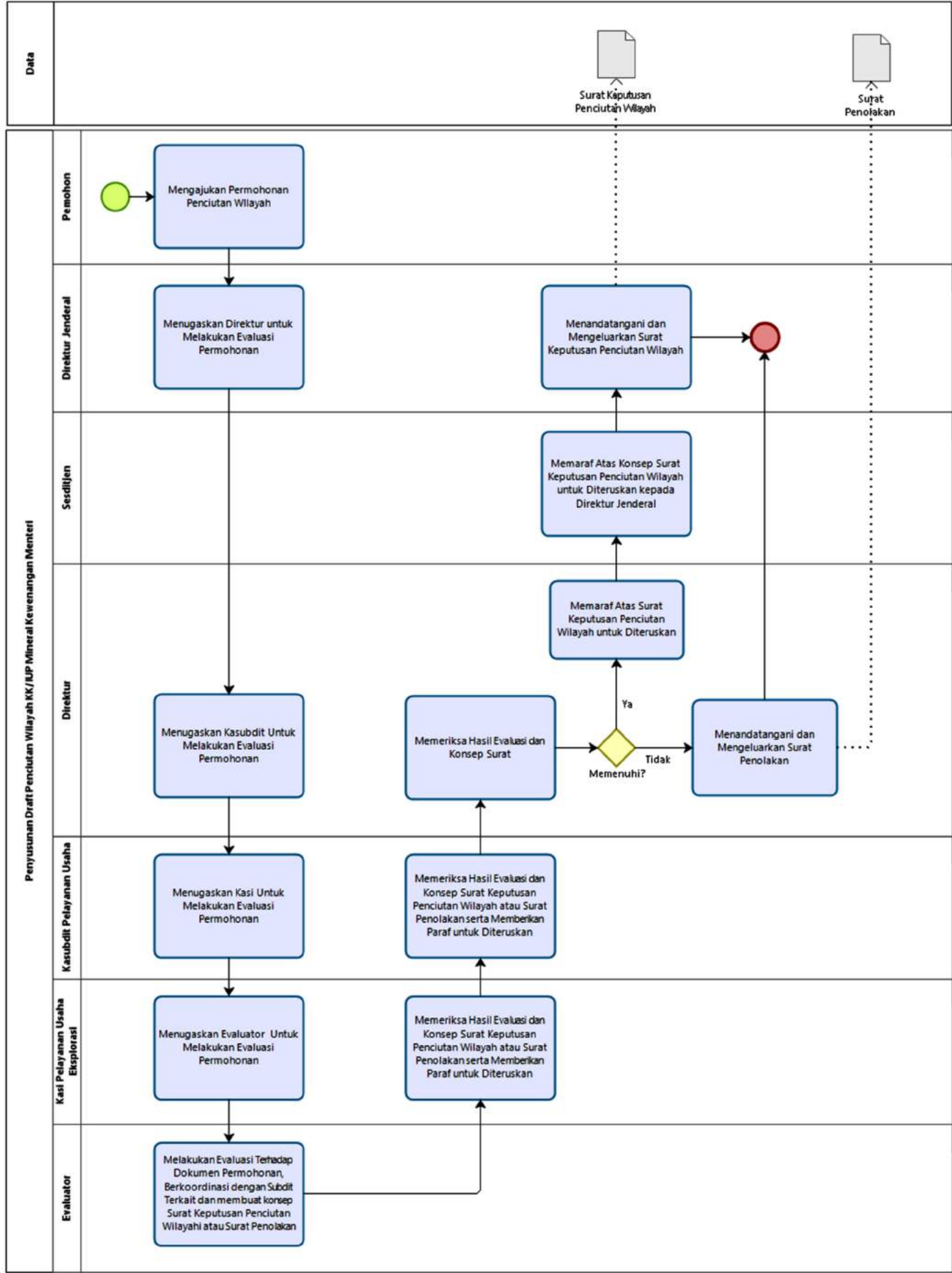
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyusunan Draft Persetujuan Suspensi



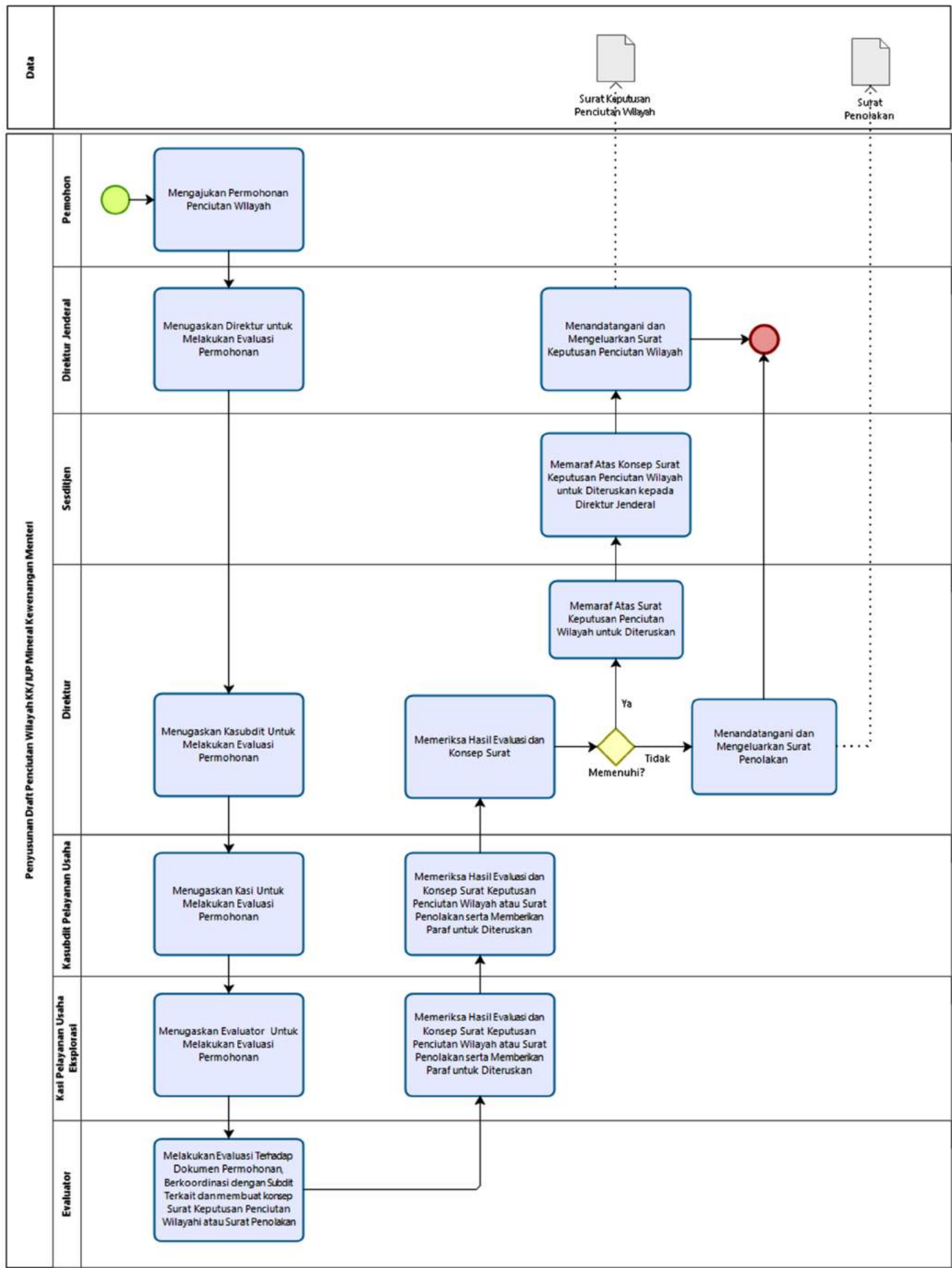
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyesuaian IUP PMA Operasi Produksi



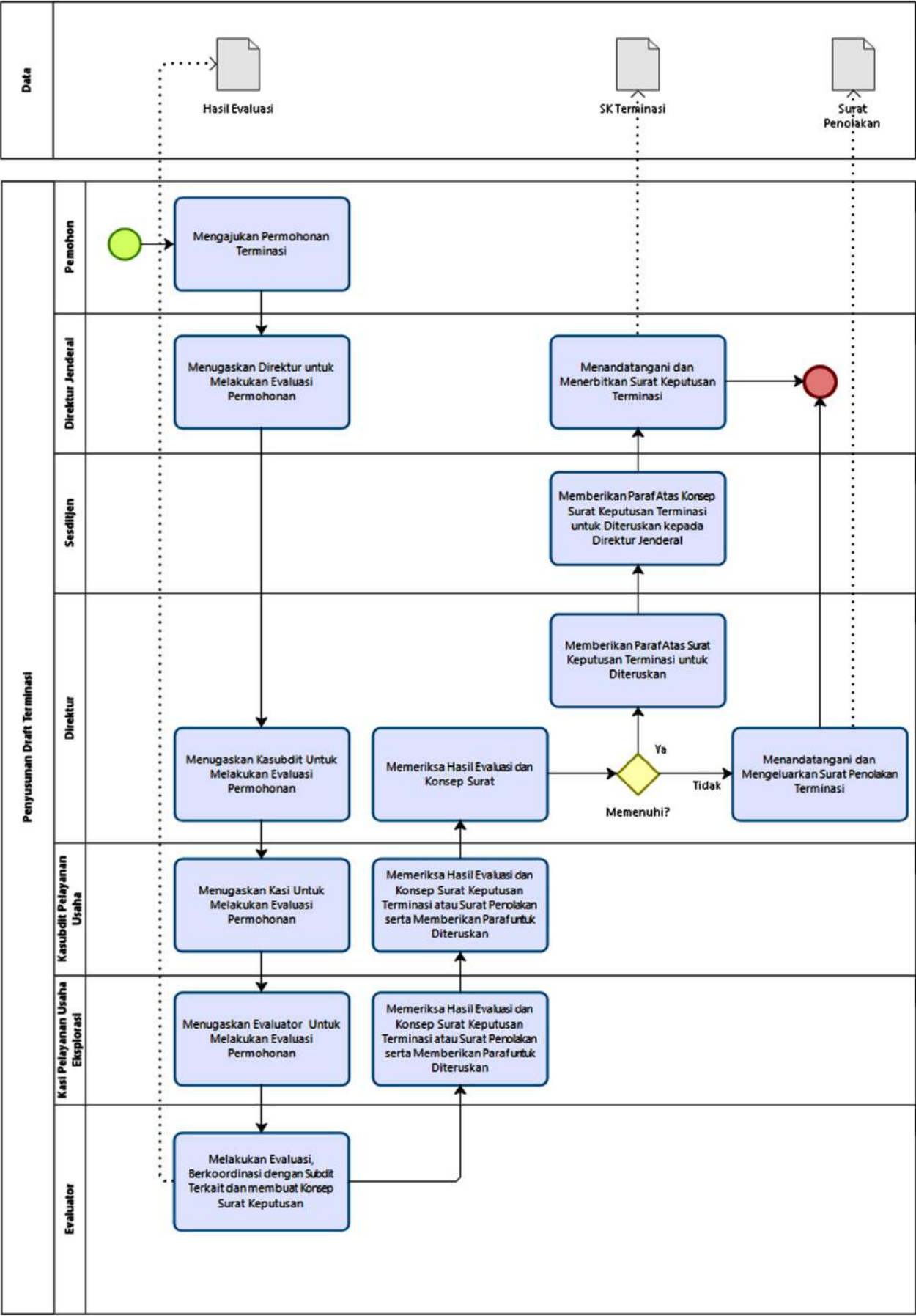
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Penciutan Wilayah



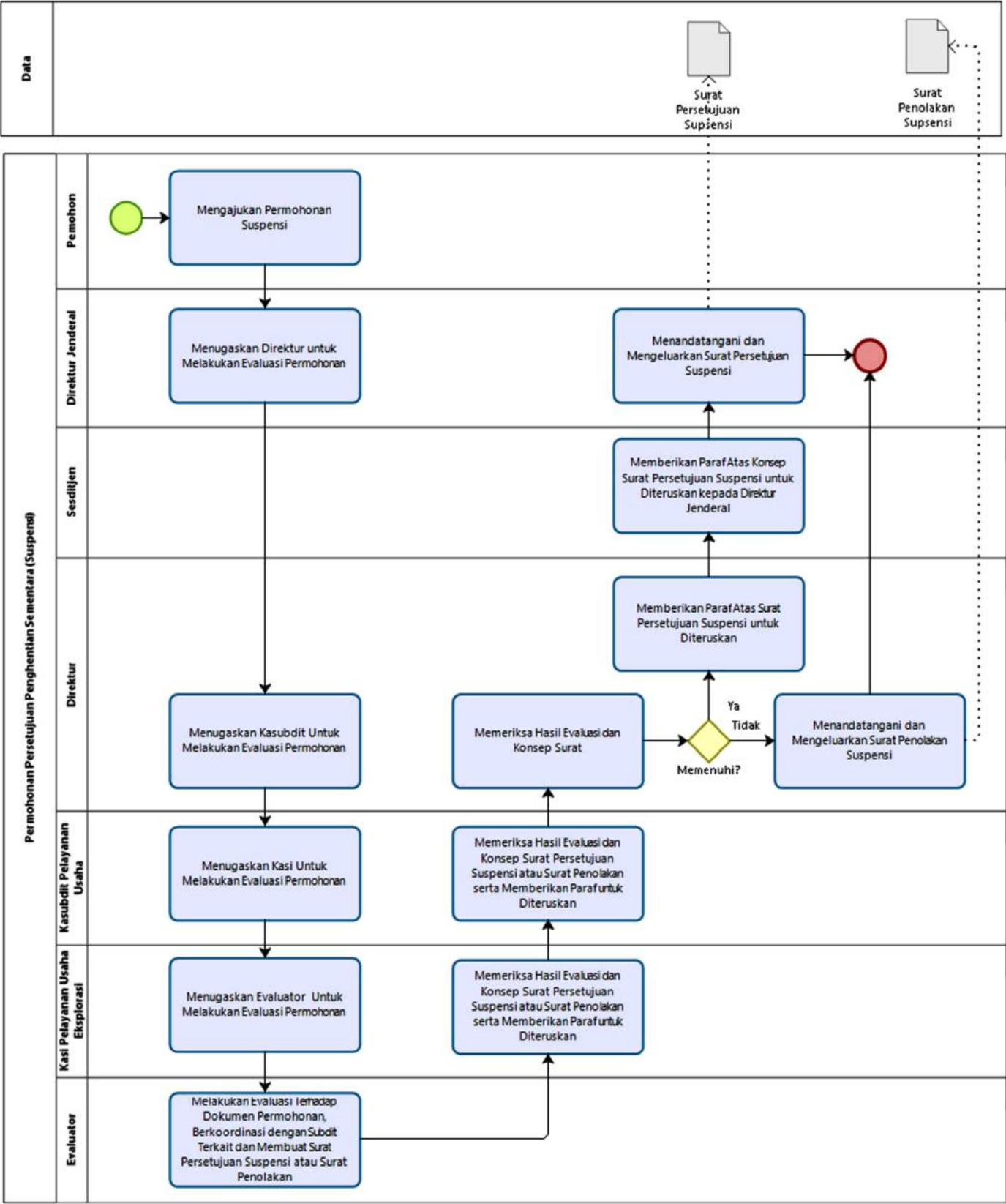
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Penciutan Wilayah



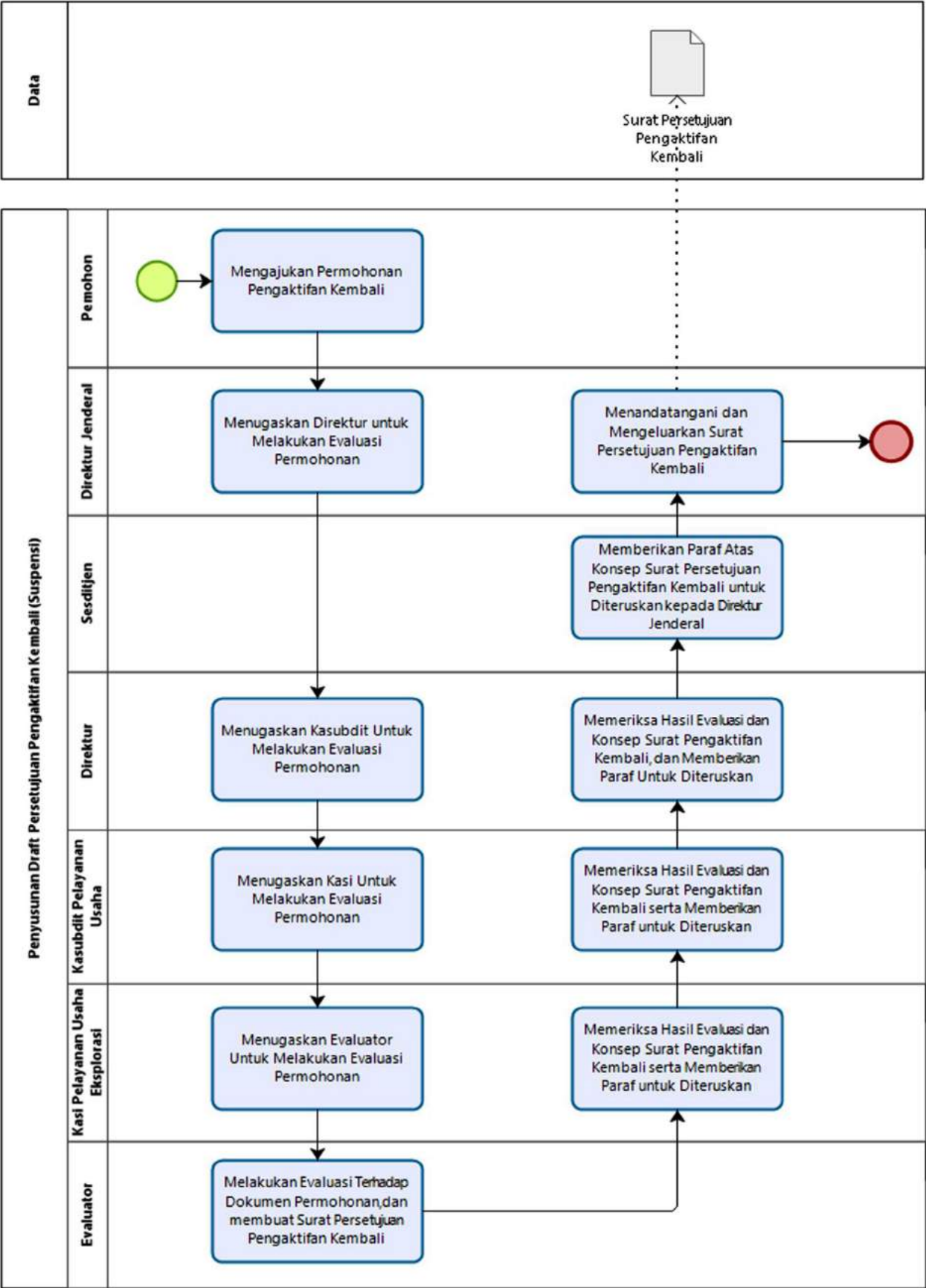
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Terminasi



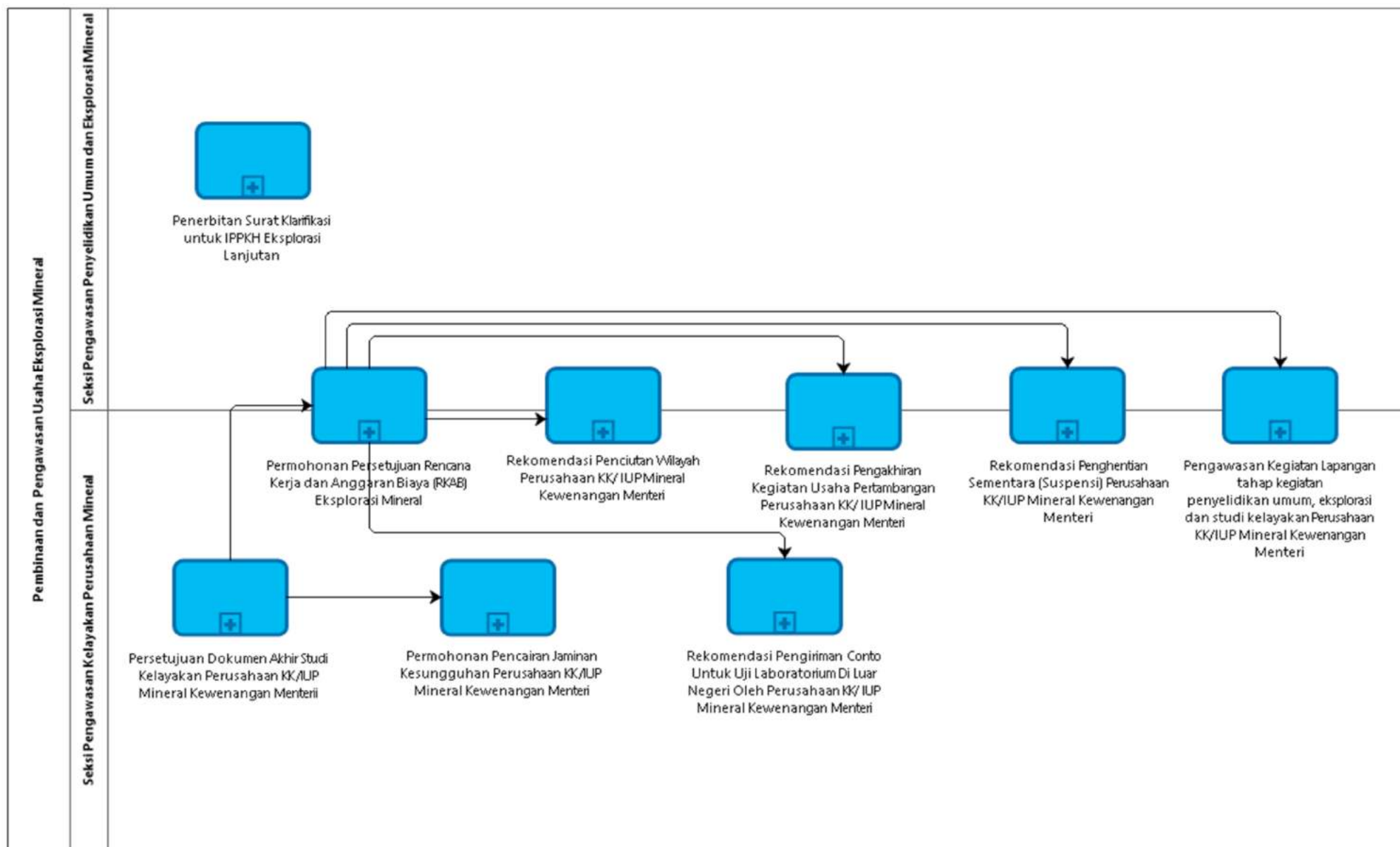
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Persetujuan Suspensi



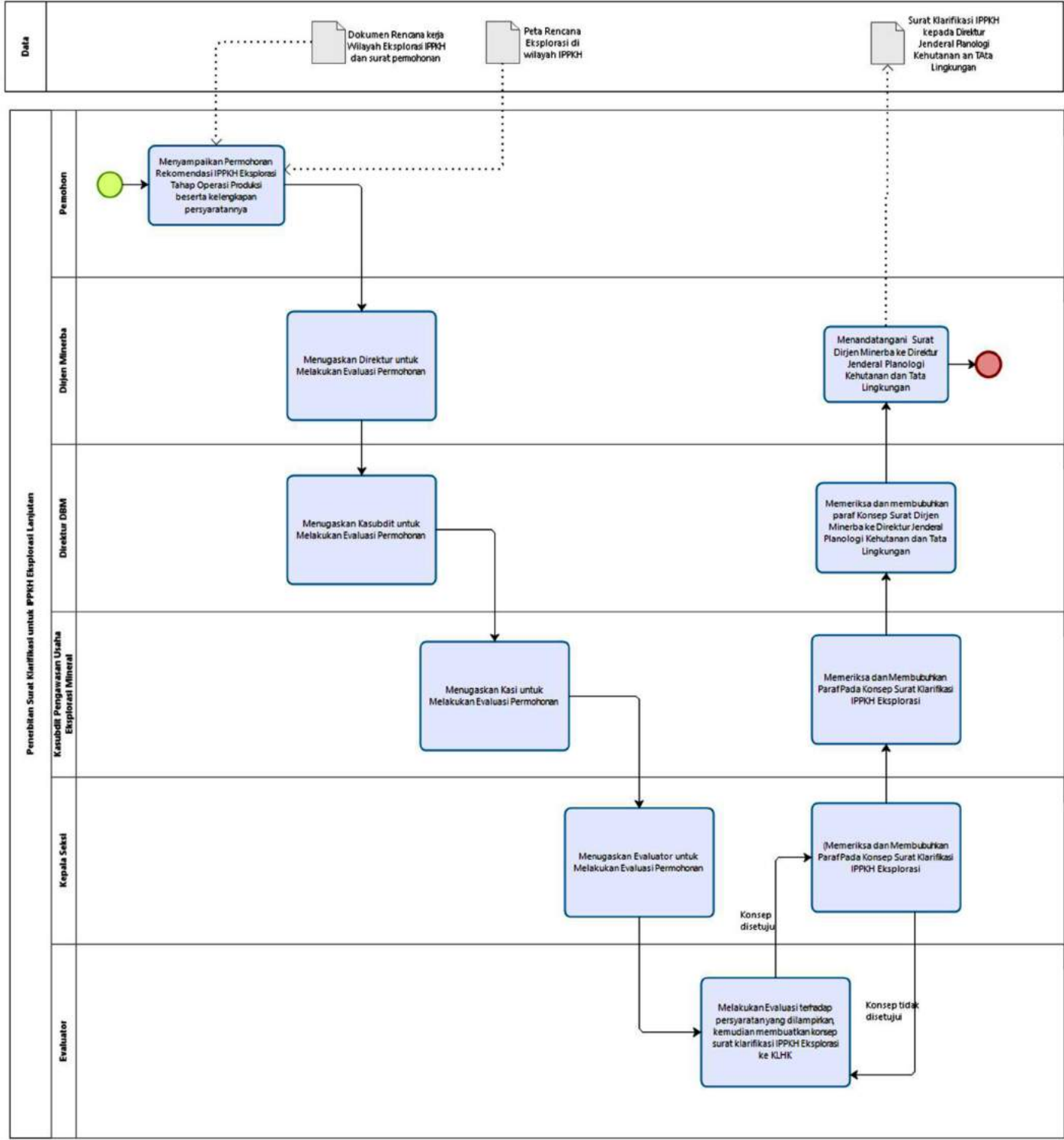
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Persetujuan Pengaktifan Kembali (Suspensi)



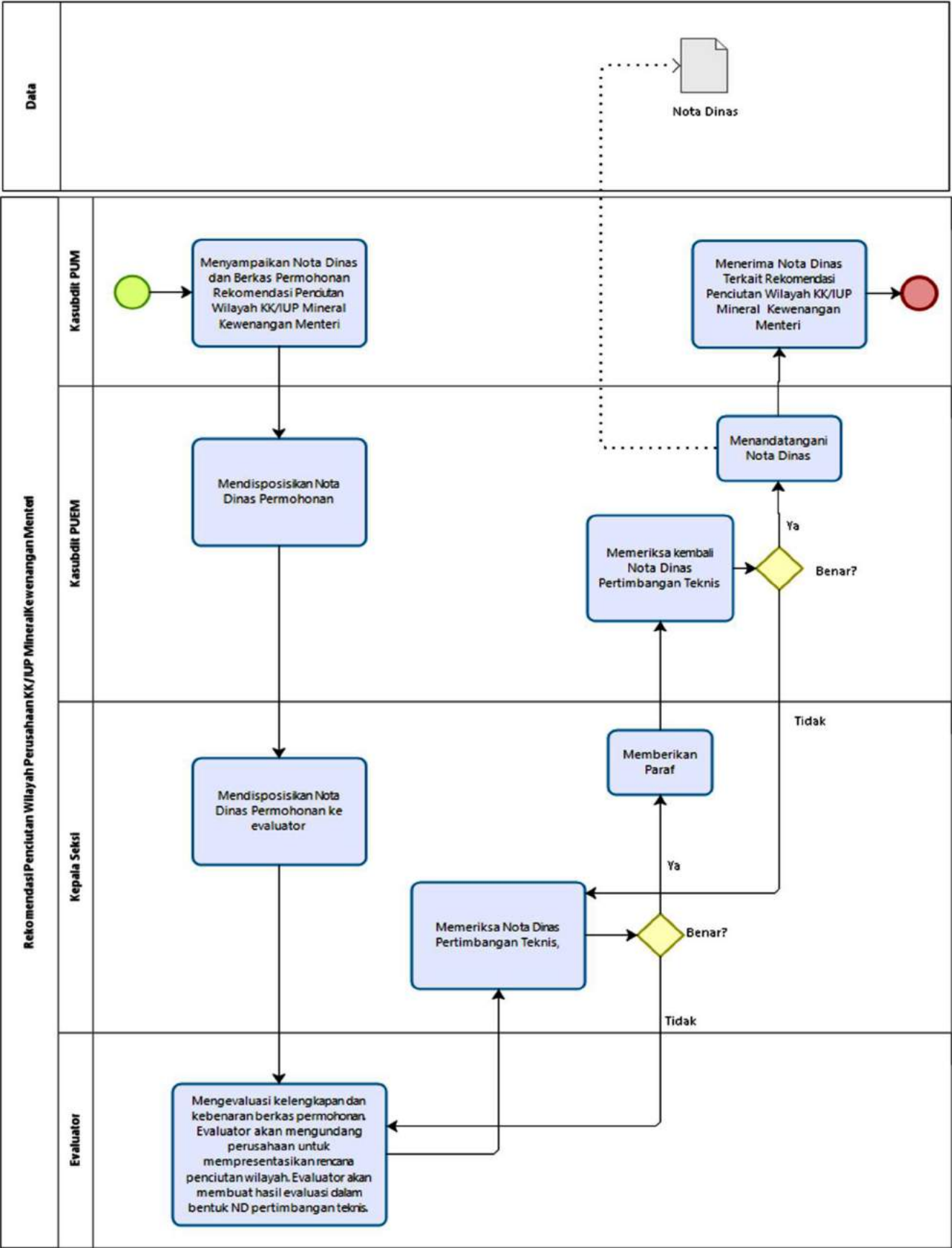
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral



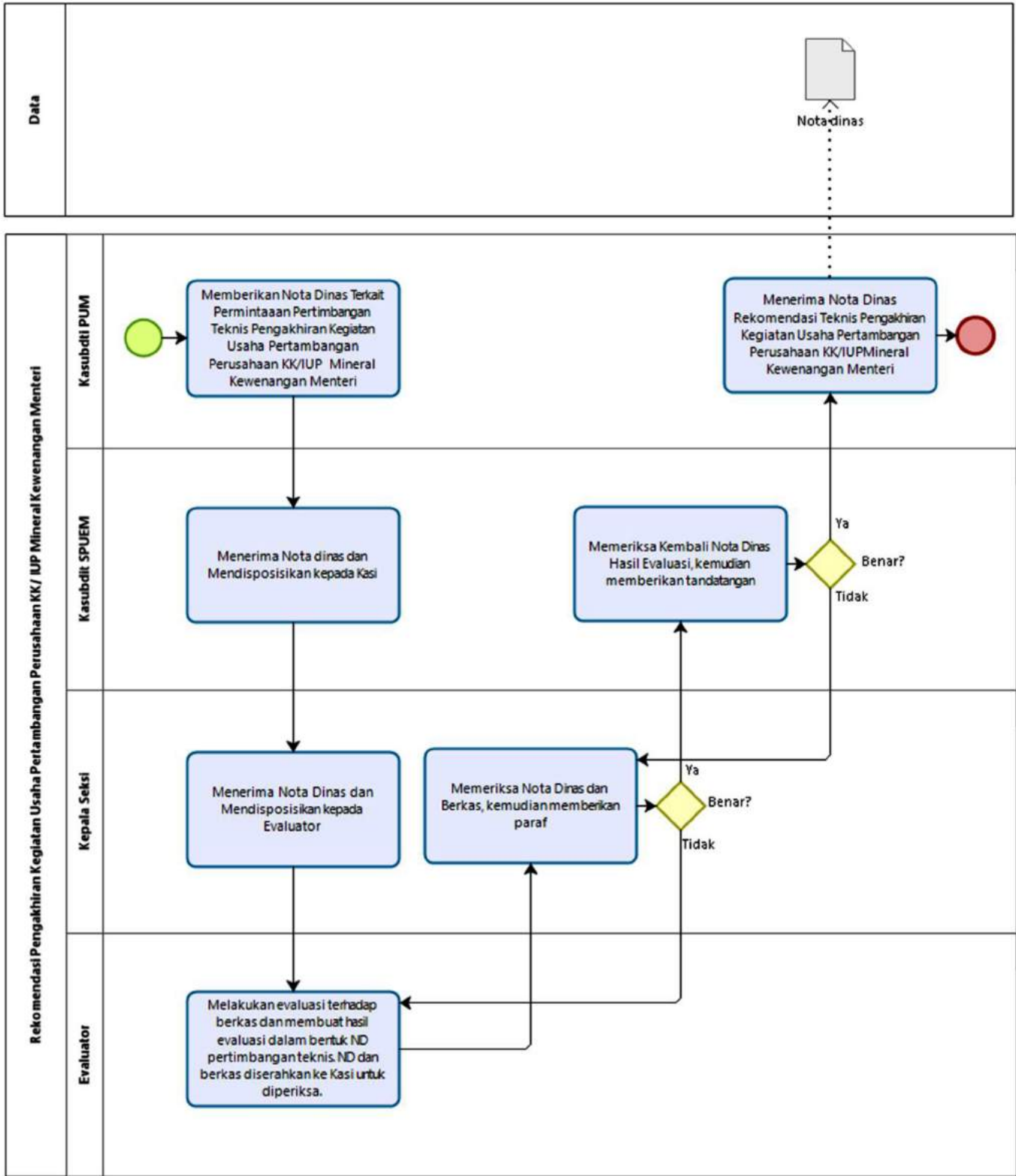
Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral - Penerbitan Surat Klarifikasi untuk IPPKH Eksplorasi Lanjutan



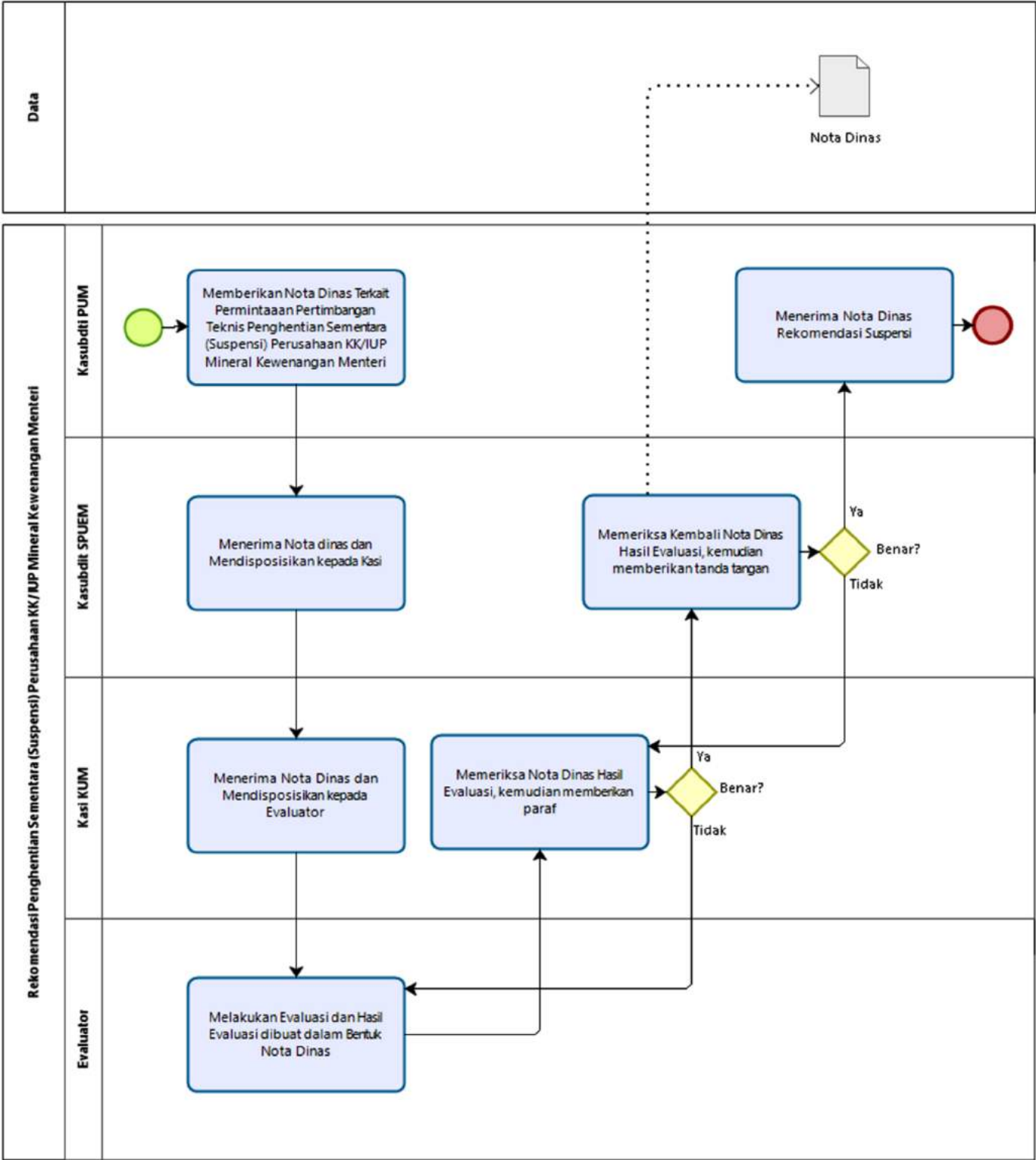
Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral dan Seksi Pengawasan Kelayakan Perusahaan Mineral - Rekomendasi Penciutan Wilayah Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral dan Seksi Pengawasan Kelayakan Perusahaan Mineral - Rekomendasi Pengakhiran Kegiatan Usaha Pertambangan Perusahaan KK/ IUP Mineral Kewenangan Menteri

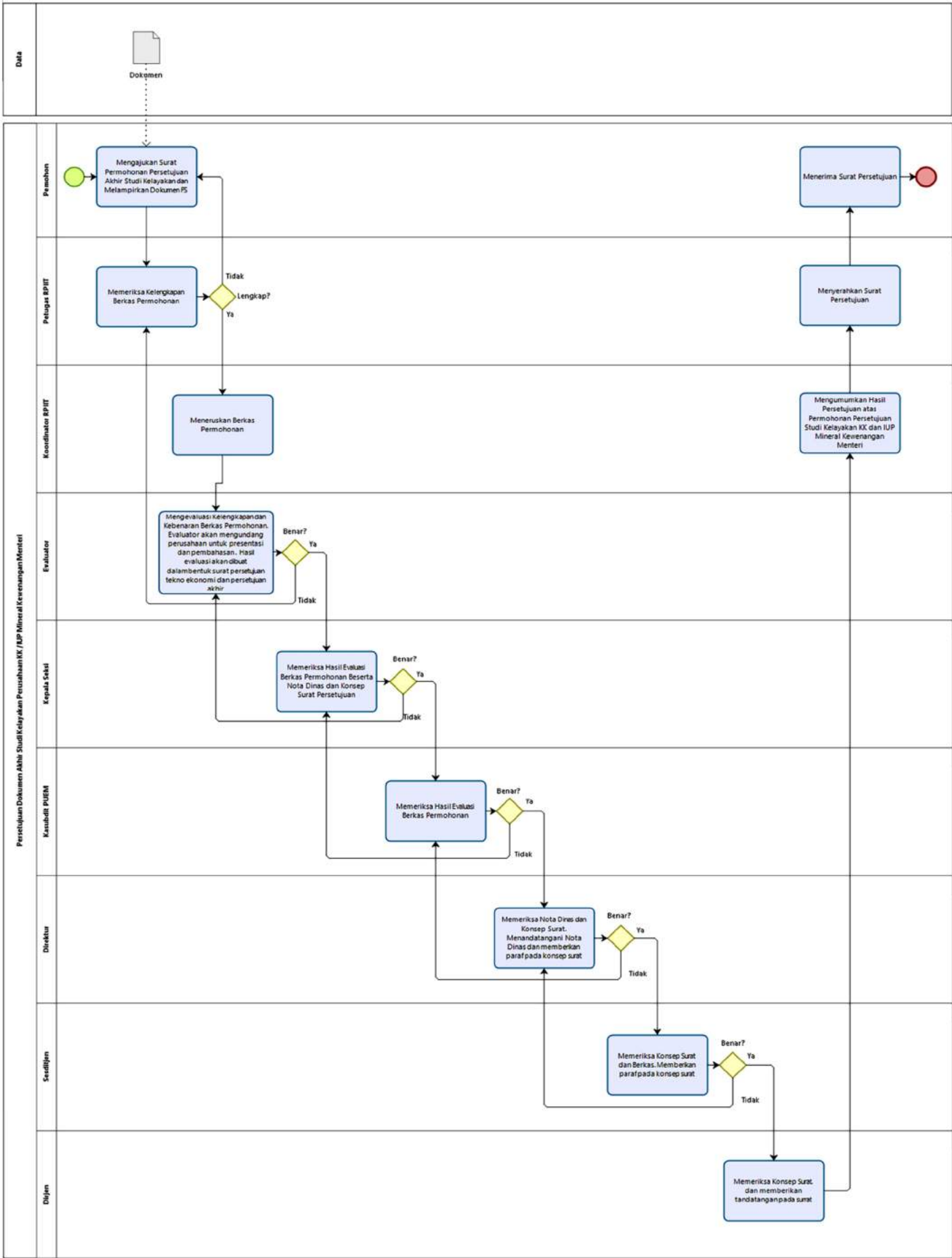


Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral dan Seksi Pengawasan Kelayakan Perusahaan Mineral - Rekomendasi Penghentian Sementara (Suspensi) Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri

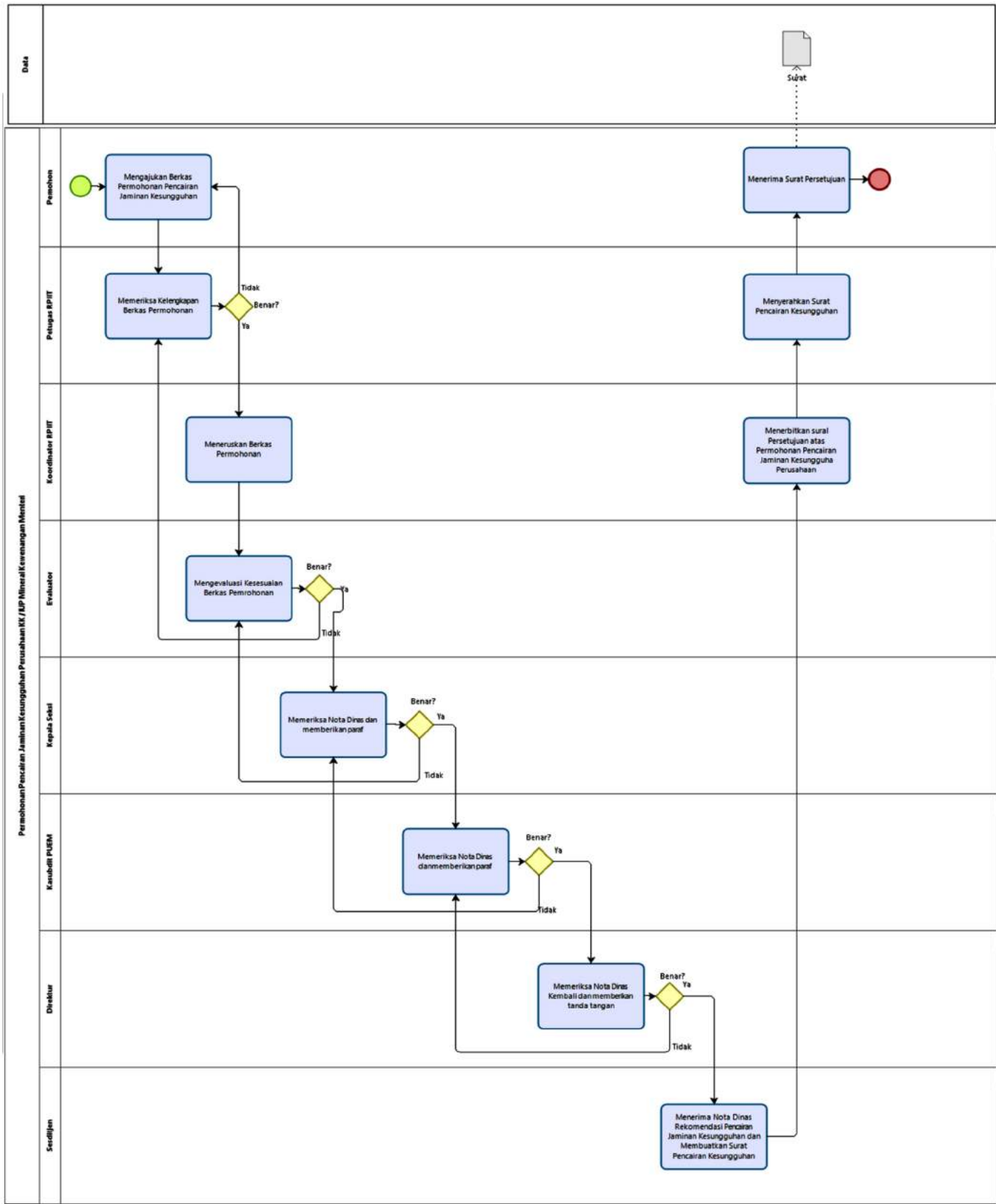


Data	<pre> graph TD Start(()) --> Kasubid[Menugaskan Kasi dan Koordinator Tim untuk Menyusun Tim Pengawasan] Kasubid --> KepalaSeksi[Menugaskan Tim Pengawasan Menyajikan Bahan Pengawasan] KepalaSeksi --> TimPengawasan[Menyajikan Bahan Pengawasan Draft Surat Tugas dan Hasil Evaluasi untuk Diajukan] TimPengawasan --> Kasubid2[Memeriksa Draft Surat Tugas] Kasubid2 --> KepalaSeksi2{Setuju?} KepalaSeksi2 -- Ya --> TimPengawasan2[Memeriksa Draft Surat Tugas] KepalaSeksi2 -- Tidak --> Kasubid2 TimPengawasan2 --> Direktur{Setuju?} Direktur -- Ya --> Kasubid3[Melakukan Kegiatan Pengawasan Lapangan ke Perusahaan] Direktur -- Tidak --> Kasubid2 Kasubid3 --> KepalaSeksi3[Memeriksa Draft Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan] KepalaSeksi3 --> TimPengawasan3{Setuju?} TimPengawasan3 -- Ya --> Kasubid4[Memeriksa Draft Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan] TimPengawasan3 -- Tidak --> KepalaSeksi3 Kasubid4 --> Direktur2{Setuju?} Direktur2 -- Ya --> End(()) Direktur2 -- Tidak --> Kasubid3 </pre>				
Penasihat K/LSP Mineral Kewenangan Meneliti	Surat/dokumen				

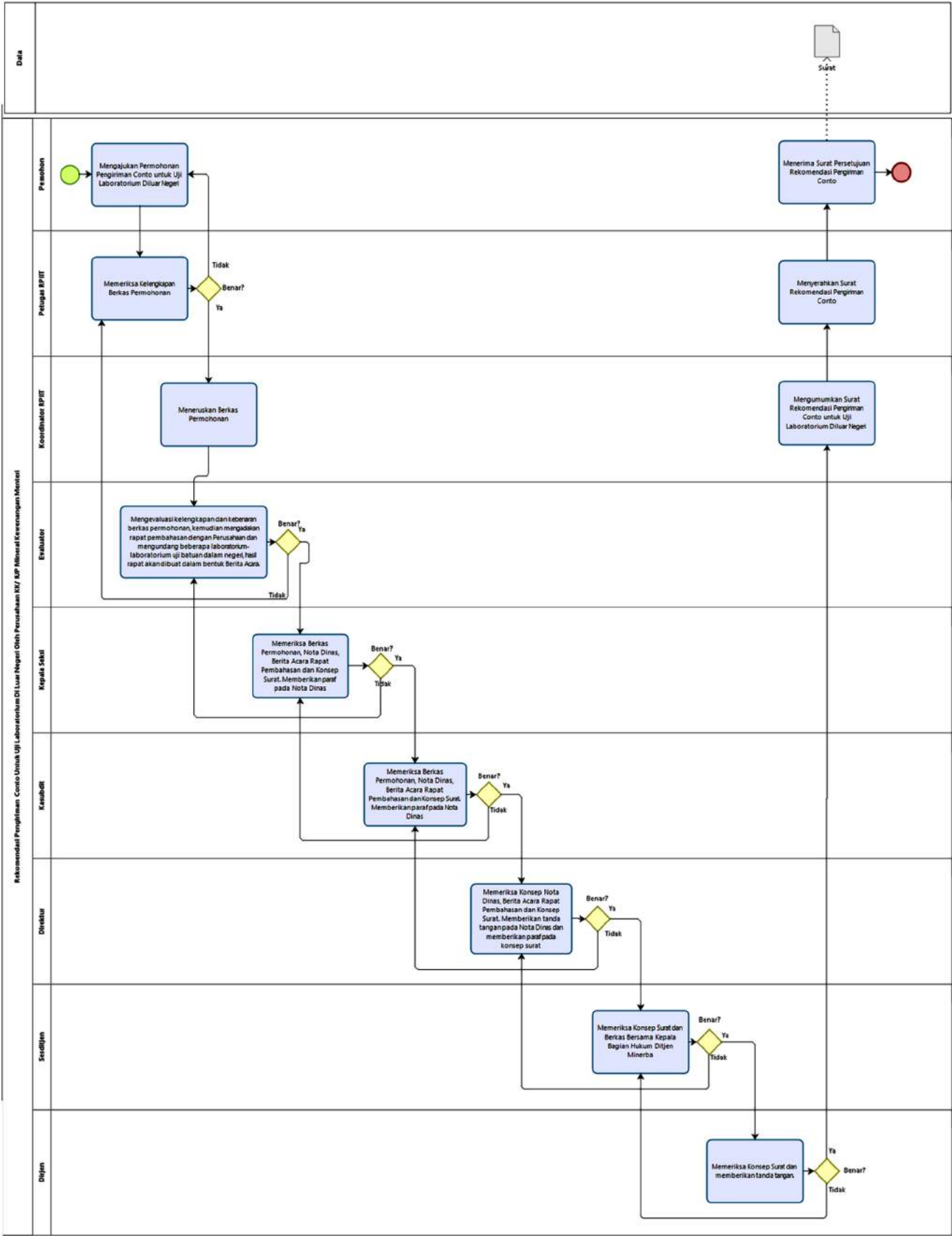
Seksi Pengawasan Kelayakan Perusahaan Mineral - Persetujuan Dokumen Akhir Studi Kelayakan Perusahaan KK /IUP Mineral Kewenangan Menteri



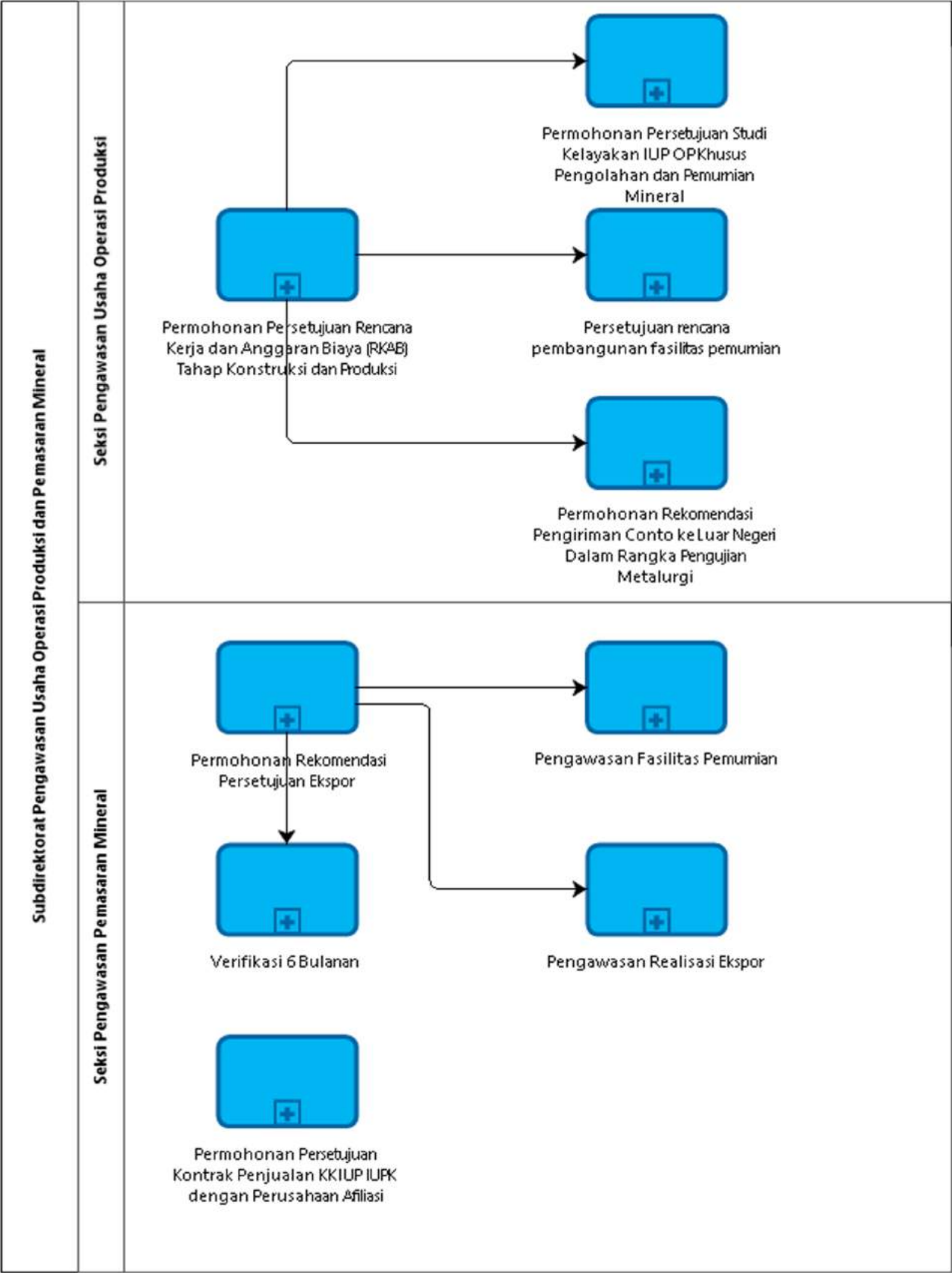
Seksi Pengawasan Kelayakan Perusahaan Mineral - Permohonan Pencairan Jaminan Kesungguhan Perusahaan KK /IUP Mineral Kewenangan Menteri



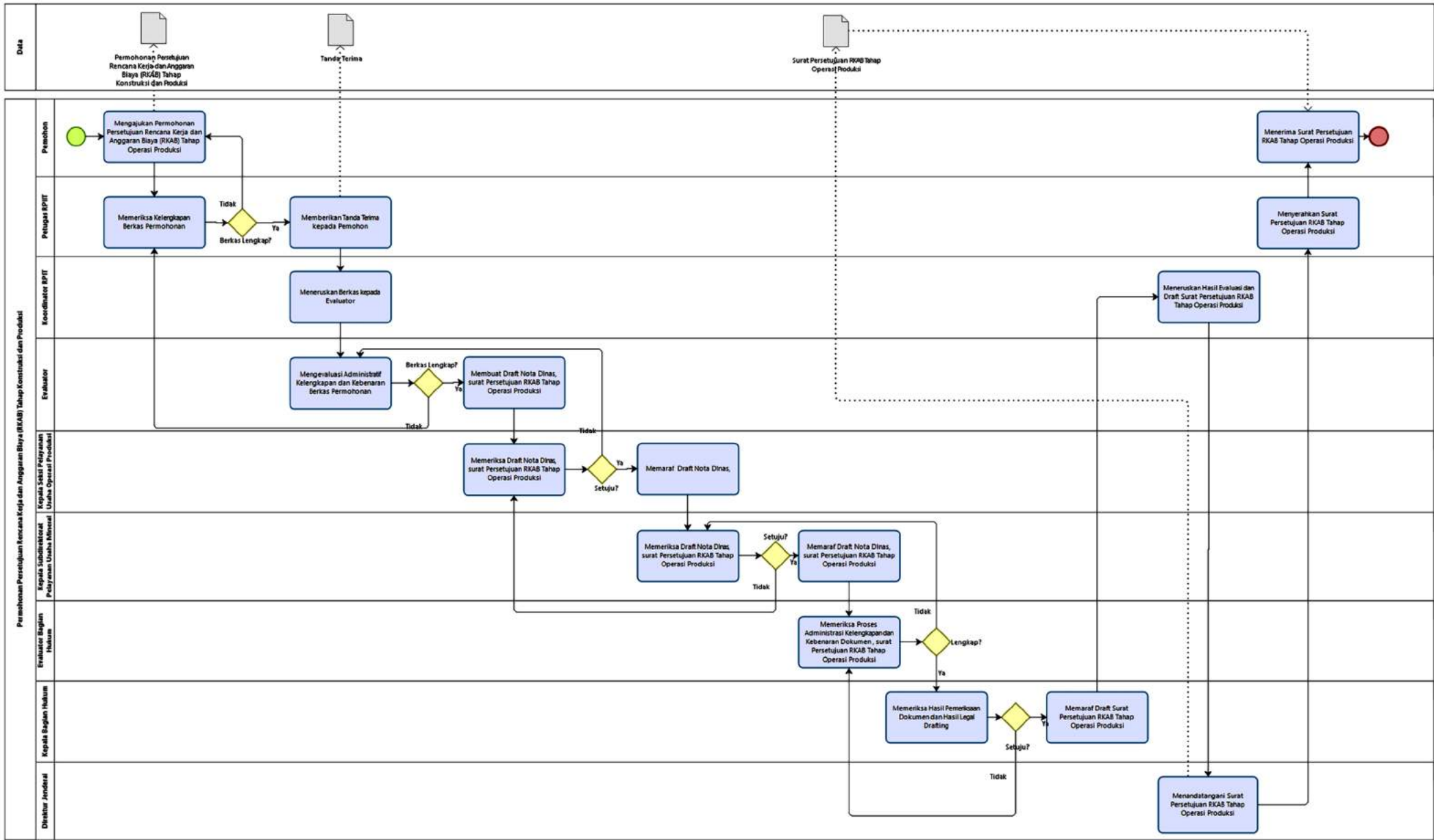
Seksi Pengawasan Kelayakan Perusahaan Mineral – Rekomendasi Pengiriman Conto Untuk Uji Laboratorium Di Luar Negeri Oleh Perusahaan KK/ IUP Mineral Kewenangan Menteri



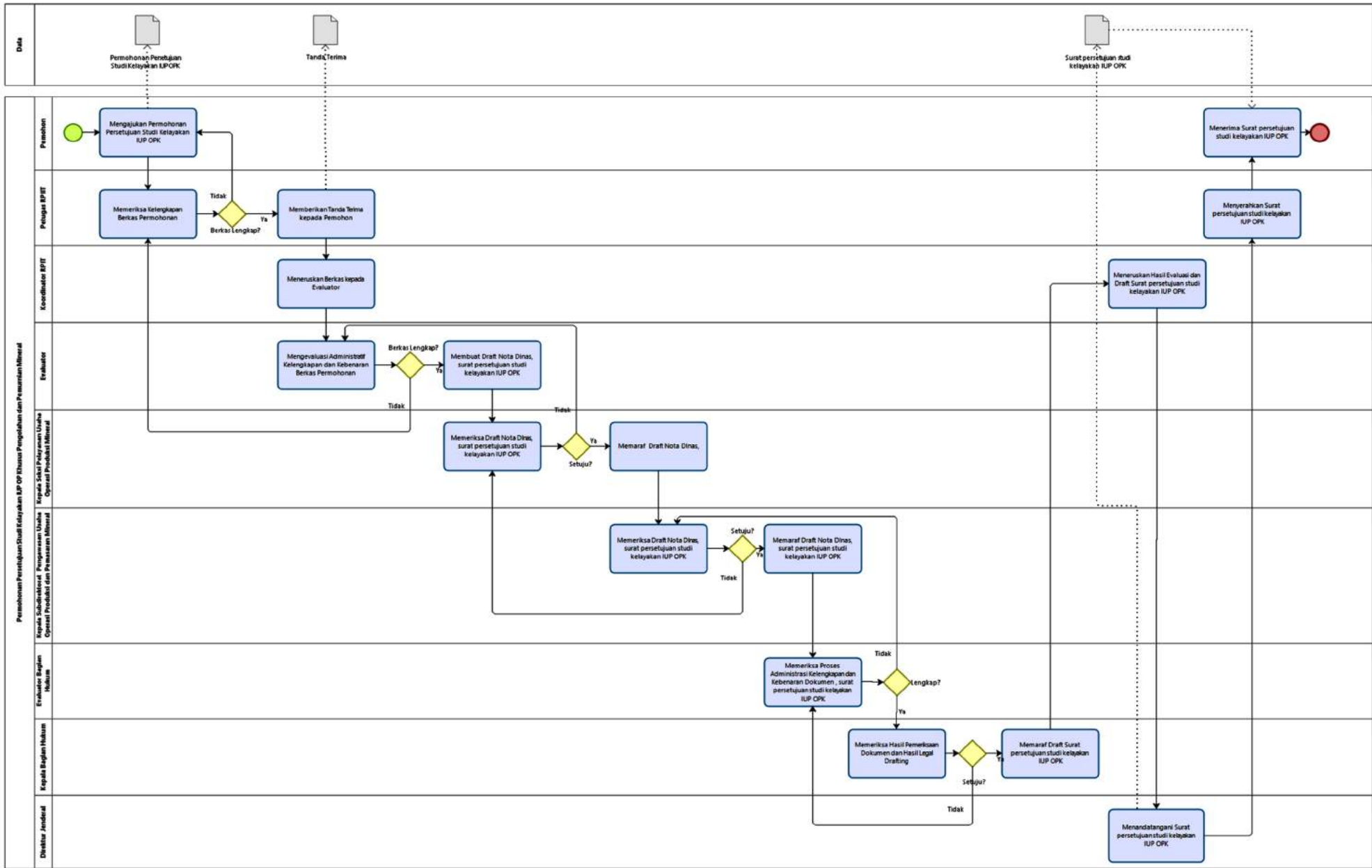
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral



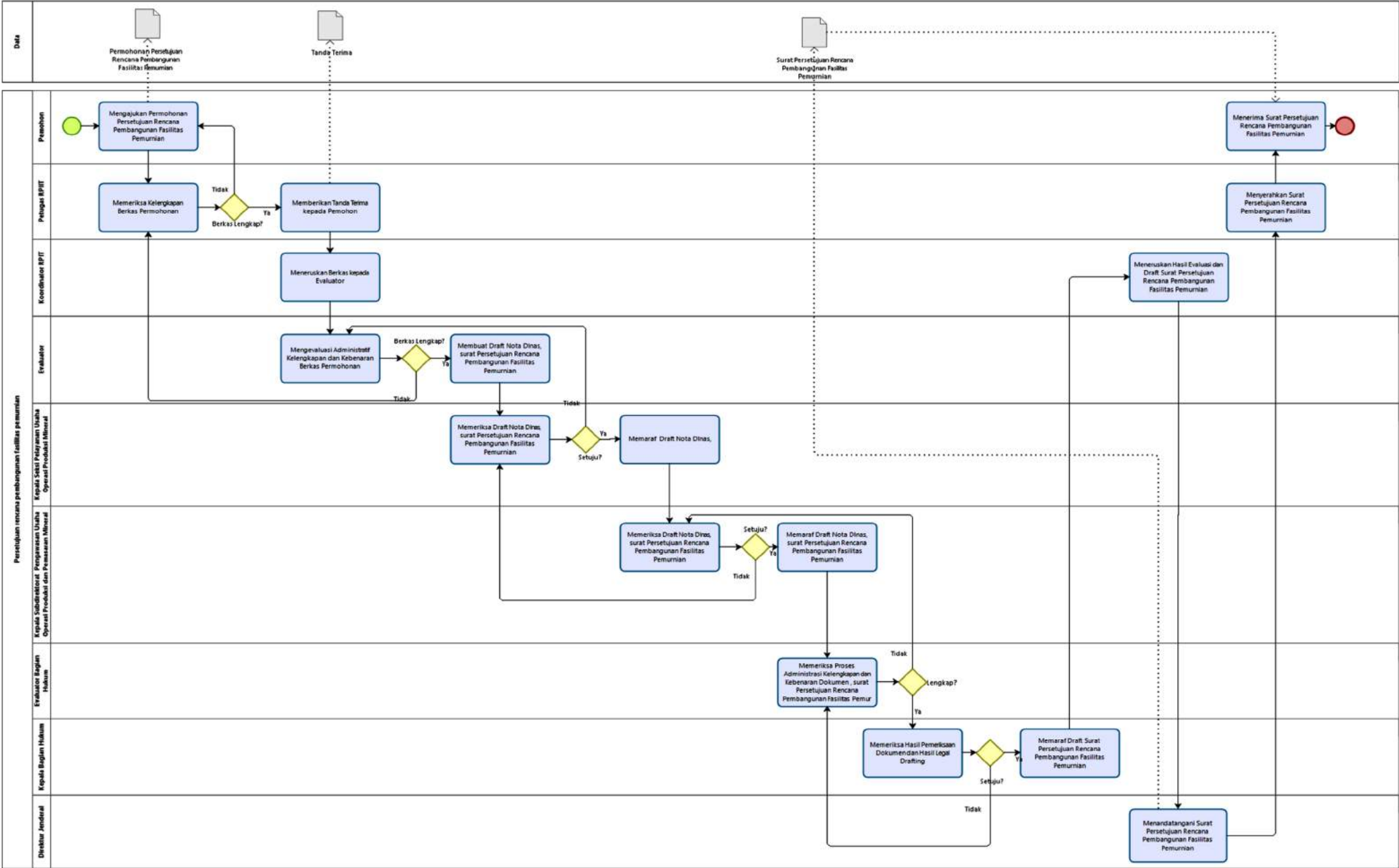
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahap Konstruksi dan Produksi



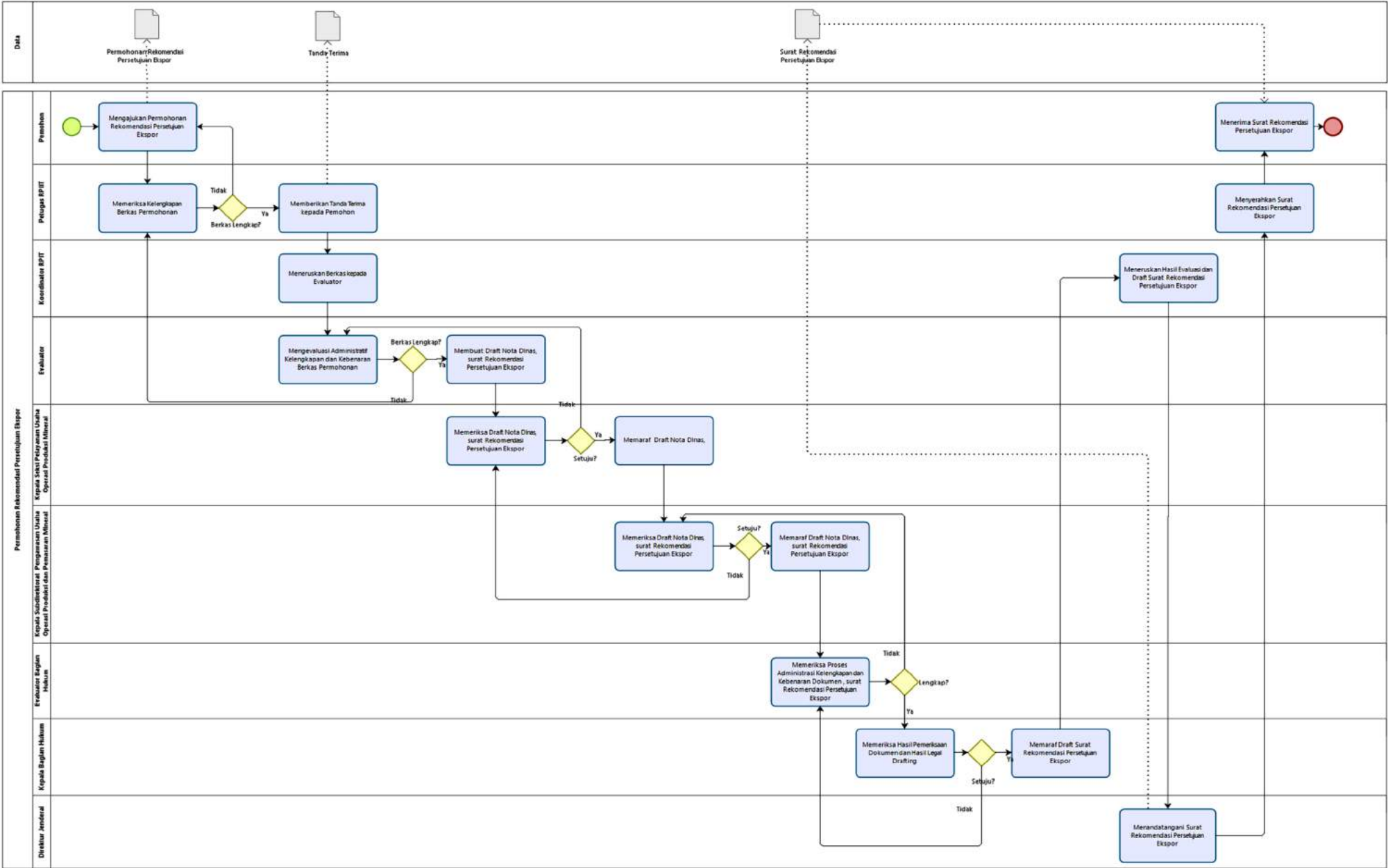
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Permohonan Persetujuan Studi Kelayakan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral



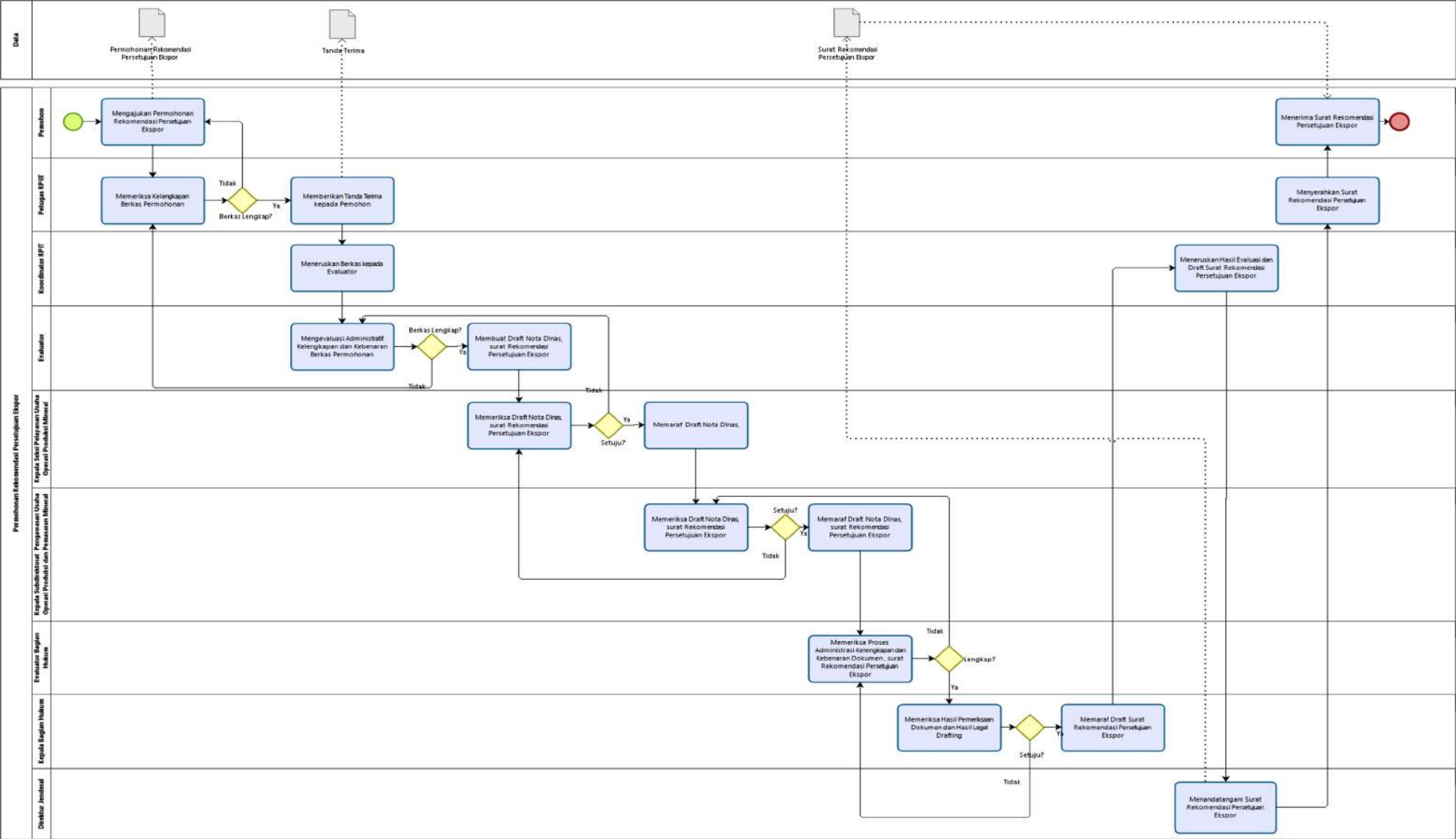
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian



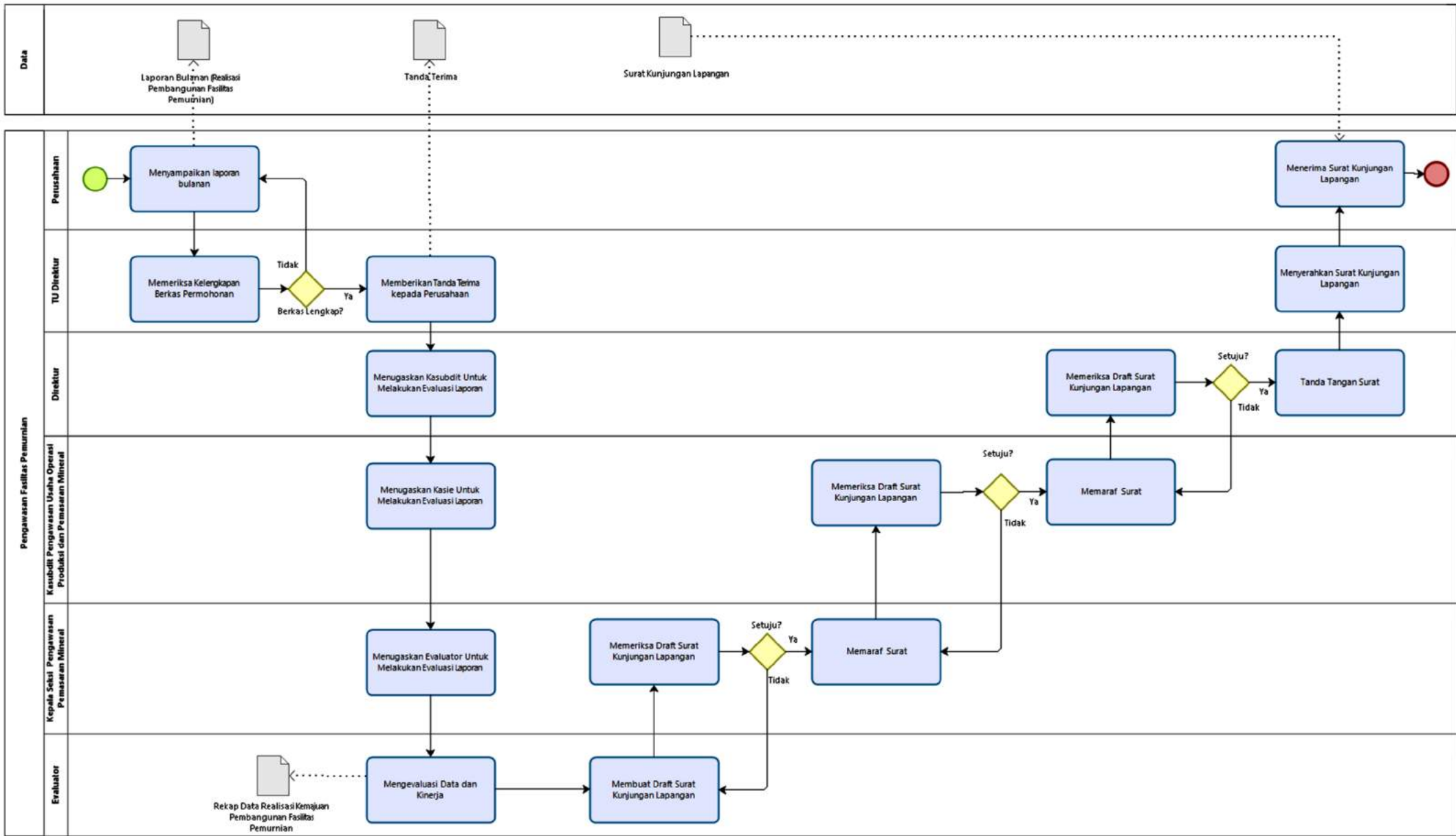
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Permohonan Rekomendasi Pengiriman Conto ke Luar Negeri Dalam Rangka Pengujian Metalurgi



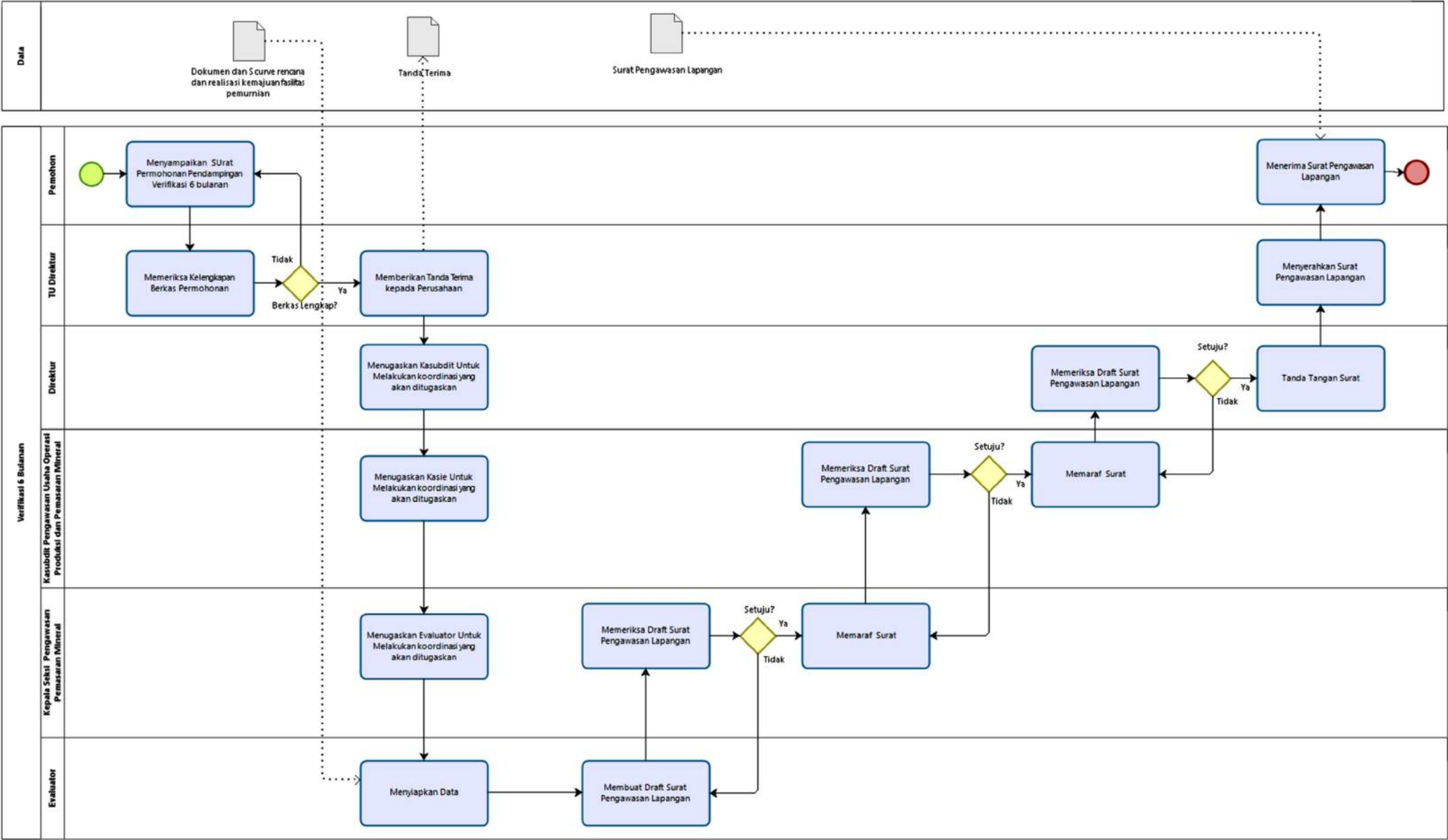
Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral - Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor



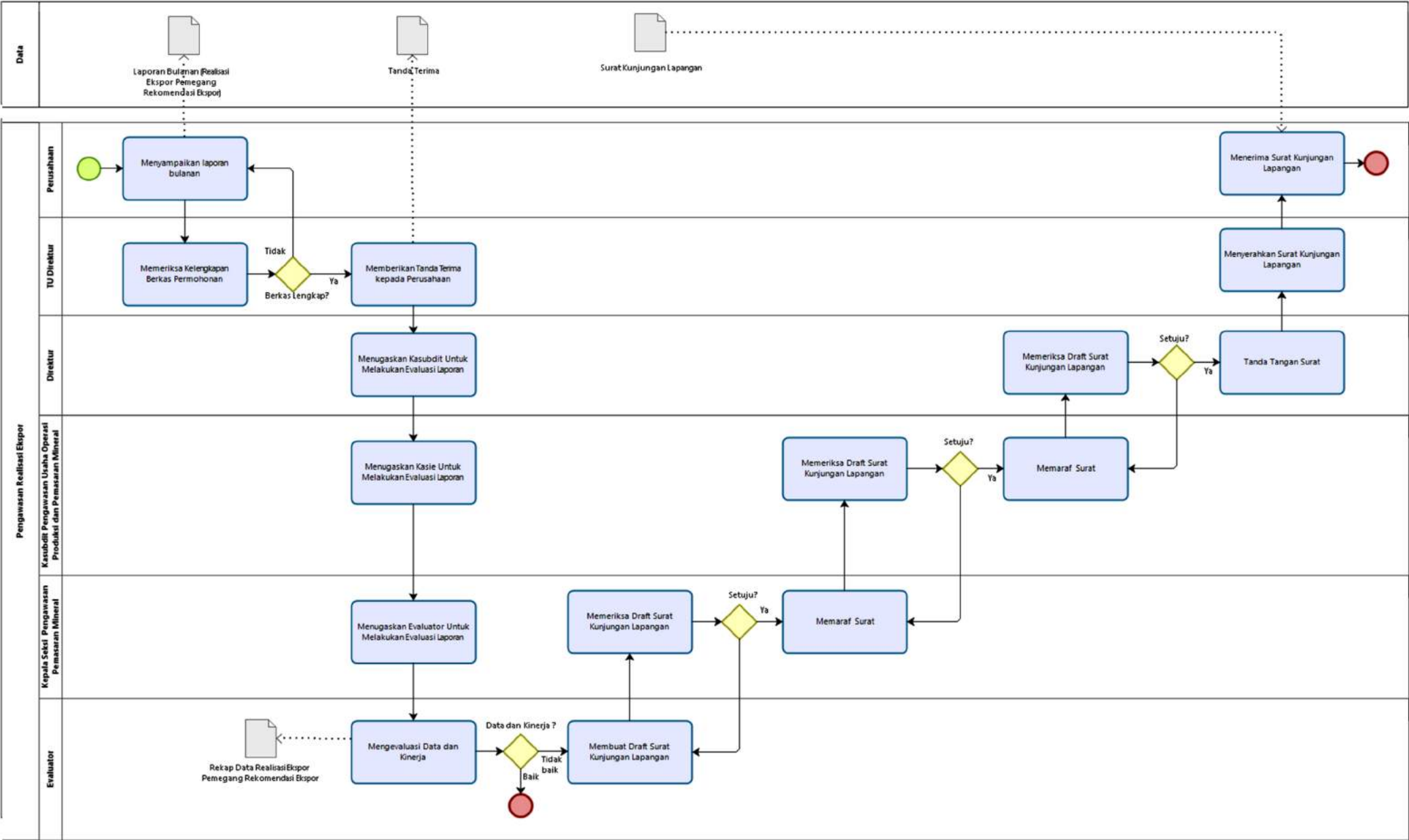
Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral - Pengawasan Fasilitas Pemurnian



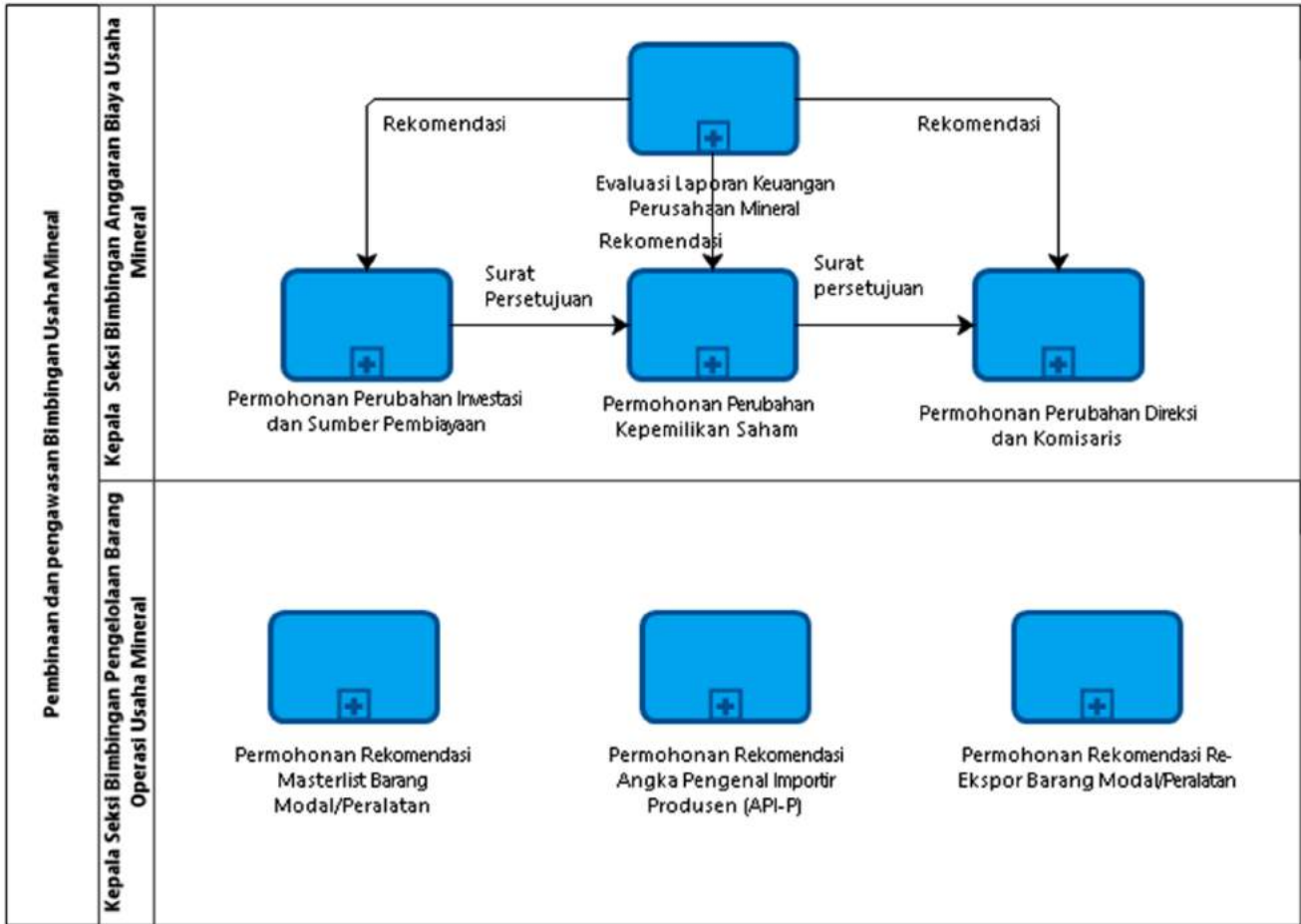
Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral - Verifikasi 6 Bulanan



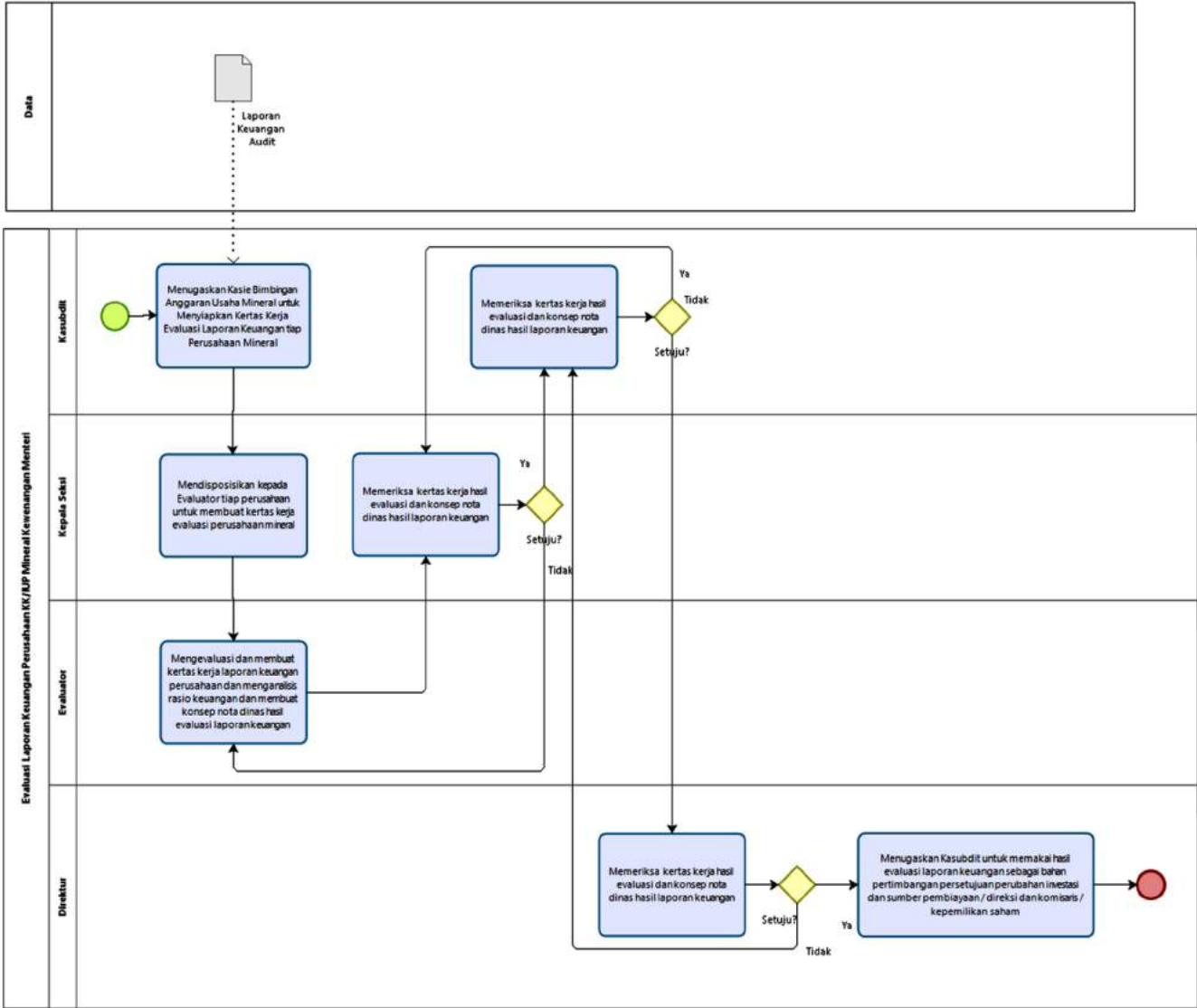
Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral - Pengawasan Realisasi Ekspor



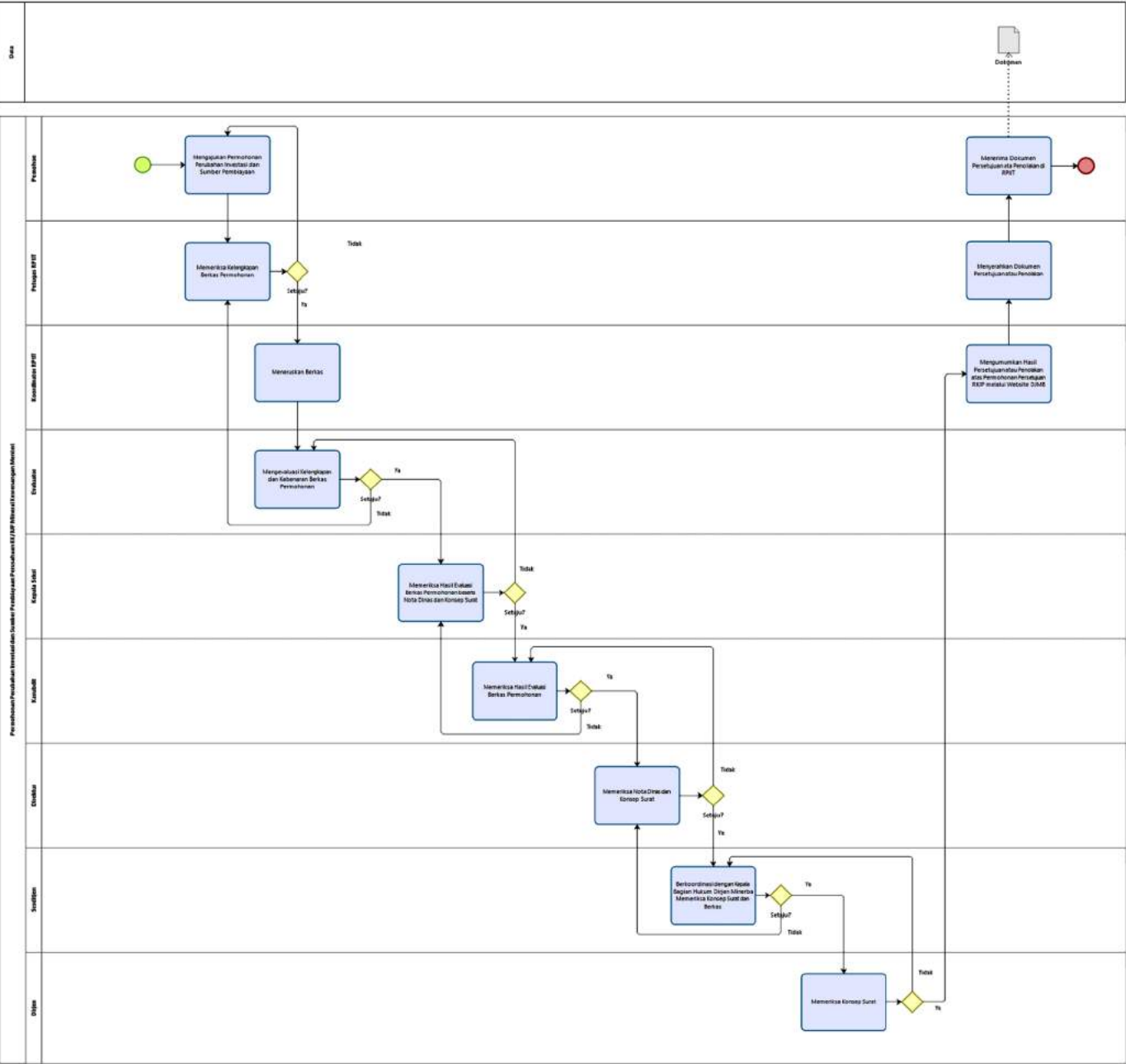
Pembinaan dan pengawasan Bimbingan Usaha Mineral



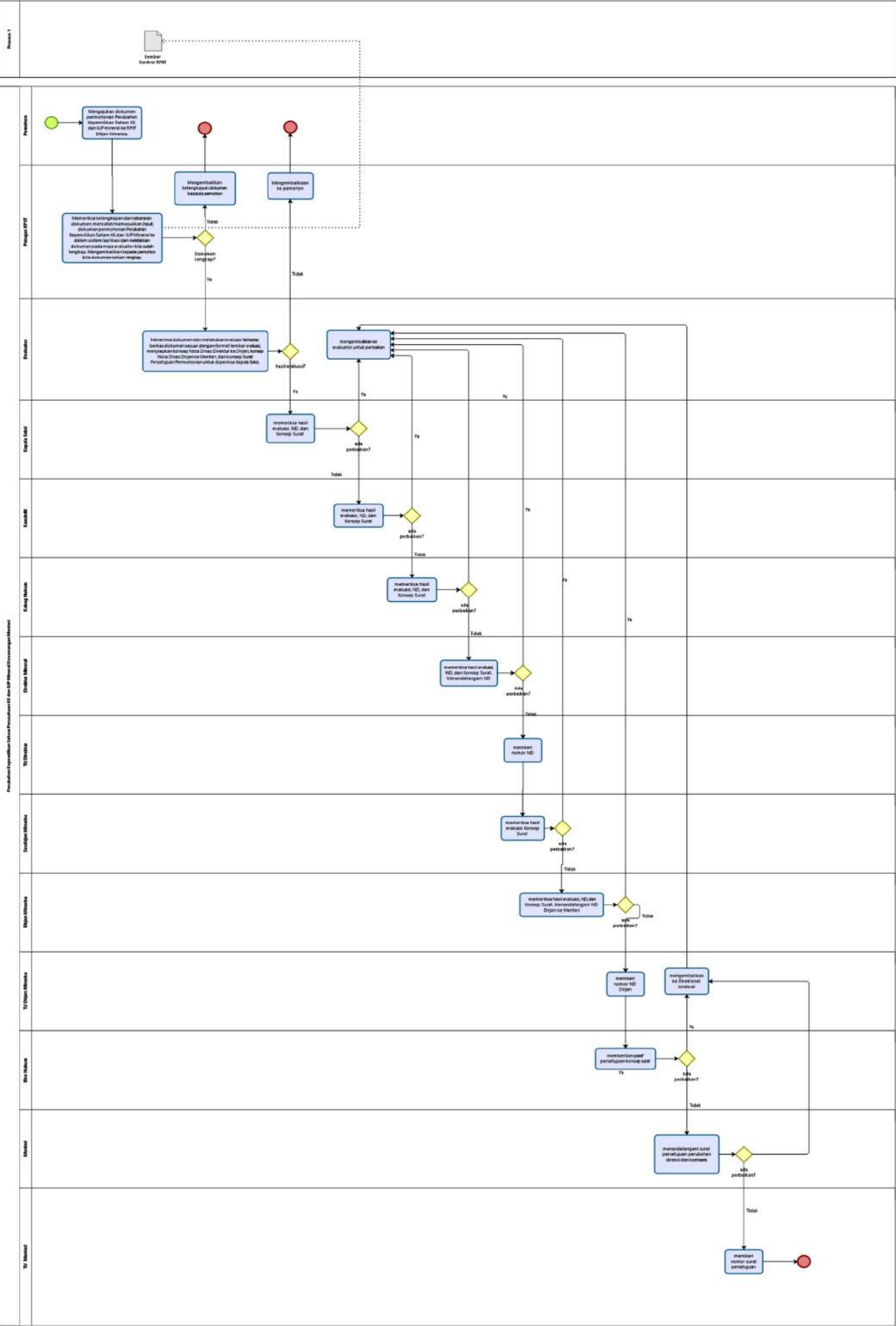
Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral - Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



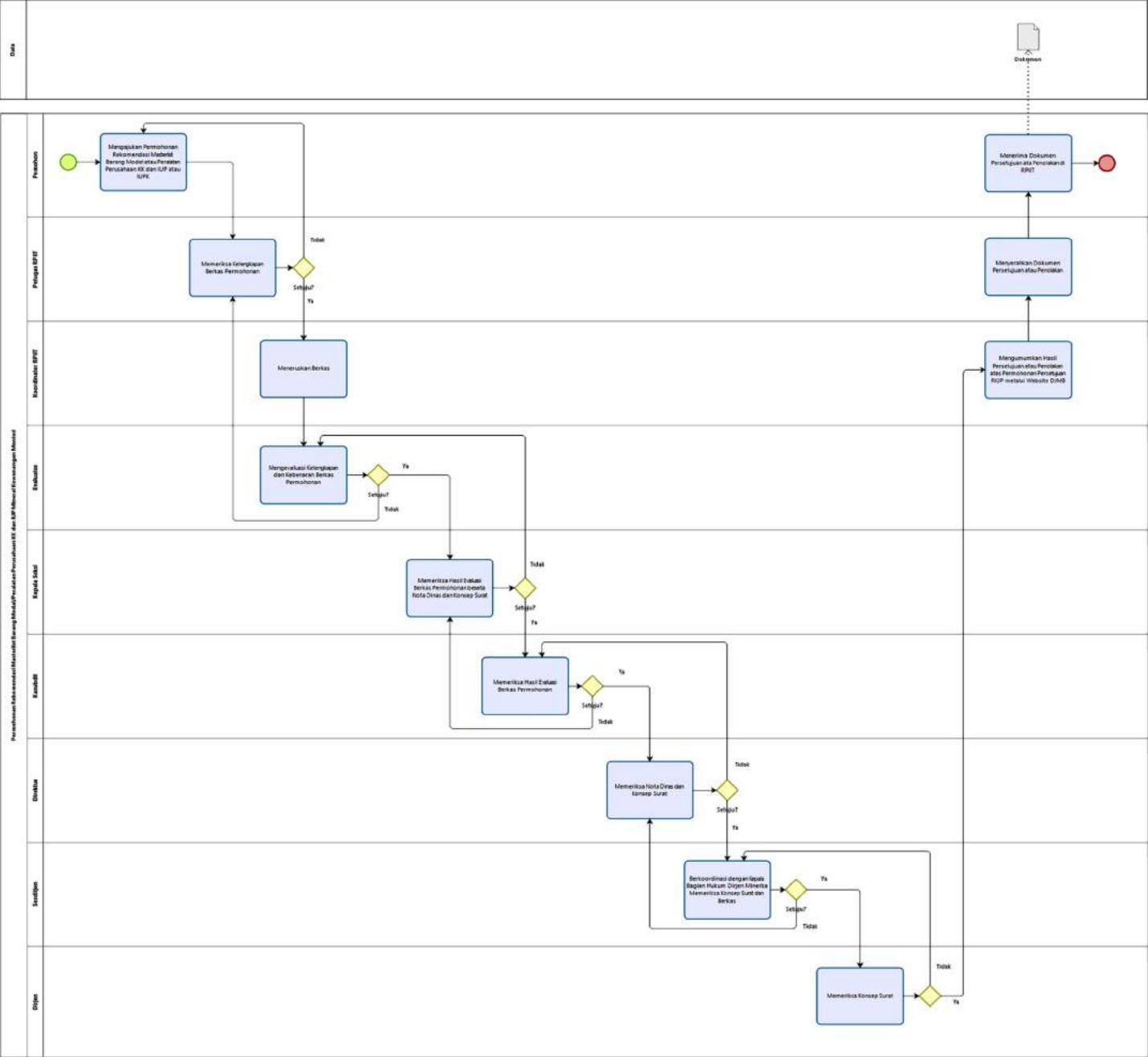
Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral - Permohonan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



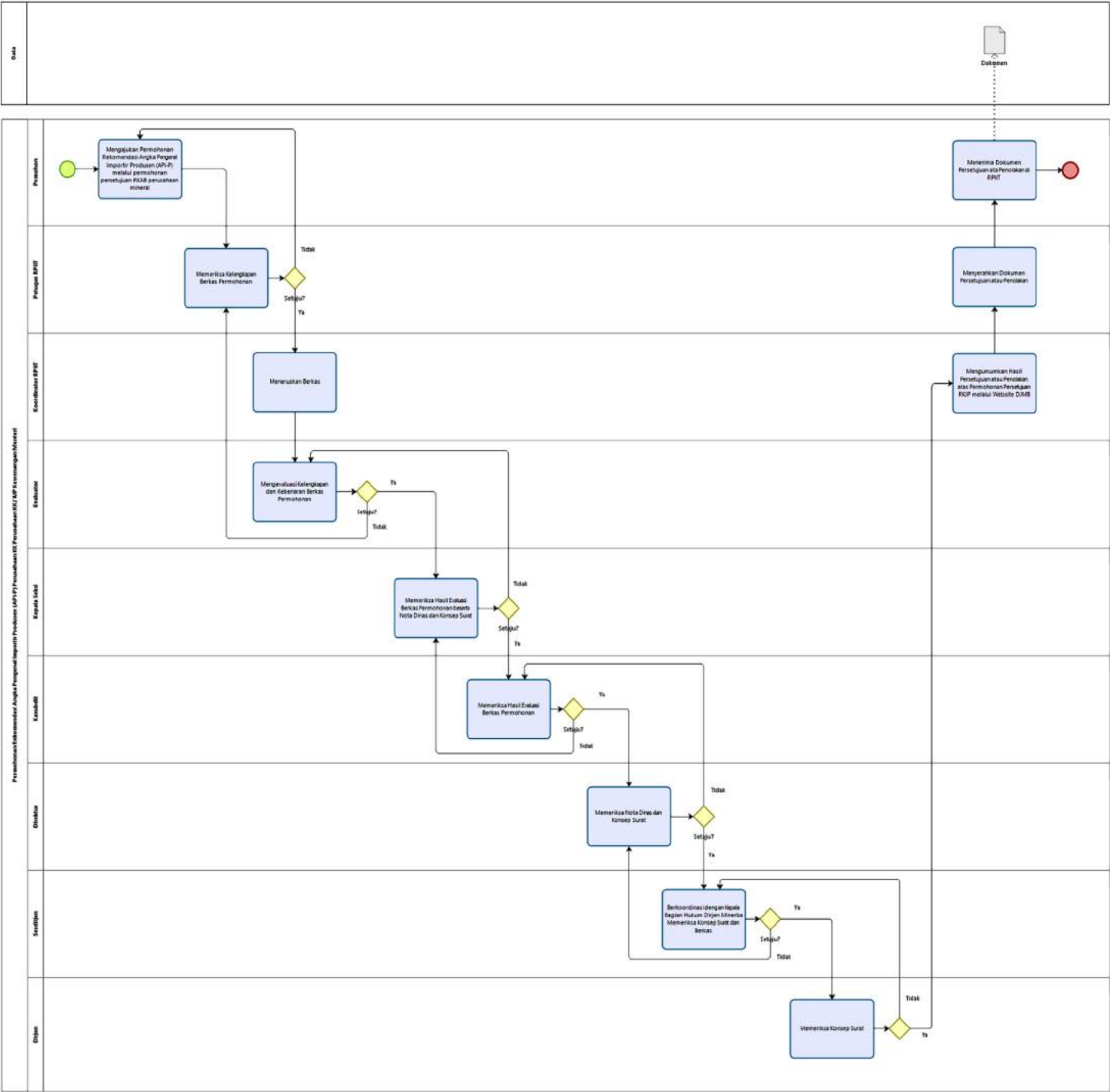
Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral - Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan KK dan IUP Mineral Kewenangan Menteri



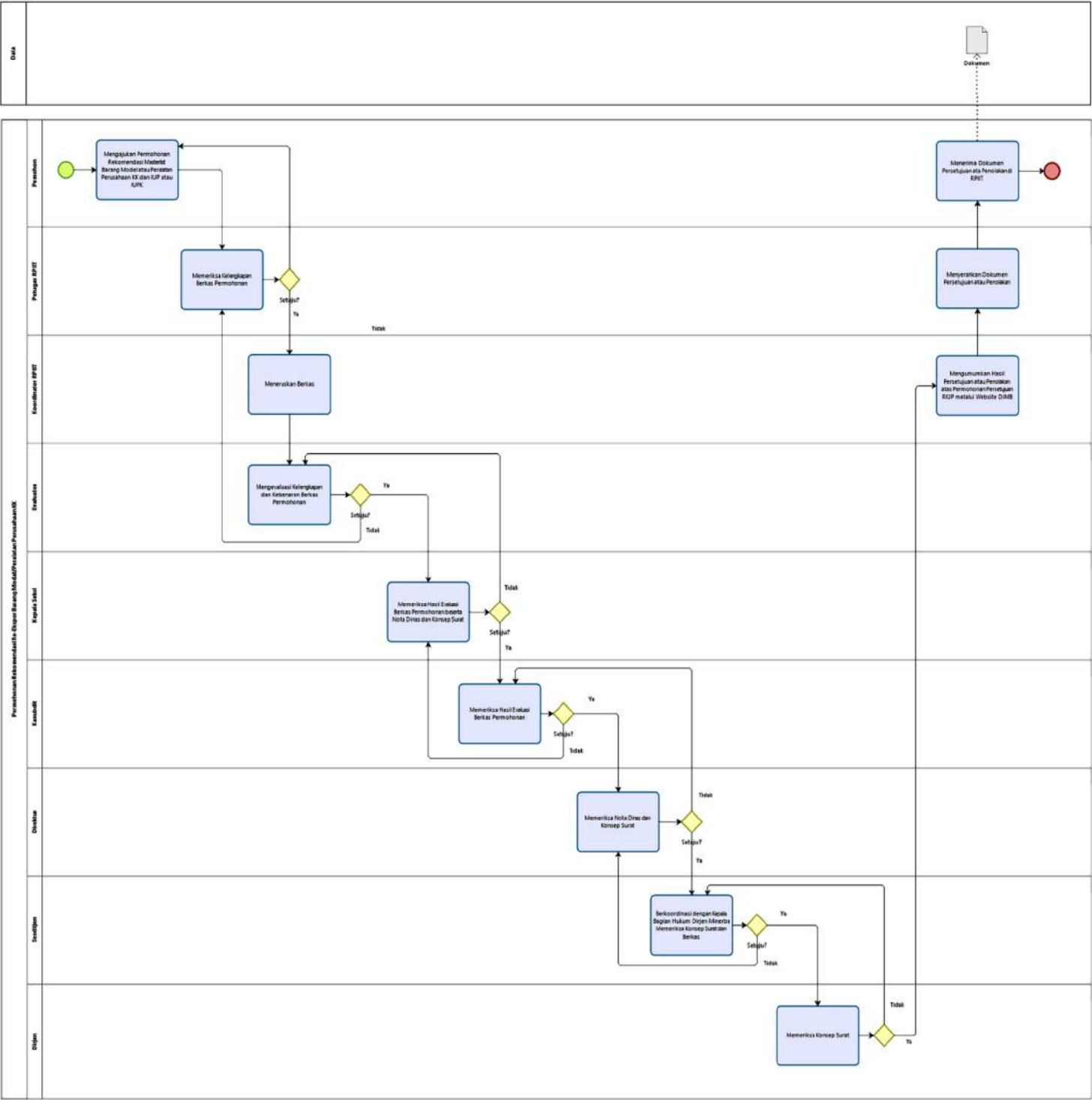
Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral - Permohonan Rekomendasi Masterlist Barang Modal/Peralatan Perusahaan KK dan IUP Mineral Kewenangan Menteri



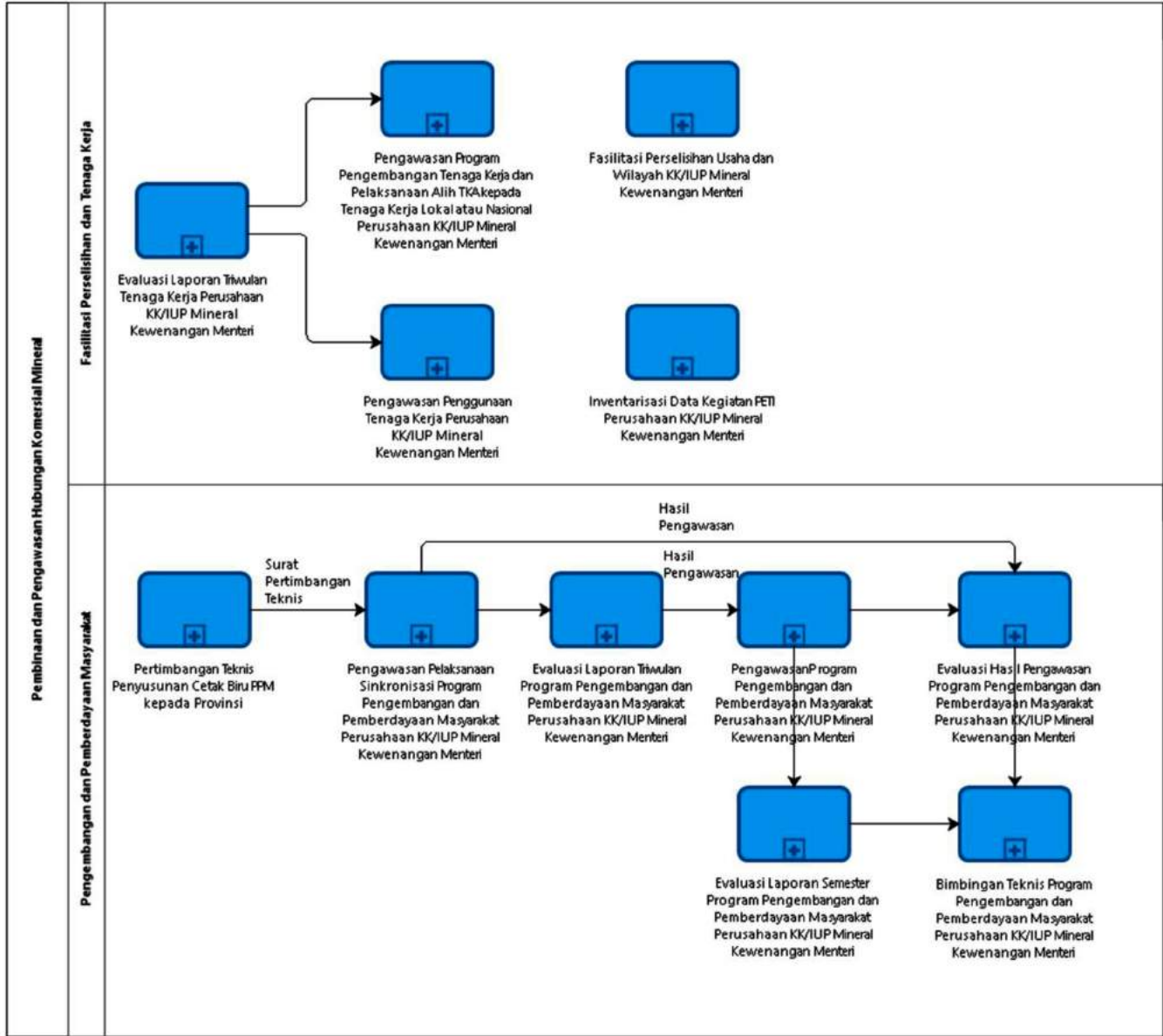
Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral - Permohonan Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Perusahaan KK Perusahaan KK/ IUP Kewenangan Menteri



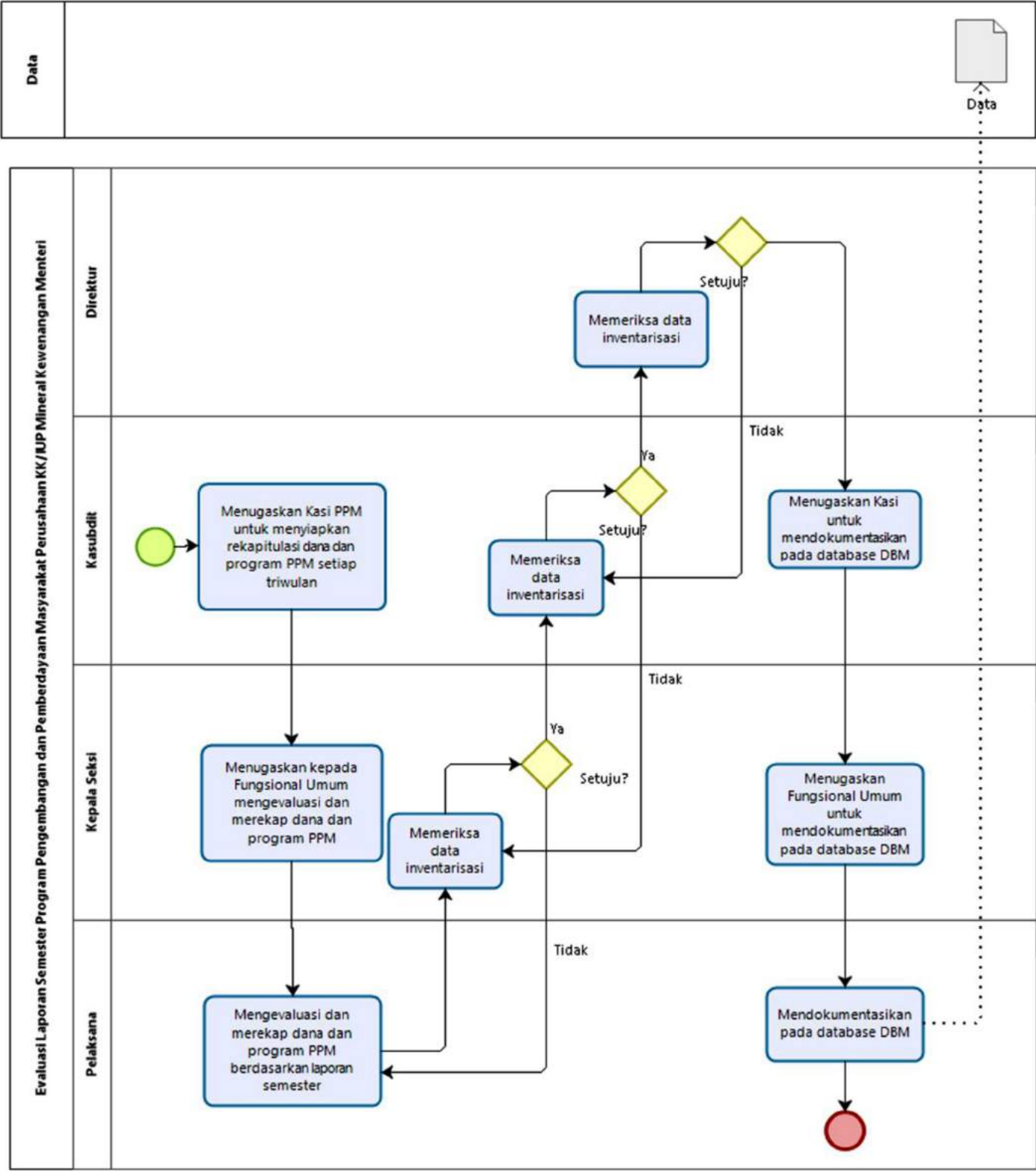
Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral - Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor Barang Modal/Peralatan Perusahaan KK



Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Komersial Mineral



Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Evaluasi Laporan Triwulan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



Flowchart: Pengawasan Program Pengembangan Tenaga Kerja dan Pelaksanaan Alih TKA kepada Tenaga Kerja Lokal atau Nasional Perusahaan KK/JUP Mineral Kewenangan Menteri

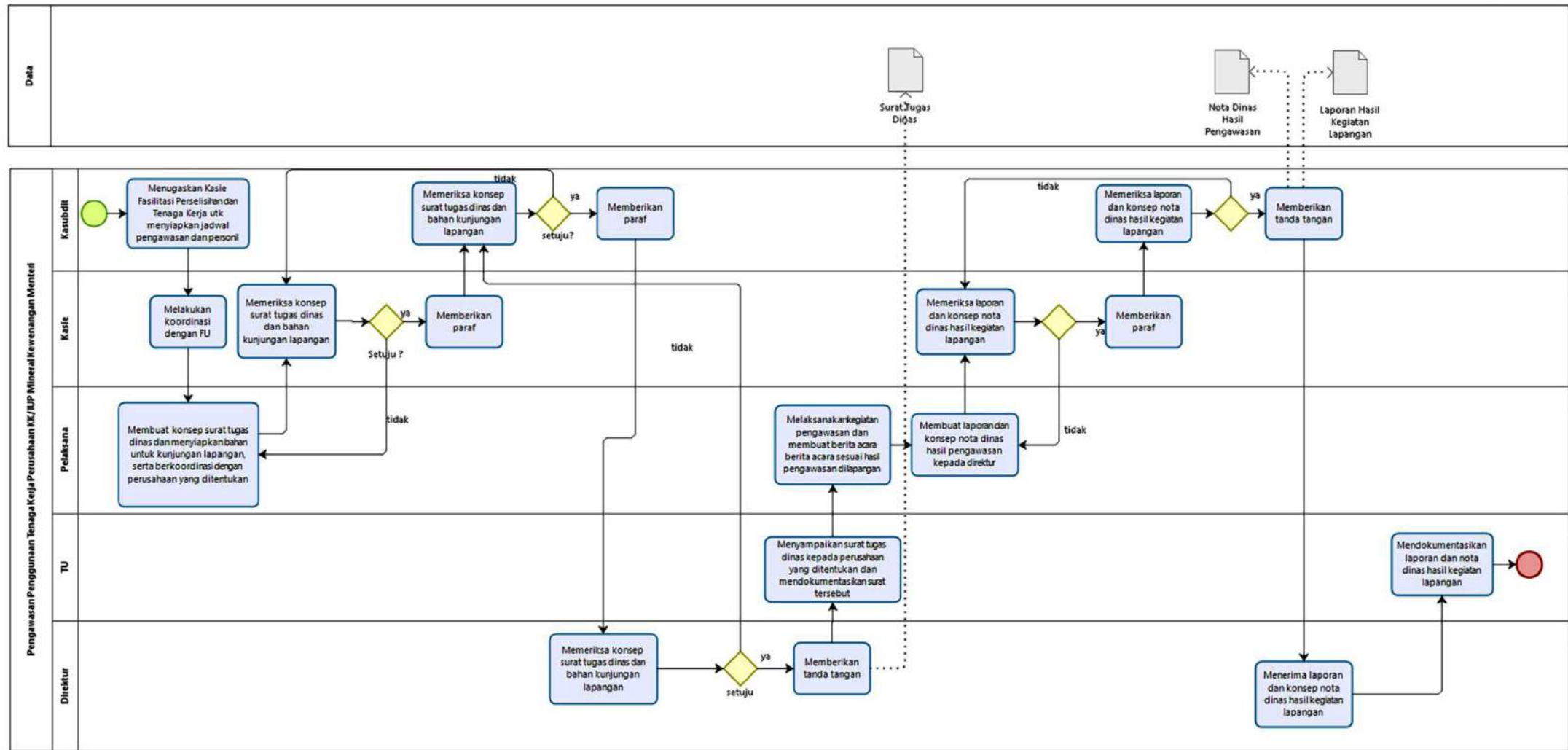
```

graph TD
    Start(( )) --> A[Menugaskan Kasie PPM utk menyiapkan jadwal pengawasan dan personel yang akan melakukan pengawasan]
    A --> B[Melakukan koordinasi dengan FU]
    B --> C[Membuat konsep surat tugas dinas dan menyiapkan bahan untuk kunjungan lapangan, serta berkoordinasi dengan perusahaan yang ditentukan]
    C --> D[Memeriksa konsep surat tugas dinas dan bahan kunjungan lapangan]
    D -- Setuju? --> E[Memberikan paraf]
    D -- tidak --> C
    E --> F[Memeriksa konsep surat tugas dinas dan bahan kunjungan lapangan]
    F -- setuju? --> G[Memberikan paraf]
    F -- tidak --> D
    G --> H[Memeriksa konsep surat tugas dinas dan bahan kunjungan lapangan]
    H -- setuju --> I[Memberikan tanda tangan]
    H -- tidak --> J[Memeriksa konsep surat tugas dinas dan bahan kunjungan lapangan]
    I --> K[Menyampaikan surat tugas dinas kepada perusahaan yang ditentukan dan mendokumentasikan surat tersebut]
    K --> L[Melaksanakan kegiatan pengawasan dan membuat berita acara berita acara sesuai hasil pengawasan dilapangan]
    L --> M[Membuat laporan dan konsep nota dinas hasil pengawasan kepada direktur]
    M --> N[Memeriksa laporan dan konsep nota dinas hasil kegiatan lapangan]
    N --> O{ }
    O -- ya --> P[Memberikan paraf]
    O -- tidak --> M
    P --> Q[Memeriksa laporan dan konsep nota dinas hasil kegiatan lapangan]
    Q --> R{ }
    R -- ya --> S[Memberikan tanda tangan]
    R -- tidak --> Q
    S --> T[Menerima laporan dan konsep nota dinas hasil kegiatan lapangan]
    T --> U[Mendokumentasikan laporan dan nota dinas hasil kegiatan lapangan]
    U --> End(( ))
  
```

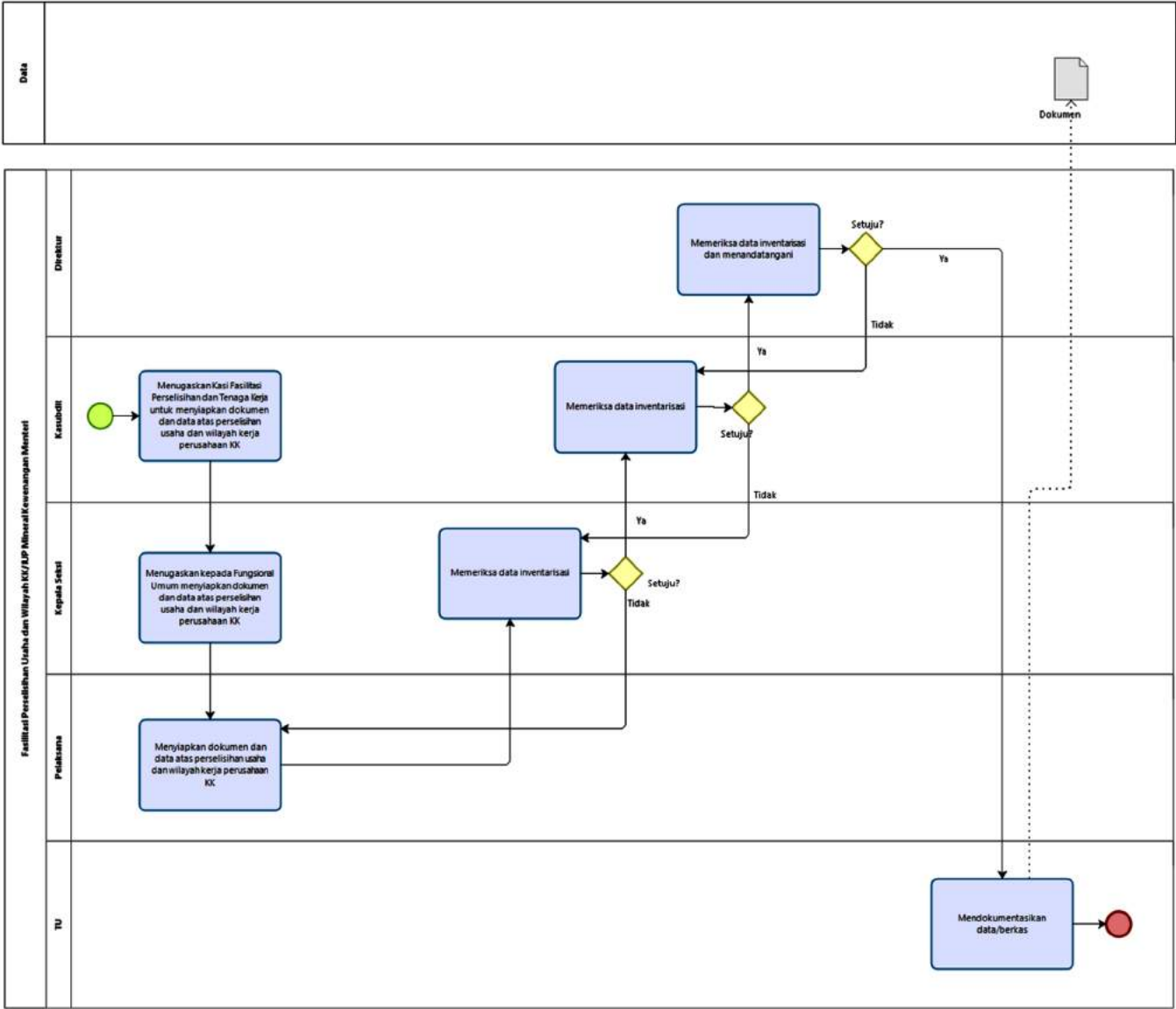
Legenda:

- Surat Tugas Dinas
- Nota Dinas Hasil Pengawasan
- Laporan Hasil Kegiatan Lapangan

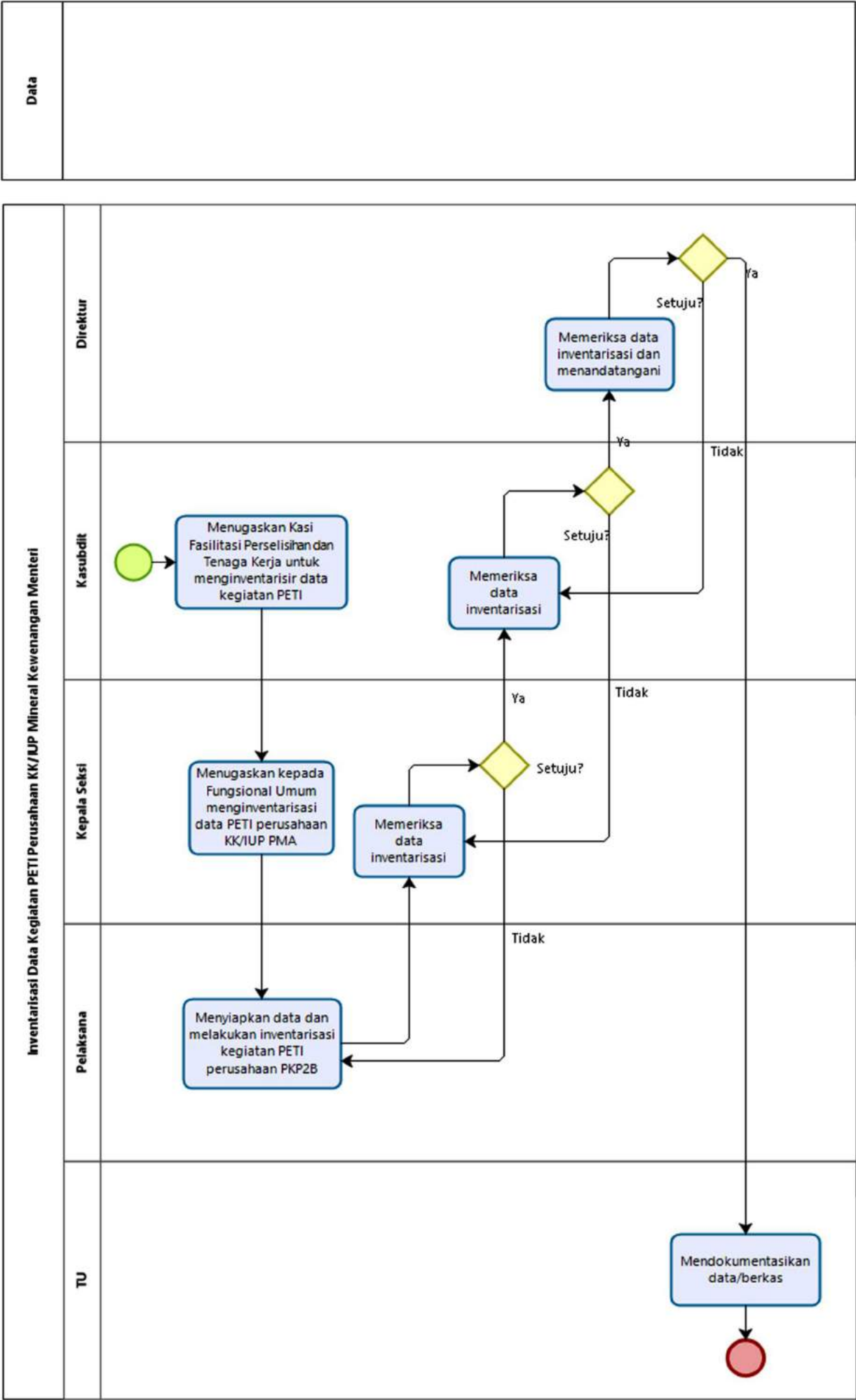
Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



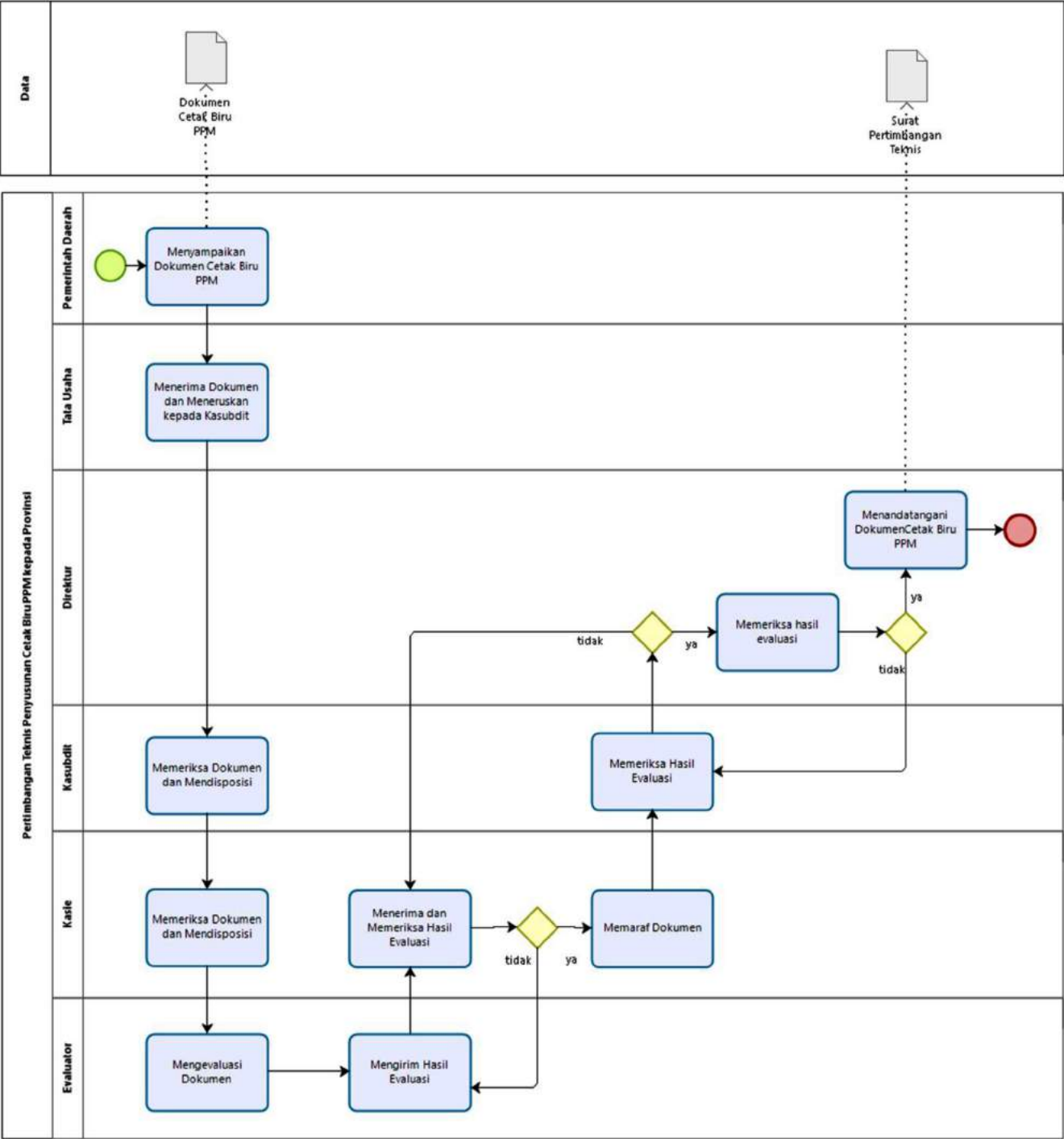
Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Fasilitasi Perselisihan Usaha dan Wilayah KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



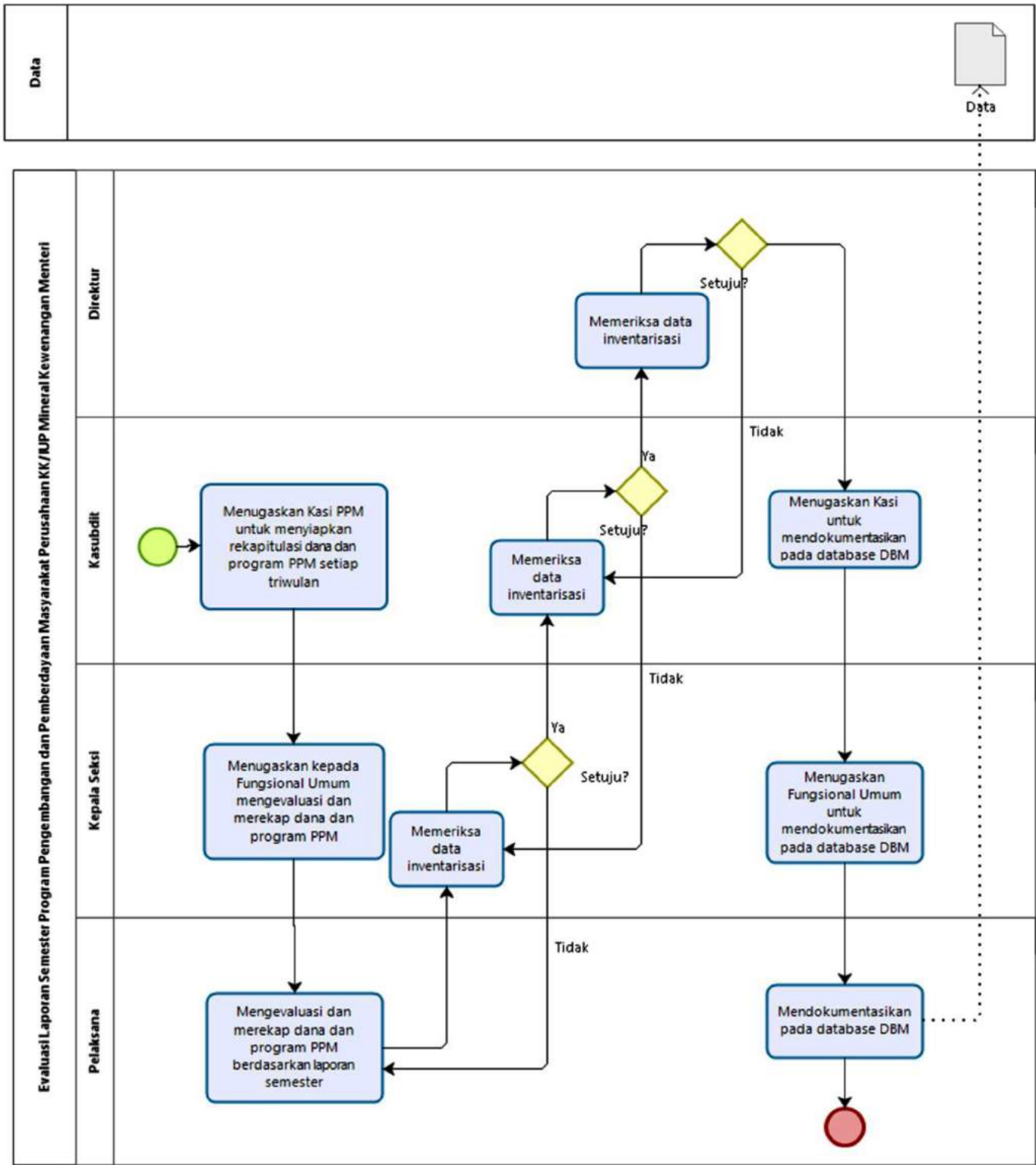
Seksi Fasilitas Perselisihan dan Tenaga Kerja - Inventarisasi Data Kegiatan PETI Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



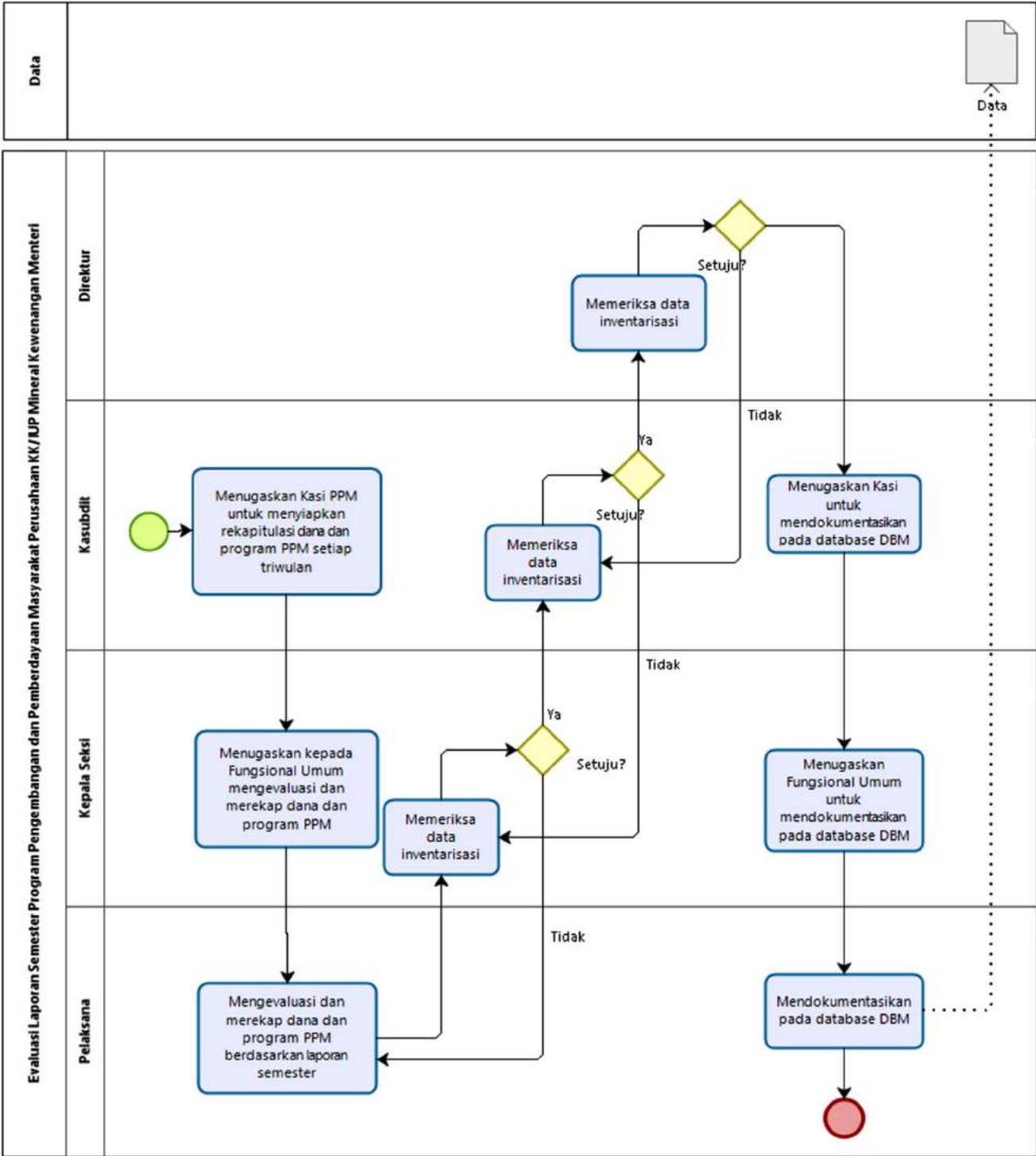
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pertimbangan Teknis
Penyusunan Cetak Biru PPM kepada Provinsi



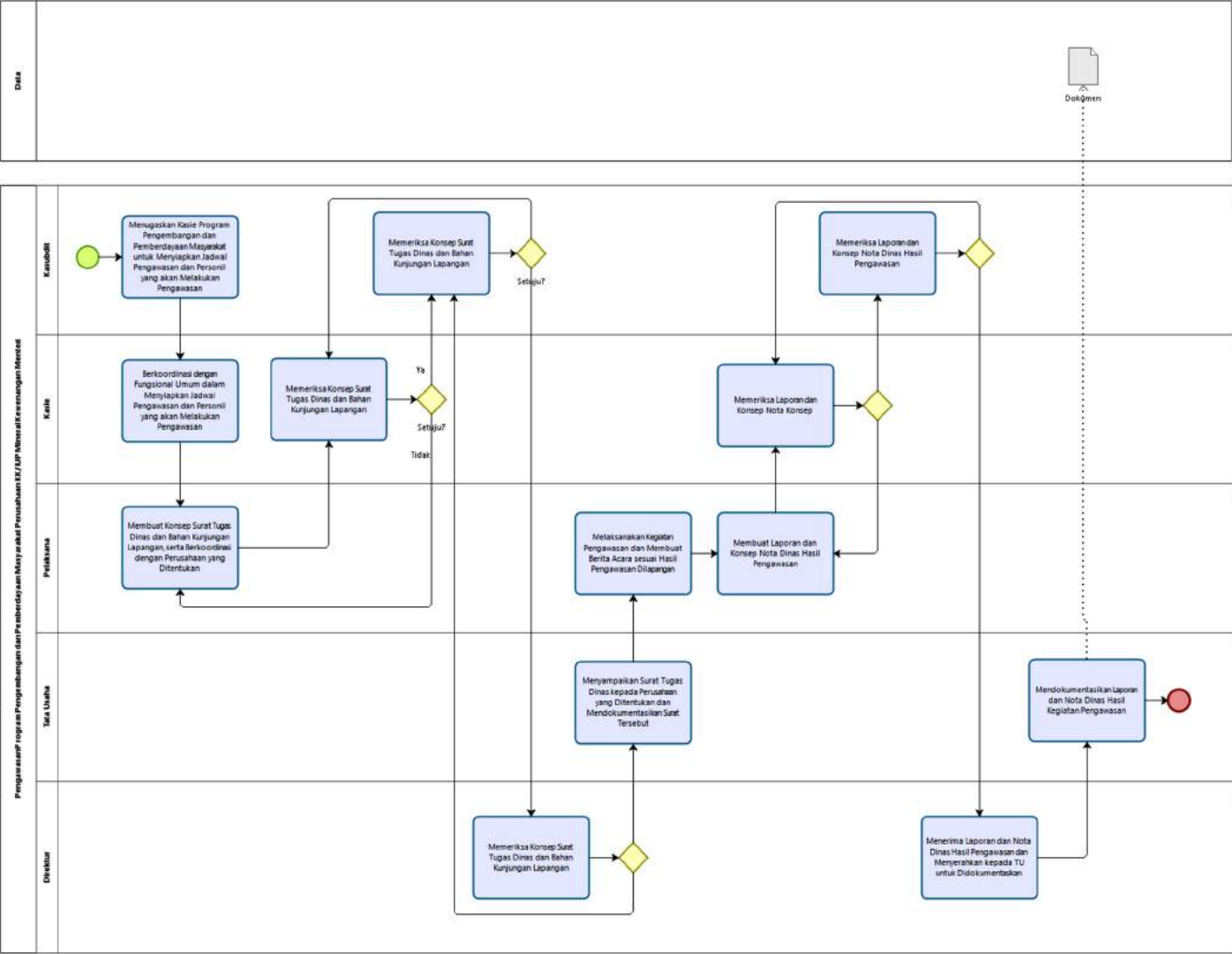
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Evaluasi Laporan Triwulan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



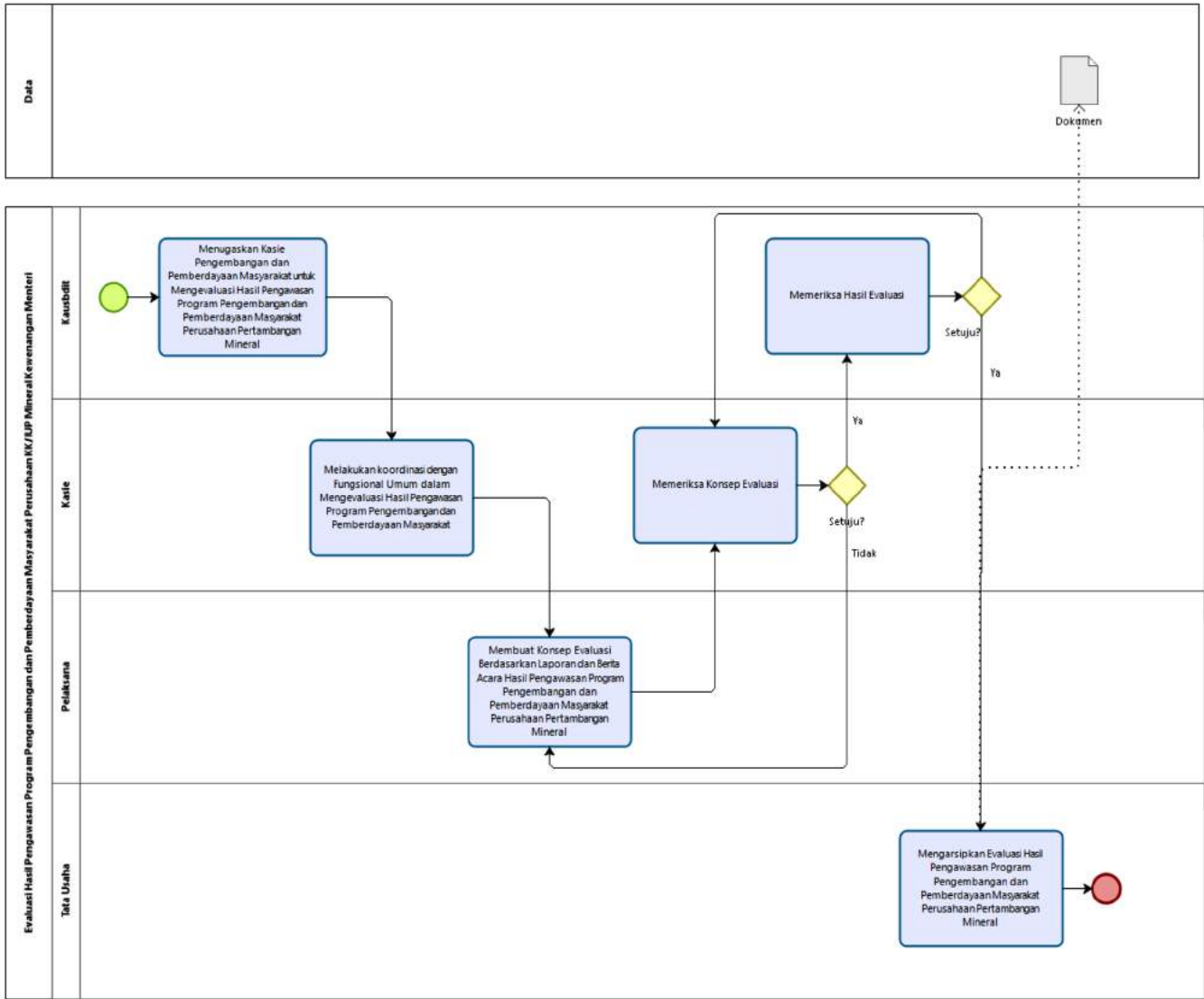
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Evaluasi Laporan Semester Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



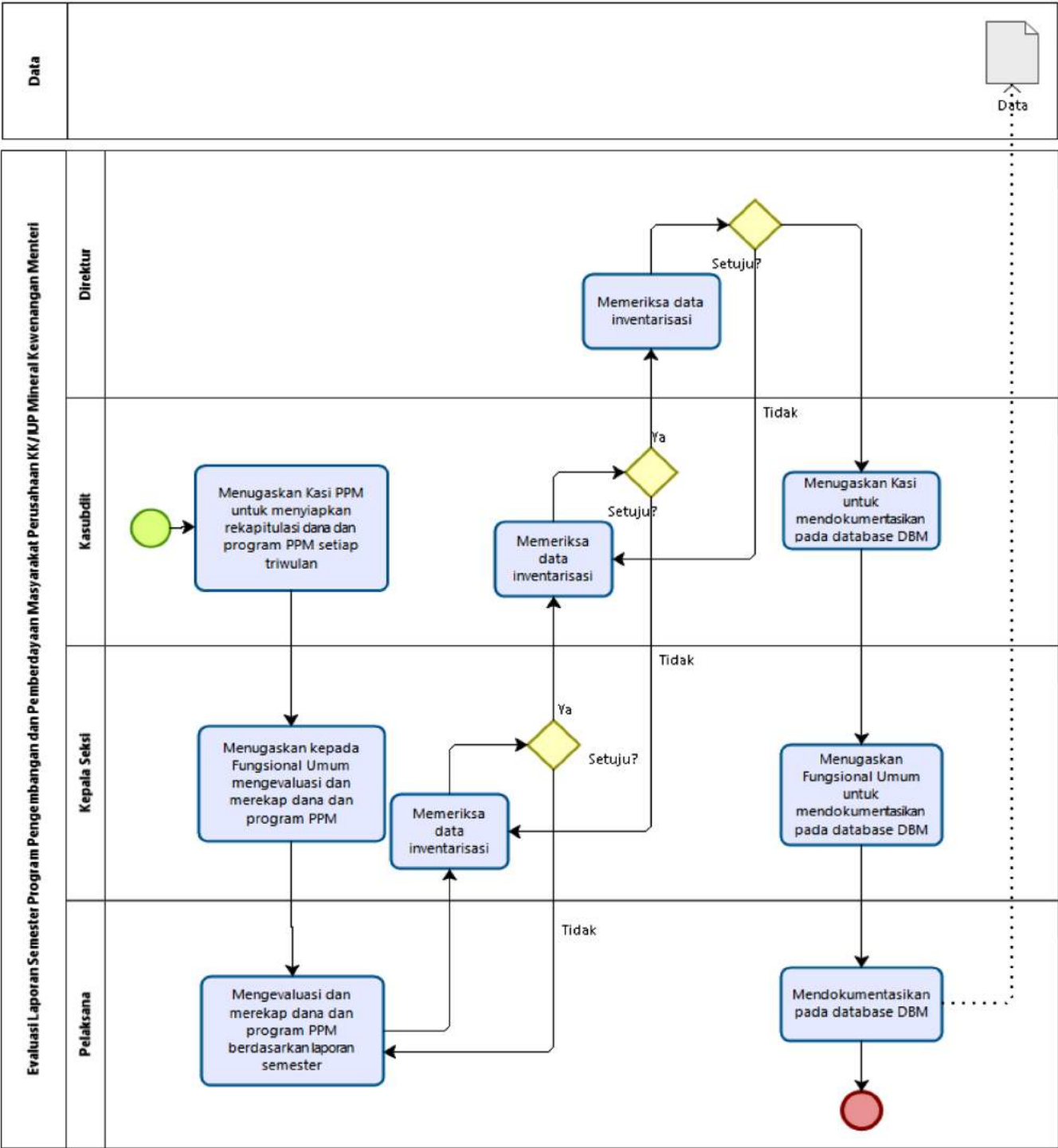
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat – Pengawasan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



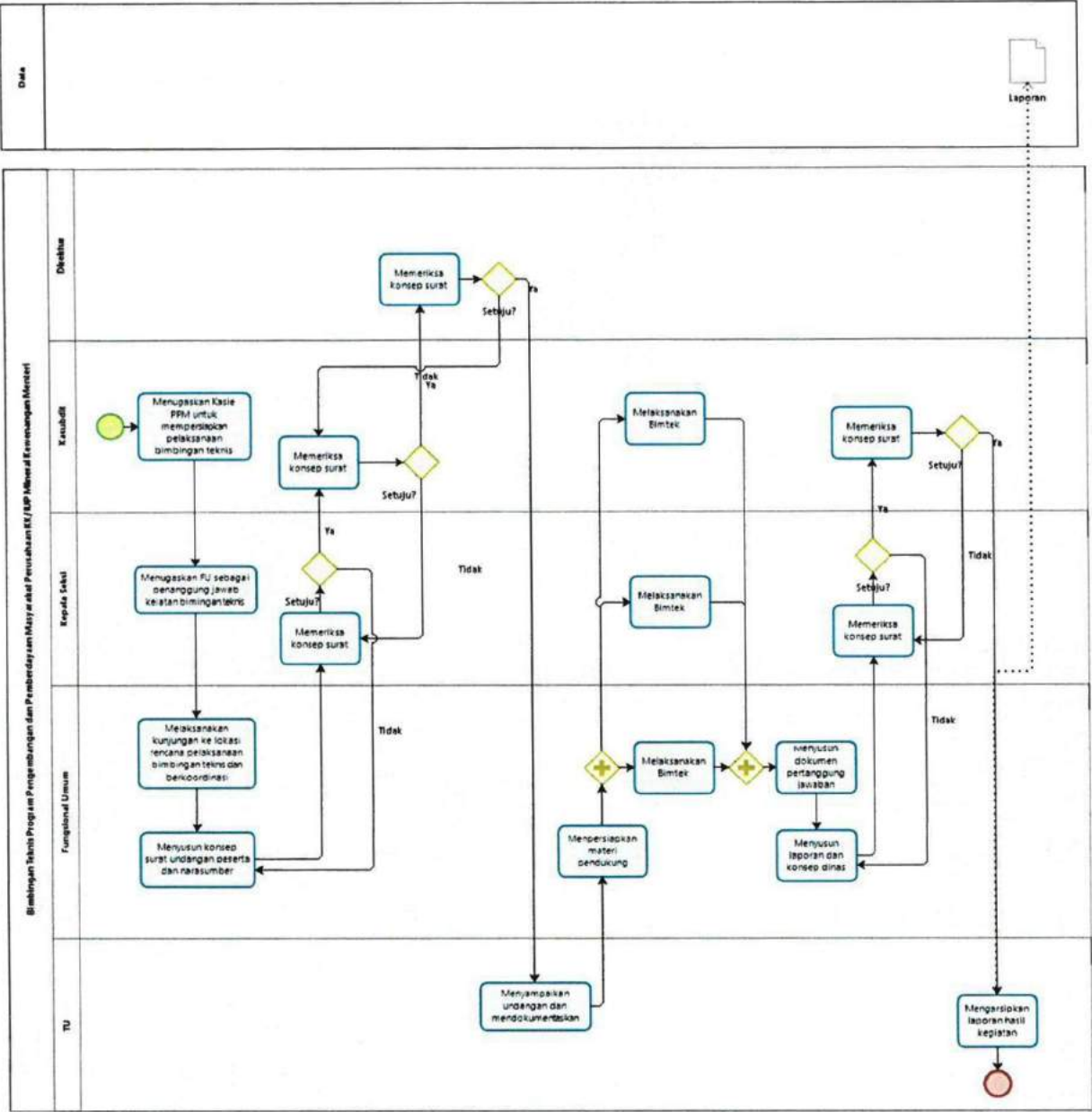
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat – Evaluasi Hasil Pengawasan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat – Evaluasi Laporan Semester Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Mineral - Bimbingan Teknis Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

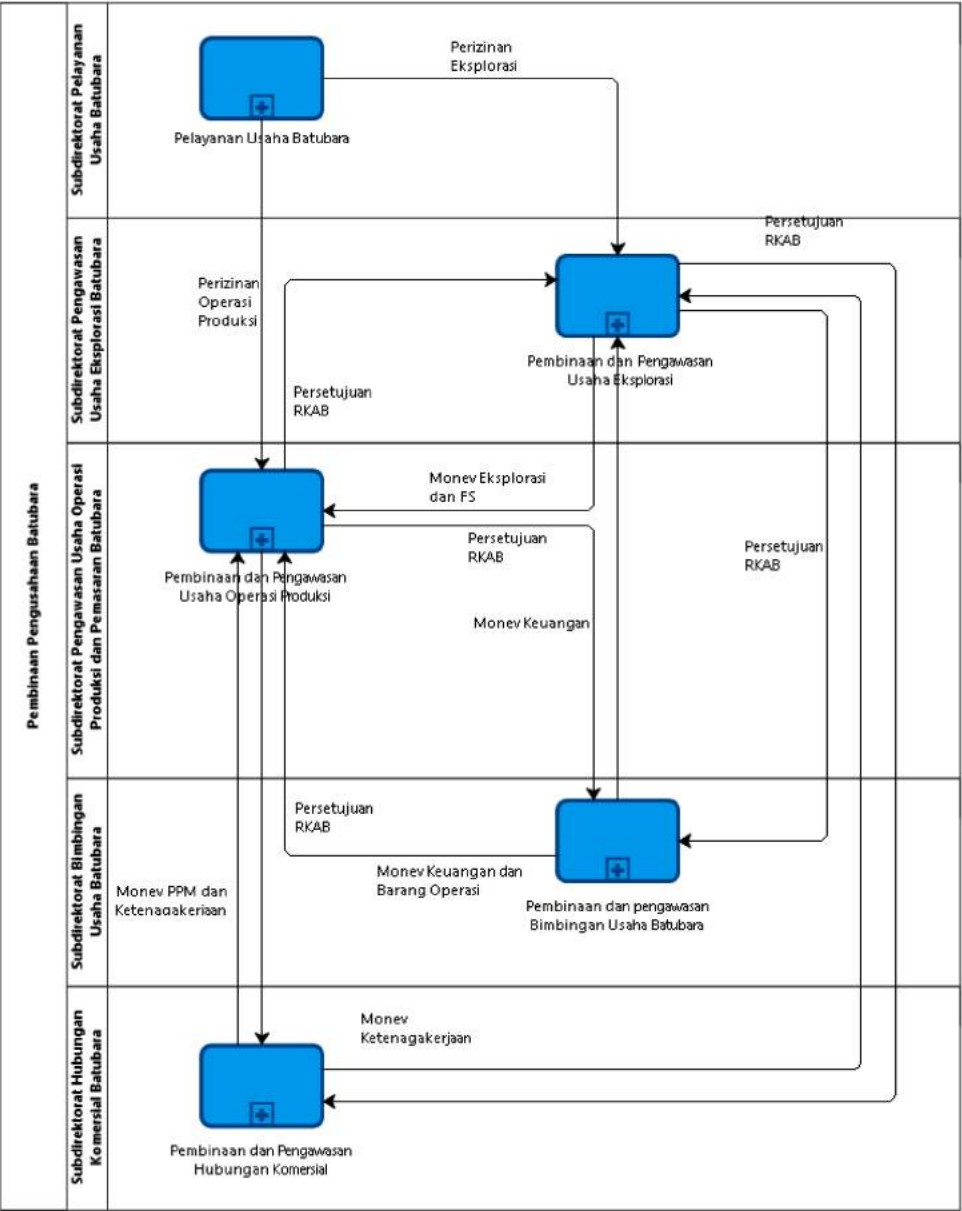

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 315.K/30/DJB/2018

TANGGAL : 14 Desember 2018

BISNIS PROSES DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN
BATUBARA



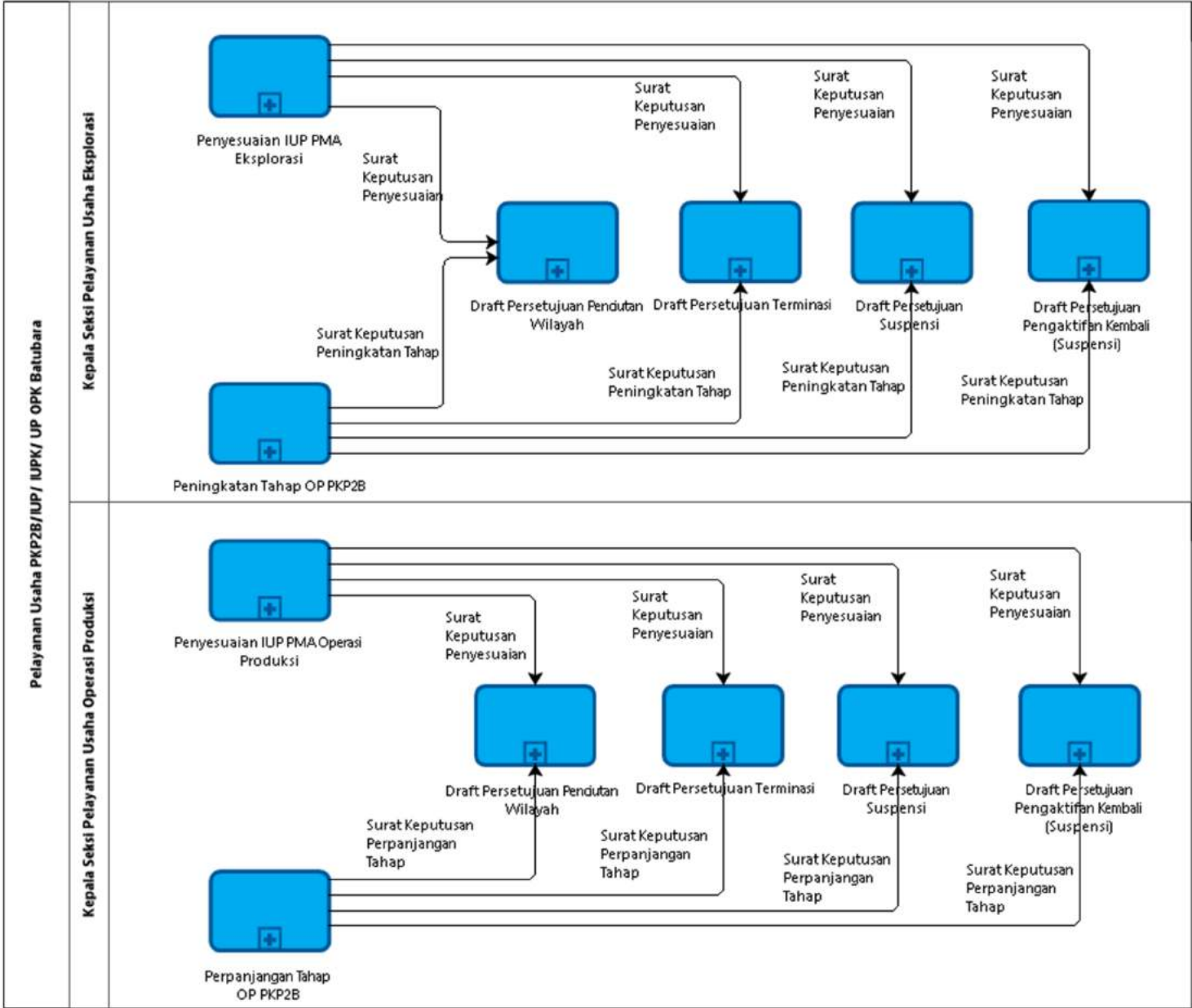
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai proses bisnis sebagai berikut:

- a. Pelayanan usaha batubara meliputi pengelolaan perizinan dan rekomendasi kegiatan usaha pertambangan yang kemudian akan dimanfaatkan dalam pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi serta pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi
- b. Pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi batubara meliputi persetujuan RKAB, penerbitan surat klarifikasi dan rekomendasi serta melakukan monitoring dan evaluasi tahap eksplorasi dan studi kelayakan

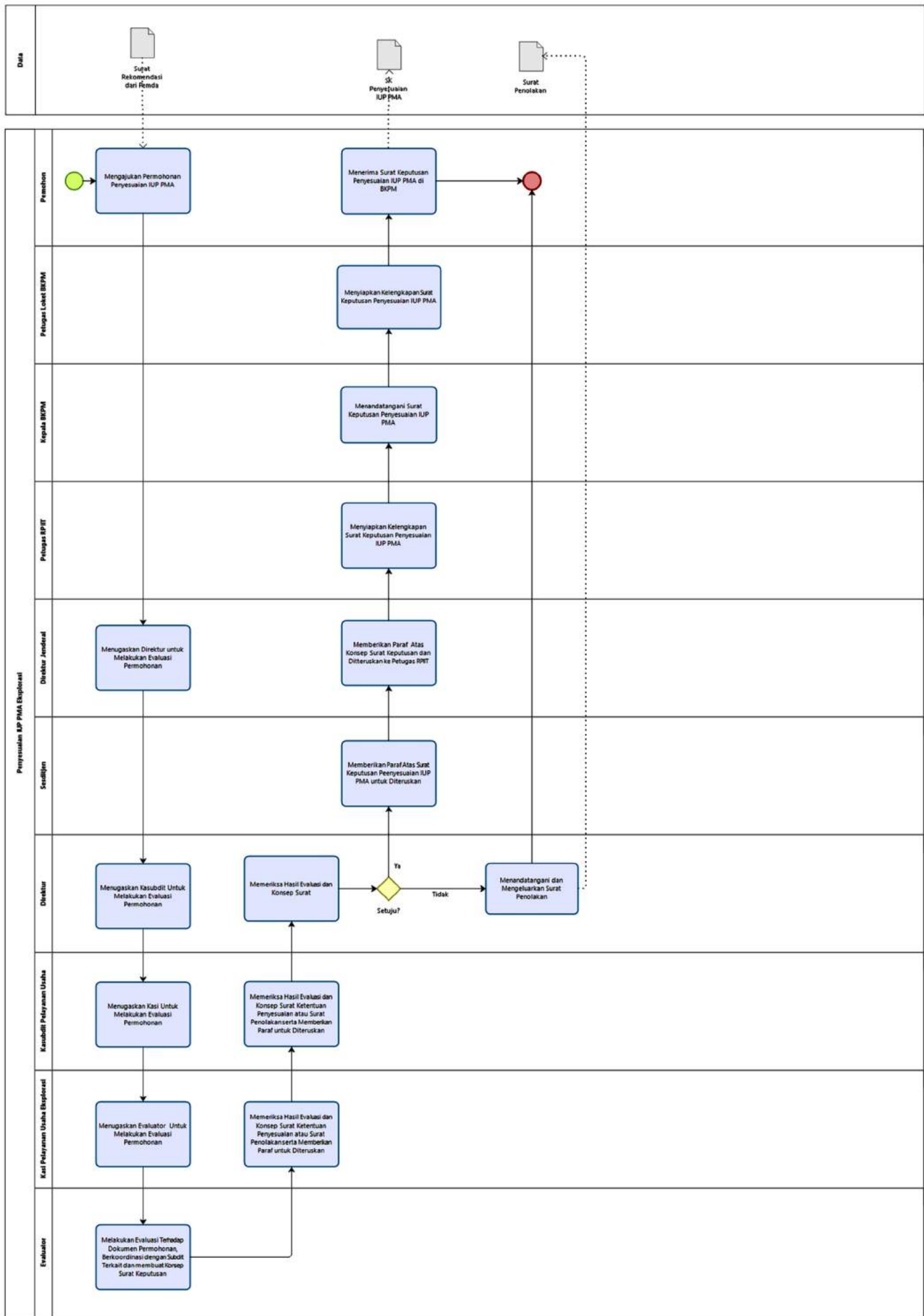
yang kemudian akan dimanfaatkan dalam pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi serta pembinaan dan pengawasan bimbingan usaha batubara

- c. Pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran Batubara meliputi persetujuan RKAB, penetapan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga patokan batubara serta pengawasan produksi yang kemudian akan dimanfaatkan dalam pembinaan dan pengawasan hubungan komersial batubara serta pembinaan dan pengawasan bimbingan usaha batubara
- d. Pembinaan dan pengawasan bimbingan usaha batubara meliputi monitoring dan evaluasi dalam aspek keuangan dan barang produksi serta evaluasi laporan keuangan perusahaan pertambangan yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi batubara serta Pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran Batubara
- e. Pembinaan dan pengawasan Hubungan Komersial Batubara meliputi monitoring dan evaluasi dalam aspek ketenagakerjaan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Pembinaan dan pengawasan usaha eksplorasi batubara serta Pembinaan dan pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran Batubara.

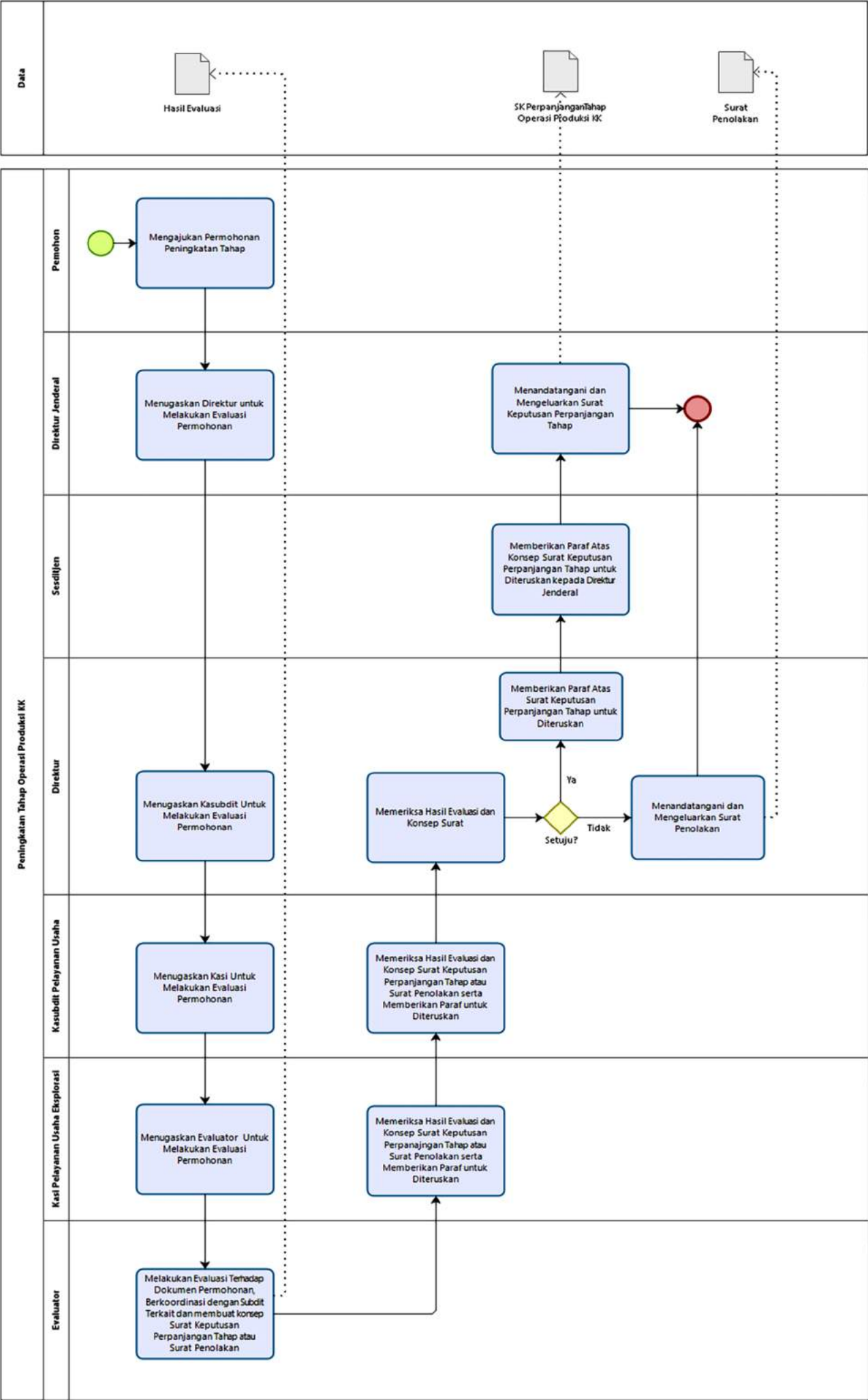
Pelayanan Usaha Batubara



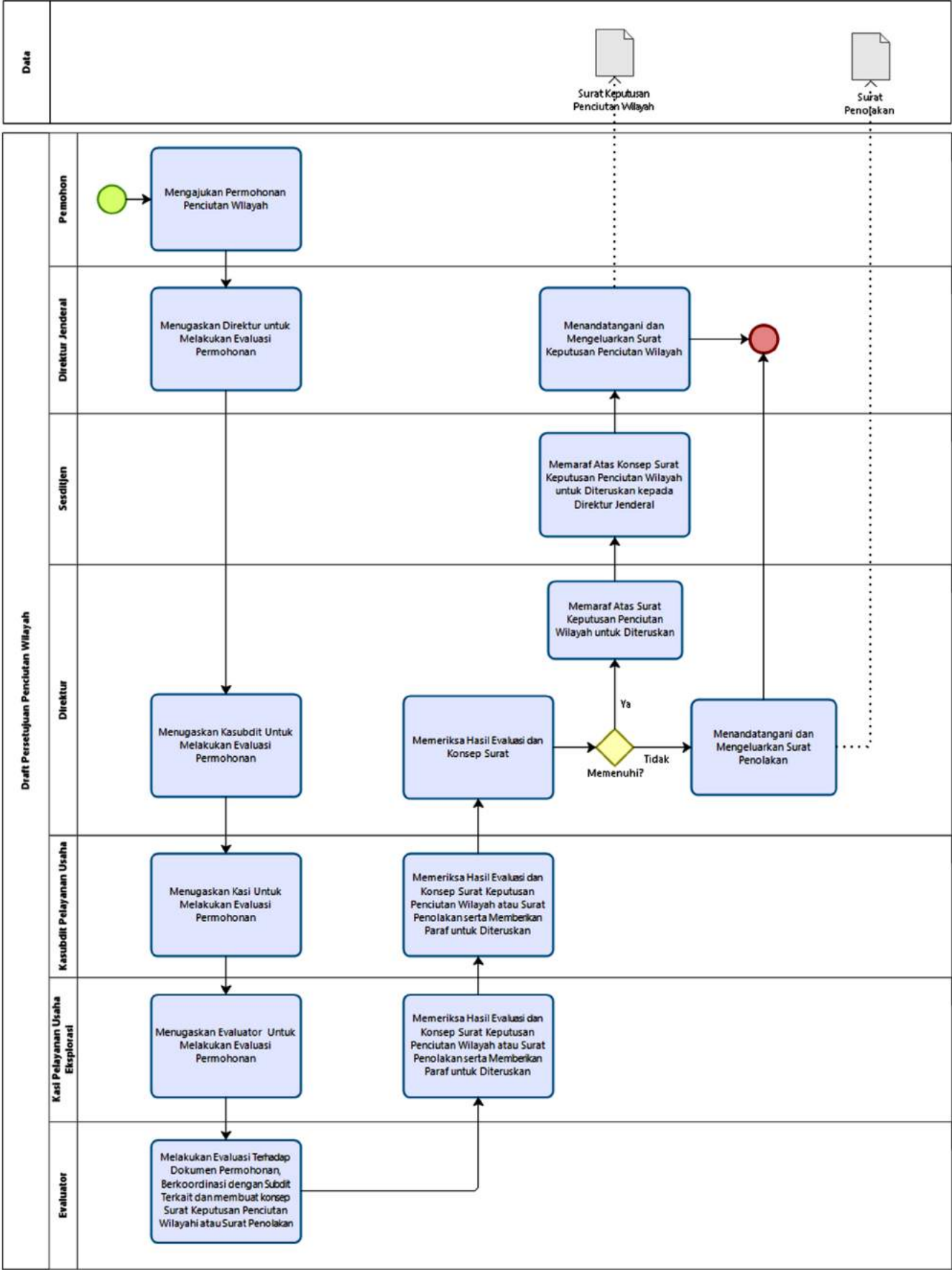
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyesuaian IUP PMA Eksplorasi



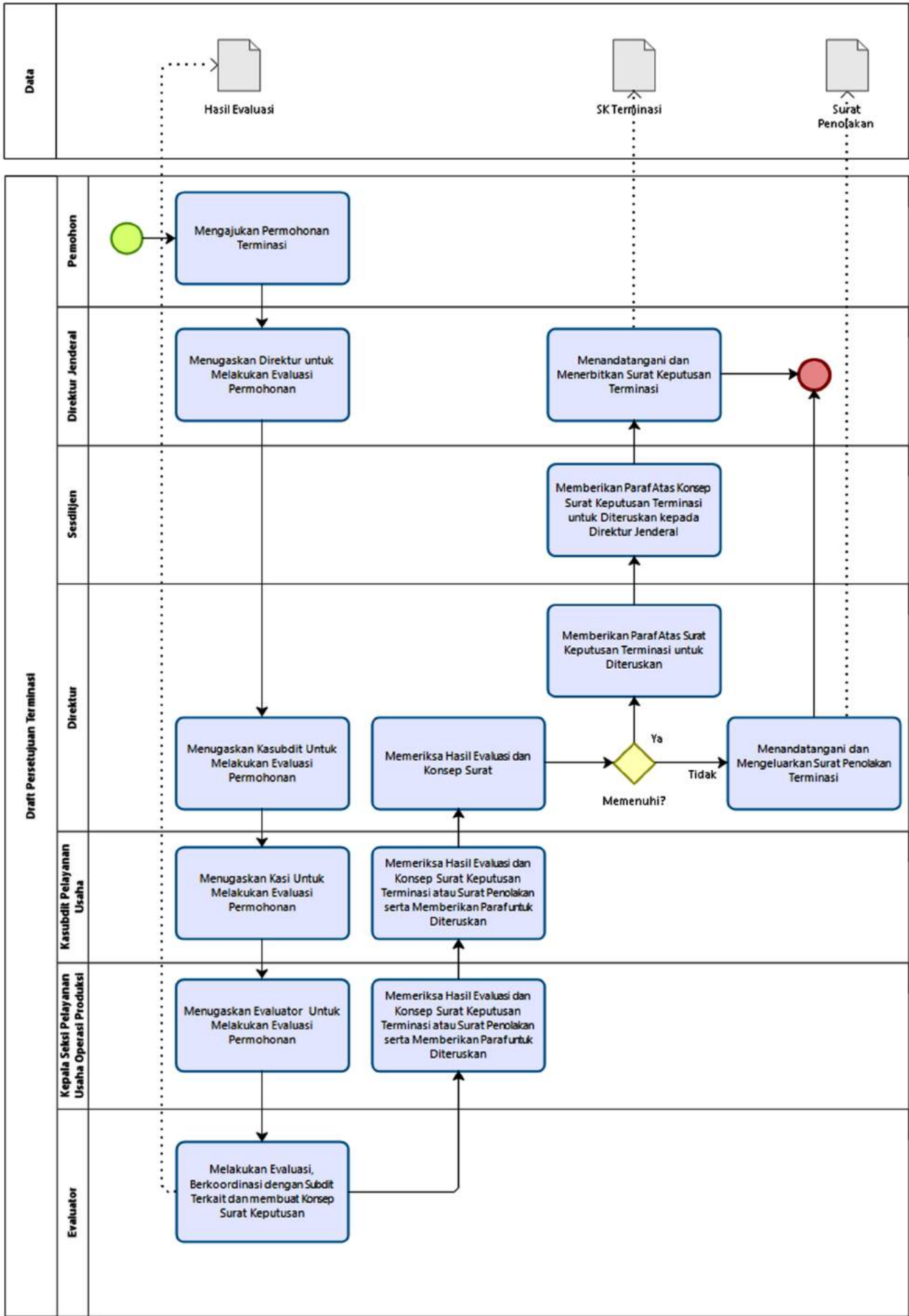
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Peningkatan Tahap Operasi Produksi
PKP2B



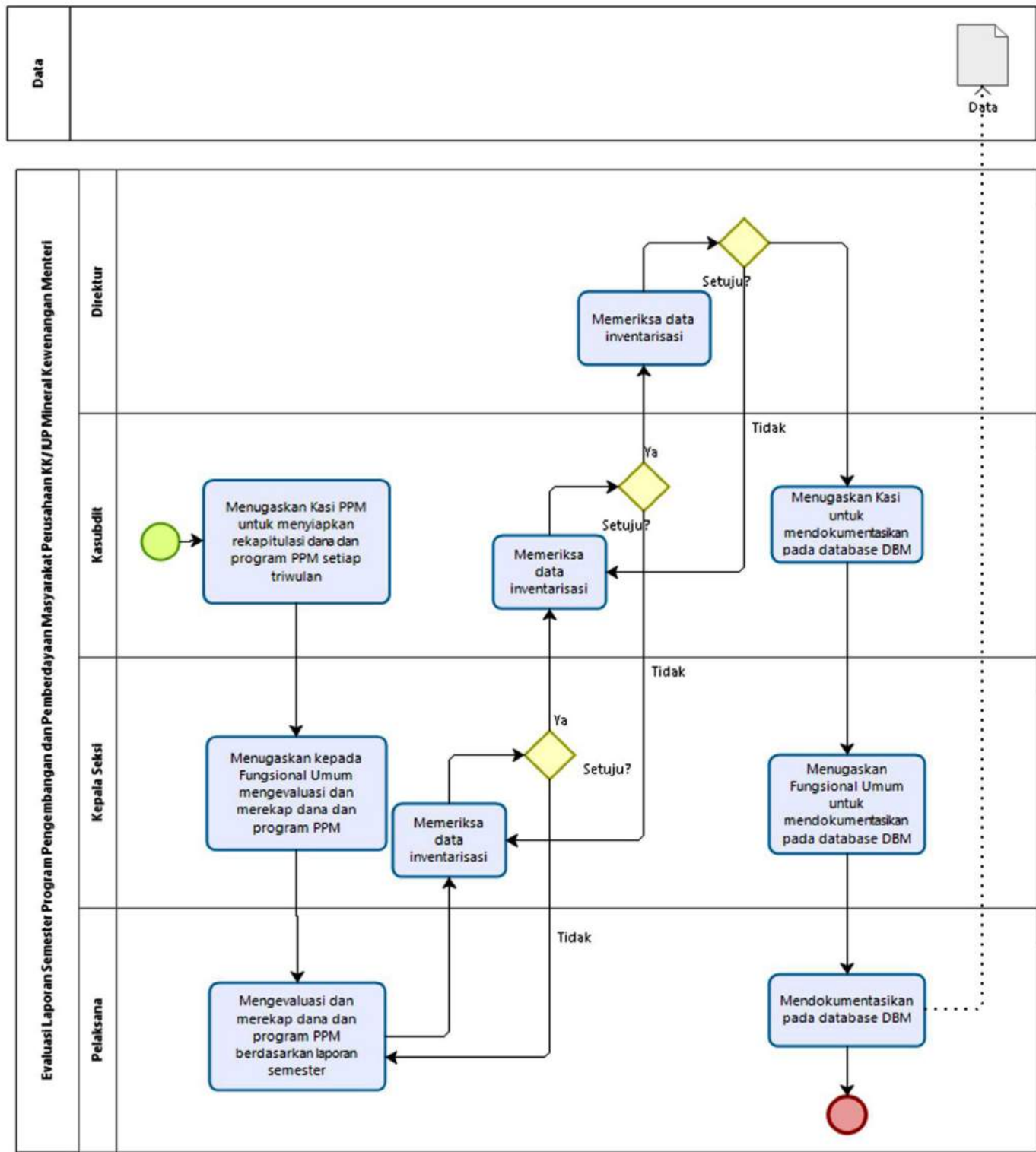
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyusunan Draft Penciutan Wilayah



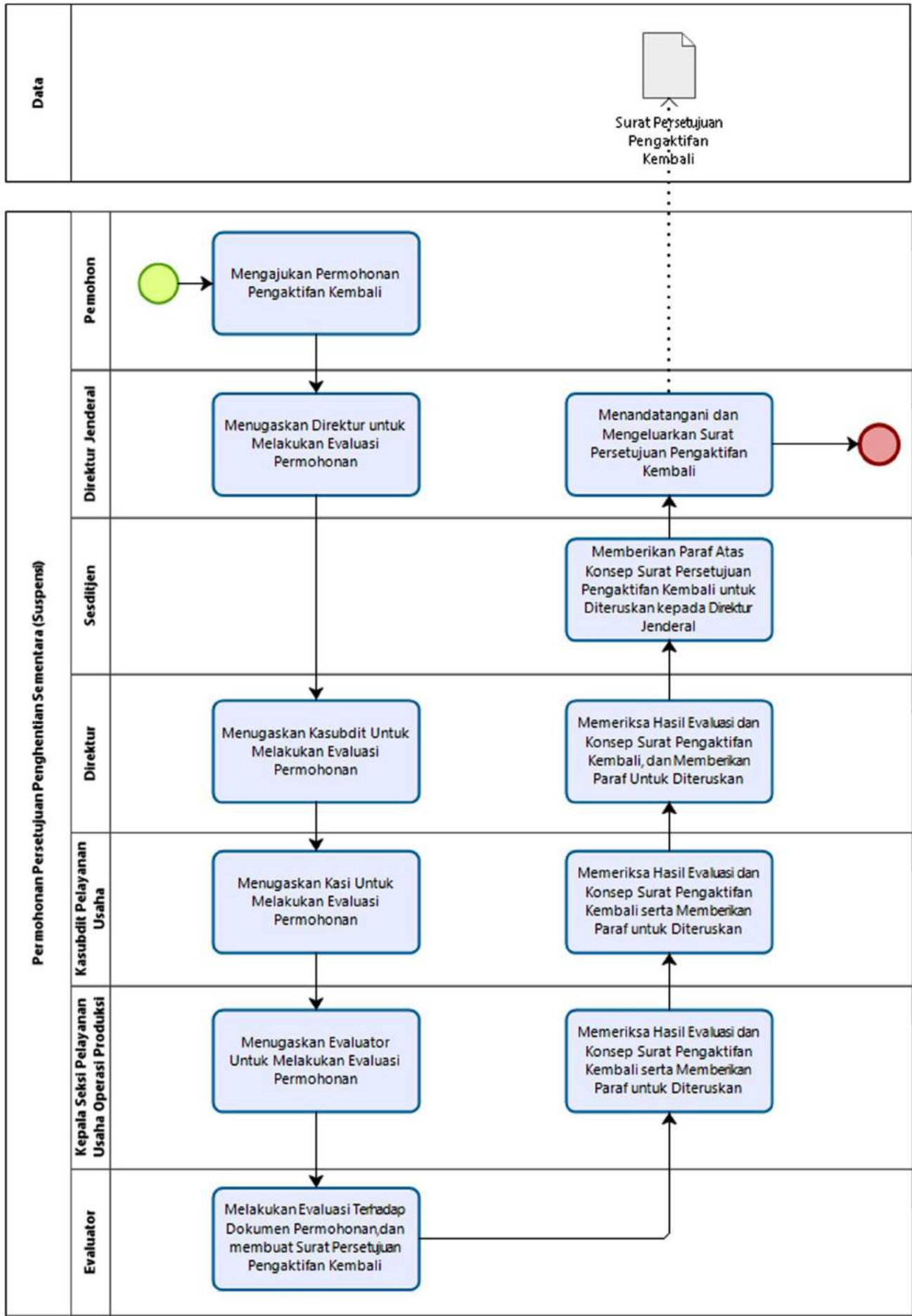
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyusunan Draft Terminasi



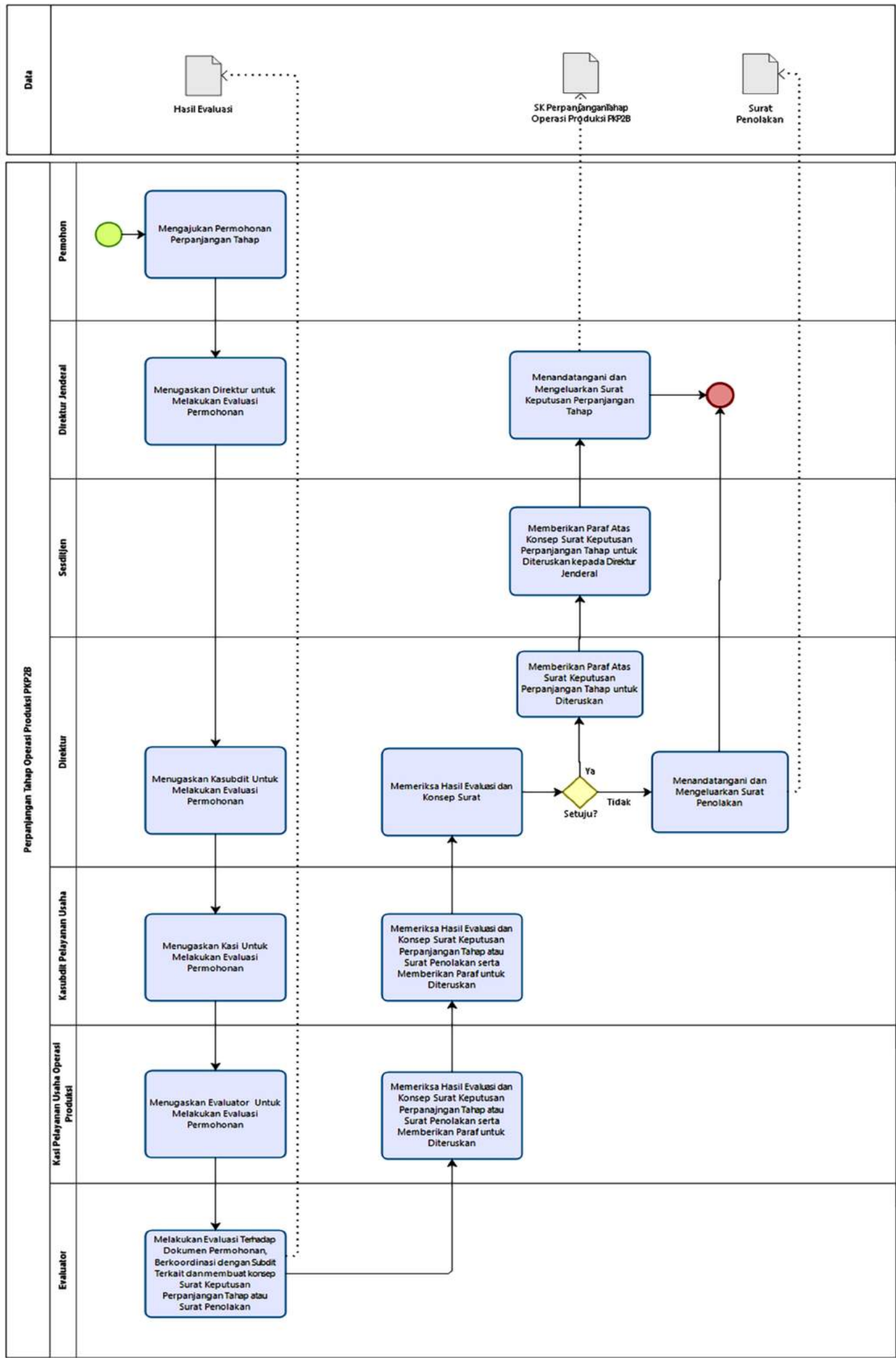
Seksi Fasilitas Perselisihan dan Tenaga Kerja - Evaluasi Laporan Triwulan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan KK/IUP Mineral Kewenangan Menteri



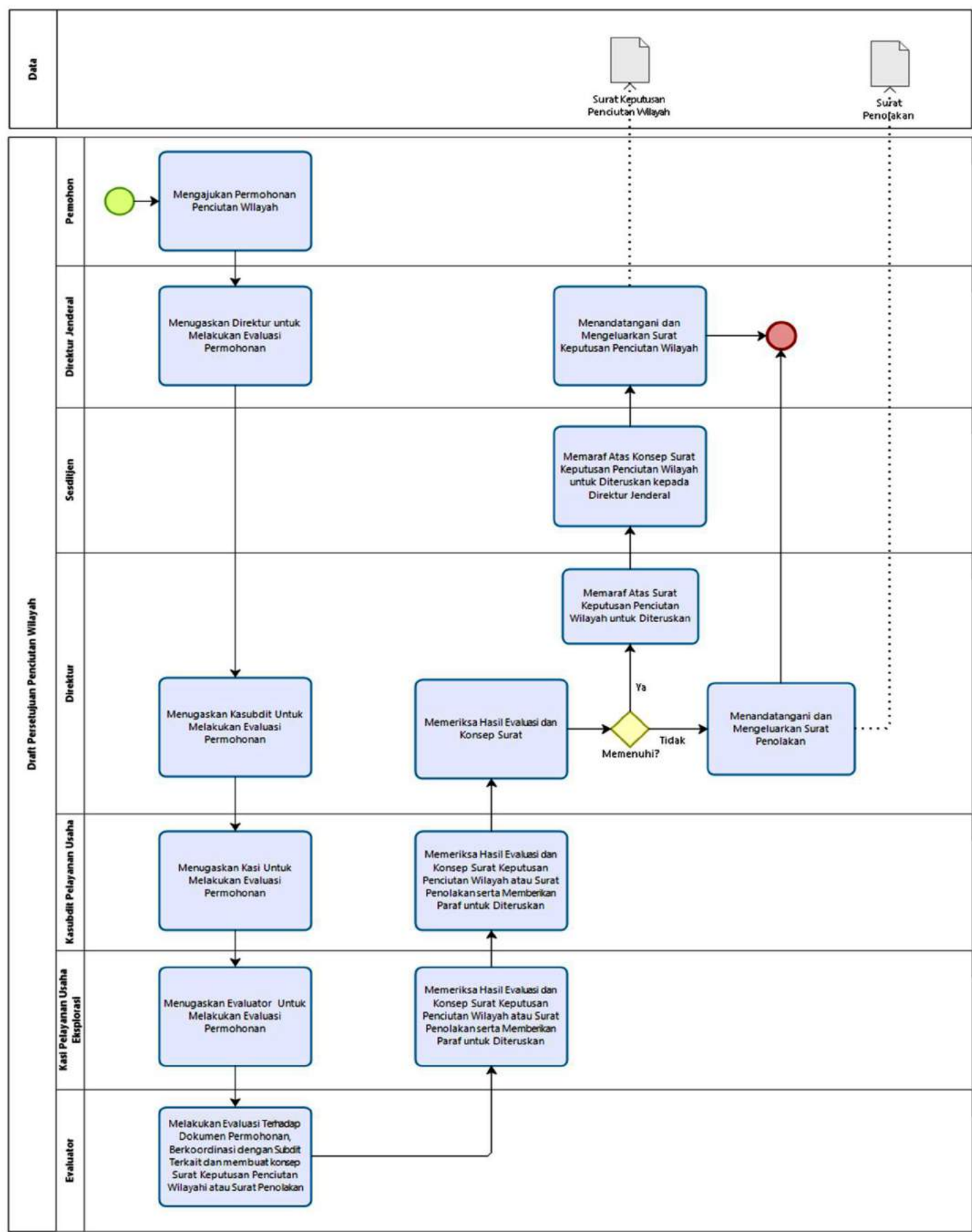
Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi - Penyusunan Draft Persetujuan Pengaktifan Kembali (Suspensi)



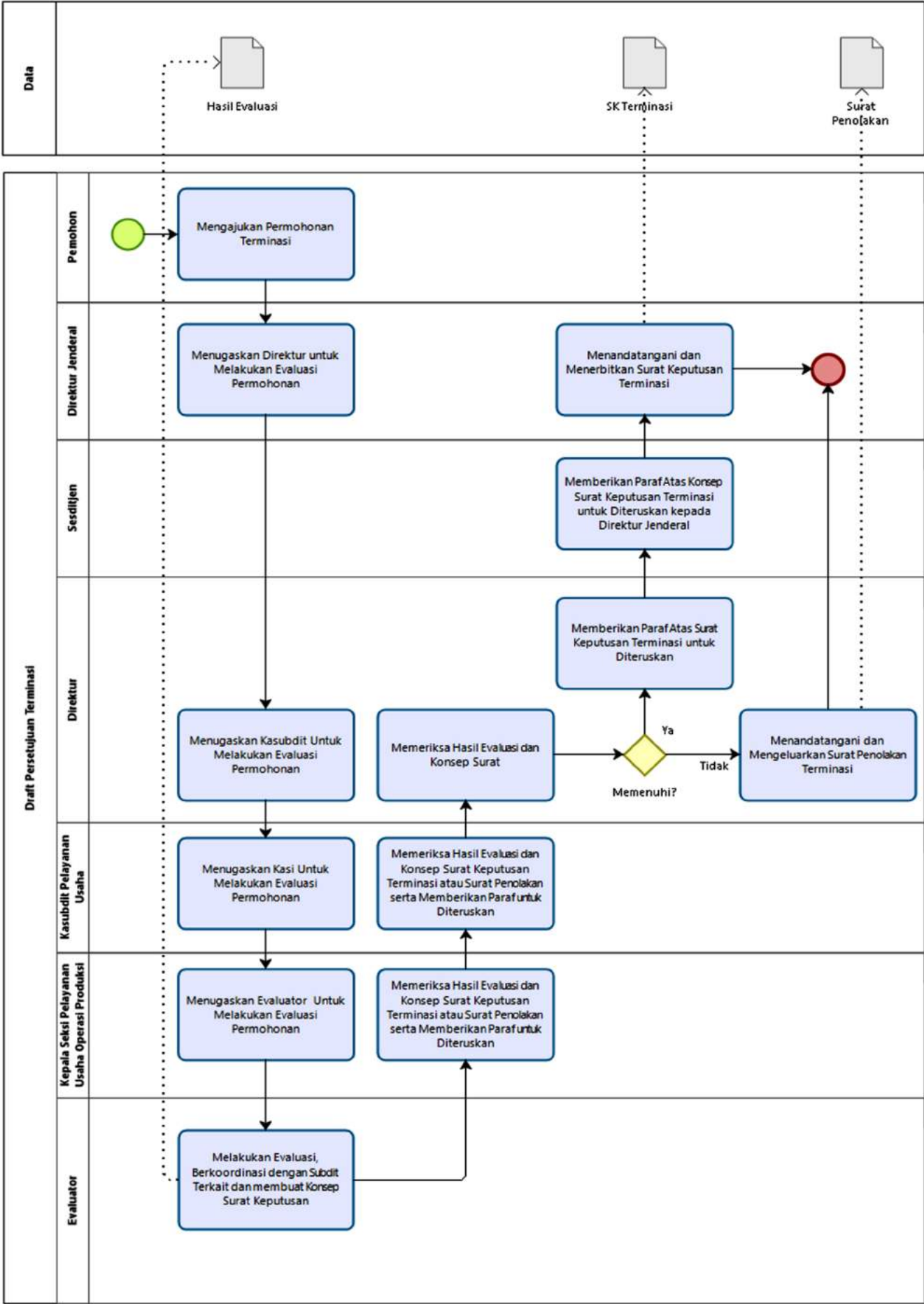
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Perpanjangan Tahap Operasi
Produksi PKP2B



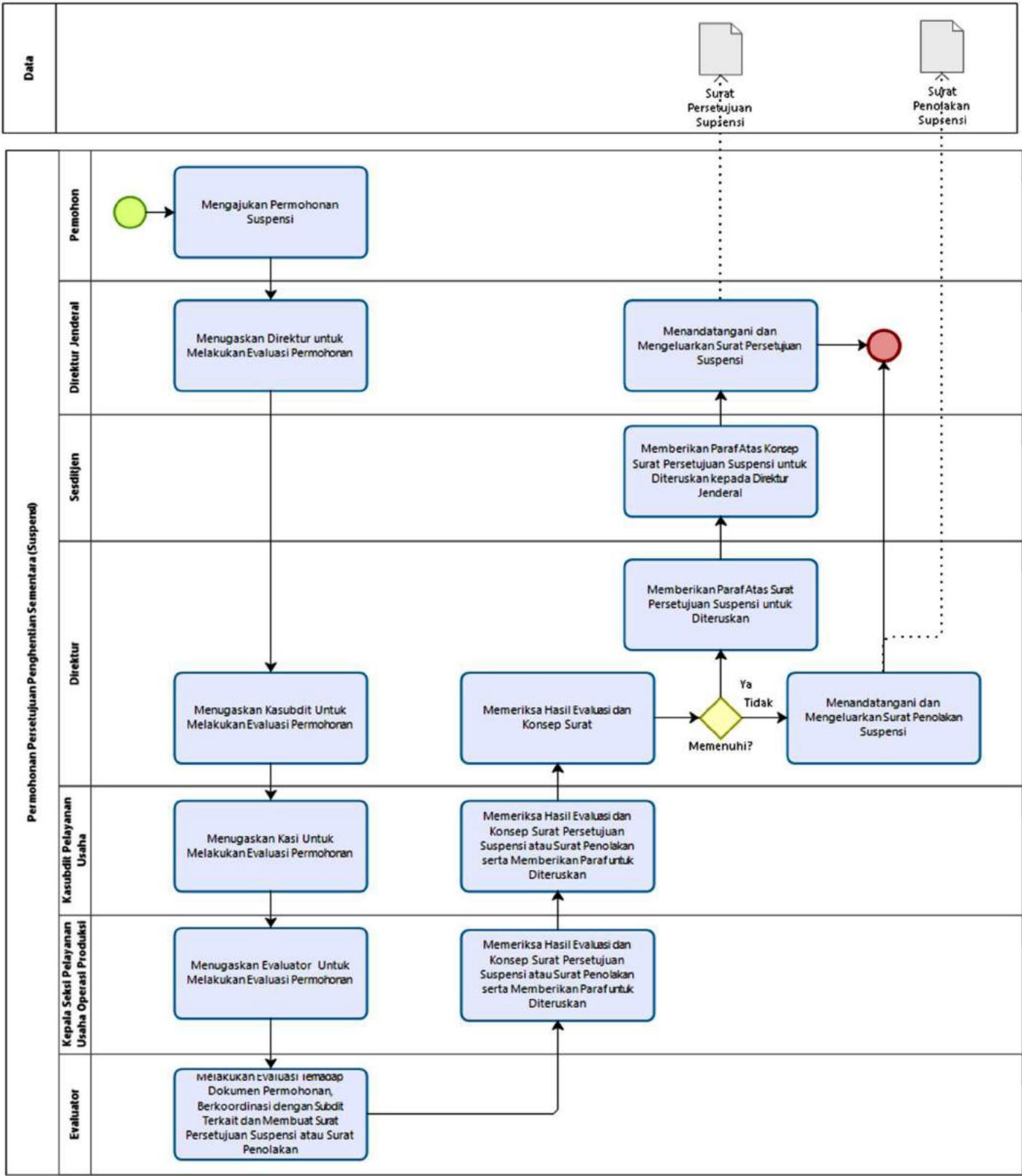
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Penciutan Wilayah



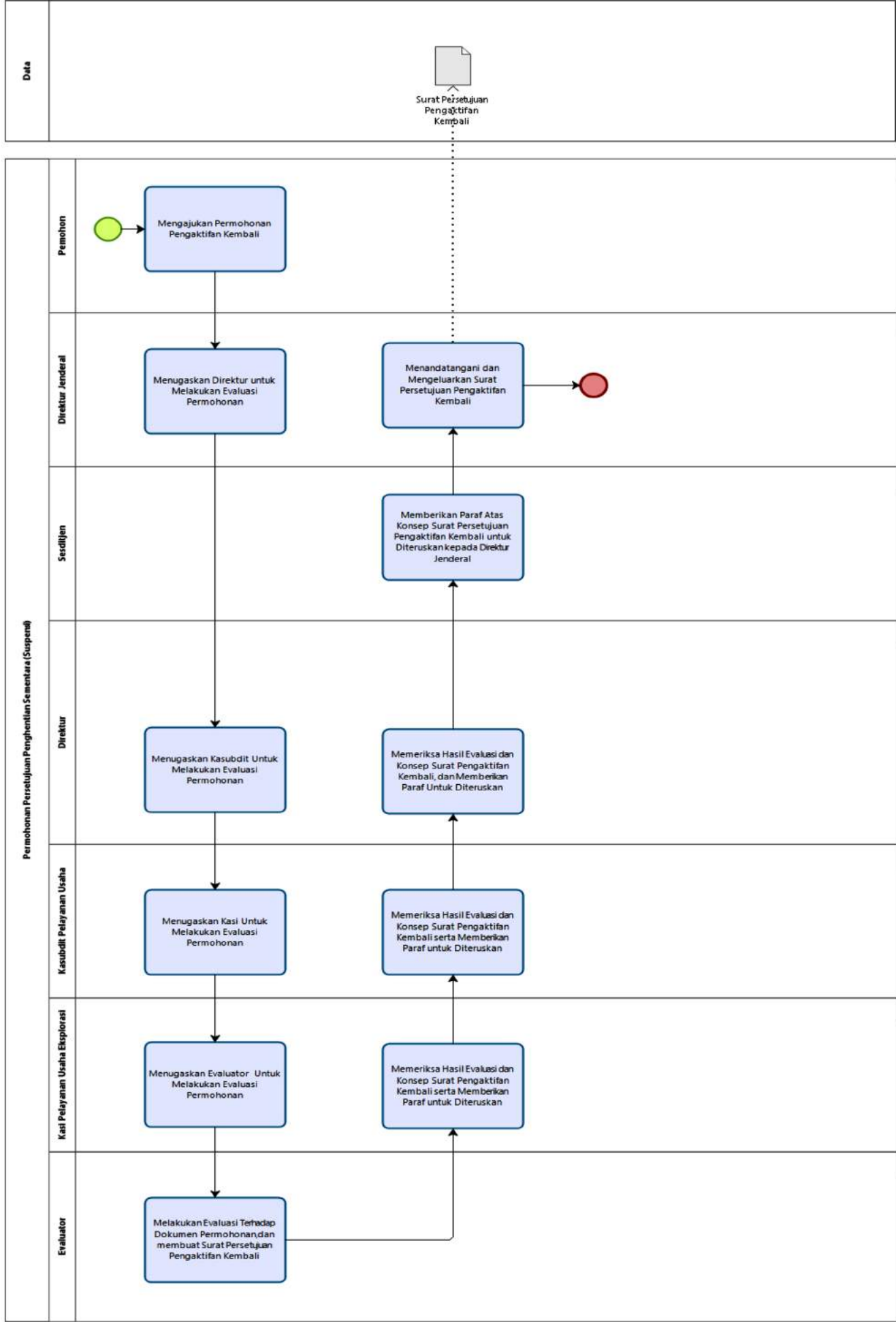
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Terminasi



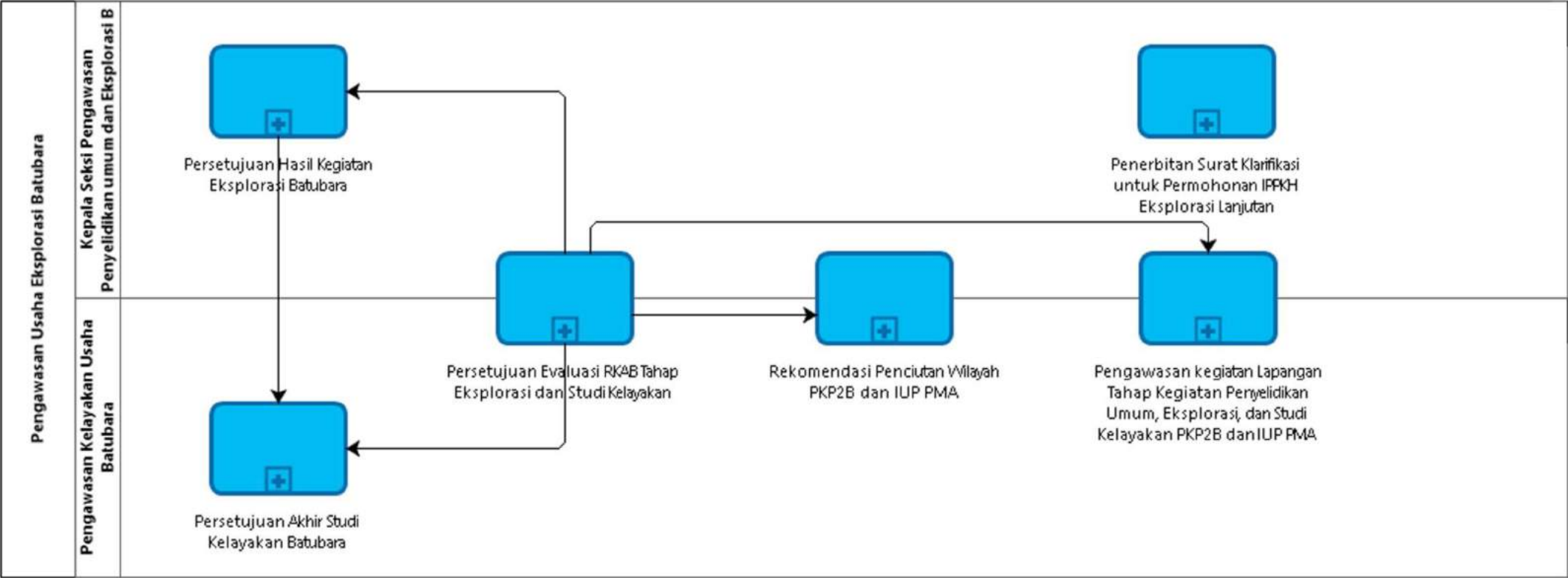
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Persetujuan Suspensi



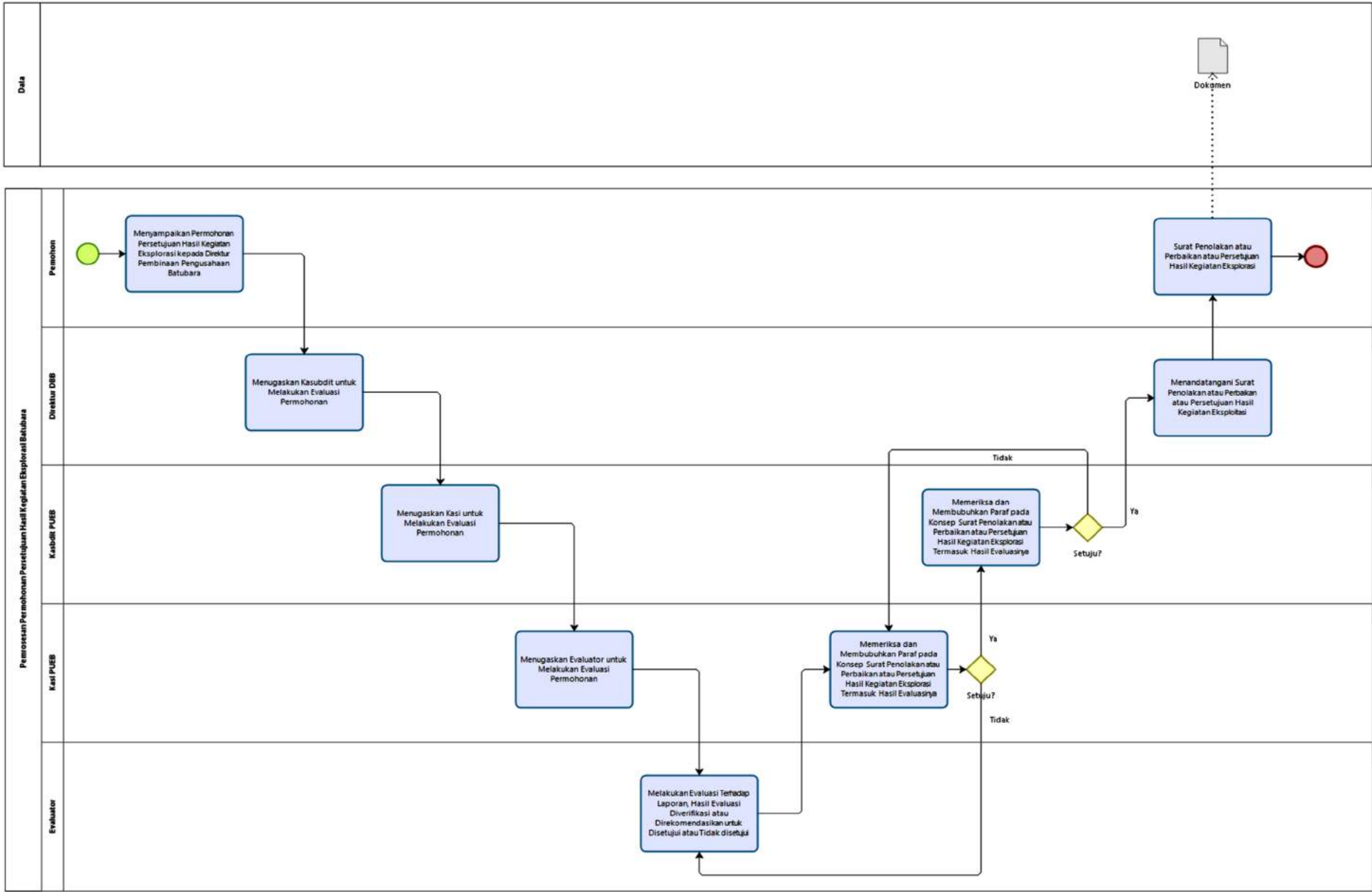
Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi - Penyusunan Draft Persetujuan Pengaktifan Kembali (Suspensi)



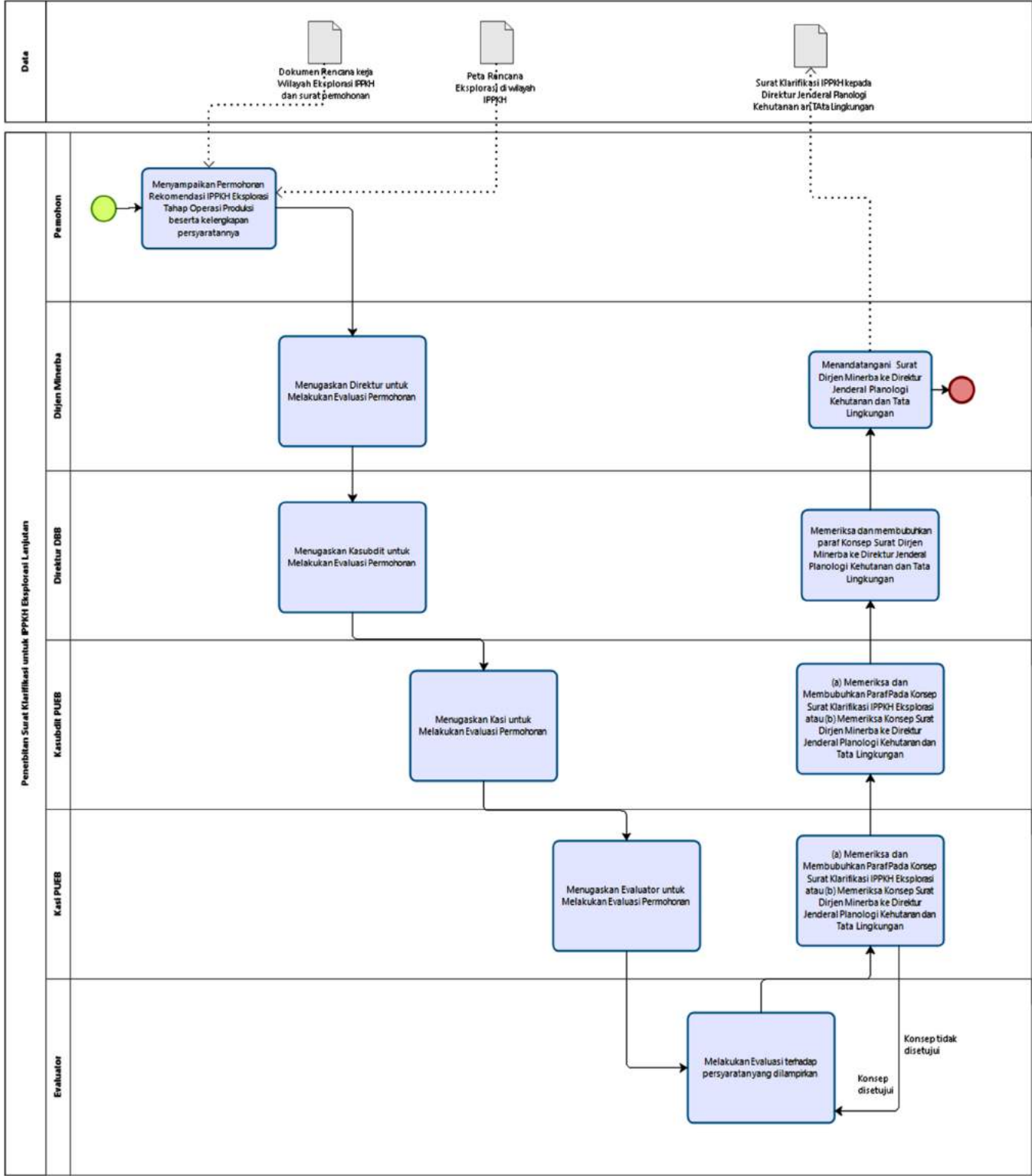
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara



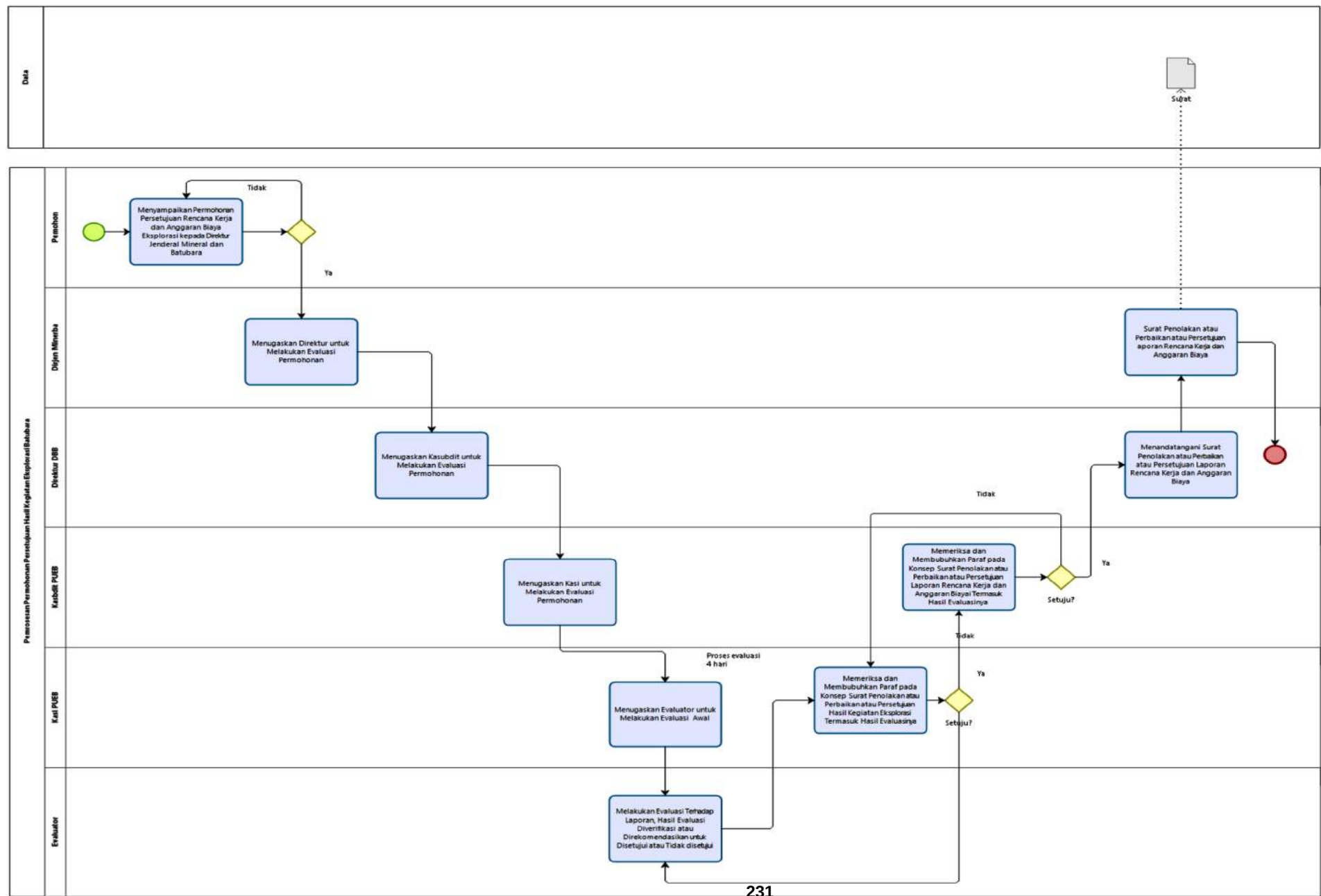
Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara - Pemrosesan Permohonan Persetujuan Hasil Kegiatan Eksplorasi Batubara



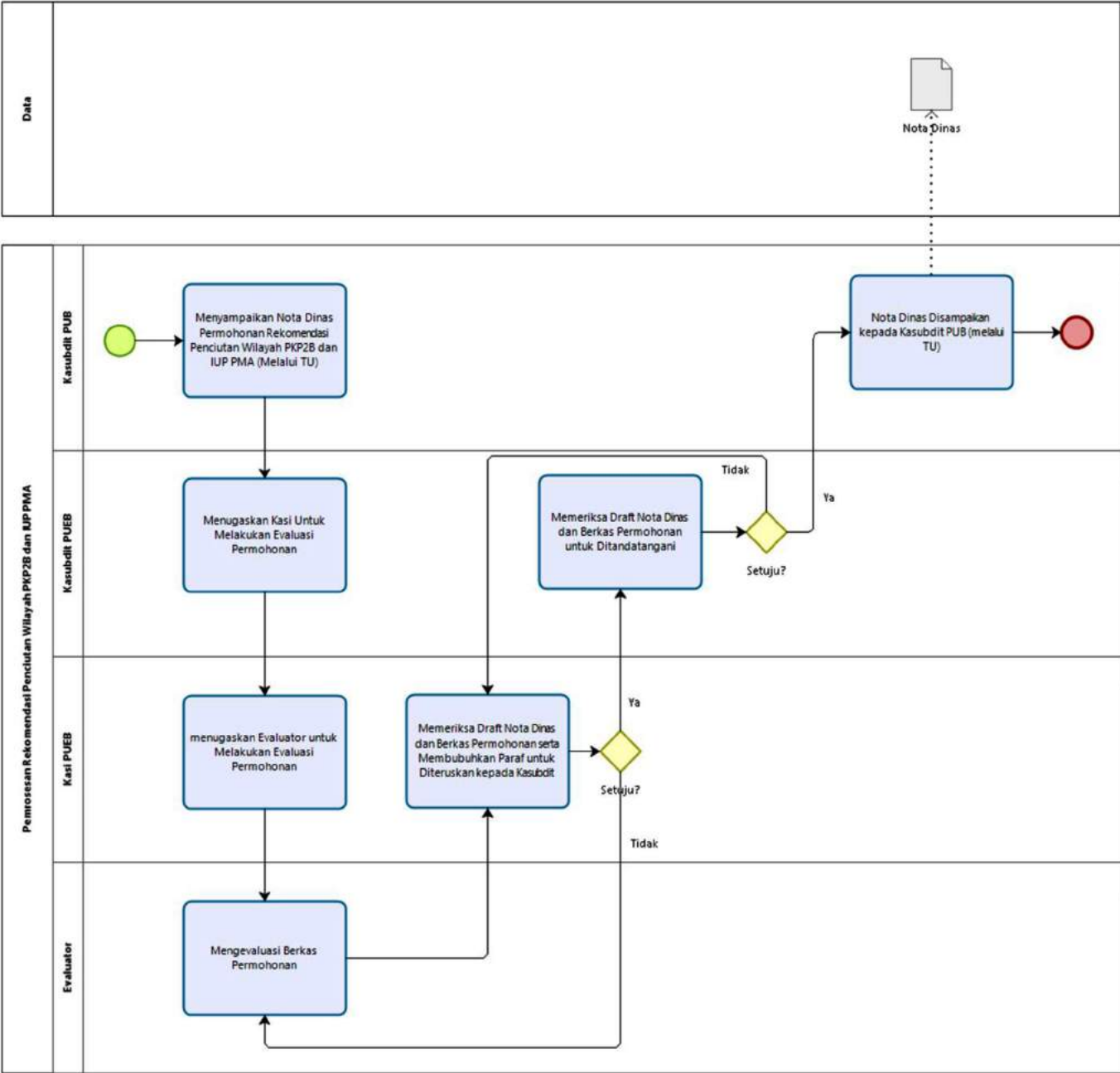
Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara - Penerbitan Surat Klarifikasi untuk IPPKH Eksplorasi Lanjutan



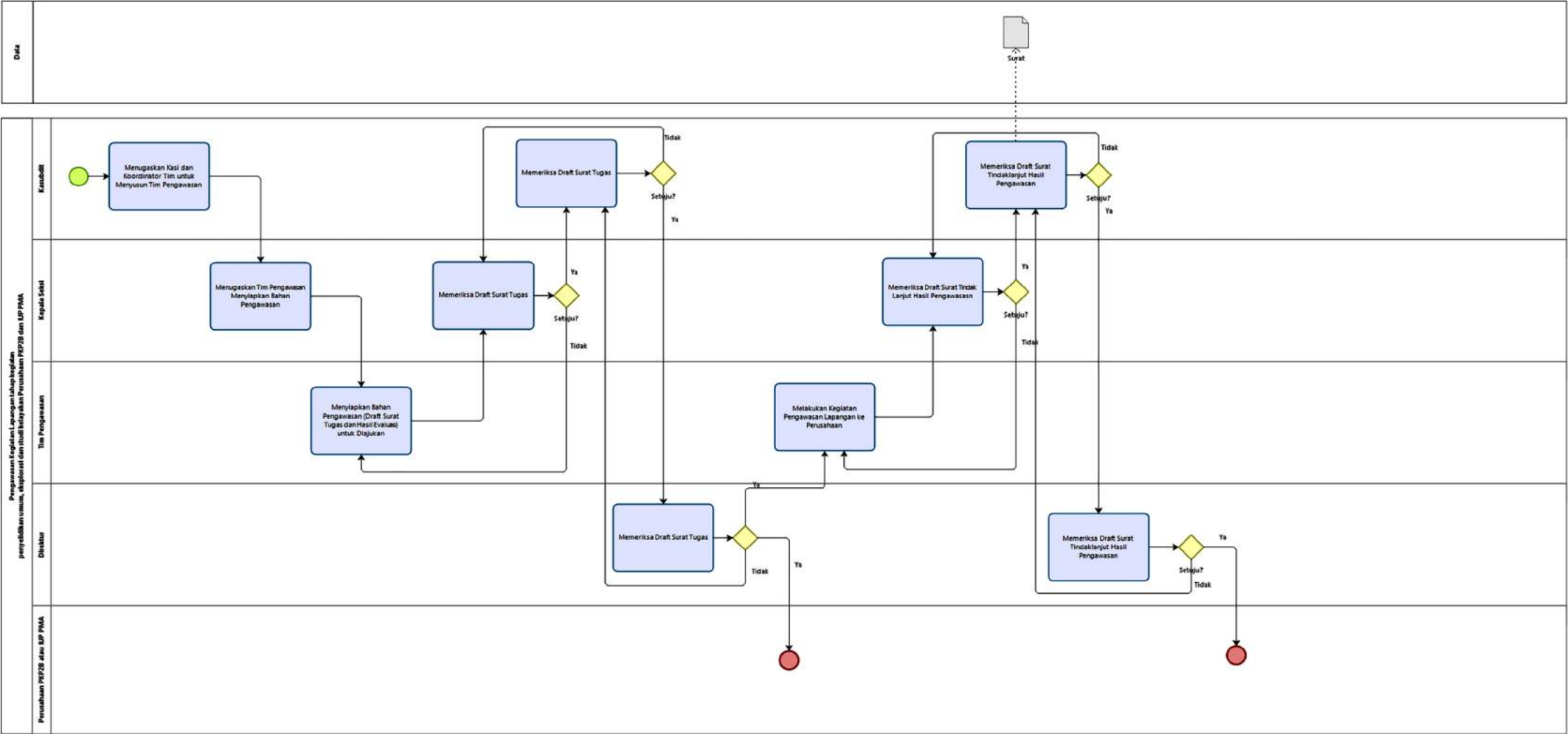
Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara dan Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara -
Persetujuan Evaluasi RKAB Tahap Eksplorasi dan Studi Kelayakan



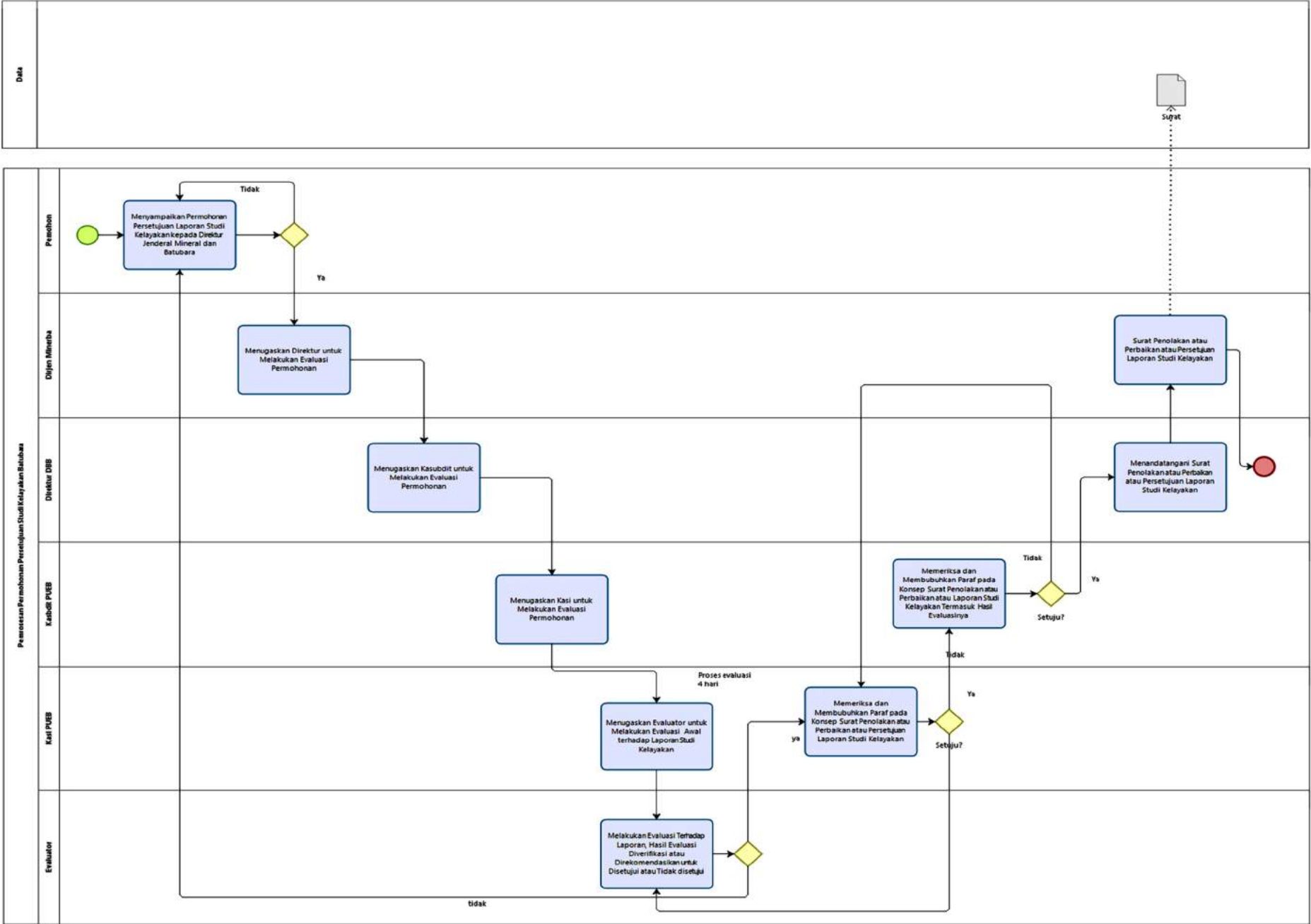
Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara dan Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara - Pemrosesan Rekomendasi Penciutan Wilayah PKP2B dan IUP PMA



Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara dan Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara - Pengawasan Kegiatan Lapangan tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan Perusahaan PKP2B dan IUP PMA



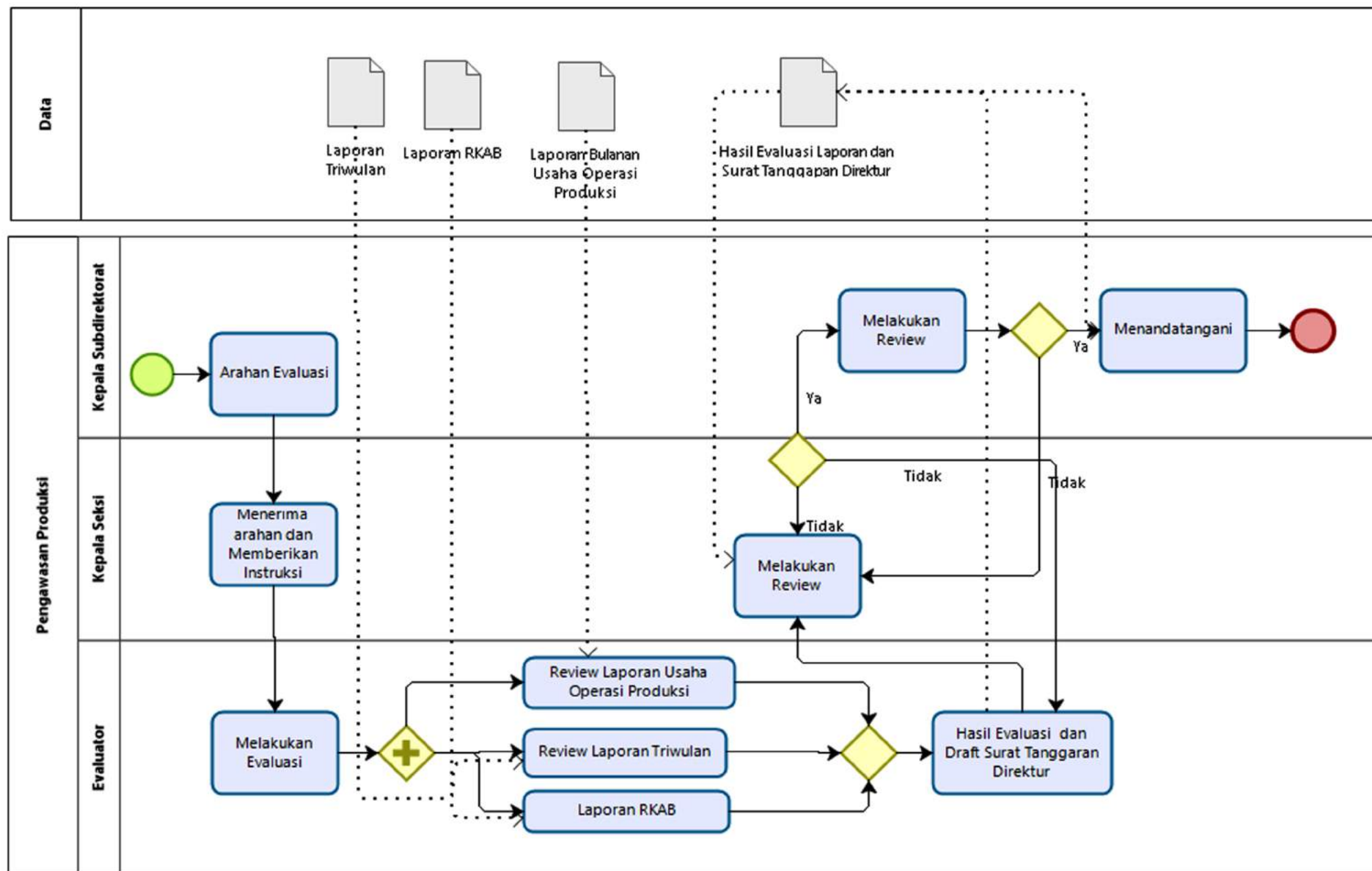
Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara - Pemrosesan Permohonan Persetujuan Studi Kelayakan Batubara



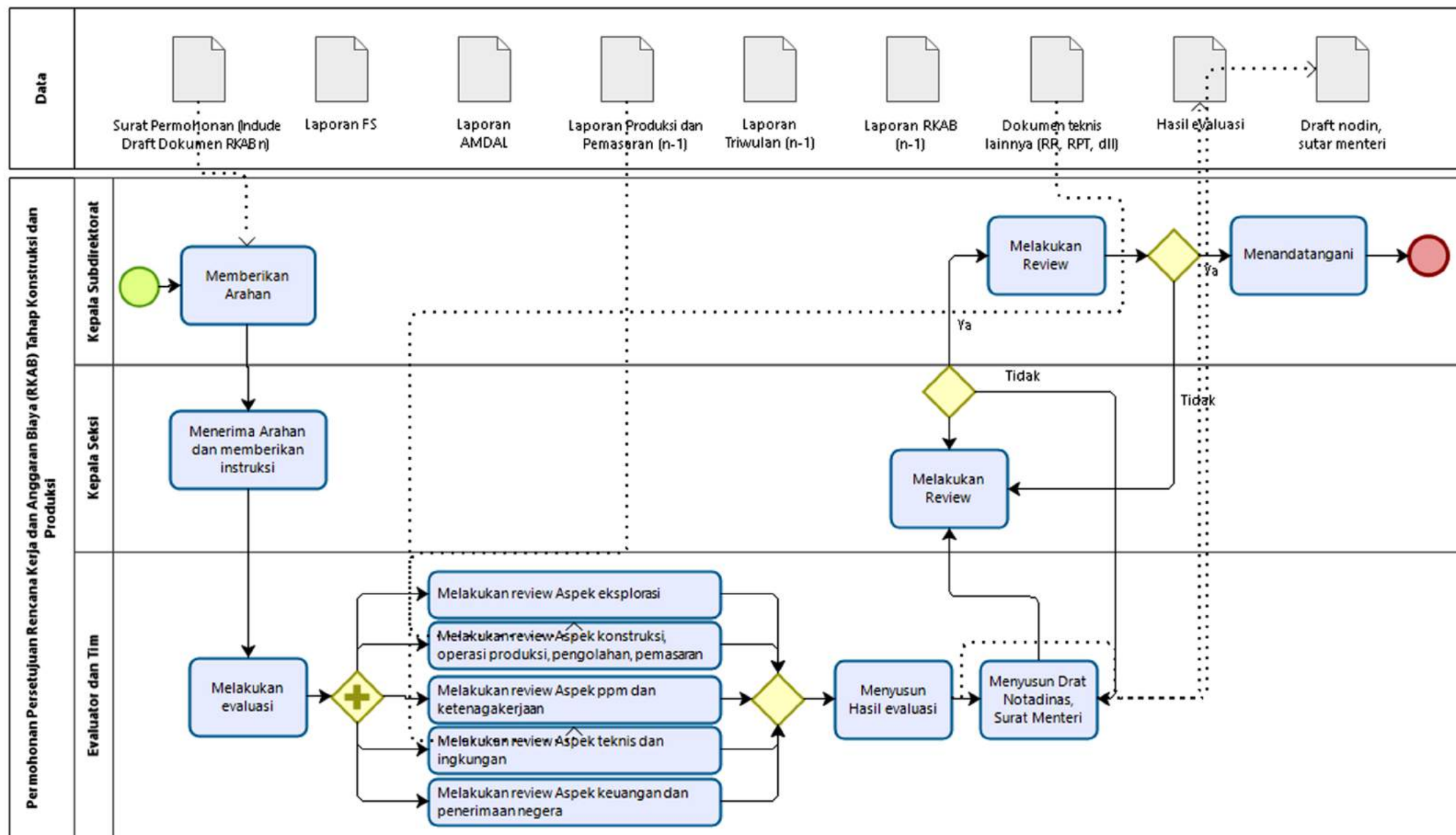
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara	Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara	 Pengawasan Produksi  Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahap Konstruksi dan Produksi  Permohonan Persetujuan Commissioning  Penetapan DMO
	Pengawasan Pemasaran Batubara	 Penetapan Harga Patokan Batubara  Pengawasan Pemasaran  Permohonan Persetujuan Kontrak Penjualan Batubara

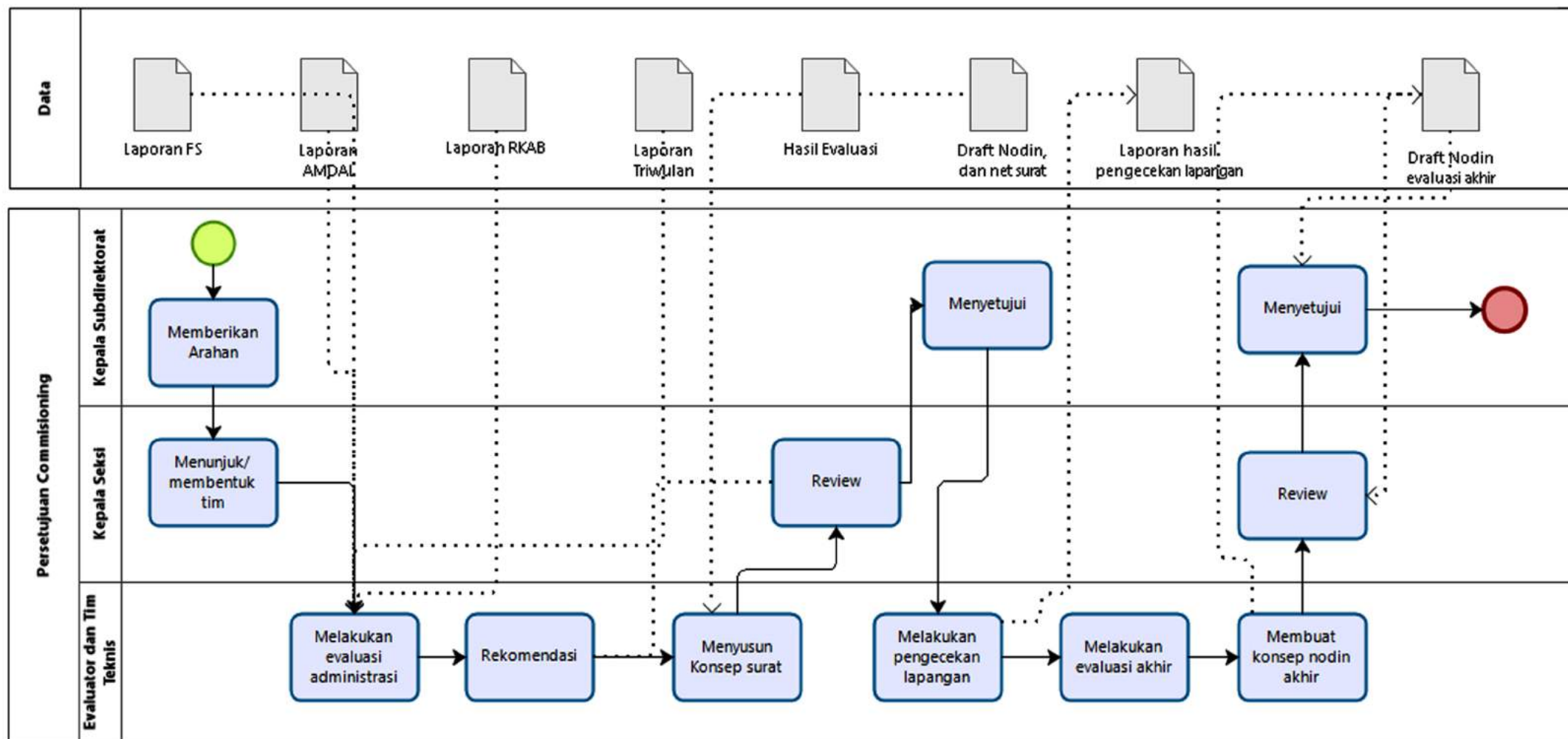
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Pengawasan Produksi



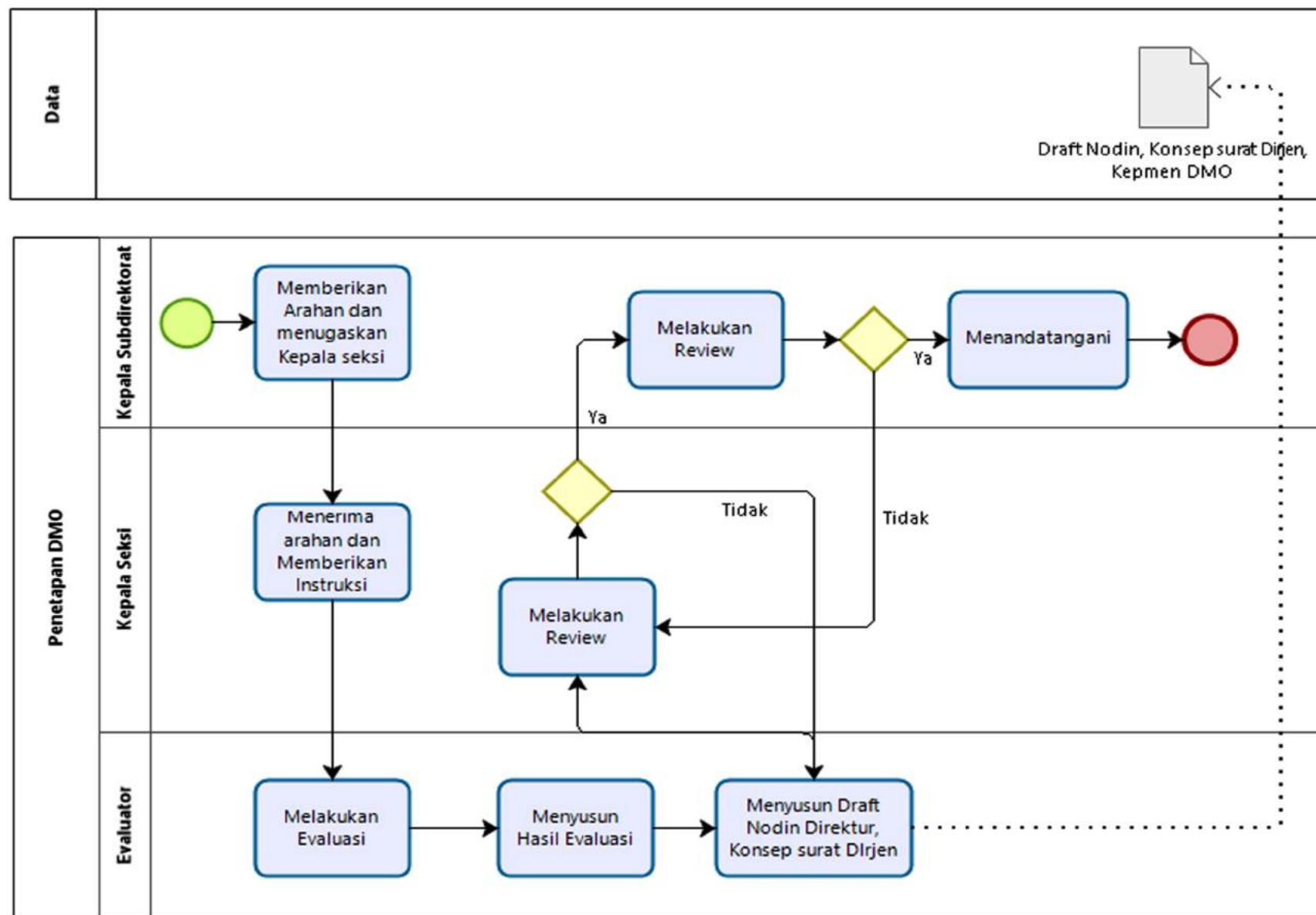
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahap Konstruksi dan Produksi



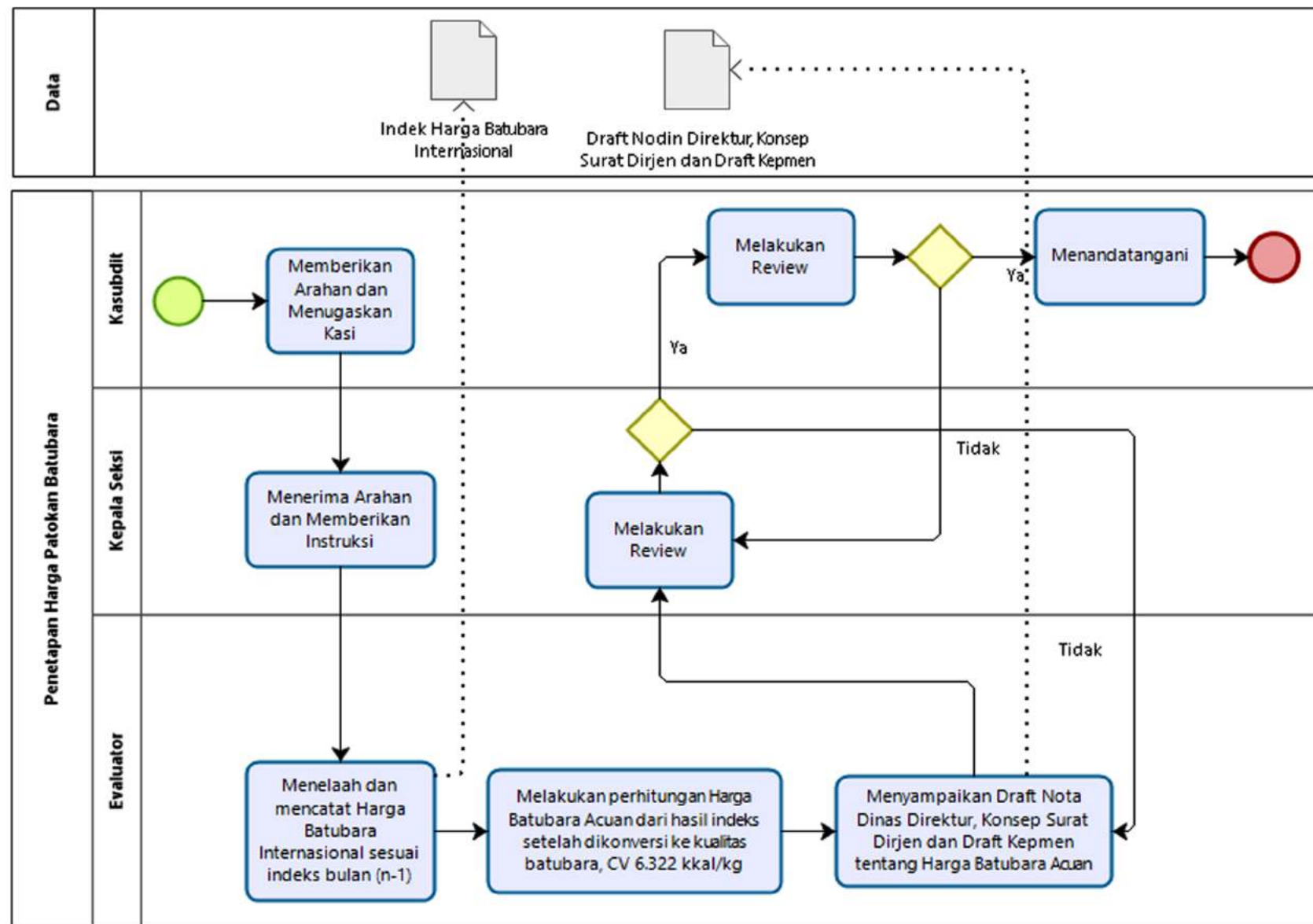
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Persetujuan Commisioning



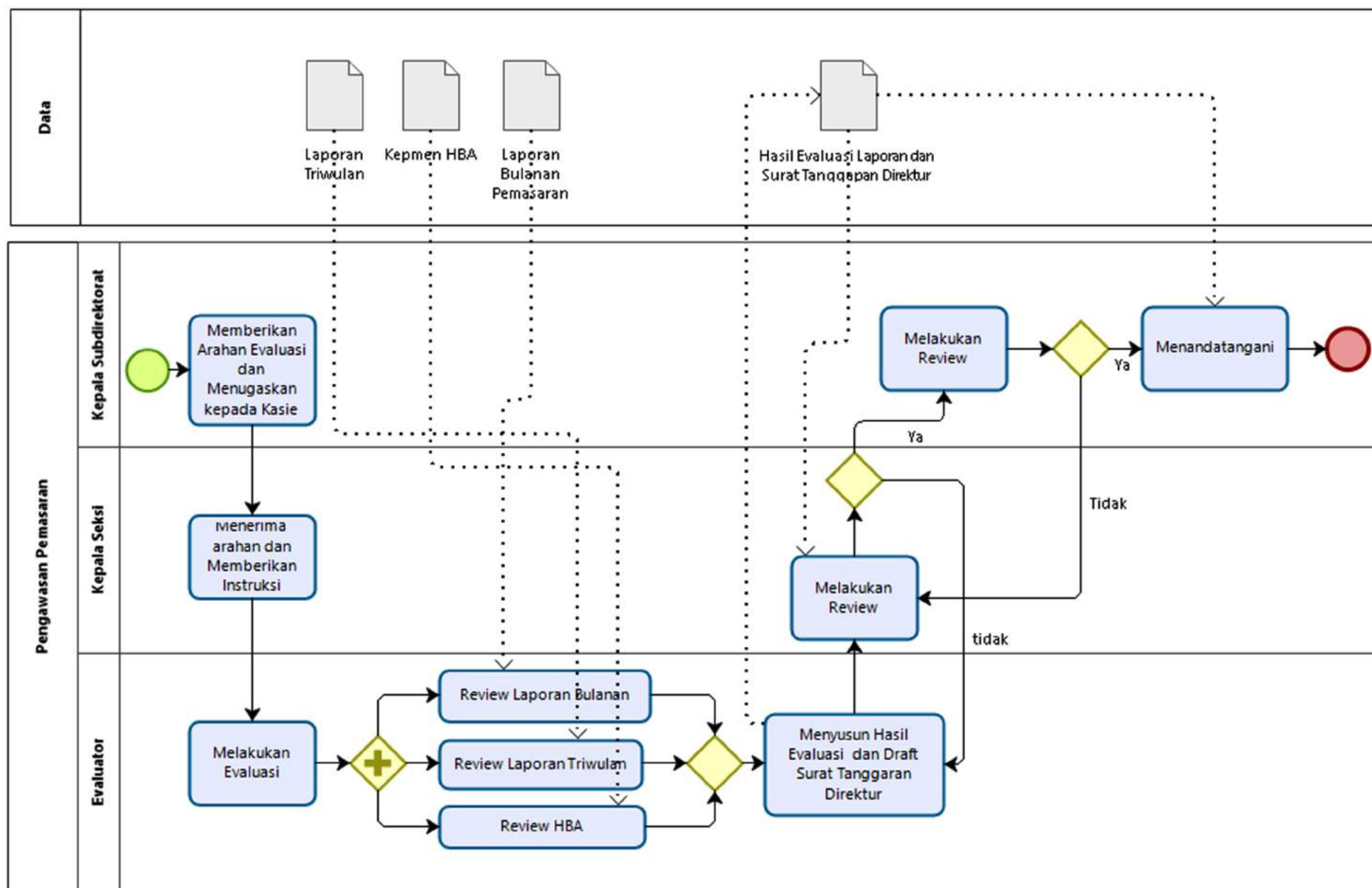
Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi - Penetapan DMO



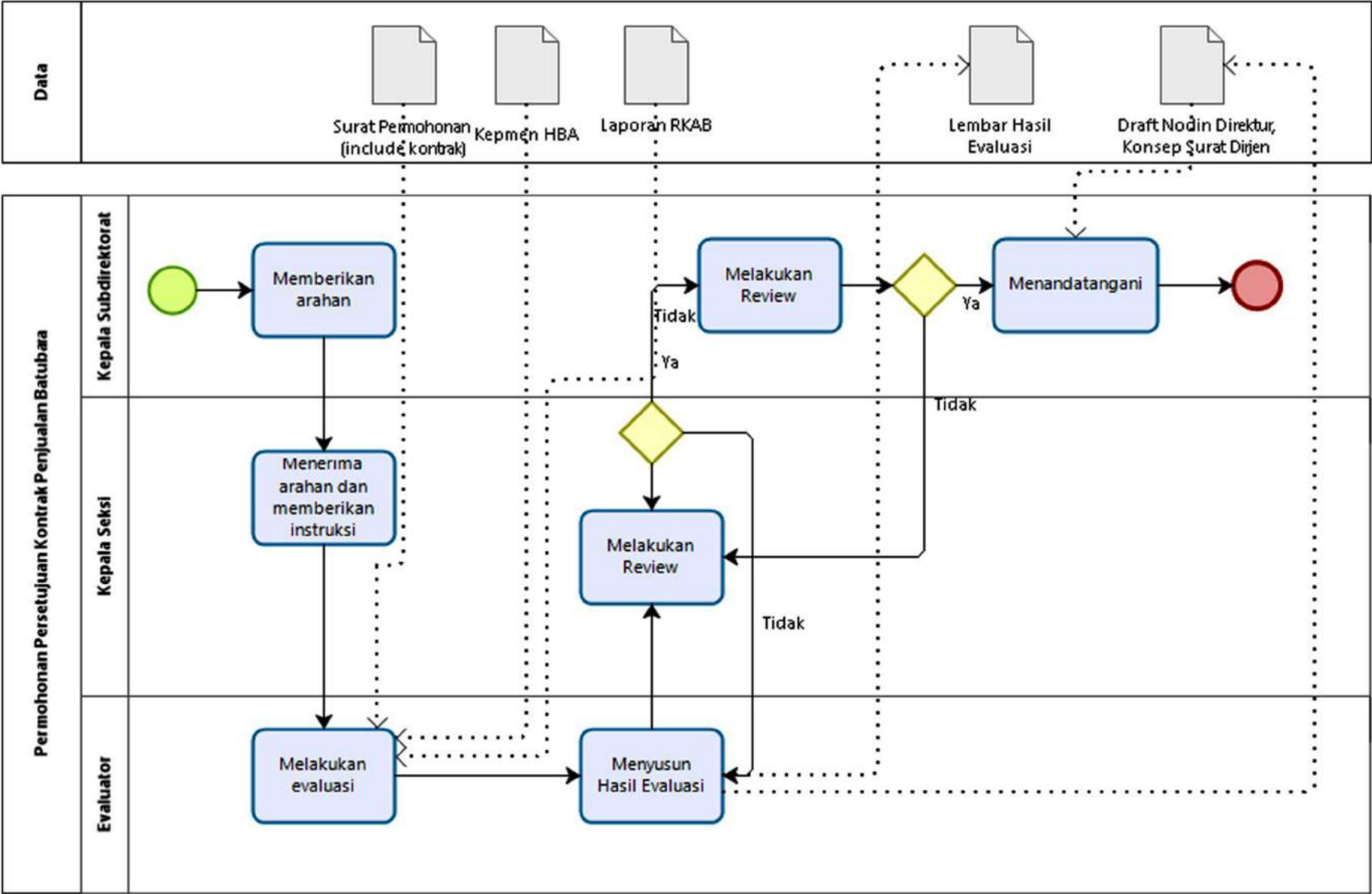
Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara - Penetapan Harga Patokan Batubara



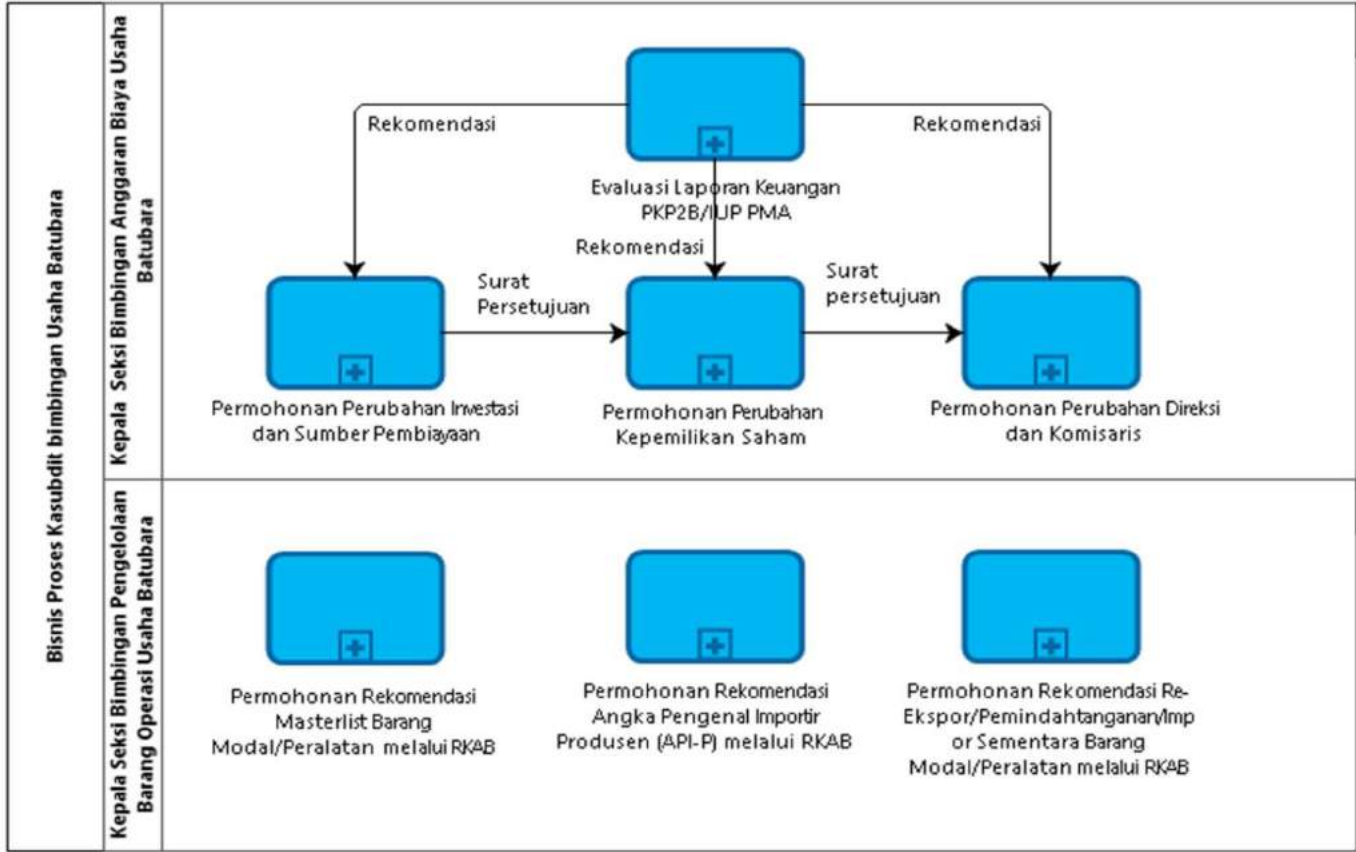
Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara - Pengawasan Pemasaran



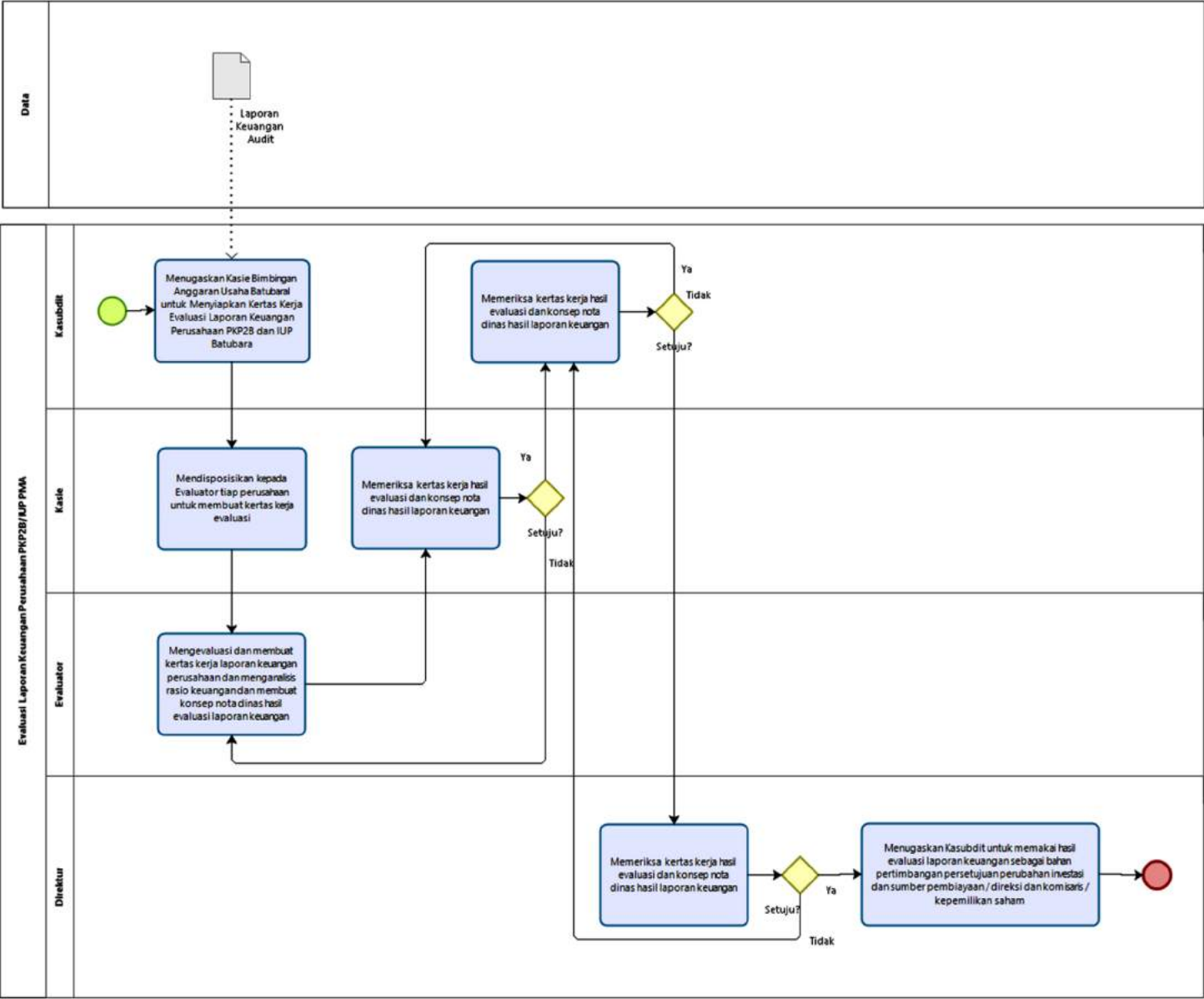
Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara - Permohonan Persetujuan Kontrak Penjualan Batubara



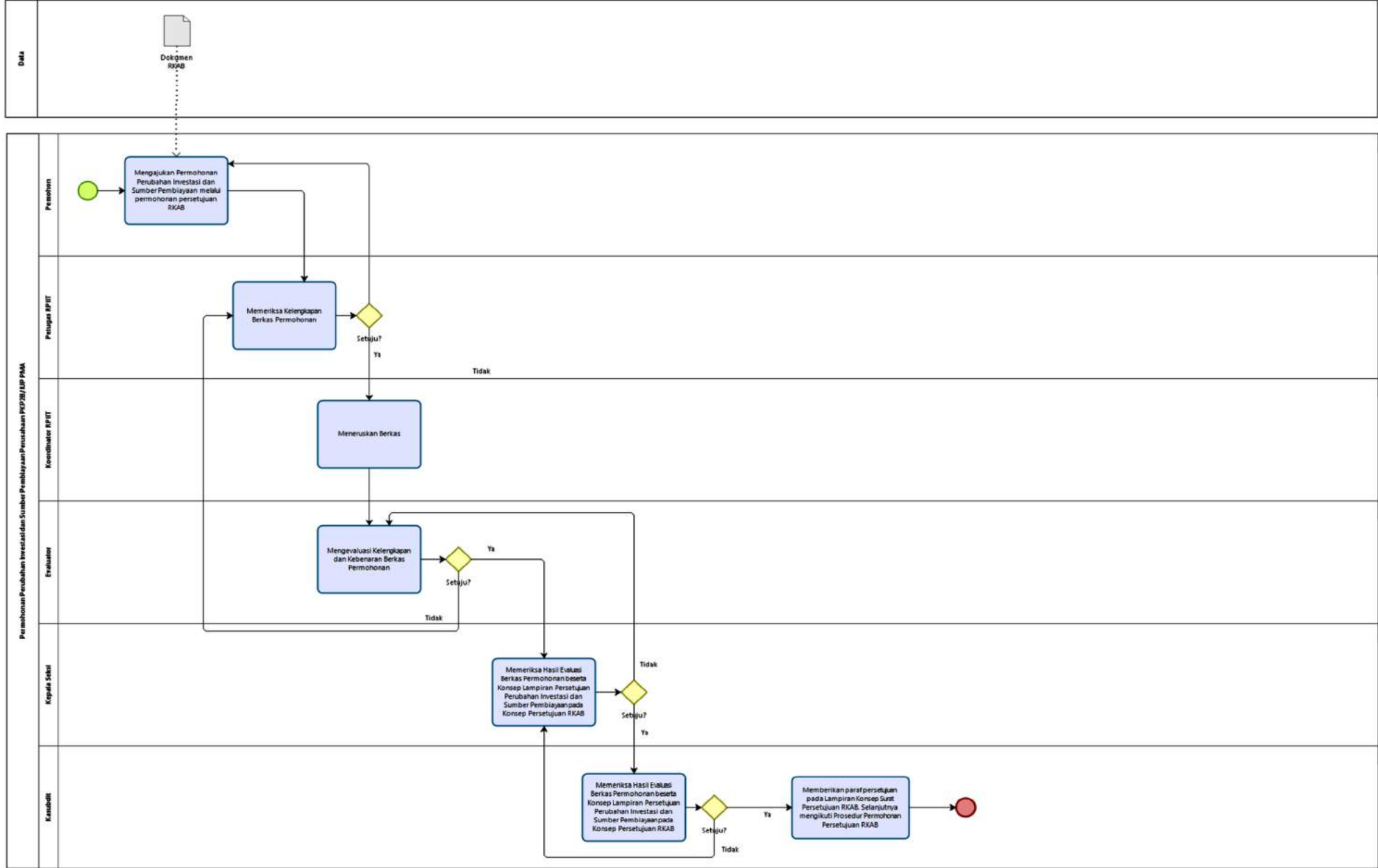
Pembinaan dan pengawasan Bimbingan Usaha Batubara



Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara - Evaluasi Laporan Perusahaan PKP2B/IUP PMA



Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara - Permohonan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan Perusahaan
PKP2B/IUP PMA



Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara - Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PKP2B/IUP PMA

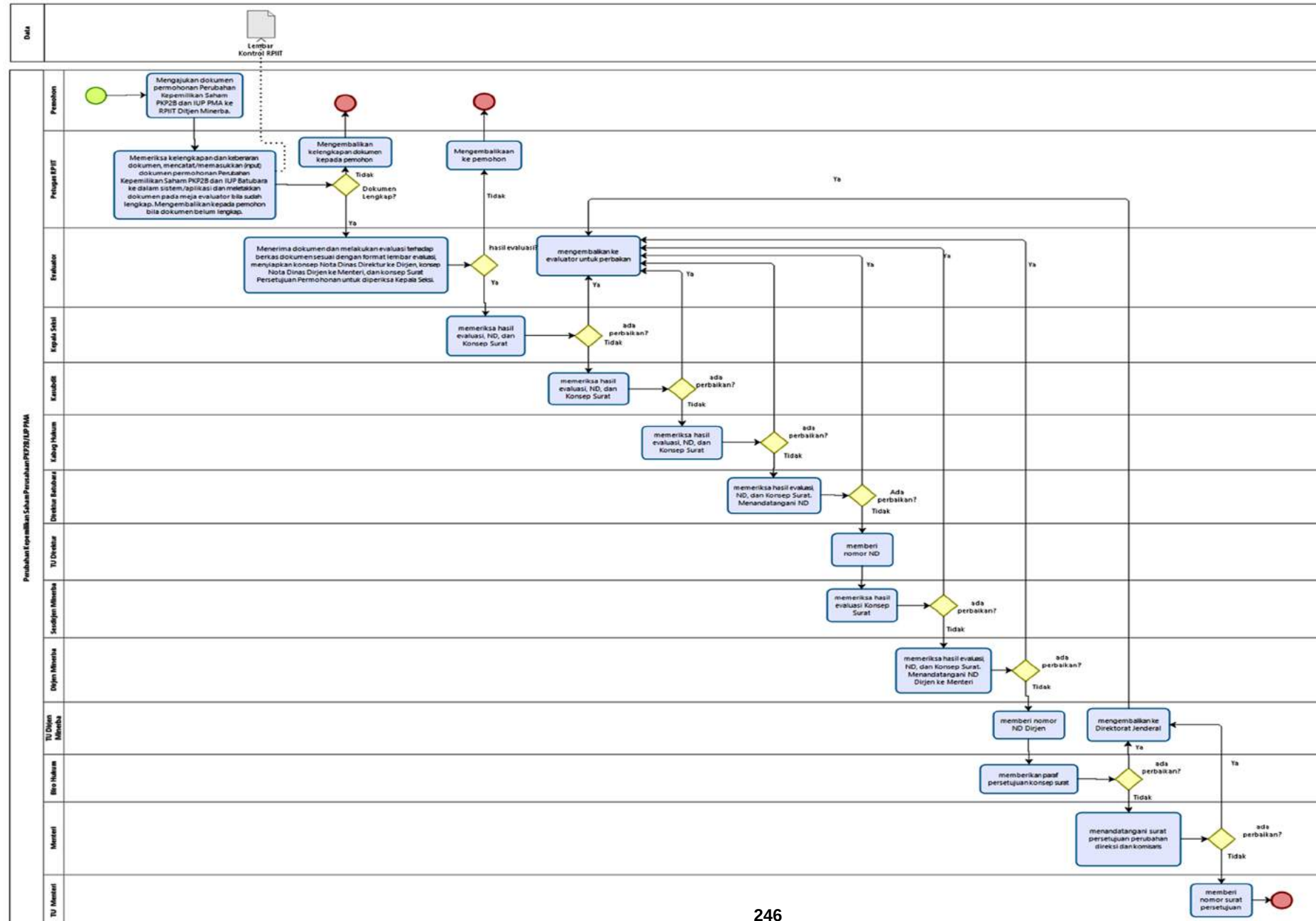


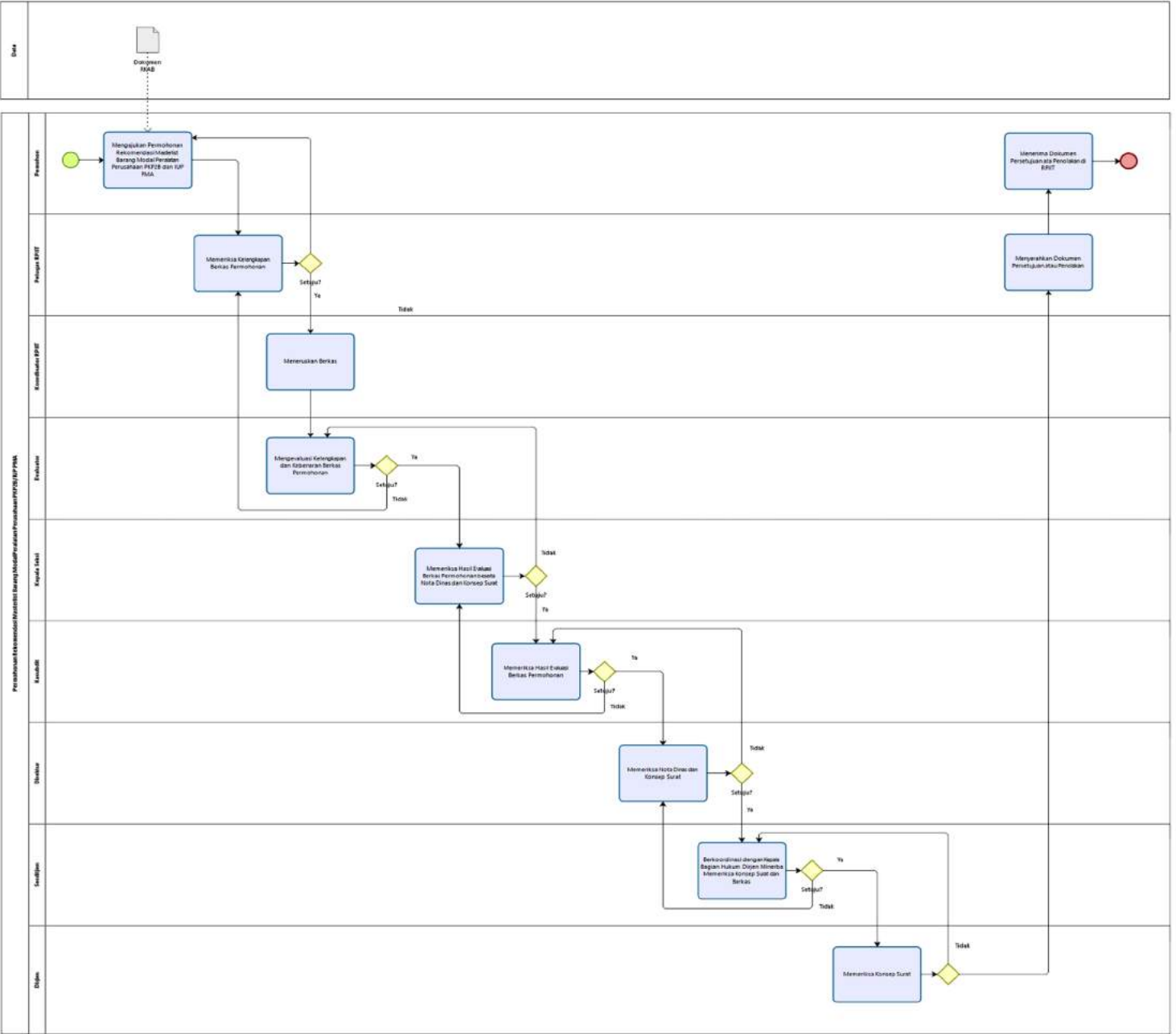
Diagram Alir (Flowchart) untuk Proses Pengajuan dan Penilaian Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris PT/20 dan IUP PMA ke RPIIT Ditjen Minerba.

```

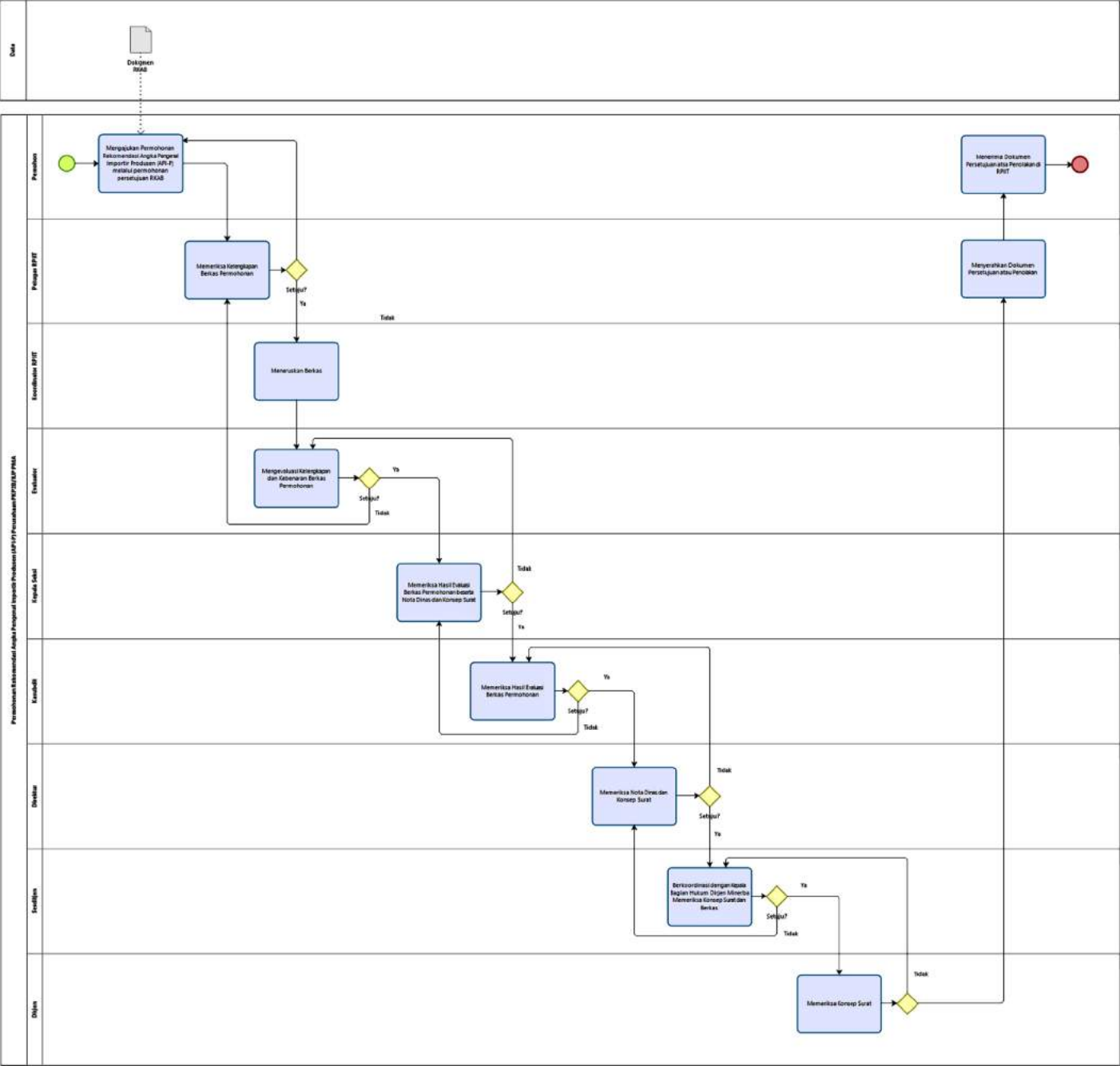
graph TD
    Start(( )) --> A[Mengajukan dokumen permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris PT/20 dan IUP PMA ke RPIIT Ditjen Minerba.]
    A --> B[Meriksa kelengkapan dan isi dokumen, mencatat/memasaikan input dokumen permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris PT/20 dan IUP PMA ke dalam sistem aplikasi dan menatahkan dokumen pada meja evaluator bila sudah lengkap. Mengembalikan kepada pemohon bila dokumen belum lengkap.]
    B --> C{Dokumen lengkap?}
    C -- Tidak --> B
    C -- Ya --> D[Menerima dokumen dan melakukan evaluasi terhadap berkas dokumen sesuai dengan format lembar evaluasi, menyatupkan konsep Nota Dinas Direktorat Ditjen, konsep Nota Dinas Ditjen ke Menteri, dan konsep Surat Persetujuan Permohonan untuk diperiksa Kepala Seksi.]
    D --> E{hasil evaluasi?}
    E -- Tidak --> F[Mengembalikan kelengkapan dokumen kepada pemohon.]
    E -- Ya --> G[meriksa hasil evaluasi, ND, dan Konsep Surat.]
    G --> H{ada perbaikan?}
    H -- Tidak --> I[meriksa hasil evaluasi, ND, dan Konsep Surat.]
    H -- Ya --> J[mengembalikan ke evaluator untuk perbaikan.]
    I --> K{ada perbaikan?}
    K -- Tidak --> L[meriksa hasil evaluasi, ND, dan Konsep Surat.]
    K -- Ya --> J
    L --> M{ada perbaikan?}
    M -- Tidak --> N[memberi nomor ND.]
    M -- Ya --> J
    N --> O[meriksa hasil evaluasi Konsep Surat.]
    O --> P{ada perbaikan?}
    P -- Tidak --> Q[meriksa hasil evaluasi, ND, dan Konsep Surat. Menandatangani ND.]
    P -- Ya --> J
    Q --> R{ada perbaikan?}
    R -- Tidak --> S[memberi nomor ND Ditjen.]
    R -- Ya --> T[Mengembalikan ke Direktorat Jenderal.]
    S --> U[memberikan paraf persetujuan konsep surat.]
    U --> V{ada perbaikan?}
    V -- Tidak --> W[menandatangani surat persetujuan perubahan direksi dan komisaris.]
    V -- Ya --> T
    W --> X{ada perbaikan?}
    X -- Tidak --> Y[memberi nomor surat persetujuan.]
    X -- Ya --> T
    Y --> End(( ))
    T --> F
    T --> J
    T --> P
    T --> R
    T --> V
    T --> X
  
```

Legenda:
 - Lingkaran Hijau: Awal Proses
 - Lingkaran Merah: Akhir Proses
 - Kotak Persegi Panjang: Aktivitas / Proses
 - Kotak Belah Ketupat: Keputusan / Kondisi

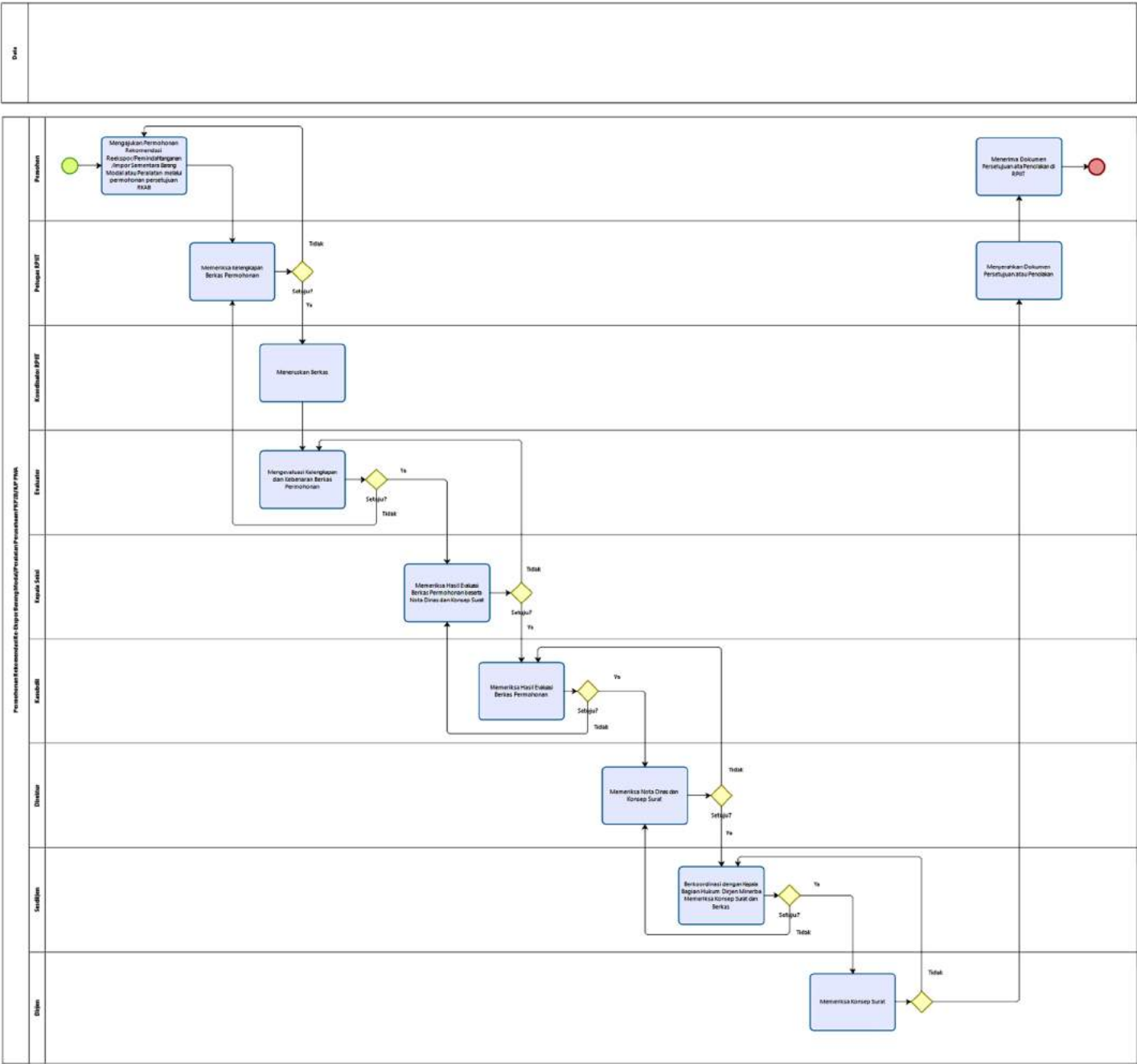
Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara - Permohonan Rekomendasi Masterlist Barang ModalPeralatan Perusahaan PKP2B/IUP PMA



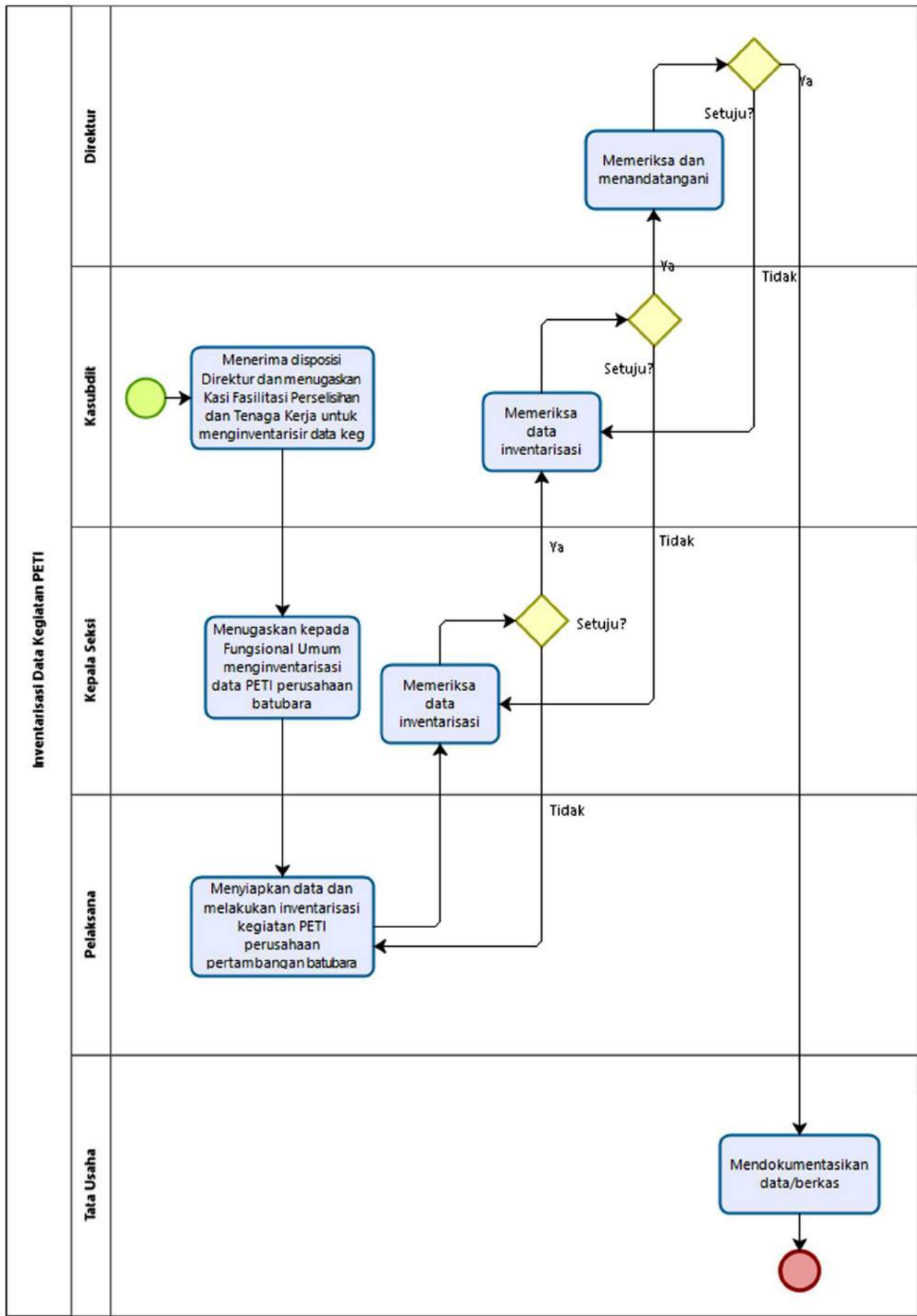
Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara - Permohonan Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Perusahaan PKP2B/IUP PMA



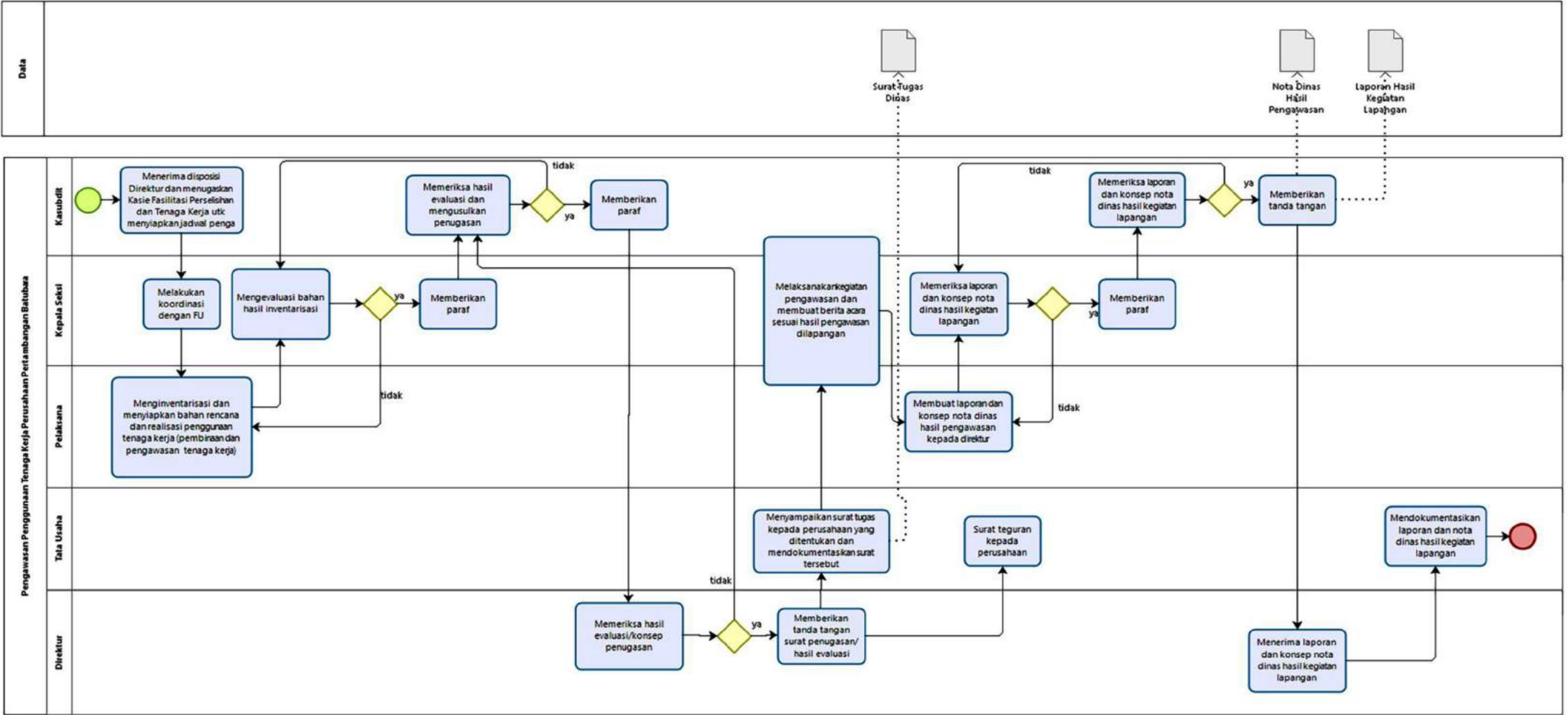
Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara - Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor Barang Modal/Peralatan Perusahaan PKP2B/IUP PMA



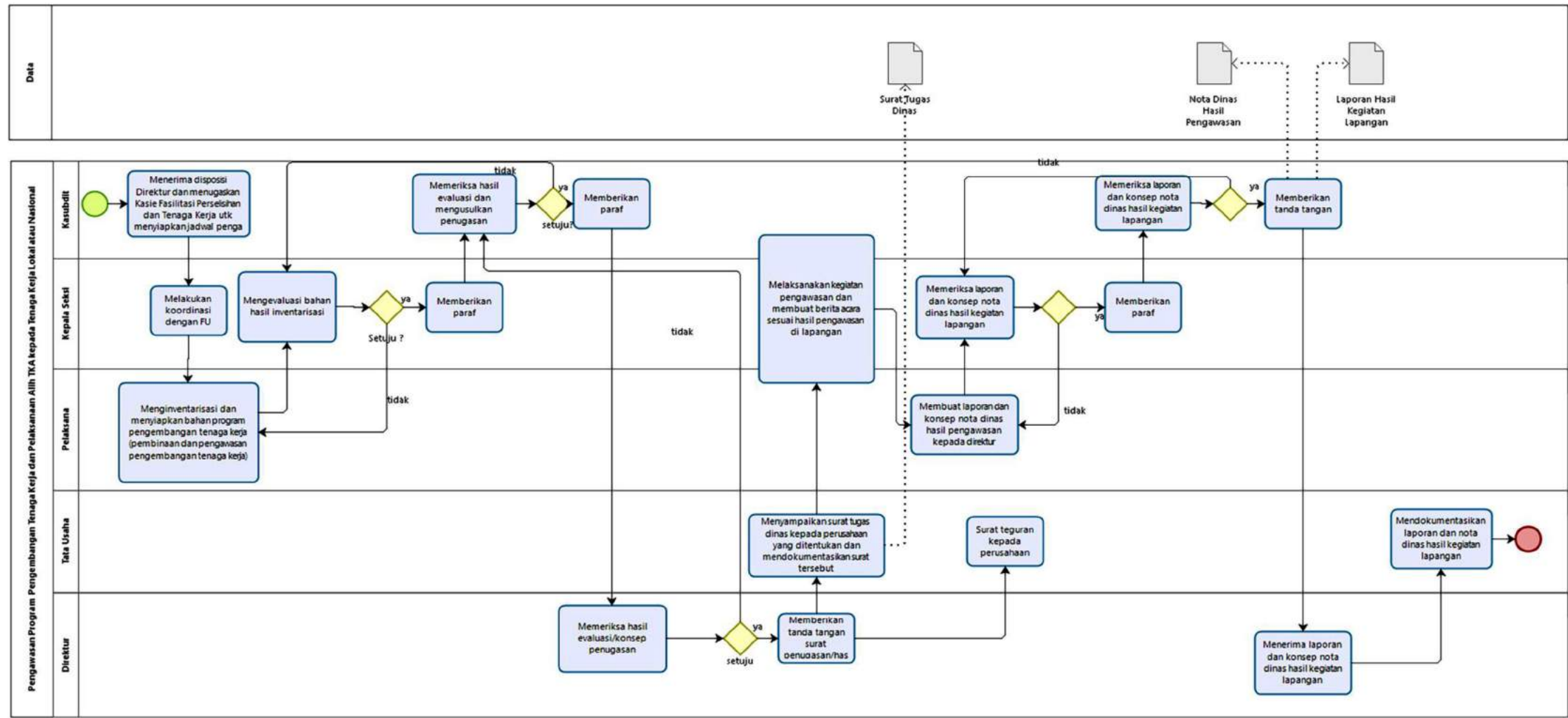
Seksi Fasilitas Perselisihan dan Tenaga Kerja - Inventarisasi Data Kegiatan PETI



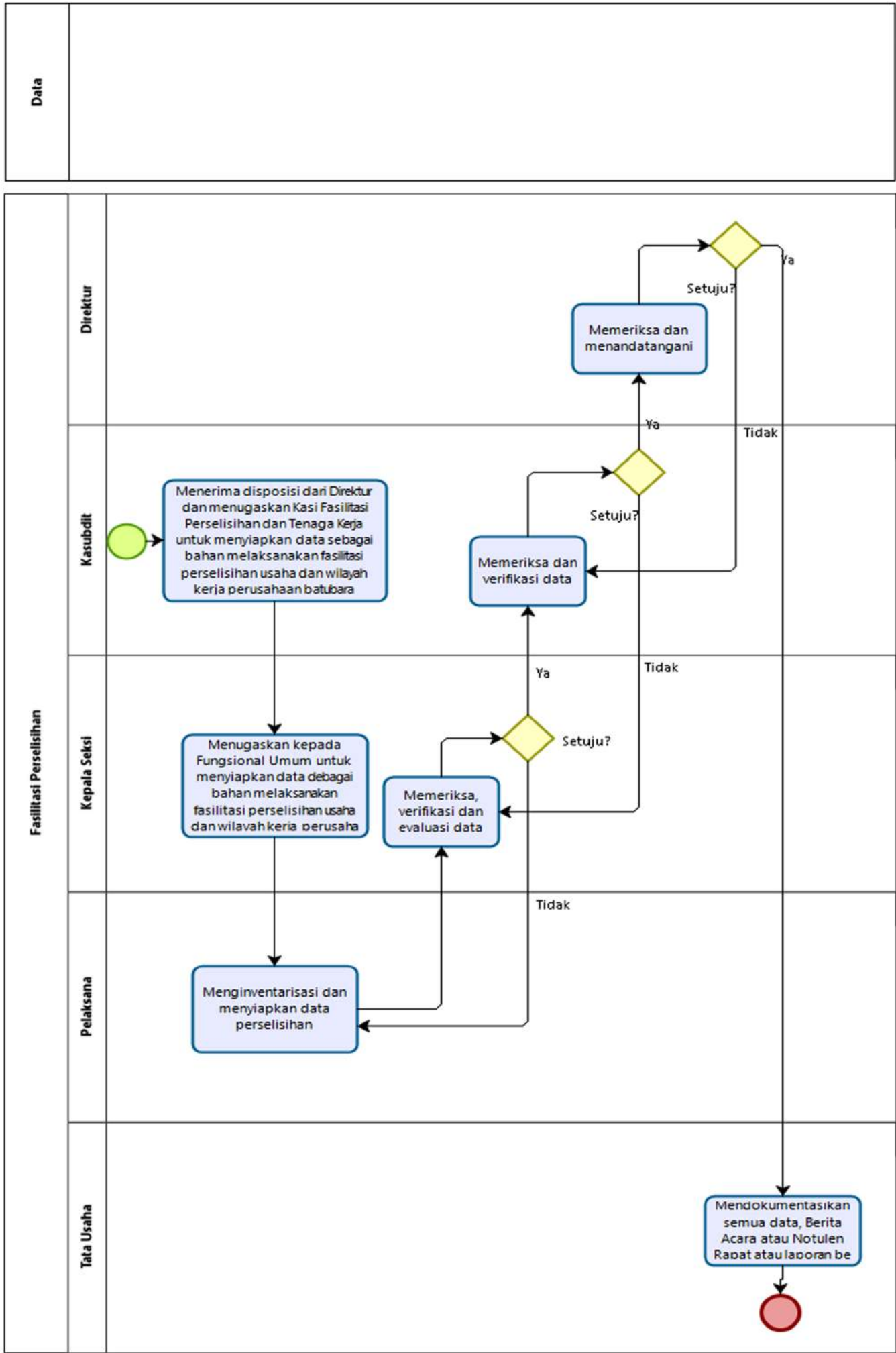
Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan Batubara



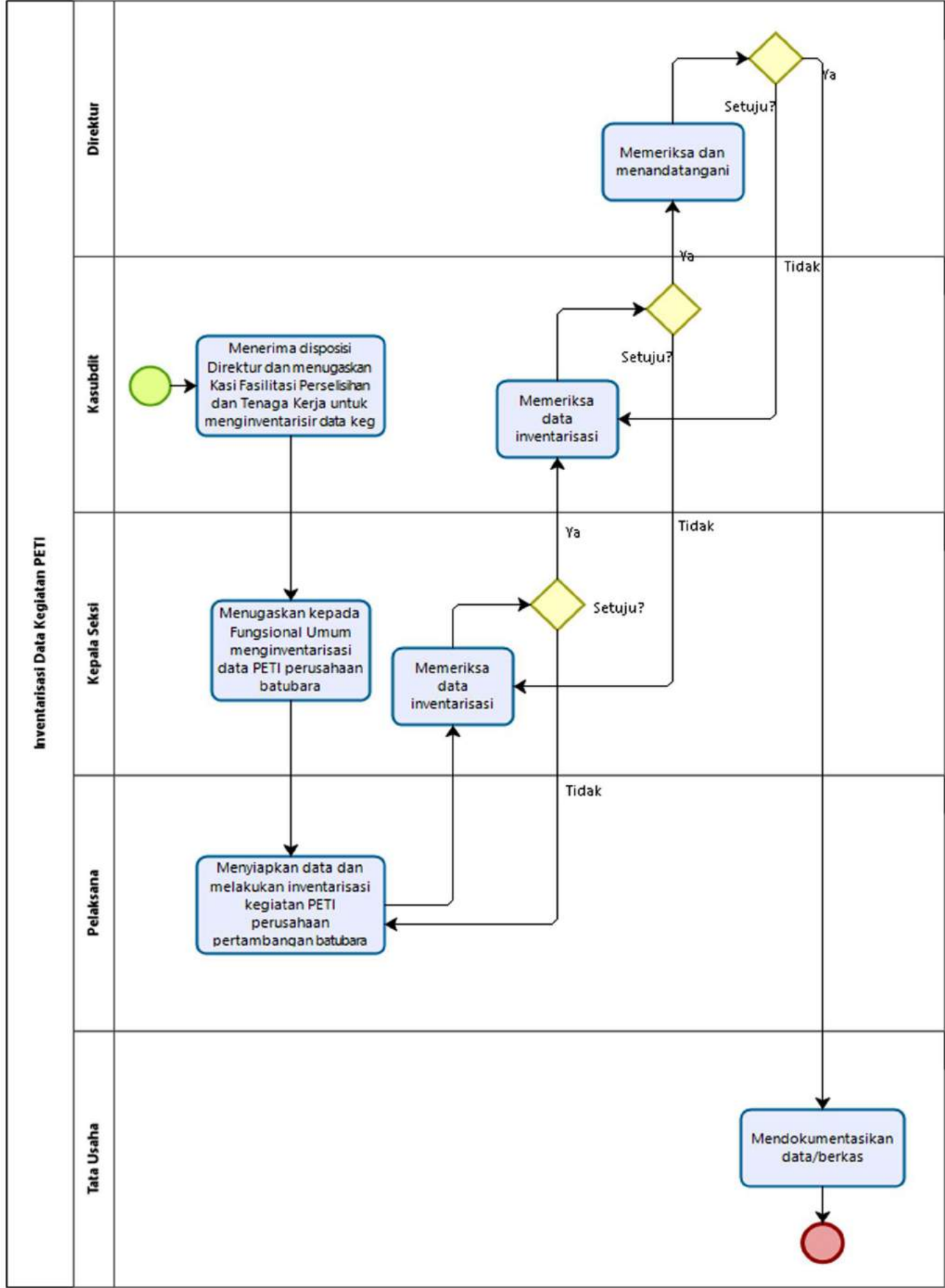
Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Pengawasan Program Pengembangan Tenaga Kerja dan Pelaksanaan Alih TKA kepada Tenaga Kerja Lokal atau Nasional



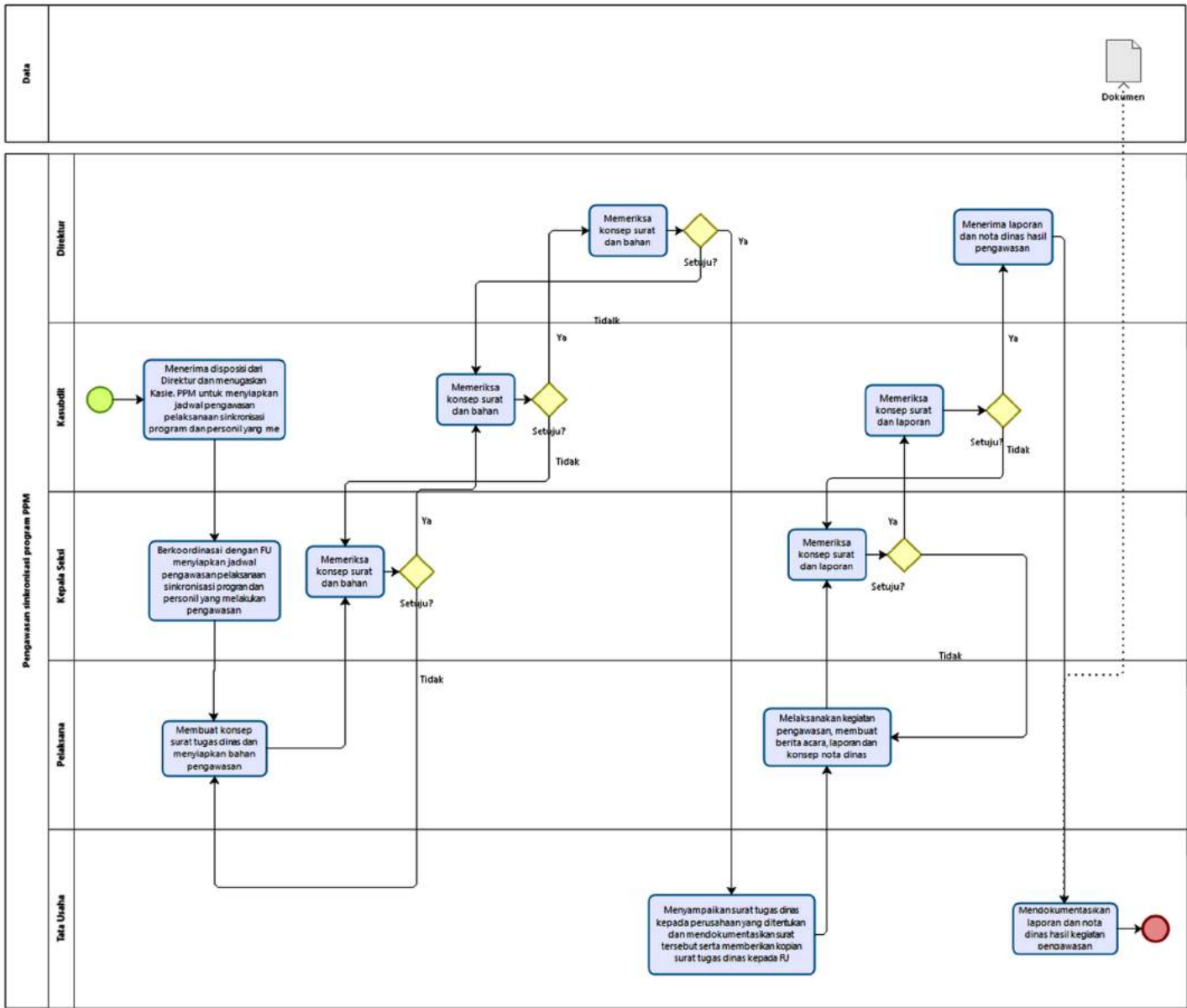
Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Fasilitasi Perselisihan Usaha dan Wilayah perusahaan pertambangan batubara yang Menjadi Kewenangan Menteri



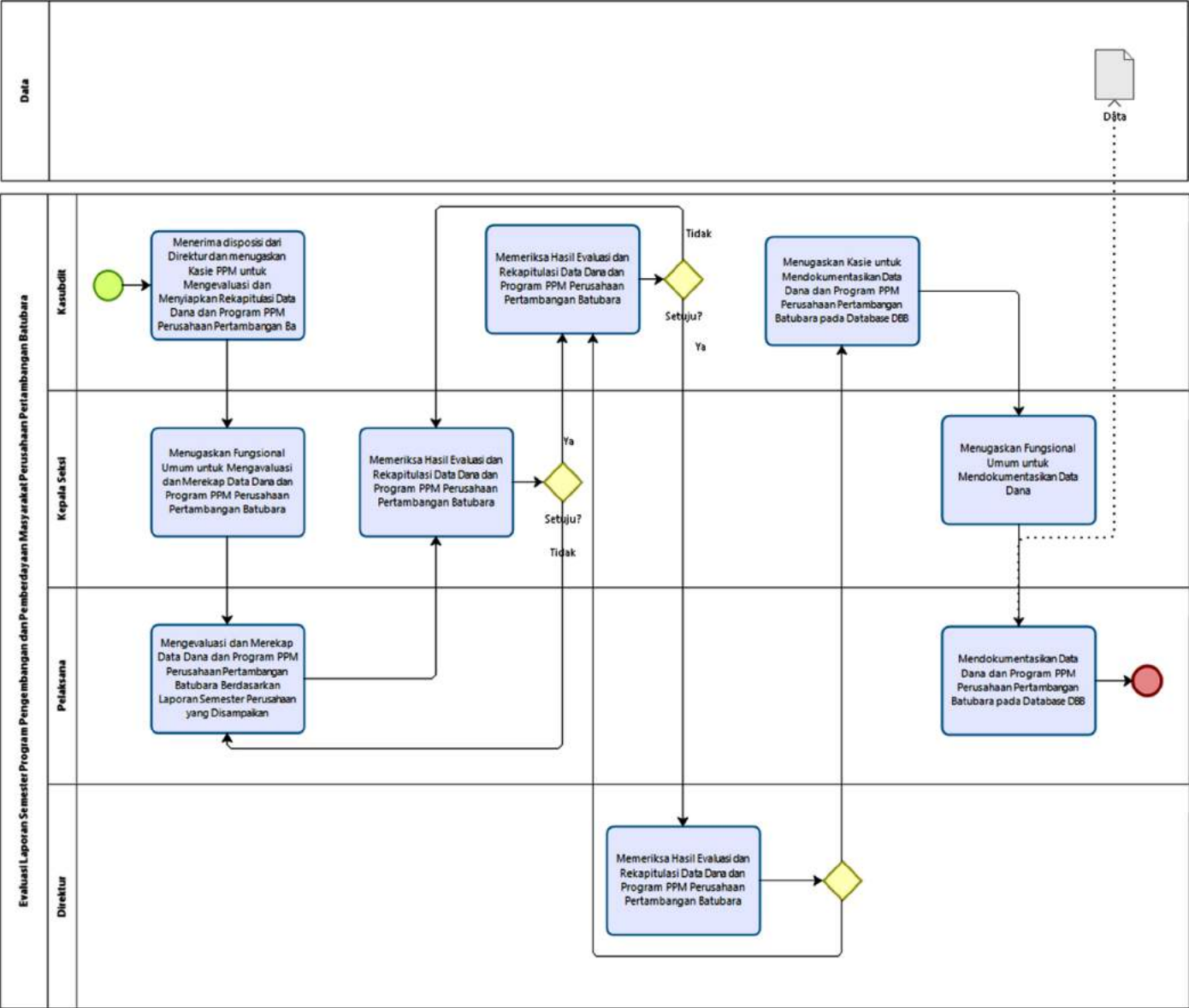
Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja - Inventarisasi Data Kegiatan PETI



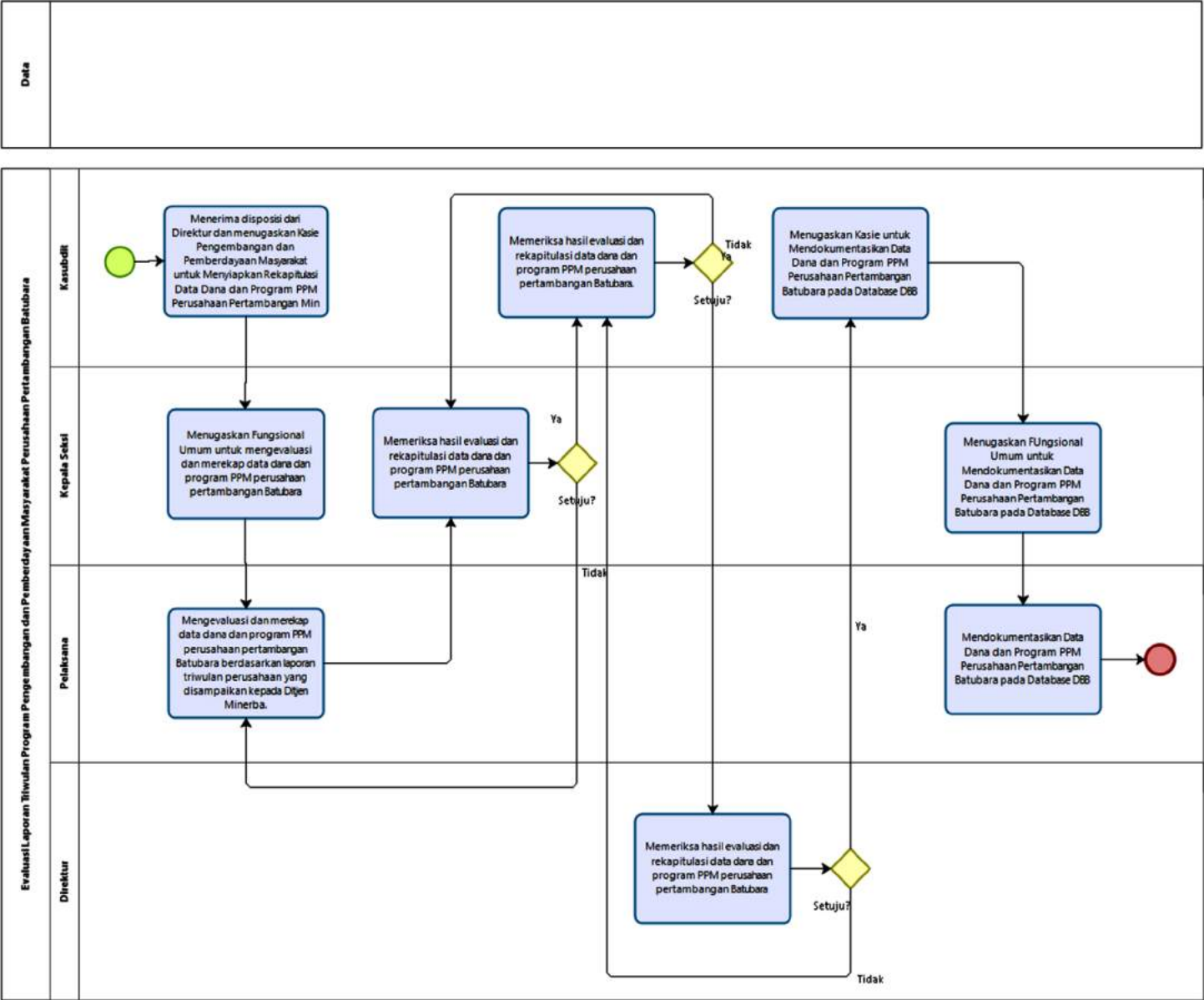
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pengawasan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Pertambangan Batubara Kewenangan Menteri



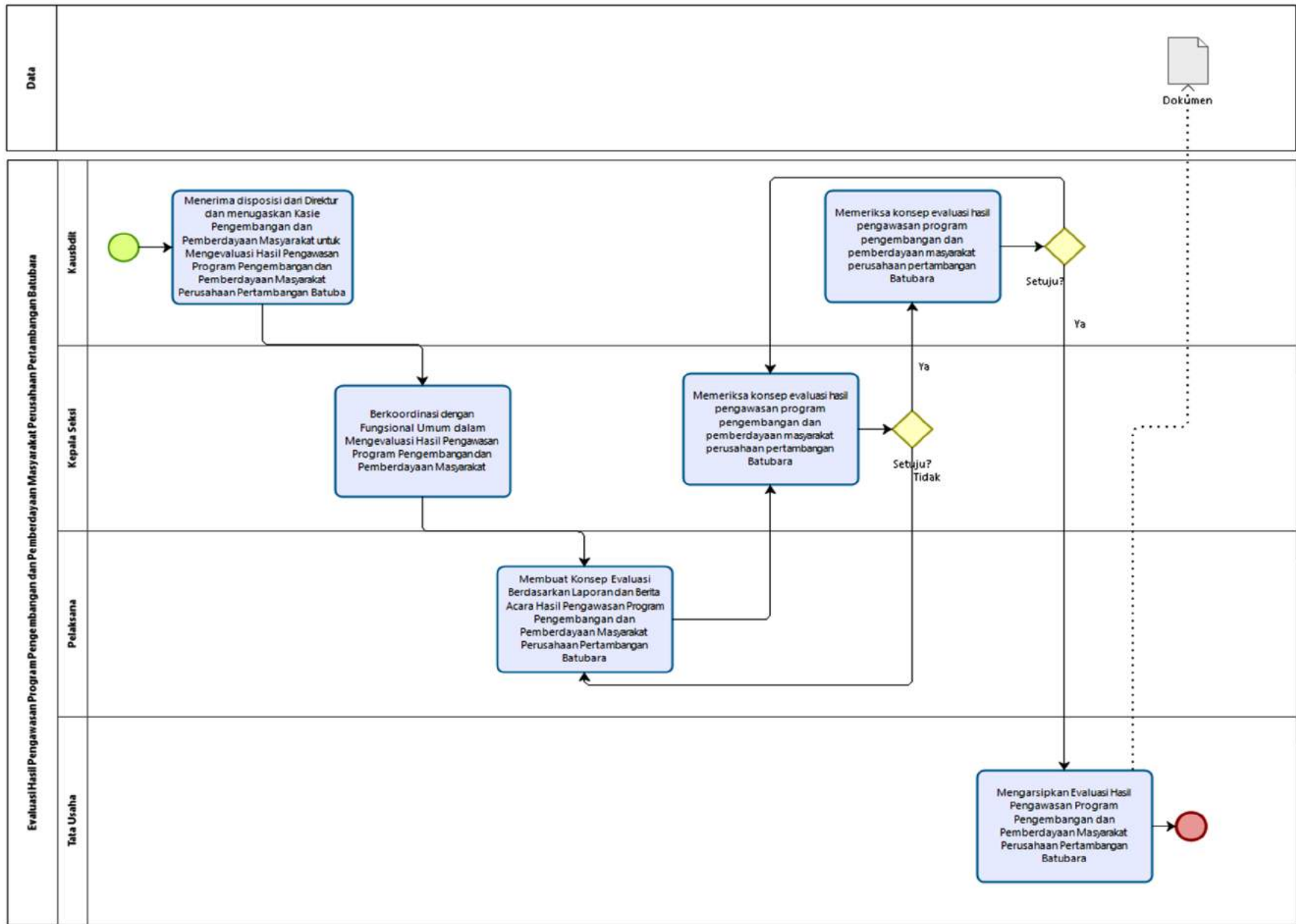
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Evaluasi Laporan Semester Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Pertambangan Batubara



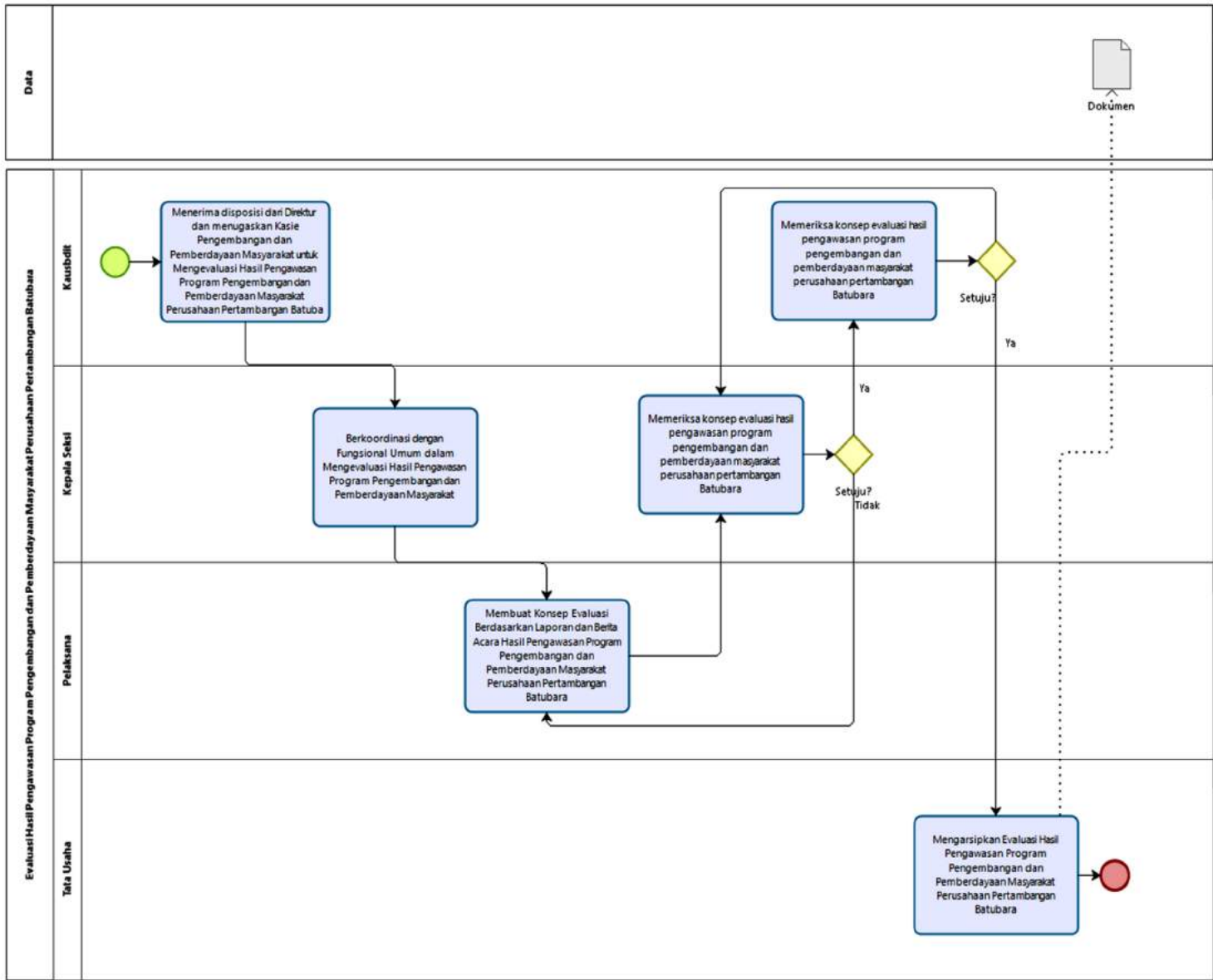
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat – Evaluasi Laporan
Triwulan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Perusahaan Pertambangan Batubara



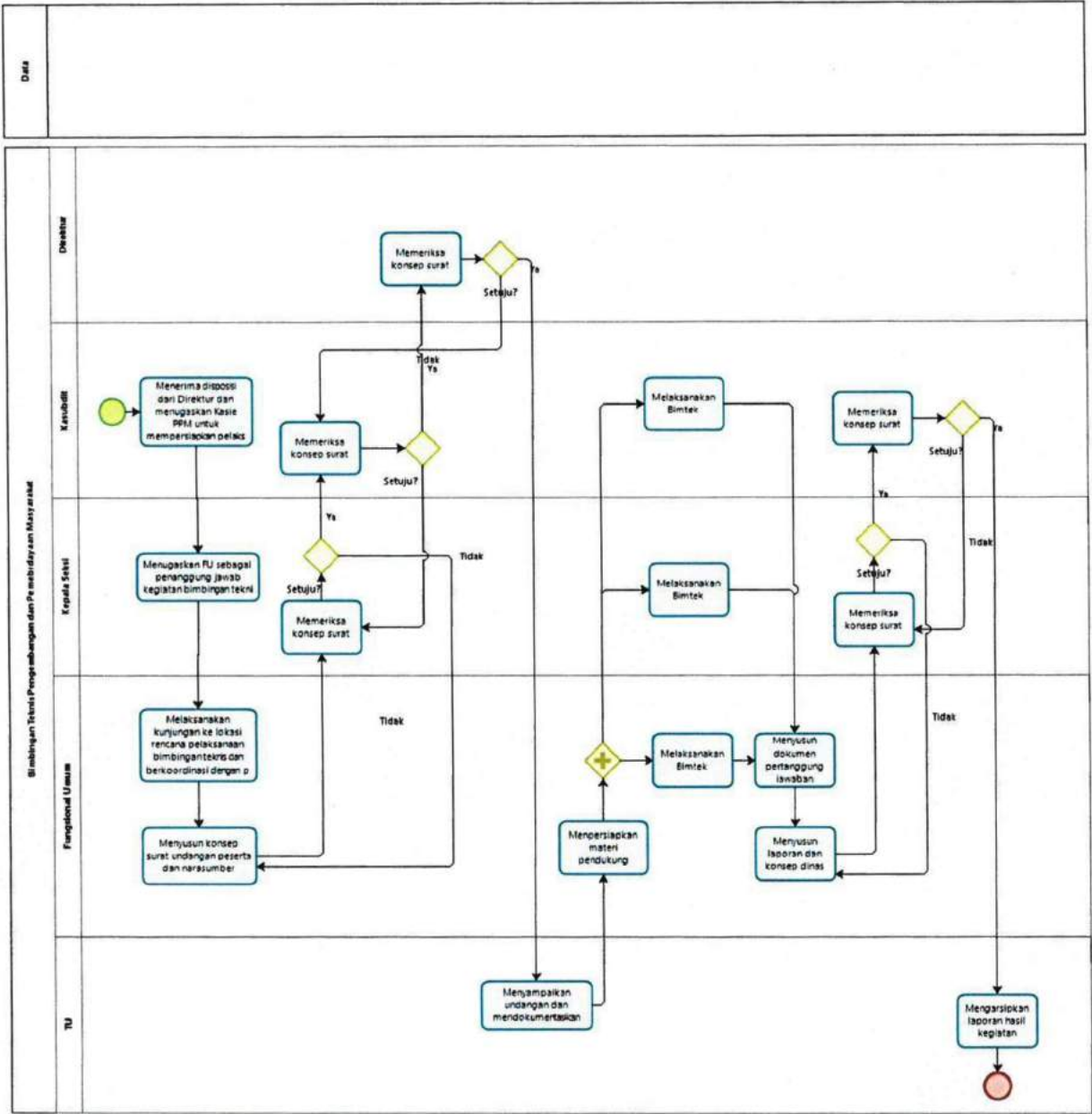
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat – Pengawasan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Pertambangan Batubara



Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat – Evaluasi Hasil Pengawasan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Pertambangan Batubara



Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Bimbingan Teknis
 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO

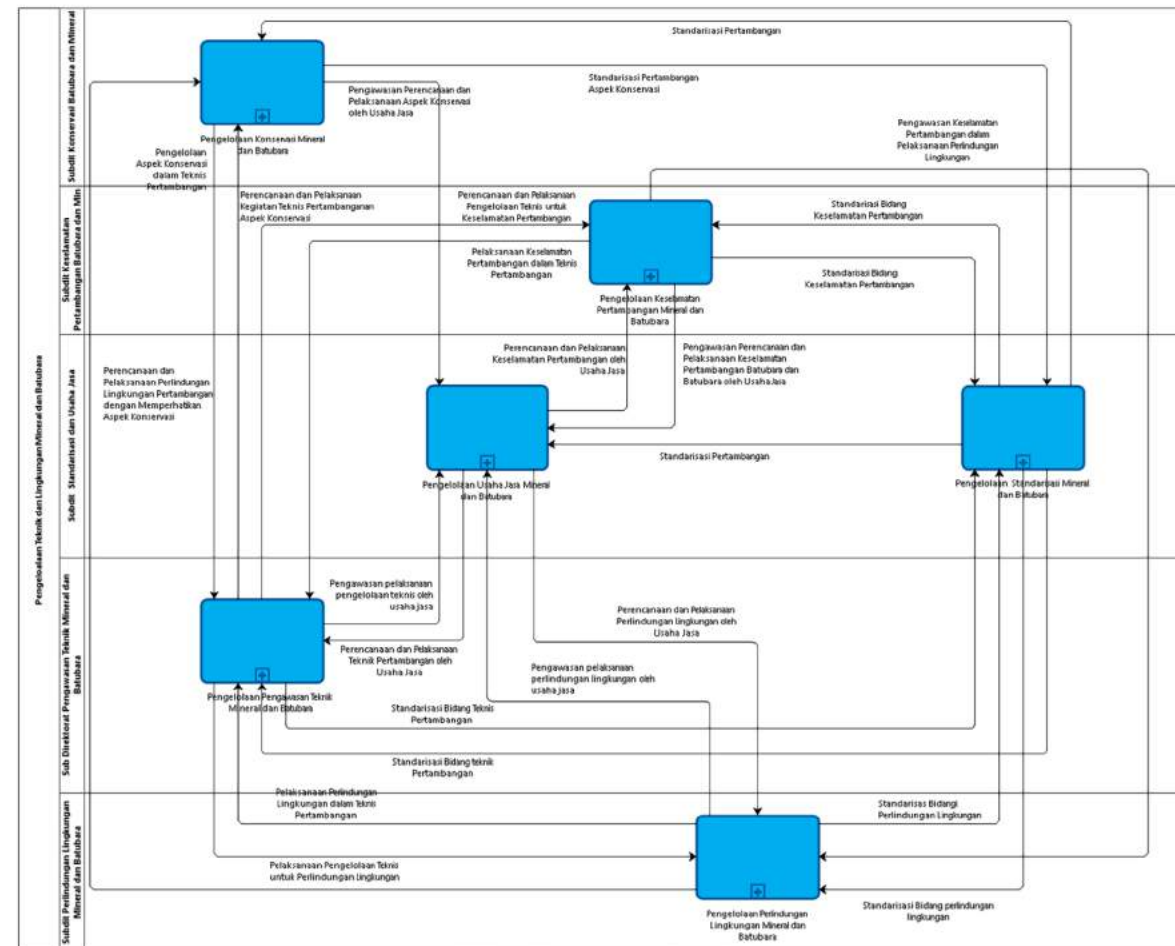
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 315.K/30/DJB/2018

TANGGAL: 14 Desember 2018

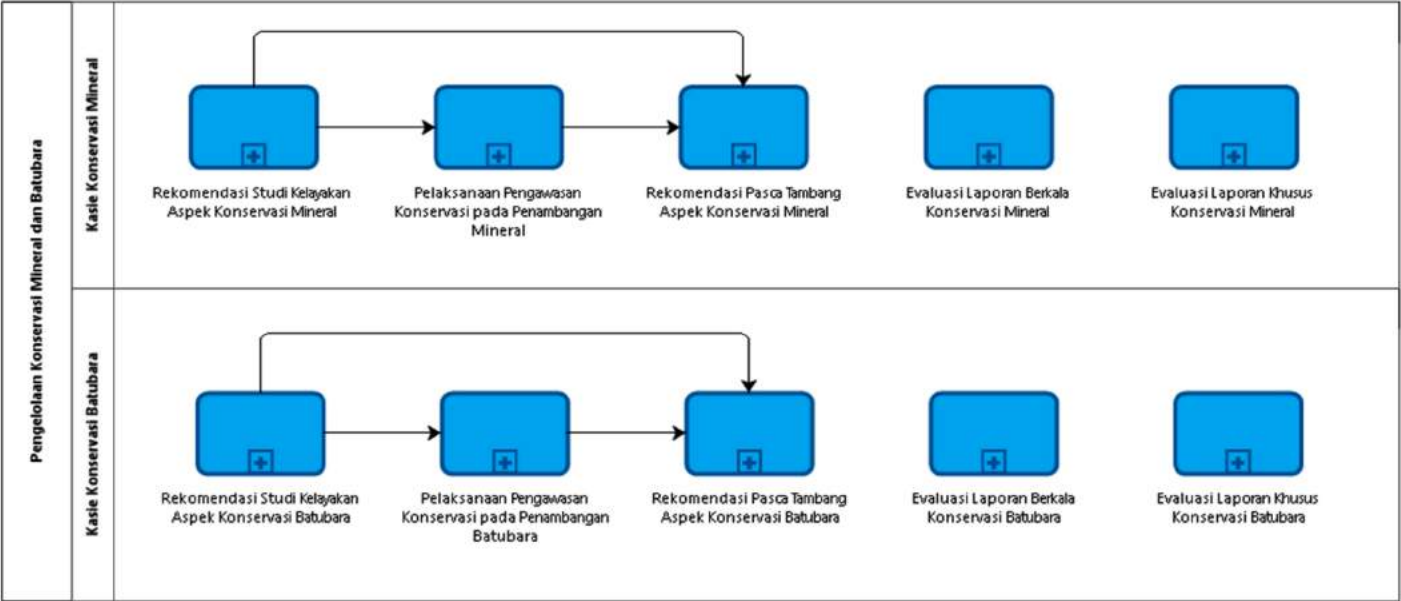
BISNIS PROSES DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA



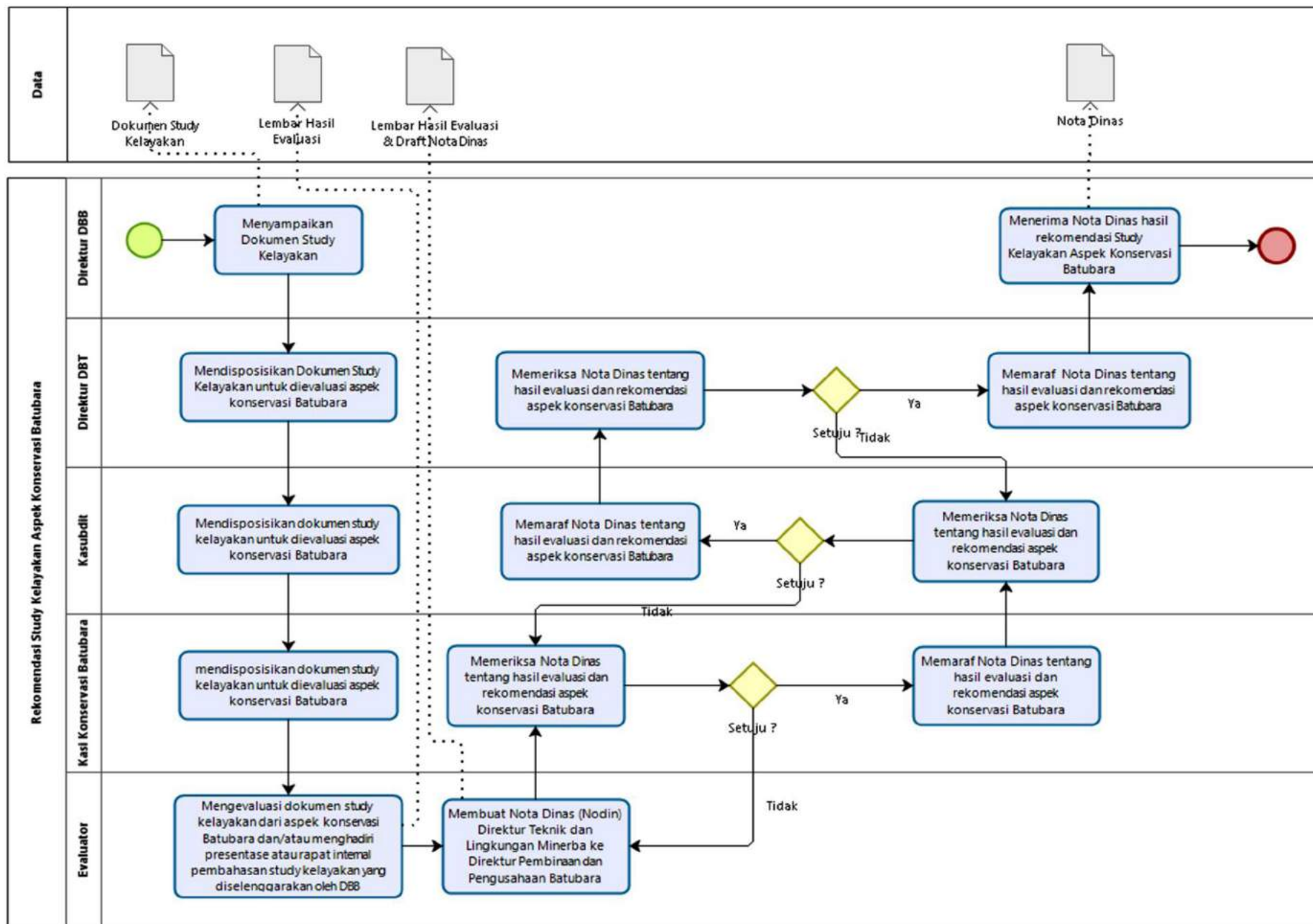
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai proses bisnis yang saling berinteraksi antar sub Direktorat di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara yang kemudian dimanfaatkan sebagai standarisasi pertambangan aspek konservasi, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan aspek konservasi dan pengelolaan aspek konservasi dalam teknis pertambangan.
- b. Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian dimanfaatkan sebagai pengawasan keselamatan pertambangan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan, standarisasi bidang keselamatan pertambangan, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan keselamatan pertambangan batubara dan batubara oleh usaha jasa dan pelaksanaan keselamatan pertambangan dalam teknis pertambangan.
- c. Pengelolaan Usaha Jasa Mineral dan Batubara yang kemudian dimanfaatkan sebagai perencanaan dan pelaksanaan teknik pertambangan oleh usaha jasa, perencanaan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan oleh usaha jasa, serta perencanaan dan pelaksanaan keselamatan pertambangan oleh usaha jasa.
- d. Pengelolaan Standarisasi Mineral dan Batubara yang kemudian dimanfaatkan sebagai standarisasi bidang perlindungan lingkungan, bidang standarisasi bidang teknik pertambangan, standarisasi bidang keselamatan pertambangan serta standarisasi bidang pertambangan.
- e. Pengelola Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara yang kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis pertambangan aspek konservasi, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan teknis aspek keselamatan pertambangan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan teknik, standarisasi bidang teknis pertambangan serta Pelaksanaan Pengelolaan Teknis untuk Perlindungan Lingkungan.
- f. Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara yang kemudian dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengelolaan teknis perlindungan lingkungan, pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam teknis pertambangan, pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan dan penyusunan standarisasi bidang perlindungan lingkungan.

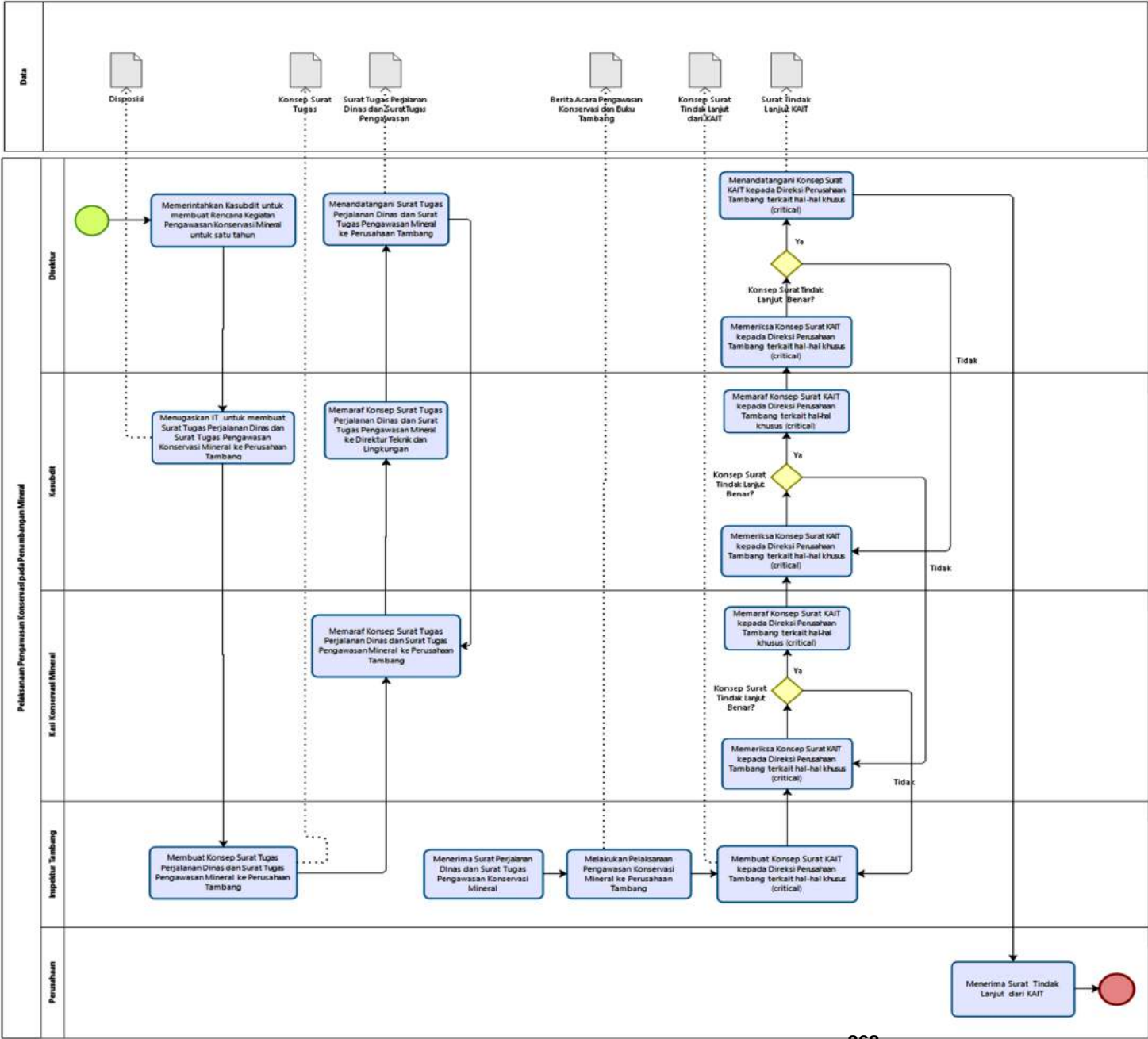
Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara



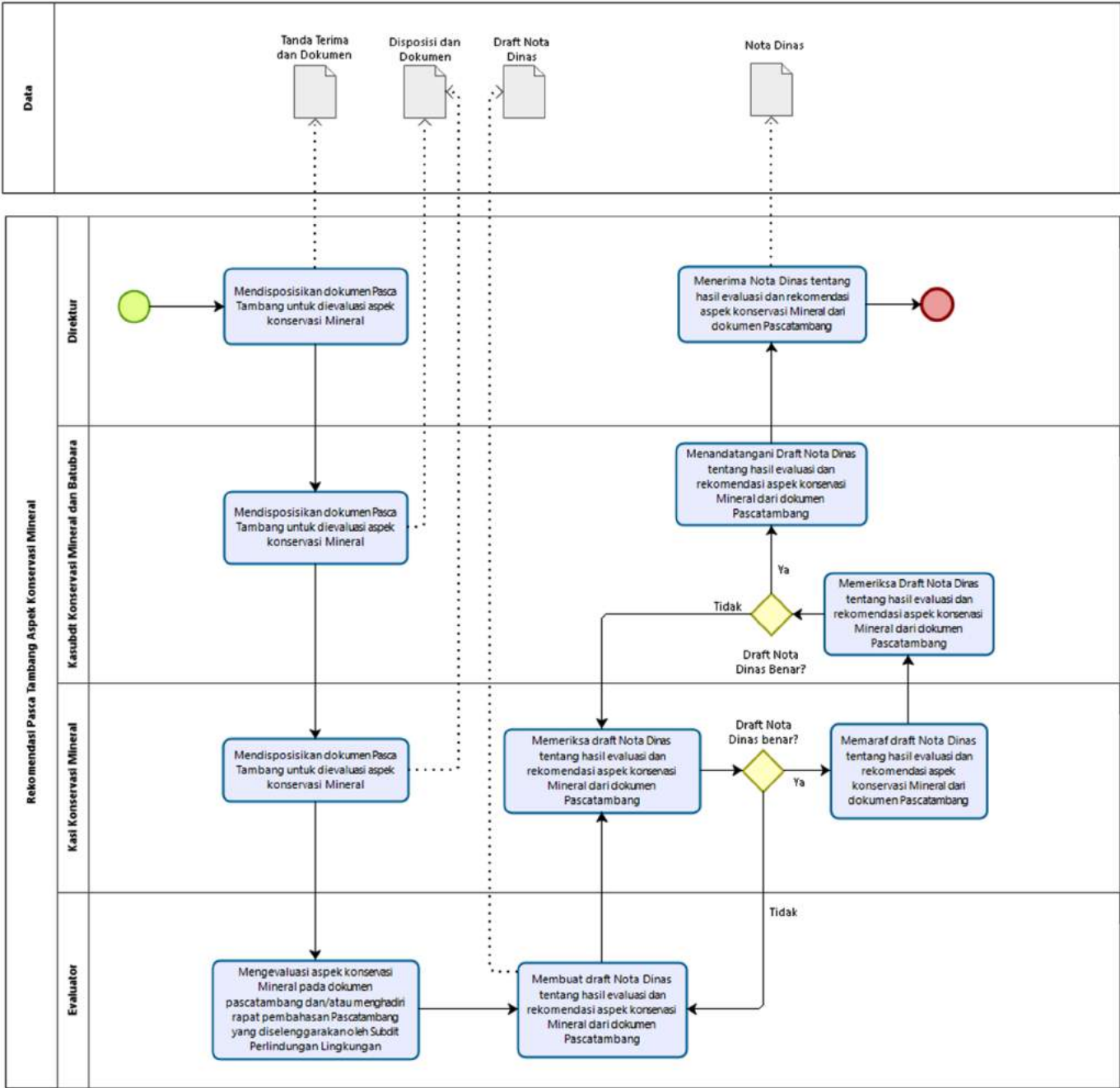
Seksi Konservasi Mineral - Rekomendasi Studi Kelayakan Aspek Konservasi Mineral



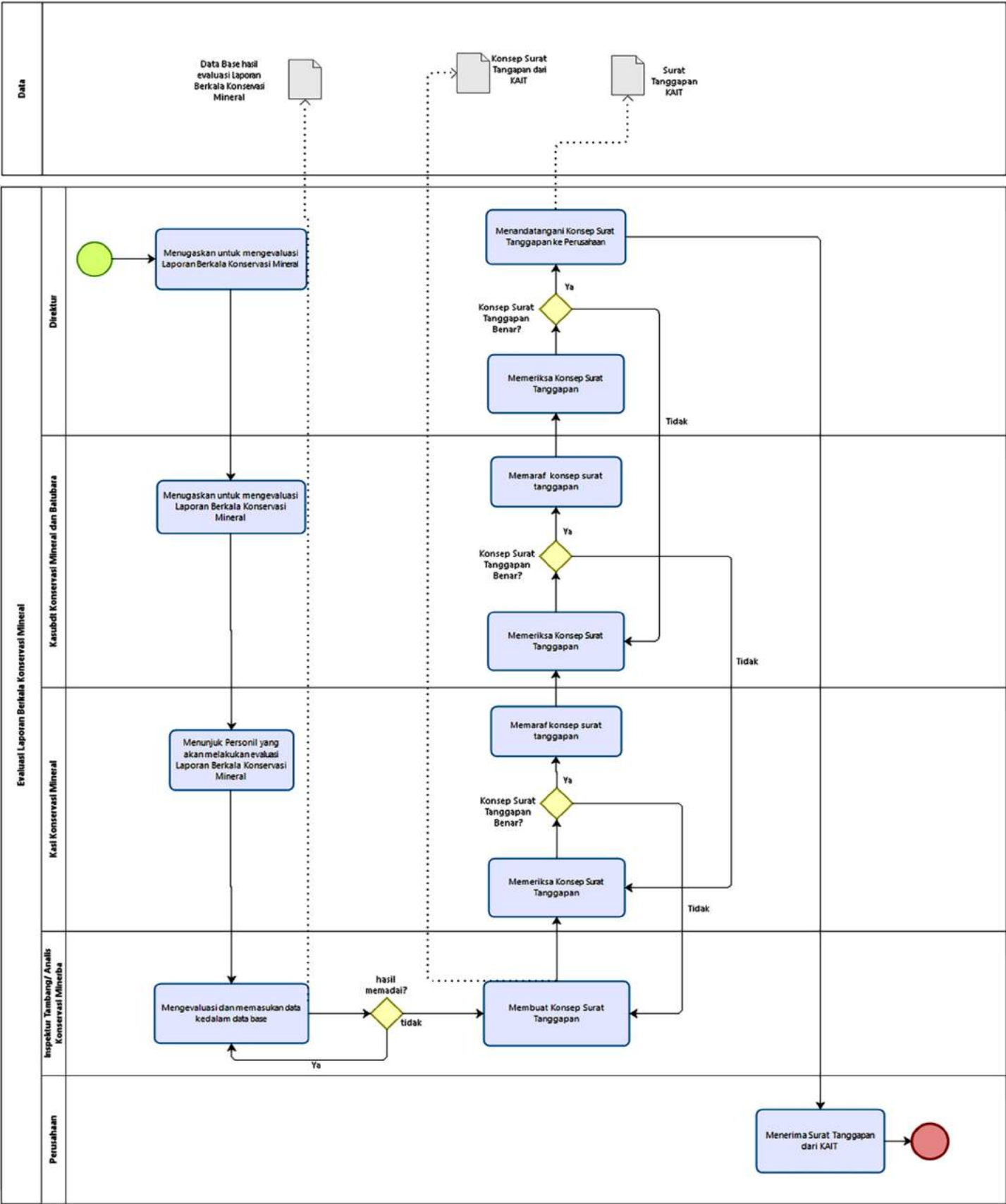
Seksi Konservasi Mineral - Pelaksanaan Pengawasan Konservasi pada Penambangan Mineral



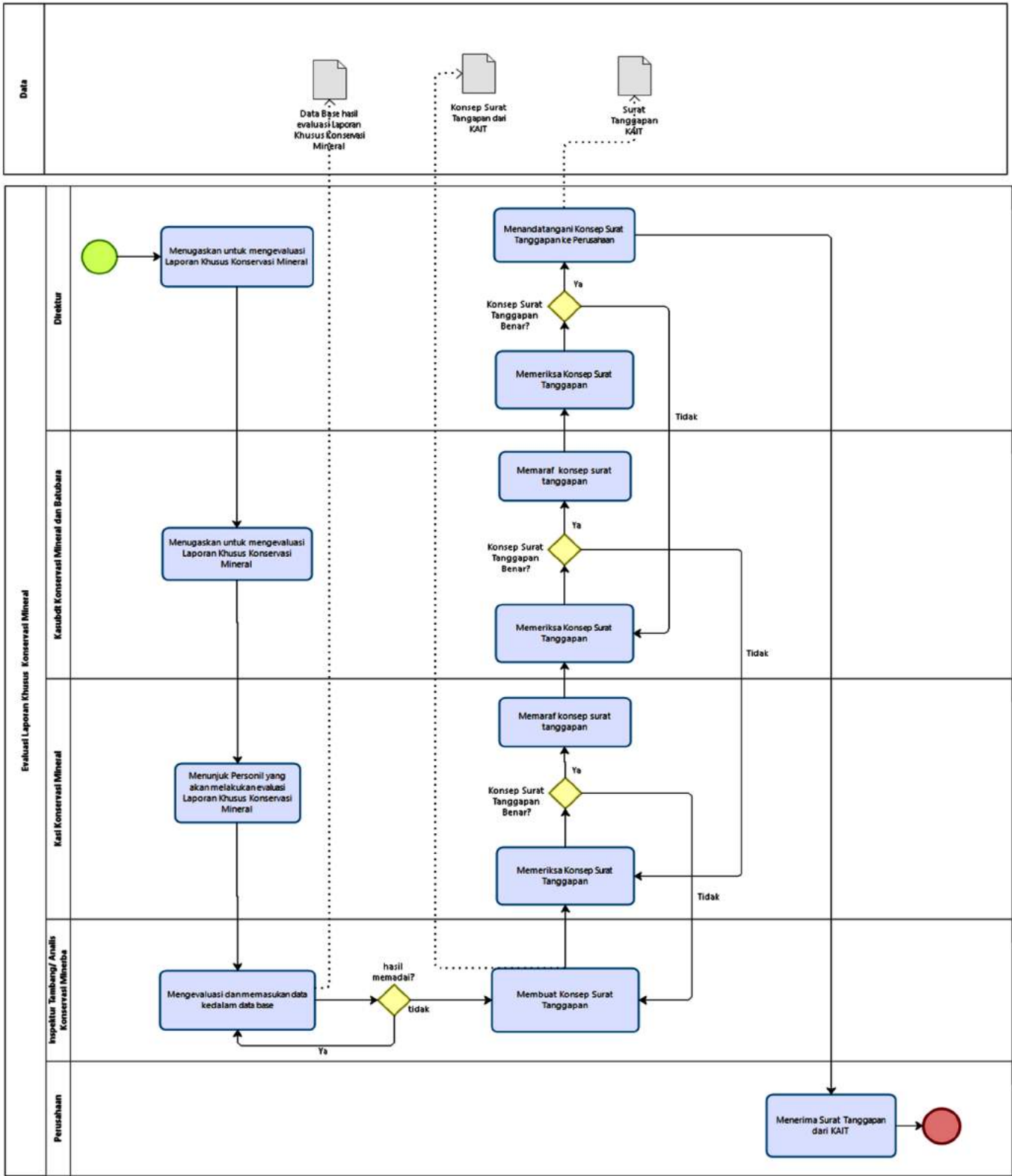
Seksi Konservasi Mineral - Rekomendasi Pasca Tambang Aspek Konservasi Mineral



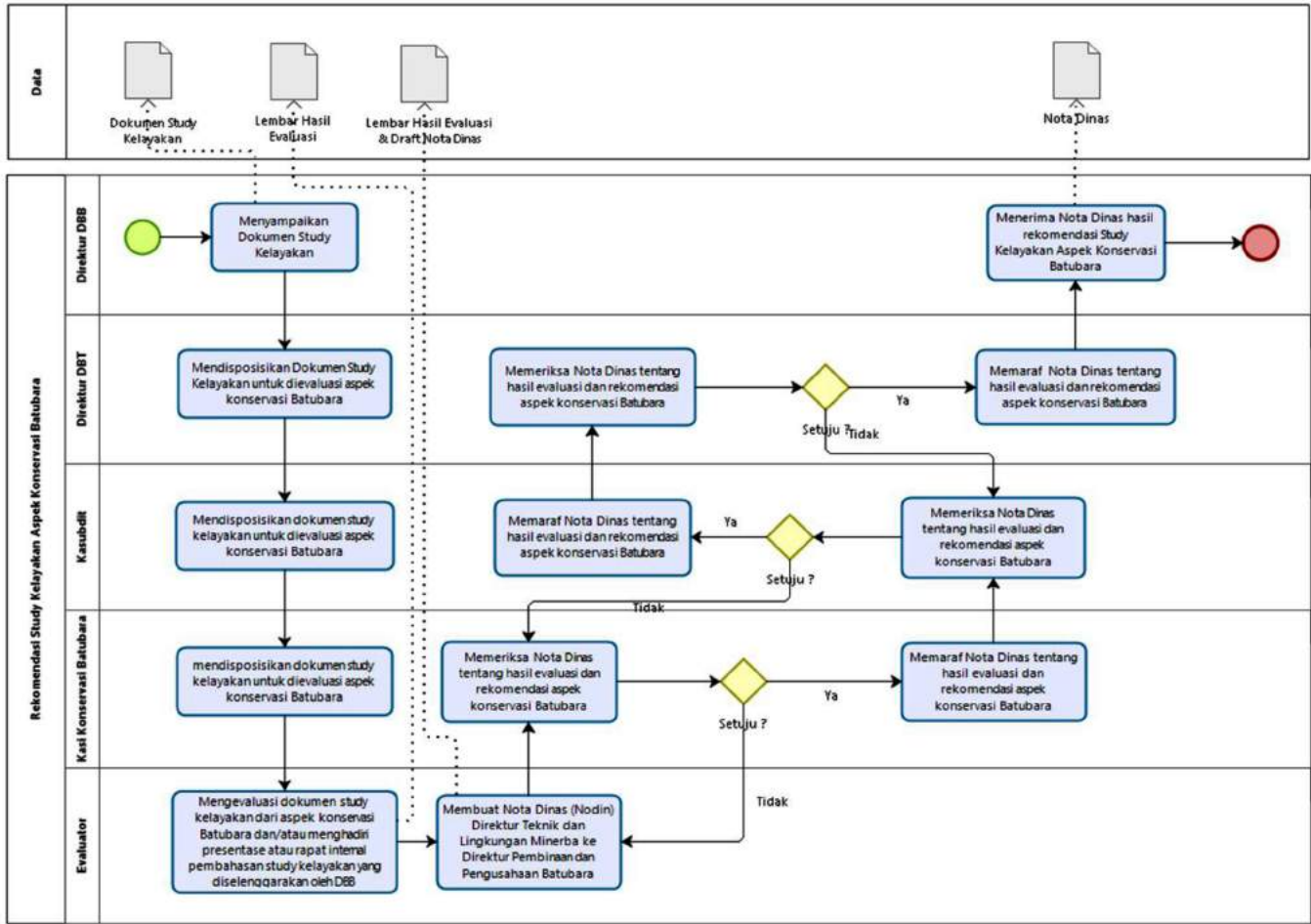
Seksi Konservasi Mineral - Evaluasi Laporan Berkala Konservasi Mineral



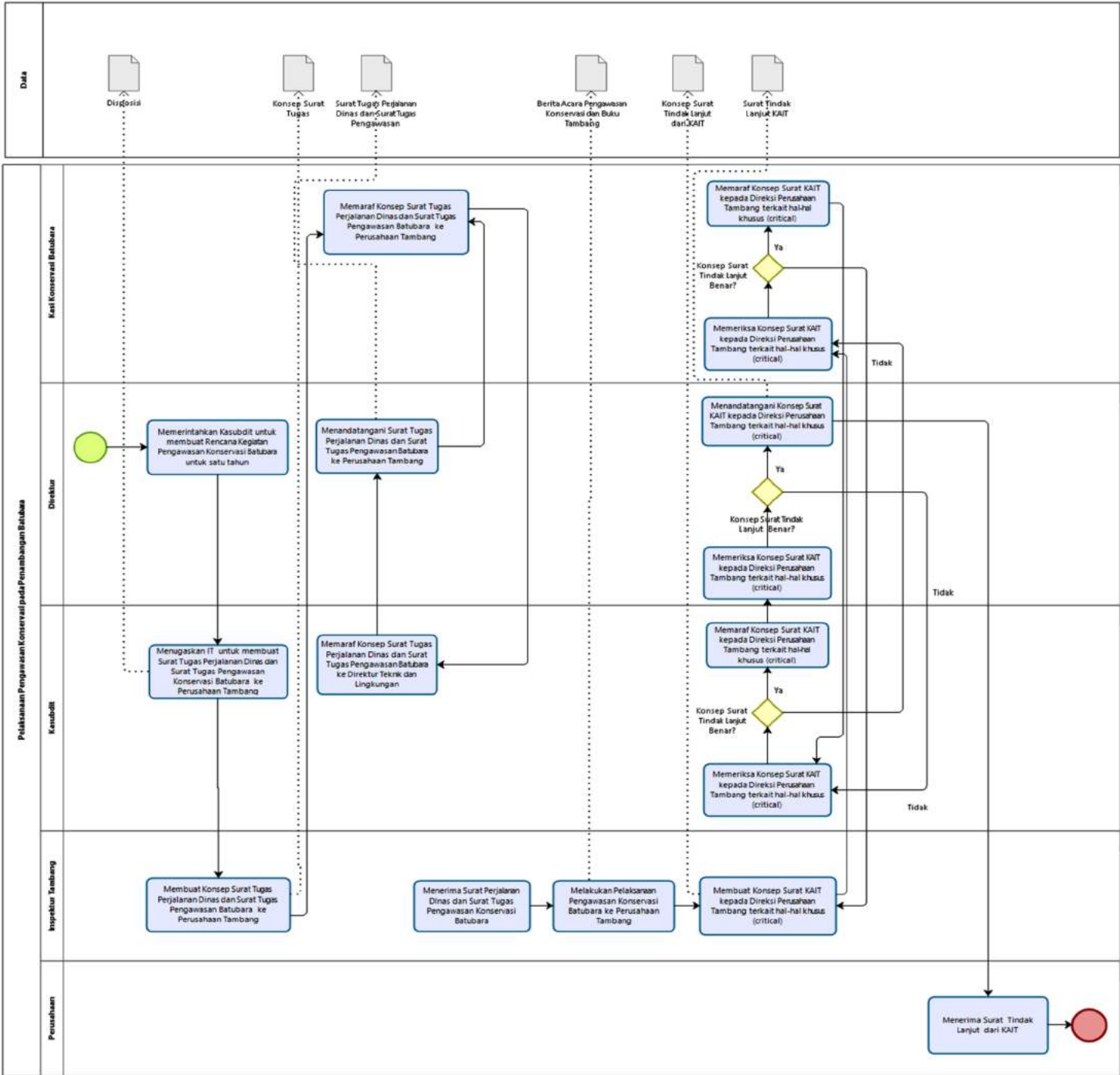
Seksi Konservasi Mineral - Evaluasi Laporan Khusus KonservasiMineral



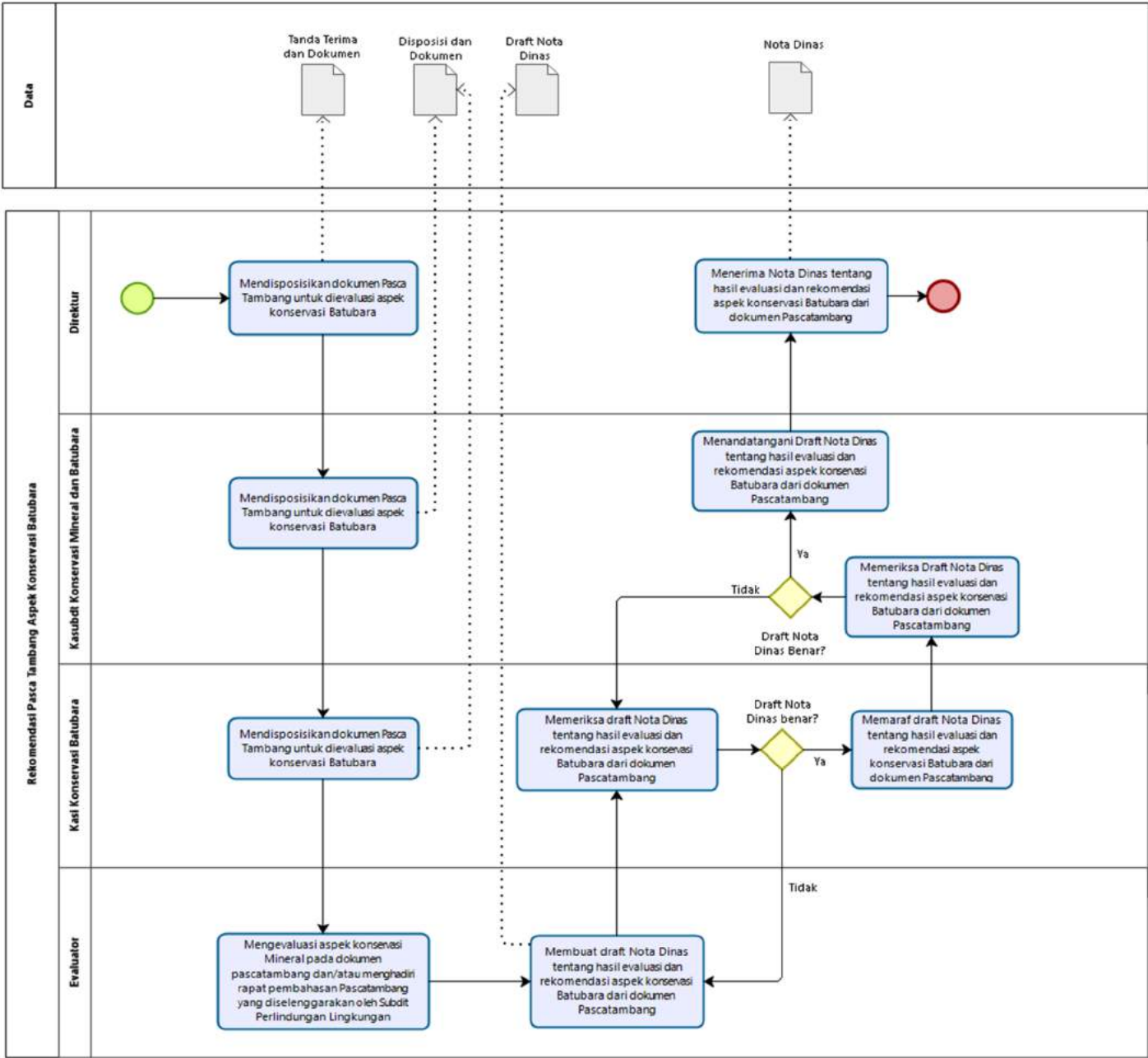
Seksi Konservasi Batubara - Rekomendasi Studi Kelayakan Aspek Konservasi Batubara



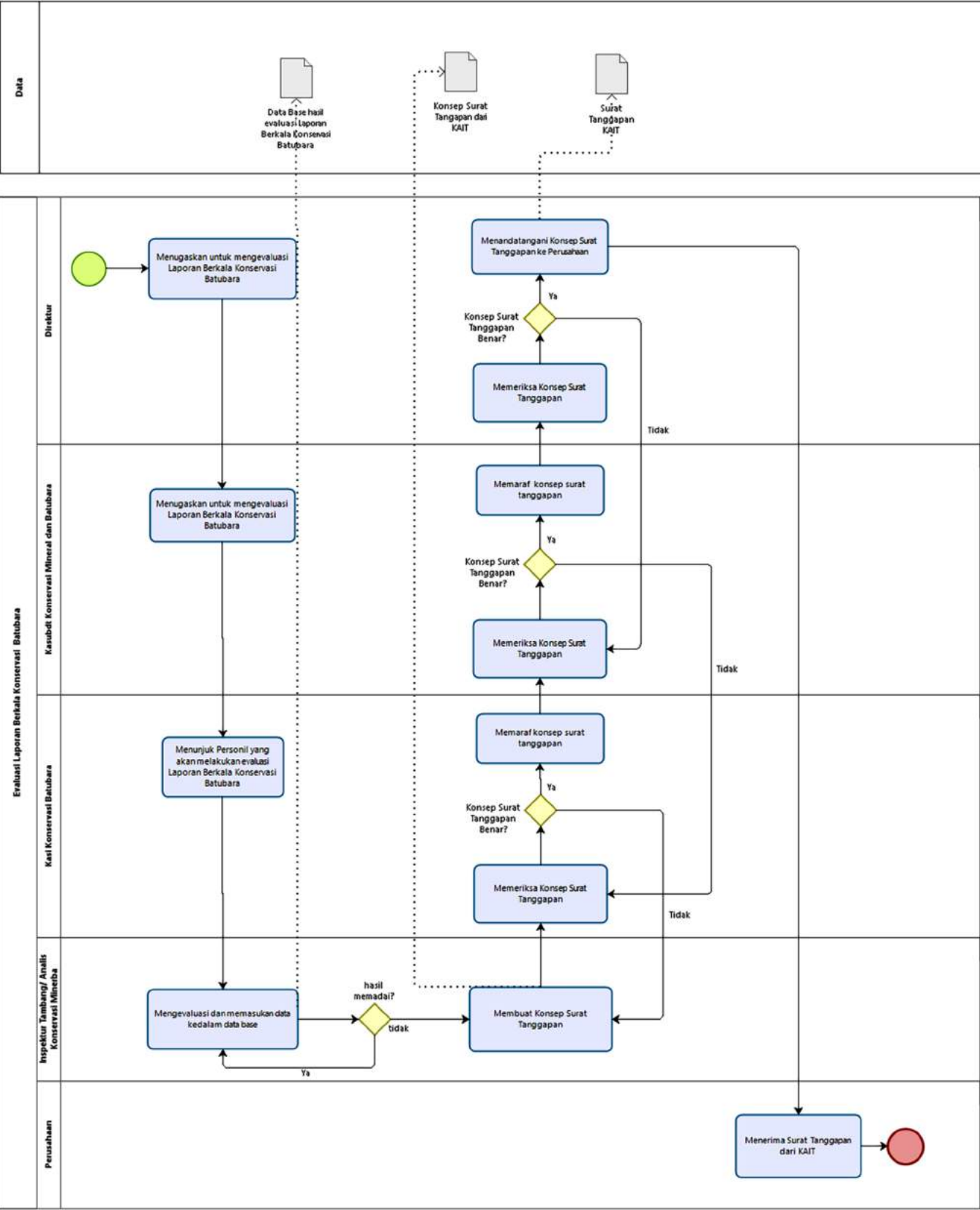
Seksi Konservasi Batubara - Pelaksanaan Pengawasan Konservasi pada Penambangan Batubara



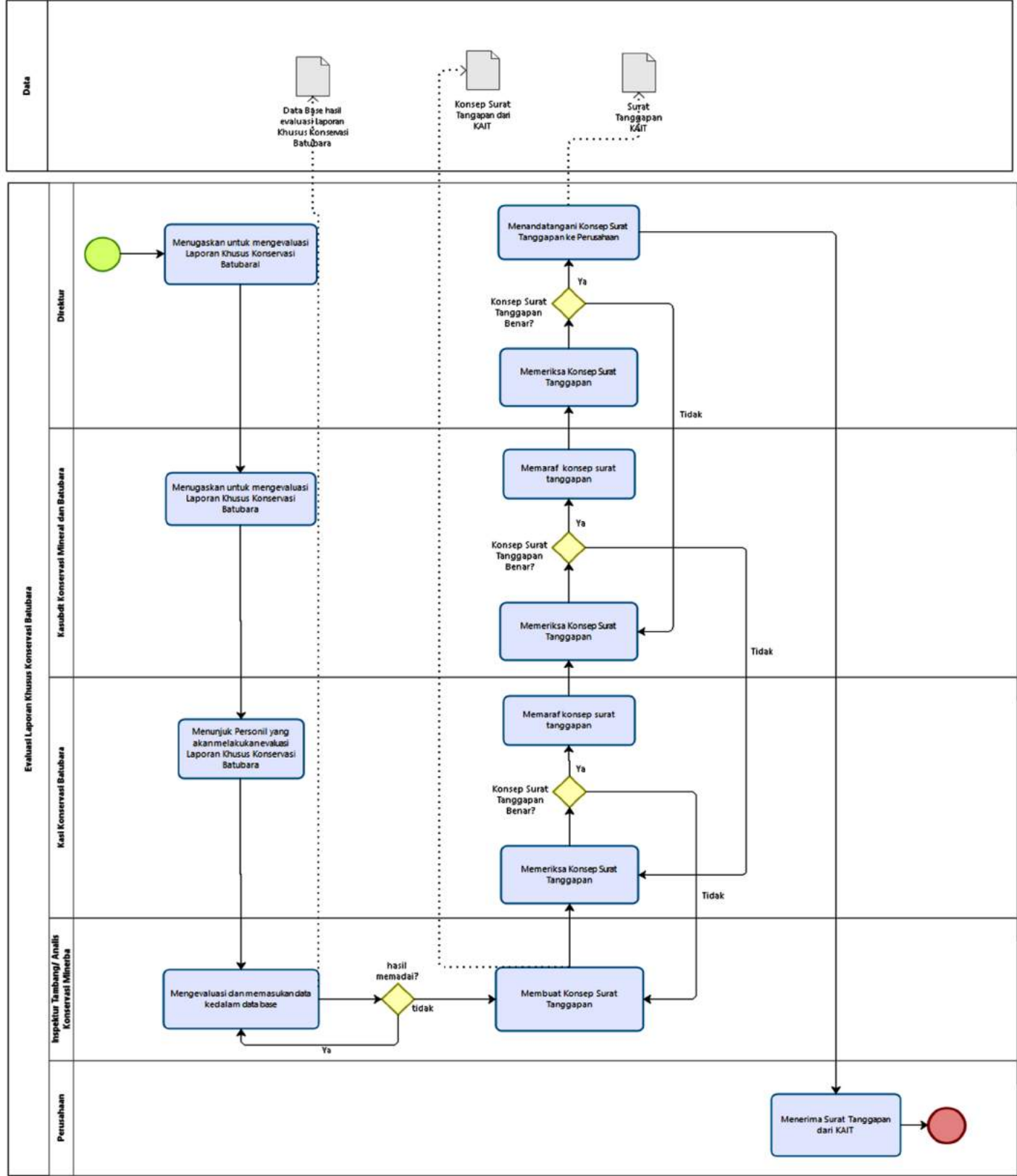
Seksi Konservasi Batubara - Rekomendasi Pasca Tambang Aspek Konservasi Batubara



Seksi Konservasi Batubara - Evaluasi Laporan Berkala Konservasi Batubara



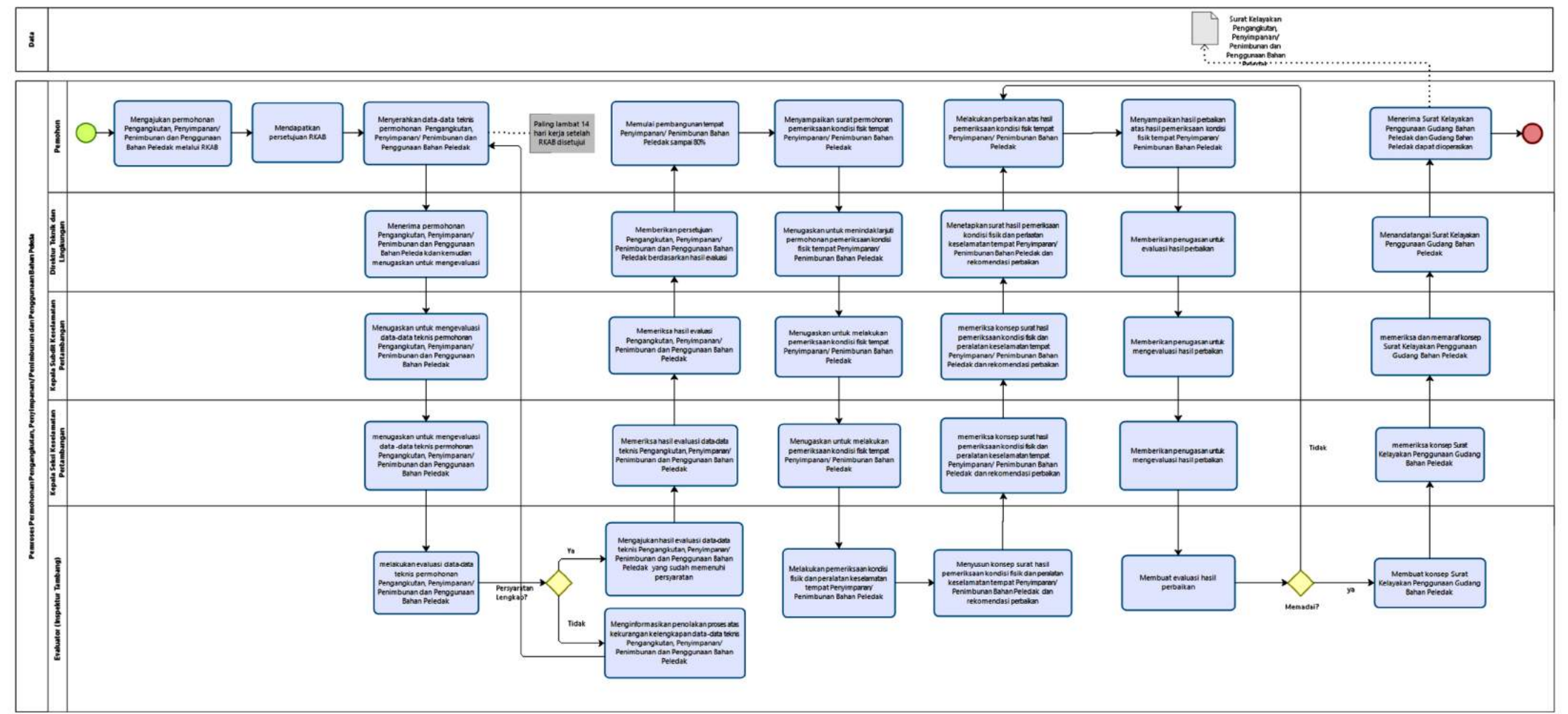
Seksi Konservasi Batubara - Evaluasi Laporan Khusus Konservasi Batubara



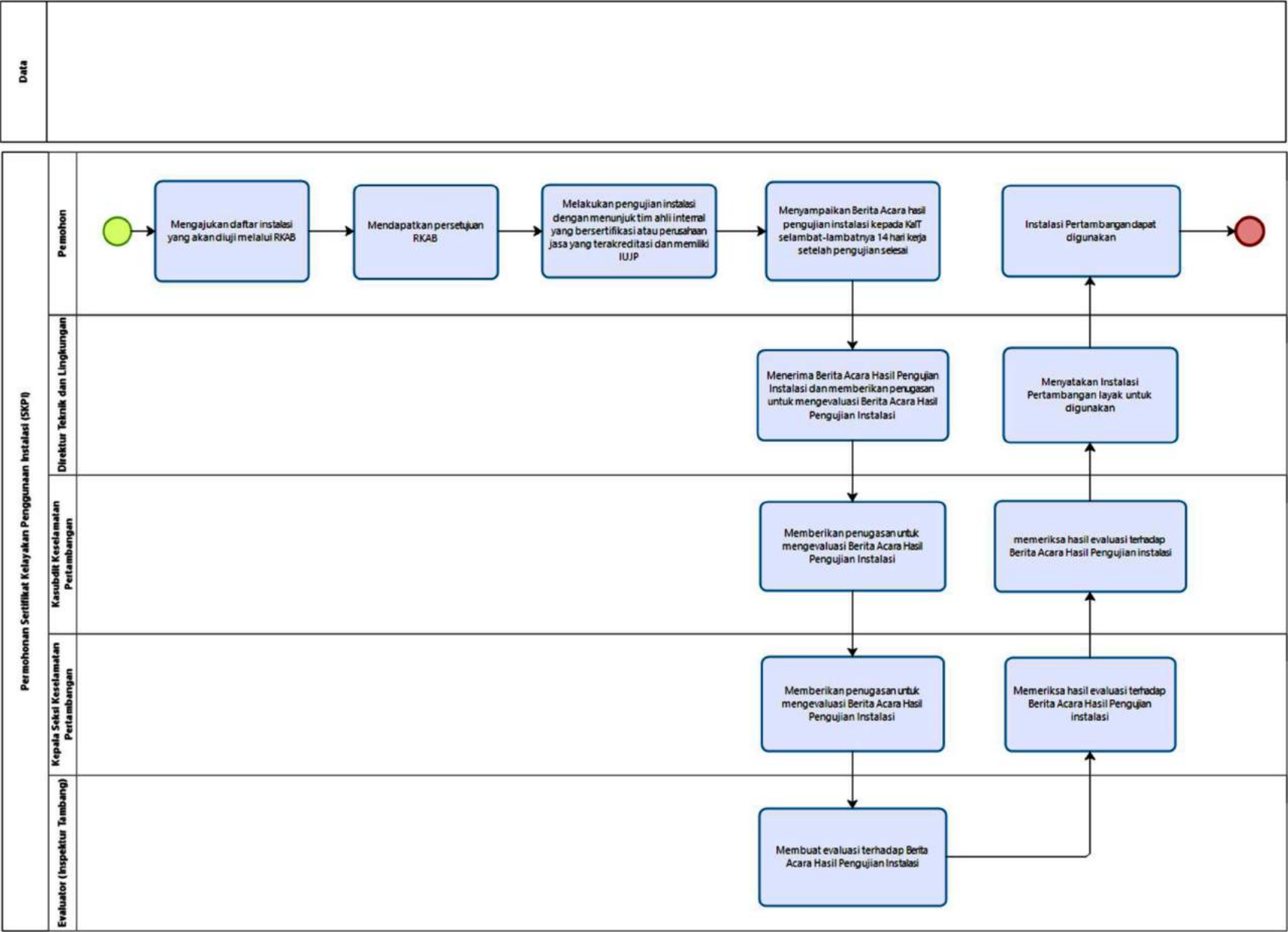
Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral					
		Pemroses Permohonan Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak	Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Pemrosesan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)	Pemroses Permohonan Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair	Pemrosesan Permohonan Pengoperasian Kapal Keruk
	Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara					
		Pemroses Pengesahan Kepala Teknik Tambang/ Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan/ Wakil Kepala Teknik Tambang / Kepala Tambang Bawah Tanah	Pemrosesan Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur	Pemrosesan Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya		
						
		Pemroses Permohonan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak	Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Pemrosesan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)	Pemroses Permohonan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair	Pemrosesan Permohonan Izin Operasi Kapal Keruk
						
		Pemroses Pengesahan Kepala Teknik Tambang	Pemrosesan Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur	Pemrosesan Pengesahan Kepala Tambang Bawah Tanah Oleh Kepala Teknik Tambang	Pemrosesan Permohonan Izin Penggunaan Bahan Peledak (Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak)	

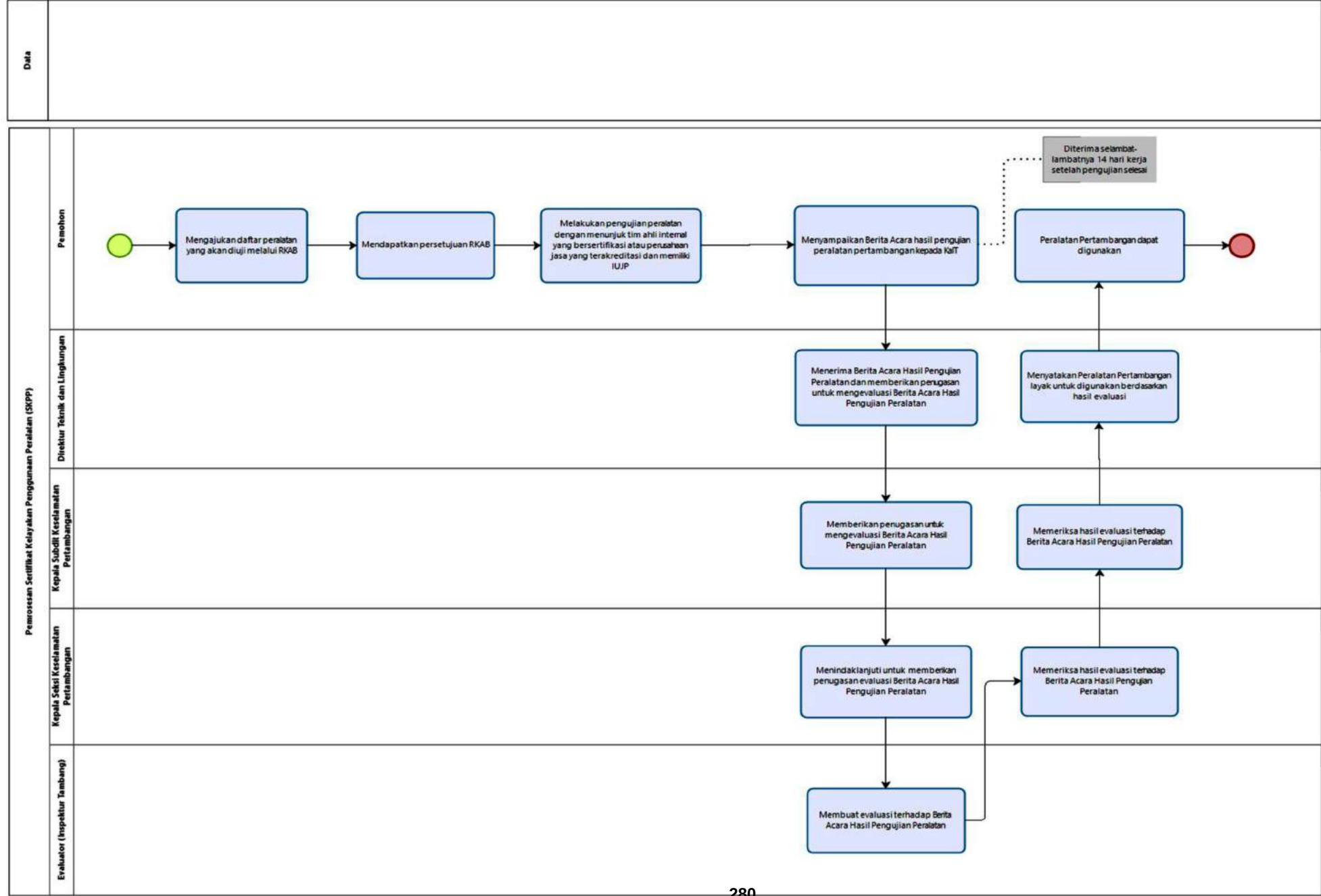
Keselamatan Pertambangan Mineral - Pemroses Permohonan Pengangkutan, Penyimpanan Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak



Keselamatan Pertambangan Mineral - Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

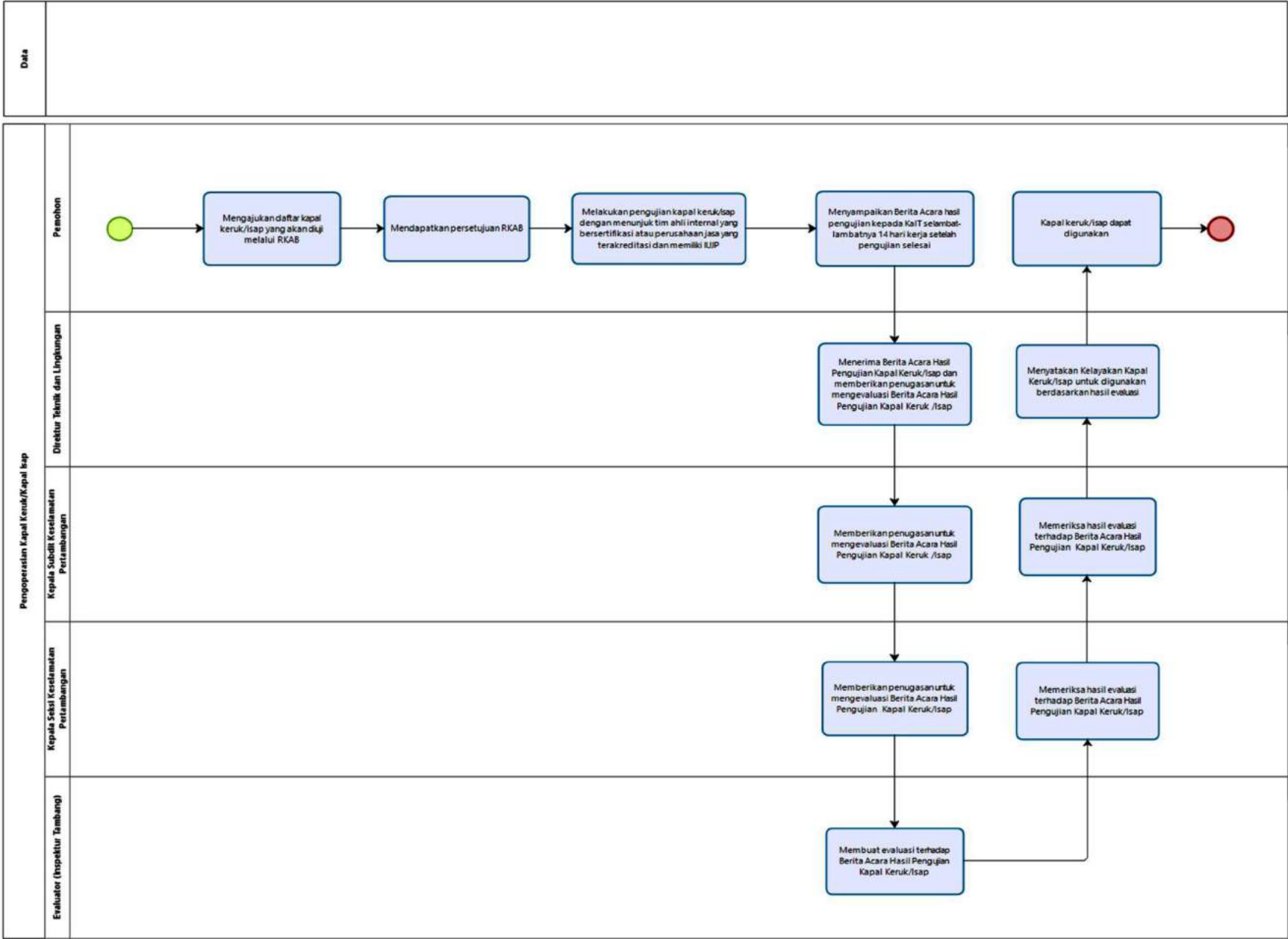


Keselamatan Pertambangan Mineral - Pemrosesan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)



[illegible]

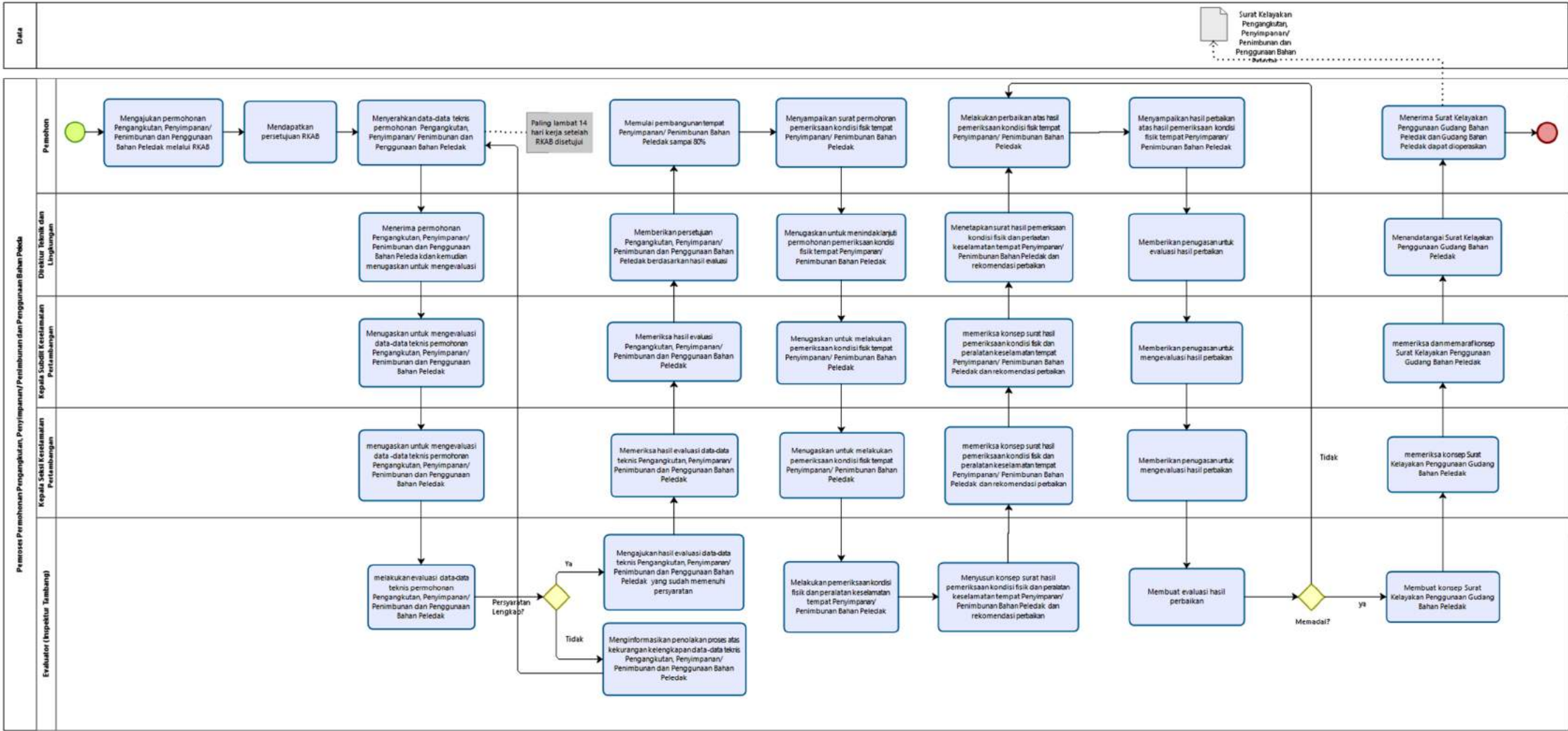
Keselamatan Pertambangan Mineral - Pemrosesan Permohonan Pengoperasian Kapal Keruk



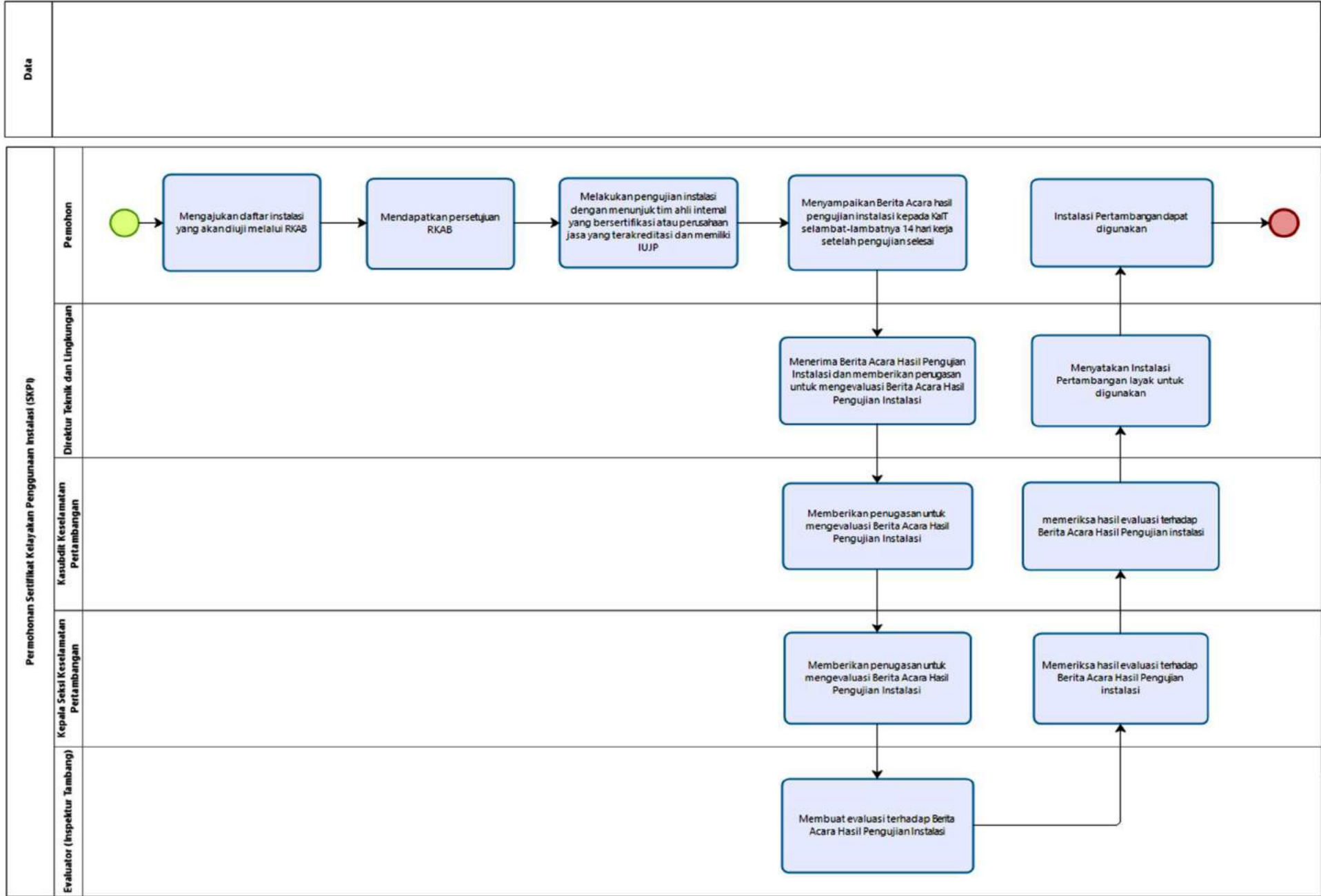


Data				
Penyohon Mengajukan permohonan peledakan tidur melalui RKAS Mendapatkan persetujuan RKAS Menerima permohonan peledakan tidur dan kemudian mengajukan untuk mengevaluasi Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Melakukan evaluasi data-data teknis permohonan peledakan tidur Melakukan verifikasi lapangan Membuat konsep surat hasil verifikasi kegiatan peledakan tidur dan rekomendasi perbaikan Membuat evaluasi hasil perbaikan Menerima surat persetujuan peledakan tidur dan peledakan tidur dapat dilakukan	Disetujui Mengajukan permohonan peledakan tidur melalui RKAS Mendapatkan persetujuan RKAS Menerima permohonan peledakan tidur dan kemudian mengajukan untuk mengevaluasi Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Melakukan evaluasi data-data teknis permohonan peledakan tidur Melakukan verifikasi lapangan Membuat konsep surat hasil verifikasi kegiatan peledakan tidur dan rekomendasi perbaikan Membuat evaluasi hasil perbaikan Menerima surat persetujuan peledakan tidur dan peledakan tidur dapat dilakukan	Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mengajukan permohonan peledakan tidur melalui RKAS Mendapatkan persetujuan RKAS Menerima permohonan peledakan tidur dan kemudian mengajukan untuk mengevaluasi Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Melakukan evaluasi data-data teknis permohonan peledakan tidur Melakukan verifikasi lapangan Membuat konsep surat hasil verifikasi kegiatan peledakan tidur dan rekomendasi perbaikan Membuat evaluasi hasil perbaikan Menerima surat persetujuan peledakan tidur dan peledakan tidur dapat dilakukan	Keselamatan Pertambangan Mengajukan permohonan peledakan tidur melalui RKAS Mendapatkan persetujuan RKAS Menerima permohonan peledakan tidur dan kemudian mengajukan untuk mengevaluasi Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Melakukan evaluasi data-data teknis permohonan peledakan tidur Melakukan verifikasi lapangan Membuat konsep surat hasil verifikasi kegiatan peledakan tidur dan rekomendasi perbaikan Membuat evaluasi hasil perbaikan Menerima surat persetujuan peledakan tidur dan peledakan tidur dapat dilakukan	Evaluasi (Inspektur Tambang) Mengajukan permohonan peledakan tidur melalui RKAS Mendapatkan persetujuan RKAS Menerima permohonan peledakan tidur dan kemudian mengajukan untuk mengevaluasi Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Memberikan pengusutan untuk mengevaluasi permohonan peledakan tidur Melakukan evaluasi data-data teknis permohonan peledakan tidur Melakukan verifikasi lapangan Membuat konsep surat hasil verifikasi kegiatan peledakan tidur dan rekomendasi perbaikan Membuat evaluasi hasil perbaikan Menerima surat persetujuan peledakan tidur dan peledakan tidur dapat dilakukan

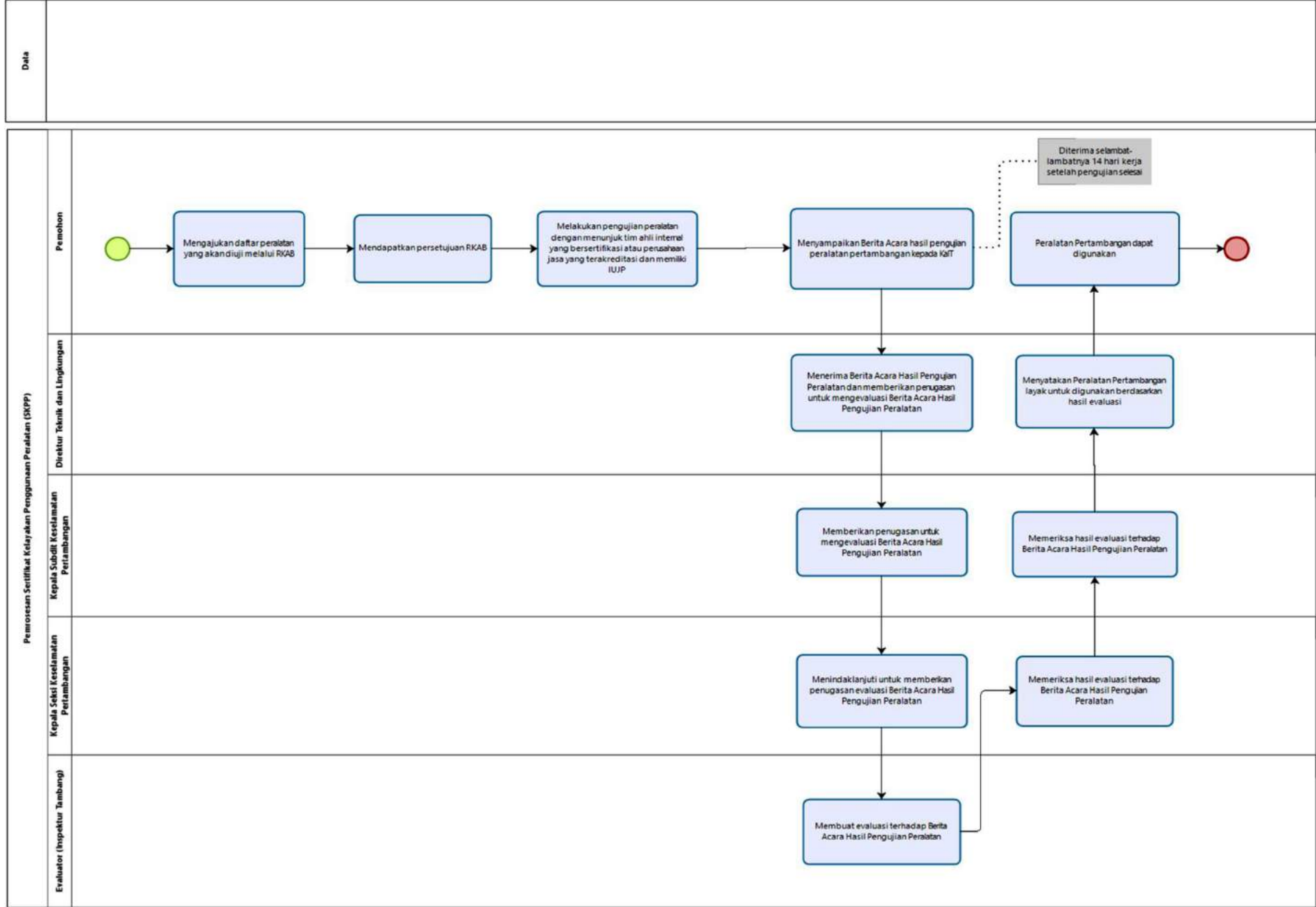
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemroses Permohonan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak



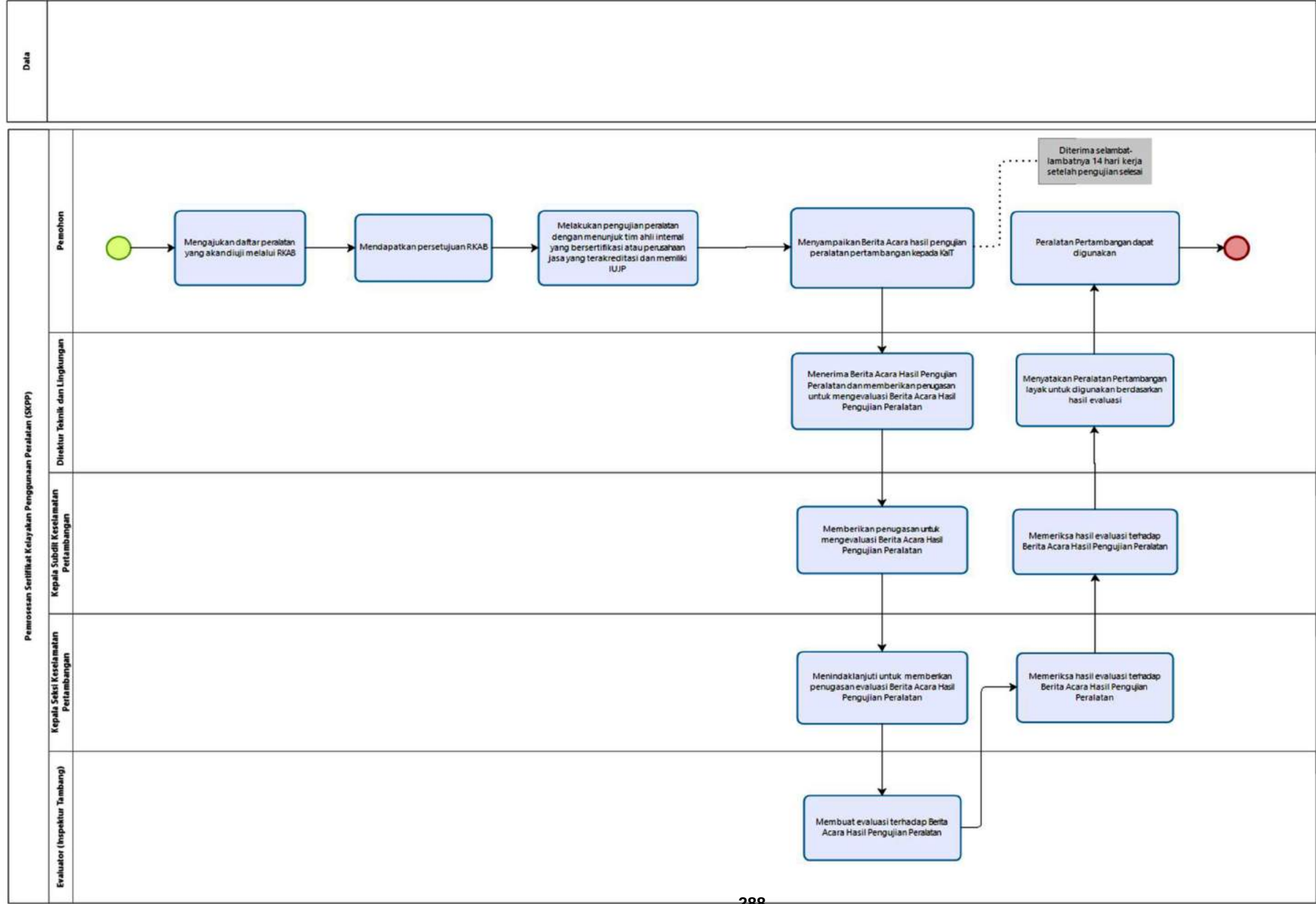
Keselamatan Pertambangan Batubara - Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)



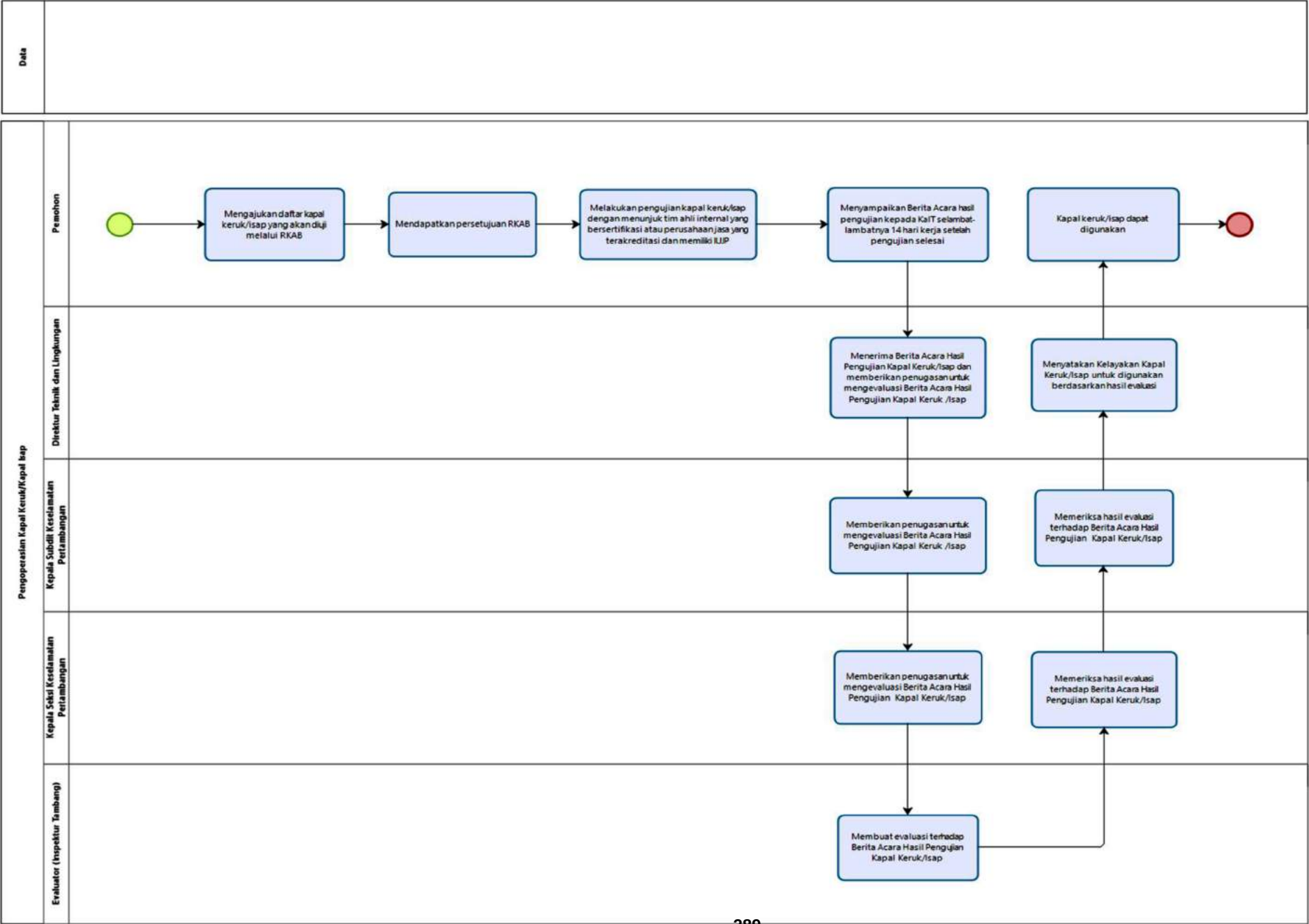
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemrosesan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)



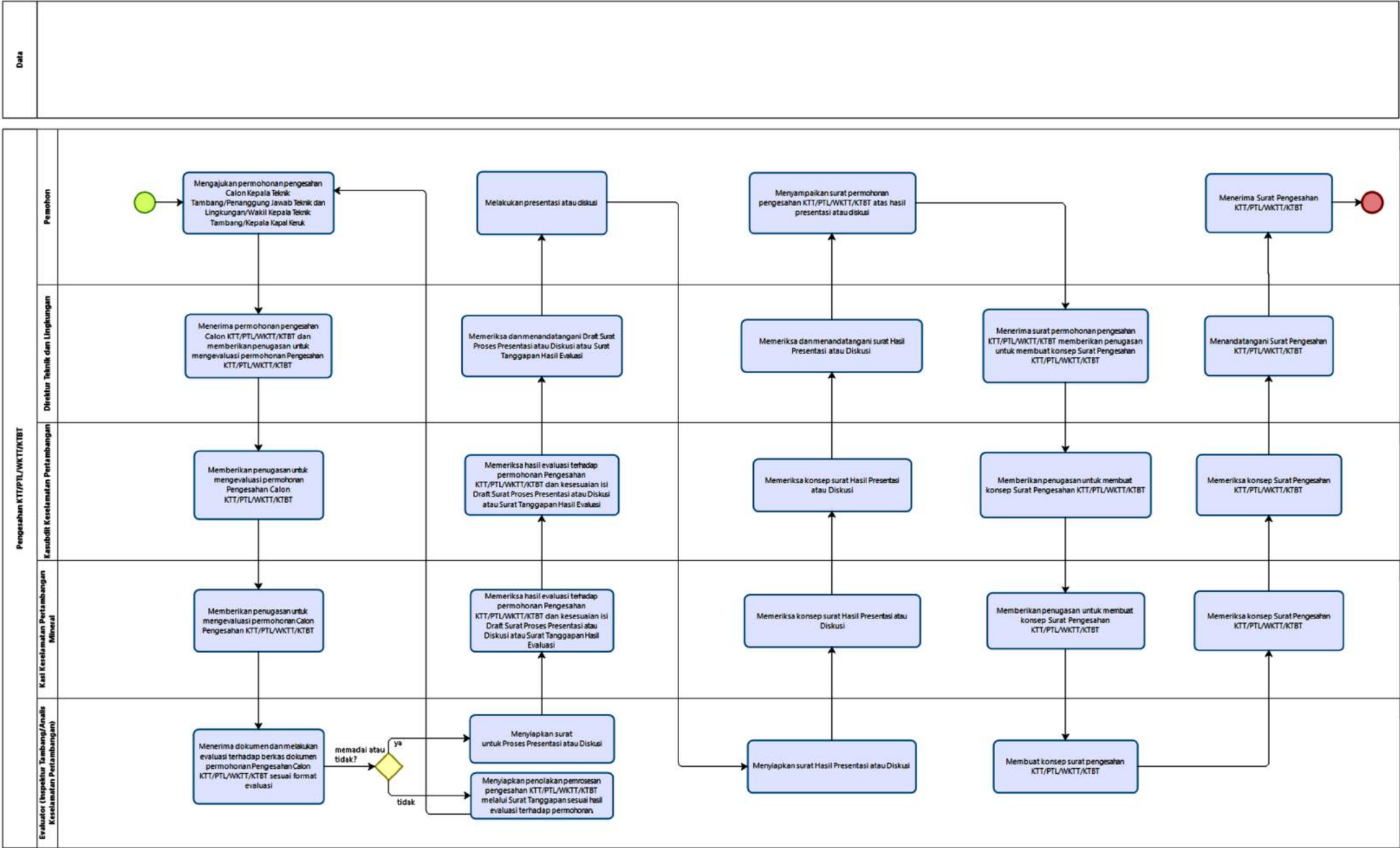
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemrosesan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)



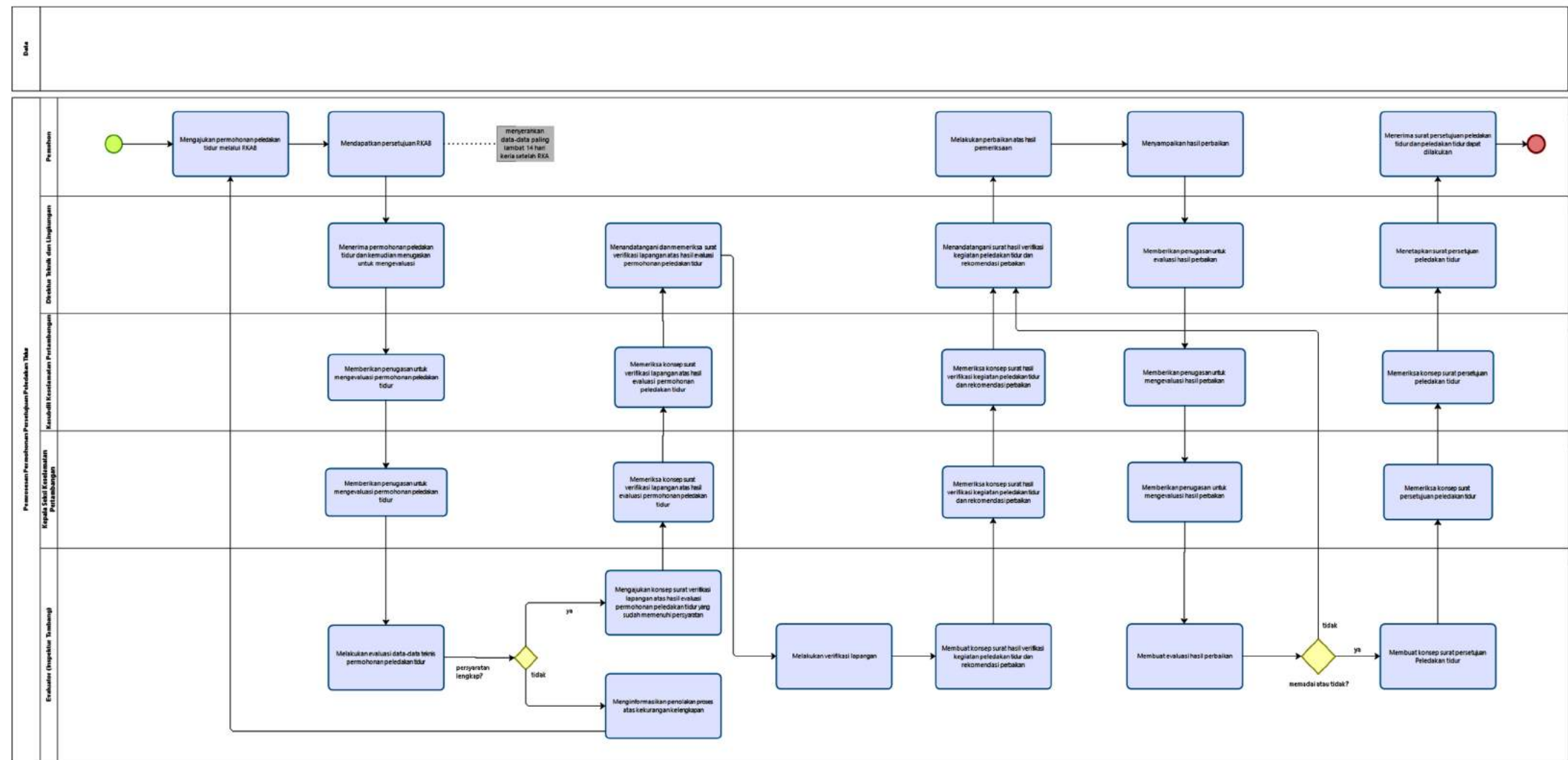
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemrosesan Permohonan Izin Operasi Kapal Keruk



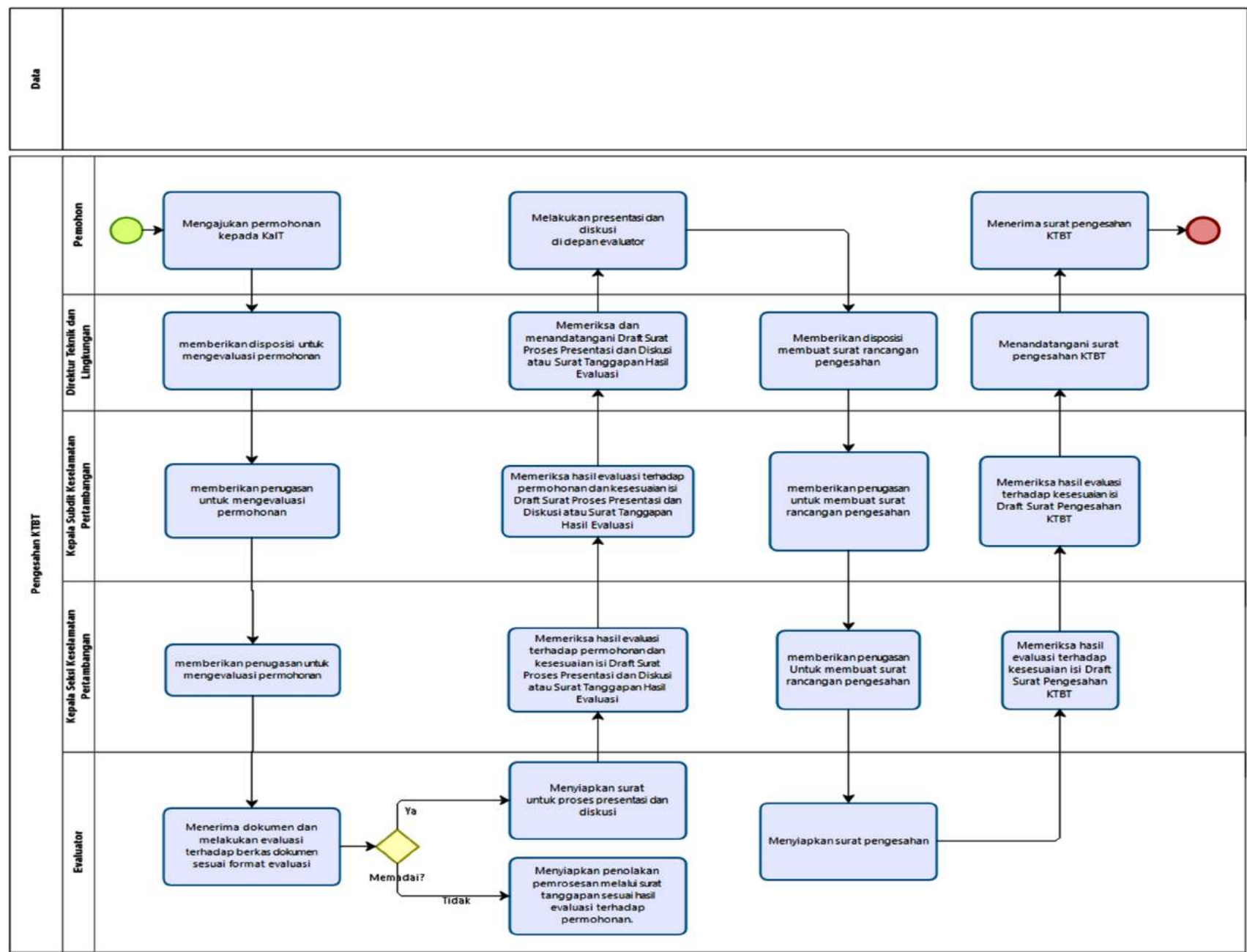
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemroses Pengesahan Kepala Teknik Tambang



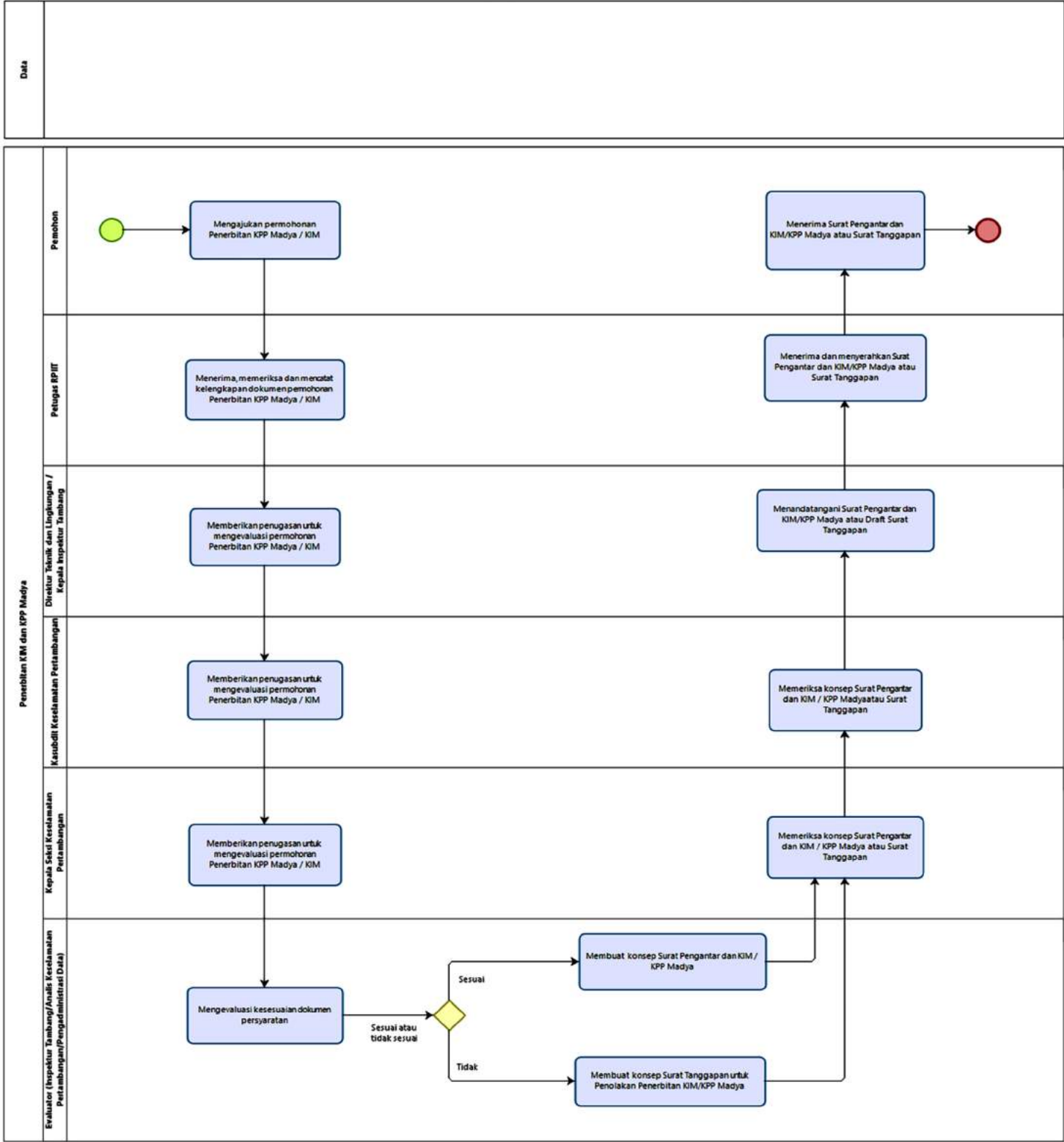
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemrosesan Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur



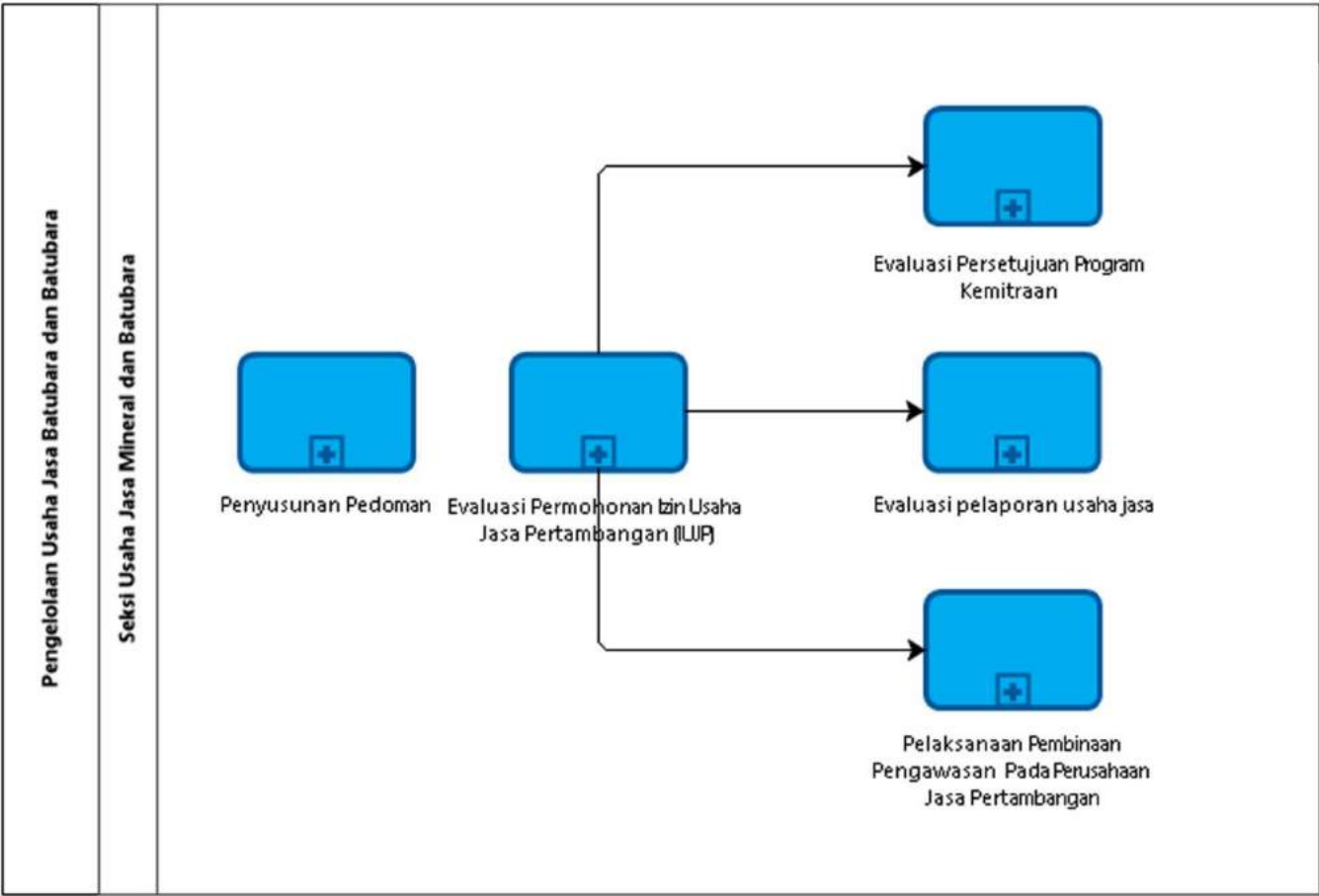
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemrosesan Pengesahan Kepala Tambang Bawah Tanah Oleh Kepala Teknik Tambang



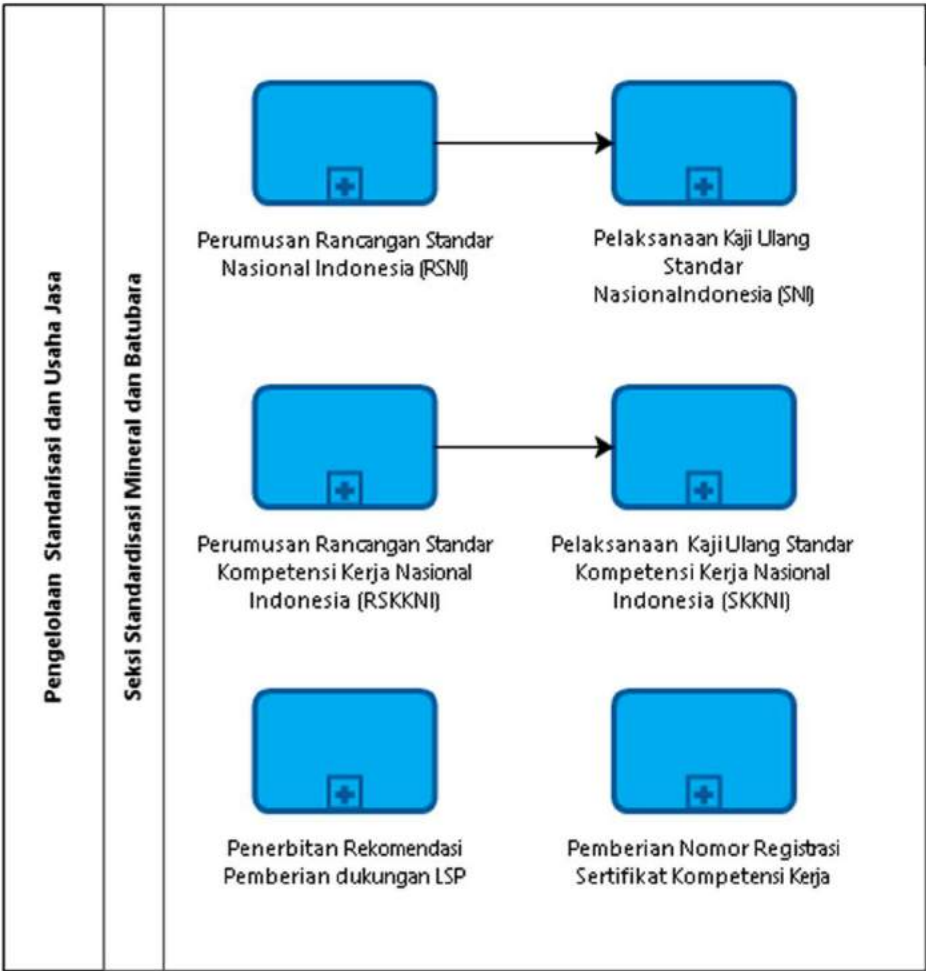
Keselamatan Pertambangan Batubara - Pemrosesan Permohonan Izin Penggunaan Bahan Peledak (Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak)



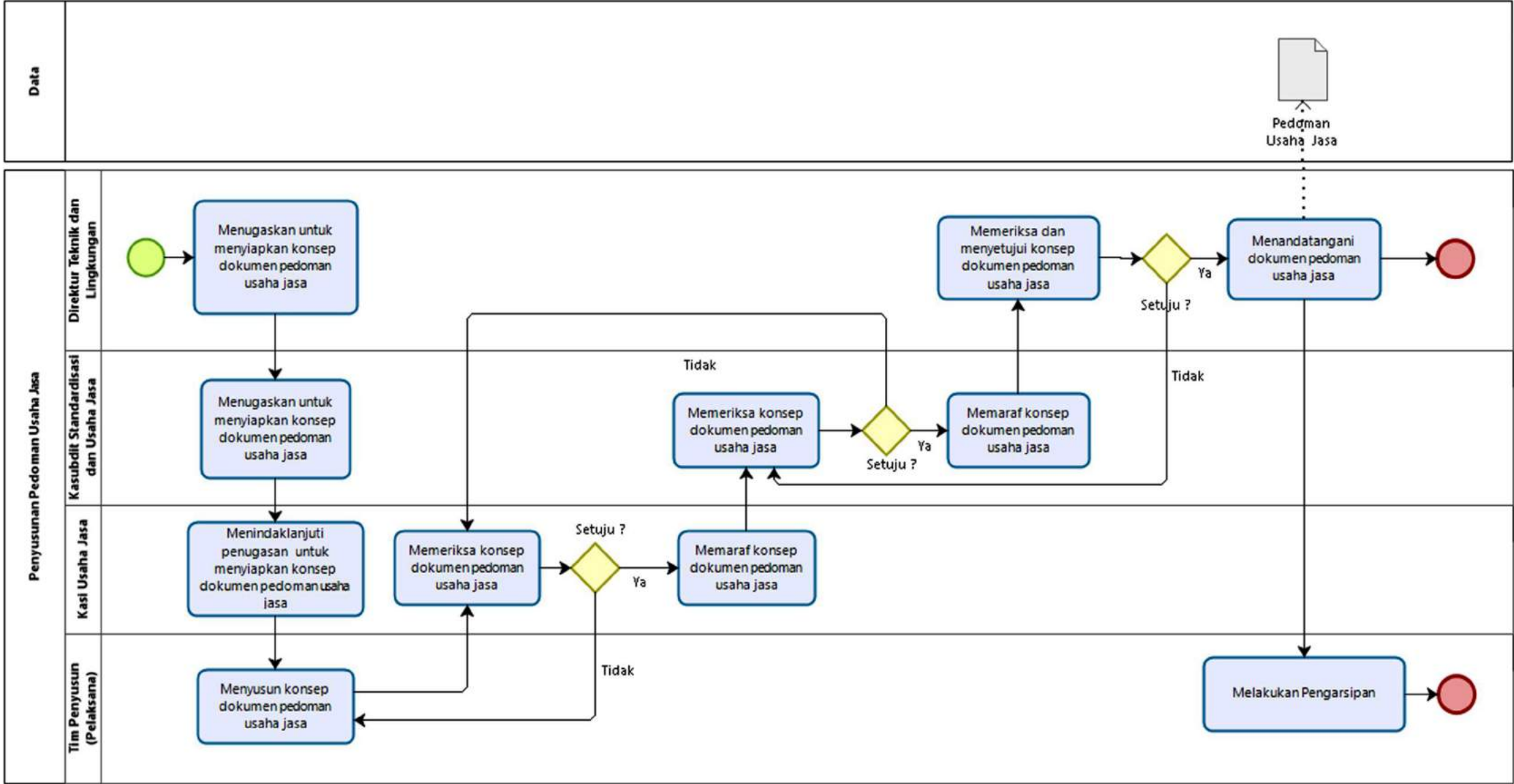
Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara (Pengelolaan Usaha Jasa Mineral dan Batubara)



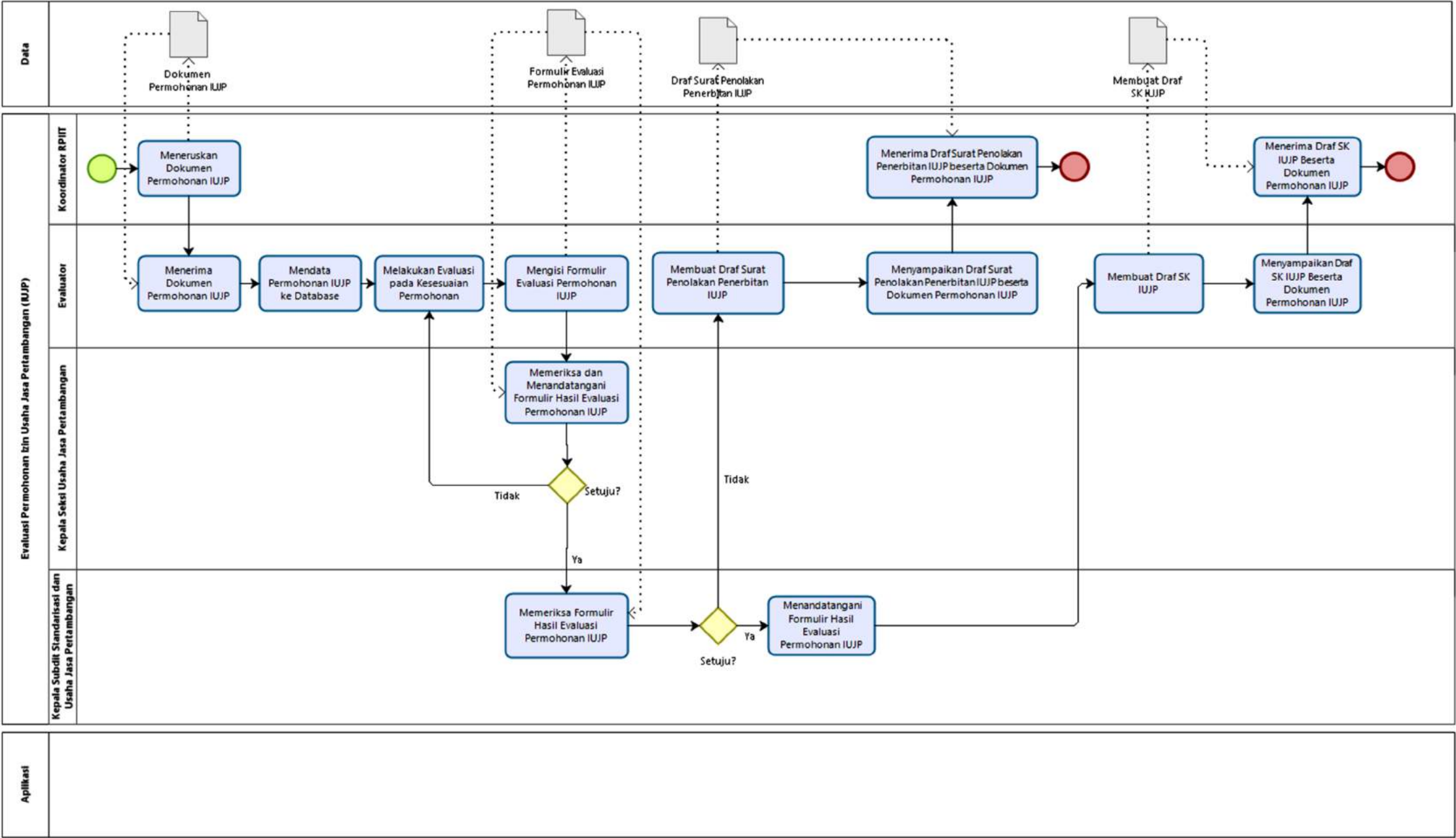
Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara (Pengelolaan Standarisasi Mineral dan Batubara)



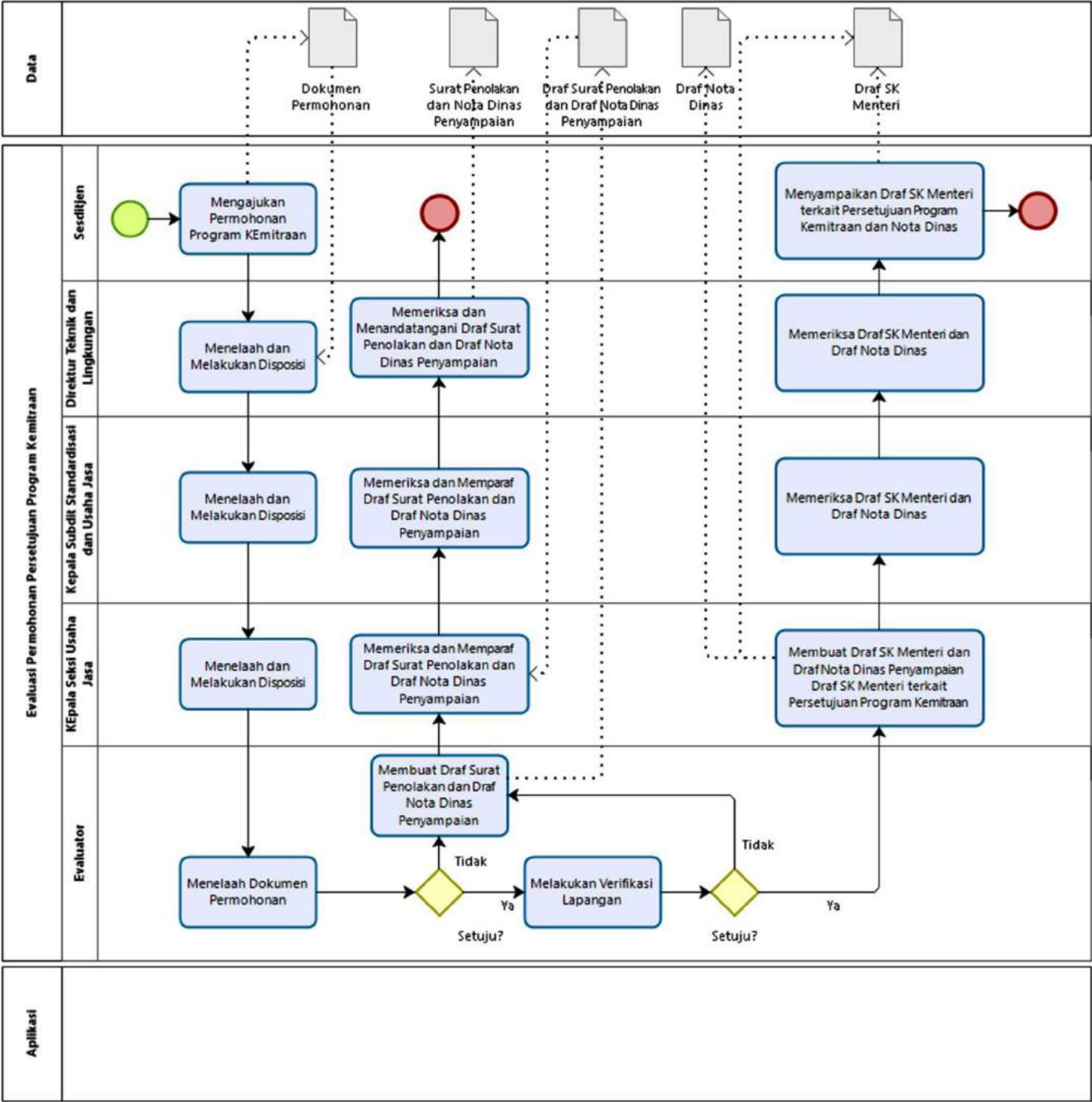
Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara - Penyusunan Pedoman



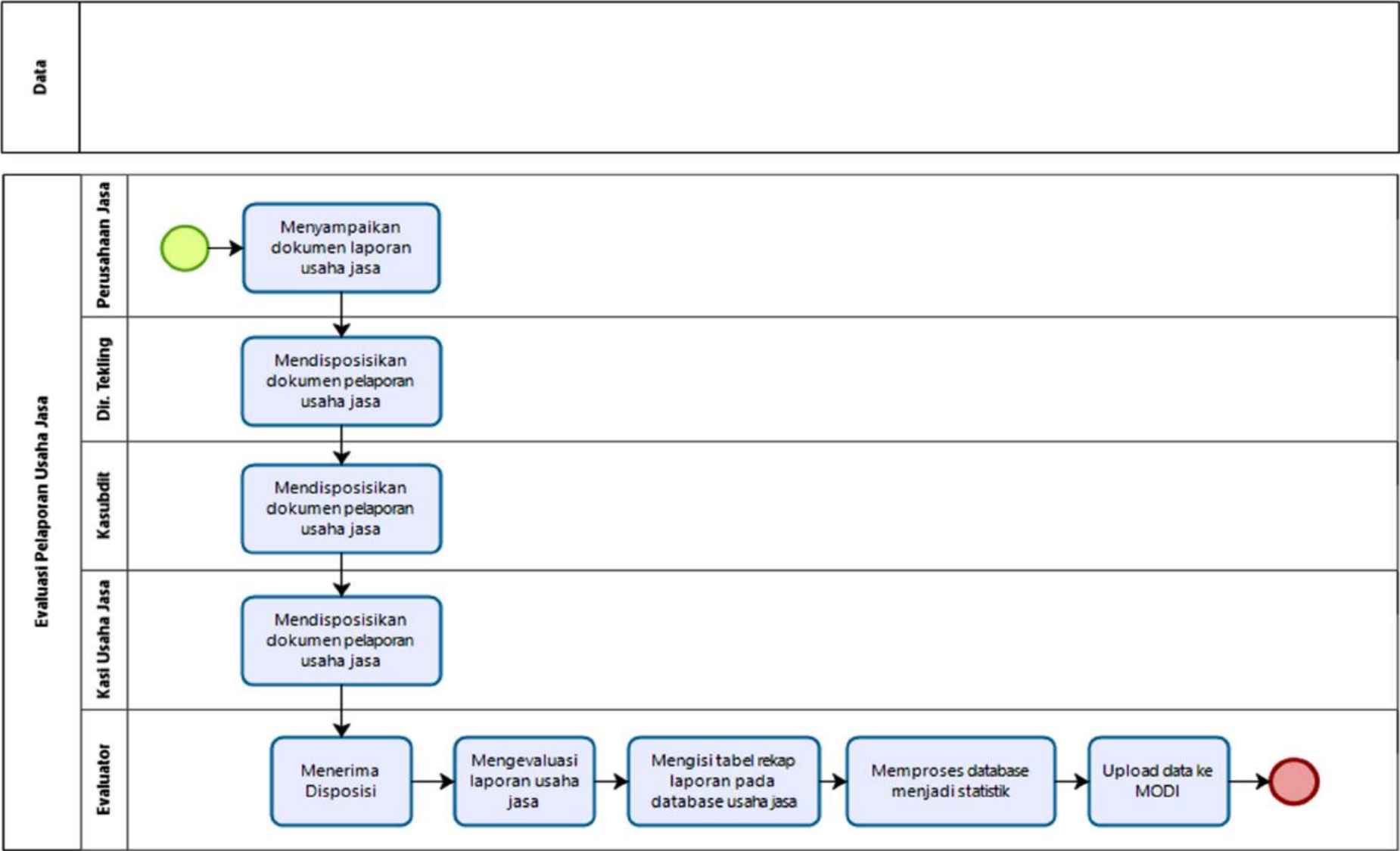
Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara – Evaluasi Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)



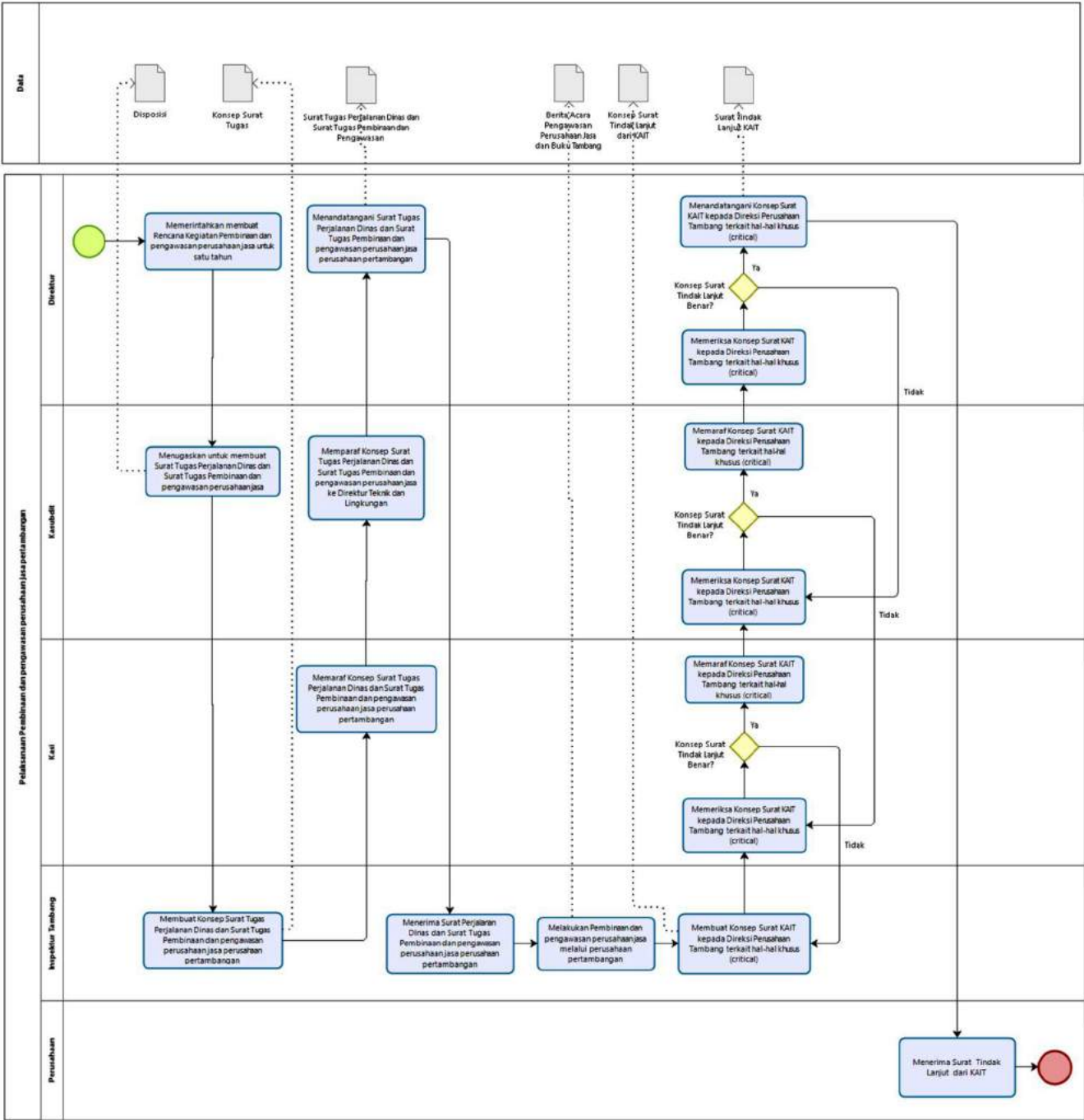
Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara – Evaluasi Persetujuan Program Kemitraan



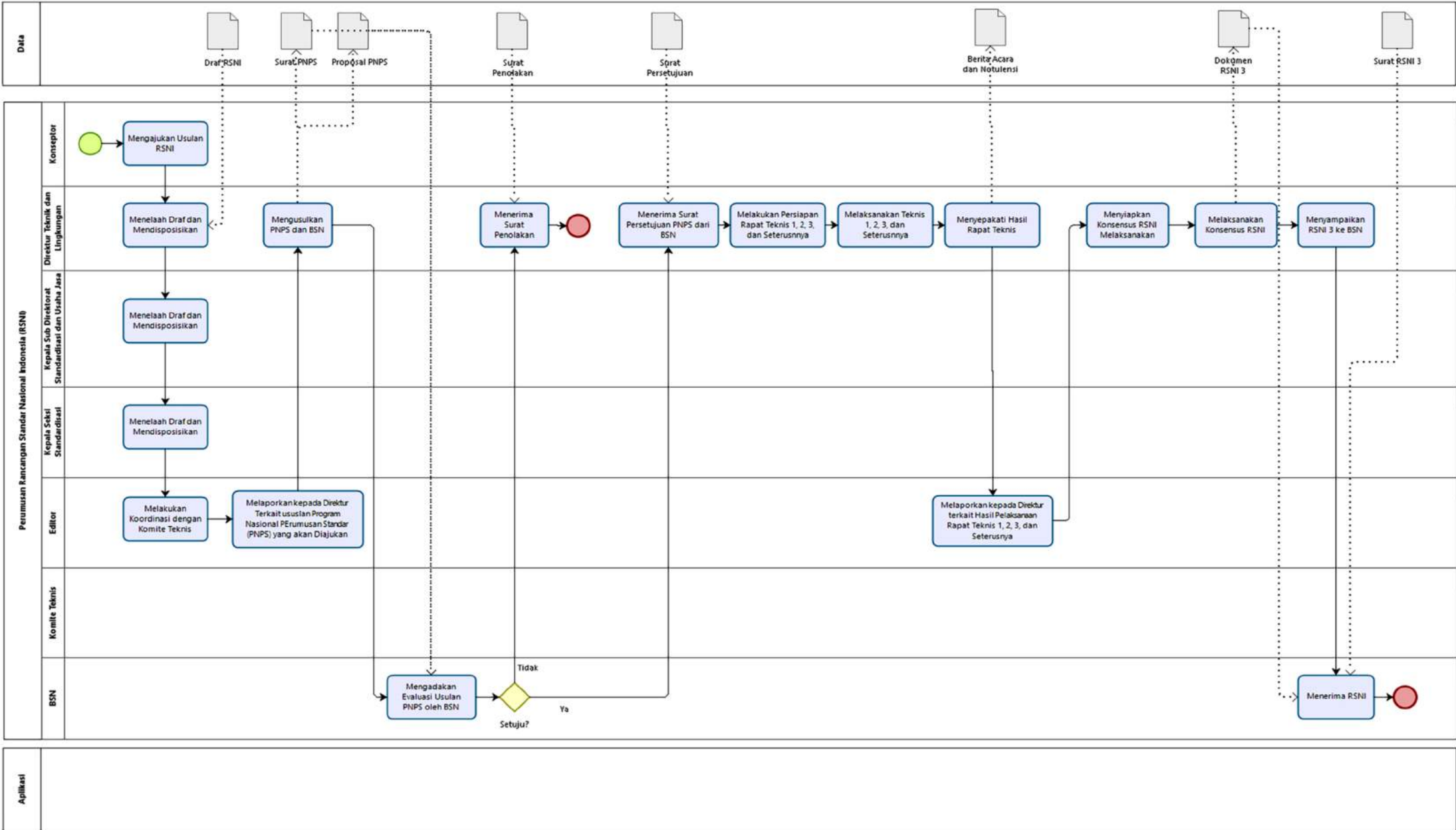
Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara – Evaluasi Pelaporan Usaha Jasa



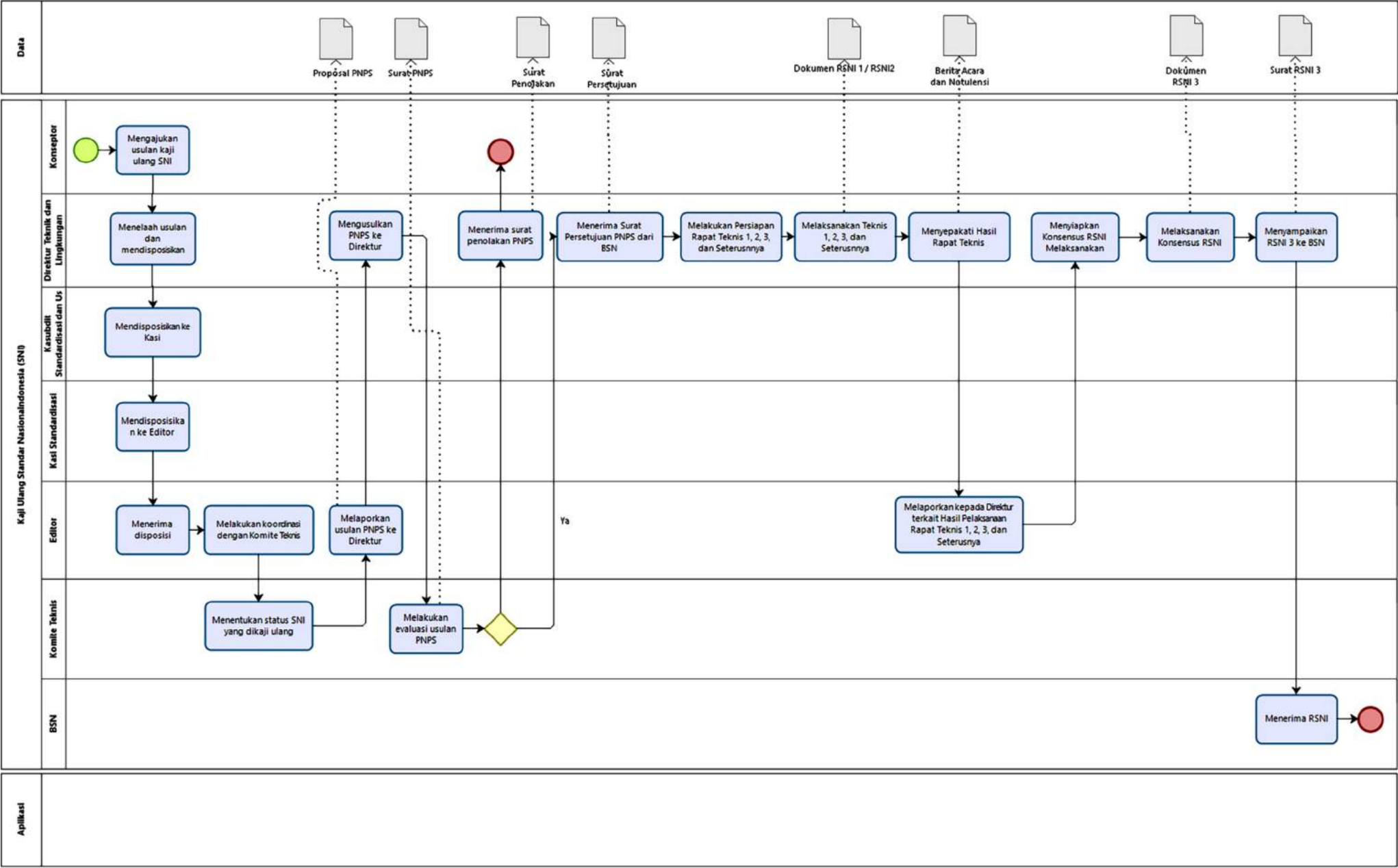
Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara – Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pada Perusahaan Jasa Pertambangan

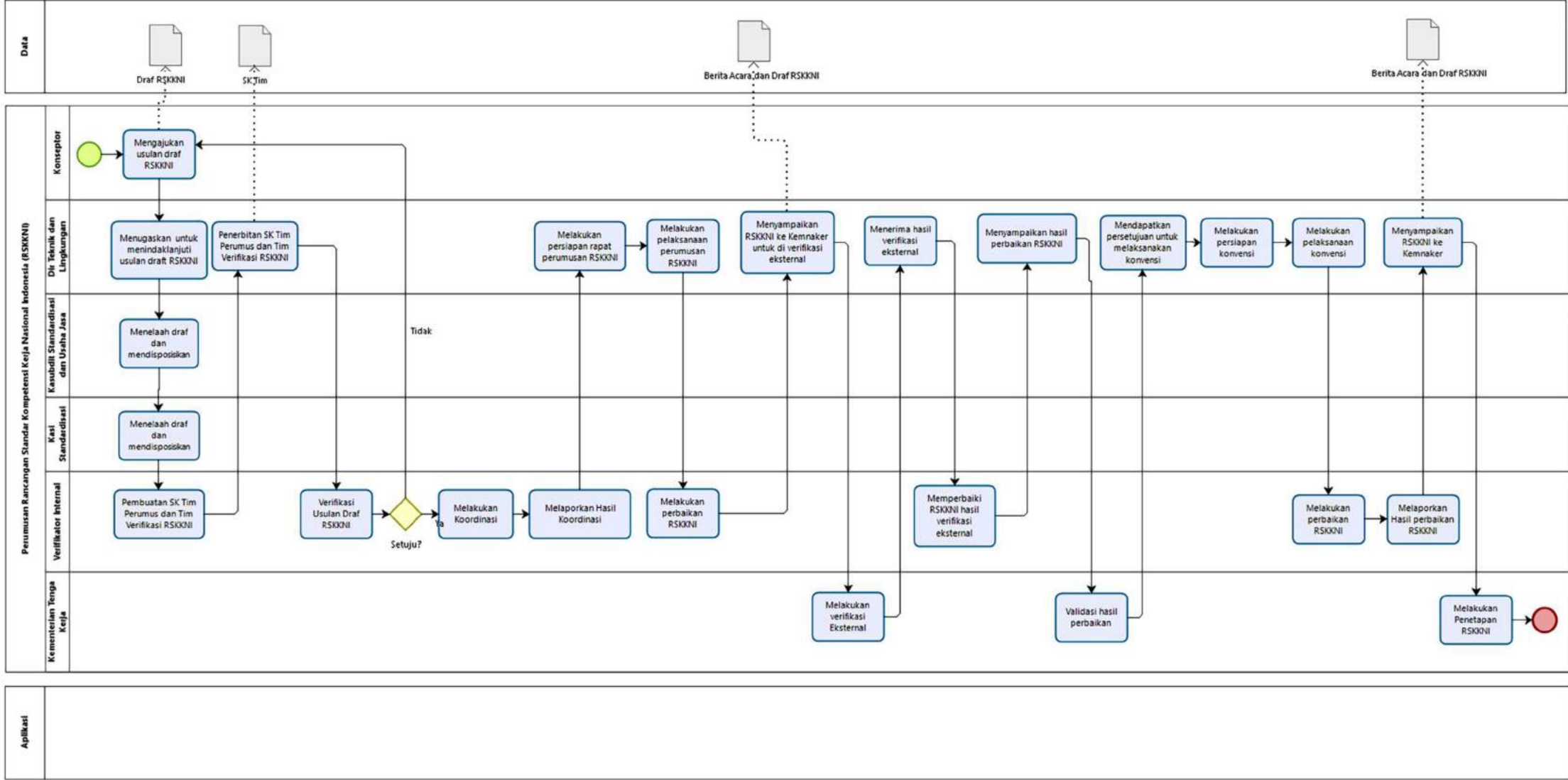


Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara – Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

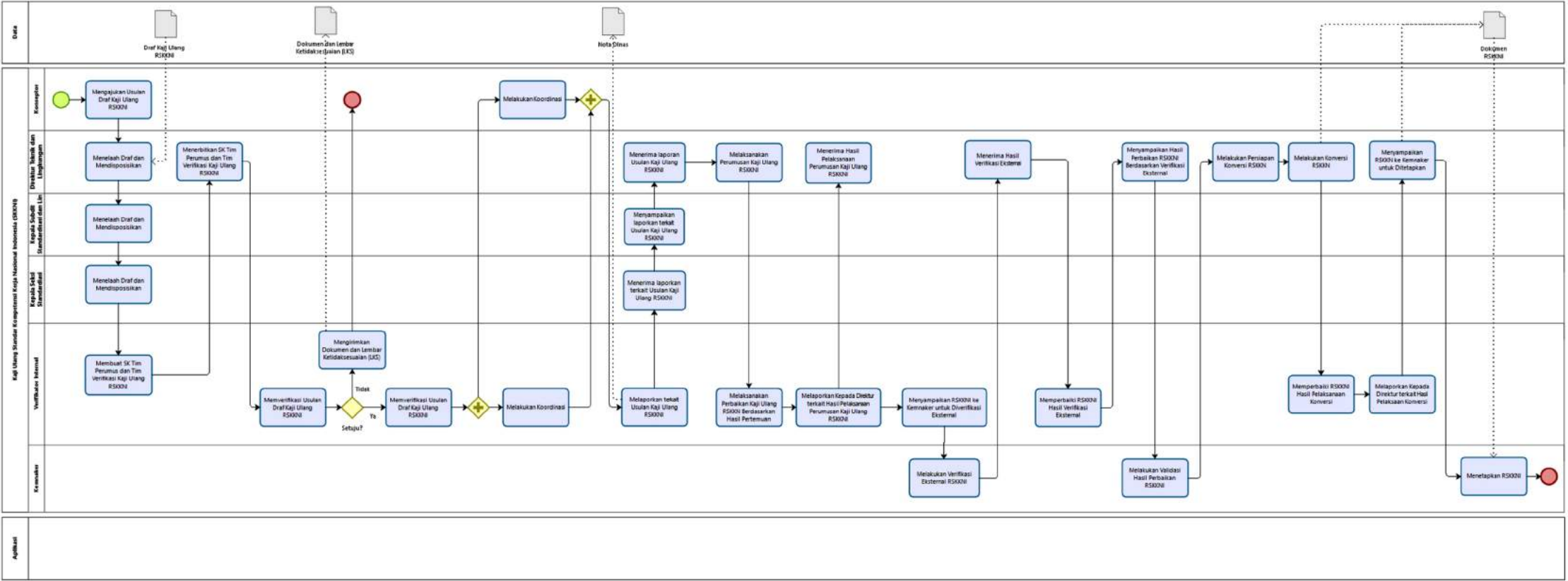


Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara – Pelaksanaan Kaji Ulang Standar NasionalIndonesia (SNI)

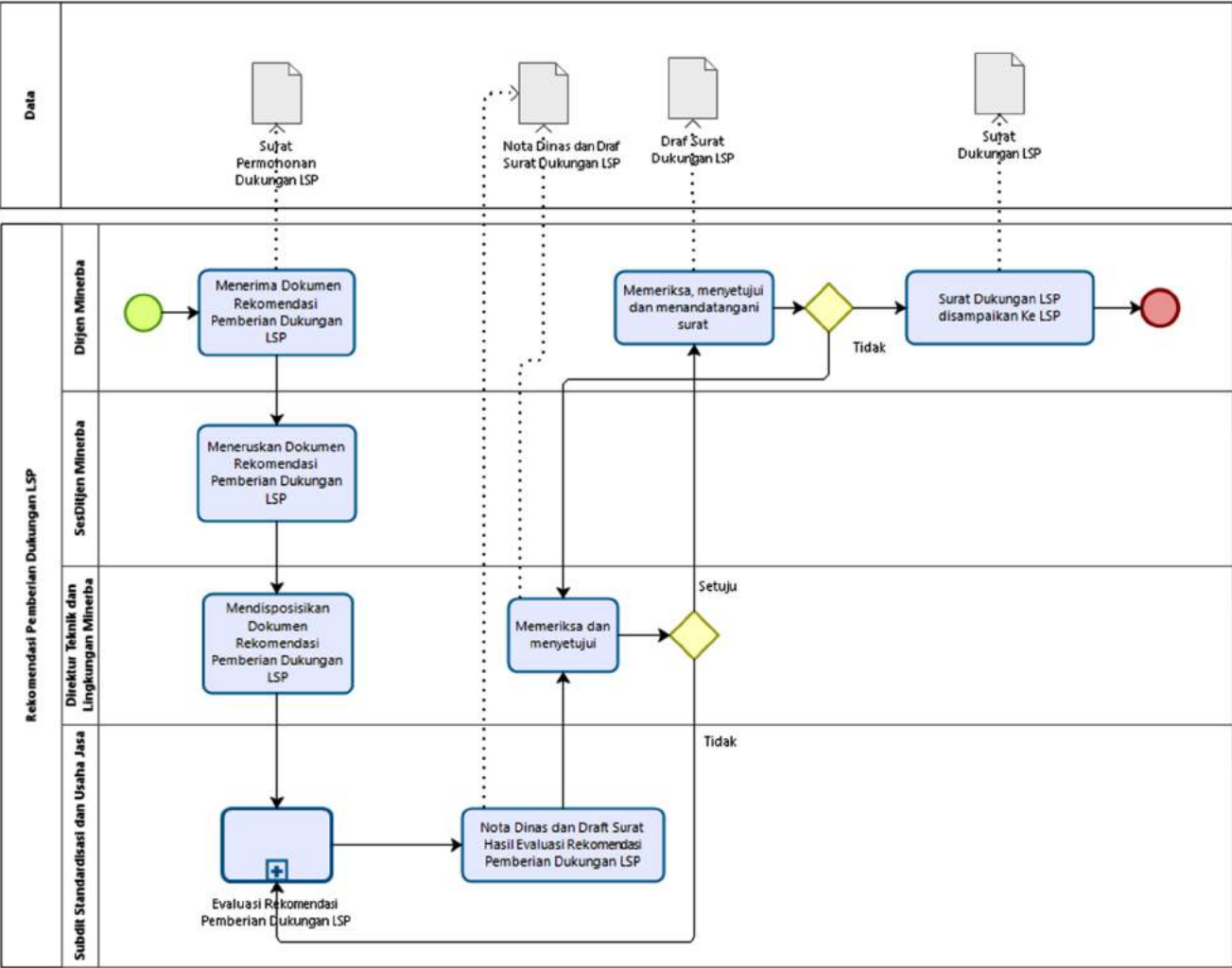




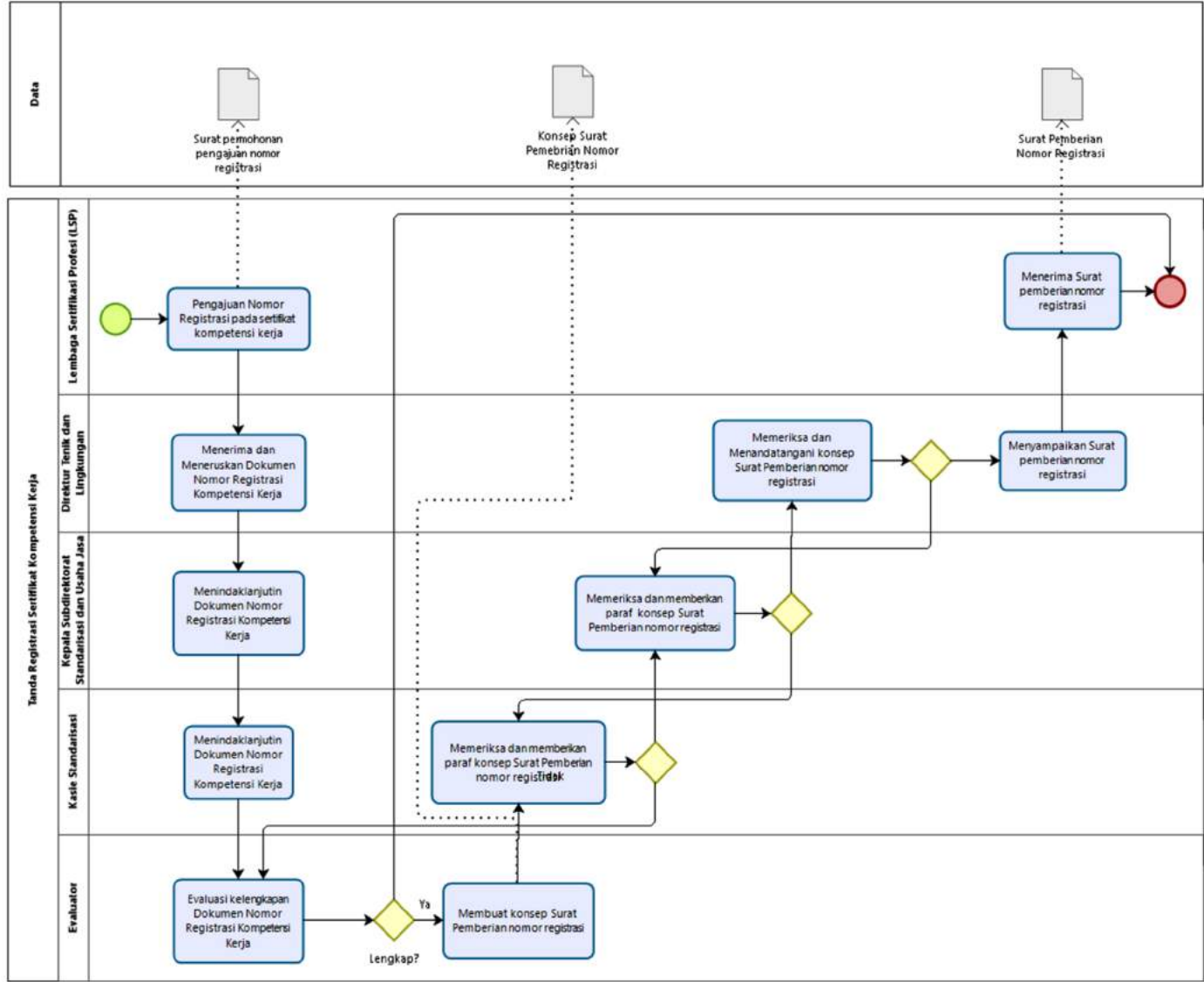
Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara – Pelaksanaan Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)



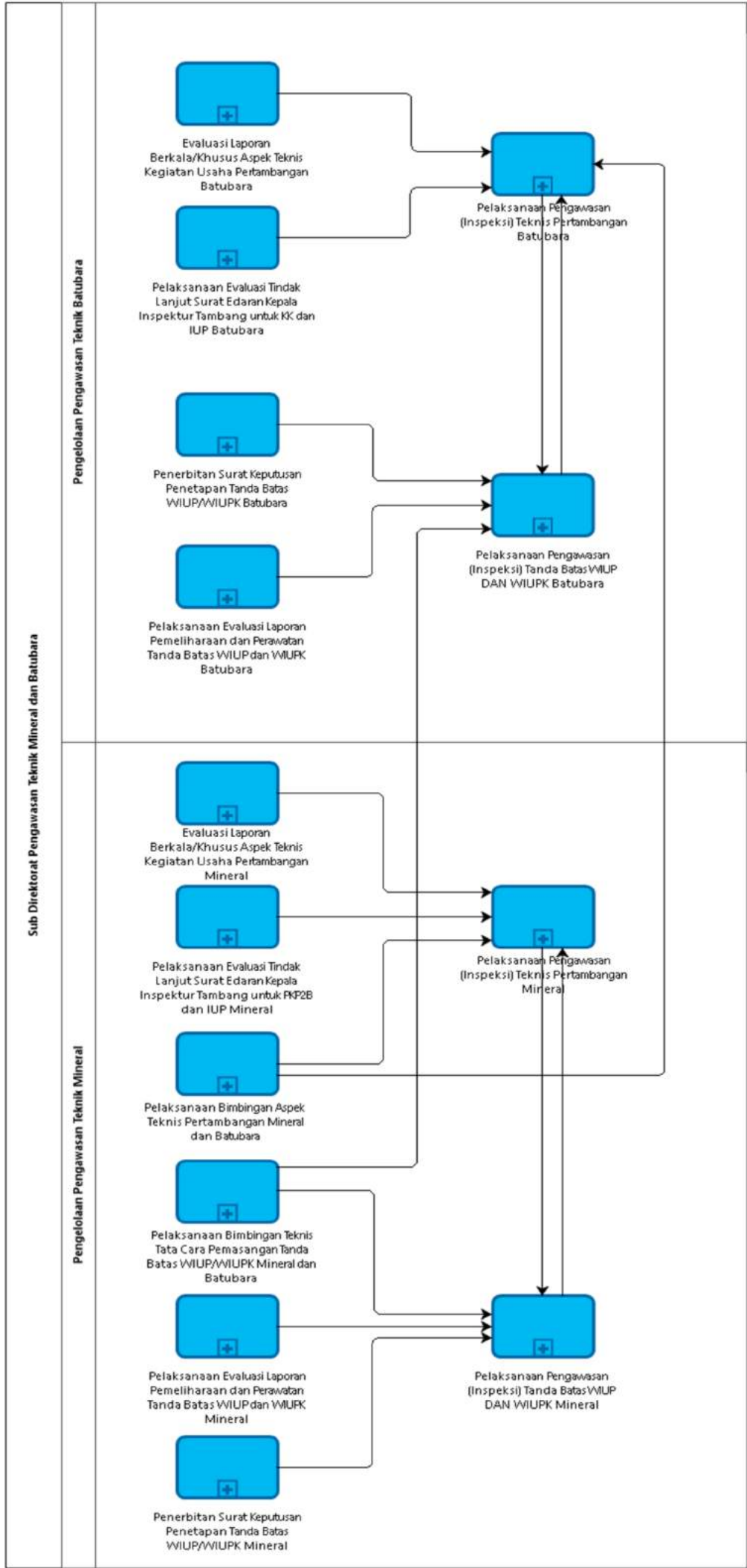
Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara – Penerbitan Rekomendasi Pemberian dukungan LSP



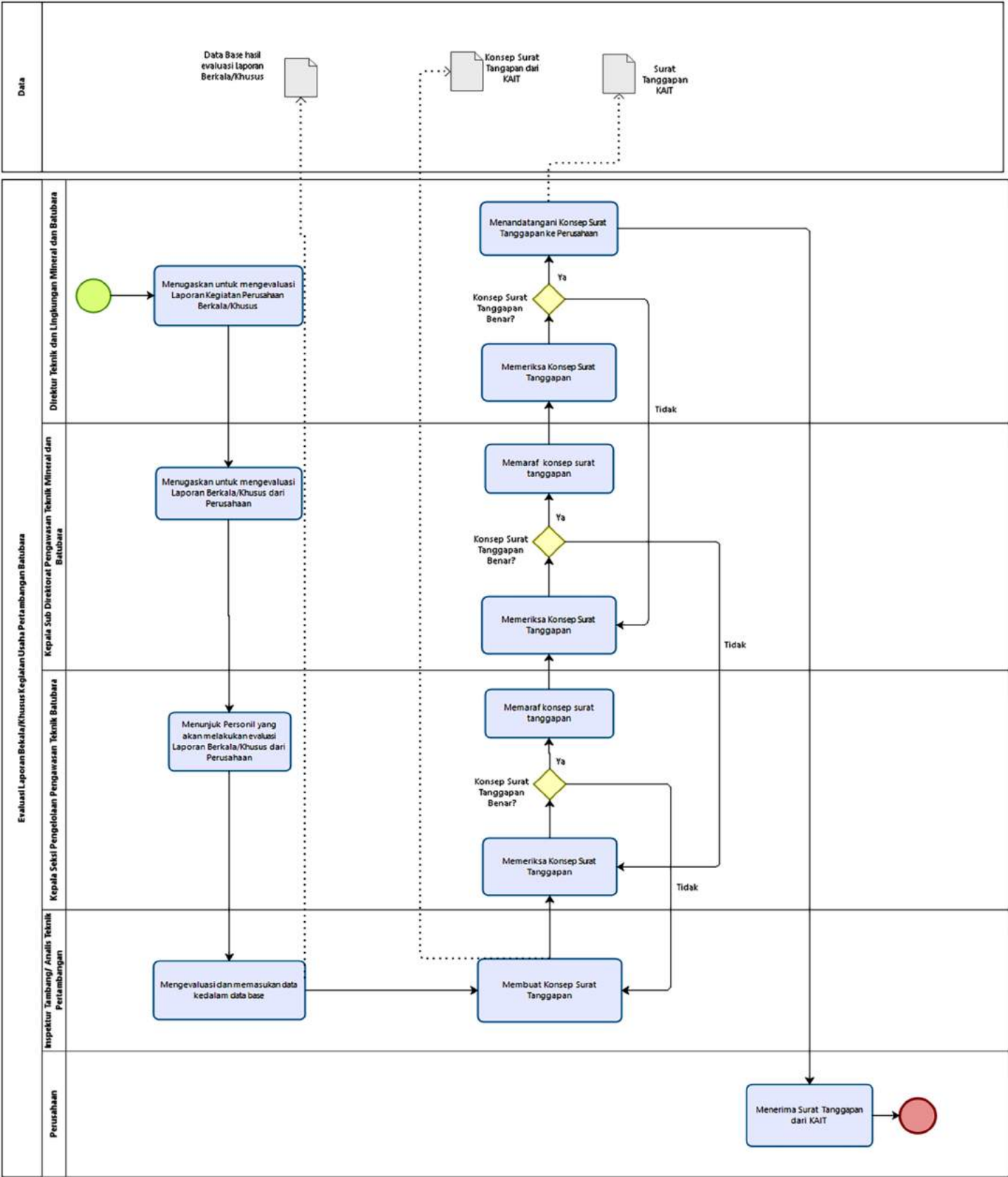
Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara - Pemberian Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja



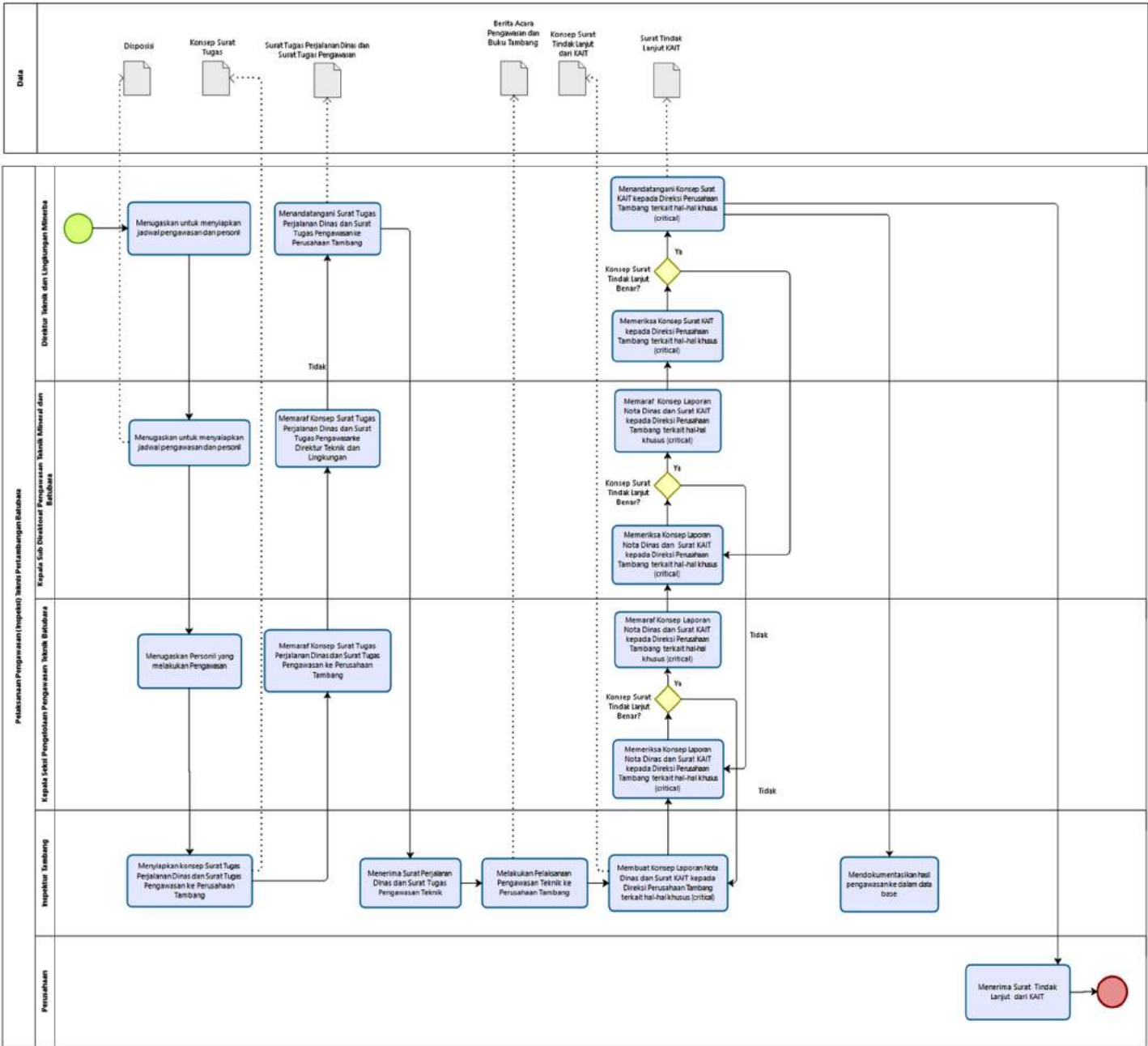
Pengelolaan Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara



Seksi Pengawasan Teknik Batubara - Evaluasi Laporan Berkala/Khusus Aspek Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

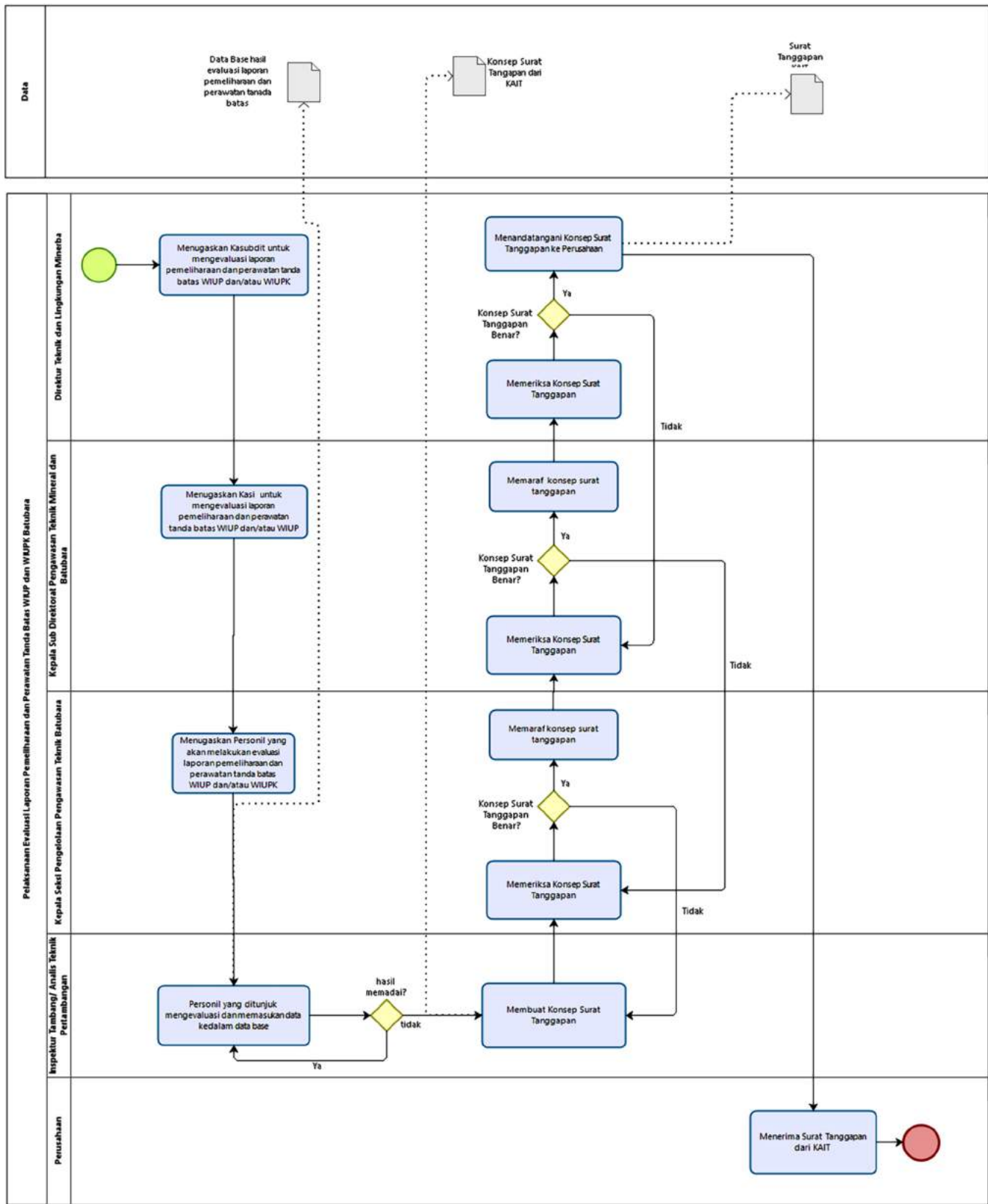


Seksi Pengawasan Teknik Batubara - Pelaksanaan Evaluasi Tindak Lanjut Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang untuk KK dan IUP Batubara

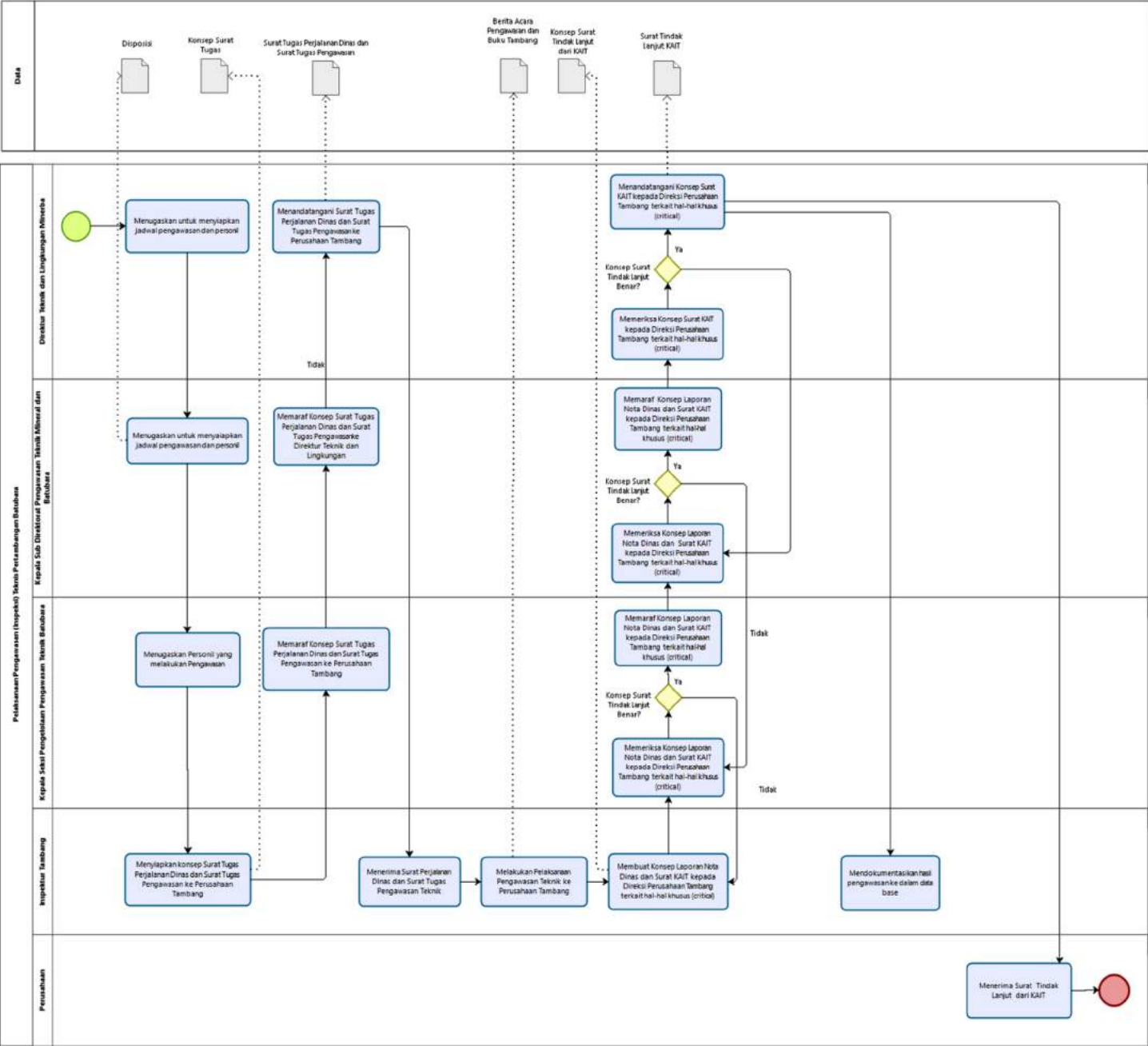




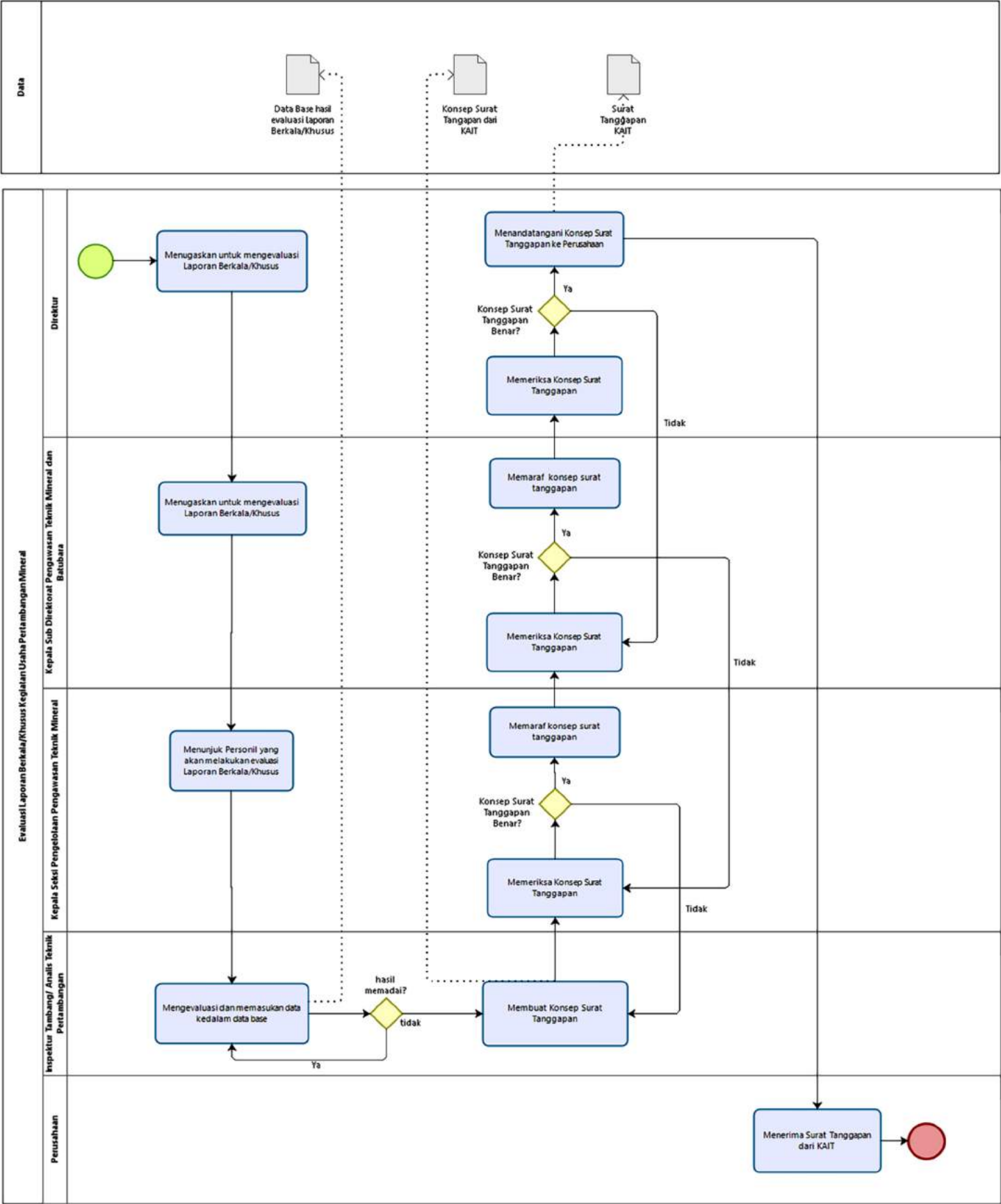
Seksi Pengawasan Teknik Batubara - Pelaksanaan Evaluasi Laporan Pemeliharaan dan Perawatan Tanda Batas WIUP dan WIUPK Batubara



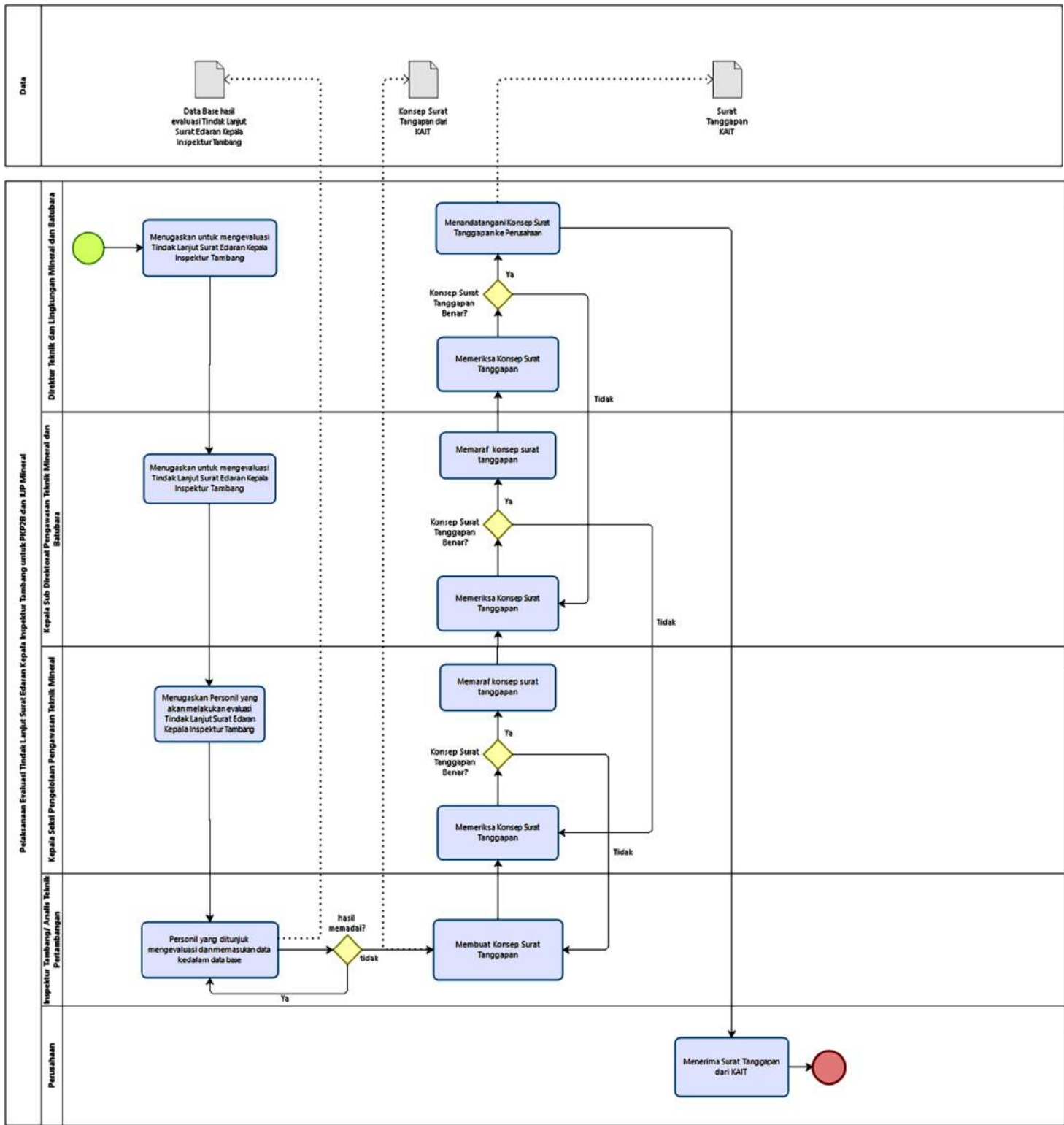
Seksi Pengawasan Teknik Batubara - Pelaksanaan Pengawasan (Inspeksi) Tanda Batas WIUP DAN WIUPK Batubara



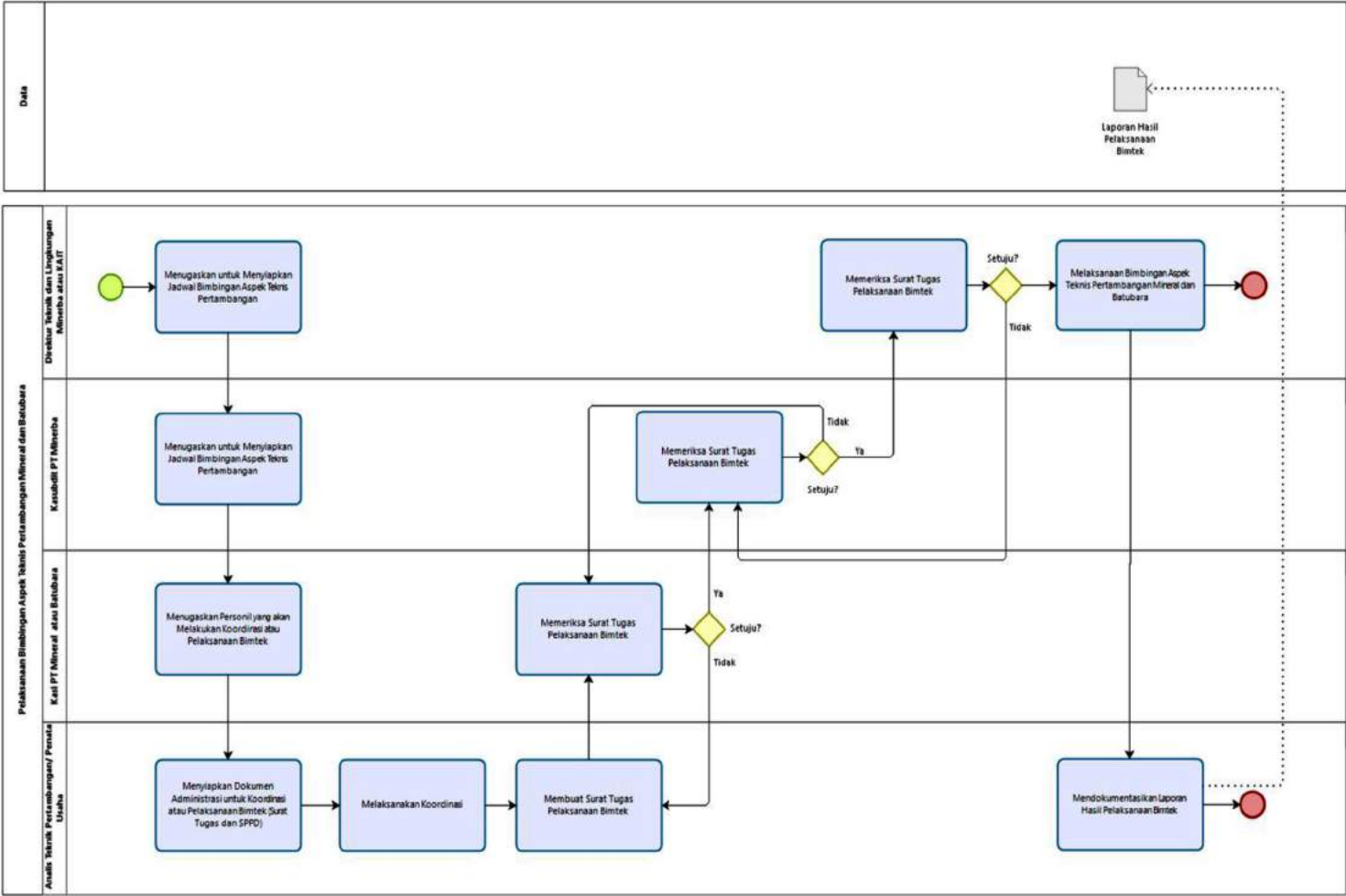
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Evaluasi Laporan Berkala/Khusus Aspek Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral



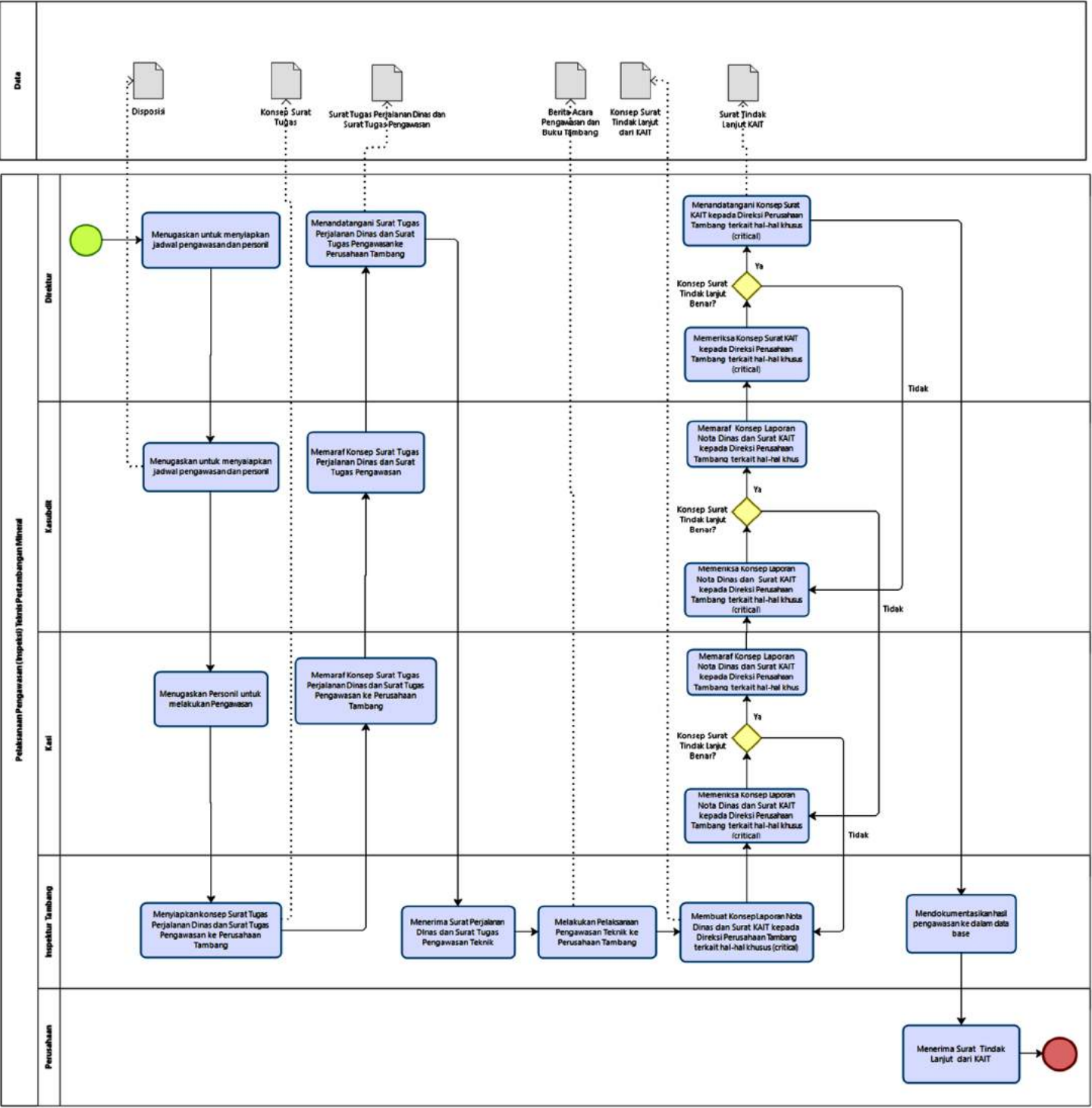
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Pelaksanaan Evaluasi Tindak Lanjut Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang untuk PKP2B dan IUP Mineral



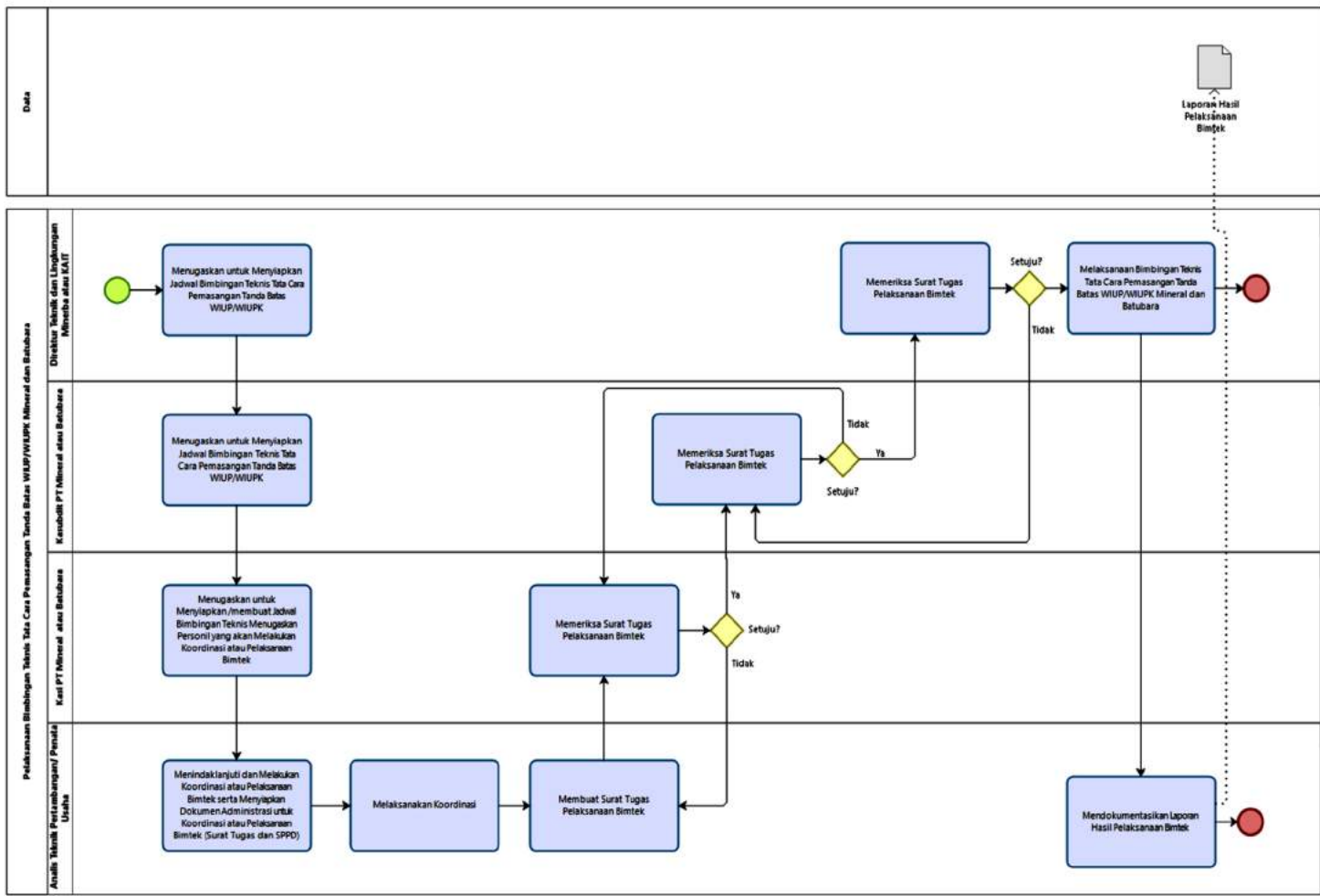
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Pelaksanaan Bimbingan Aspek Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara



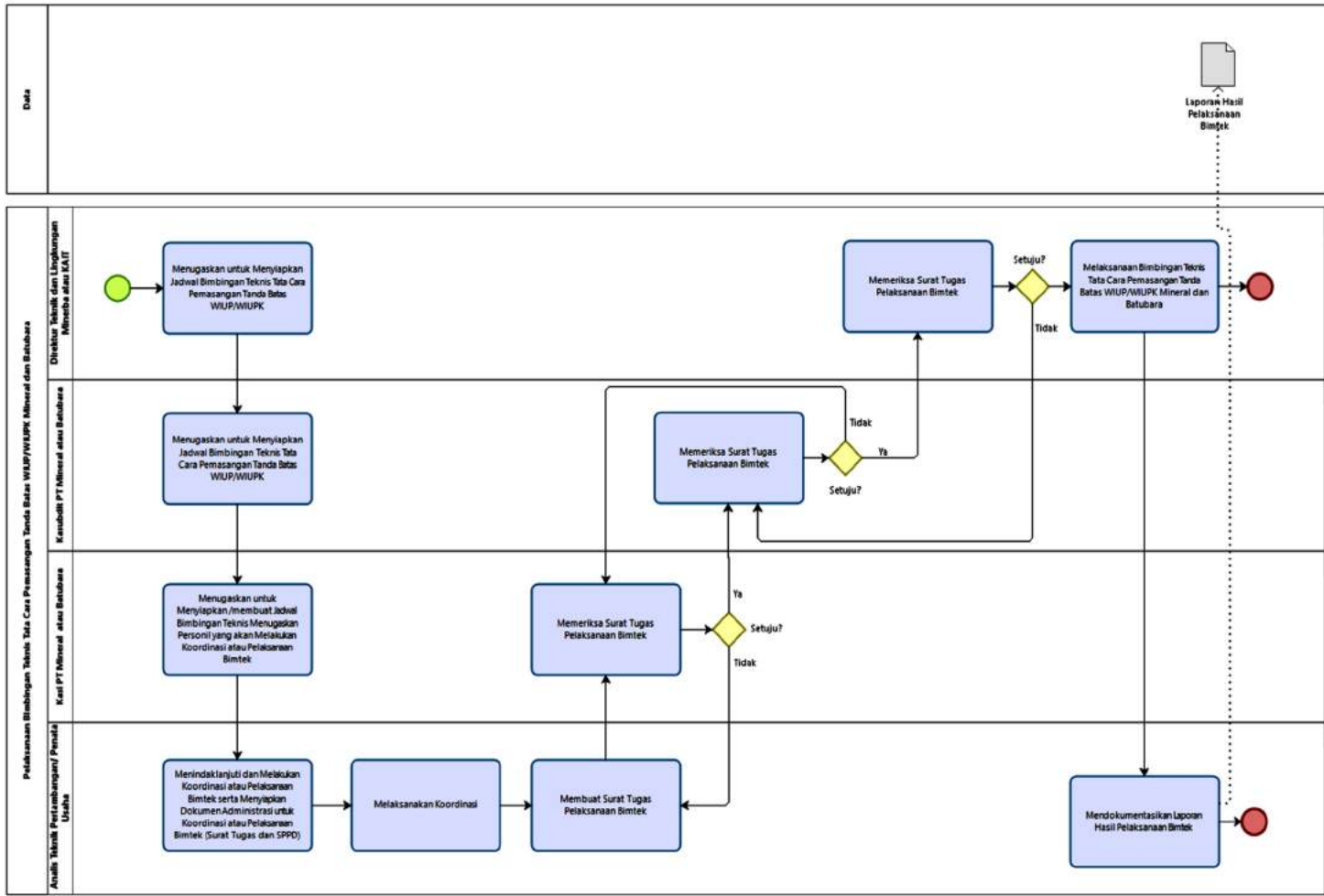
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Pelaksanaan Pengawasan (Inspeksi) Teknis Pertambangan Mineral



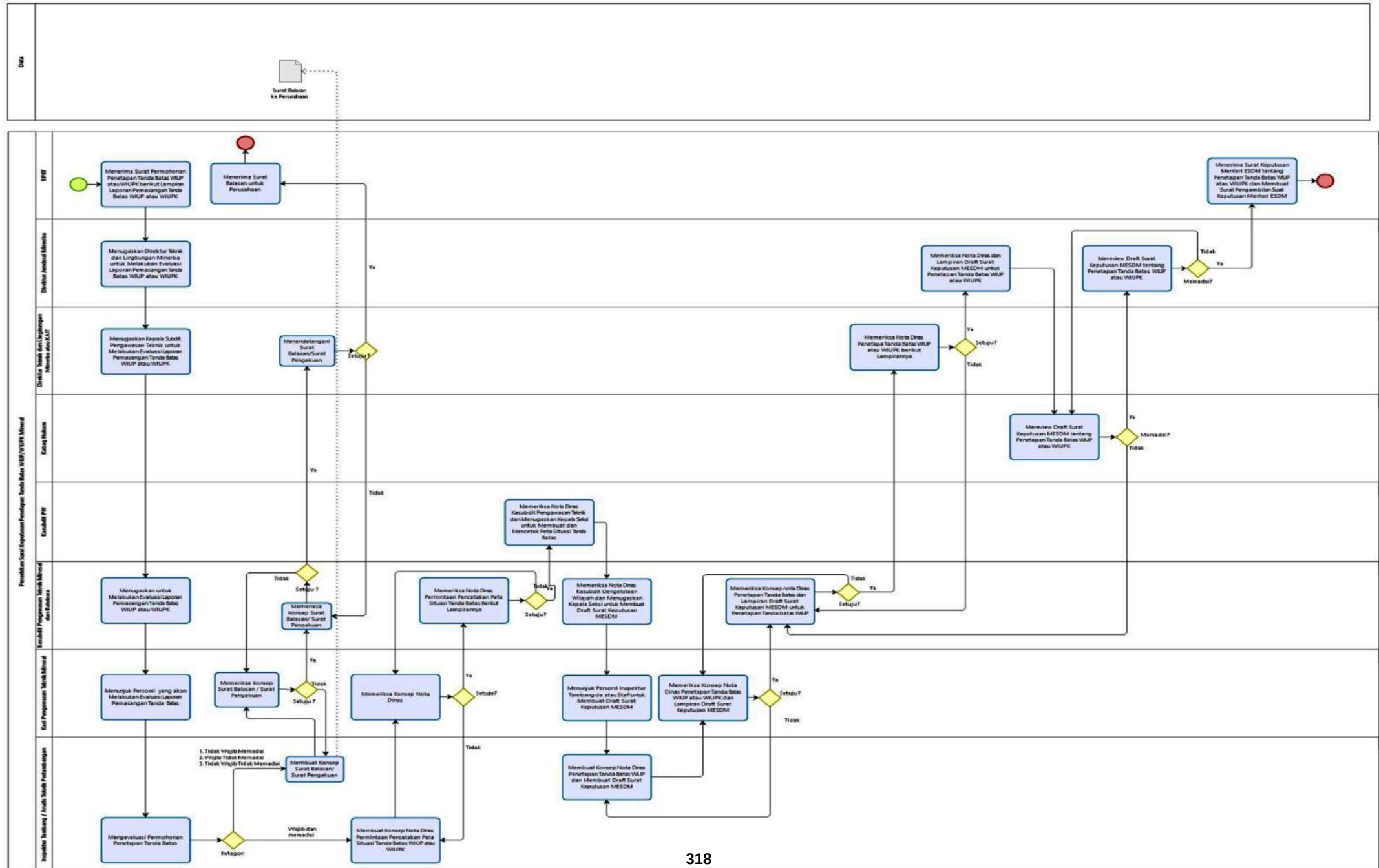
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK Mineral dan Batubara



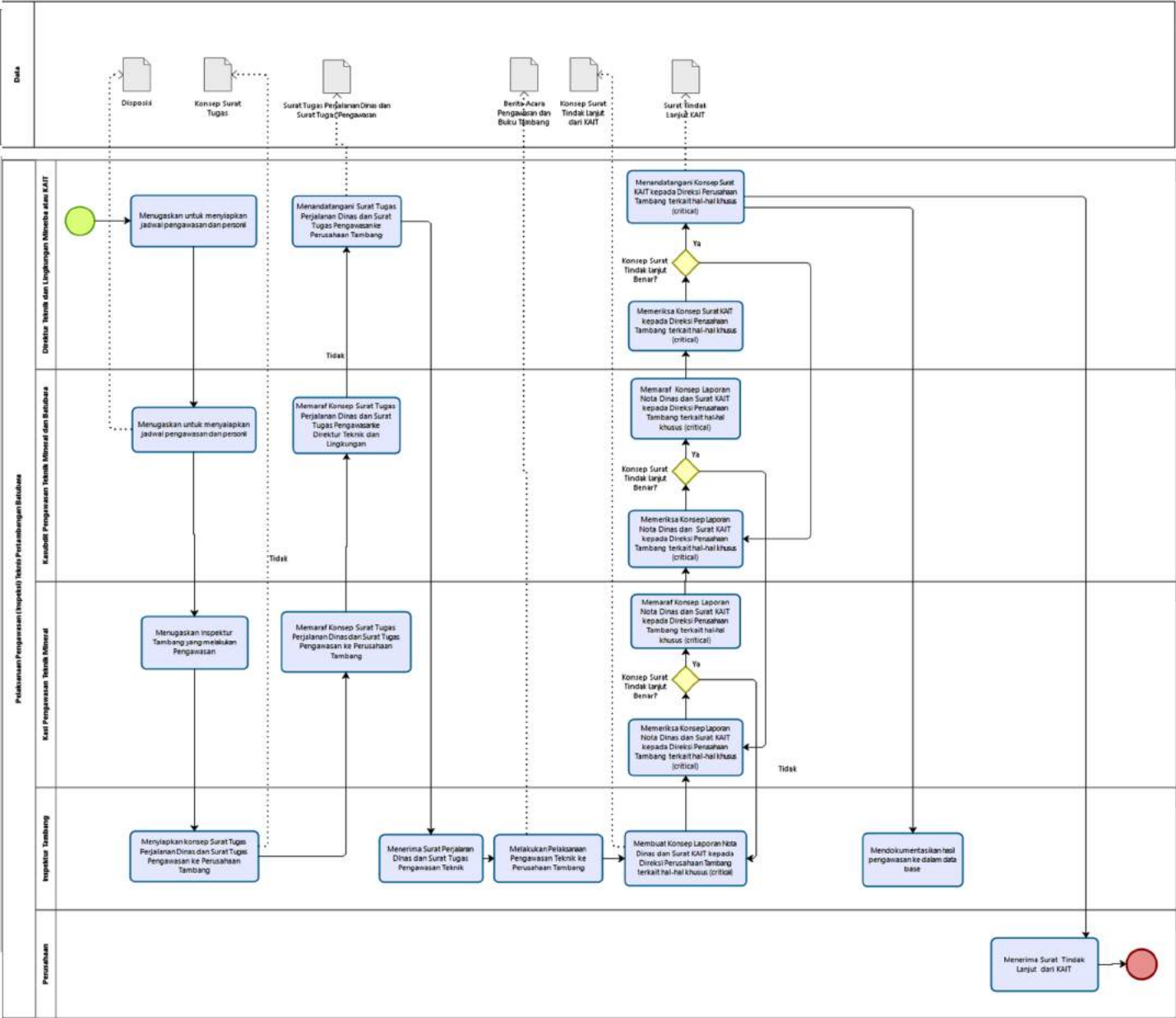
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK Mineral dan Batubara



Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP/WIUPK Mineral



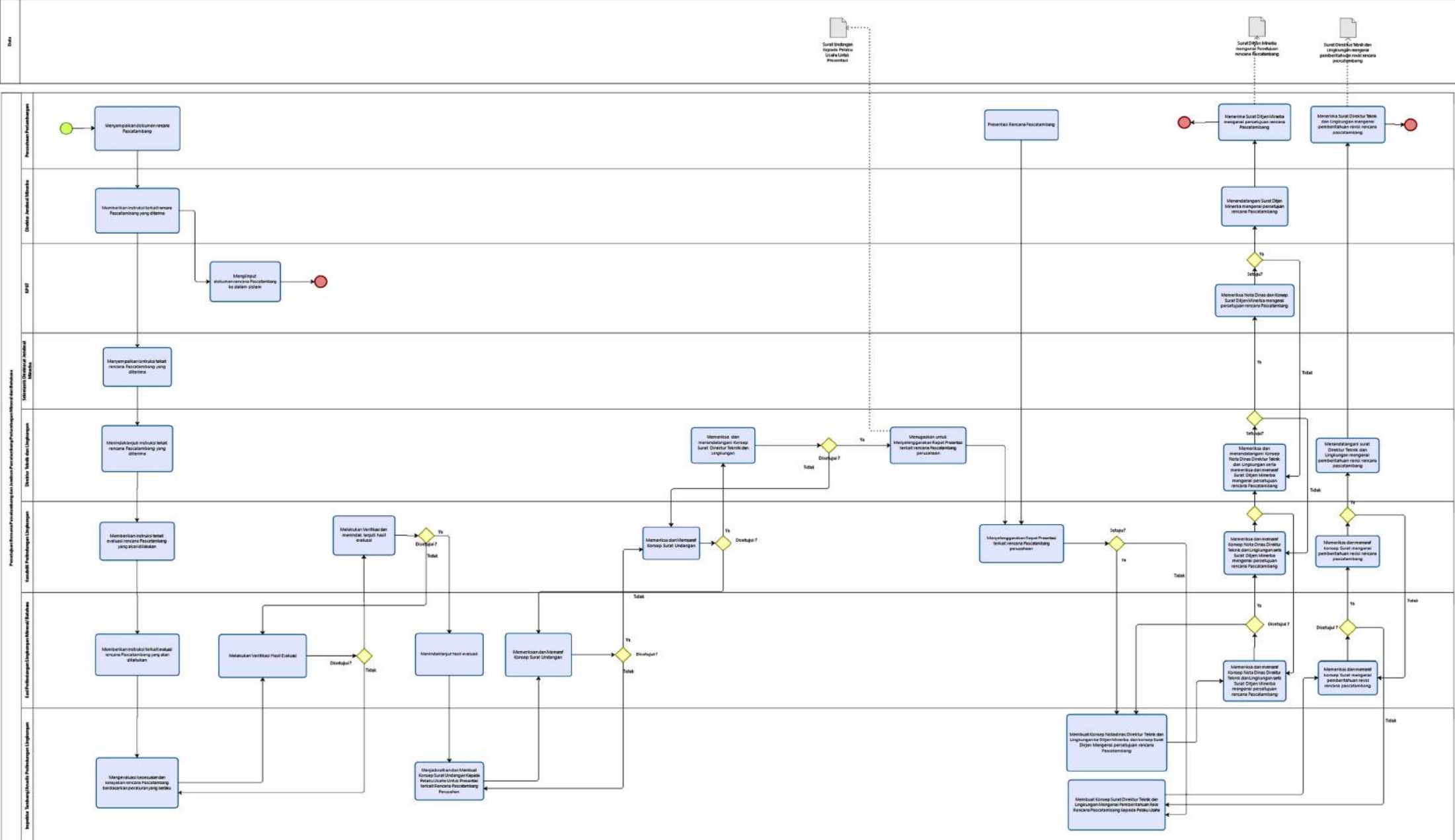
Seksi Pengawasan Teknik Mineral - Pelaksanaan Pengawasan (Inspeksi) Tanda Batas WIUP dan WIUPK Mineral



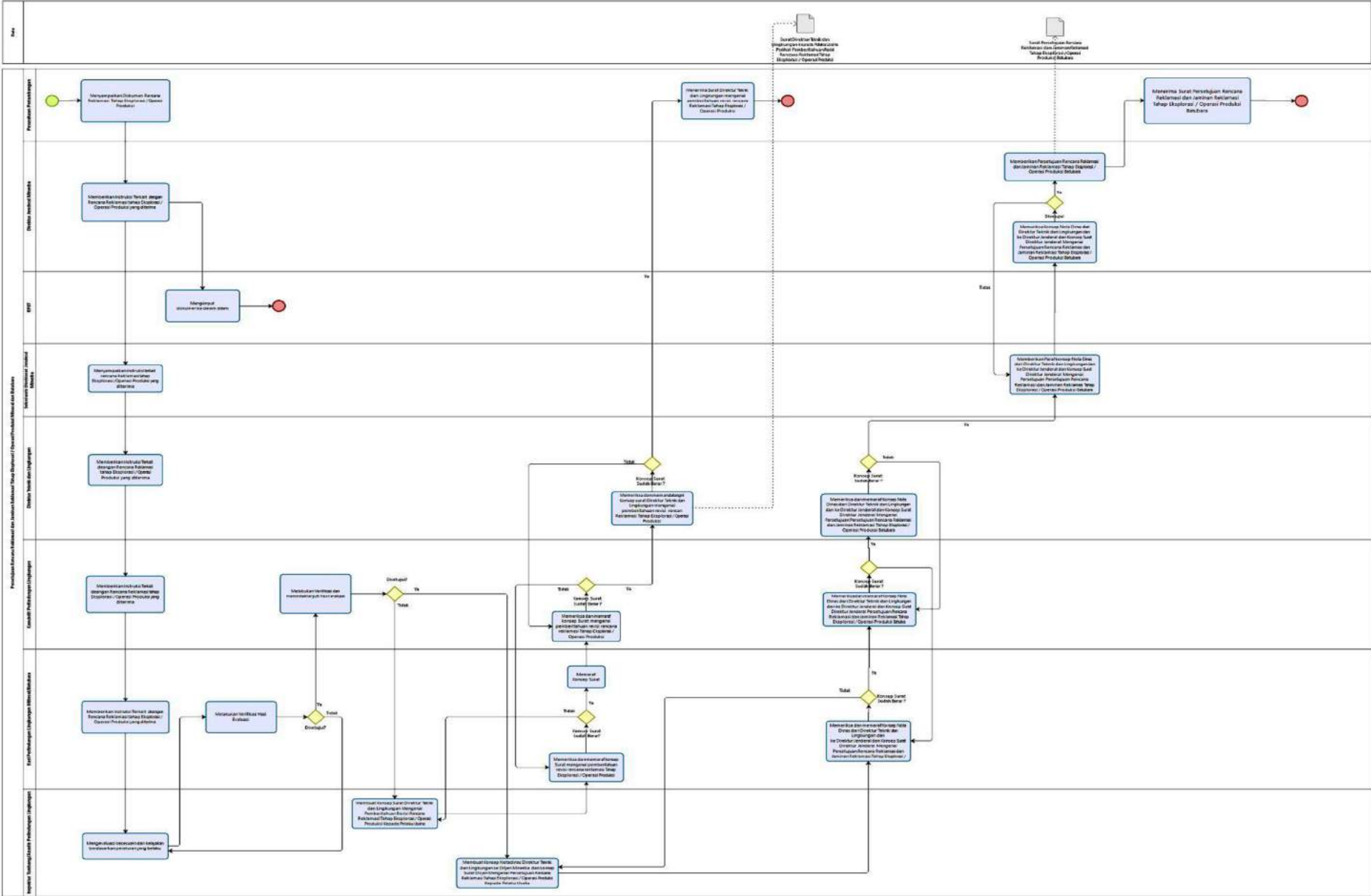
Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara

Perlindungan Lingkungan Mineral dan Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara	Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara		
		Persetujuan Rencana Pascatambang dan Jaminan Pascatambang Batubara	Persetujuan Rencana Reklamasi dan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi/ Operasi Produksi Batubara
			
		Persetujuan Pelepasan/ Pencairan Jaminan Pascatambang Batubara	Persetujuan Pelepasan/ Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi/ Operasi Produksi Batubara
Perlindungan Lingkungan Mineral dan Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral	Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral		
		Persetujuan Rencana Pascatambang dan Jaminan Pascatambang Lingkungan Mineral	Persetujuan Rencana Reklamasi dan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi/ Operasi Produksi Lingkungan Mineral
			
		Persetujuan Pelepasan/ Pencairan Jaminan Pascatambang Lingkungan Mineral	Persetujuan Pelepasan/ Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi/ Operasi Produksi Lingkungan Mineral

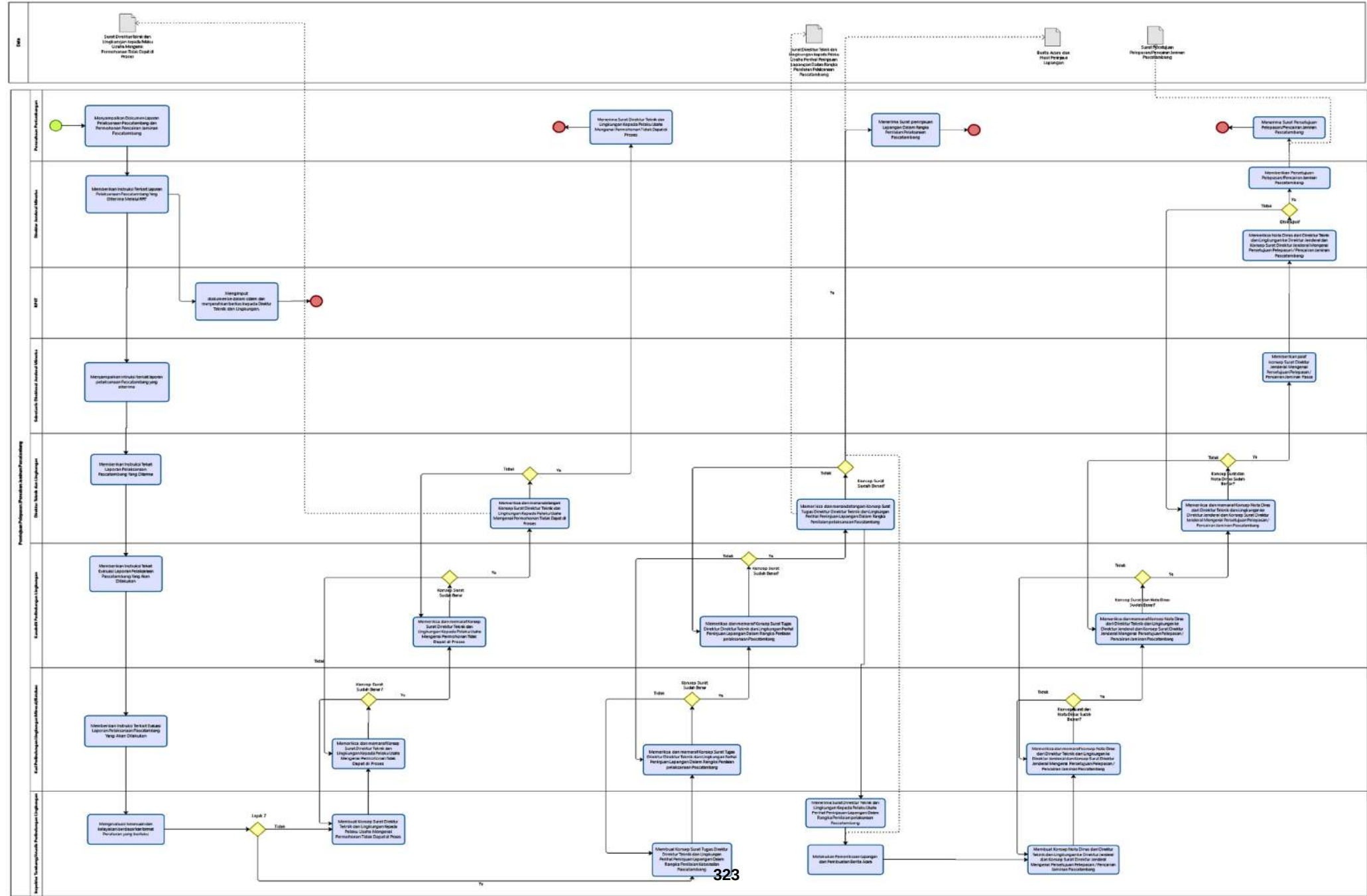
Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara - Persetujuan Rencana Pascatambang dan Jaminan Pascatambang Batubara



Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara - Persetujuan Rencana Reklamasi dan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi / Operasi Produksi Batubara

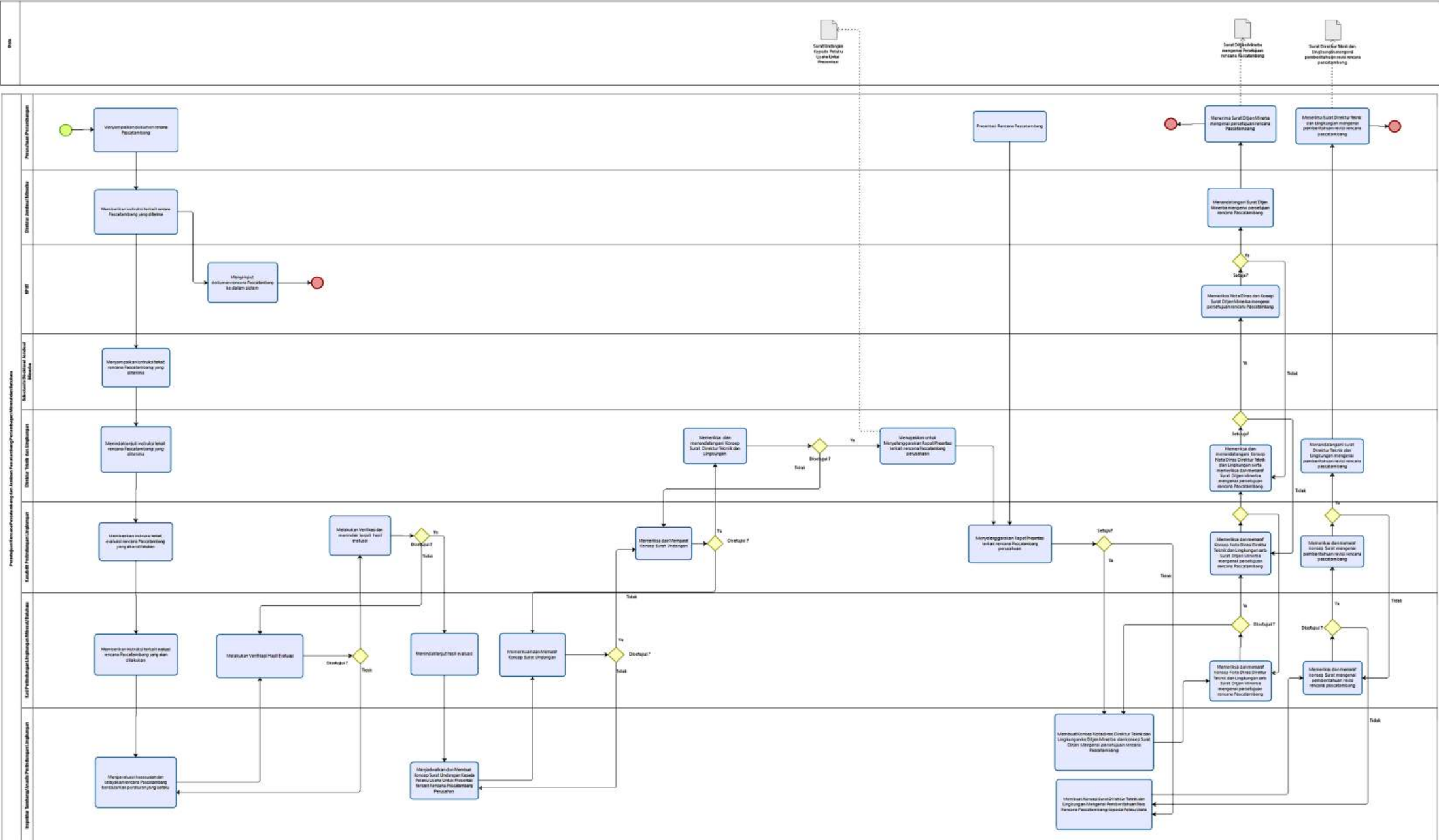


Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara - Persetujuan Pelepasan/ Pencairan Jaminan Pascatambang Batubara

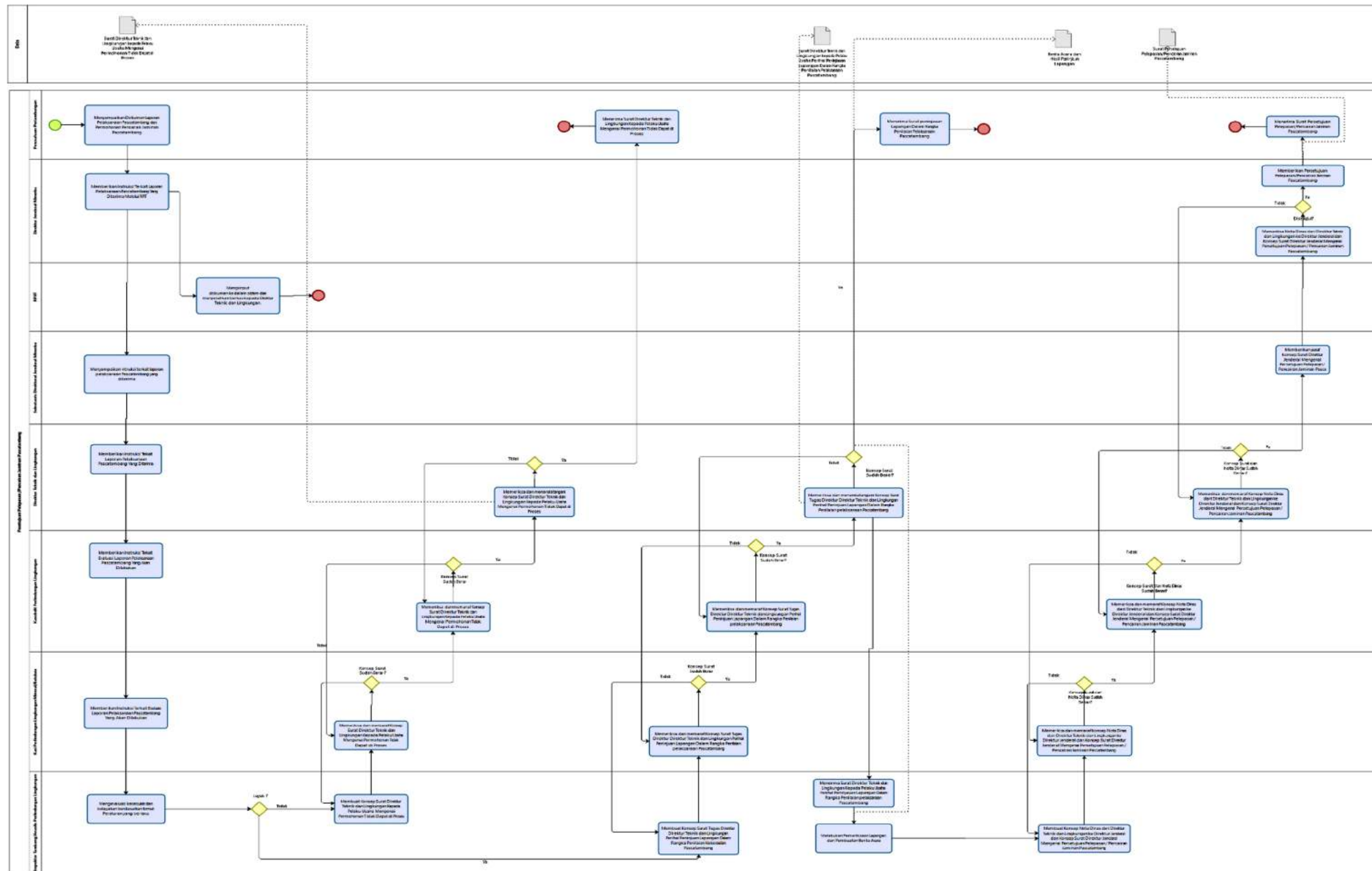


[illegible]

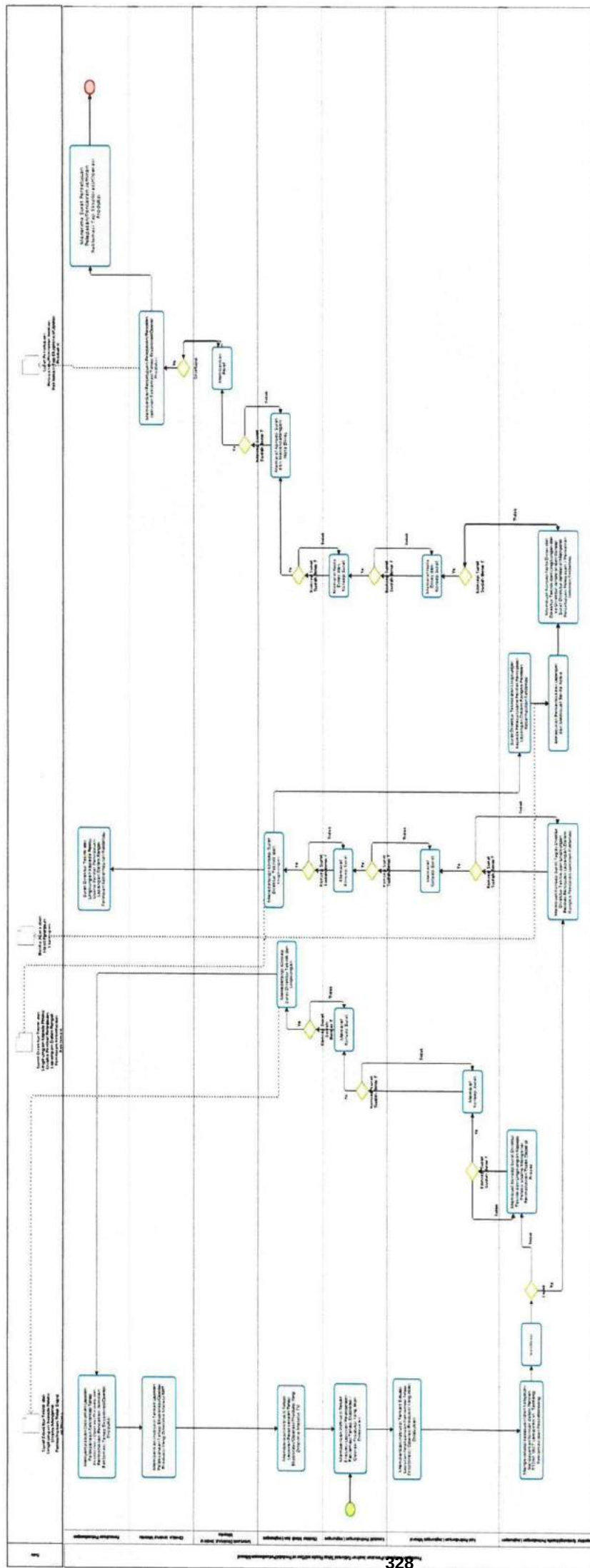
Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral - Persetujuan Rencana Pascatambang dan Jaminan Pascatambang Lingkungan Mineral



Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral - Persetujuan Pelepasan/ Pencairan Jaminan Pascatambang Lingkungan Mineral



Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral - Persetujuan Pelepasan/Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi/ Operasi Produksi Lingkungan Mineral



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

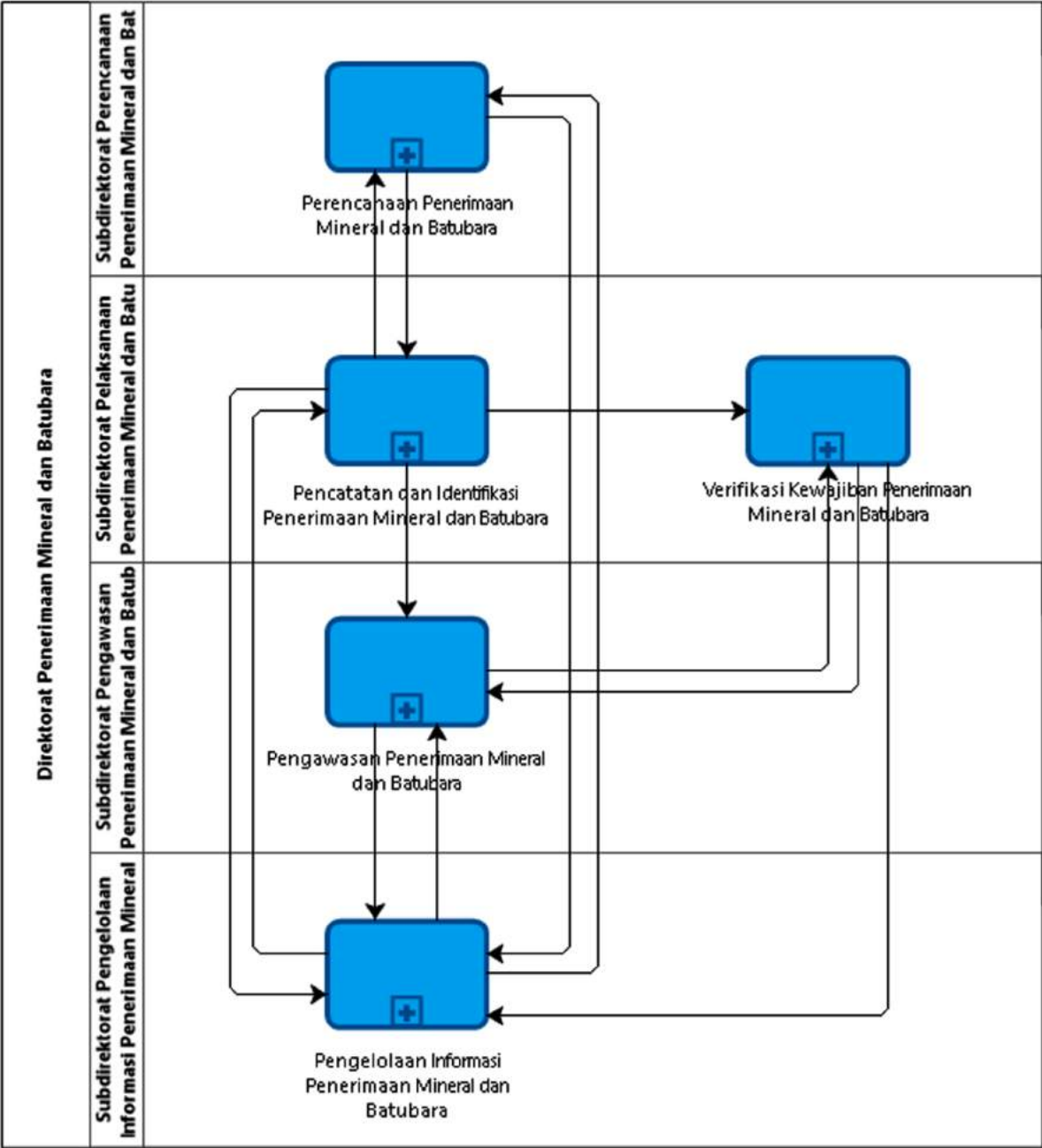
BAMBANG GATOT ARIYONO



LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 315.K/30/DJB/2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

BISNIS PROSES DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN
BATUBARA



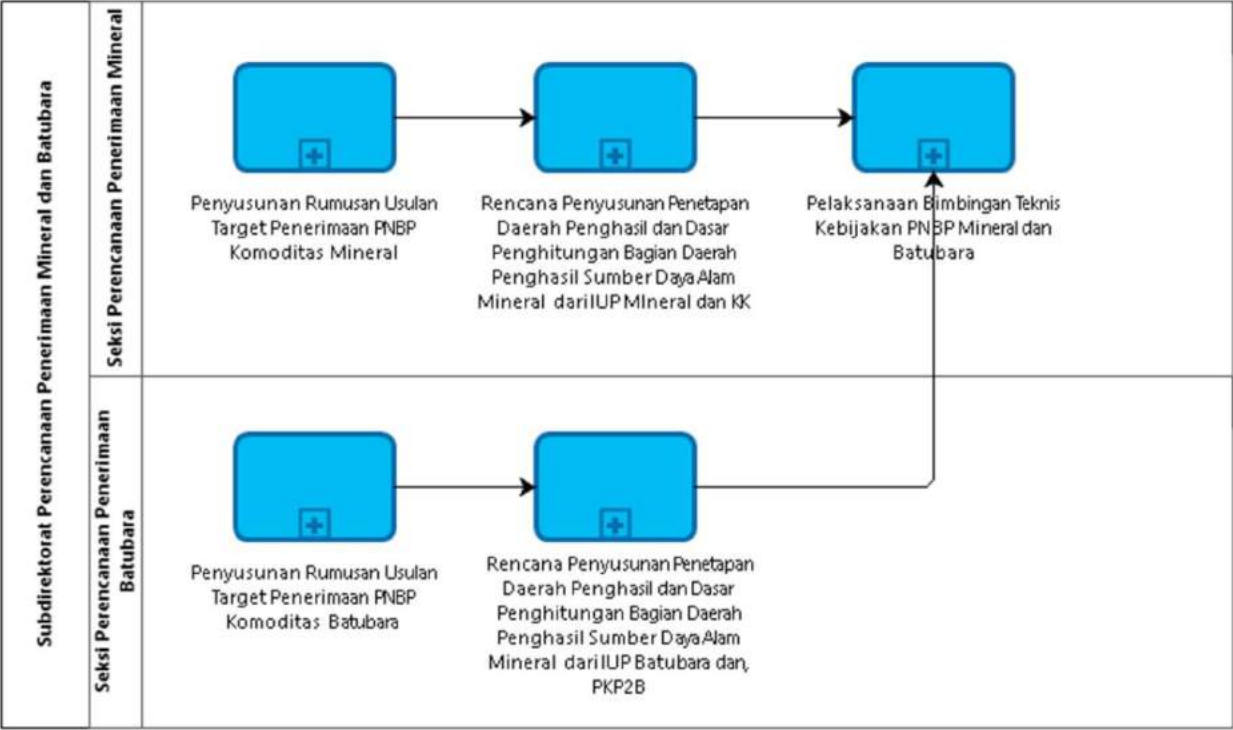
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai proses bisnis sebagai berikut:

- Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara meliputi penyusunan usulan target penerimaan PNPB mineral dan batubara dan penyusunan penetapan daerah penghasil yang berkoordinasi dengan Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara, adapun hasil dari proses tersebut ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Pengelolaan Informasi

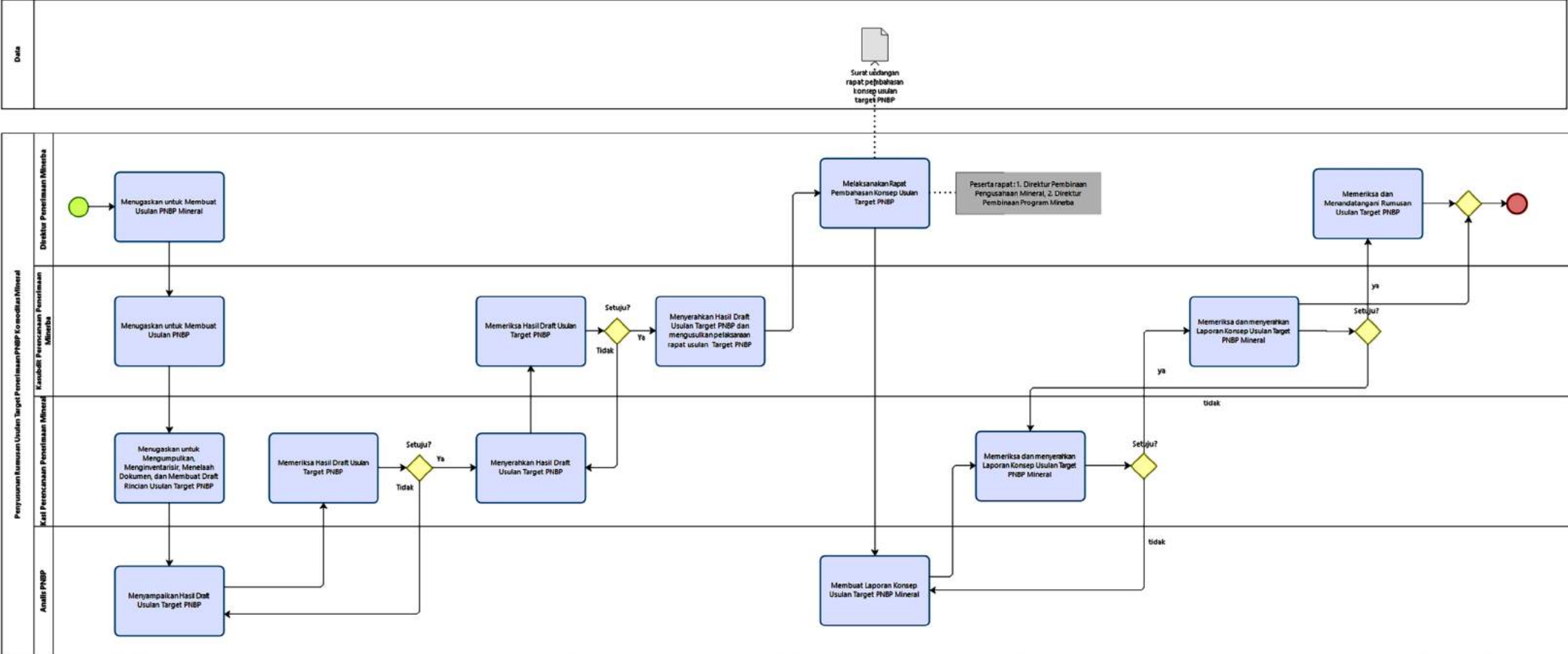
Penerimaan mineral dan batubara untuk dapat diperbaharui kedalam aplikasi informasi Penerimaan Mineral dan Batubara.

- b. Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara meliputi pencatatan dan identifikasi penerimaan minerba serta verifikasi kewajiban penerimaan minerba yang berkoordinasi dengan Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara dan Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara, adapun hasil dari proses tersebut ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Pengelolaan Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara untuk dapat diperbaharui kedalam aplikasi informasi Penerimaan Mineral dan Batubara.
- c. Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara meliputi pelaksanaan rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dan Batubara, Pencatatan Piutang Minerba, Penagihan kurang/kelebihan bayar kewajiban PNB Minerba, evaluasi keringanan/keberatan, berdasarkan data yang diperoleh dari Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara, adapun hasil dari proses tersebut ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Pengelolaan Informasi Pengelolaan Minerba untuk dapat diperbaharui kedalam aplikasi informasi Penerimaan Mineral dan Batubara.
- d. Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara meliputi mengumpulkan pengolahan seluruh data terkait dengan penerimaan mineral dan batubara yang diperoleh dari Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral, Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara, dan Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara.

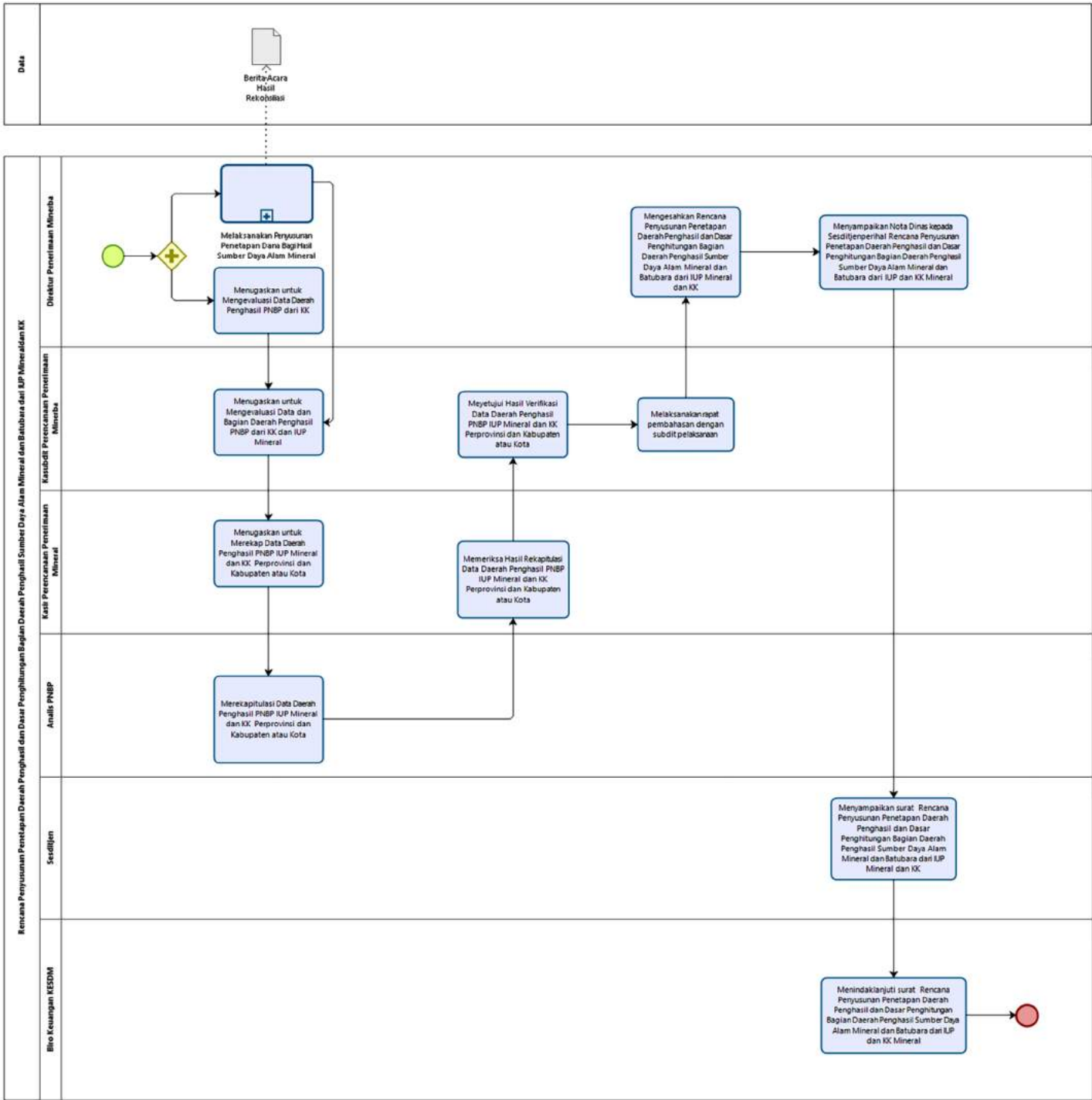
Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara



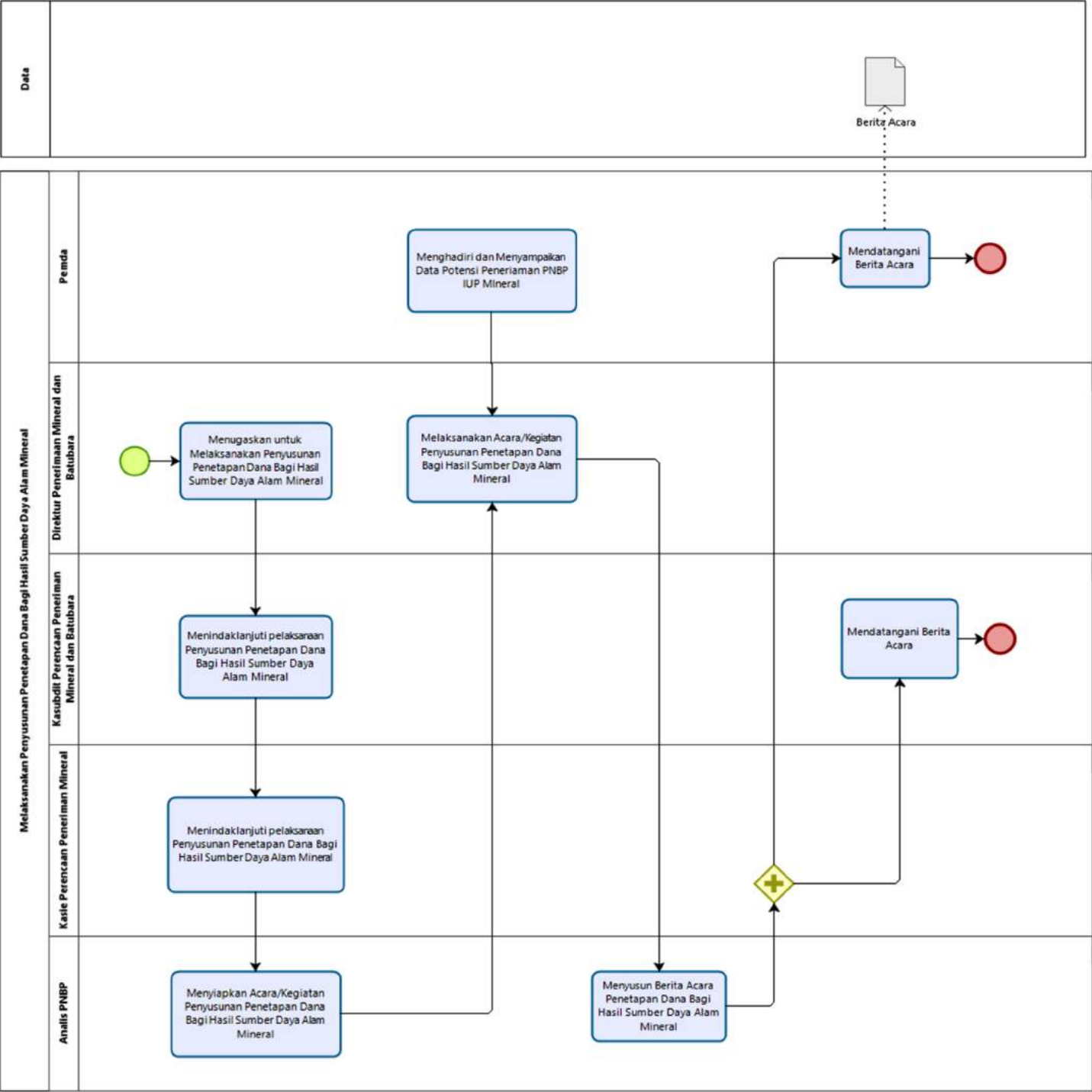
Revisi Perencanaan Penerimaan Mineral - Penyusunan Rumusan Usulan Target Penerimaan PNBP Komoditas Mineral



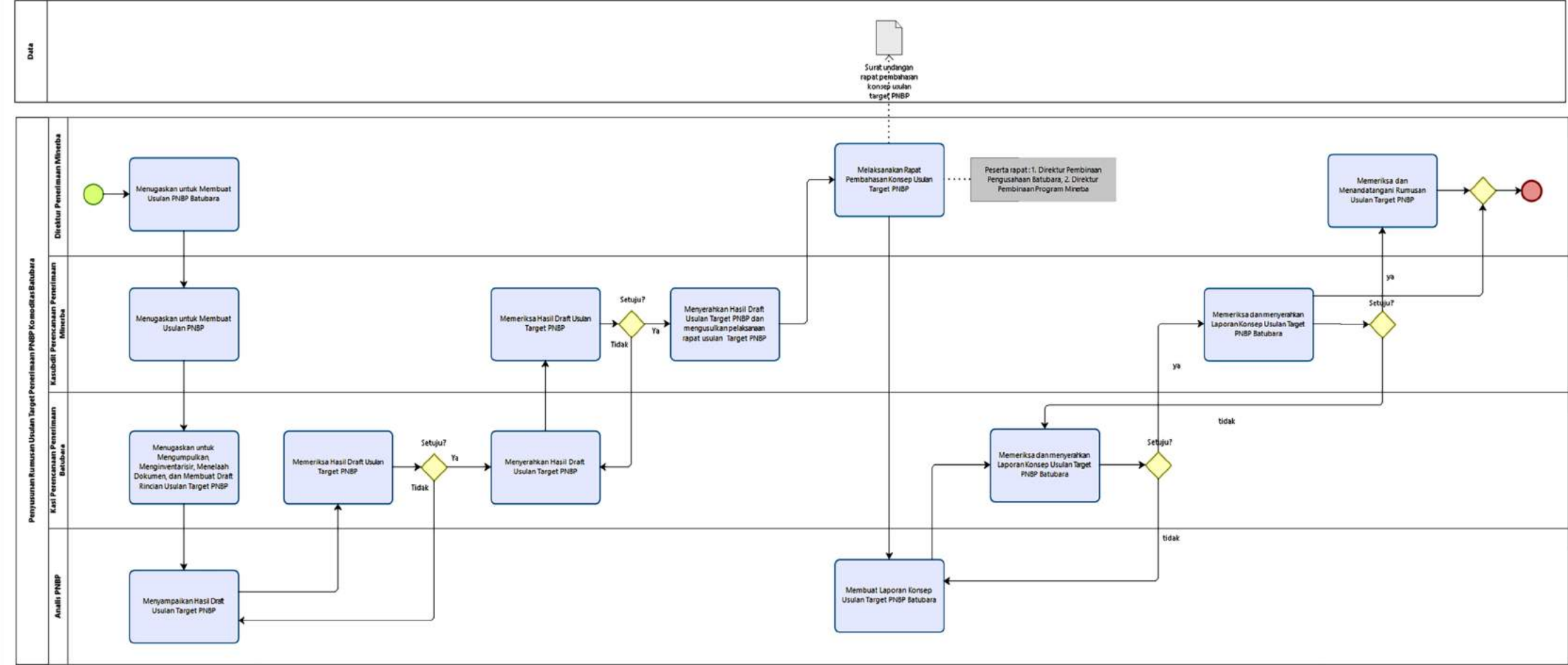
Seksi Perencanaan Penerimaan Mineral - Rencana Penyusunan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Mineral dari IUP Mineral dan KK



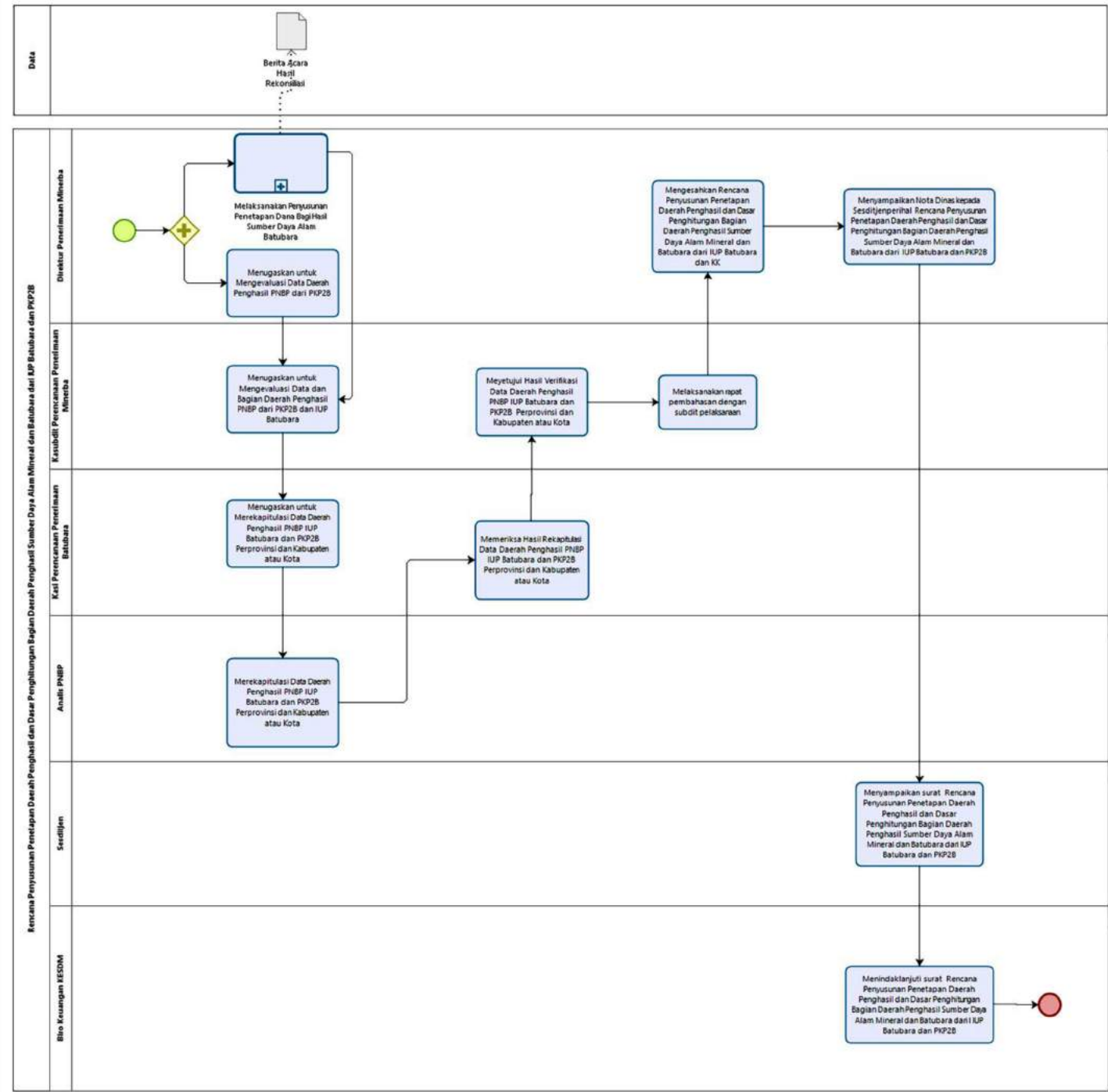
Seksi Perencanaan Penerimaan Mineral - Rencana Penyusunan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Mineral dari IUP Mineral dan KK (Melaksanakan Penyusunan Penetapan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral)



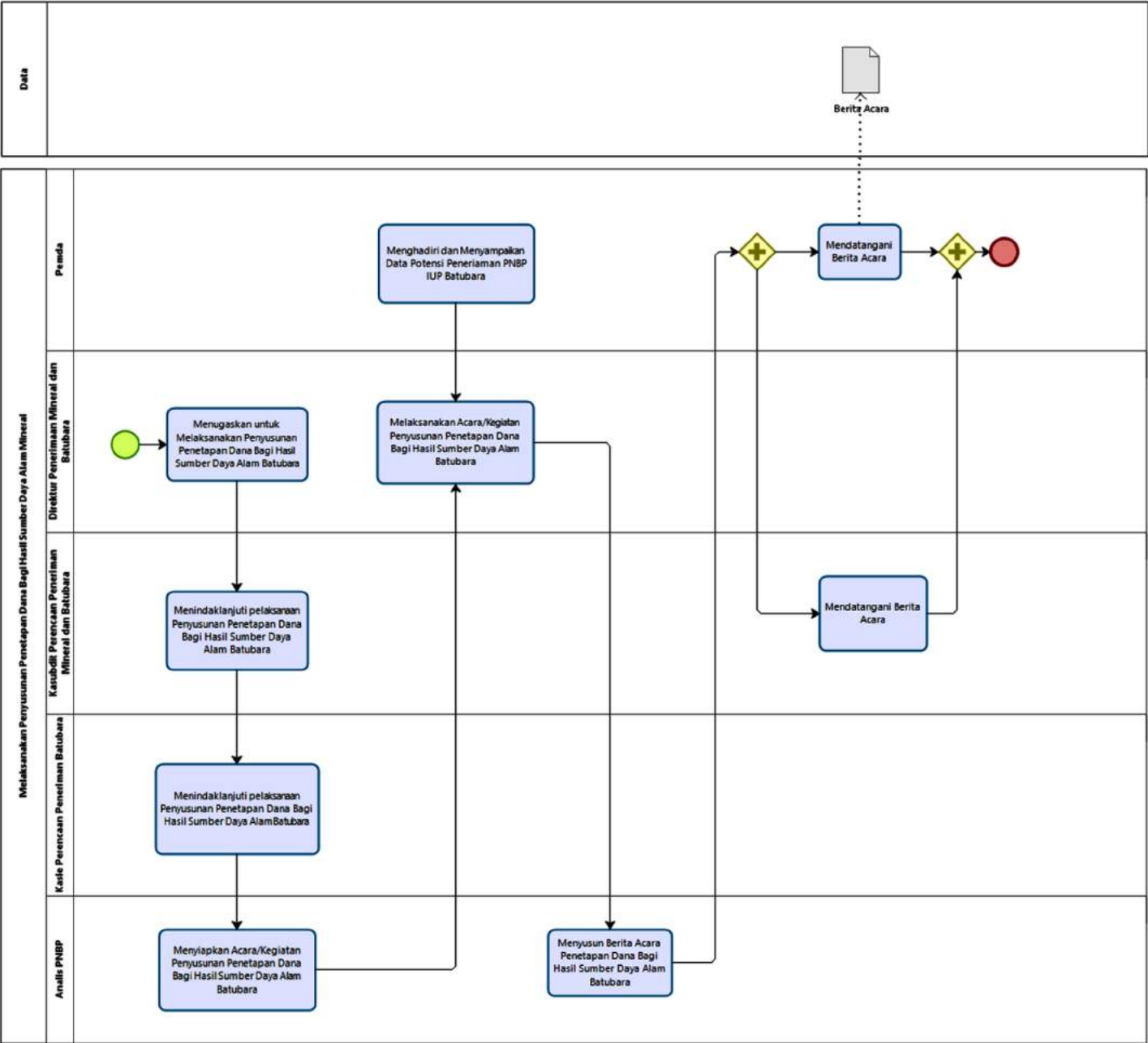
Seksi Perencanaan Penerimaan Batubara - Penyusunan Rumusan Usulan Target Penerimaan PNB Komoditas Batubara



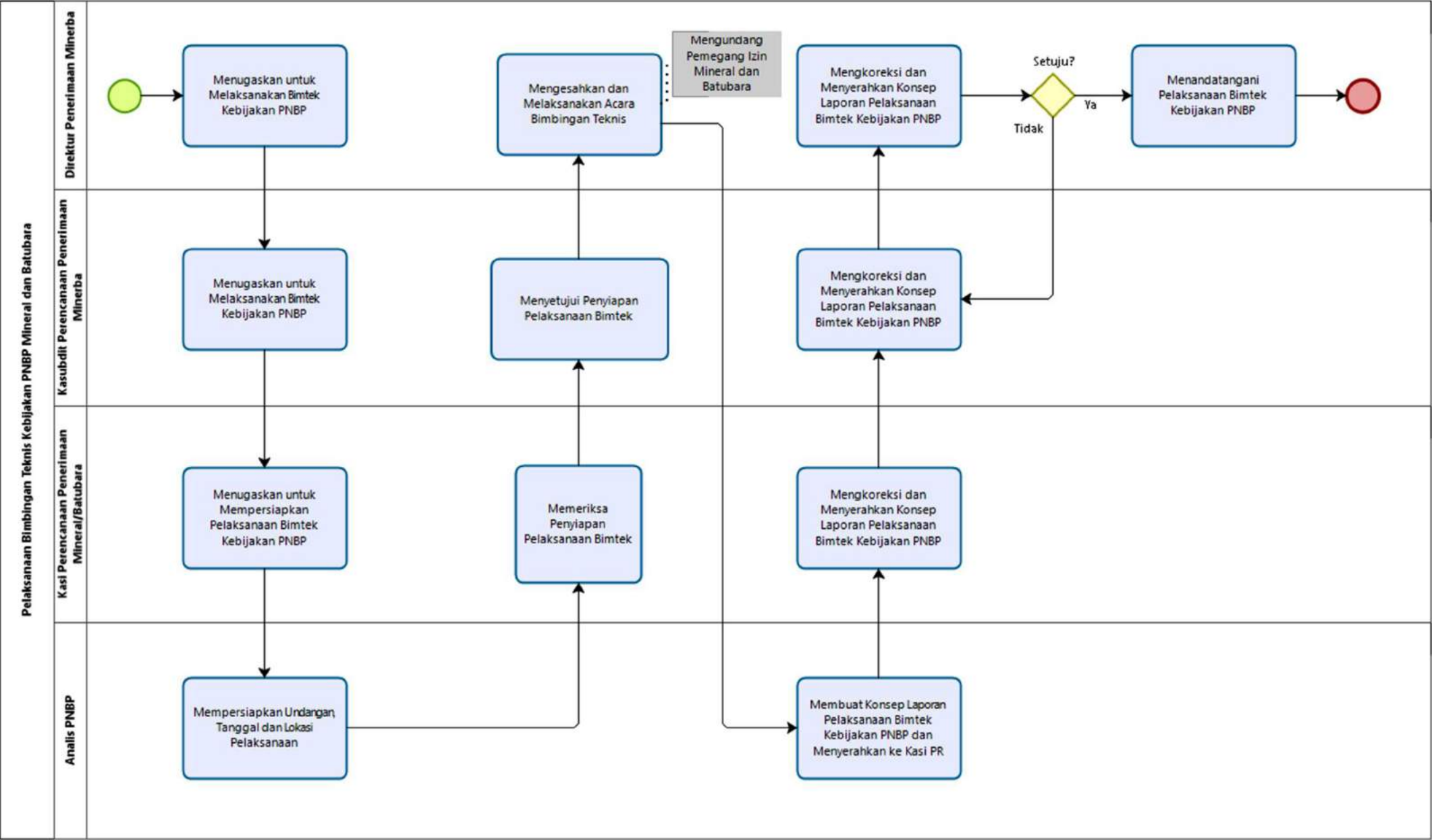
Seksi Perencanaan Penerimaan Batubara - Rencana Penyusunan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Mineral dari IUP Batubara dan PKP2B



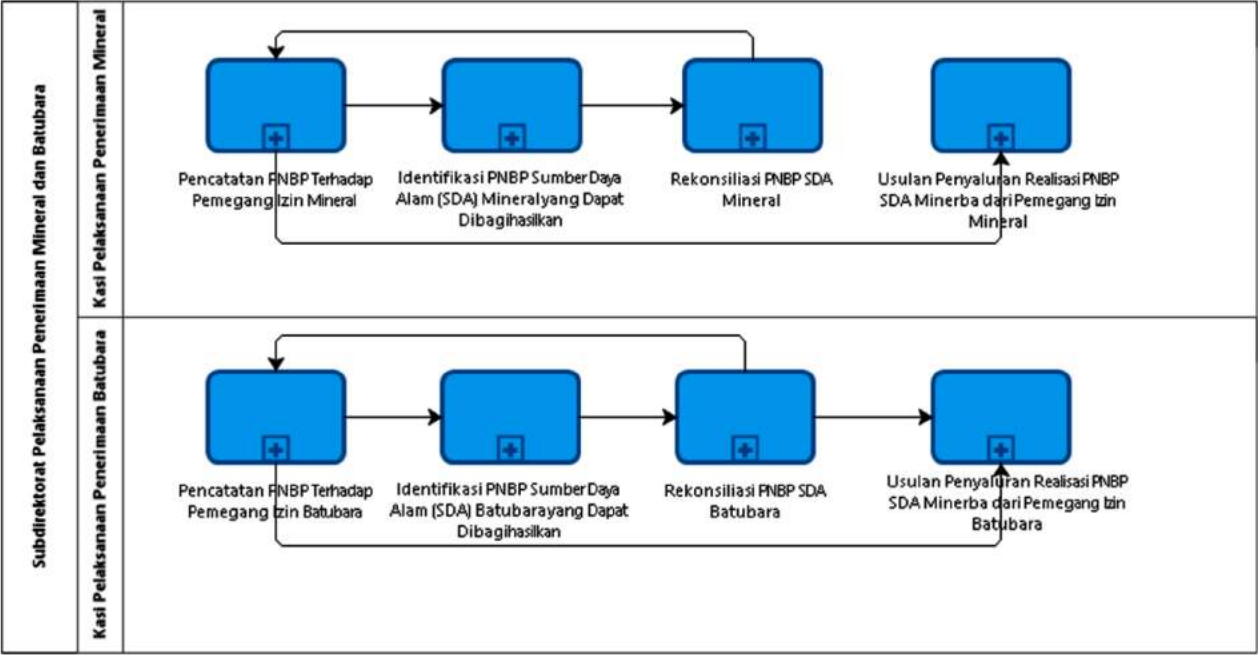
Seksi Perencanaan Penerimaan Batubara - Rencana Penyusunan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Mineral dari IUP Batubara dan PKP2B (Melaksanakan Penyusunan Penetapan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Batubara)



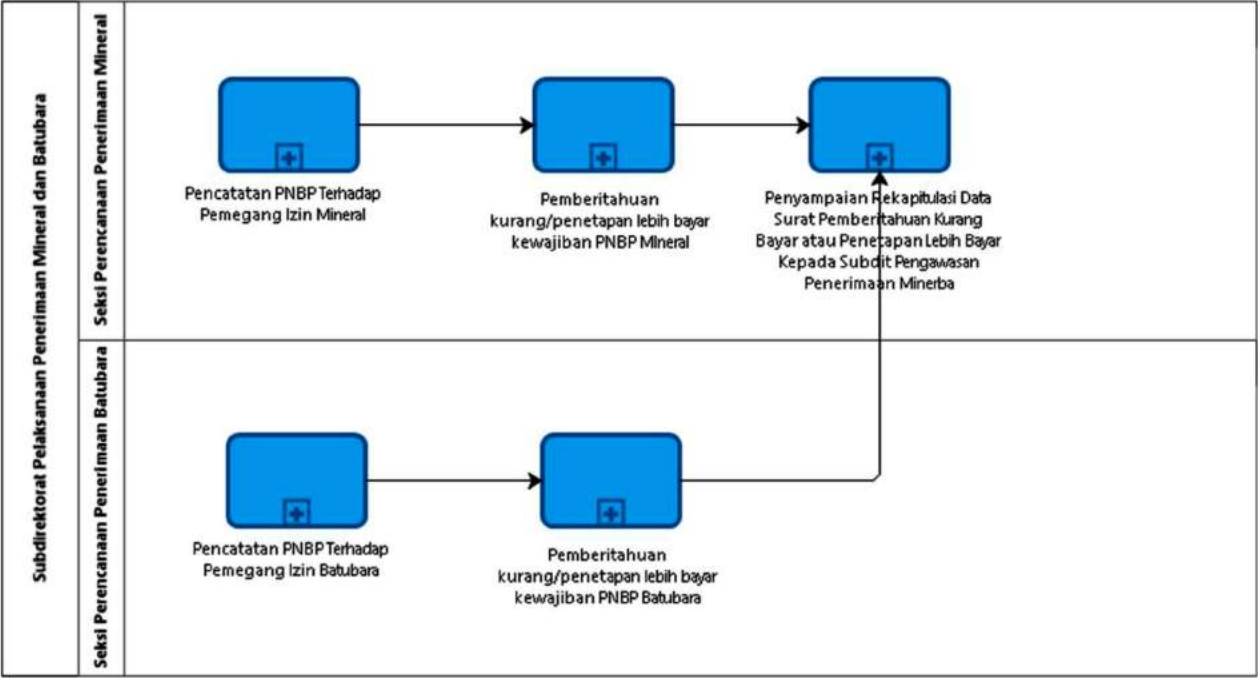
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kebijakan PNBP Mineral dan Batubara



Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara - Pencatatan dan Identifikasi Penerimaan Mineral dan Batubara



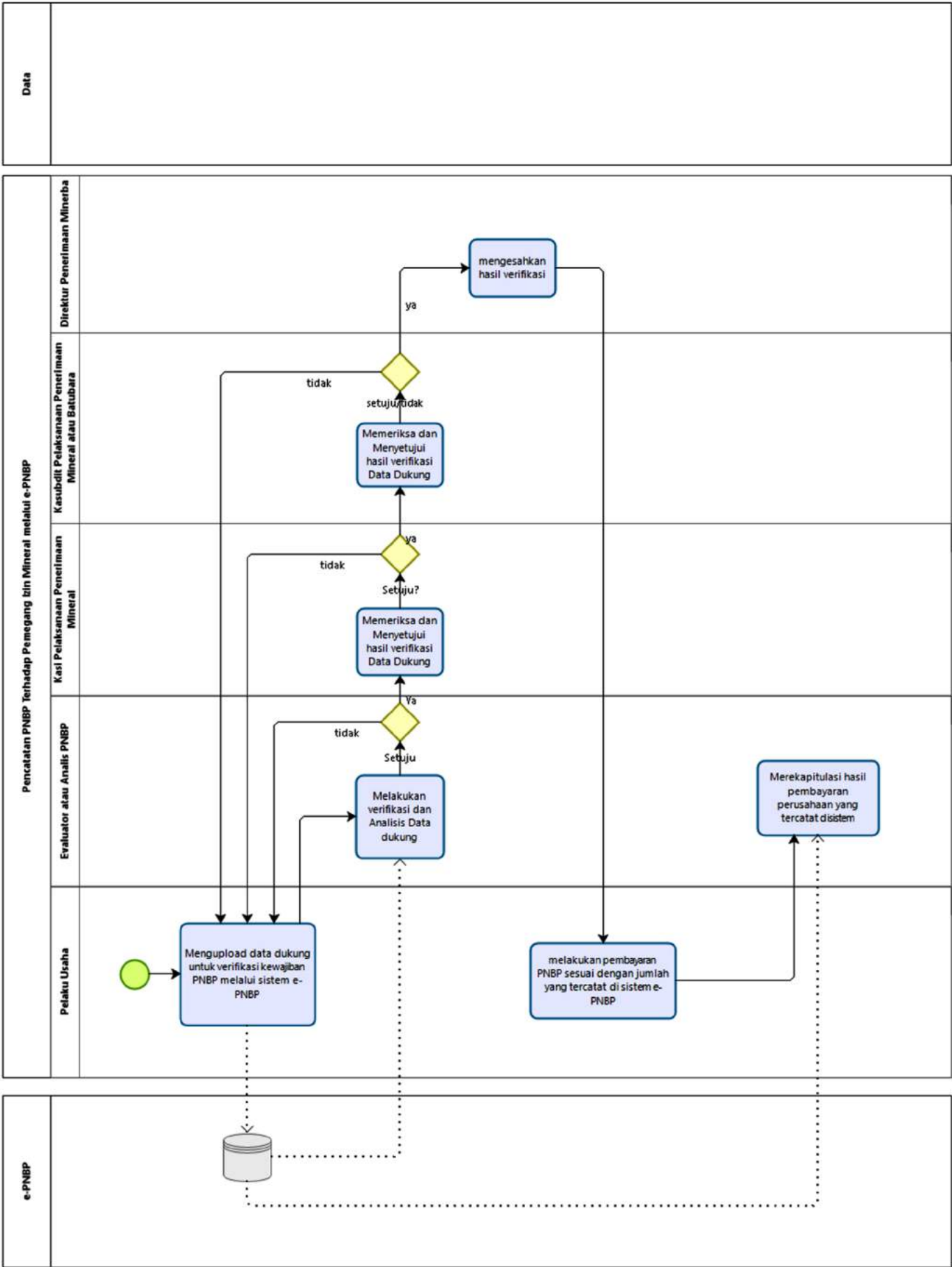
Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara - Verifikasi Kewajiban Penerimaan Mineral dan Batubara



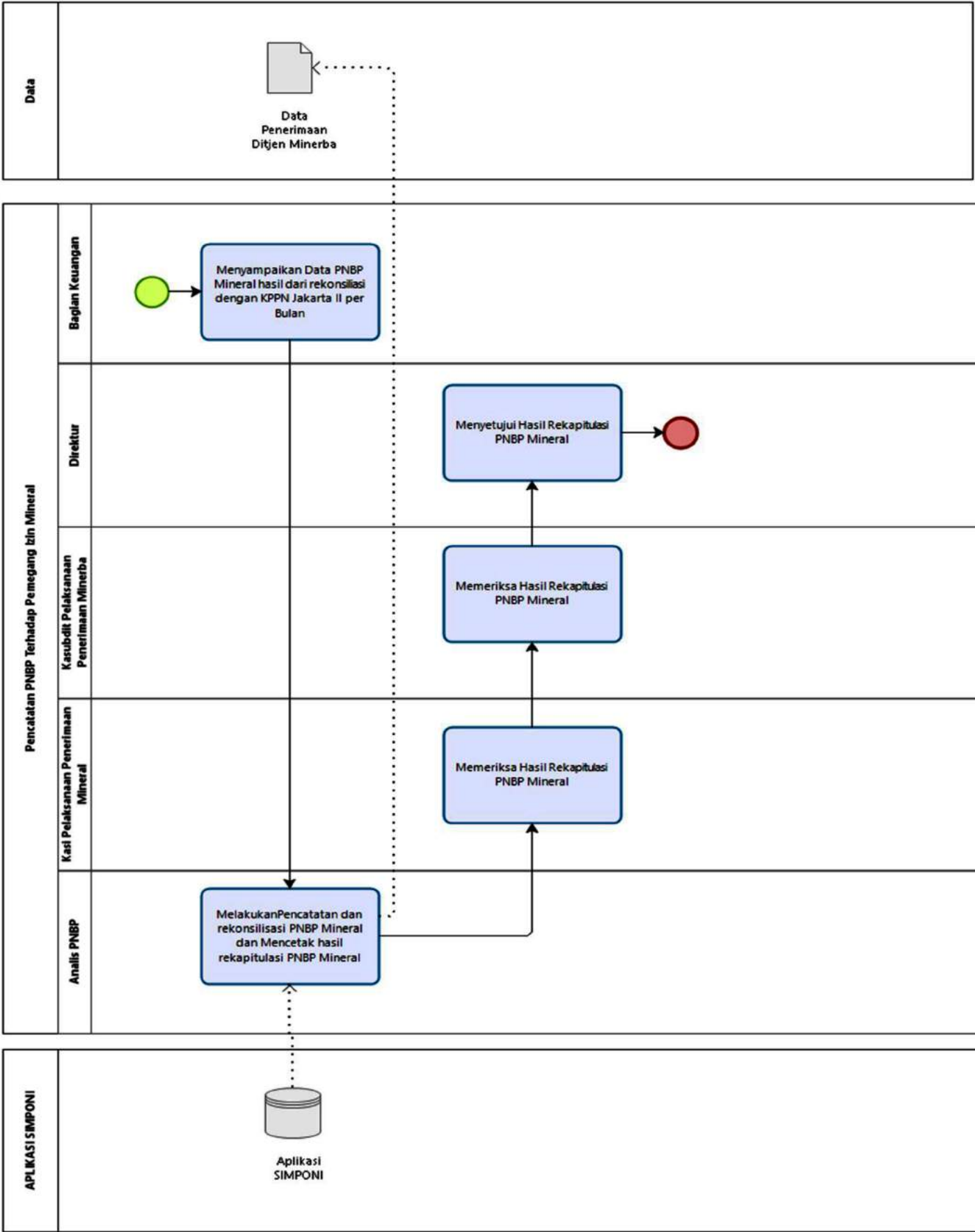
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral

Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral	 Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral dari E-PNBP  Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral dari Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II
---	---

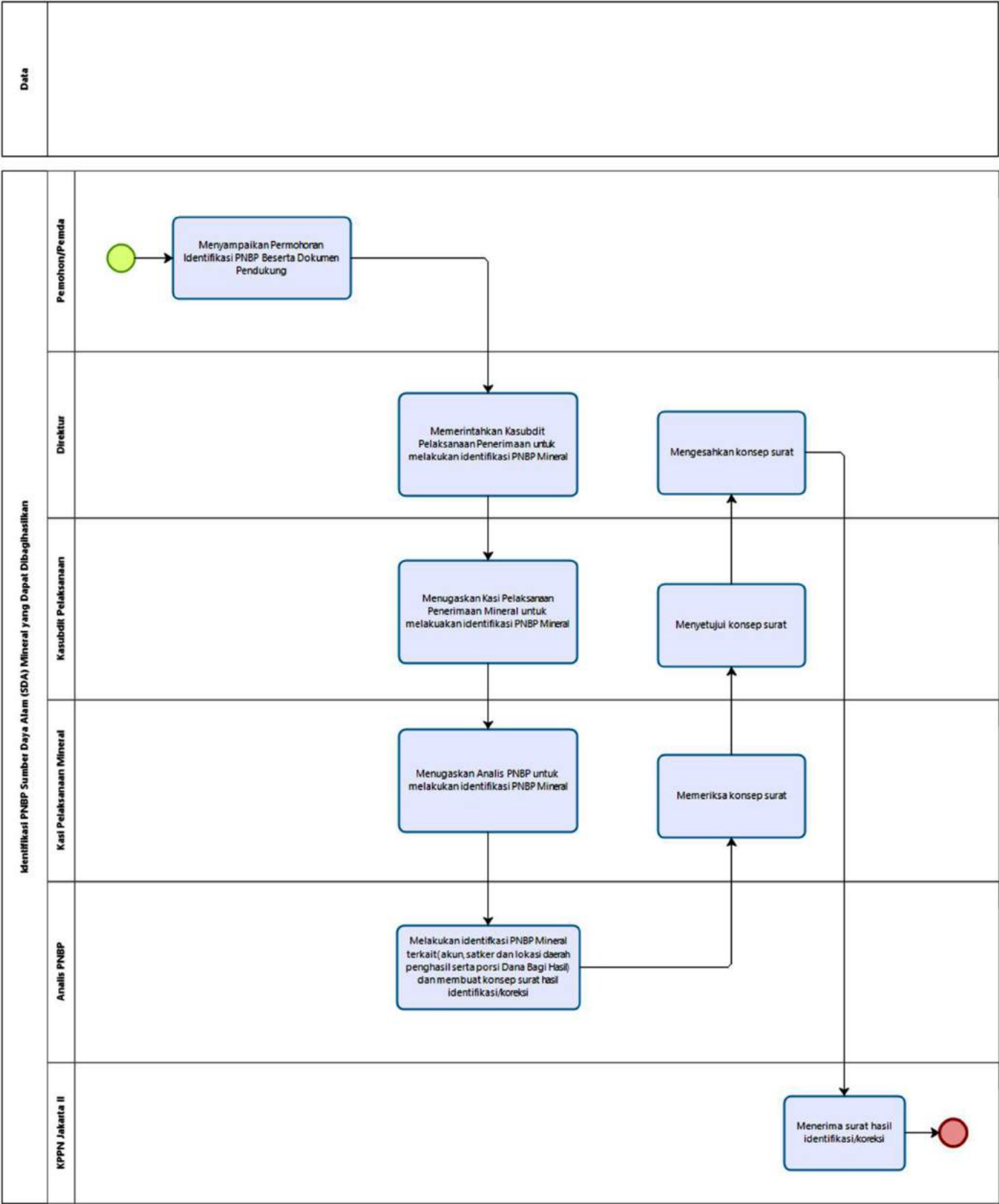
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral (Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral dari E-PNBP)



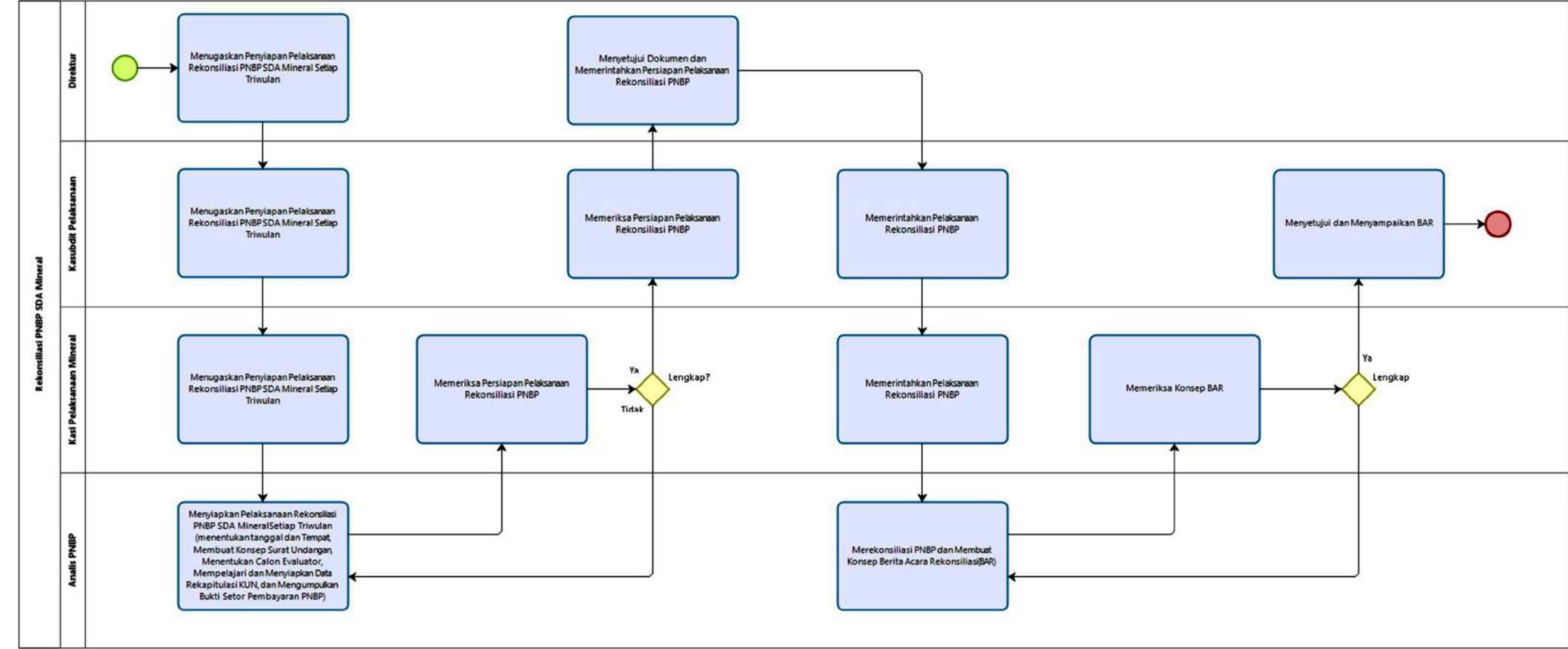
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral (Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Mineral dari Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II)



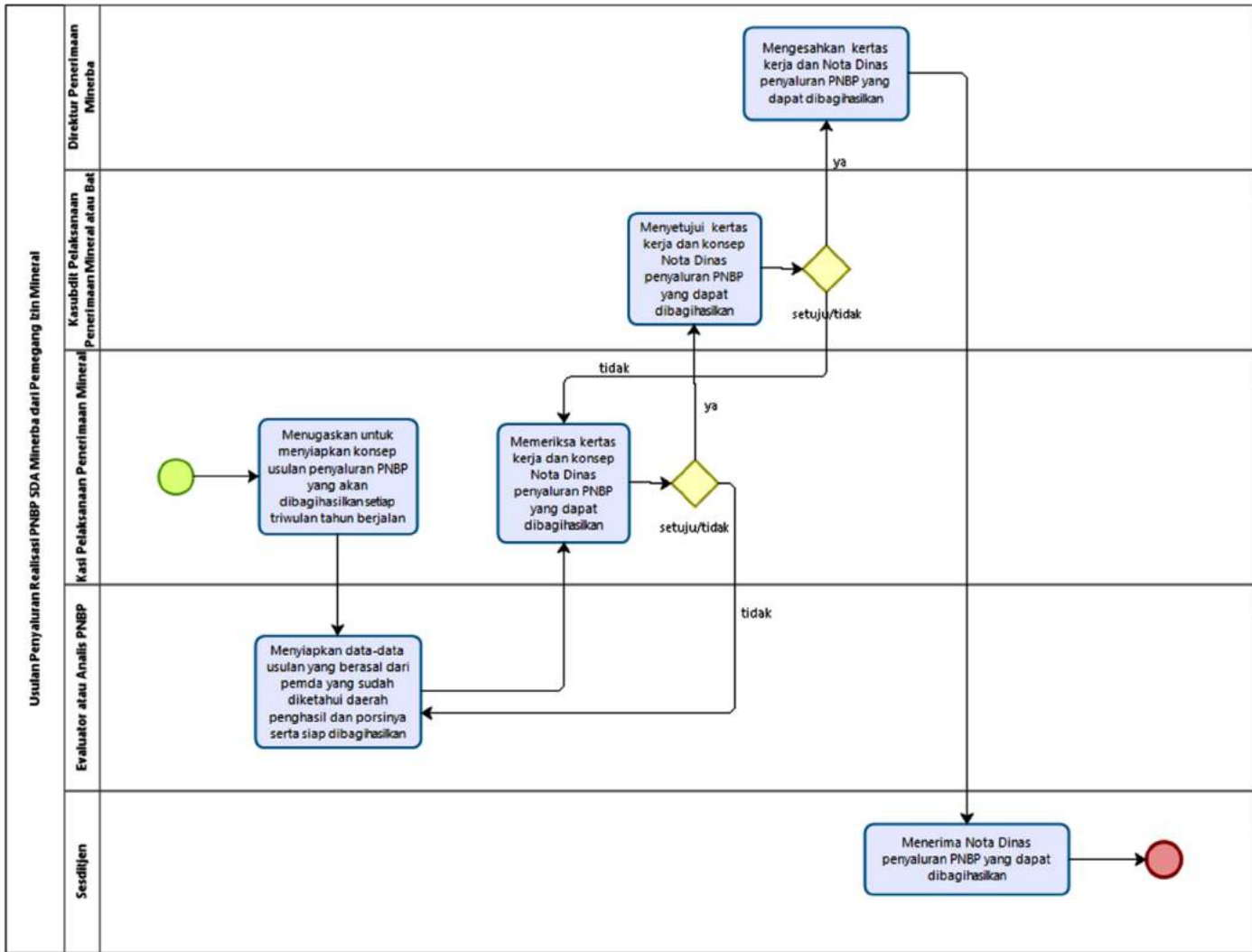
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Identifikasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Mineral yang Dapat Dibagihasilkan



Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral -Rekonsiliasi PNPB SDA Mineral



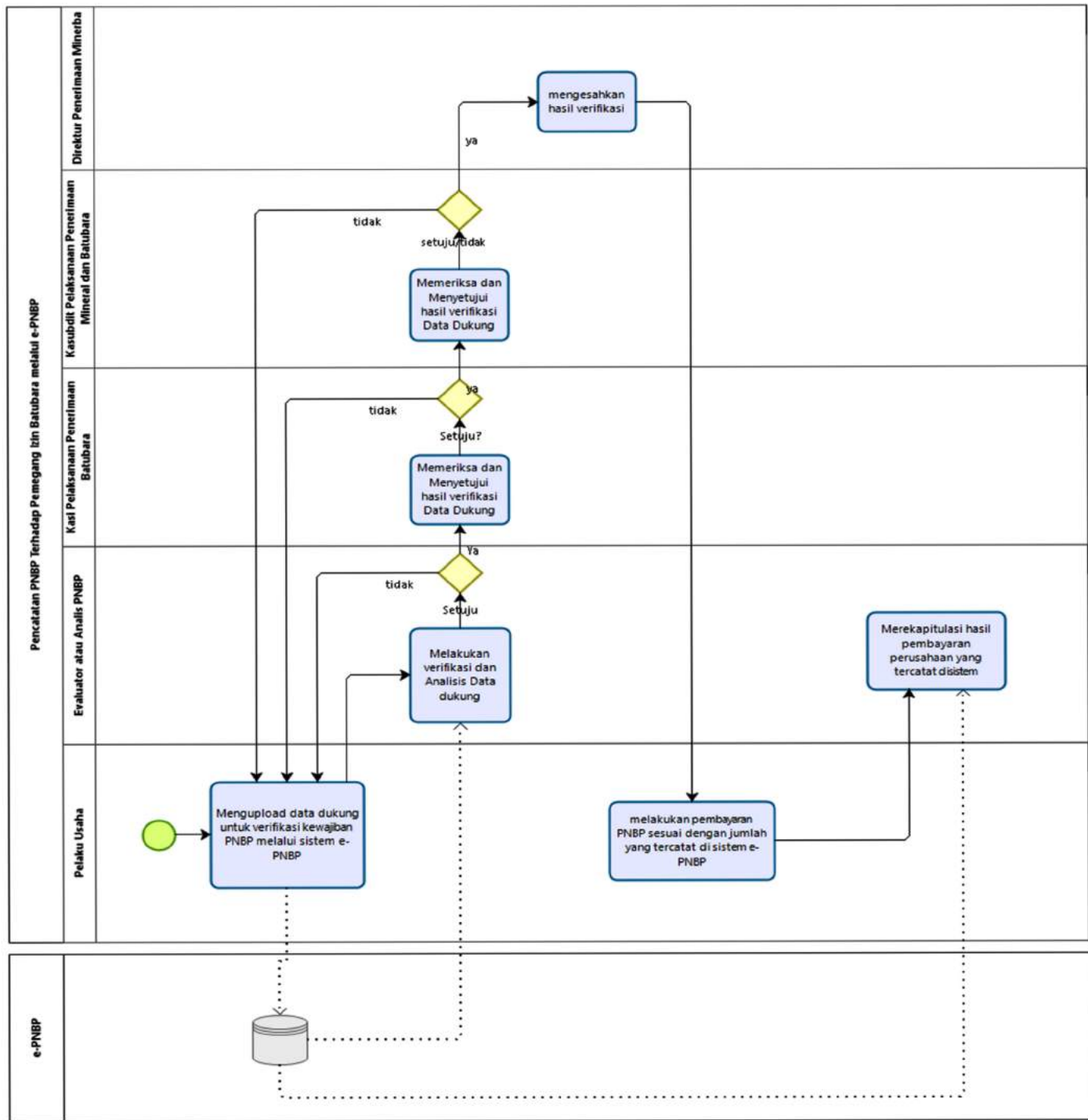
**Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Usulan Penyaluran Realisasi PNBP
SDA Minerba dari Pemegang Izin Mineral**



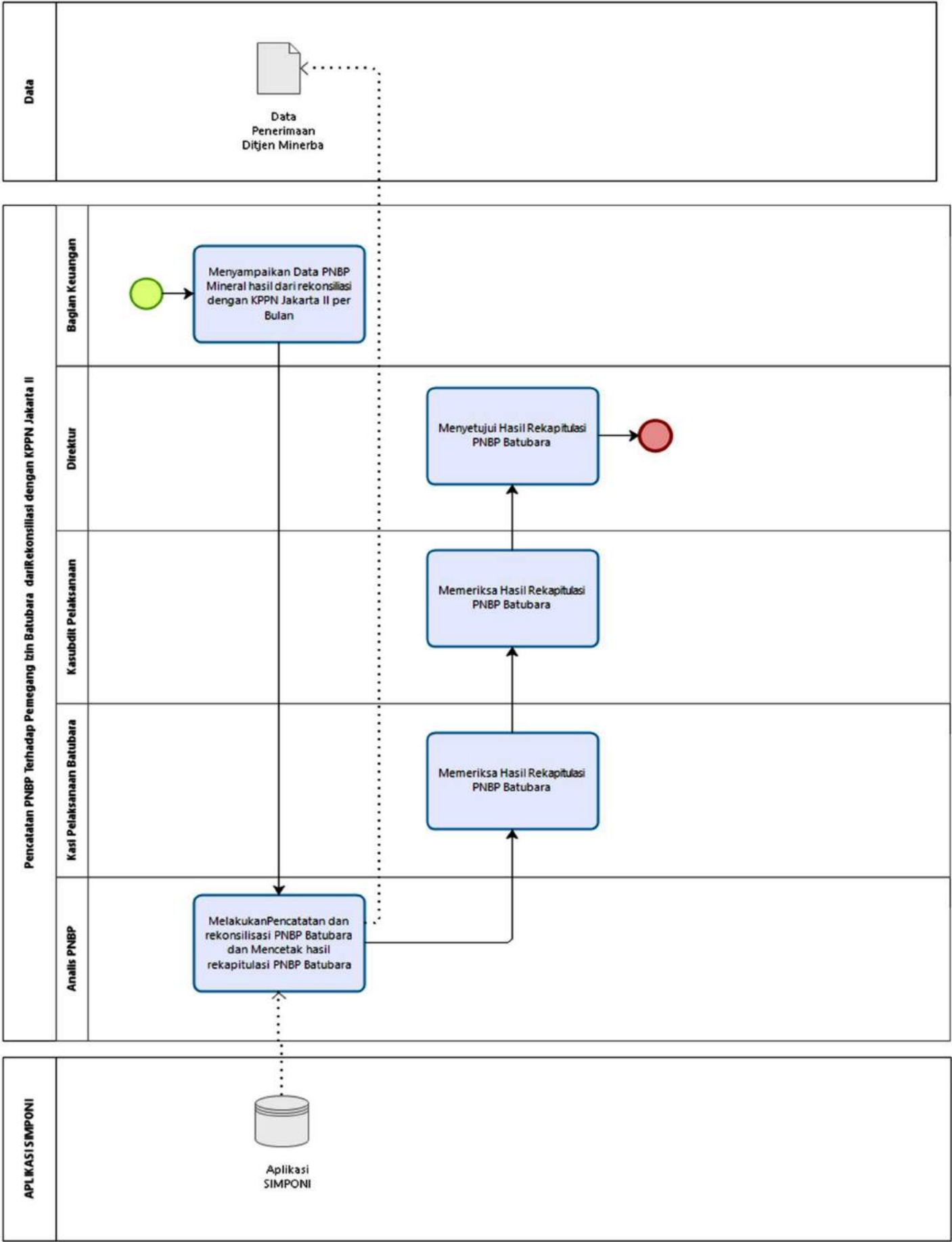
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Batubara

Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Batubara	 Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Batubara dari E-PNBP  Pencatatan PNBP Terhadap Pemegang Izin Batubara dari Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II
--	---

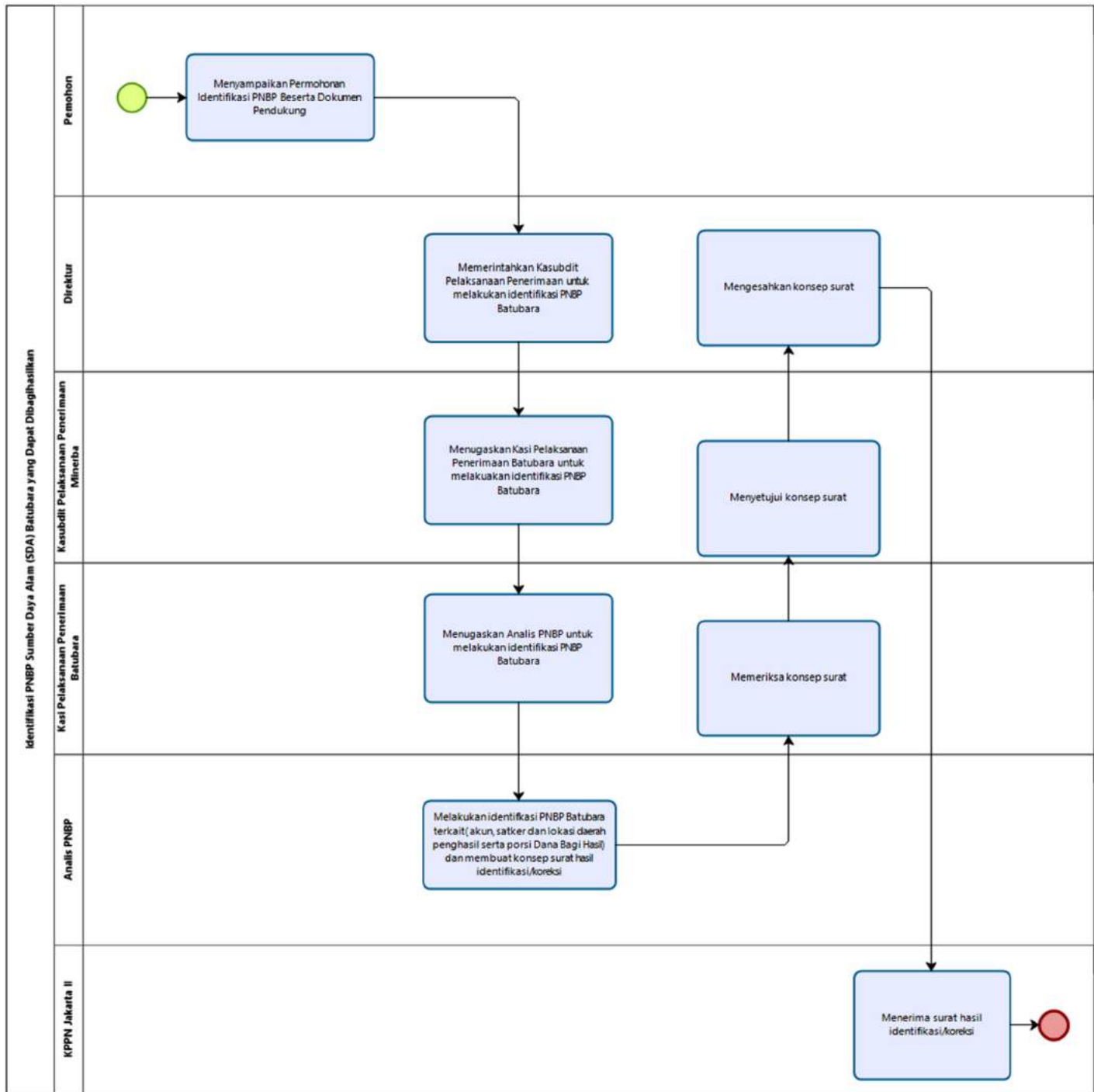
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Pencatatan PNPB Terhadap Pemegang Izin Batubara (Pencatatan PNPB Terhadap Pemegang Izin Batubara dari E-PNPB)



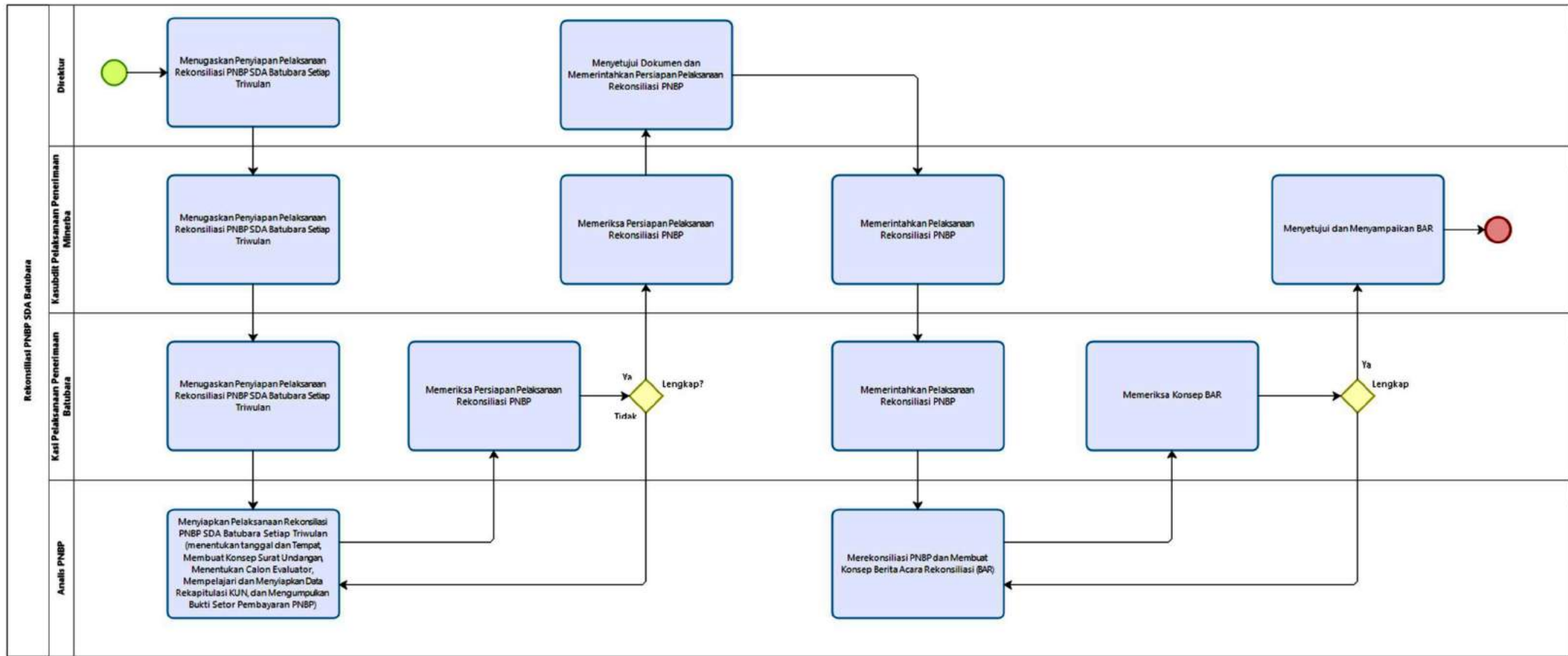
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Pencatatan PNBPN Terhadap Pemegang Izin Batubara (Pencatatan PNBPN Terhadap Pemegang Izin Batubara dari Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II)



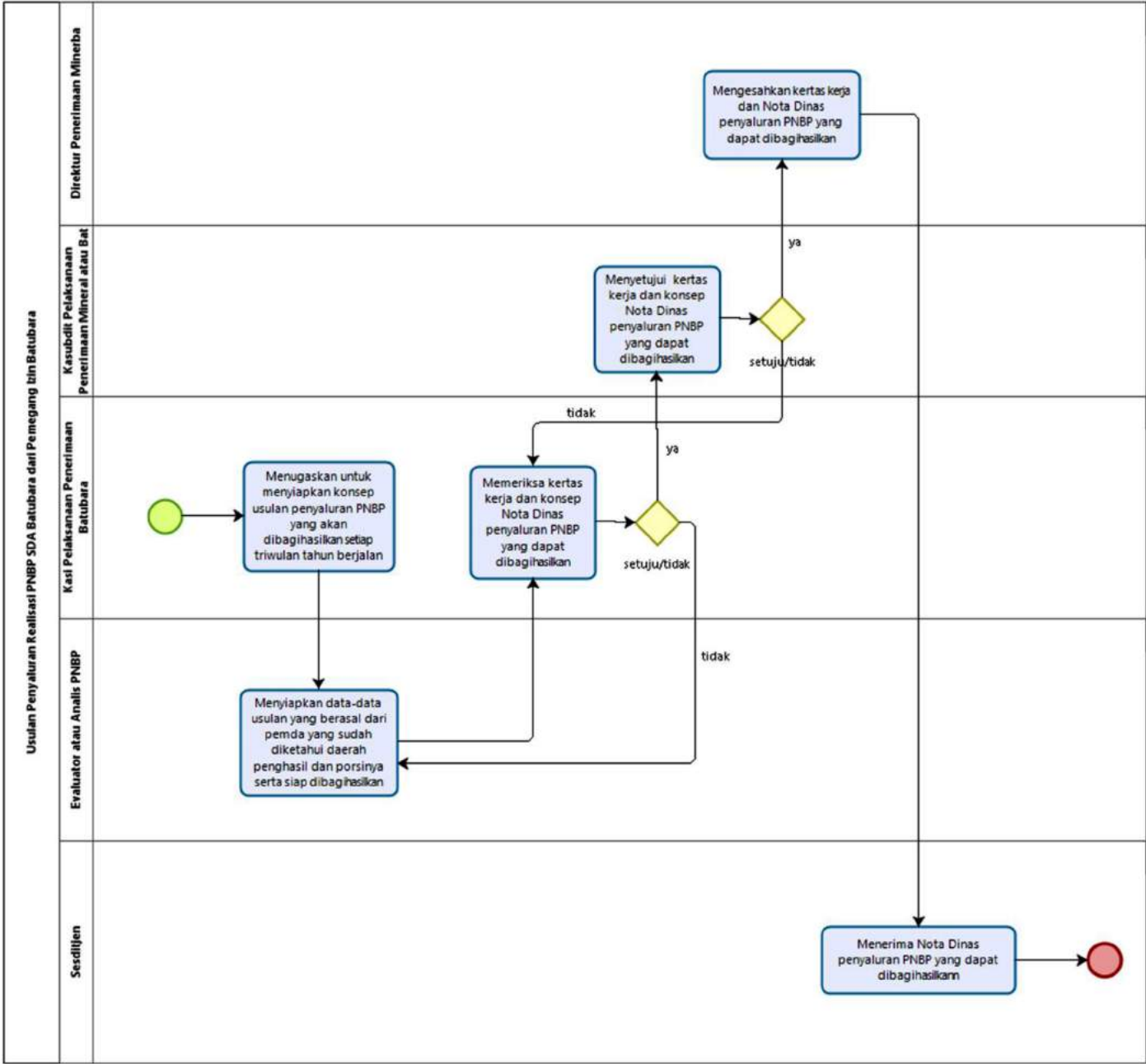
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Identifikasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Batubara yang Dapat Dibagihasilkan



Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Rekonsiliasi PNPB SDA Batubara



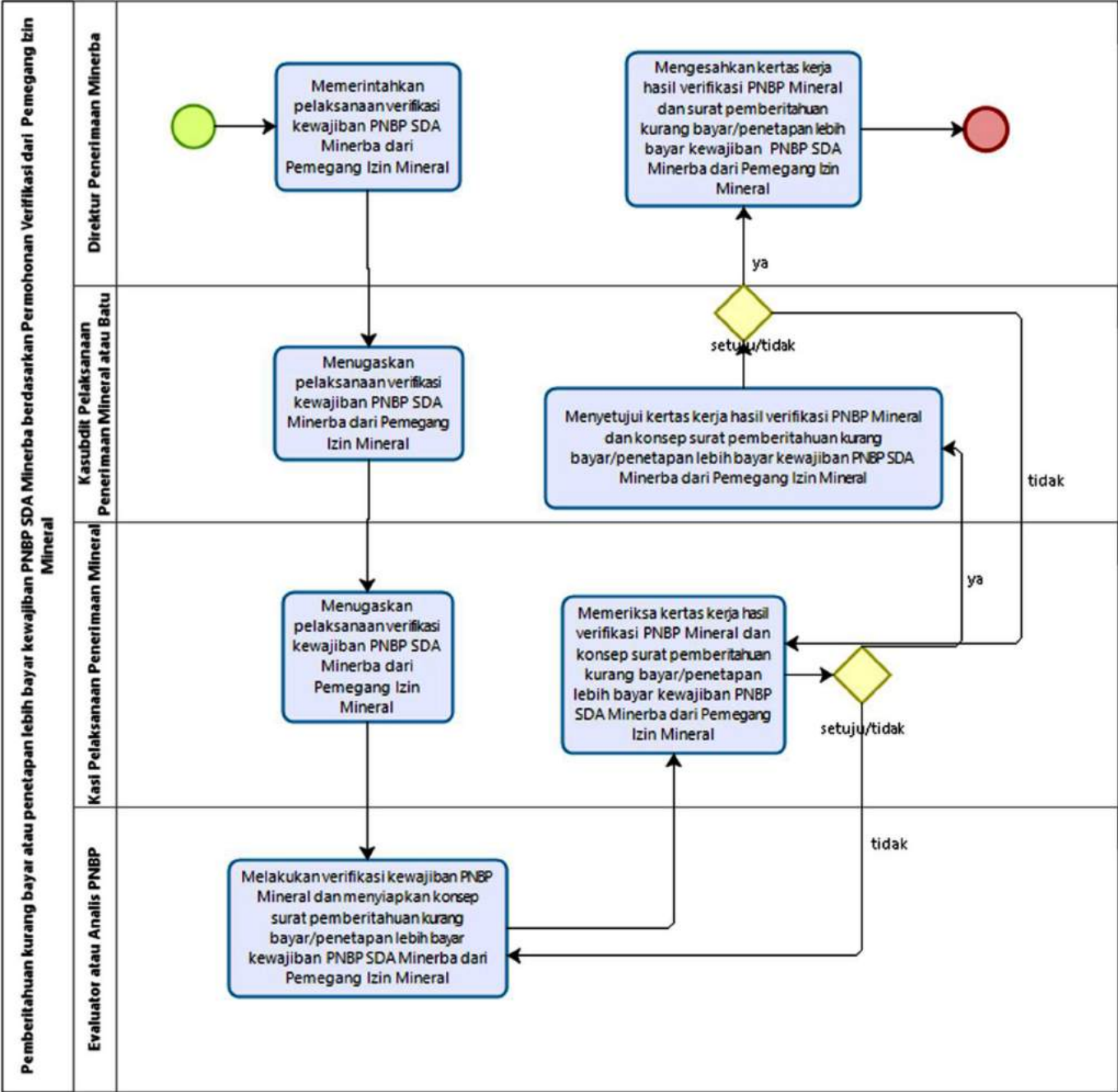
Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Usulan Penyaluran Realisasi PNBP
SDA Minerba dari Pemegang Izin Batubara



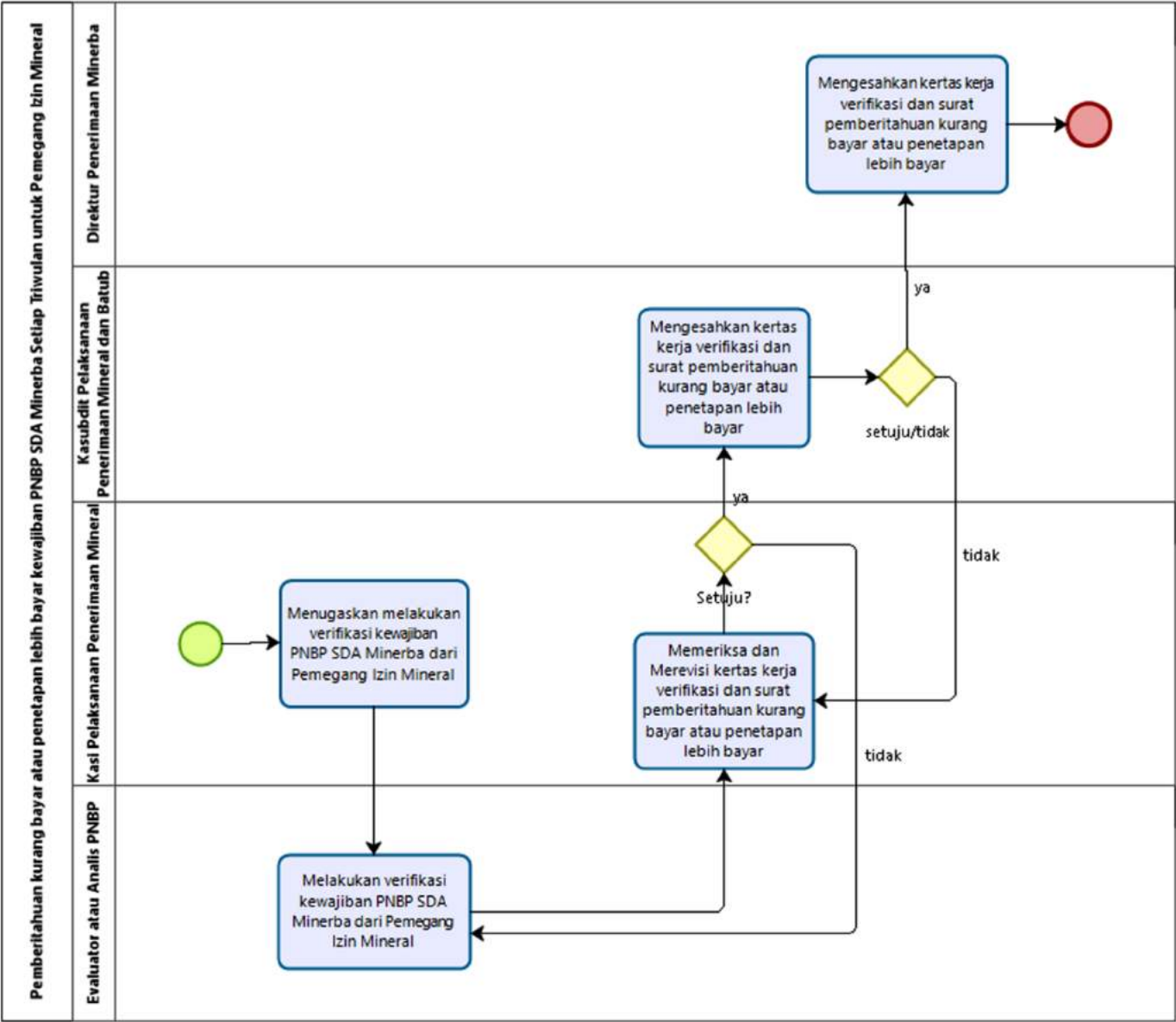
Kasi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNBP Mineral

Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNBP Mineral	 Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNBP SDA Minerba berdasarkan Permohonan Verifikasi dari Pemegang Izin Mineral	 Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNBP SDA Minerba Setiap Triwulan untuk Pemegang Izin Mineral	 Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNBP SDA Minerba berdasarkan Hasil Audit BPK atau BPKP untuk Pemegang Izin Mineral
--	---	--	--

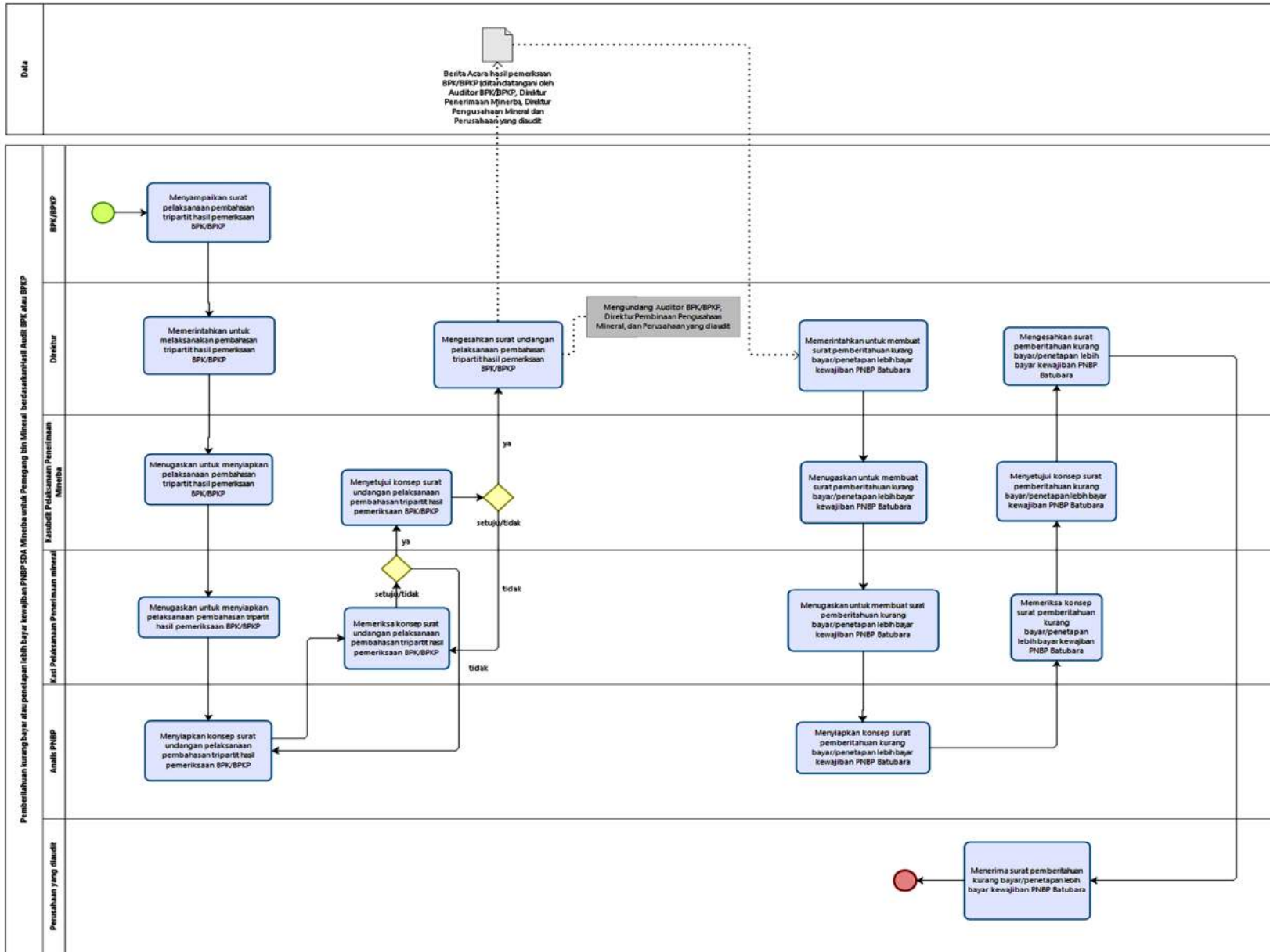
Kasi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNPB Mineral (Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNPB SDA Minerba berdasarkan Permohonan Verifikasi dari Pemegang Izin Mineral)



Kasi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNPB Mineral (Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNPB SDA Minerba Setiap Triwulan untuk Pemegang Izin Mineral)



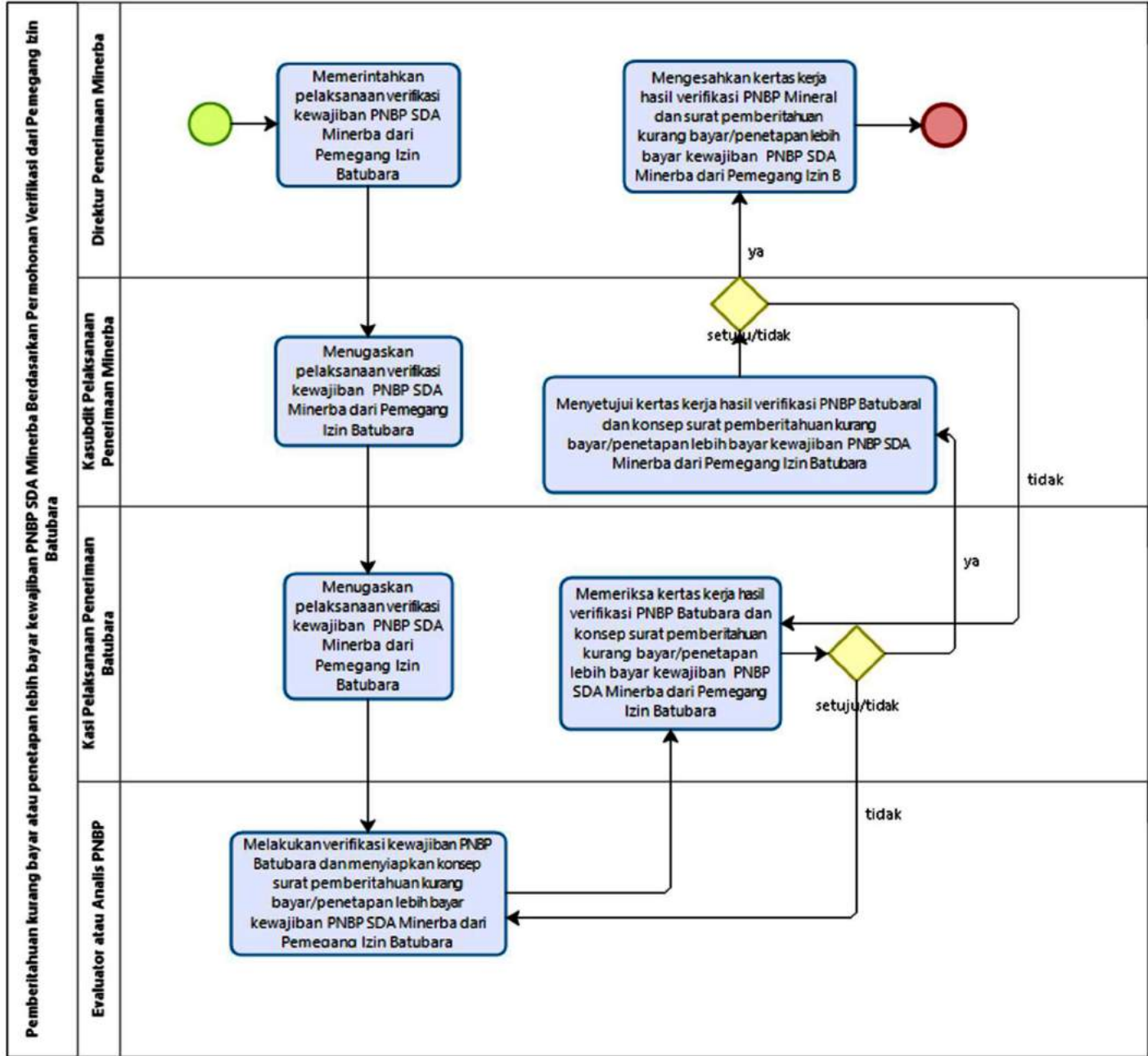
Kasi Pelaksanaan Penerimaan Mineral - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNB Mineral (Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNB SDA Minerba berdasarkan Hasil Audit BPK atau BPKP untuk Pemegang Izin Mineral)



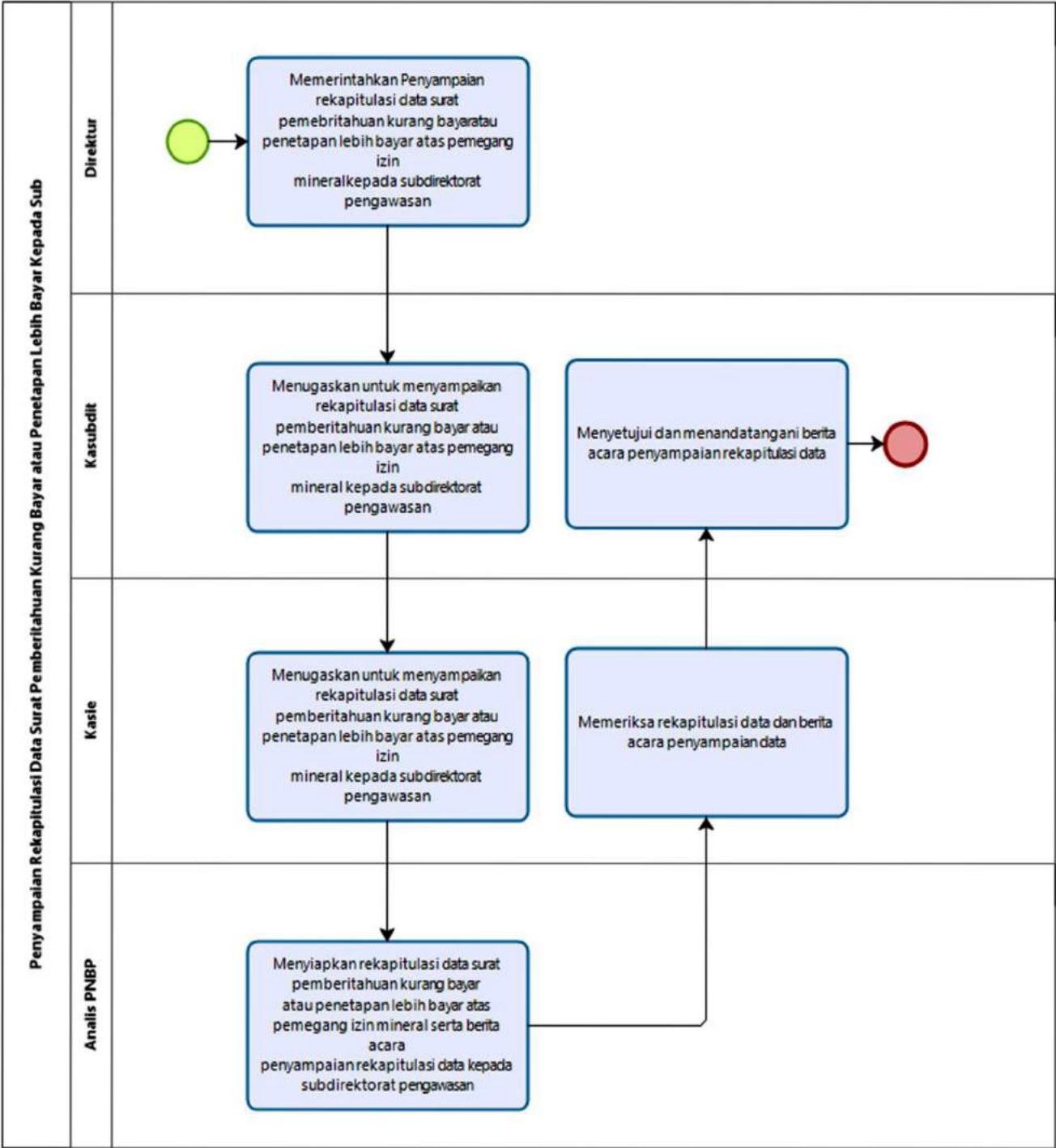
Kasi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNPB Batubara

Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNPB Batubara	 Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNPB SDA Minerba Berdasarkan Permohonan Verifikasi dari Pemegang Izin Batubara	 Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNPB SDA Minerba untuk Pemegang Izin Batubara Setiap Triwulan	 Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNPB SDA Minerba untuk Pemegang Izin Batubara berdasarkan Hasil Audit BPK atau BPKP
--	--	---	---

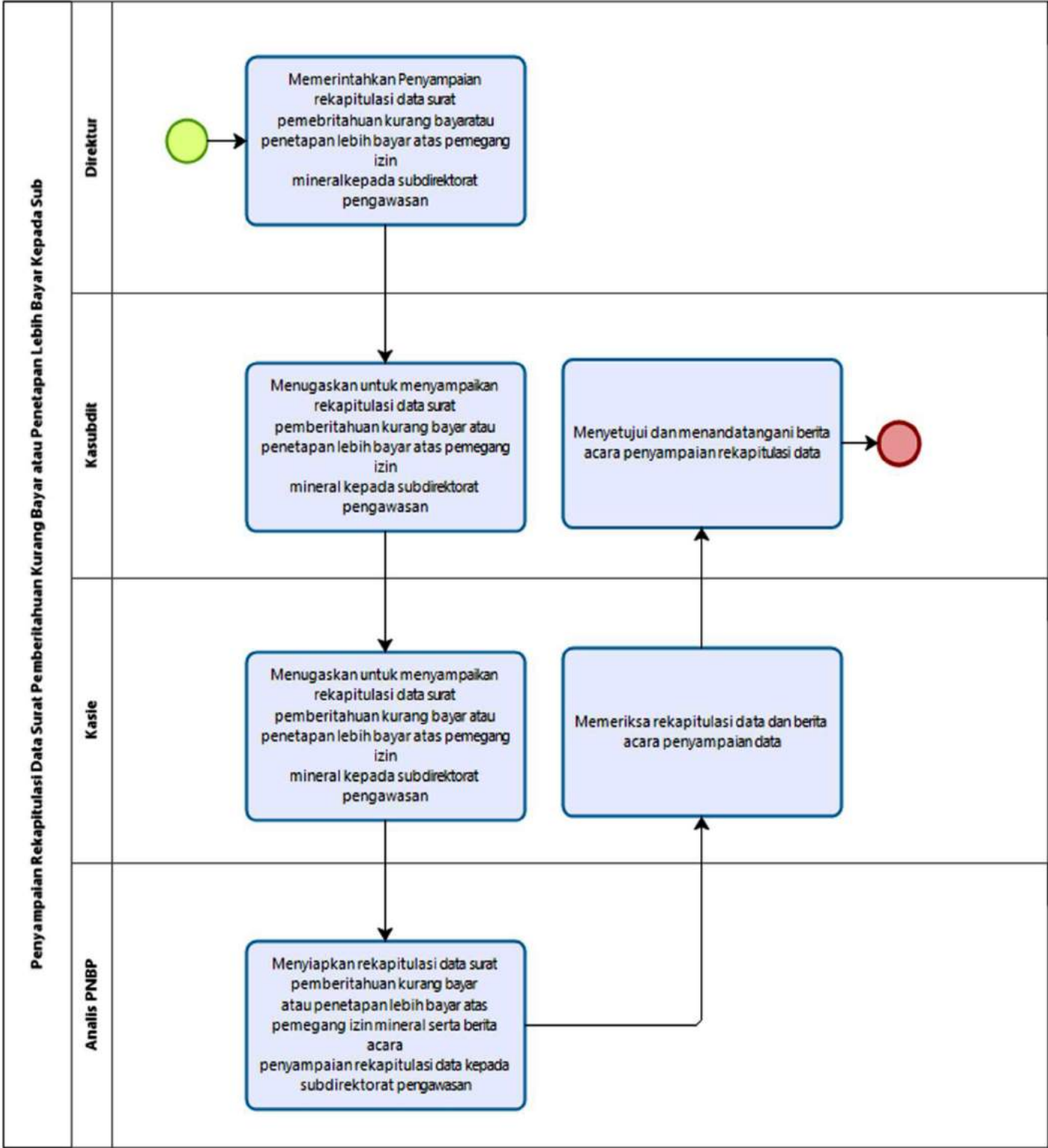
Kasi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNBPN Batubara (Pemberitahuan kurang bayar atau penetapan lebih bayar kewajiban PNBPN SDA Minerba Berdasarkan Permohonan Verifikasi dari Pemegang Izin Batubara)



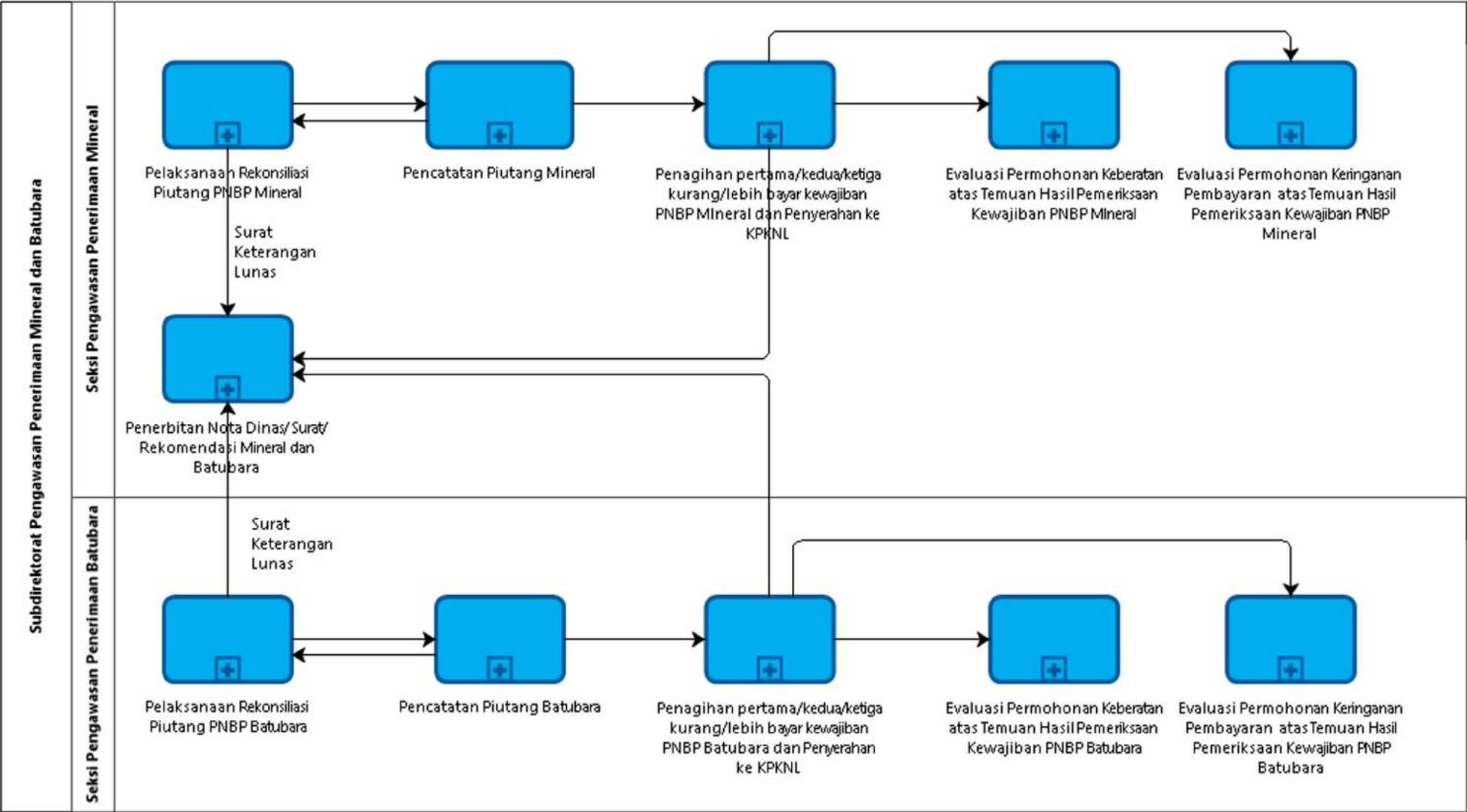
Kasi Pelaksanaan Penerimaan Batubara - Pemberitahuan kurang/penetapan lebih bayar kewajiban PNPB Batubara



Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara - Penyampaian Rekapitulasi Data Surat Pemberitahuan Kurang Bayar atau Penetapan Lebih Bayar Kepada Subdit Pengawasan Penerimaan Minerba



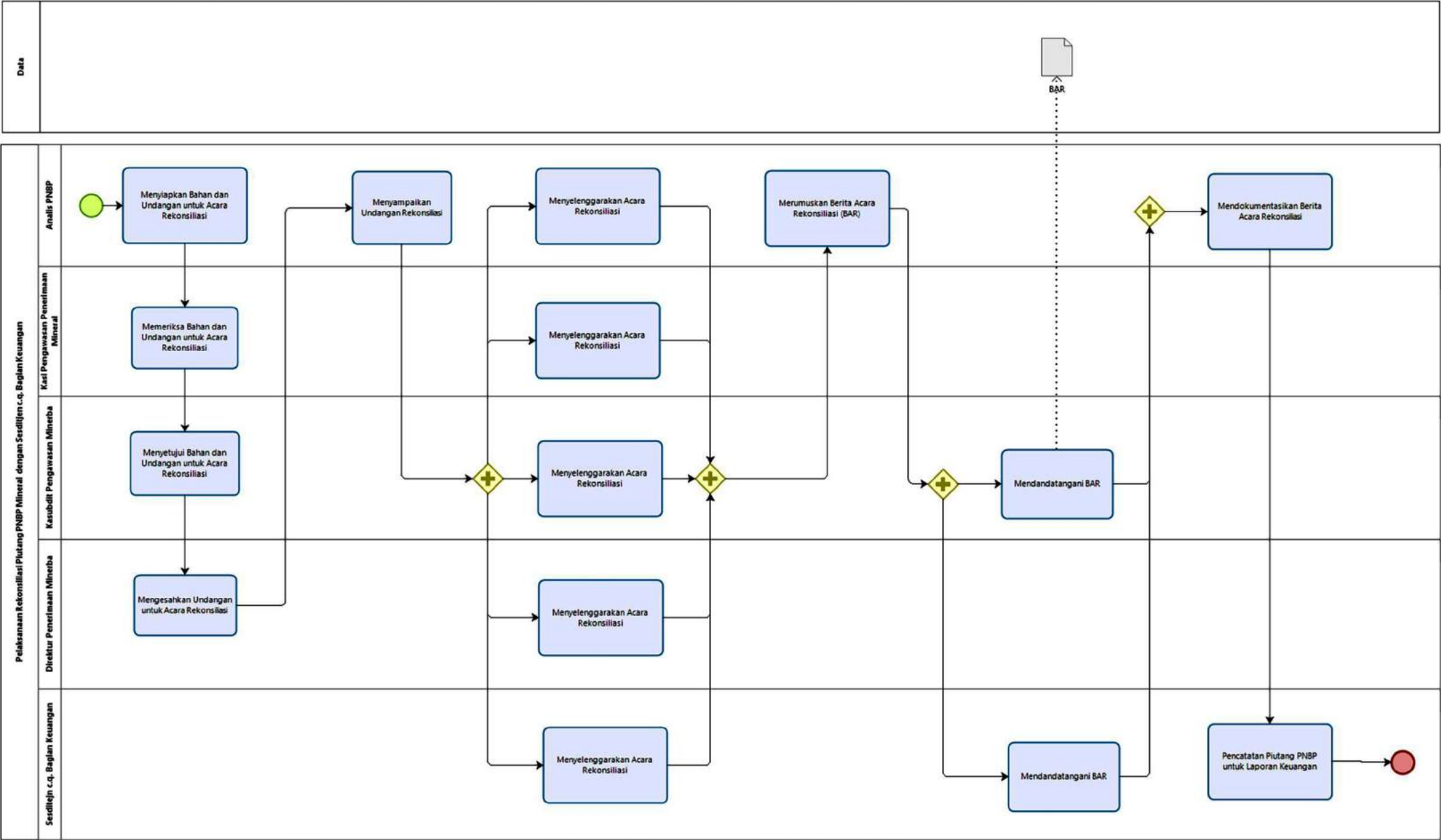
Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara



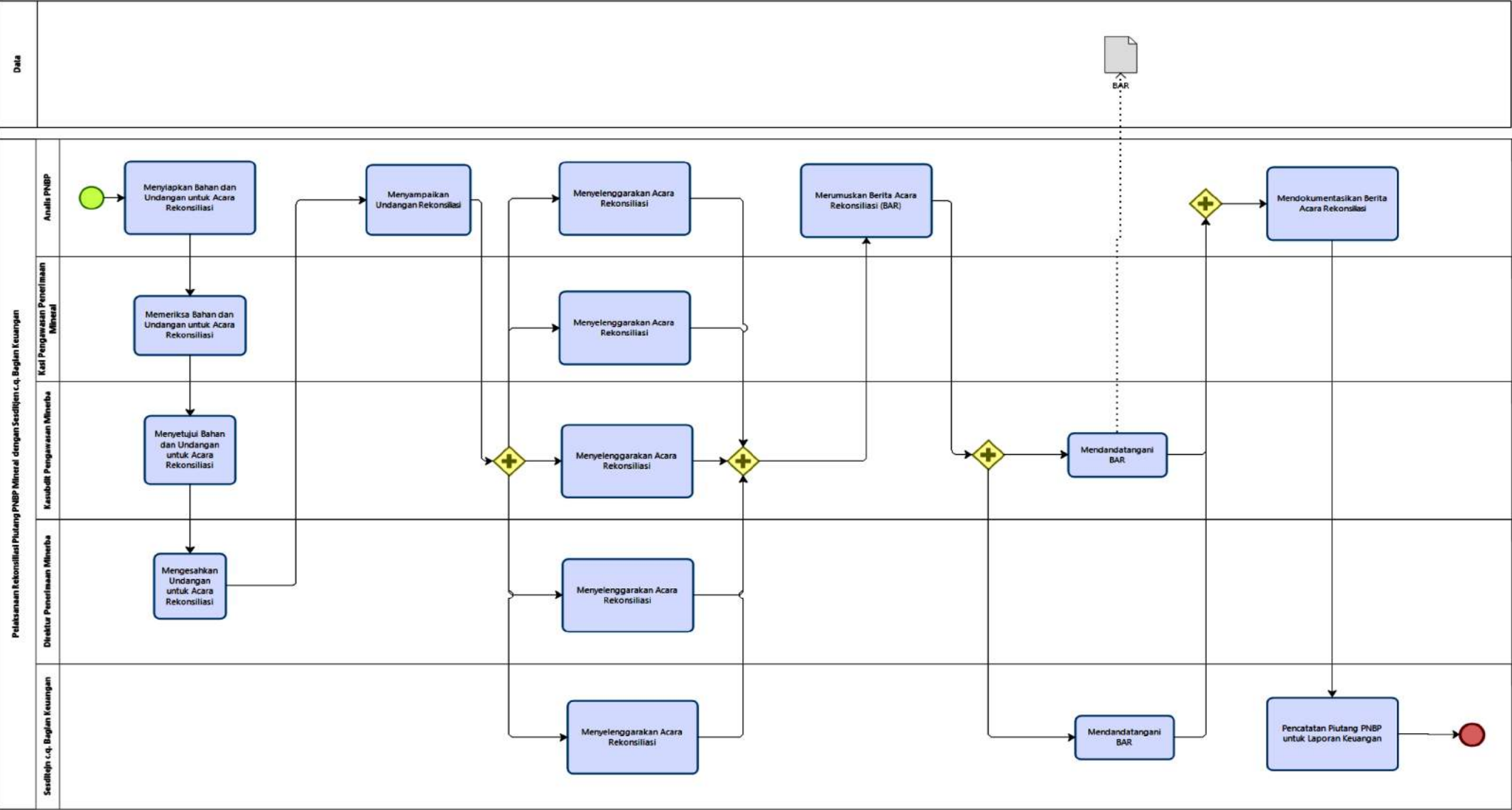
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral

Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral	 Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dengan Wajib Bayar  Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dengan Seditjen c.q. Bagian Keuangan  Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dengan Subdit Pelaksanaan Penerimaan
---	--

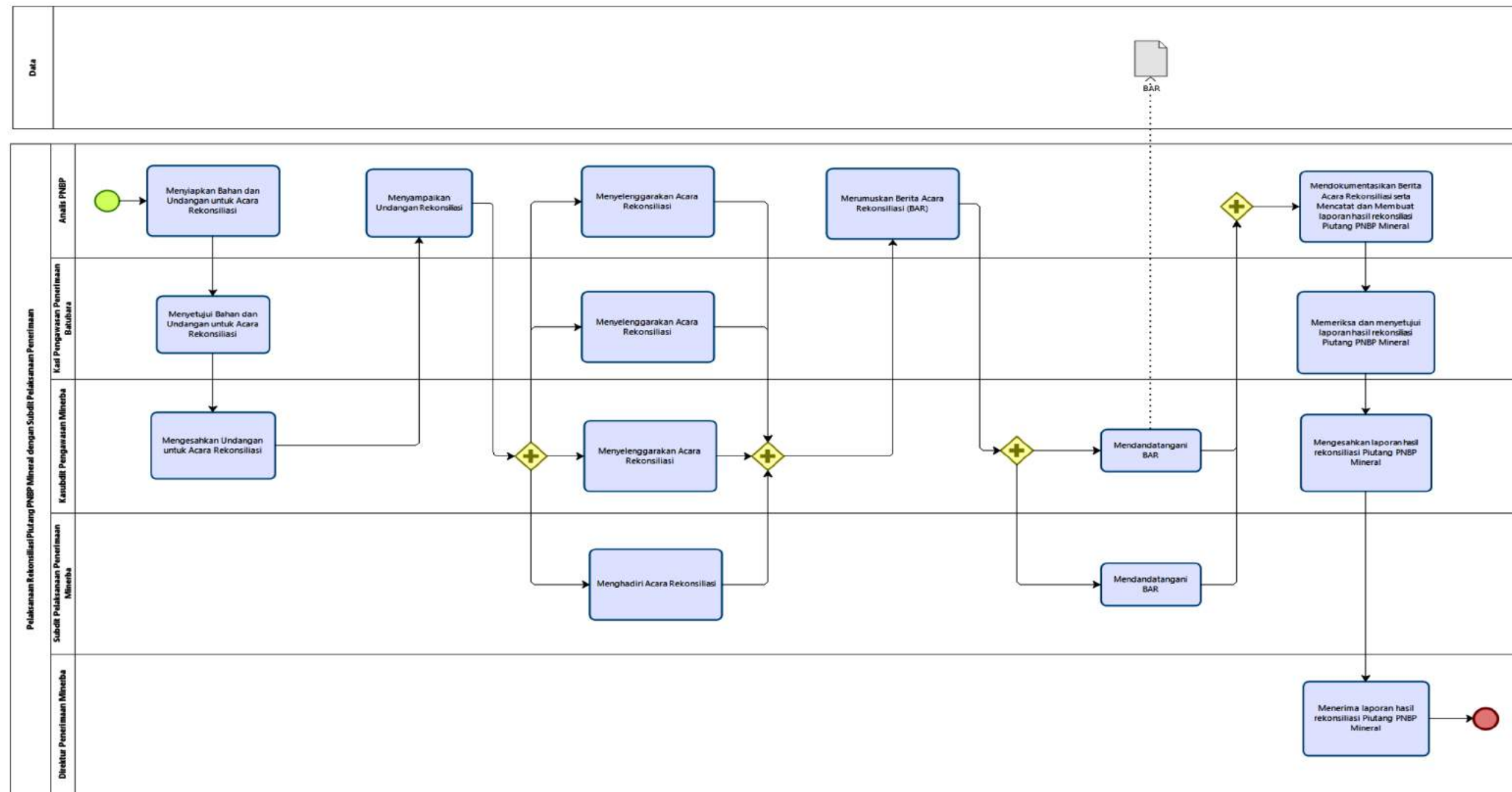
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral (Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dengan Wajib Bayar)



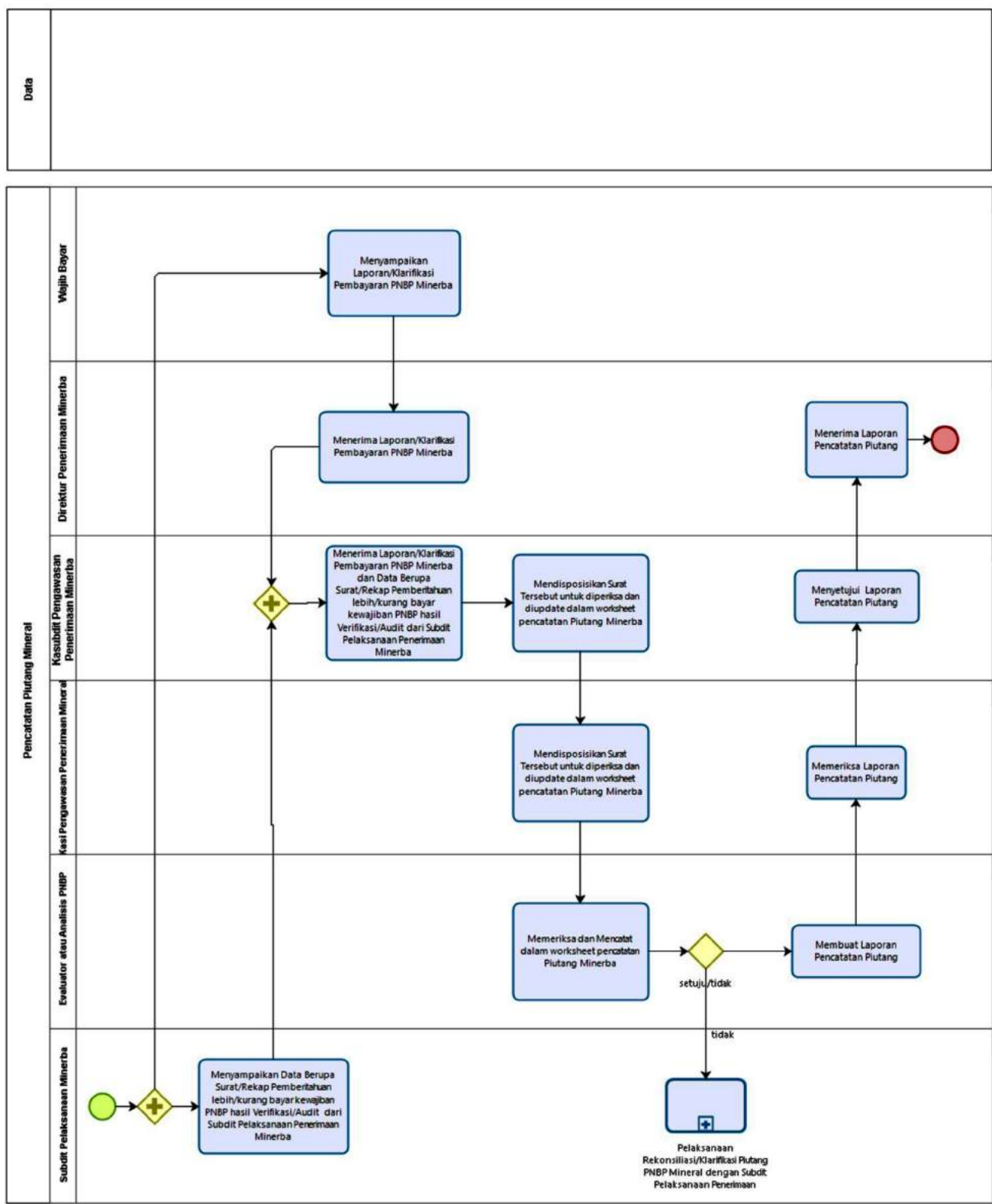
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral (Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dengan Sedtitjen c.q. Bagian Keuangan)



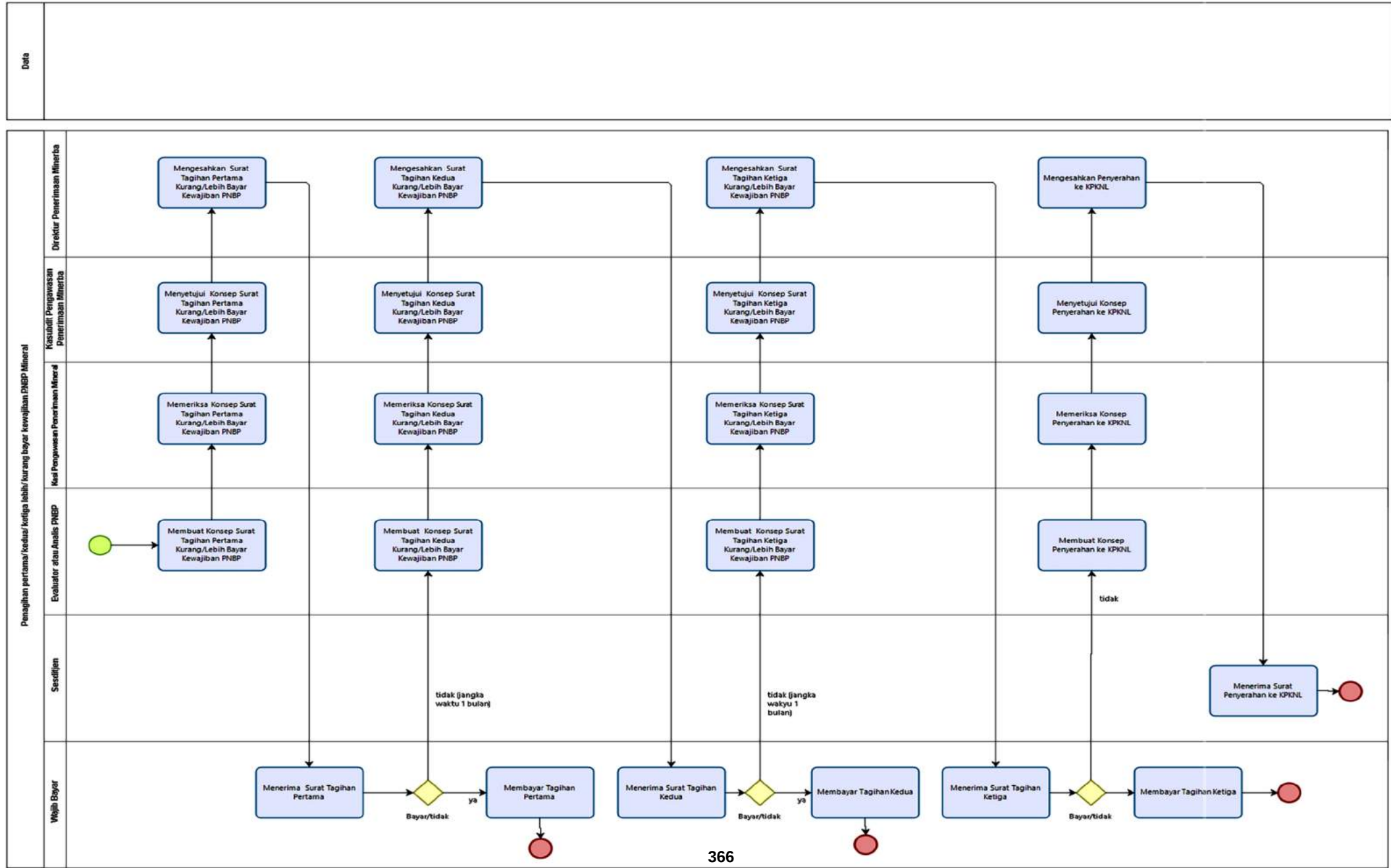
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral (Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNB Mineral dengan Subdit Pelaksanaan Penerimaan)



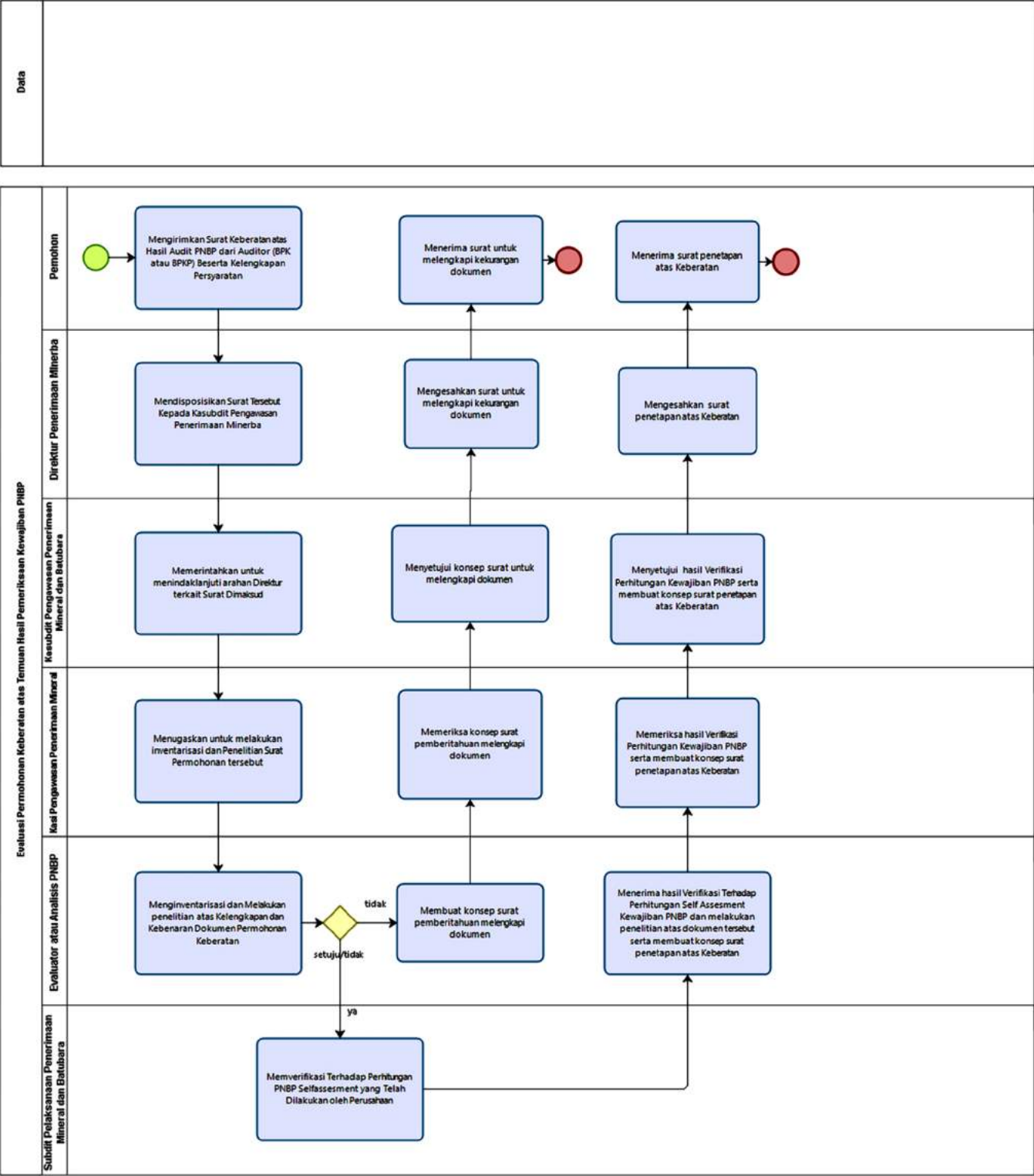
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Pencatatan Piutang Mineral



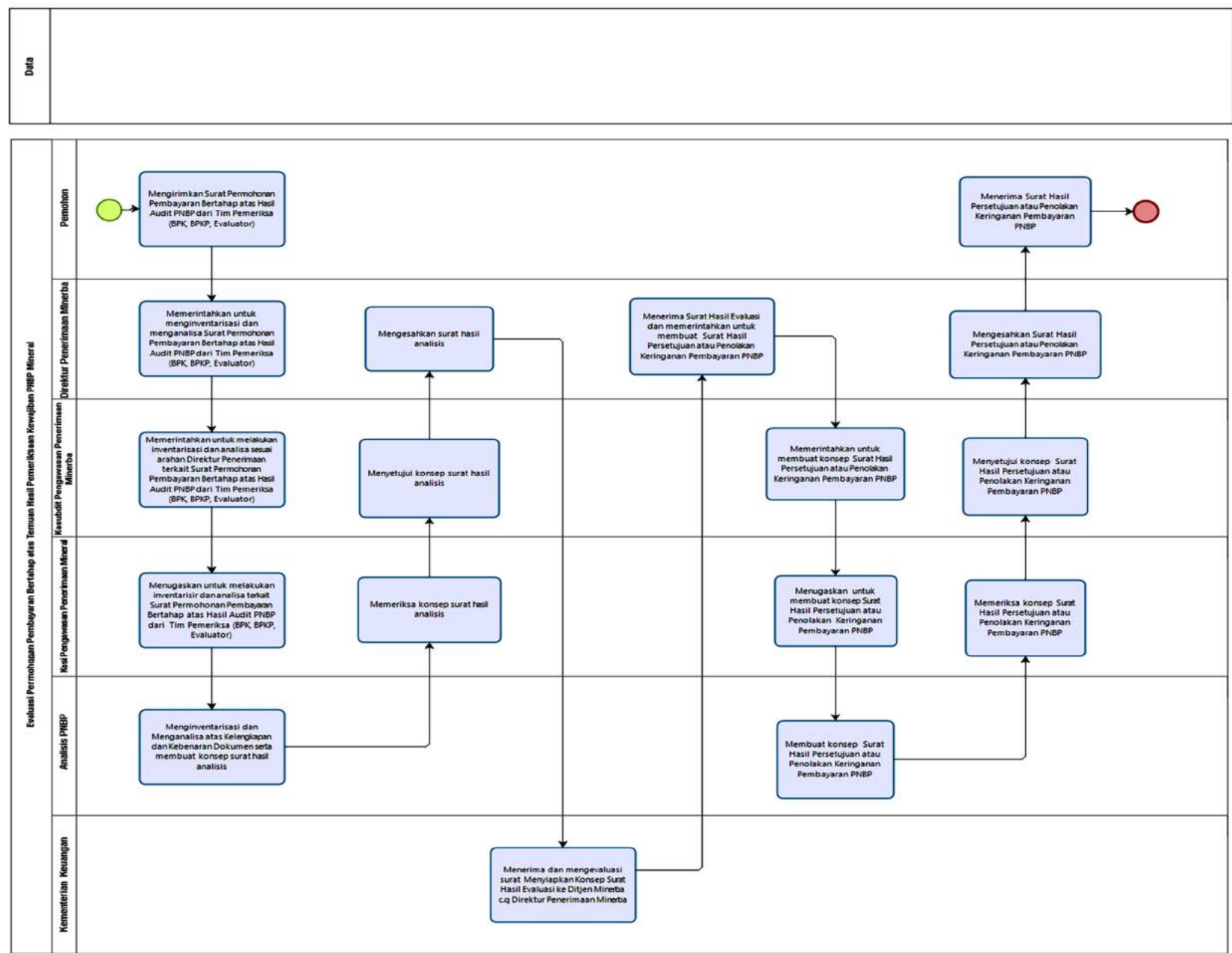
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Penagihan pertama/dua/tiga kurang/lebih bayar kewajiban PNBP Mineral dan Penyerahan ke KPKNL



Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Evaluasi Permohonan Keberatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Kewajiban PNPB Mineral



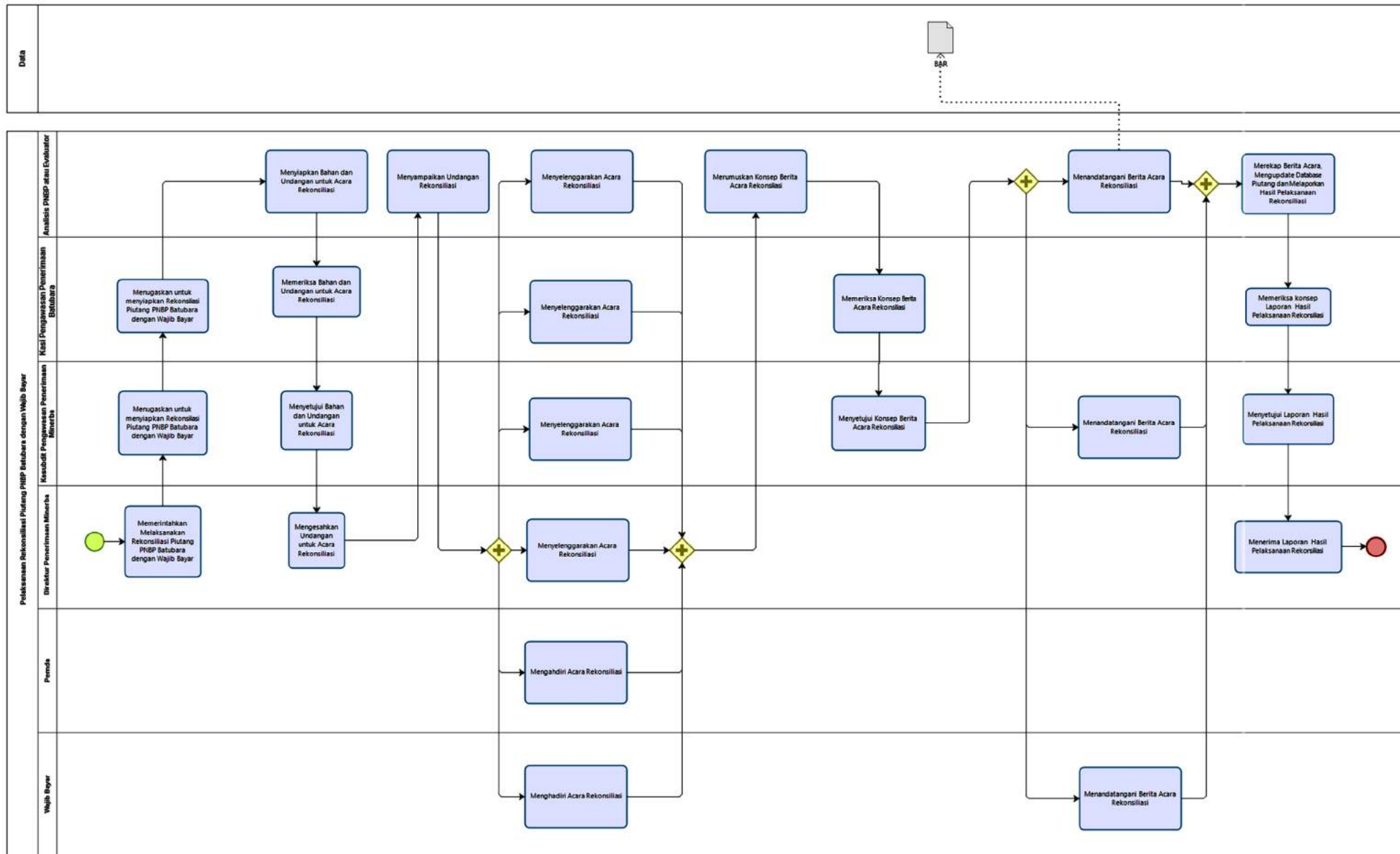
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral - Evaluasi Permohonan Keringanan Pembayaran atas Temuan Hasil Pemeriksaan Kewajiban PNPB Mineral



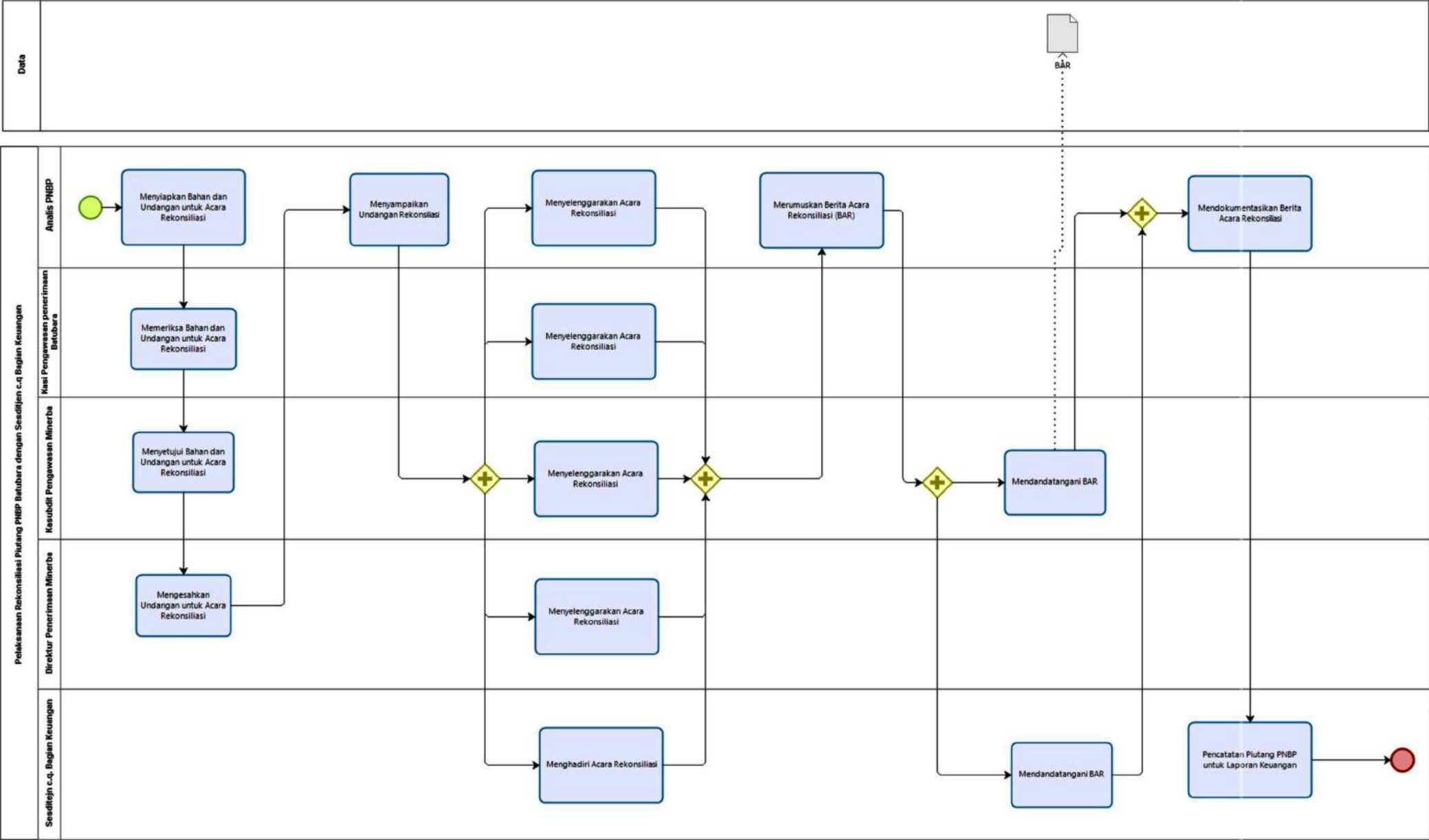
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara

Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara	 Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara dengan Wajib Bayar  Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara dengan Sedtitjen c.q. Bagian Keuangan  Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara dengan Subdit Pelaksanaan Penerimaan
---	---

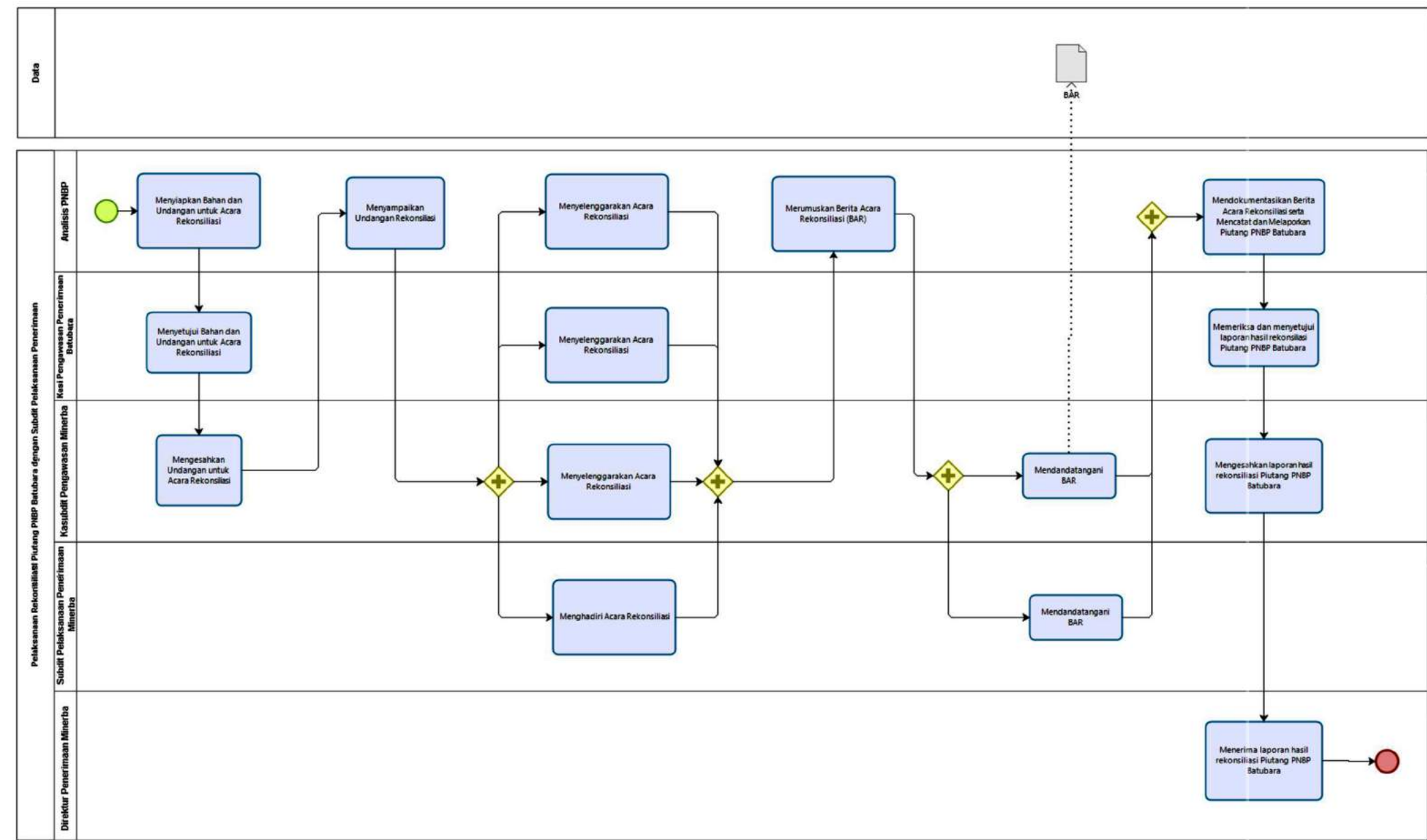
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBPN Batubara (Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBPN Batubara dengan Wajib Bayar)



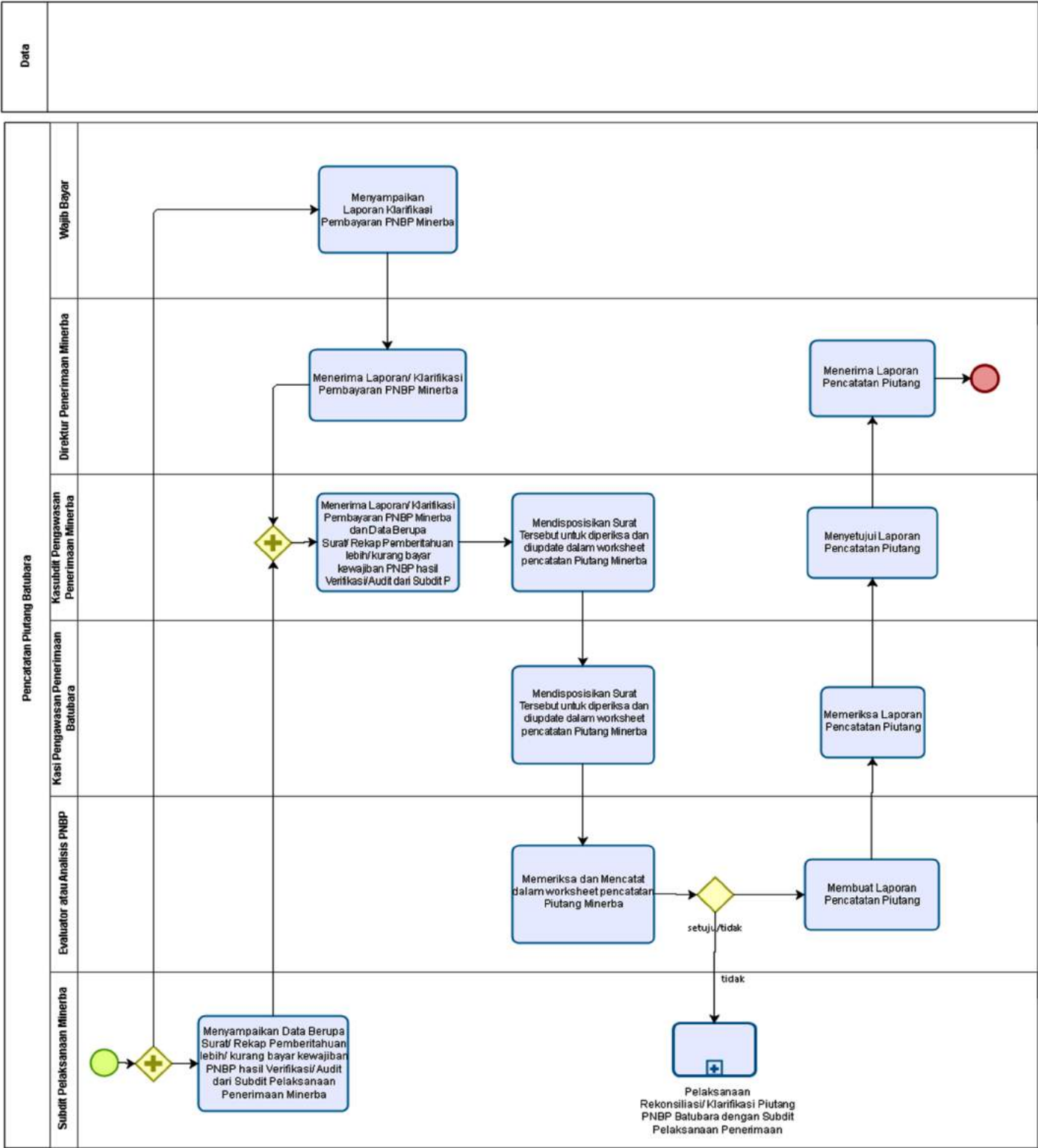
Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara (Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara dengan Seditjen c.q. Bagian Keuangan)



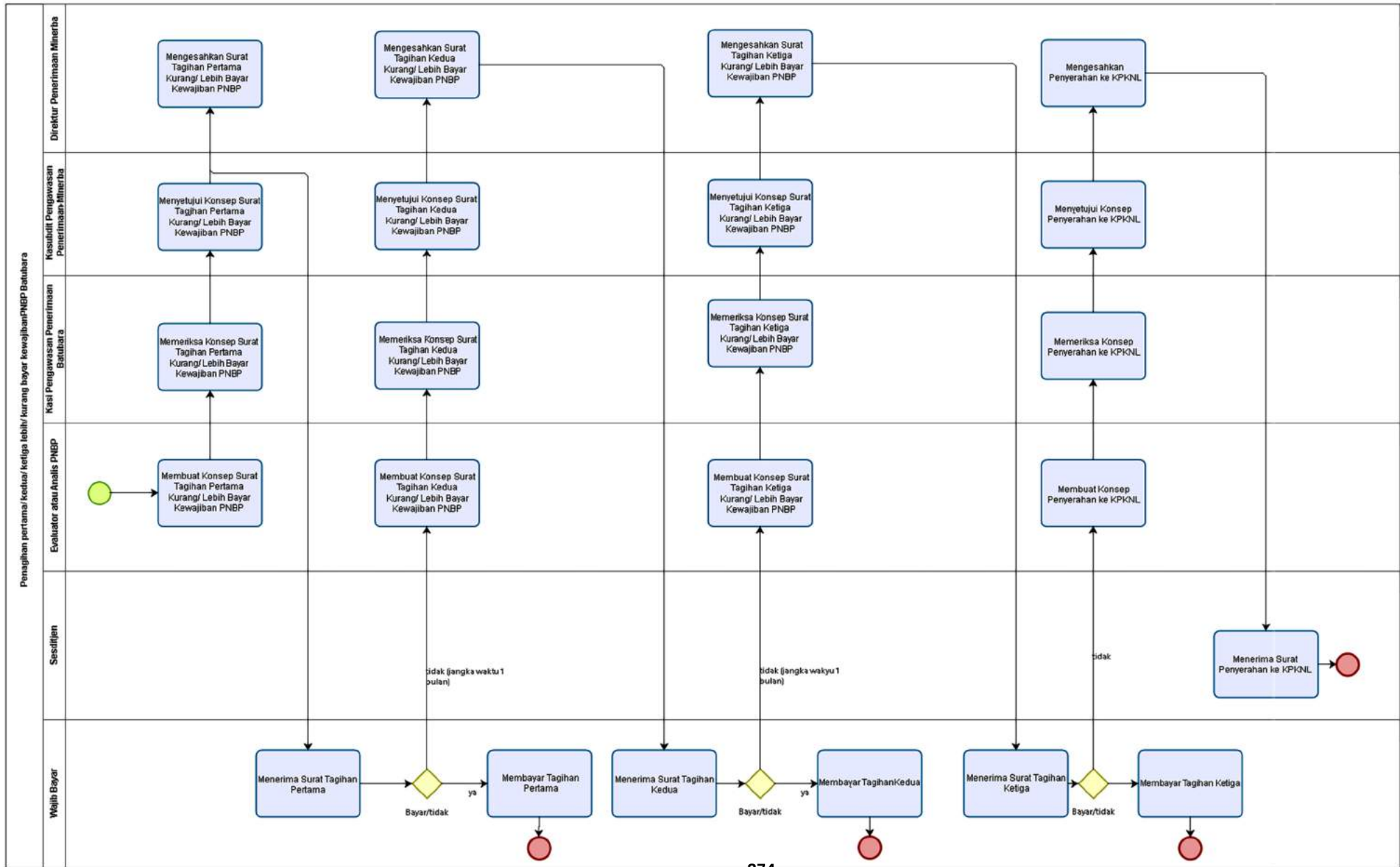
Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara - Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara (Pelaksanaan Rekonsiliasi Piutang PNBP Batubara dengan Subdit Pelaksanaan Penerimaan)



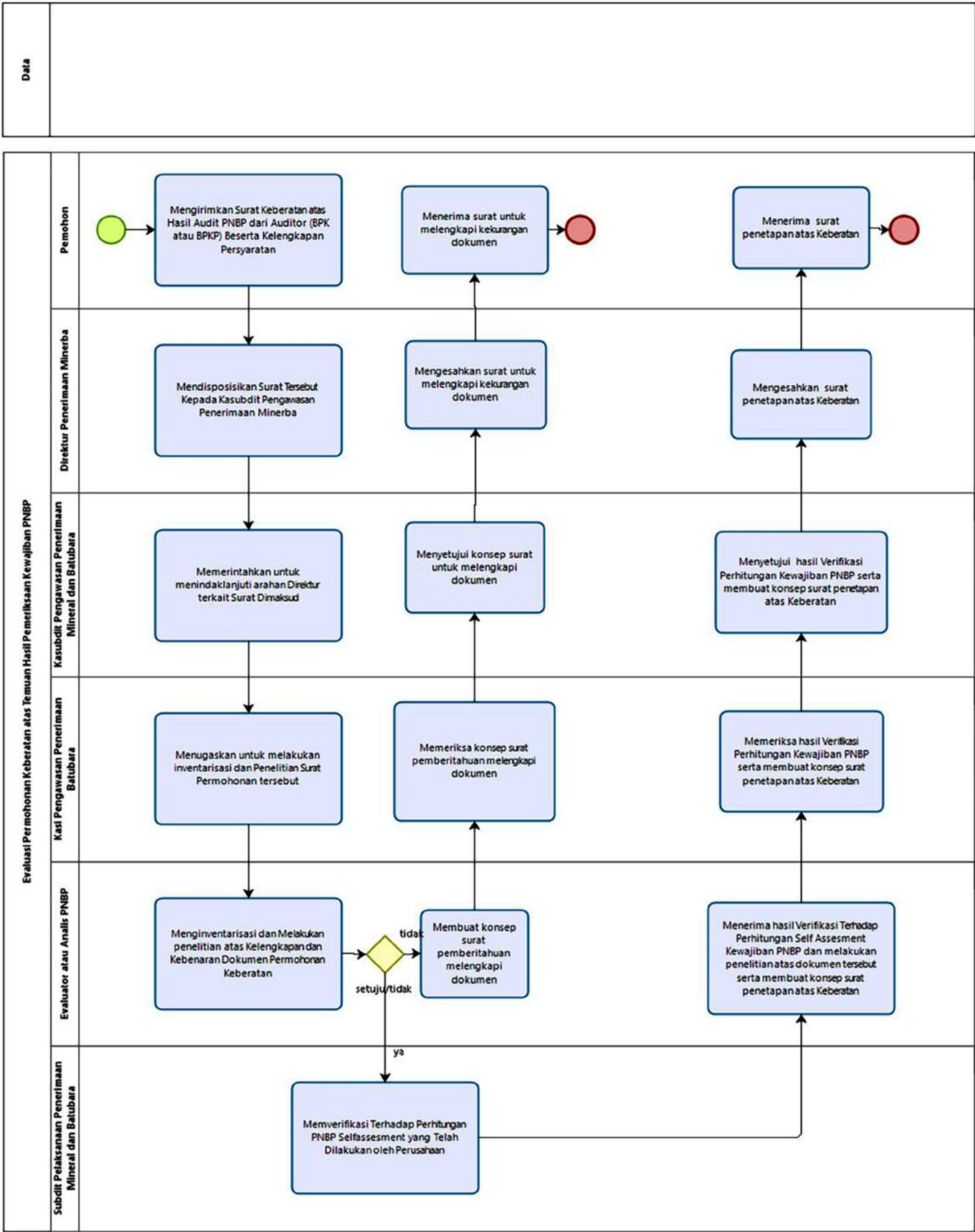
Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara - Pencatatan Piutang Batubara



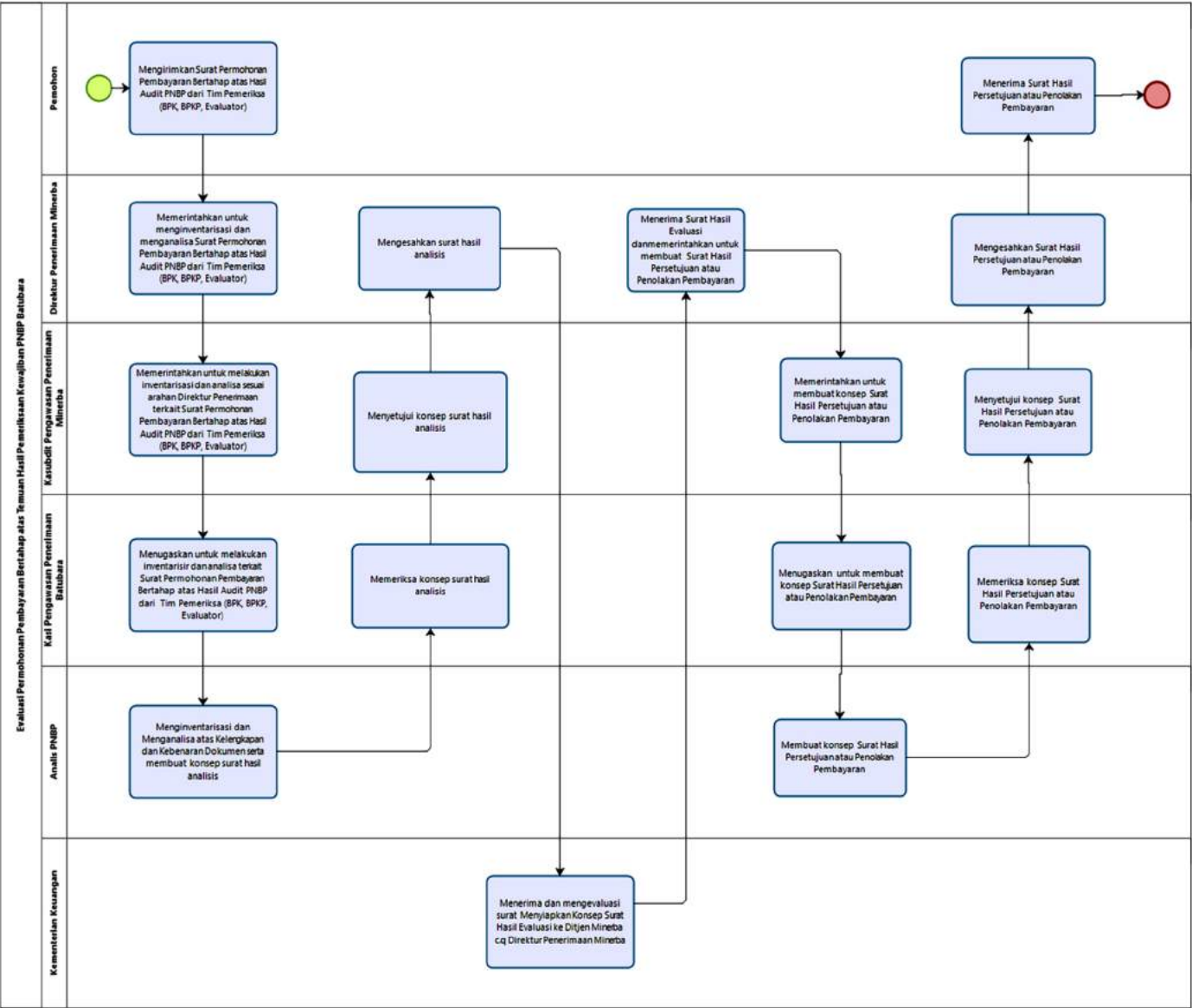
Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara - Penagihan pertama/kedua/ketiga kurang/lebih bayar kewajiban PNBP Batubara dan Penyerahan ke KPKNL



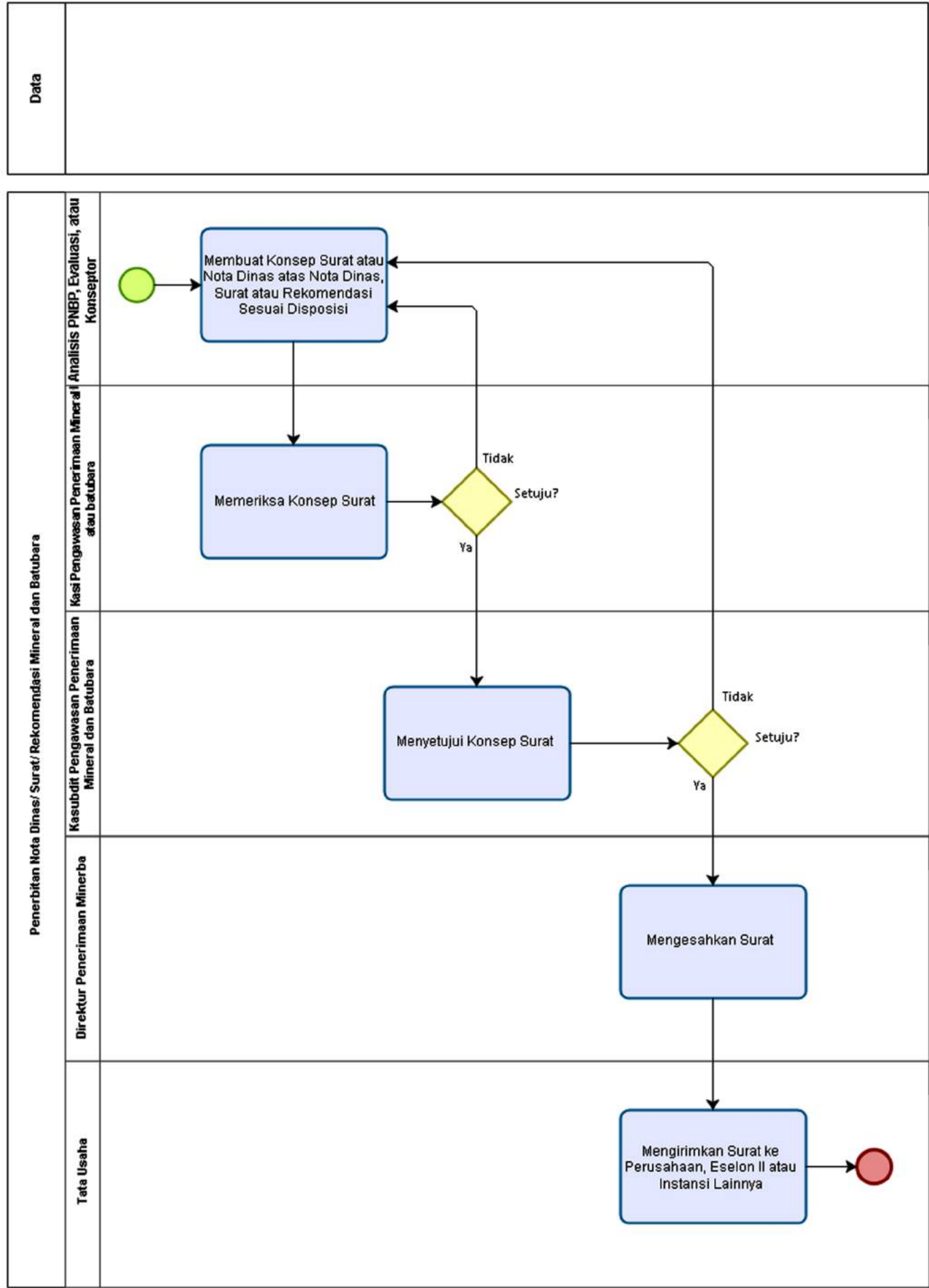
Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara - Evaluasi Permohonan Keberatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Kewajiban PNPB Batubara



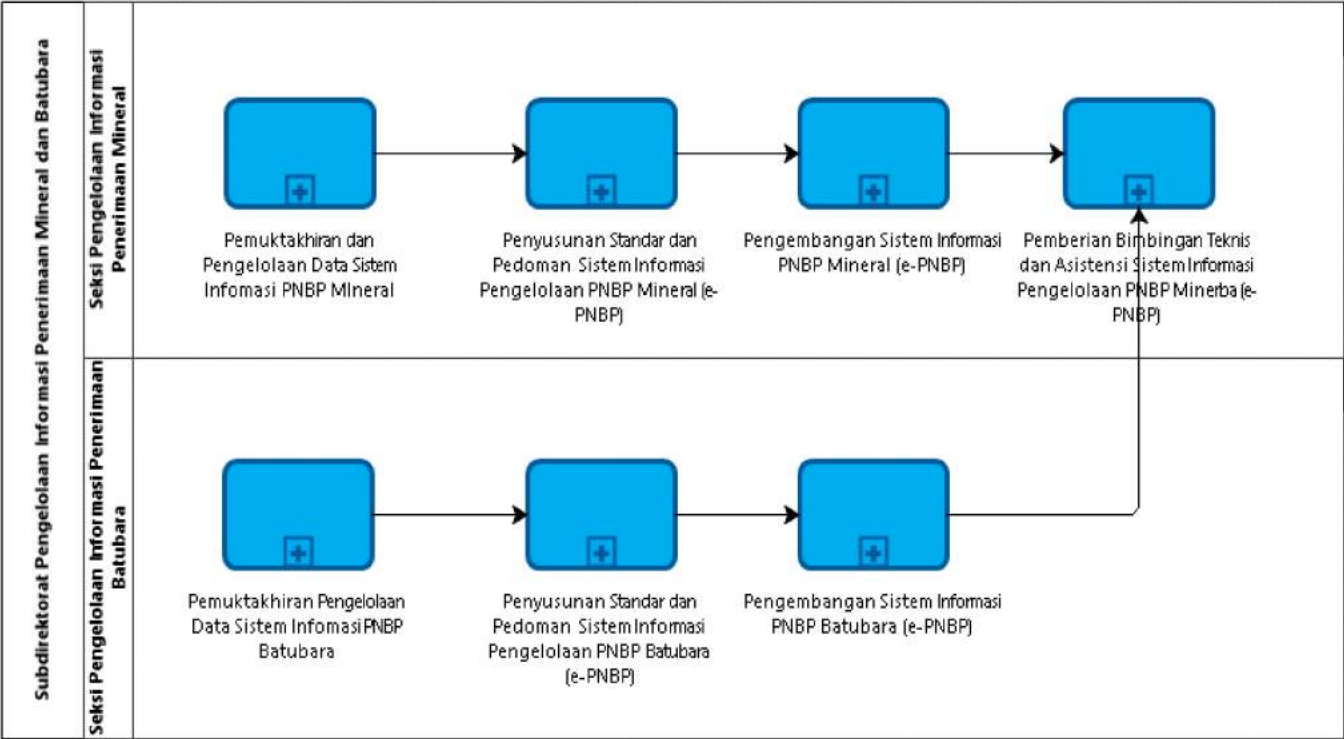
Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara - Evaluasi Permohonan Keringanan Pembayaran atas Temuan Hasil Pemeriksaan Kewajiban PNPB Batubara



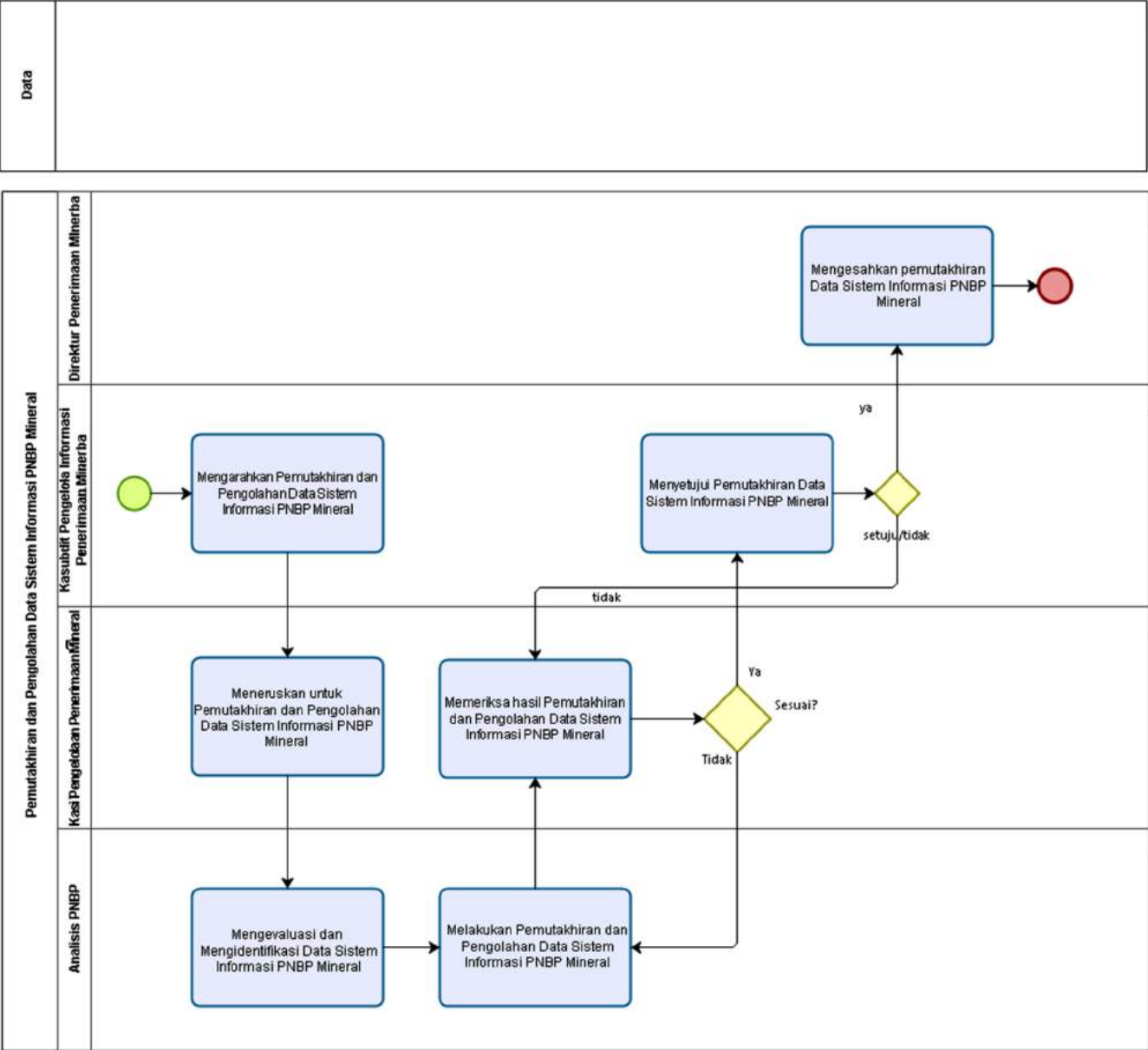
Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara - Penerbitan Nota Dinas/ Surat/ Rekomendasi Mineral dan Batubara



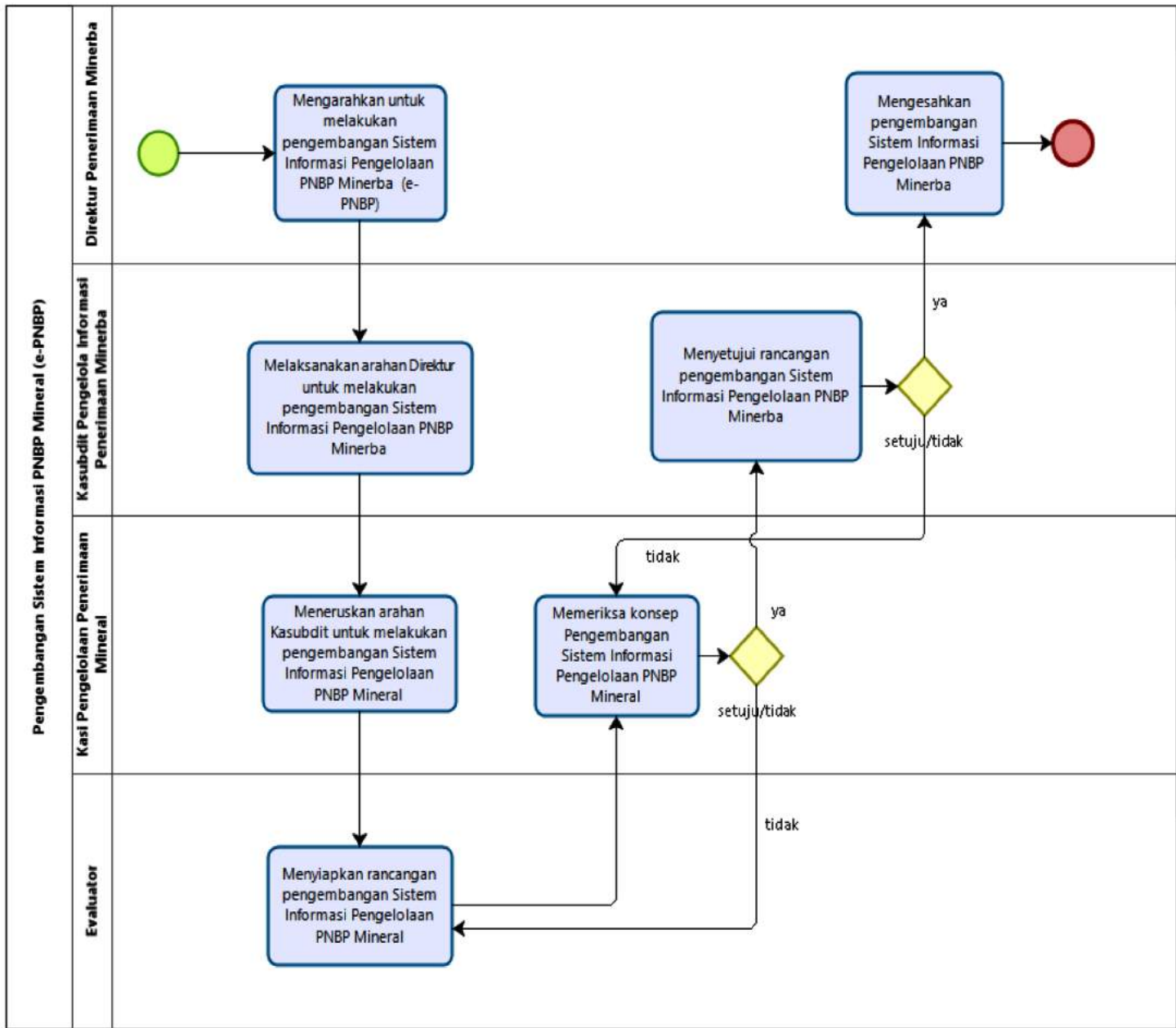
Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara



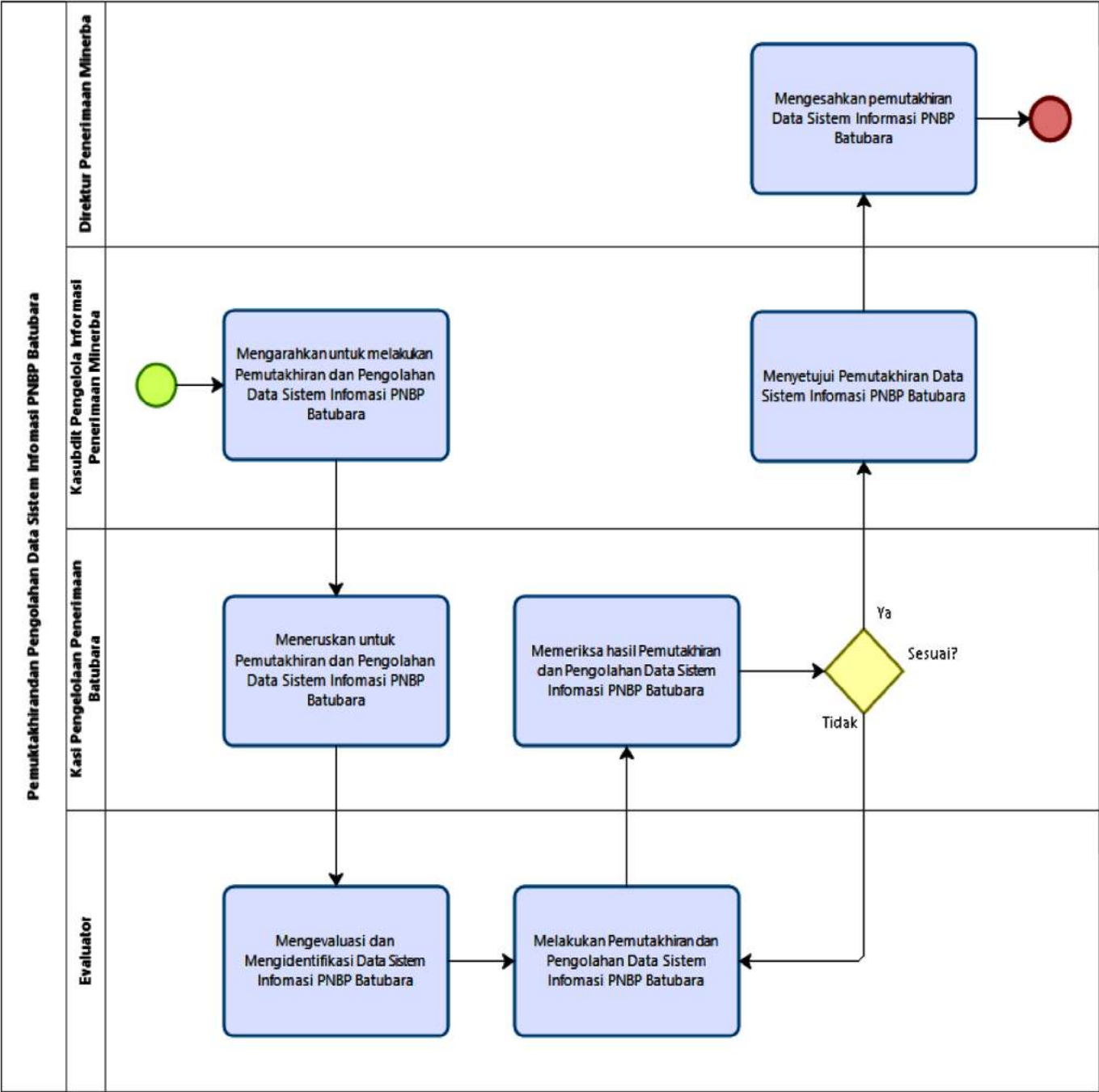
Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral - Pemuktakhiran dan Pengelolaan Data Sistem Infomasi PNBP Mineral



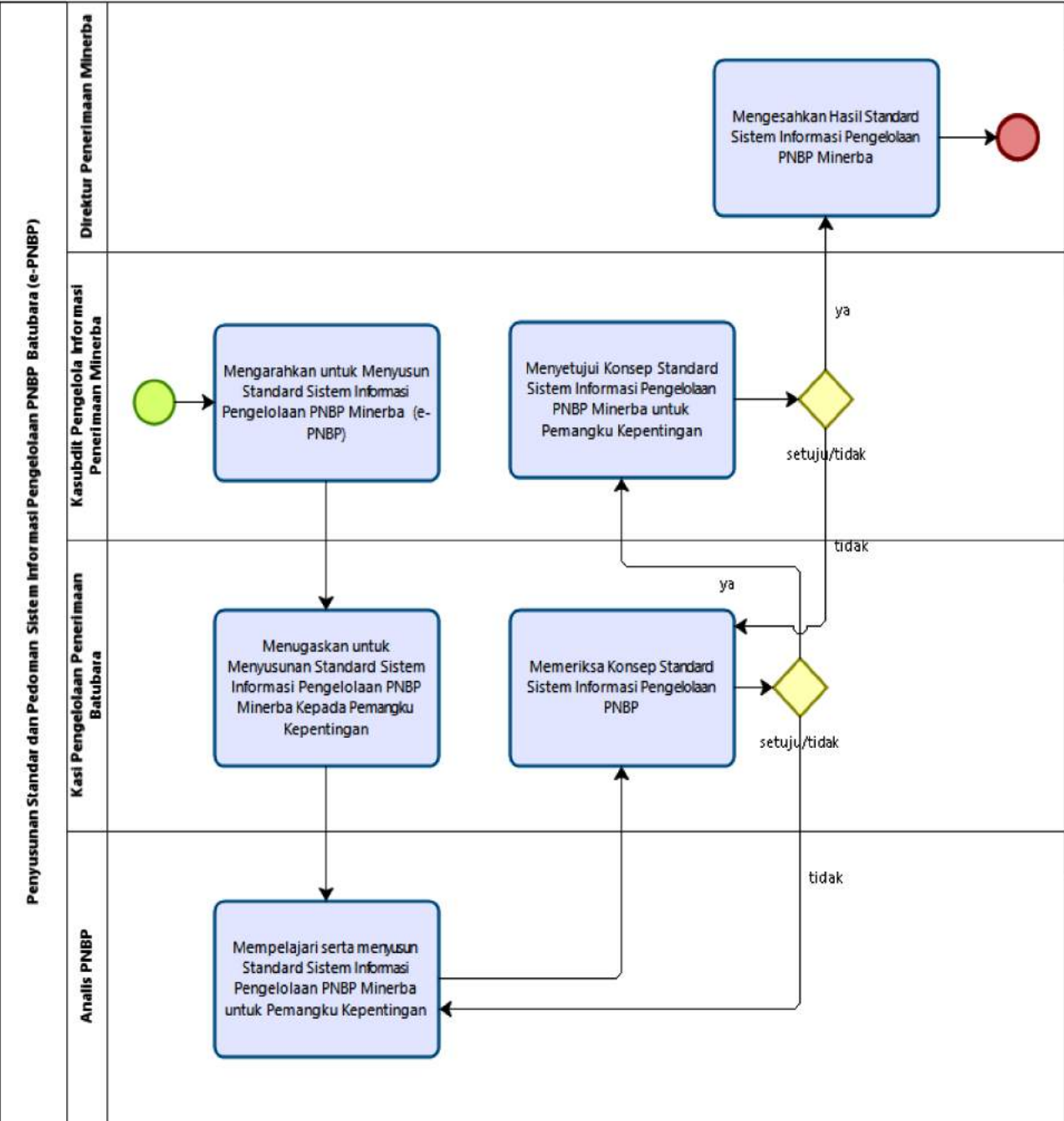
Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral - Pengembangan Sistem Informasi PNB Mineral (e-PNB)



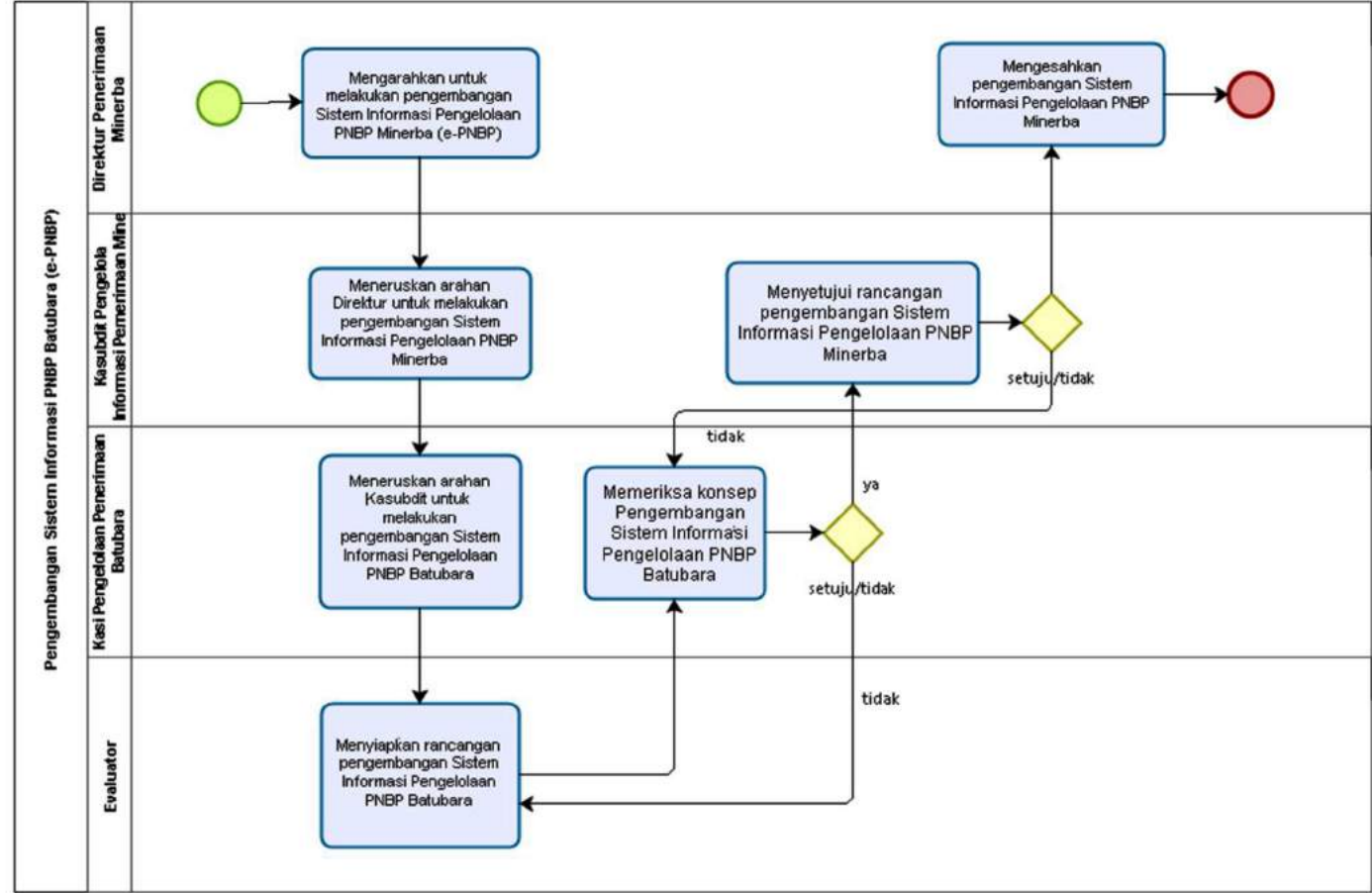
Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara - Pemuktakhiran Pengelolaan Data Sistem Infomasi PNBP Batubara



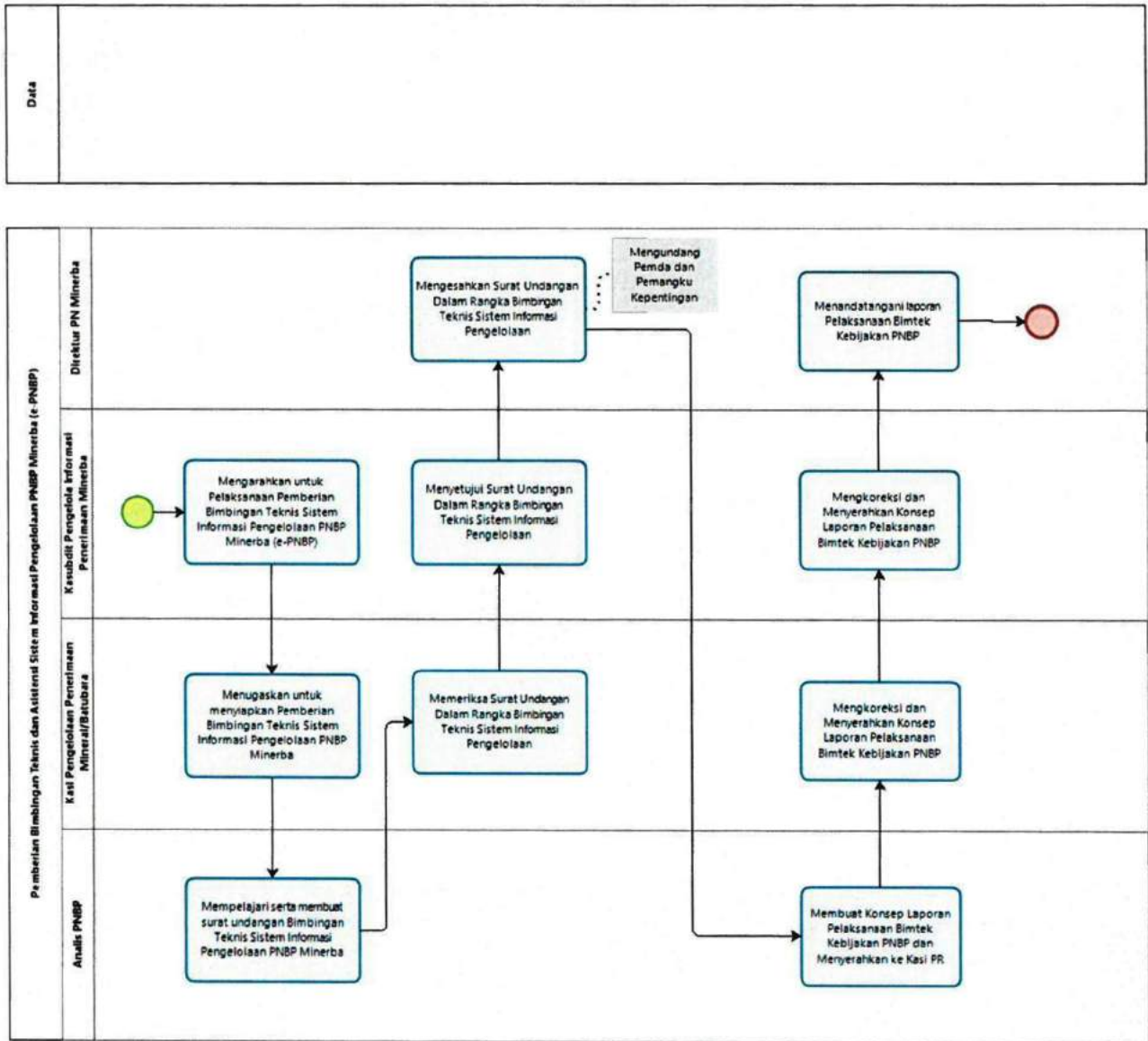
Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara - Penyusunan Standar dan Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan PNBP Batubara (e-PNBP)



Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara - Pengembangan Sistem Informasi PNBP Batubara (e-PNBP)



Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan/atau Batubara -
Pemberian Bimbingan Teknis dan Asistensi Sistem Informasi Pengelolaan PNBP
Minerba (e-PNBP)





DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
BAMBANG GATOT ARIYONO